Budhy Munawar-Rachman (Ed.)

MEMBELA KEBEBASAN BERAGAMA

Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme

(BUKU 2)

Pengantar:
Ihsan Ali-Fauzi
Samsu Rizal Panggabean
Trisno S. Sutanto

MEMBELA KEBEBASAN BERAGAMA

Percakapan tentang Sekularisme, LIberalisme, dan Pluralisme

(Buku 2)

Penyunting:
Budhy Munawar-Rachman

Penyunting Pelaksana:
Tantowi Anwari

Pengantar:
Ihsan Ali-Fauzi
Samsu Rizal Panggabean
Trisno S. Sutanto

Edisi Digital

Jakarta 2011

MEMBELA KEBEBASAN BERAGAMA
Percakapan tentang Sekularisme, LIberalisme, dan Pluralisme

Penyunting:
Budhy Munawar-Rachman

Penyunting Pelaksana:
Tantowi Anwari

Pewawancara:
Muhammad Akib, Didi Ahmadi, Saidiman, Moh. Syifa Amin, Widigdo, Iqbal Hasanuddin, Rifah Zainani, Moh. Hanifudin Mahfuds, Ahmad Mustopa, Moh. Shofan

Pengantar:
Ihsan Ali-Fauzi, Samsu Rizal Panggabean, dan Trisno S, Sutanto

Pewajah Sampul: mps creativa
Foto Isi: Khoemini

Edisi Digital

Diterbitkan oleh:
Democracy Project
Yayasan Abad Demokrasi
www.abad-demokrasi.com

Layout dan Redesain cover: Aryo Ceria
Redaksi: Anick HT

Daftar Isi

Membela Kebebasan Beragama

Percakapan tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme

(Buku 2)

Percakapan dengan

F. Budi Hardiman

F. Budi Hardiman, pengajar di STF Driyarkara dan Universitas Pelita Harapan, Jakarta. Ia memperoleh gelar Magister Atrium dan Doktor der Philoshopie dari Hochschule für Philosophie, München, Jerman.

Pemisahan antara agama dan politik dalam sekularisasi berkait erat dengan pemisahan antara ruang privat dan publik dalam liberalisme, yang menjunjung tinggi kebebasan individu, kebebasan politik dalam partisipasi demokratis, kesamaan antarmanusia, dan pluralisme. Dalam konteks pluralisme, liberalisme dikaitkan dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menganut bentuk-bentuk kehidupan tertentu. Liberalisme pun menegaskan: setiap pengambilan kebijakan publik harus dipisahkan antara problem-problem yang menyangkut publik secara luas (tanpa membedakan agama, etnisitas, dan orientasi politik) dengan bentuk-bentuk kehidupan spesifik. Itulah yang disebut sebagai *the problem of justice*. Maka, model ideal yang lebih tepat untuk Indonesia adalah masyarakat demokratis, pluralistik, dan multikultural yang diwadahi oleh budaya Islam yang moderat, liberal, dan toleran.

Sekularisme terlahir dengan sejarah yang berdarah-darah. Namun demikian, di samping ia memberikan jalan untuk terciptanya kemajuan, baik di bidang pengetahuan maupun politik dan hal-hal positif lainnya, di berbagai tempat dan oleh banyak kalangan ia juga ditolak dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah penolakan atau lebih tepatnya kekhawatiran dari kalangan agamawan bahwa pada akhirnya sekularisme hanya akan menimbulkan sikap antiagama. Untuk menjembatani tarik menarik isu seputar sekularisme itu, beberapa kalangan membuat distingsi signifikan antara sekularisme sebagai sebuah ideologi dan sekularisasi sebagai proses. Bagaimana Anda mengomentari hal itu?

Menurut hemat saya, sekularisasi itu berbeda dengan sekularisme. Sekularisme merupakan suatu ideologi yang berkembang sebagai akibat dari sekularisasi. Sebagai suatu proses, yaitu lepasnya simbol-simbol religius dari praktik-praktik dan institusi-institusi politik, sekularisasi mengacu pada sebuah proses sosiologis yang berkaitan dengan modernisasi. Namun sikap eksesif dari sekularisasi menimbulkan suatu anggapan bahwa segala sesuatu yang mempunyai kaitan dengan agama akan langsung dikaitkan dengan absolutisme agama Abad Pertengahan di Eropa. Berbeda dari sekularisasi, sekularisme bukanlah sebuah proses sosiologis, melainkan sebuah ideologi, yaitu suatu bentuk pandangan sempit yang beranggapan bahwa hanya proses-proses dalam kehidupan material yang ada di dunia kita inilah yang riil, sementara dimensi transendental, dimensi-dimensi yang bersifat adi-kodrati dalam hidup manusia dianggap sebagai bukan bagian dari realitas yang bisa diterima. Dalam arti ini, sekularisme dapat mendorong baik kepada tendensi-tendensi yang bersifat ateistik maupun yang bersifat deistik. Keduanya, baik ateisme maupun deisme, memusatkan

diri pada kehidupan material di dunia ini – entah dengan cara menolak adanya dunia transendental, dalam kasus ateisme; ataupun menganggap bahwa dimensi transendental, dalam hal ini adalah Tuhan, tidak berperan langsung di dalam sejarah sebagaimana dimengerti oleh deisme. Pengertian inilah yang berkembang dalam sejarah Eropa sejak abad ke-18, baik di Inggris (deisme) maupun Prancis (ateisme dan materialisme).

Kata sekularisme itu sendiri adalah 'tipe ideal' (dalam pengertian Max Weber) untuk suatu bentuk pemikiran. Saya katakan tipe ideal karena kita, dalam konteks itu, mencoba mengidealkan suatu sikap. Meski demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa bentuk ideal itu akan dipraktikkan secara sama di berbagai negara. Lebih daripada itu, dalam kenyataannya tidak ada seorang manusiapun yang sangat sekularistis. Kalau bisa ditemukan orang yang seperti itu, maka dia adalah orang yang berpandangan sangat sempit sedemikian rupa sehingga hanya mengakui keberadaan atau eksistensi dunia ini seraya menolak dimensi transendental. Adakah orang seperti itu? Kita tak tahu isi hati orang. Andaikan orang seperti itu ada, tentulah dia begitu tidak peduli dengan 'hati'-nya sebab 'hati' ini berciri transendental. Jadi, kita tidak dapat memastikan soal ini dari luar. Jika kita bicara tentang sekularisme, acuan kita bukan pada pergumulan eksistensial itu, melainkan pada politik. Kita

Sekularisme merupakan suatu ideologi yang berkembang sebagai akibat dari sekularisasi. Sebagai suatu proses, yaitu lepasnya simbol-simbol religius dari praktik-praktik dan institusi-institusi politik, sekularisasi mengacu pada sebuah proses sosiologis yang berkaitan dengan modernisasi.

harus membatasi percakapan kita pada politik, yakni kehidupan bersama di dalam Negara.

Bentuk konkret dari institusi sekularisme adalah pemisahan sama sekali, bahkan penyingkiran, dimensi religius dari kehidupan sehari-hari sedemikian rupa sehingga ada sikap permusuhan dengan agama atau segala yang berbau religius. Praktik seperti pelarangan pemakaian jilbab di Prancis, negara yang sejak awal masa Pencerahan abad ke-18 dikenal memiliki tendensi ateistik dan materialistis yang cukup kuat dalam proses sekularisasinya, adalah wujud dari politik sekularistis dan bukan sekedar sekular.

Pembedaan antara ruang publik dan ruang privat dalam sekularisme apakah sama atau tidak dengan pembedaan antara the problem of justice *sebagai wilayah negara* an sich *dan* the problem of good life *sebagai wilayah individu atau agama. Apakah keduanya tidak boleh saling campur tangan, sehingga harus selalu dipisahkan?*

Pertama-tama kita harus membedakan antara sekularisme dan liberalisme juga pluralisme, meskipun ketiga hal tersebut saling berkorelasi satu sama lain. Dalam sejarah perkembangannya, kalau kita bisa petakan, yang disebut liberalisme itu setua zaman modern atau modernisasi itu sendiri. Liberalisme adalah ideologi modern *par-excellence*. Gagasan ini memiliki bermacam-macam sikap dalam ekspresinya. Prinsipnya adalah menjunjung tinggi kebebasan individu, kebebasan politik dalam partisipasi demokratis, kesamaan antarmanusia, dan pluralisme. Dalam konteks pluralisme itu, liberalisme dikaitkan juga dengan kebebasan dalam berekspresi dan kebebasan untuk menganut bentuk-bentuk kehidupan (*form of life*)

tertentu. Oleh karena itu, yang sentral dalam liberalisme adalah pemisahan antara ruang publik dan ruang privat.

Mengapa demikian? Karena berabad-abad totalitarianisme agama di Abad Pertengahan Eropa telah dilihat sebagai tidak adanya pemisahan antara ruang publik dan ruang privat. Otoritas politis, pada masa itu, menganggap dirinya memiliki kewenangan untuk mengarahkan sikap-sikap individual dalam nilai-nilai yang sangat personal, seperti agama, etika dan sebagainya. Akibatnya kekuasaan negara menjadi berlebihan. Ditambah lagi Eropa di awal jaman modern telah mengalami perang agama antara Katolik dan Protestan selama tiga dasawarsa. Salah satu hikmah dari perang agama yang kemudian ditarik oleh liberalisme adalah asas netralitas politik dari pandangan-pandangan hidup spesifik keagamaan. Di dalam perang agama ada klaim-klaim kemutlakan dari masing-masing agama yang saling berbenturan dan ingin memaksakan kalim-klaim itu kepada penganut agama lain. Hal itu menurut liberalisme hanya bisa diatasi dengan pemisahan antara ruang publik dan ruang privat. Pemisahan kedua hal itu sendiri, berbeda dengan pemisahan antara agama dan politik dalam sekularisasi, meskipun keduanya saling berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, liberalisme mengandaikan sekularisasi karena masyarakat dan negara dipisahkan seperti juga negara dan agama.

Yang disebut *the problem of justice* dan *the problem of good life* itu berasal dari diskursus etika politik abad ke-20 antara golongan liberalisme dan komunitarianisme, sebagaimana terjadi antara Michael Sandel, Alasdair McIntyre dan Charles Taylor di satu pihak dan John Rawls di lain pihak. Buku Sandel *Liberalism and the Limit of Justice* dan buku Ralws *A Theory of Justice* sangat sentral dalam diskusi itu. Diskusi itu sendiri, sejatinya, lebih matang dan progre-

sif daripada liberalisme klasik. Duduk perkaranya adalah bagaimana kita, dalam masyarakat modern yang sangat kompleks, dengan macam-macam bentuk kehidupan dan orientasi nilai di dalamnya, tetap bisa memiliki kehidupan bersama secara politis yang damai dan saling mengerti satu sama lain. Kaum komunitarian mengedepankan kembali peranan nilai-nilai yang berakar pada komunitas konkret dan menolak konsep abstrak liberalisme tentang individu. Kontroversi ini di Jerman direspons oleh Jürgen Habermas yang mencoba mencari 'jalan tengah' lewat teori diskursus negara hukum demokratis dalam bukunya yang berjudul *Faktizität und Geltung* (terjemahan Inggris *Between Fact and Norm*).

Liberalisme abad ke-20 mencapai suatu sikap bahwa dalam pengambilan kebijakan-kebijakan publik harus dipisahkan antara problem-problem yang menyangkut publik secara luas tanpa membeda-bedakan agama, etnisitas atau orientasi politis dan problem-problem yang menyangkut bentuk-bentuk kehidupan spesifik. Yang pertama itu kurang lebih berciri kosmopolitan dan bersangkutan dengan hukum dan keadilan. Itulah yang disebut sebagai *the problem of justice*. Cirinya adalah abstrak, tidak terkait langsung pada bentuk-bentuk kehidupan komuniter seperti agama, suku, dan organisasi dengan basis nilai-nilai tertentu. Yang menjadi sentral di sini adalah paham hak asasi manusia (HAM).

Sementara itu yang disebut *the problem of good life* adalah segala macam bentuk persoalan yang terkait dengan gambaran-gambaran dunia spesifik atau jalan hidup spesifik, misalnya tentang keselamatan hidup (apakah eksistensiku di dunia ini akan selamat atau tidak), tentang kebahagiaan, tentang karakter, dan keutamaan-keutamaan yang berhubungan dengan gaya hidup yang sangat khusus di dalam sebuah masyarakat. Problem ini berciri partikularistik,

berkait dengan komunitas-komunitas tertentu entah agama, etnik, maupun organisasi-organisasi dengan basis nilai tertentu. Kelompok-kelompok yang beragam dalam masyarakat lebih sulit mencapai saling pengertian mengenai *good life* ini daripada mengenai *justice*. Karena itu negara liberal secara normatif membatasi dirinya pada *the problem of justice*. Kelompok-kelompok dari berbagai orientasi nilai religius, etnis, politis dan seterusnya. mesti sepakat tentang infrastruktur dan manajemen politik yang dapat mewujudkan keadilan sebagai *fairness* dalam masyarakat majemuk itu. Namun mereka tidak perlu mencari kesepakatan mengenai jalan keselamatan yang secara spesifik ditawarkan secara berbeda-beda oleh agama yang berbeda-beda. Kita bahkan boleh membayangkan penerimaan semacam pasar bebas penyebaran agama sebagai konsekuensi sikap liberal, sejauh misi pentobatan itu menjauhkan diri dari paksaan, manipulasi dan kekerasan. Negara bertindak hanya jika ada kebebasan individu atau kelompok yang dilukai atau jika ada masalah keadilan.

Kata sekularisme itu sendiri adalah 'tipe ideal' (dalam pengertian Max Weber) untuk suatu bentuk pemikiran. Saya katakan tipe ideal karena kita, dalam konteks itu, mencoba mengidealkan suatu sikap. Meski demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa bentuk ideal itu akan dipraktikkan secara sama di berbagai negara. Lebih daripada itu, dalam kenyataannya tidak ada seorang manusiapun yang sangat sekularistis. Kalau bisa ditemukan orang yang seperti itu, maka dia adalah orang yang berpandangan sangat sempit sedemikian rupa sehingga hanya mengakui keberadaan atau eksistensi dunia ini seraya menolak dimensi transendental.

Sekarang marilah kita lihat masyarakat kita yang sangat majemuk. Di situ ada begitu banyak gaya hidup dan orientasi nilai. Sebut saja orang-orang kebatinan, komunitas Muslim, komunitas Kristiani dengan berbagai macam aliran dan praktik di dalamnya, yang masing-masing mempunyai cara berpikir spesifik, dan kelompok berambut *punk* yang juga ada di beberapa tempat. Belum lagi ada suku-suku yang masing-masing mempunyai bayangan-bayangan spesifik tentang bagaimana menjadi bahagia sebagai anggota kelompok-kelompok itu. Kaum kaya dan kaum miskin juga menambah cara kategorisasi sosial itu. Masing-masing memiliki orientasi nilainya yang berkembang lewat ruang dan waktu. Pemuda *punk* mungkin saja merasa berbahagia dengan perlawanannya terhadap kultur mapan. Para penjaga tradisi melihat kebahagiaan dalam pemeliharaan nilai-nilai kultural mereka. Belum lagi yang terkait iman religus, seperti ajaran-ajaran tentang keselamatan final dan kebenaran iman. Semua itu memiliki implikasi praktis dalam organisasi, visi, cara bertindak dan sikap-sikap terhadap kelompok-klompok lain. Banyak kontradiksi nilai dalam masyarakat majemuk seperti masyarakat kita, dan nilai-nilai yang dianggap benar oleh satu kelompok tidak dapat diuniversalkan begitu saja untuk kelompok-kelompok lain, sehingga nilai-nilai itu tetap partikular. Itulah contoh aspek yang disebut *the problem of good life*.

Tentang kemajemukan ini liberalisme menempatkannya pada ruang otonom yang tidak dicampuri oleh negara. Salah satu kalimat termasyhur berasal dari seorang filosof Pencerahan Jerman di abad ke-18, Immanuel Kant, yang dalam posisi ini dikenal sebagai perintis liberalisme. Dia mengatakan bahwa tak seorang pun boleh memaksaku untuk menjadi bahagia. Menurutnya kebahagian adalah masalah personal dan privat. Kant mengatakan ini dalam

kaitan dengan negara. Baginya, otoritas politis tidak berwewenang untuk menentukan jalan hidup warganya agar menjadi bahagia. Negara juga tidak berwewenang atas keputusan eksistensial individu atas keselamatannya, maka orientasi-orientasi nilai partikular seperti agama atau etnisitas berada di bawah wewenang kelompok-kelompok partikular itu.

Suatu otoritas politis seperti pemerintah negara yang merasa berhak untuk menentukan jalan hidup, kebahagiaan atau keselamatan final para warganya telah mengaburkan batas antara ‘membahagiakan’ dan ‘menindas’. Misi untuk menyelamatkan jiwa dari api neraka yang dilakukan oleh negara macam itu pastilah dialami oleh para individu sebagai teror. Karena itu perpaduan antara agama dan politik di tangan satu otoritas akan mengancam kebebasan sipil warga negara. Doktrin keselamatan suatu agama, jika dipakai sebagai doktrin resmi negara, akan berubah menjadi ideologi keji yang menindas agama-agama lain.

> Liberalisme adalah strategi untuk menghadapi suatu problem, yaitu absolutisme dan totalitarianisme agama.

Apakah distingsi semacam itu tidak akan condong pada suatu sikap pemisahan absolut, sehingga akan menjurus kepada ketidakadilan tertentu. Misalnya, terhadap kalangan pemeluk agama tertentu yang merasa harus menerapkan nilai-nilai yang diyakininya ke dalam aturan legal-formal?

Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa distingsi-distingsi itu harus kita terapkan dalam ranah yang berbeda-beda. Kalau

berbicara tentang distingsi antara negara dan masyarakat, atau ruang publik dan ruang privat, kita sedang berbicara secara institusional dan struktural, yakni tentang bagaimana masyarakat liberal menata dirinya. Sedangkan kalau berbicara tentang *the problem of justice* dan *the problem of good life* berarti kita sedang berbicara mengenai macam-macam tema persoalan dan bentuk kebijakan dalam demokrasi. Kita alokasikan di mana problem itu sehingga tidak tercampur satu sama lain, lebih dari kerangka metodologi dan epistemologi. Bila suatu konsensus atas norma publik tertentu merupakan ungkapan kepentingan kelompok tertentu dan tidak mencerminkan kepentingan umum, kita sebut itu sebagai *the problem of good life*, namun bila suatu diskusi melibatkan persoalan yang menyangkut kepentingan kemanusiaan, kita sebut itu *the problem of justice*.

Persoalan yang tadi Anda ajukan adalah apakah distingsi semacam itu tidak akan condong pada suatu sikap absolut pemisahan, sehingga akan menjurus kepada ketidakadilan tertentu juga. Itu benar. Namun, liberalisme itu sendiri terus berkembang. Kita bisa melihat bahwa dewasa ini, dari akhir abad ke-20, praktik masyarakat-masyarakat liberal tidak sungguh-sungguh liberal seperti dalam teorinya. Hampir setiap kelompok dalam masyarakat liberal mengklaim diri liberal, meski sebetulnya juga neo-konservatif. Bisa dikatakan bahwa ideologi liberalisme dewasa ini telah mengalami kemerosotan karena variasi-variasi dalam pelaksanaannya. Ide tentang pasar bebas dan sebagainya juga tidak secara murni diterapkan di berbagai negara. Begitu juga soal pemisahan ruang publik dan ruang privat. Sebab banyak kaum liberal sendiri yang justru menentangnya. Kaum feminis, misalnya, sangat tidak nyaman dengan pemisahan itu, karena justru begitu banyak proteksi ketidakadilan atas nama pemisahan itu.

Ada satu diskusi di Amerika dan Eropa tentang asas netralitas yang sangat sentral dalam proses legislasi dalam sistem hukum liberal. Asas itu mengatakan bahwa negara harus bersikap netral terhadap masalah *good life* tadi dan tidak mengintervensi apa-apa yang berada di ranah privat. Kalau ada kekerasan dalam rumah tangga lalu diproteksi dengan suatu alasan bahwa masalah itu adalah masalah privat yang tidak bisa dimasukkan ke dalam diskusi publik, tentu kaum feminis akan sangat berkeberatan.

Lantas, apa makna netralitas itu? Dalam diskusi itu beberapa pihak, seperti Habermas di Jerman, sampai pada kesimpulan bahwa asas netralitas tidak bisa dipahami secara mutlak. Artinya isu-isu di dalam ruang privat juga boleh ditampilkan ke ruang publik sejauh relevan sebagai masalah publik. Lebih dari itu, karena isu-isu dalam ruang privat terkadang juga bersentuhan dengan masalah keadilan. Tegasnya, isu privat tidak bisa langsung diblokir untuk tidak boleh dibicarakan sebagai diskusi publik. Blokade semacam itu hanyalah alasan untuk melakukan represi terhadap problem-problem yang sebenarnya bisa masuk ke dalam ruang publik. Tetapi, hasil dari diskusi itu, meskipun ada inklusivitas dan *fairness* serta keterbukaan dalam masalah privat yang bisa diangkat ke ruang publik, tidak semua masalah dalam ruang privat bisa mendapat kualifikasi publik. Masalah itu harus terlebih dahulu diuji secara publik, apakah benar-benar bisa masuk ke masalah publik, atau tetap hanya menjadi masalah privat. Misalnya, seorang anak dilecehkan secara seksual oleh bapaknya, atau seorang istri diperkosa di dalam rumah tangganya. Masalah-masalah seperti ini sangatlah subtil. Apakah ini persoalan keadilan atau masalah privat? Determinasi itu haruslah diperiksa di bawah sorotan publik juga. Artinya, dalam diskusi publiklah kekerasan dalam rumah tangga

dapat ditentukan sebagai persoalan privat atau publik. Itu tak boleh diblokade oleh aturan hukum begitu saja. Tema tidak boleh dibatasi dengan asas netralitas itu, namun prosedur diskusi publik sedapat mungkin harus tetap netral dari intervensi pemerintah dan kepentingan pasar.

Itu satu hal. Lain hal dengan yang Anda tanyakan. Agama, dalam berbagai ekspresinya, memang boleh berperan di dalam partisipasi demokratis. Kendatipun begitu, yang harus dipastikan sebelumnya adalah mana yang memang menjadi problem privat dan mana yang bisa masuk sebagai problem publik, seperti dalam bidang pendidikan yang cukup dilematis dalam menentukan garis batas privat-publiknya. Pendidikan bersifat publik, karena pendidikan membuka aksesnya kepada publik dan publik bisa secara luas berpartisipas di dalamnya. Dan mengapa disebut privat? Karena diselenggarakan oleh masyarakat dengan orientasi nilainya masing-masing.

Lalu kalau itu diselenggarakan oleh lembaga agama dengan ekspresi keagamannya yang sangat spesifik, bolehkah lembaga pendidikan ini ikut serta di dalam kebijakan publik pendidikan? Dalam politik sekular jawabannya adalah boleh, sejauh tidak membawa alasan religius ke dalam pengambilan keputusan publik. Misalnya, separasi antara pria dan wanita di dalam sekolah-sekolah dengan alasan norma religius yang melarang persentuhan di antara kedua jender. Masalah seperti itu seharusnya bisa dinalar tidak semata dari sudut teologi moral yang sangat spesifik dalam agama itu, melainkan juga dari sudut hak-hak asasi manusia universal. Dalam terang hak-hak asasi manusia itulah persoalan itu dapat dibahas pada level publik, sementara kebandelan untuk bertahan pada perspektif religius sektarian justru membuat persoalan itu tetap

berciri partikular. Ternyata di hadapan norma universal hak-hak asasi manusia, alasan-alasan teologis moral spesifik yang mendasari pengaturan sosial-religius-pedagogis itu tampak sebagai problem ketidaksetaraan jender. Ini merupakan *the problem of justice*, maka menjadi minat publik. Memblokade kebijakan separasi itu sebagai persoalan privat kelompok religius tentulah semacam legitimasi bagi ketidakadilan jender. Publik yang lebih luas daripada komunitas eksklusif yang mengklaim privasi itu berkepentingan untuk mempersoalkan ketidaksetaraan jender. Sebab itu, pemisahan publik dan privat tidak bisa mutlak.

Liberalisme adalah ideologi modern *par-excellence*. Gagasan ini memiliki bermacam-macam sikap dalam ekspresinya. Prinsipnya adalah menjunjung tinggi kebebasan individu, kebebasan politik dalam partisipasi demokratis, kesamaan antar-manusia, dan pluralisme.

Sebaliknya, alasan-alasan religius kadang juga mengandung nilai-nilai universal. Misalnya, pandangan-pandangan tentang kemanusiaan universal dan solidaritas moral umat manusia yang berciri inklusif dan kosmopolitan tentulah merupakan impuls positif bagi pluralisme yang terkandung dalam setiap agama. Di samping ciri eksklusifnya dalam mengklaim solusi keselamatan final, agama-agama juga memiliki ciri inklusif dalam pandangan humanisnya dan keadilan sosial bagi semua manusia. Bagaimanapun modernitas dengan humanisme universalnya turut membebaskan potensi agama-agama untuk melihat manusia lebih luas daripada sesempit umat mereka saja. Vitalitas potensi ini merupakan kontribusi bagi toleransi.

Kembali pada pertanyaan Anda. Sebenarnya pemisahan itu tidaklah *rigid*. Itu hanya cara bicara dan cara memandang yang

kemudian masuk ke dalam praktik-praktik hukum, yang masih fleksibel terhadap diskusi terus-menerus.

Ada kekhawatiran yang sangat akut bahwa kalau agama juga ikut terlibat ke dalam wilayah publik, dengan memaksakan nilai-nilainya menjadi aturan publik, yang akan terjadi adalah tindakan eksklusi terhadap agama dan keyakinan yang lain. Tetapi hal itu dibantah dengan contoh lain, bahwa gereja, sebagai simbol agama, seperti di Filipina atau di Amerika justru membantu mendiseminasikan wacana liberalisme. Makanya kemudian ada konsep deprivatisasi. Agama tidak lagi hanya menjadi urusan individu yang selalu berada di ruang privat, melainkan bisa menampakkan wajah publiknya dengan lebih menghargai nilai-nilai liberalisme dan pluralisme. Justru konteks itulah yang paling bisa dipakai untuk saat sekarang. Kita juga mengenal, kendati mungkin masih debatable, *ada gagasan pos-sekular. Apakah masyarakat pos-sekular akan membuat wajah baru agama di muka publik menjadi ramah dan toleran; atau seperti apakah masyarakat pos-sekular itu sebenarnya? Dan bagaimana seharusnya wajah publik agama ditampakkan?*

Ada sebuah buku baru yang ditulis oleh Peter Sloterdijk yang berjudul *Zeit und Zorn* (Waktu dan Murka). Tesis yang diwakilinya adalah bahwa masyarakat Barat dibangun atas kemarahan. Filsuf kontemporer ini membuat interpretasi bahwa dari zaman ke zaman isi peradaban Barat adalah revolusi dan kemarahan. Salah satu bentuk kemarahan itu semestinya juga apa yang lalu menjadi liberalisme itu. Maksud saya liberalisme adalah suatu strategi untuk mengatasi suatu ekses atau trauma yang ada di masa lalu dalam totalitarianisme agama. Untuk menghilangkan totalitarianisme aga-

ma, masyarakat Barat bertindak eksesif dengan membuat pemisahan yang absolut (liberalisme). Namun dari situ, mereka juga menemukan kebijaksanaan dan sikap-sikap yang bisa mereka pakai untuk menghadapi pluralitas seperti yang ada sekarang. Liberalisme adalah strategi untuk menghadapi suatu problem, yaitu absolutisme dan totalitarianisme agama. Dalam arti ini, jalan sejarah Barat cukup khas. Namun jika menilik bahwa modernitas di Timur juga berbenturan dengan feodalisme, proses emansipasi untuk menjadi liberal ternyata universal, meski tak harus lewat revolusi seperti di Barat.

Negara liberal secara normatif membatasi dirinya pada *the problem of justice*. Kelompok-kelompok dari berbagai orientasi nilai religius, etnis, politis dst. mesti sepakat tentang infrastruktur dan manajemen politik yang dapat mewujudkan keadilan sebagai *fairness* dalam masyarakat majemuk itu.

Kalau melihat suatu persoalan, kita tidak bisa begitu saja menerapkan kebijakan liberal seolah-olah suatu tongkat ajaib yang dapat menyelesaikannya dengan seketika. Maka menjawab persoalan agama yang hendak ikut serta dalam kebijakan publik pun kita tidak bisa menjawabnya secara hitam putih. Memang peran agama dalam pengambilan keputusan publik tidak pasti mengacaukan. Akan tetapi pastilah mengacaukan jika politk agama itu bersikap picik, tidak dewasa, berkutat dengan perspektif etnosentrisnya, tidak mencoba mentransendensi perspektifnya dengan mengambil alih perspektif kelompok lain, dan bersikeras pada pandangan dunianya yang *imune* terhadap kritik dan masukan dari luar. Bahaya sesungguhnya tidak berasal dari alasan religius itu sendiri, melainkan dari sikap-sikap kaku dan tertutup untuk menolak komunikasi.

Saya membedakan antara para penganut agama pada umumnya dengan para penganut agama yang mengalami kepanikan. Sebut saja orang-orang yang panik ini adalah orang-orang yang tidak tahan melihat kemajemukan dan mencari sistem kepastian yang eksklusif dalam agama mereka. Oleh sebab itu mereka kemudian membentuk suatu pulau sendiri guna mengimunisasi diri dari luar dan merasa bahwa sudut pandangnya itu adalah yang terbaik dan paling benar. Kalau orang-orang panik ini masuk ke dalam diskusi publik dan ikut campur dalam kebijakan-kebijakan publik bisa berbahaya karena perspektif triumphalistis mereka akan memacetkan dialog.

Fundamentalisme bukanlah sekadar persoalan politis atau ideologis. Ada akar-akar psikologis yang dapat menjelaskan mengapa seseorang menjadi begitu kaku, sempit dan tertutup dalam keyakinan religiusnya, yakni pencarian kepastian deduktif atas segala persoalan di tengah-tengah kepanikan hatinya berkonfrontasi dengan relativisme nilai dewasa ini. Dalam fanatismenya ia merasa mendapatkan tongkat ajaib untuk menyelesaikan segala persoalan itu. Tentu saja keyakinan semacam itu absurd, sebab dunia di luar kepala sang fanatikus tentulah lebih kompleks dan plural daripada dunia di dalam kepalanya. Kesulitan berdialog dengan mereka disebabkan antara lain oleh mekanisme sistem imun dalam jiwanya yang sedang panik yang tanpa disadarinya telah beralih menjadi keyakinan berlebihan tentang dogma imannya.

Tetapi orang-orang beragama atau orang-orang beriman tidak semuanya panik seperti itu. Ada yang tenang, *sumeleh*, dan terbuka terhadap bermacam-macam nilai di dalam masyarakat. Bahkan dari agama sendiri ada nilai-nilai universal yang bisa dibangun untuk gerakan seperti yang ada di Filipina. Jadi persoalan sesungguhnya mungkin tidak semata-mata terletak pada agama itu sen-

diri, tetapi pada proses marginalisasi sosial, ekonomis atau politis. Marginalisasi akan menghasilkan dua sikap, mereka yang panik dan mereka yang, karena kultur dan kedalaman penghayatannya, lebih tenang dan tidak panik. Mereka yang panik, langsung akan merespons dengan fanatisme, merasa bahwa agama menjadi satu-satunya solusi untuk menyelesaikan persoalan. Di sini agama segera berubah menjadi alat kuasa. Yang sakral dalam agama dinodai dengan agresi dan arogansi.

Saya sepakat bahwa cukup banyak gerakan demokrasi di berbagai negara yang dimotori oleh kelompok-kelompok dengan orientasi religius. Karena dalam nilai-nilai agama juga terdapat motivasi untuk bergerak sebagaimana diperlihatkan oleh Martin Luther King Jr di Amerika Serikat dan Mahatma Gandhi di India. Keduanya membangun *civil courage* dan motivasi untuk berkorban. Menurut hemat saya, semangat dan motivasi semacam itu tidak semata-mata berasal dari liberalisme, melainkan berakar jauh ke dalam spritualitas religius mereka. Liberalisme, jika hanya dimengerti sebagai kebebasan negatif, bahkan bisa menghasilkan krisis motivasi atau *lost of meaning*, seperti banyak diulas dalam teori-teori kritis tentang modernitas. Dalam agama ada sumber tak habis-habis untuk menimba motivasi guna keberanian bertindak dan membangun solidaritas. Jika orang memiliki kedewasaan iman, dari agama manapun orang ini akan memiliki cukup keyakinan diri dan kemantapan untuk menerima perbedaan nilai dalam berbagai agama. Karena itu kedewasaan iman juga memberi kontribusi mo-

> Liberalisme mengandaikan sekularisasi karena masyarakat dan negara dipisahkan seperti juga negara dan agama.

tivasi yang signifikan untuk formasi keutamaan-keutamaan warga dalam masyarakat demokratis.

Selanjutnya tentang masyarakat pos-sekular. Masyarakat pos-sekular merupakan hasil refleksi dari masyarakat liberal yang sudah matang. Bagi masyarakat pos-sekular, sudah saatnya sekarang, dalam proses demokrasi, juga harus mengikutsertakan warga negara dengan latar belakang religius untuk berpartisipasi, dan tidak begitu saja memblokade alasan-alasan religius yang diberikan. Mereka yang mau datang dalam proses demokratisasi dengan membawa alasan-alasan religius, harus berusaha sedapat mungkin menemukan inti epistemis dari alasan religius itu, yaitu inti yang bisa dimengerti oleh orang-orang dari agama lain supaya bisa dikomunikasikan.

Ambil contoh ini: Suatu kelompok religius yang menerima bunuh diri sebagai tindakan religius yang sakral, tentulah sulit dimengerti oleh kelompok-kelompok lain, sampai kelompok ini memberikan 'alasan rasional' yang ada di balik doktrin tentang bunuh diri itu. Tentu pada akhirnya kelompok pro-bunuh diri ini harus melegitimasikan posisinya dalam wawasan rasionalitas hak-hak asasi manusia universal agar dapat diterima secara rasional. Tingkat kesulitan untuk mencapai saling pengertian dalam hal ini tentu sangat tinggi, namun komunikasi rasional itu sendiri sedikit banyak dapat mengubah pandangan-pandangan sempit. Ini contoh ekstrem untuk menjelaskan bahwa dalam diskusi publik kita harus menerjemahkan alasan religius itu menjadi alasan yang lebih rasional. Ada banyak hal lainnya, seperti: praktik korban hewan versus sikap para penyayang hewan, sorban di kepala versus aturan pemakaian helm, dan seterusnya. Era pos-sekular dewasa ini telah membuka ruang diskusi antara pihak-pihak dengan latar belakang religius dan pihak-pihak

dengan latar belakang sekular di atas *platform* yang sama, yaitu demokrasi dan pluralisme.

Tetapi bagaimana dengan konteks Indonesia? Seringkali orang mengatakan bahwa Indonesia ini bukan negara agama, sekaligus juga bukan negara sekular. Padahal kalau kita lihat beberapa elemen dasar negara, jelas bahwa negara kita dibangun atas dasar nilai-nilai yang sekular. Itu terbukti dengan kemenangan kelompok nasionalis pada pemilu pertama negara kita. Anda sendiri melihat negara ini seperti apa?

Dalam liberalisme, kebebasan itu dipahami dalam kerangka hukum: tidak ada kebebasan yang bersifat mutlak. Dalam liberalisme, orang yang melanggar hak orang lain bisa dikenakan sanksi. Hal seperti itu tampak dalam praksis kebebasan masyarakat liberal sendiri. Bila Anda berkunjung ke masyarakat liberal, Anda tidak akan menemukan anarki. Yang akan Anda temukan adalah tatanan liberal yang sangat hormat terhadap hukum. Kebebasan dalam masyarakat liberal distabilisasikan oleh *system of rights*.

Kita adalah negara yang masih berada dalam formasi. Kita belum menemukan bentuk yang bisa diartikulasikan secara teoretis-epistemologis-metodologis tentang negara macam apa yang sedang kita jalani ini. Kalau mengatakan bukan negara agama dan bukan negara sekular itu hanya "teologi negatif" untuk menentukan suatu identitas. Kalau bukan negara kapitalis, bukan sosialis, bukan negara agama dan negara sekular, kita akan ditagih untuk menjawab pertanyaan: lalu negara apa? Kalau disebut negara Pancasila, negara pancasila itu sendiri negara apa? Kita harus menjelaskan modelnya. Persisnya,

model inilah yang belum terbentuk di negara ini. Model ini masih dalam eksperimen di dalam proses demokratisasi. Kita sedang ditantang untuk menemukan kesepakatan inklusif tentang model yang dapat mewadahi kemajemukan nilai dalam masyarakat kita. Untuk itu memang dibutuhkan tidak hanya kreativitas, melainkan juga kematangan.

Saya justru melihat bahwa proses pembentukannya dimulai dengan gerakan reformasi. Sebelumnya, yang lebih bertindak dalam eksperimen kita adalah sistem politik. Sekarang masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam proses pembentukan modelnya. Publik "dari bawah" harus ikut serta membentuk model itu. Kalau kita lihat ke belakang, maka, agaknya, nasib menjadi Indonesia itu terkait dengan multikulturalisme dan pluralisme. Kalau mau membuat modelnya, kita tidak bisa lepas dari pluralisme dan multikulturalisme. Apakah multikulturalisme dan pluralisme ini lebih mempunyai nada dasar atau tekanan komunitarian atau liberal, hal itu bisa berjalan hilir-mudik dalam zamannya. Kalau melihat negara-negara Asia, tampaknya, tekanan komunitarian akan sangat kuat. Yang saya maksud adalah meskipun masyarakat kita ini majemuk, pluralistik, dan multikultural, kita tetap ingin memberi sedikit banyak sisi substantif tentang keindonesiaan. Suatu komunitas politis selalu ingin mempunyai kesatuan, warna yang sama. Pancasila tentu merupakan titik-tolak yang visioner untuk menata pluralitas kultural masyarakat kita, artinya lebih komunitarian. Kutub ini akan selalu mempunyai lawannya, yaitu yang liberal. Jika kita mengambil jalan liberal, suatu gagasan induk seperti Pancasila tidak boleh dipahami secara substantivistis sebagai semacam *doctrina domus* (ajaran rumah), melainkan hanya secara kategorial sebagai ruang-ruang interpretasi bebas tanpa sabuk nilai-nilai komunitarian.

Mungkin model yang lebih tepat untuk Indonesia adalah masyarakat yang demokratis, pluralistik, multikultural yang diwadahi oleh budaya Islam yang moderat, liberal dan toleran. Kita tidak bisa lepas dari horison Islam sebagai agama mayoritas. Pluralitas yang lepas sama sekali dari budaya mayoritasnya itu hampir tidak mungkin. Yang perlu ditegaskan adalah bahwa rumusan atau model seperti itu mengandung suatu konsekuensi bahwa Islam yang menjadi horison Indonesia haruslah Islam yang toleran dan moderat. Katakanlah 'Islam kultural' dan bukan Islamisme atau Islam ideologis. Islam sebagai horizon kultural tentulah berbeda dari Islam sebagai bentuk politis. Pemisahan antara agama dan negara itu tak bisa ditawar, maka Islam kultural yang menjadi horizon itu memberi kontribusi motivasional utama dalam keutamaan-keutamaan publik dalam demokrasi pluralistis. Agama harus menghormati otonomi negara, seperti juga negara harus menghormati otonomi agama.

Bahkan negara liberal Barat pun tetap memiliki nada dasar Kristiani-kultural, kendati lebih pada multikulturalisme dan netralitas kulturalnya. Masalah dalam negeri kita akan muncul kalau Islam-nya menjadi *rigid*. Corak Islamisme macam itu justru akan berbahaya bagi koeksistensi damai dalam kemajemukan. Jika negara menerapkan kebijakan-kebijakan islamistis tanpa mendengar aspirasi minoritas, akan terjadi atomisasi, isolasi, bahkan bisa menjadi *apartheid* dan bisa menyebabkan terjadinya disintegrasi nasional. Nasib menjadi Indonesia adalah menjadi demokrasi pluralistik. Nada dasarnya mau bersifat komunitarian atau liberal, tergantung kekuatan politik yang masuk dan menguasai. Kalau mau komunitarian, nada dasar Islam toleran dan moderat harus ada di dalamnya dan kalau mau liberal, mungkin tendensi modernis Barat

yang akan banyak berperan di sana. Tegangan ini sendiri mengasyikkan, karena darinya pemikiran-pemikiran sosial akan tumbuh di negeri ini.

Kendati Anda sudah banyak menyinggung masalah liberalisme, tetapi kami ingin mendapat klarifikasi tentang anggapan banyak orang yang mengartikan liberal sebagai kebebasan tanpa batas dan terkait dengan ekonomi kapitalis yang hanya memberi ruang kepada yang kuat. Itu tentu saja pandangan-pandangan yang sudah dimasuki oleh nilai-nilai tertentu. Menurut Anda apa dan bagaimana sebenarnya liberalisme?

Ada buku yang menarik dari Rainer Forst, *Kontexte der Gerechtigkeit* (konteks-konteks Keadilan). Di situ dikatakan bahwa secara historis memang liberalisme berjalan bergandengan dengan kapitalisme, karena liberalisme juga sebetulnya muncul sebagai *impuls* dari perkembangan filsafat dan ilmu-ilmu alam. Pandangan dunia mekanistis dalam ilmu-ilmu alam membebaskan manusia dari dikte alam dan dari takhayul. Ini disusul dengan emansipasi lain dalam liberalisme, yakni individu terbebas dari dikte kelompok. Karena itu, liberalisme juga terkait dengan proses ekonomi pasar bebas di mana individu boleh berusaha dan usahanya bisa tanpa batas. Batas usaha individu dalam konteks liberalisme itu hanya ketika berbenturan dengan kepentingan orang lain. Maka kepentingan diri, dalam liberalisme, merupakan suatu hal yang tidak diharamkan.

Namun, dalam perkembangan lebih lanjut, liberalisme dan kapitalisme jelas menjadi dua hal yang berbeda. Mereka yang merespons sisi negatif dari liberalisme, lebih mengacu gagasan tersebut pada abad ke-19, masa awal liberalisme. Liberalisme sekarang

berkembang lebih jauh. Dalam buku Forst ini jelaslah bahwa liberalisme sebetulnya bukan kebebasan mutlak tanpa batas dari individu, melainkan suatu konsep hukum. Liberalisme bukan hanya sebuah ideologi, melainkan juga suatu *theory of right*. Dalam konsep hukum, seorang individu akan merasa bebas kalau hak-haknya dijamin secara hukum. Individu mempunyai ruang untuk bergerak karena ada jaminan hukumnya. Namun, untuk mendapatkan hak itu, seorang individu terlebih dahulu harus memenuhi kewajiban-kewajiban hukum tertentu. Jadi, konsep hak dan kewajiban itu komplementer dalam liberalisme. Dengan kata lain, dalam liberalisme, kebebasan itu dipahami dalam kerangka hukum: tidak ada kebebasan yang bersifat mutlak. Dalam liberalisme, orang yang melanggar hak orang lain bisa dikenakan sanksi. Hal seperti itu tampak dalam praksis kebebasan masyarakat liberal sendiri. Bila Anda berkunjung ke masyarakat liberal, Anda tidak

Tentang kemajemukan, liberalisme menempatkannya pada ruang otonom yang tidak dicampuri oleh negara. Salah satu kalimat termasyhur berasal dari seorang filsuf Pencerahan Jerman di abad ke-18, Immanuel Kant, yang dalam posisi ini dikenal sebagai perintis liberalisme. Dia mengatakan bahwa tak seorang pun boleh memaksaku untuk menjadi bahagia. Menurutnya kebahagian adalah masalah personal dan privat. Kant mengatakan ini dalam kaitan dengan negara. Baginya, otoritas politis tidak berwewenang untuk menentukan jalan hidup warganya agar menjadi bahagia. Negara juga tidak berwewenang atas keputusan eksistensial individu atas keselamatannya, maka orientasi-orientasi nilai partikular seperti agama atau etnisitas berada di bawah wewenang kelompok-kelompok partikular itu.

akan menemukan anarki. Yang akan Anda temukan adalah tatanan liberal yang sangat hormat terhadap hukum. Kebebasan dalam masyarakat liberal distabilisasikan oleh *system of rights*.

Jadi kelirulah anggapan bahwa liberalisme adalah kebebasan semutlak-mutlaknya. Pada ide liberalisme awal memang ada ide seperti yang dibayangkan para penentang liberalisme di Indonesia. Misalnya pada Thomas Hobbes dalam *Leviathan*. Bagi Hobbes, kebebasan adalah tidak adanya kendala untuk bertindak. Kebebasan dalam arti ini diartikan oleh Hobbes sebagai hak untuk melakukan apa saja. Konsep hak semacam ini disebut *natural liberty*, tapi jelas bukan *civil liberty*.

Kebebasan alamiah semacam itulah yang tersirat pada anarki, yang mungkin menetap pada pikiran orang yang salah mengerti tentang liberalisme. Padahal, konsep Hobbes tentang hak itu sudah dikritik dan diatasi oleh Hobbes sendiri dengan mengatakan bahwa kita tidak mungkin mempertahankan hak alamiah semacam itu dalam liberalisme. Kita harus beralih menjadi *civil liberty*, kebebasan sipil. Kebebasan sipil itu terjadi lewat kontrak. Sedangkan kontrak itu sendiri terjadi lewat melepaskan hak-hak natural untuk kemudian tunduk kepada hukum bersama. Hak dan kebebasan sipil itulah yang dianut oleh liberalisme. Masyarakat liberal akan tunduk kepada hukum yang dilegislasi bersama.

Terkait dengan netralitas negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak individu, bagaimana negara mengupayakan suatu tatanan yang fair, *adil bagi semua kelompok?*

Fairness dan netralitas dalam bentuk konkretnya adalah tidak memihak kepada salah satu aliran termasuk yang mayoritas. Asas

netralitas tidak menghendaki adanya regulasi publik yang dilakukan atas nama agama tertentu tapi mengikat orang dari agama lain. Itu pengertian pertama. Kedua, sebelum ada proses pengambilan kebijakan publik, sedapat mungkin negara mengikutsertakan berbagai macam bentuk kelompok di dalam masyarakat dengan bermacam-macam orientasi nilainya untuk memberikan kontribusi pandangan, sehingga akhirnya ditemukan suatu titik tengah yang bisa memuaskan semua pihak. Semua itu normatif. Pada faktanya, tidak semua keputusan publik akan mencapai titik tengah seperti itu. Yang bisa dilakukan adalah upaya dan adanya itikad baik untuk mencapai titik tersebut.

Apabila kebijakan publik kita secara terang-terangan memihak kelompok tertentu, dalam masyarakat plural hal itu akan langsung dilihat sebagai pemihakan. Hal itu justru kontraproduktif. Maka peraturan-peraturan daerah yang berhaluan pada agama tertentu juga bisa kontraproduktif kalau semata-mata untuk memberi isi identitas. Hal itu adalah bentuk dari politik identitas di daerah-daerah dan akan berbahaya bagi negara secara keseluruhan. Regulasi-regulasi daerah semacam itu kontraproduktif karena akan mengundang sentimen masyarakat yang membuat mereka saling mengisolasikan diri satu sama lain dengan ongkos raibnya solidaritas nasional. Identitas politis tak seharusnya ditimba dari agama, melainkan seharusnya dari konstitusi republik kita.

> Iman secara spesifik cenderung mengeksklusikan iman lain, jika hal itu berkaitan dengan identitas kolektif. Namun jika iman menyentuh kedalaman kemanusiaan universal, dari iman itu juga termuat suatu harapan untuk melampaui identitas kolektif yang dikira berasal darinya.

Pada level ini negara harus segera bertindak untuk menengahi prosesnya sehingga perda-perda itu lebih berorientasi nasional atau bahkan kosmopolitan. Tetapi suatu masyarakat yang hendak berorientsai nasional atau kosmopolitan banyak bergantung pada pendidikan, pertumbuhan ekonomi, kematangan kebudayaan, kontak dengan bermacam-macam elemen baik di dalam maupun di luar negeri, dan tentunya juga politik. Pemerintah harus sensitif dan tegas terhadap tendensi-tendensi politik identitas yang mulai marak di daerah-daerah.

Salah satu usul untuk menciptakan suatu tatanan ideal yang sering Anda kemukakan di beberapa media dan kesempatan adalah melaui public reasoning. *Proses itu sendiri meniscayakan semua komponen masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk menyumbangkan pendapatnya. Kalau dalam praktiknya, dalam konteks Indonesia, bagaimana* public reasoning *itu dapat dijalankan? Melalui negara atau* civil society*?*

Tidak boleh melalui negara, harus melalui *civil society*. Kalau melalui negara, yang kita dapat hanyalah perpanjangan tangan kekuasaan, seperti dalam klompencapir di masa Orde Baru. Itu kesalahan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Saya sangat senang dengan radio-radio yang sudah mulai membicarakan tentang kebijakan presiden, menteri-menteri, bupati dan lain sebagainya, dan kemudian ditanggapi oleh pemirsa atau pendengar dengan sangat cerdas dalam memberikan alasan. Forum-forum seminar di kampus dan hotel-hotel, diskusi-diskusi di dalam surat kabar, LSM dan lain-lain juga vitalitasnya sangat menggembirakan di Indonesia. Jangan salah mengira bahwa diskusi-diskusi publik kita dangkal-dangkal

saja. Kalau dibandingkan dengan apa yang ada di negara liberal, saya menduga, kedalaman komentar dan kritik dalam pembahasan persoalan, seperti UU pornografi, mungkin pandangan-pandangan yang dikemukakan masyarakat Indonesia lebih dalam, beragam, dan terbuka. Kita kadang-kadang memandang remeh apa yang ada di negeri kita dan mengagumi yang ada di luar. Padahal, ternyata, apa yang berkembang di Indonesia ini sangat menakjubkan.

Satu hal yang belum ada di Indonesia yaitu upaya untuk mendokumentasi, mengartikulasikan, mengingat dan menjadikan suatu peristiwa sebagai momentum yang selalu diingat bersama, lantas membuat suatu studi komprehensif untuk mengetahui arahnya. Sebut saja, seminar, diskusi dan problem besar yang ada di Indonesia, semuanya hampir hanya seperti *performance* atau *reality show* yang muncul sporadis lalu hilang dilupakan oleh zaman. Tidak ada upaya untuk mencari jalan keluar dan secara komprehensif menyelesaikan masalah-masalah itu, sehingga kalau suatu ketika ditanya, kita tak mempunyai *progress report* yang jelas mengenainya. Di wilayah inilah orang kita sangat kurang memberikan respons. Mungkin karena masyarakat kita terlalu kompleks, atau karena masyarakat kita hanya senang berbicara namun kurang senang mendokumentasi. Masyarakat kita lebih gemar hidup dalam budaya lisan, kurang membiasakan diri dengan budaya tertulis, mendokumentasikan sesuatu, dan mengembangkannya. Akibatnya, begitu banyak peristiwa dan tragedi kolektif yang tidak terselesaikan karena kita tidak pernah mau membuka dan mendokumentasikannya.

Saya baru saja datang dari Hiroshima, kota yang dulu rata oleh bom dan hanya menyisakan satu gereja dan *dome*, yang mungkin karena konstruksinya lebih kuat dibanding bangunan lain. Sekarang Hiroshima menjadi kota modern dan penduduknya menjadi

orang-orang yang anti-perang. Saya mengunjungi satu museum di sana yang isinya dokumentasi lengkap dari jumlah korban sampai cerita individual tentang korban yang dapat diakses melalui internet. Misalnya ada cerita pengalaman seorang korban pengeboman yang berasal dari Jerman yang terdokumentasi secara lengkap. Ada juga cerita korban tentang anak yang pada saat pengeboman kota itu sedang membawa kotak makanan untuk makan siang. Kotak makannya masih ada dan cerita mengenai anak itu, mungkin melalui cerita ibunya atau orang-orang yang melihat dan tetap *survive*, semuanya lengkap terdokumentasi. Hampir semua rombongan pelajar yang berkunjung ke museum ini adalah anak-anak Jepang. Bagaimana mereka belajar dari sejarah sangatlah menakjubkan.

Kita juga mempunyai cerita-cerita seperti itu. Kita punya peristiwa G 30 S/PKI, kerusuhan Mei, dan masih banyak lagi, yang sayangnya tidak pernah selesai diungkap. Orang kita perlu berani untuk jujur terhadap sejarah, sehingga mampu juga melihat prestasi-prestasi sejarah di samping pengalaman-pengalaman negatif di dalamnya. Sejak reformasi, kita juga mempunyai prestasi-prestasi dalam deliberasi, misalnya kasus tentang RUU-APP (Rancangan Undang-Undang Anti-Pornografi dan Pornoaksi) yang akhirnya direvisi. Artinya, sistem politik kita memperhatikan juga apa yang berkembang di publik. Itu salah satu prestasi deliberasi yang seharusnya juga terdokumentasi secara lengkap. Begitu banyak prestasi deliberasi lain yang harus dianggap sebagai capaian-capaian. Sebut saja kasus-kasus pengadilan HAM yang seharusnya disosialisasikan ke masyarakat. Banyak yang belum terungkap karena kurangnya kedaulatan pengadilan, namun setiap prestasi kecil yang dihasilkan perlu diapresiasi. Untuk terwujudnya semua itu, kita harus mempunyai *knowledge management* yang bagus sehingga sistem pendidikan

kita dapat menyerap kejadian itu sebagai pelajaran yang objektif dan mencerahkan. Cerita di bangku-bangku sekolah jangan lagi hanya memuat cerita masa lalu, tetapi juga yang sekarang: prestasi deliberasi kita apa saja, apa yang menjadi demokratis, kebebasan pers bagaimana, dan sebagainya. Tentu semua ini harus berasal dari bawah. Jika tidak demikian, hal itu tak lebih daripada propaganda pemerintah lagi.

Public reasoning *merupakan mekanisme yang hanya mengakomodasi wacana yang rasional. Bukankah hal ini sama artinya dengan upaya mengeksklusi atau meminggirkan pandangan-pandangan lainnya yang tidak rasional?*

Jika Anda mempunyai seorang teman yang sedang marah. Salah satu sikap yang mungkin Anda lakukan adalah diam. Karena kalau diajak bicara, hasil pembicaraannya juga mungkin tidak akan produktif. Namun yang harus diperhatikan, orang yang marah itu pada dasaranya ingin menyampaikan sesuatu supaya Anda dengar. Cara yang memungkinkan itu, dia harus menenangkan diri terlebih dahulu untuk tidak marah kemudian baru berbicara. Kalau marah terus-menerus dia tidak pernah akan dapat menyampaikan

---

Untuk menghilangkan totalitarianisme agama, masyarakat Barat bertindak eksesif dengan membuat pemisahan yang absolut (liberalisme). Namun dari situ, mereka juga menemukan kebijaksanaan dan sikap-sikap yang bisa mereka pakai untuk menghadapi pluralitas seperti yang ada sekarang. Liberalisme adalah strategi untuk menghadapi suatu problem, yaitu absolutisme dan totalitarianisme agama.

---

apa yang dia inginkan, lalu kita tidak akan pernah saling mengerti. Jadi langkah yang harus dilakukan dalam kasus itu, *pertama,* Anda harus diam supaya dia tenang. Dan *kedua,* dia juga harus menenangkan diri supaya bisa berbicara. Pada akhirnya *toh* dia juga bicara.

Kalau perumpamaan itu saya transfer ke dalam kehidupan bersama secara politis, kelompok-kelompok radikal di masyarakat adalah ibarat orang yang sedang marah. Mereka merasa dirugikan dan dimarginalisasikan. Tetapi sebenarnya mereka mau berbicara. Hanya saja, bicara dalam kemarahan adalah kontraproduktif. Oleh karena itu, mereka harus terlebih dahulu menenangkan diri. Harus mencari alasan rasional untuk bisa menyampaikan pesannya. Sebaliknya, kita yang mendengarkan juga harus menenangkan diri, jangan mengajak bicara terus-menerus karena hanya akan menghasilkan hal yang kontraproduktif dan hanya akan menyulut terjadinya perkelahian. Artinya, selama kelompok-kelompok radikal ini emosional dan menggunakan alasan-alasan yang tidak rasional, maka tidak akan pernah bisa memulai pembicaraan, selama itu pula tertundalah komunikasi. Tetapi hal itu merugikan kedua belah pihak. Maka, sekali lagi, dalam konteks hidup bersama secara politis, pihak yang sedang marah, agar gagasannya bisa diterima, harus terlebih dahulu menenangkan diri dan mencari argumen.

Dalam demokrasi tidak ada jalan lain selain menjadi masyarakat yang rasional. Namun rasionalitas sendiri mempunyai berbagai macam variannya. Salah satu yang harus diperhatikan dalam konteks ini adalah rasionalitas publik. Melalui rasionalitas inilah sikap dan tindakan seseorang dapat dimengerti oleh publik. Melalui rasionalitas ini juga tindak kekerasan terhadap yang lain menjadi sesuatu yang terlarang. Kekerasan hanyalah efek dari frustasi, dan frustasi

terjadi karena defisit rasionalitas. Defisit rasionalitas muncul karena kepanikan yang ada di dalam jiwa seseorang. Sedangkan sikap panik sendiri muncul karena marginalisasi dalam masyarakat.

Jadi terhadap alasan yang tidak rasional, dalam konteks demokrasi, ada dua sikap yang bisa dikedepankan. *Pertama*, menunda komunikasi sampai lawan menemukan alasan rasional untuk berbicara dengan kita, dan kita sendiri menenangkan diri untuk mencoba mendekati lawan supaya dicapai titik temu yang saling bisa mendekati. Dan kemungkinan *kedua*, selama lawan yang emosional tidak sabar dan tetap melakukan kekerasan, polisi harus turun tangan. Dalam demokrasi, kita membutuhkan polisi yang kuat. Kalau polisi sudah bersikap netral, aktif, dan adil, keamanan akan bisa ditegakkan.

Pandangan-pandangan tentang kemanusiaan universal dan solidaritas moral umat manusia yang berciri inklusif dan kosmopolitan tentulah merupakan impuls positif bagi pluralisme yang terkandung dalam setiap agama.

Jadi, mungkinkah dalam konteks Indonesia kesepakatan melalui public reasoning *bisa dicapai, kalau pada faktanya Indonesia terfragmentasi sebegitu rupa sehingga sangat sulit menemukan titik temu?*

Ini masalah yang sangat pelik. Tetapi, untuk tidak mematahkan harapan, dalam buku Niklas Luhmann *Soziale Systeme* (Sistem-sistem Sosial), ada suatu formula yang sangat penting bahwa sistem merupakan 'reduksi kompleksitas'. Kalau masyarakat kita begitu kompleks, dan kompleksitas itu tidak direduksi, kita tidak akan pernah lepas dari krisis. Salah satu jalan untuk mereduksi komplek-

sitas adalah sistem manajerial negara yang bersih, *good governance*, sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial masayarakat. Adanya berbagai macam pandangan di dalam masyarakat tidak akan menghabisi negara. Tidak membuat negara menjadi bubar. Mengapa? Mungkin jawabannya karena kita tetap memiliki kepentingan bersama, yaitu ingin fasilitas publik bersama, jalan-jalan umum yang tidak macet, ingin birokrasi negara yang tidak memihak, urusan surat-surat yang bebas korupsi, mengurus tanah mudah dan baik, mengurus ijin usaha juga lancar, dan lain sebagainya. Kita sebagai warga negara dengan macam-macam orientasi nilai tetap ingin mempunyai satu *platform* bersama hingga bisa saling kita mengerti dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain. Jangan membayangkan seolah-olah negara modern itu bisa menjadi monolitis seperti komunitas adat, karena bayangan itu juga berbahaya jika menjadi kebijakan politis. Yang perlu dicari adalah tatanan bagi pluralitas.

Apa yang disebut kepentingan bersama ini akan tetap ada. Salah satu kepentingan bersama yang tetap ada adalah bahwa seluruh pihak ingin menjadi masyarakat yang demokratis dan pluralistis. Kalau pemerintahnya konsisten pada wilayah itu, disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan keadilan distributif yang baik, beragam pandangan pun akan bisa dikoordinasikan dan dimobilisasi untuk sepakat pada negara. Artinya, negara akan menjadi milik bersama. Tetapi kalau itu gagal, kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan negara (pemerintah) akan merasa mempunyai alternatif untuk memberikan solusi. Itulah bagian dari dinamika politik. Bisa saja suatu kelompok menawarkan suatu solusi, meskipun, bisa jadi, nantinya akan dilawan oleh kelompok lain. Namun demikian substratumnya adalah bahwa kita tetap ingin plural, di

mana dalam pluralitasnya kita tetap menginginkan pertumbuhan ekonomi yang mengesankan dengan keadilan distributif yang dapat dinikmati oleh setiap orang. Tentang perbedaan ideologi dan sebagainya, lama-kelamaan, dalam prosesnya, akan menjadi tidak begitu sentral lagi. Seperti dalam negara maju, perbedaan ideologi sudah tidak menjadi soal hidup dan mati, tetapi hanya menjadi cara berpikir. Masyarakat pada fase itu sudah berada pada tingkat moderasi tertentu. Kita belum mencapai tingkat itu, dan perlulah keyakinan bahwa suatu saat kita juga akan bisa mencapainya.

Pluralisme harus dimengerti sebagai suatu tatanan sekaligus sebagai suatu kondisi kebebasan tertentu.

Dapatkah Anda mengomentari, pertama, *perihal masa depan kemajemukan Indonesia yang iklimnya semakin tidak menggembirakan, terutama ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan pluralisme, dengan salah satu alasan bahwa pluralisme dapat berakibat pada sinkretisme, pembauran aneka ragam agama dan keyakinan menjadi satu, sehingga tidak jelas lagi yang mana iman Islam yang murni, yang mana Kristen, Hindu, Budha dan lain sebagainya, sehingga dapat mendangkalkan iman umat;* kedua, *pluralisme yang juga dinilai negatif karena hanya akan menghasilkan relativisme?*

Pemahaman pluralisme seperti itu sangat spesifik MUI. Dan perlu ditekankan di sini juga bahwa MUI adalah suatu lembaga dengan *adresat*-nya umat Islam. Dalam konteks itu, berarti MUI bicara *pro-domo*, untuk rumah, bukan untuk publik, bukan untuk orang-orang dari agama lain. Institusi agama memang biasa seperti itu, karena mempunyai kepentingan untuk integritas dan memberi

identitas pada umatnya. Persoalan di Indonesia menjadi merembes ke mana-mana lantaran Islam menjadi mayoritas dan di kalangan Islam sendiri mungkin belum mempunyai kesepakatan mengenai sekularisasi (apakah agama dan politik itu dipisah atau tidak). Kalau di dalam gereja Katolik dan Protestan perihal sekularisasi sudah disepakati sejak lama. Sehingga kalau pemimpinnya mengatakan: "Lawan *New age!* atau lawan posmodernisme!" hal semacam itu akan ditanggapi sebagai masalah moral dan pembinaan iman, dan bukan masalah politik. Masalah di MUI juga seperti itu, yang lalu dikaitkan dengan politik, kelompok lain, dan sebagainya. Sejauh umat Islam bisa menyikapi bahwa itu adalah fatwa *pro-domo,* tidak masalah. Itu persoalan intern, diskursus dalam Islam di Indonesia. Saya tidak bisa menanggapi perdebatan itu. Tetapi kalau fatwa itu dimaksudkan untuk seluruh masyarakat, saya keberatan, karena pluralisme tidak sama dengan sinkretisme dan relativisme.

Lebih dari itu, sinkretisme bukan sesuatu yang mempunyai konotasi negatif. Dalam tingkat tertentu, agama-agama juga sinkretis. Setiap agama juga berdialog dan menghasilkan pencampuran tertentu dengan kebudayaannya. Meski setiap agama juga mempunyai suatu pretensi untuk murni dari budaya. Itu pretensi. Sementara faktanya setiap agama selalu tercampuri budaya tertentu. Kita bisa mengatakan bahwa mereka yang berpretensi murni sebenarnya hanya berpretensi untuk membentuk kebudayaan sendiri, yaitu kebudayaan puritan. Puritanisme bukan budaya hakiki, melainkan tetap salah satu bentuk kultural.

Karena itu, sulit untuk menerima begitu saja bahwa pluralisme dan sinkretisme secara umum negatif. Tetapi kalau fatwa itu diucapkan *pro-domo,* berarti hanya dimaksudkan untuk memberikan bimbingan spiritual. Kalau ini diterima umatnya, maka *no*

problem. Tetapi kalau umatnya sendiri memberikan respon yang bertentangan dengan fatwa, itu tanda bahwa sebenarnya di situ terdapat masalah.

Banyak yang mengatakan bahwa pluralisme, dalam konteks Indonesia yang cukup majemuk ini, adalah suatu keniscayaan. Kira-kira model pluralisme seperti apa yang dalam pandangan Anda lebih santun dan bisa merawat kemajemukan tanpa ada pertikaian dan sebagainya?

> Tak ada pertentangan logis antara beriman dan menjadi toleran. Justru sebaliknya, toleransi bersumber dari iman yang benar dan seharusnya menjadi bagian identitas agama. Seringkali militansi dan toleransi dipertentangkan satu sama lain, seolah tidak mungkin menjadi kesatuan: orang yang militan pasti tidak toleran dan sebaliknya orang yang toleran tidak militan. Toleransi militan adalah suatu pandangan bahwa perjuangan untuk mewujudkan toleransi antaragama merupakan bagian dari pergumulan iman sejati para warganegara yang religius.

Pertanyaan ini berbeda dengan pertanya-an tentang MUI. Seka-rang kita berada di luar konteks *pro-domo*. Pembedaan publik dan privat tetap berguna, meskipun jangan terlalu *rigid*. Ketika kita berhadapan dengan konteks pluralisme di Indonesia, dengan kemajemukan agamanya, maka yang harus masuk adalah wacana nasional, bukan wacana agama. Tetapi jika untuk kalangan intern, wacana agama jelas diperbolehkan. Sebut saja kalau sebuah seminar dihadiri oleh orang dari bermacam-macam agama, maka kita tidak bisa berbicara hanya dalam terminologi agama sendiri. Harus ada

platform bersama yang kita sepakati sebagai bangsa, *demos*, warga negara.

Modelnya seperti apa? Seperti yang saya katakan tadi, sejarah membuktikan bahwa pluralisme dikehendaki sejak awal oleh masyarakat kita. Tadi saya katakan, nada dasarnya bisa kita pilih, entah komunitarian atau liberal – yang dalam hal ini bisa hilir-mudik. Yang saya maksud komunitarian adalah ada warna kultural Islam yang menjadi horison utamanya, dan perlu diingat, Islamnya bukan yang islamisme, melainkan yang toleran, Islam kultural. Hal itu akan bisa kita terima bersama. Bahkan orang Kristen yang ke luar negeri juga mengatakan bahwa mereka berasal dari masyarakat dengan mayoritas Islam, namun demikian mereka sebagai Kristen merasa mendapatkan ruang untuk berekspresi di Indonesia. Oleh karena itu, orang Kristiani Indonesia merasa berasal dari latar belakang kultur Islam dan tahu bagaimana Islam di Indonesia. Sungguhpun begitu mereka tidak merasa bahwa dengan cara demikian, lantas akan beralih iman menjadi Islam. Mereka adalah seorang Kristen yang memahami kultur Islam di Indonesia.

Atau, pilihannya kita menjadi liberal sama sekali. Artinya, kita tidak sama sekali berbicara tentang Islam. Ini adalah negara Republik Indonesia yang sekular. Pertanyaannya, apakah Indonesia bisa seperti itu? Tentunya hal ini tergantung kekuatan politik mana yang mau bergerak. Tampaknya kalau melihat dasawarsa-dasawarsa yang lalu, nada dasar komunitarianlah yang lebih diambil, meskipun hal itu tetap menggelisahkan mereka yang mencintai kebebasan individu. Indonesia akan memiliki wajah liberal jika makin banyak individu yang menghargai kebebasan dirinya dan kebebasan orang lain. Selera akan kebebasan ini belum cukup tampak, sementara banyak orang mencari tambatan pada komunitas dan otoritas.

Dalam perkembangan pemikiran, terutama di Barat, ada kecenderungan membenturkan antara pluralisme dengan monisme, yang dalam agama tercermin lewat semangat monoreligius dengan karakter menyingkirkan perbedaan agama dan keyakinan ke dalam paham agama yang tunggal. Demikian pun yang terjadi di negeri ini, di mana banyak kalangan warga yang melihat Indonesia hanya terjebak pada perbedaan-perbedaan besar, Islam-Kristen, Jawa-sunda, dan tidak melihat pada yang lebih mendasar, yaitu perbedaan-perbedaan nilai di masing-masing komunitas yang teramat plural. Bagaimana pandangan Anda tentang itu semua?

Semua itu, pada dasarnya, masalah steoreotipifikasi kategori-kategori sosial. Dalam buku Clifford Geertz yang saya baca edisi Jermannya, *Die Welt in Stücken* (aslinya dalam bahasa Inggris. Artinya: Dunia yang Tercabik-cabik), ditunjukkan bahwa apa yang dikatakan Samuel P. Hantington tentang benturan peradaban, yang mana seolah-olah Islam, Kristen, Hindu, Budha, Konfusianis merupakan kategori-kategori monolotis yang saling dibenturkan. Geertz membuktikan bahwa yang sebenarnya terjadi tidaklah demikian. Peradaban yang dibentuk oleh agama-agama itu dan praktik agama-agama itu sendiri tidaklah monolitis, melainkan sangat pluralistis. Dalam buku tersebut ditunjukkan bahwa Indonesia adalah salah satu contoh di mana begitu banyak kemajemukan yang terbangun dari sejarahnya, yakni formasi lapisan-lapisan nilai yang berasal dari etnisitas, bahasa, agama, birokrasi kolonial, modernitas dan seterusnya. Kalau melihat seperti itu, benturan antara monisme, dan pluralisme di negeri kita, seperti yang Anda katakan itu, merupakan akibat tidak memahami fakta pluralitas negeri ini. Kita semua yang mendiami kepulauan nusantara ini mau tidak mau

harus mengambil sikap pro-pluralisme, jika mau hidup bersama secara damai.

Sekarang persoalannya apakah pluralisme merupakan suatu kondisi yang kemudian hanya kita biarkan. Artinya, kita pasif dan tidak melakukan aksi sama sekali, atau kita mempunyai suatu proyek untuk memobilisasi sedemikian rupa sehingga pluralisme berada dalam tatanan tertentu yang bisa menjamin keutuhan sebuah masyarakat. Saya cenderung pada yang kedua. Pendapat yang pertama cenderung pada sikap *laissez-faire*, membiarkan pluralisme menjadi liar terpecah-pecah dan tidak saling mengerti satu sama lain. Dari sini akan terbentuk isolasionisme. Membentuk 'pulau-pulau' yang tidak saling mengerti satu sama lain. Maka dari itu pluralisme harus dimengerti sebagai suatu tatanan sekaligus sebagai suatu kondisi kebebasan tertentu. Jika di dalam sebuah agama, misalnya, terdapat bermacam-macam aliran atau sekte, sekurang-kurangnya ada suatu organisasi yang cukup fleksibel yang mencoba mendekatkan mereka untuk saling mengerti. Gerakan-gerakan solidaritas semacam gerakan ekumene dalam kekristenan adalah salah satu contoh upaya untuk saling mengerti di antara yang terpecah.

Fleksibilitas itu harus ditunjukkan sebagai gerakan solidaritas kemanusiaan yang inklusif, dan bukan sebagai kontrol atau dominasi doktriner. Kita tidak harus mereduksi pluralitas, melainkan menatanya. Gerakan untuk saling mengerti ini tidak boleh mengeksklusi pihak-pihak yang terlepas jauh, yakni yang sangat berbeda dari mayoritas, karena sikap eksklusif macam itu justru akan meradikalkan sikap pihak yang dieksklusi. Sikap yang tepat adalah mengajak bicara sambil membiarkan berkembangnya suatu kategori yang lebih inklusif untuk menampung pluralitas. Kemampuan dan kemauan untuk bersikap inklusif ini tentu saja banyak tergantung

pada sejarah identitas dan kedewasaan umat. Begitu juga pluralitas kultural dalam masyarakat kita perlu ditata secara inklusif dan bertumpu pada nilai-nilai kemanusiaan universal yang melampaui tembok-tembok agama, suku, ideologi, ras, dan seterusnya.

Apakah semua yang Anda paparkan tersebut terkait dengan proyek besar menuju apa yang Anda sebut sebagai toleransi militan?

Toleransi militan itu suatu konsep embrional yang lahir prematur, karena belum saya pikirkan secara sistematik. Inti dari konsep itu sendiri berangkat dari anggapan bahwa setiap orang mempunyai iman, keyakinan dan paham tentang kebenarannya sendiri-sendiri. Seorang yang beriman dengan tekun tidak bisa mengatakan bahwa semua agama sama saja. Adanya hal-hal yang sama dalam berbagai agama tidak berarti bahwa semua agama sama saja. Anggapan seperti itu juga yang mau dihindari oleh agama manapun. Kebenaran di dalam agamaku tidak bisa ditawar lagi, namun pengakuan kebenaran ini tidak harus dengan mengeksklusikan pihak lain sebagai tidak selamat. Sebagai suatu keyakinan yang menyentuh fondasi eksistensial manusia, agama memang cenderung menjadi sistem pandangan

Iman yang benar tidak mendehumanisasi manusia-manusia dari kelompok lain sebagai musuh, kafir atau sesat, melainkan justru mendorong upaya-upaya saling pengertian. Seorang yang toleran secara militan bukanlah sosok yang mudah goyah di tengah-tengah pluralisme nilai, lalu menjadi *laissez faire* terhadap imannya sendiri. Dia malah berupaya menemukan acuan-acuan kosmopolitan dari khasanah religiusnya untuk mendukung toleransi.

dunia yang absolut. Akan tetapi dalam agama manapun, juga yang sangat eksklusif, terkandung pandangan tentang kemanusia-an yang membuka diri terhadap bangsa-bangsa dan agama-agama lain. Iman secara spesifik cenderung mengeksklusikan iman lain, jika hal itu berkaitan dengan identitas kolektif. Namun jika iman menyentuh kedalaman kemanusiaan universal, dari iman itu juga termuat suatu harapan untuk melampaui identitas kolektif yang dikira berasal darinya.

Toleransi militan yang saya maksud adalah bahwa meskipun kita mempunyai identitas dari agama tertentu, tidak berarti kita tidak toleran. Tak ada pertentangan logis antara beriman dan men-jadi toleran. Justru sebaliknya, toleransi bersumber dari iman yang benar dan seharusnya menjadi bagian identitas agama. Seringka-li militansi dan toleransi dipertentangkan satu sama lain, seolah tidak mungkin menjadi kesatuan: orang yang militan pasti tidak toleran dan sebaliknya orang yang toleran tidak militan. Toleransi militan adalah suatu pandangan bahwa perjuangan untuk mewu-judkan toleransi antaragama merupakan bagian dari pergumulan iman sejati para warga negara yang religius. Iman yang benar ti-dak mendehumanisasi manusia-manusia dari kelompok lain sebagai musuh, kafir atau sesat, melainkan justru mendorong upaya-upaya saling pengertian. Seorang yang toleran secara militan bukanlah sosok yang mudah goyah di tengah-tengah pluralisme nilai, lalu menjadi *laissez faire* terhadap imannya sendiri. Dia malah berupaya menemukan acuan-acuan kosmopolitan dari khasanah religiusnya untuk mendukung toleransi. Toleransi militan adalah sebuah po-sisi inklusif yang mau relaks terhadap tendensi-tendensi trumpha-listis dalam setiap agama. Relaks berarti ber-ironi seperti seorang

dewasa yang merasa geli mengenang kepicikan yang dilakukan di masa kanak-kanaknya.

Maka itu, tidaklah mengherankan bahwa dalam perbincangan spiritual, seorang rohaniwan Muslim yang memilik kedalaman spiritual dan seorang rohaniwan Kristani atau Budhis yang juga sangat dalam spiritualitasnya akan dapat berjumpa satu sama lain untuk kemanusiaan, meskipun mereka melihat dari perigi rohani yang berbeda-beda. Bertolak dari keyakinannya dan dari pengalaman mistiknya sendiri-sendiri, seorang beragama yang sangat tinggi spiritualitasnya dapat menemukan mistik kemanusiaan yang sama. Jadi, *platform* kemanusiaan di semua agama pada dasarnya sama. Mereka bisa bertemu satu sama lain. Persoalan kenapa umat kebanyakan malah saling bertengkar, tak lain karena ajaran-ajaran religius telah diideologisasi dan membentuk sikap doktriner dan dogmatis yang ekstrem bagi umat. Sikap ini yang bisa membentuk umat menjadi militan dan tidak toleran. Atau militan atau *laissez-faire* bukanlah sebuah pilihan real bagi toleransi militan. Militansi politis atas dasar agama seringkali justru berasal dari kurangnya kedalaman iman. Sebaliknya, sikap *laissez-faire* kerap merupakan bukti ketidaktekunan dalam beriman. Toleransi militan memadukan kesalehan religius dan humanisme universal.

Seorang yang beriman dengan tekun tidak bisa mengatakan bahwa semua agama sama saja. Adanya hal-hal yang sama dalam berbagai agama tidak berarti bahwa semua agama sama saja. Anggapan seperti itu juga yang mau dihindari oleh agama manapun. Kebenaran di dalam agamaku tidak bisa ditawar lagi, namun pengakuan kebenaran ini tidak harus dengan mengeksklusikan pihak lain sebagai tidak selamat.

Setelah pemaparan panjang lebar di atas. bagaimana Anda melihat pluralisme di Indonesia ke depan? Apakah ada harapan bahwa pluralisme Indonesia akan menuju pada arah yang lebih cerah atau justru Indonesia akan semakin terancam dengan disintegrasi dan sebagainya? Cukup banyak alasan untuk pesimis, meski juga masih banyak alasan untuk optimis.

Sulit untuk memastikan akan seperti apakah Indonesia ini ke depan. Tapi kalau ingatan dan memori masyarakat kita cukup kuat, maka akan terlihat benang merah dalam sejarah, dan benang merahnya adalah kebersamaan dalam kemajemukan. Tampaknya di samping alasan yang sangat pesimis bahwa mungkin ada segmen-segmen radikal-ekstrem dalam masyarakat kita yang sewaktu-waktu dapat mengambil alih kekuasaan dan sebagainya, tetap ada alasan untuk optimis bahwa benang merah itu menunjukkan tendensi pluralisme yang cukup kuat. Itu bergantung pada banyak faktor, baik intern maupun ekstern. Termasuk ke dalam faktor ekstern ini adalah politik internasional dan politik HAM yang sewaktu-waktu bisa menekan kalau ada rejim militer atau rejim fundamentalis yang mengambil alih kekuasaan di suatu negara.

Jadi, benang merah itu akan memberi suatu harapan buat Indonesia bahwa ke depannya kita akan tetap bergerak pada jalur masyarakat majemuk, meskipun ini juga sebuah perjuangan. Orang-orang yang toleran dan berpikiran pluralis, yang sebenarnya bagian mayoritas dari masyarakat kita, harus semakin berani berbicara. Mereka sekarang adalah *the silence majority* yang harus mendapat akses lebih besar untuk berbicara dan menolak segala macam bentuk intoleransi dan monisme di negara ini. Inilah yang saya tulis dalam buku saya *Memahami Negativitas* (Kompas, 2005). Masyarakat kita itu mudah diprovokasi, karena banyak yang ter-

marginalisasi. Mereka yang termarginalisasi kemudian menjadi panik dan mudah terprovokasi dalam gerakan-gerakan massa. Dalam masyarakat kita, bahkan di dunia pada umumnya, ada kelompok yang dapat memanfaatkan situasi seperti ini dengan sangat baik.

Ada pihak-pihak dalam masyarakat kita yang secara cerdik dapat memprovokasi massa, dengan memainkan politik uang dan sebagainya, serta dapat menggerakkan semuanya dalam proses demokrasi, mungkin dengan semboyan pembersihan dari korupsi atau mencitrakan diri sebagai rejim yang jujur meski diarahkan oleh kepentingan ideologi tertentu. Situasi seperti itu juga yang terjadi dalam fasisme. Suatu bahaya yang juga tidak tertutup bagi masyarakat kita. Maka kelompok yang dapat memanfaatkan situasi itu akan muncul sebagai pesona baru, sebagai rejim yang cukup bersih namun keras, dan secara diam-diam akan membawa seluruh masyarakat ini pada ideologi yang diperjuangkannya. Itu bahaya dan kita harus terus mewaspadainya. Menurut saya, rejim monistis yang mungkin bersih dari korupsi itu, jika ada, akan berlangsung sementara saja. Setelah keuntungan yang diinginkannya diperoleh, mereka akan membawa masyarakat kepada maksud-maksudnya yang semula. Di situ kebebasan dan pluralisme dirugikan. Sekarang kita berada dalam situasi yang seperti itu. Menegangkan. Jadi, dua benang merah itu terdapat di negara kita. Kebebasan kita sebagai warga negara diberkati oleh pluralitas masyarakat kita, tetapi pada saat yang sama bahaya homogenisasi tetap mengancam, karena banyak kelompok dalam masyarakat kita masih dapat digerakkan sebagai "massa".

Wawancara dilakukan di Jakarta, 12 Juni 2007

Percakapan dengan

Fachry Ali

Fachry Ali, Direktur Lembaga Studi dan Pengembangan Etika Usaha Indonesia (LSPEUI). Ia memperoleh gelar MA dari Monash University, Australia. Ia juga pernah aktif di LP3ES.

Semua gagasan yang terkandung dalam Pancasila terlahir dari agama, apapun agamanya. Karena itu proses yang menempatkan hak agama dan non-agama secara terpisah membutuhkan waktu yang sangat panjang. Sehingga sampai beberapa dekade ke depan sekularisasi di negeri ini belum bisa berjalan alamiah. Harus diakui, pertumbuhan negara kita tidaklah kaya gagasan, kecuali yang tersedia dari agama-agama yang ada. Sedangkan langgengnya suatu agama lantaran kemampuannya memberi inspirasi bagaimana seharusnya dunia ini ditafsir dan bagaimana menstrukturkan sistem tingkah laku dalam menyikapi realitas. Karenanya, di tengah kehidupan bangsa yang beragam, harus tetap menjaga sikap kritis dan kesejatian kita sebagai rakyat. Maka, toleransi yang bersumber dari sikap etik, yang merupakan kata hati dan saripati agama, sangat penting ditanamkan.

Bagaimana pandangan Anda mengenai sekularisme? Apakah perlu dibedakan antara sekularisme, sebagai ideologi, dan sekularisasi, sebagai proses, sebagaimana pernah ditulis oleh Nurcholish Madjid?

Memperbincangkan gagasan tersebut sangat tergantung bagaimana kita memaknainya. Sekular yang dimaksudkan dalam pengertian Cak Nur adalah sekularisasi. Sekularisasi merupakan sebuah proses di mana orang diminta untuk menempatkan di mana hak agama dan di mana hak non-agama. Gagasan Cak Nur ini sebenarnya lebih merupakan sebuah usaha mendekonstruksi sistem pemikiran keagamaan yang sudah mapan pada waktu itu, yaitu ketika banyak hal-hal yang seharusnya tidak terlalu *urgen* disinggungkan dengan agama justru mengalami proses peng-agama-an. Yang paling konkret dicontohkan, misalnya, menjadikan partai sebagai barometer keislaman. Orang yang masuk ke dalam partai Masyumi atau NU dianggap telah beragama Islam secara benar atau berhak dipanggil sebagai aktivis Islam. Sedangkan mereka yang di luar itu, walaupun Muslim, tidak berhak menyandang predikat keislaman dalam perjuangan, karir, dan seterusnya.

Sekularisasi Cak Nur mengarah kepada pembetulan atau koreksi konseptual tentang apa yang dimaksud sebagai agama dan non-agama. Sebab apa yang dilakukan oleh para pengusung dan aktivis partai Islam lebih bersifat politis, dalam pengertian bahwa mereka yang beragama Islam, yang bergerak di luar institusi-institusi keislaman, berhak menyatakan diri sebagai Muslim dan di atas segala-galanya absah sebagai Muslim.

Sekularisasi Cak Nur berkaitan juga dengan proses desakralisasi, bukan saja atas tempat-tempat keramat, melainkan juga tokoh-tokoh yang dianggap suci. Para pemimpin agama, di dalam konsep sekularisasi ini, tidak secara otomatis menjadi tokoh paling suci,

paling tidak berdosa, melainkan harus tetap dianggap sebagai manusia biasa. Juga tidak ada tempat-tempat yang lebih suci atau keramat ketimbang tempat lainnya. Semua tempat pada dasarnya sama.

Untuk konteks Indonesia, pemisahan negara dan agama masih tidak dimungkinkan, karena sangat terbatasnya persyaratan-persyaratan sumber daya gagasan. Jika tanpa agama, Anda mau mendirikan atau menjalankan negara ini dengan menggunakan sumber gagasan apa? Paling mengambil dari gagasan Barat seperti demokrasi. Tetapi untuk gagasan tentang keadilan, dari mana mau Anda ambil kalau bukan dari agama? Negara kita tumbuh memang tidak kaya dengan gagasan, kecuali dengan tawaran dari agama-agama yang ada. Karena itu, agama tetap ada karena dia memberikan inspirasi harus bagaimana dunia ini kita tafsirkan dan bagaimana kita menstrukturkan sistem tingkah laku dalam memperlakukan dunia. Artinya bagaimana Anda melihat diri Anda, bagaimana Anda melihat alam dan orang lain, baik sebagai individu maupun kelompok, dan bagaimana Anda melihat orang-orang yang sama atau orang-orang yang berbeda pandangan dan agamanya, maka seluruh sumber gagasan atau cara pandang itu berasal dari agama.

Inti sekularisasi dalam pengertian Cak Nur tersebut adalah penggabungan dari dua hal. *Pertama*, Wahhabisme. Gagasan sekularisasi Cak Nur berakar langsung pada jantung keislaman, yaitu Wahhabisme. Sebab Wahhabi dalam hal tertentu sangat sekular dalam berpikir. Makam Nabi, bagi kaum ini, tidak boleh ada, sebab kalau ada akan dikeramatkan oleh orang-orang terutama umat Muslim. *Kedua*, sebagai konsekuensi terjadinya pertemuan antara gagasan sekularisasi Cak Nur dengan gagasan Barat, perihal *the idea of progress,* yang menempatkan manusia pada status yang dominan (subyek) dan alam sebagai obyek. Maka, karena

alam diposisikan sebagai obyek, alam boleh diperlakukan bagaimanapun juga, sepanjang perlakuan itu membantu tercapainya survivalitas manusia.

Sekarang, di dalam konteks yang dikembangkan oleh kaum intelektual dan para pemikir agama, sekularisme sebenarnya lebih dipahami sebagai pemisahan antara agama dan negara. Tuntutan pembubaran MUI, misalnya, atau ramainya protes terhadap perda-perda, yang secara sepihak dikatakan sebagai perda syariah dan seterusnya, adalah sebuah usaha untuk memisahkan antara agama dan negara. Jadi, demikianlah sekularisasi atau sekularisme yang saya pahami sebagaimana terpantul dari tuntutan-tuntutan para aktor *civil society* sekarang ini.

Pertanyaannya, apakah hal itu mungkin secara antropologis maupun sosiologis? Apakah mungkin agama dipisahkan dari negara di dalam konteks sejarah politik Indonesia? Kalau kita lihat kecenderungan sekarang, mengapa Aa Gym, Zaenuddin MZ dan kiai-kiai muda itu bermunculan, karena pada dasarnya sebagian besar masyarakat kita tidak mau bersusah payah untuk mencari sendiri pemahaman agamanya. Yang mereka butuhkan adalah tuntunan. Makanya ketika muncul pendakwah-pendakwah baru selalu diikuti dengan munculnya para pengikut. Yang mereka inginkan adalah semacam adanya *division of labour.* Sebagai contoh, baiklah saya bekerja dalam bidang yang selama ini saya tekuni, apakah pedagang, kaum profesional, dosen, politisi dan seterusnya, tetapi untuk urusan agama saya akan menyerahkan kepada orang yang memang secara khusus mempelajarinya. Inilah alasan *pertama* kenapa sulit melakukan pemisahan antara agama dan negara, khususnya dalam konteks Indonesia.

Alasan *kedua*, karena ada unsur *spiritual sanction*s, sangsi-sangsi dan persetujuan-persetujuan dalam persoalan keagamaan. Pada umumnya masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan untuk tidak terlalu masuk ke dalam persoalan agama karena mereka takut. Sebab, ada konsep surga dan neraka. Konsep ini merupakan konsep baku di tengah masyarakat, bukan hanya umat Islam, tetapi juga Kristen dan sebagainya. Karena mereka takut tergelincir menyalahgunakan agama, yang karena itu akan masuk neraka, maka sebaiknya mereka tidak ikut campur ke dalam persoalan agama. Faktor-faktor inilah yang kemudian memunculkan tokoh-tokoh agama. Atau, inilah yang memberikan penjelasan kepada kita mengapa orang-orang seperti Zaenuddin MZ, Aa Gym dan sebagainya akan terus tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Contoh yang lebih menarik lagi adalah, sebagaimana saya saksikan di makam raja-raja Jawa, di Imogiri, saya melihat rakyat datang berduyun-duyun, naik tangga yang jumlahnya sangat banyak, lalu duduk di depan pintu gapura – padahal makam raja-rajanya itu masih sangat jauh – kemudian mereka berdoa. Jadi, secara antropologis maupun sosiologis, sebenarnya kebutuhan untuk penguatan spiritual masih sangat kuat sekali.

Bagaimana dengan konsep negara dan hubungannya dengan agama?

Di dalam konteks ini kita melihat bahwa konsep negara sebenarnya merupakan institusi asing di dalam pengalaman kolektif masyarakat kita. Hal ini terjadi karena mereka memang tidak secara langsung bersentuhan dengan negara. Oleh karena itu, mereka tidak begitu mengenal simbol-simbol negara modern. Dengan

kondisi seperti ini, maka yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana negara kemudian bisa dipahami dan melekat ke dalam sistem kognisi mereka. Jalan satu-satunya adalah melalui simbol-simbol yang mereka kenal, yaitu simbol-simbol agama. Di samping sikap masyarakat yang tampak asing dengan negara, celakanya kemudian negara juga memanfaatkan energi agama untuk melegitimasi kekuatannya, di mana pada saat yang sama juga menciptakan agamanya sendiri, yang disebut dengan *civic religion*.

Kalau Anda melihat upacara 17 Agustus, deru langkah orang baris-berbaris, menaikkan bendera, lalu presiden menerima bendera dari paskibraka, di tambah suasana upacara yang dibikin sehening mungkin dengan lagu-lagu pemujaan terhadap negara-bangsa, itulah perwujudan *civic religion*. Artinya, bahkan negara sekalipun membangun dan menggunakan simbol-simbol dari agama untuk membangun ritual tersendiri. Maka tidak heran jika pemisahan antara agama dan negara adalah pandangan yang dalam realitasnya masih sangat jauh.

Di negara-negara maju, seperti Amerika dan terutama Australia, karena saya sekolah di sana, saya lihat bahwa praktik sekularisasi itu dijalankan oleh negara dengan tidak mendukung seluruh hal yang berhubungan dengan agama, baik itu pelajaran agama, organisasi gereja, ataupun perkumpulan-perkumpulan lain yang berkaitan dengan aktivitas agama. Kebijakan-kebijakan negara juga bukan merupakan kebijakan yang menguntungkan salah satu agama. Makanya, kalau Anda lihat perdebatan seperti di Prancis tentang larangan penggunaan simbol-simbol agama, baik jilbab, salib atau kopiah orang Yahudi adalah salah satu bukti dari praktik sekularisasi.

Di sana, pada masyarakat Barat, sangat mungkin terjadi sekularisasi, walaupun pasti tidak ada yang sempurna. Anda lihat George Bush sendiri sangat terinspirasi oleh agama dalam kebijakan-kebijakannya, termasuk kebijakan untuk berperang. Tetapi secara umum, sejarah ekonomi atau lebih tepat sejarah kemanusiaan masyarakat Barat sudah sangat lama dan memberikan kesempatan yang jauh lebih luas untuk mengkonstruksikan sistem ideologi sekular. Karena sejak jatuhnya Roma pada awal abad masehi, sebagaimana kita ketahui, kekristenan meluas ke wilayah-wilayah Eropa. Lalu Roma sebagai pusat keagamaan menguasai seluruh aspek, baik ekonomi maupun politik dan aspek kehidupan lainnya. Begitupun raja-raja Eropa juga lebih mempersepsikan diri mereka sebagai wakil dari Roma ketimbang sosok yang mewakili "bangsa"-nya sendiri. Kemunculan sekte-sekte agama yang lantas menguasai panggung politik, pada saat itu, cenderung disikapi dengan menyingkirkan sekte atau agama yang berbeda. Penekanan terhadap anti-Yahudi juga habis-habisan dilakukan dan sangat mewarnai perjalanan sejarah Eropa. Intinya, yang terjadi di Eropa sejak abad ke-9, 10 atau 11, sampai habisnya masa Abad Pertengahan, adalah dominasi gereja yang sangat kuat.

Tuntutan pembubaran MUI, misalnya, atau ramainya protes terhadap perda-perda, yang secara sepihak dikatakan sebagai perda syariat dan seterusnya, adalah sebuah usaha untuk memisahkan antara agama dan negara. Jadi, demikianlah sekularisasi atau sekularisme yang saya pahami sebagaimana terpantul dari tuntutan-tuntutan para aktor *civil society* sekarang ini.

Kondisi seperti inilah yang kemudian melahirkan gejolak dan pemberontakan yang berkepanjangan. Namun demikian, pembe-

rontakan yang dilakukan sebenarnya bukanlah pemberontakan pemikiran, melainkan lebih pada pemberontakan atas cengkeraman agama terhadap sistem sosial, politik, maupun ekonomi yang sangat dominan dalam masyarakat Eropa pada saat itu. Dalam beberapa hal, sistem feodal juga mencerminkan adanya peranan agama dalam menstrukturisasi sistem kemasyarakatan. *Land lord* atau kaum bangsawan bukan hanya sebagai pemimpin politik atau hakim, tetapi sekaligus juga menjadi pemimpin agama dan pemilik tanah yang sangat luas, pemilik sumber daya ekonomi. Jadi pada sistem seperti itu, antara kepemimpinan agama dan kontrol terhadap ekonomi dan politik memiliki hubungan yang sangat kuat. Kalaupun kemudian mereka, masyarakat Eropa, melakukan pemberontakan kepada gereja, hal itu lebih dikarenakan adanya *specific historical course*, jalan sejarah yang sangat spesifik dalam pengalaman sejarah kemanusiaan masyarakat Eropa pada waktu itu, bersamaan semakin menguatnya otonomi manusia dengan munculnya temuan-temuan teknologi sebagai basis bagi perkembangan industrialisasi. Dari prakondisi inilah pemberontakan terhadap agama yang sekarang kita kenal dengan sekularisasi, mendapatkan pembenaran strukturalnya. Dari kasus Eropa tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa sebetulnya pemberontakan terjadi ketika kapital jauh lebih dominan menentukan sistem tingkah laku masyarakat secara kolektif, ketimbang yang lainnya.

Untuk Indonesia, sejarah negara modern kita sebenarnya sangat baru apabila diukur dari 17 Agustus 1945, hari kelahiran bangsa. Kalau kita ukur dari pertemuan antara Barat dan Timur, maka paling banter berumur sekitar 3 atau 4 abad. Meskipun demikian, persentuhan yang sudah mulai intensif, yang memunculkan sebuah masyarakat yang terdidik, masih sangat terbatas sekali. Kalau Anda

melihat sejarahnya, pada tahun 40-an, orang-orang yang terdidik secara Barat (modern) di Indonesia tidak sampai 25 ribu orang dari 70 juta penduduk Indonesia. Coba Anda bayangkan bahwa sebagian besar masyarakat kita menjelang kemerdekaan bangsanya, ternyata masih *uneducated*. Orientasinya masih pada kerajaan, jauh dari sistem *nation-state* seperti sekarang. Pada 1946 atau 1947, saya melihat gambar-gambar ulang tahun kemerdekaan kita, tampak terlihat jelas bahwa masih dominan masyarakat yang menganggap negara ini sebagai kerajaan yang dipimpin oleh seorang maharaja. Di situ terlihat ada orang dari Jawa Barat yang pergi ke Yogyakarta, sebagai ibu kota negara pada waktu itu, yang membawa hasil-hasil pertanian untuk diberikan kepada presiden Soekarno. Lalu mereka meyembah Soekarno seperti halnya dahulu, yakni upacara ketika pemberian upeti kepada raja. Baginya, Soekarno bukanlah presiden yang memimpin negara, tetapi lebih sebagai raja dari sebuah kerajaan.

> Buat saya, otentisitas keagamaan tetap harus dipertahankan. Sebab, agama adalah tempat kembali bagi orang-orang yang pernah berdiam di "rumah". Dalam pengalaman keagamaan saya, momen ritual seperti pembacaan *shalawat* dan sebagainya itulah di mana saya merasa kembali ke "rumah" saya, meski saya juga tahu bahwa itu hanyalah simbol-simbol. Saya tidak akan menyanyi *Jingle Bell* dan lain sebagainya, yang memang dari dulu tidak terdapat di "rumah" saya.

Kalau Anda lihat penelitian UIN Jakarta (PPIM UIN Jakarta) yang dipresentasikan baru-baru ini, hasilnya memperlihatkan bahwa responden ketika ditanya apakah Anda lebih merasa sebagai orang Indonesia atau seorang Muslim, sebagian besarnya masih mengata-

kan lebih merasa sebagai Muslim, baru setelah itu sebagai orang Indonesia. Sementara ketika ditanya akan lebih patuh kepada pemimpin agama atau presiden, mereka menjawab ulama.

Jadi, maksud saya, proses sekularisasi itu mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih panjang, sampai beberapa dekade ke depan. Dan sekularisasi di Indonesia belum bisa berjalan secara alamiah.

Yang justru akan terjadi adalah kesimpangsiuran persepsi. Apa yang terjadi di Turki, sebagai ikon negara yang sebagian besar penduduknya Muslim dengan sistem negara yang sekular, sekarang-sekarang ini sangat membingungkan. Tulisan Mahmud Ayyub, di *The Jakarta Post*, menyatakan bahwa kaum sekular di sana telah berkubu kepada kaum militer maupun *the establishment*, yang berhadapan dengan kekuatan-kekuatan baru yang dimotori oleh partai-partai Islam, yang berkiblat pada sistem ekonomi pasar dan mengarahkan atau menyesuaikan politiknya kepada sistem global. Di dalam konteks ini, kita melihat sesuatu yang terbalik. Orang-orang yang *vested interest,* yang mengaku sebagai benteng sekular, pada dasarnya adalah orang-orang yang berpikiran sempit. Karena kepentingan-kepentingannya terjepit, mereka kemudian mengatakan bahwa sekularisasi sedang berada dalam bahaya. Padahal dengan sekularisasi, mereka tengah mempertahankan struktur sosial-ekonomi yang menguntungkan mereka dan menolak perubahan yang lebih besar.

Sekularisme atau sekularisasi tidak hanya bermakna separation*, pemisahan, ia juga diartikan* differentiation*, pembedaan, sebagaimana yang terjadi di beberapa negara Eropa. Bagaimana pendapat Anda?*

Untuk konteks Amerika, sekularisme lebih merupakan anomali modernisasi. Bahwa setidak-tidaknya sepanjang partai Republik yang berkuasa, maka semakin modern masyarakat Amerika, semakin mereka beragama. Sementara itu, Eropa sudah sekular "habis-habisan." Di dalam beberapa hal, Australia juga mirip dengan Eropa, di mana agama sudah tidak ada fungsinya lagi. Agama tidak lagi menjadi inspirasi secara resmi keputusan-keputusan politik di tingkat negara. Dengan mengatakan seperti itu, sebenarnya bukan berarti bahwa mereka tidak punya etika. Kesan saya melihat negara maju yang sekular di Eropa adalah bahwa di sana telah muncul etika publik yang telah menjadi substitusi atau pengganti atas agama. Hal yang sama sulit kita temukan pada masyarakat Amerika. Anda akan melihat bahwa penyerangan terhadap Iraq justru dianggap sebagai bagian dari kewajiban keagamaan yang mereka lakukan. Inilah anomali. Oleh karena itu, orang-orang Amerika melakukan kritik keras terhadap Eropa. Pertama-tama tentu saja karena sikap Eropa yang tidak mendukung sikap Amerika dalam melakukan penyerangan ke Iraq, yang kemudian berbuntut pada kecaman mereka terhadap sekularisasi Eropa. Saya baca di majalah *The Economist* bahwa betapa Amerika telah mengorbankan anak-anak terbaik mereka pada Perang Dunia ke-2, dalam mempertahankan kedaulatan negara-negara Eropa dalam melawan fasisme dan Nazisme di Italia dan Jerman. Tetapi mana bantuan mereka (Eropa) untuk perang Irak, terlebih mereka kini sudah tidak meng-

Proses sekularisasi itu mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih panjang, sampai beberapa dekade ke depan. Dan sekularisasi di Indonesia belum bisa berjalan secara alamiah. Yang justru akan terjadi adalah kesimpangsiuran persepsi.

anggap lagi adanya Tuhan. Gereja-gereja sudah dialihkan menjadi, kadang-kadang, tempat disko, klub malam dan sebagainya, yang sama sekali jauh dari nilai-nilai agama.

Untuk konteks Indoenesia, pemisahan negara dan agama masih tidak dimungkinkan, karena sangat terbatasnya sumber daya gagasan. Jika tanpa agama, Anda mau mendirikan atau menjalankan negara ini dengan menggunakan sumber gagasan apa? Paling mengambil dari gagasan Barat seperti demokrasi. Tetapi untuk gagasan tentang keadilan, dari mana mau Anda ambil kalau bukan dari agama? Negara kita tumbuh memang tidak kaya dengan gagasan, kecuali dengan tawaran dari agama-agama yang ada. Karena itu, agama tetap ada karena dia memberikan inspirasi harus bagaimana dunia ini kita tafsirkan dan bagaimana kita menstrukturkan sistem tingkah laku dalam memperlakukan dunia. Artinya bagaimana Anda melihat diri Anda, bagaimana Anda melihat alam dan orang lain, baik sebagai individu maupun kelompok, dan bagaimana Anda melihat orang-orang yang sama atau orang-orang yang berbeda pandangan dan agamanya, maka seluruh sumber gagasan atau cara pandang itu berasal dari agama.

Negara Indonesia, yang muncul karena revolusi, pasti bersifat dadakan. Satu hari sebelum 17 Agustus 1945, tentunya, Indonesia belum ada. Begitu diproklamirkan, Indonesia ada, tanpa ada sebuah gagasan atau formulasi gagasan yang dianut sebelumnya, kecuali kata merdeka. Akhirnya, bagaimana kita mengorganisasikan kekuasaan *kecuali* harus kita pinjam pada tradisi orang lain. Sehingga negeri ini diberi nama republik – yang turunannya kemudian adalah parlemen, presiden dan wakil presidennya dan seterusnya. Jadi, republik itu sendiri bukan istilah Indonesia. Bagaimanapun harus diakui, di luar itu semua, sebenarnya kekayaan gagasan kita

tidak ada. Kalau demikian, dari mana kita menggali etika publik kalau bukan dari agama?

Bukankah awal terbentuknya Indonesia sebagai sebuah negara melalui perdebatan panjang dan alot, misalnya, melalui PPKI?

Itu sebenarnya sama sekali tidak panjang. Terlebih lagi lembaga-lembaga itu terlahir lebih karena janji Jepang. Sebelumnya apakah motif orang untuk berontak? Tak lain adalah agama. Makanya, Clifford Geertz mengarang sebuah artikel yang berjudul *The Javanese Kijaji; the Changing Role of Cultural Broker*. Dia mengatakan bahwa ketika bangsa Indonesia baru bangkit, dengan kelahirannya yang secara tiba-tiba, masyarakat tidak kenal dengan apa yang dinamakan negara secara konseptual. Sehingga memaksa kiai untuk memerankan diri sebagai *cultural broker,* sebagai mediator yang menjembatani antara kelahiran negara yang begitu modern dengan massa yang *uneducated.* Negara tidak punya apa-apa; *qua* simbol, *qua* gagasan, *qua* sumber-sumber etik. Kita hanya mempunyai agama. Maka kemudian kita membutuhkan dan mengambil pandangan-pandangan atau gagasan-gagasan keagamaan untuk membangun negara kita supaya dikenal dan *recognized*, diakui.

Kalau saya ceritakan tentang Aceh, di sana dapat dikatakan bahwa Indonesia itu lahir di masjid ketika Teungku Muhammad Daud Beureueh, pemimpin Islam di Aceh, mengatakan siapa saja yang gugur mempertahankan kemerdekaan berarti dia (mati) *syâhid*. Itu gagasan dari mana kalau bukan dari agama. Pidato Bung Tomo yang kita dengar pada 10 November 1945, yang memakai pekikan *Allâhu akbar* segala, dari mana gagasannya, kalau bukan dari agama. Lalu sekarang orang seenaknya saja mau memisahkan

agama dari negara. Itu artinya mau enak sendiri dan, bagi saya, itu tidak masuk akal.

Gagasan seperti itu adalah upaya menempelkan sesuatu yang asing ke dalam struktur tradisi kita, yang lain, yang dirasa tidak cocok. Lantas kita katakan semuanya salah, yang benar adalah gagasan yang asing itu.

Agama dalam konteks sekularisasi berperan sebagai inspirasi bukan aspirasi. Artinya, konsep-konsep umum yang dimiliki oleh agama, seperti konsep tentang keadilan dan kesetaraan, dalam sekularisasi, kemudian diturunkan menjadi bukan lagi dalam bahasa agama, melainkan dalam bahasa publik yang sekular. Bagaimama menurut Anda?

Sekarang saya mau tanya: dalam praktiknya yang merumuskan undang-undang itu siapa? Tentunya DPR. Makanya anggota DPR kemudian disebut *law maker*, pembuat undang-undang. DPR dipilih oleh rakyat. Sebelumnya, ketika berkampanye, yang dijual oleh anggota-anggota yang sekarang terpilih adalah agama, karena konstituennya adalah masyarakat yang berbasis agama. Hal yang sama bisa dilihat pada pemilihan baik presiden, gubernur, maupun pimpinan-pimpinan lainnya. Calon yang akan maju pada pemilihan gubernur Jakarta, misalnya, mendadak memakai sorban dan perlengkapan baju Muslim lainnya ketika hendak menemui konstituennya. Hal itu dilakukan karena dia sadar bahwa para calon pemilihnya merupakan masyarakat yang masih menjadikan agama sebagai basisnya. Lantas setelah terpilih, kalau keputusan yang diambil kemudian ternyata *radically different* dengan aspirasi rakyat yang sudah memberikan wewenang kepadanya, misalnya dengan

membuat undang-undang yang sama sekali di luar harapan mereka, apakah tidak akan membuat *discrepancy?*

Oleh karena itu, yang harus dipahami oleh mereka, para pembela sekularisasi, adalah sejarah sosialnya. Sejarah itu memberitahukan bahwa kita tidak bergerak dari nol. Sekarang cobalah Anda baca *Babad Diponegoro*. Maksud dan tujuan dia memberontak terhadap penjajah tak lain adalah sebagai upaya melawan orang kafir. Pemberontakan para petani di Banten juga demikian. Pada dua contoh kasus itu, seandainya tidak ada gagasan agama, pastilah semuanya akan menyerah begitu saja kepada penjajah. Hanya karena ada Islam yang menolak keberadaan penjajah yang kafir, sehingga terjadilah perlawanan. Muncullah apa yang dinamakan *boundary,* batas antara kita dan mereka. Sekali lagi saya katakan bahwa agama terlalu kaya untuk memberikan inspirasi tentang bagaimana realitas itu diinterpretasikan. Hal ini dapat menjelaskan kenapa kemarin SBY harus datang juga ke tempat seorang habib yang meninggal, dengan memakai kopiah, sorban putih dan berpidato. SBY sebagai representasi dari *state* datang karena dia tahu membutuhkan konstituen yang percaya terhadap kekuatan agama. Karena itu konstituen memberi dukungan kepada SBY bukan dengan cek kosong. Sehingga, harus ada kebijakan-kebijakan negara yang menguntungkan mereka. Kalau tidak demikian, ia akan ditinggalkan.

Di dalam kehidupan kita, pluralisme itu terjadi, bahkan di dalam Islam itu sendiri. Karena itu, kita harus menerima adanya perbedaan pandangan semacam itu. Penerimaan perbedaan pandangan itu tentunya didasarkan pada sebuah etik publik yang berlaku di Indonesia, dan itu tetap berujung pada agama."

Apakah hal semacam itu bukan politisasi agama?

Secara struktural kebijakannya harus berjalan seperti itu. Sekarang, yang sebenarnya dibutuhkan dan perlu ditekankan adalah toleransi. Itu yang tadi saya katakan sebagai etika publik, yang sebenarnya bersumber dari agama juga. Yang harus ditekankan adalah bagaimana berhadapan dengan perbedaan, tetapi juga jangan dengan cara yang *norak,* jangan dengan cara memancing-mancing emosi orang. Kalau umat Muslim, misalnya, dikasih "pantat," seperti yang dilakukan oleh Inul Daratista, apakah mereka tidak akan marah? Kalau saya, sebagai orang beradab, akan tersingung, karena pantat adalah simbol dari penghinaan. Coba Anda lakukan itu kepada dosen Anda, pasti dia akan marah. Lantas kenapa "pantat" ini yang malah kalian bela? Sungguh sebuah hal yang sangat lucu. Inul yang tidak memberikan sumbangsih peradaban apapun, kalian bela. Ketika dia kasih "pantat", kalian bersorak. Ditaruh di mana otak kalian semua? Hal-hal seperti itulah yang harus dipikirkan oleh kaum sekular.

Bukankah founding fathers *negara kita sendiri sepakat untuk tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama, sekaligus juga tidak secara eksplisit menjadikan Indonesia sebagai negara sekular? Alternatifnya, rumusan yang diberikan oleh para pendiri negara, adalah Pancasila.*

Pertanyaannya, kalau tidak ada agama bisakah ada Pancasila? Apakah tanpa agama akan terpikirkan oleh para pendiri negara ini tentang gagasan keadilan sosial, musyawarah dan lain sebagainya? Semua itu diambil dari agama.

Sebelum Islam datang ke Indonesia, pada masa-masa kerajaan sudah ada nilai-nilai keadilan sosial, musyawarah, bahkan pemilihan ketua suku dilakukan berdasarkan suara rakyat, dan sebagainya.

Itu betul. Tetapi, semua gagasan Pancasila terlahir dari agama, apapun agamanya. Taruhlah agamanya Hindu, karena dia lebih awal daripada Islam, sungguhpun demikian, tetap namanya adalah agama. Maksud saya, mereka, kaum sekular, berpikirnya ahistoris. Tiba-tiba saja karena di Amerika seperti ini, kita harus begini. Tanpa melihat komposisi dari kekuatan masyarakat kita yang terbentuk oleh sejarah yang khusus. Sangat susah untuk melakukan standarisasi pada semua hal. Kalau selera mungkin bisa, seperti apa yang kita kenal sekarang dengan istilah *McDonaldization*. Kamu bisa makan Mc Donald sekaligus gudeg, nasi Padang, dan sebagai-nya pada saat yang sama. Tetapi orang yang makan Kentucky dan sebagainya, jalan pikirannya tetap saja agama. Jadi, maksud dari seluruh uraian tadi, saya hendak betul-betul menganjurkan, khususnya kepada kaum sekular, agar berpikir secara historis. Karena demikian itulah fakta kita.

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa seruan tentang toleransi, dan macam-macam pandangan yang moderat dan liberal, bagaimanapun harus disampaikan tidak dengan cara meledek, menyindir atau cara semacamnya.

Lantas, apakah Anda ingin mengatakan bahwa Indonesia sebagai negara agama?

Kalau kita perhatikan dari sejak berdirinya negara ini sampai sekarang, sama sekali tidak ada yang dinamakan negara agama. Bagaimanapun negara kita – yang, konon, bukan negara agama dan bukan negara sekular – berasal dari rumusan yang dibangun oleh Orde Baru. Karena itu, bagi saya, sebenarnya hal-hal semacam itu bukan sesuatu yang harus diperdebatkan lagi. Yang perlu dilakukan adalah toleransi. Toleransi harus berangkat dari sikap etik. Sikap etik adalah kata hati.

Kalau Anda menyaksikan di tv dan media lainnya yang memberitakan tentang rumah dan tempat beribadah orang Ahmadiyah diserang oleh sekelompok masyarakat di Mataram dan di beberapa daerah lainnya, kata hati kita pasti akan menolak sikap semacam itu. Kita akan mengatakan bahwa itu adalah tindakan yang salah dan bukan merupakan tindakan yang didasarkan pada agama, karena telah merusak nilai-nilai kemanusiaan. Kalau Anda melakukan pengeboman di pasar, seperti yang dilakukan oleh Amrozi dan kawan-kawan, maka tidak bisa mengatasnamakan Tuhan untuk membenarkan perbuatannya. Pada titik itulah perlunya mengembangkan sikap toleran dalam kehidupan. Tetapi jangan pula berharap bahwa toleransi itu akan *taken for granted* berjalan. Sebab pada dasarnya mereka, yang sekarang bersikap kurang atau tidak toleran itu, juga melihat ketidakadilan di tingkat dunia. Siapa yang mau mengadili Amerika? Urusan apa Amerika datang ke Irak dan Afghanistan? Lantas, kenapa orang-orang sekular tidak memprotes Amerika beramai-ramai? Apakah karena akan mengganggu harmonisasi agama di Indonesia sendiri? Bukankah mereka tidak melakukan protes itu? Sebaliknya, yang mereka serang malah MUI.

Bukankahkah pada 2003, semua masyarakat, termasuk kalangan liberal-sekular juga melakukan protes atas perang yang dilakukan Amerika di Afghanistan dan Irak?

Demonstrasi ada, tapi uangnya kalian terima juga. *Point* yang ingin saya katakan untuk hal-hal yang telah saya sebutkan di atas adalah bahwa harus ada sikap kritis dari kita sebagai akademisi. Itulah yang dikritik oleh Harry J. Benda terhadap pendekatan Herbert Feith, ketika dia menulis *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia.* Di situ Feith mencoba menerapkan sebuah pendekatan atau kerangka penglihatan yang asing. Lalu Feith, sebagaimana kata Benda, mengatakan bahwa demokrasi Indonesia sudah gagal. Padahal, kata Benda, lapisan dasar masyarakat juga merupakan sistem bernegara yang dipakai oleh Indonesia, di mana itu semua adalah sebuah sejarah pembentukan kemasyarakatan yang berbeda dari Barat, yang tampilannya seperti kita sekarang ini. Lihat saja, begitu demokrasi muncul, yang bermunculan adalah partai-partai Islam. Pertanyaannya, dari manakah mereka muncul? Bagi saya, mereka tetap ada, bahkan pada masa Orde Baru pun sebenarnya ada, hanya saja tidak diberi ruang gerak oleh pemerintah. Itu yang harus Anda lihat dalam konteks seperti ini. Kritik di atas yang saya maksudkan adalah dilakukan secara logis. Kalau tidak, kita hanya menjadi "pion-pion" mereka saja.

> Hemat saya, substansi dari liberalisasi pemikiran harus diarahkan atau mencerminkan apa yang pada esensinya dibutuhkan oleh masyarakat lintas kelas.

Termasuk tentang Pancasila yang sebenarnya tidak ada yang tidak cocok dengan agama. Sekarang apakah Pancasila bekerja?

Dulu Pancasila bekerja karena dukungan kekuasaan. Kita semua dulu mengikuti penataran P4 sebelum masuk SLTP atau SLTA. Praktik seperti itu tak lain karena kekuasaan. Yakni kekuasaan yang kemudian berpretensi untuk melakukan penyeragaman penafsiran atas Pancasila. Oleh karena itu, menurut saya, agar Pancasila tetap diakui sebagai dasar negara, harus dibiarkan untuk diinterpretasikan secara agama, karena memang agamalah yang mereka kenal. Kalau Anda membiarkan dia sebagai sesuatu yang sekular, maka akan asing di dalam sistem kognisi masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila tidak akan berjalan, kecuali jika Anda paksakan lagi.

Jika Pancasila dipahami secara sekular, apakah menurut Anda ia menjadi kurang memadai sebagai dasar negara?

Saya tidak tahu apakah sekarang ini Pancasila berlaku atau tidak. Buktinya sekarang perekonomian kita menggunakan sistem ekonomi pasar, bukan ekonomi Pancasila. Bagi saya, sesuatu atau sistem yang dikatakan berlaku atau berjalan haruslah sistem yang dibangun dari gagasan yang menggambarkan struktur sistem tingkah laku kita secara individual maupun kolektif. Lalu keputusan-keputusan sosial, politik, dan ekonominya semua berlangsung atau berasal dari gagasan yang sama. Pada tingkat gagasan dan praktiknya sekarang ini, apakah negara ini sudah seperti itu? Apakah Undang-Undang Penanaman Modal yang baru disahkan oleh DPR, yang memberikan kesempatan kepada investor asing untuk bisa menguasai lahan Indonesia selama seratus tahun dan kalau masih kurang masih ditambah 2x25 tahun lagi, artinya bisa 150 tahun, adalah cerminan dari ideologi Pancasila? Pada hemat saya, sama sekali bukan. Karena aturan tersebut secara struktural

tidak punya akar, bahkan di dalam susunan keputusan-keputusan yang bersifat kenegaraan. Jadi, sistem berpikir kita yang harus kita lihat kembali secara kritis.

Anda hampir selalu menyimpulkan bahwa kalau mau membicarakan Indonesia maka tidak bisa lepas dari agama. Bukankah sebuah negara seperti Indonesia tidak hanya cukup diurusi memakai pendekatan agama?

Memang tidak harus negara ini selalu dikaitkan dengan agama.

Nilai-nilai seperti toleransi dan sebagainya diharapkan akan mampu menopang demokrasi yang sedang kita bangun. Artinya, toleransi kita pahami bersama sebagai penyamarataan bagi semua warga negara, komunitas, agama, dan bahasa, sehingga terwujud masyarakat yang demokratis. Bagaimana tanggapan Anda?

Bagi saya pemikiran seperti itu akan menjebak diri sendiri. Sekarang, yang mayoritas di Indonesia adalah Islam, dan dalam demokrasi, yang menang adalah yang mayoritas. Makanya, sebagaimana saya katakan tadi, lagi-lagi, yang perlu diajarkan di sini adalah toleransi. Toleransi di sini artinya bagaimana orang melihat perbedaan sebagai gejala alamiah. Pertanyaannya, apakah itu tidak diajarkan oleh agama? Pasti di ajarkan. Oleh karenanya interpretasi kita terhadap realitas juga harus obyektif.

Dulu, ketika ICMI muncul, kaum sekular pada ribut. Sekarang kamu cari di negeri lain, adakah Beni Moerdani-nya Islam di Filipina, misalnya? Ada atau tidak menteri di Filipina yang ber-

agama Islam? Makanya, daripada mendera orang Islam Indonesia terus-menerus seperti itu, bikinlah perbandingan: di mana ada orang minoritas menguasai ekonomi secara mayoritas kalau bukan di Indonesia. Apakah fakta seperti itu menunjukkan masyarakat Indonesia tidak toleran? Meski mungkin juga karena kebodohan, misalnya. Siapa yang menguasai panggung wacana publik? Siapa yang mempunyai koran-koran besar dan stasiun-stasiun televisi di negeri ini? Koran Islam tingkat nasional di Indonesia cuma ada dua buah, yaitu *Republika* dan *Pelita*, yang saya yakin kalian, orang-orang sekular, tidak membaca. Kalian pasti hanya membaca *Kompas*. Lihatlah di Filipina, adakah orang Islam yang mempunyai koran? Itu yang saya maksud dengan berpikir kritis tadi. Jangan hanya mencuci otak kita dengan pandangan dan nilai-nilai baru tanpa ada sikap kritis yang memadai. Di dalam kehidupan kita pluraslisme sudah secara otomatis terjadi, bahkan di dalam Islam sendiri. Karena itu, kita harus menerima adanya perbedaan pandangan semacam itu. Penerimaan perbedaan pandangan itu tentunya didasarkan pada sebuah etika publik yang berlaku di Indonesia, dan itu tetap berujung pada agama.

Faktanya, sikap tidak toleran justru seringkali muncul dari kelompok mayoritas keagamaan terhadap kelompok minoritas, seperti komunitas Eden, Ahmadiyah, dan pengrusakan terhadap rumah ibadah kelompok minoritas.

Persis pada titik itulah toleransi harus diajarkan. Tetapi bahwa orang mau memperjuangkan sesuatu untuk masuk menjadi keputusan negara, sepanjang itu dilakukan secara demokratis, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Soal toleransi ini memang menjadi problem

paling besar di negara kita. Makanya, seperti tadi telah saya katakan, cara untuk tetap melestarikannya adalah dengan tidak membuat panas perasaan orang lain. Mas Dawam saya kritik waktu acara peluncuran bukunya, karena dia berkata "asal saya tidak disebut Muhammadiyah". Kalau sikap orang-orang atau kelompok yang konon menjunjung toleransi dan pluralisme saja seperti itu, lantas kapan toleransi benar-benar dapat diwujudkan, sementara kelompok yang ingin mendiseminasikan toleransi sendiri tidak toleran. Dalam al-Quran disebutkan panggillah mereka dengan panggilan hikmah, *bi al-hikmah wa al-maw'izhah al-hasanah*. Nilai-nilai toleransi seperti itu sudah ada di dalam Islam, masa mau dibuang juga.

Substansi dari gagasan keagamaan yang baru, seperti Islam Liberal atau apapun namanya, itu seharusnya jangan terjebak pada kecenderungan kelas di mana kita berada. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah jangan menghabiskan energi kita hanya untuk melayani pertentangan-pertentangan pemikiran, sementara tidak memperhatikan dan mencurahkan energi kita untuk pemberantasan kemiskinan, penegakan keadilan ekonomi dan lain sebagainya, yang lebih esensial.

Bagaimana sikap intoleran yang ditunjukkan oleh sebagian umat Muslim?

Coba Anda lihat di India atau Amerika; coba baca *Catatan Pinggir* Goenawan Mohamad hari ini (Edisi 21-27 Mei 2007) tentang seorang pendeta Kristen yang fundamentalis. Ternyata intoleransi dan fundamentalisme bukan hanya terjadi pada orang Islam saja. Jadi, janganlah selalu mendera orang Islam Indonesia seperti itu.

Akhir-akhir ini banyak aksi dan tuntutan memberlakukan syariat Islam, bahkan di beberapa daerah sudah sampai tingkat peraturan daerah, meskipun tidak disebut sebagai perda syariah. Menurut Anda apakah kecenderungan seperti ini sebagai pertanda makin menguatnya tuntutan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam?

Kalau Anda lihat sejarah, sebenarnya yang berjuang untuk kemerdekaan itu siapa? Yang paling banyak tentunya orang Islam. Mereka melakukan semua itu atas nama agama. Masalahnya, mereka yang berjuang atas nama agama itu adalah orang-orang yang *uneducated*, karena memang didiskriminasikan oleh Belanda. Pada waktu itu, semua yang memiliki kedekatan dengan Islam disingkirkan. Bacalah buku *Heather Sutherland* yang menceritakan bagaimana orang-orang yang dekat dengan kiai tidak bakal bisa menjadi bupati. Orang-orang seperti inilah yang berjuang untuk negeri ini dengan mengatasnamakan agama. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menulis dan sebagainya. Oleh karena itu, pada periode berikutnya, orang-orang yang mendapat pendidikan Belandalah yang merumuskan negara. Coba saat itu diberi opsi untuk melakukan referendum, mungkin hasilnya bisa lain. Karena para *founding fathers* kita kebanyakan memperoleh pendidikan dari Belanda, maka dapat dipahami jika kemudian yang menuntut tujuh kata dalam Piagam Jakarta, yang merupakan orang Islam, dibujuk oleh Hatta untuk tidak usah memasuk-kannya ke dalam dasar negara. Fakta ini juga seharusnya diungkap, supaya kita bisa jernih melihatnya. Demikian kira-kira konteks sejarahnya.

Dari awal saya sudah mengatakan bahwa toleransi yang harus terus dibangun. Saya sama sekali tidak setuju dengan orang yang melakukan pengrusakan dan penghancuran terhadap fasilitas

agama lain atau fasilitas umum. Yang paling dramatis seperti penyerangan rumah-rumah orang Ahmadiyah. Bagi saya, polisi memang harus menangkap mereka, karena itu tindakan yang sama sekali bukan persoalan agama. Itu sama sekali bukan tindakan *islami*. Justru negara wajib melindungi warga negaranya apapun latar belakang agamanya.

Yang perlu diperhatikan adalah bahwa seruan tentang toleransi, dan macam-macam pandangan yang moderat dan liberal, bagaimanapun harus disampaikan tidak dengan cara meledek, menyindir atau cara semacamnya. Makanya, saya tidak setuju dengan si Oneng (Rieke Dyah Pitaloka) yang sangat meledek orang-orang yang mendukung RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Mereka yang diledek itu juga tahu, karena di rumahnya juga terdapat alat untuk mengakses informasi seperti tv dan lain sebagainya. Yang dilakukan kebanyakan orang-orang yang sekular terhadap kalangan Islam yang tidak disetujuinya bukan dengan cara mendamaikan, bukan *al-maw'izhah al-hasanah.* Cara yang lebih baik untuk mengkampanyekan toleransi tetap harus santun. Kalau tidak, sama saja dengan membuang bensin dalam api yang sudah terbakar. Saya mengatakan kepada kawan-kawan yang menolak RUU APP, kalau kalian turun dengan cara-cara seperti itu, maka yang muncul nanti adalah reaksi balik, yaitu kemarahan dari pihak yang merasa ditentang. Jadi, hendaknya kalian turun ramai-ramai menentang pornografi dan RUU APP dengan santun, pasti akan lain ceritanya. Menurut saya, yang menjadi problem di sini sebenarnya adalah diplomasi.

Bagaimana pandangan Anda tentang liberalisme? Dan apakah liberalisme yang masuk ke dunia Islam di Indonesia bersifat produktif atau malah sebaliknya?

Kalau kita lihat sejarahnya, sebenarnya gerakan kaum Padri, atau gerakan Persatuan Ulama Seluruh Aceh yang berdiri pada 1939, misalnya, adalah pemberontakan terhadap dominasi adat. Pemimpin-pemimpinnya yang menjadi aktor utama dalam gerakan perlawanan terhadap penjajah pada saat itu adalah kaum liberal. Dengan pengertian bahwa liberal pada waktu itu lebih sebagai usaha untuk melepaskan diri dari kungkungan adat dan tradisi. Makanya Snouck Hurgronje cenderung mengatakan bahwa mereka adalah kaum perusak, karena selalu berusaha mentransformasikan masayarakat.

Pada konteksnya, gerakan pembaharuan yang mereka lakukan sudah sangat produktif. Masalahnya kemudian, gerakan pembaharuan itu mengalami institusionalisasi, seperti Muhammadiyah, dan dalam beberapa hal juga Nahdlatul Ulama (NU). Institusionalisasi inilah yang kemudian memunculkan elite-elite tersendiri, yang mengambil otoritas sebagai penafsir realitas berdasarkan pandangan-pandangan keagamaan yang ada. Di situ kebekuan muncul.

Proses pemapanan pandangan yang dikangkangi oleh elite-elite tadi inilah yang menyebabkan gagasan-gagasan keagamaan yang sebelumnya transformatif lantas menjadi fosil. Cak Nur, dalam konteks ini, adalah pemberontak paling awal dengan gagasan sekularisasinya. Itulah kenapa kemudian Cak Nur yang tampil? Karena dia yang paling menguasai persoalan. Dialah, pada saat itu, yang menguasai baik persoalan keagamaan maupun perkembangan di luar agama. Dia bisa mengombinasikan keduanya secara bertanggung jawab. Kalau Anda tidak paham agama dan tiba-tiba mau menjadi liberal, bagaimana akan mempertanggungjawabkan persoalan itu secara etis. Makanya wajar atau menjadi

alamiah jika pemikir liberal, saya sebenarnya tidak setuju dengan istilah ini, jumlahnya sedikit.

Hal itu tak lain karena untuk mencetak orang seperti Cak Nur membutuhkan persiapan dan waktu yang cukup lama. Kecuali mereka yang terdidik seperti Ahmad Wahib, yang mengatakan bahwa setiap orang sebenarnya berhak untuk mempunyai mazhab sendiri, dalam konteks bahwa individu harus mencari, menginterpretasi, dan menginternalisasi sendiri gagasan atau ajaran-ajaran keagamaan yang mereka anut. Persoalannya apakah orang punya waktu? Lihatlah para petani. Kita punya waktu karena kita tahu bahwa besok kita masih bisa makan. Tetapi para petani, tukang becak, pembantu rumah tangga, buruh, dan sebagainya, kapan mereka punya waktu untuk, misalnya, sekadar membaca buku. Oleh karena itu, secara struktural mereka memang mau tidak mau hanya bisa taklid dalam berbagai urusan, khususnya keagamaan. Lebih dari itu, kalaupun semua orang ingin menjadi pembaharu, maka sebenarnya sudah tidak

> Di negara-negara maju, seperti Amerika dan terutama Australia, karena saya sekolah di sana, saya lihat bahwa praktik sekularisasi itu dijalankan oleh negara dengan tidak mendukung seluruh hal yang berhubungan dengan agama, baik itu pelajaran agama, organisasi Gereja, ataupun perkumpulan-perkumpulan lain yang berkaitan dengan aktivitas agama. Kebijakan-kebijakan negara juga bukan merupakan kebijakan yang menguntungkan salah satu agama. Makanya, kalau Anda lihat perdebatan seperti di Prancis tentang larangan penggunaan simbol-simbol agama, baik jilbab, salib atau kopiah orang Yahudi adalah salah satu bukti dari praktik sekularisasi.

ada lagi yang dinamakan pembaharu, karena semua orang sudah berada pada kondisi yang sama.

Di dalam sejarah Jawa, kenapa pada waktu dulu hanya kaum priyayi yang bisa menulis adalah karena mereka tidak bertani, hanya duduk di kursi goyang, melihat burung peliharaan, dan semuanya serba dilayani. Mereka punya banyak waktu. Maka wajar kalau kemudian merekalah yang bisa melahirkan ajaran-ajaran, karya sastra, dan lain-lain. Namun, karena secara sosiologis, mereka belum bisa melepaskan diri dari status kelasnya di masyarakat, sehingga karya yang dilahirkan pun akhirnya tetap bias dengan kelasnya.

Jadi pada hemat saya, substansi dari liberalisasi pemikiran harus diarahkan atau mencerminkan apa yang pada esensinya dibutuhkan oleh masyarakat lintas kelas. Pertanyaannya, apakah gagasan Islam liberal atau liberalisasi Islam tidak bias pada kelas para penyokongnya? Saya pernah berkata kepada Ulil Abshar-Abdalla ketika dia mengeluh "*masak* ada anak ITS (Institut Teknologi Surabaya) yang bertanya kepada saya, ketika ingin membuat skripsi, tentang spa yang *islami* – seolah-olah Islam mengatur segala persoalan". Saya katakan kepada Ulil, "itulah realitas keberagamaan di Indonesia". Ulil tidak dilihat sebagai tokoh sekular, justru dilihat sebagai salah satu kutub kiai yang baru muncul, seperti mereka memahami munculnya Aa Gym, Zaenuddin MZ, dan sebagainya.

Oleh karena hal-hal seperti itulah, bagi saya, sekali lagi saya katakan, sikap kritis kita dan kesejatian kita sebagai rakyat yang harus tetap dijaga. Kritik saya kepada Islam Liberal adalah saya utarakan dengan pertanyaan yang sangat struktural, untuk apakah menyesuaikan agama dengan modernitas? Pertanyaan ini saya lontarkan dengan beberapa refleksi, *pertama*, dia (agama) akan kehilangan otentisitasnya. *Kedua*, bukankah modernitas itu me-

rupakan barang baru, sedangkan Islam muncul jauh lebih awal. Selanjutnya, *ketiga*, sebagaimana dikatakan gagasan Marxis, bahwa seluruh gagasan kita tidak lain adalah refleksi dari superstruktur. Karena superstruktur kita kapitalis, sadar atau tidak sadar, maka gagasan keagamaan, sistem hukum, dan sistem pendidikan kita juga bersifat kapitalis. Semuanya dibuat untuk menyerap tenaga kerja. Gerakan keagamaan harus mempunyai kesadaran struktural seperti itu. Kalau tidak, maka bisa jadi setiap hari akan bermunculan gerakan yang berbeda-beda dan kita senantiasa harus selalu menyesuaikannya.

Permasalahan yang dapat muncul, ketika ide modernisasi diterapkan dalam agama, akan sangat banyak. Di antaranya adalah persoalan *religious intimacy*. Secara naluriah, begitupun dalam konteks beragama, ketika berada dalam situasi tersendiri kita akan merasa asing, tidak tahu lagi tempat untuk pulang. Lantas ke mana lagi tempat itu dapat kita temukan kalau otentisitas agama kita sendiri telah hilang? Cobalah Anda sekolah ke luar negeri. Di sana Anda tidak bisa mendengar lagi suara azan, orang mengaji dan lain sebagainya. Mau kembali ke manakah kita pada saat seperti itu? Jawabannya adalah agama.

Jadi, buat saya, otentisitas keagamaan tetap harus dipertahankan. Sebab, agama adalah tempat kembali bagi orang-orang yang pernah berdiam di "rumah". Dalam pengalaman keagamaan saya, momen ritual seperti pembacaan *shalawat* dan sebagainya itulah di mana saya merasa kembali ke "rumah" saya, meski saya juga tahu bahwa itu hanyalah simbol-simbol. Saya tidak akan menyanyi *Jingle Bell* dan lain sebagainya, yang memang dari dulu tidak terdapat di "rumah" saya.

Substansi dari gagasan keagamaan yang baru, seperti Islam Liberal atau apapun namanya, itu seharusnya jangan terjebak pada kecenderungan kelas di mana kita berada. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah jangan menghabiskan energi kita hanya untuk melayani pertentangan-pertentangan pemikiran, sementara tidak memperhatikan dan mencurahkan energi kita untuk pemberantasan kemiskinan, penegakan keadilan ekonomi dan lain sebagainya, yang lebih esensial. Selama ini, yang terjadi di kita adalah saling ejek antarkelompok yang berseberangan. Islam liberal terus dikritik dan dihujat, sementara kemiskinan tetap didiamkan.

Dulu, ketika saya di LP3ES, kita bersatu dalam satu paradigma pembangunan yang menekankan keadilan dan pemerataan, di situ tidak ada persoalan agama. Dengan ini jugalah, kemudian kita menentang negara yang otoriter. Kenapa sekarang hal seperti itu seolah-olah tidak terlihat lagi? Salah satu faktornya, bagi saya, kalau kita lihat lagi pada sejarah, adalah penghancuran ICMI. Karena dalam sejarahnya, ICMI didirikan, saya ingat sekali karena saya juga ikut hadir pada waktu itu, di rumah pak Habibie, justru bertujuan untuk mengantisipasi munculnya Islam radikal, di samping (tujuan lainnya) agar Islam memiliki representasi yang kuat di dalam negara. Sayangnya, oleh kaum sekular, ICMI malah dihancurkan pasca-presiden Soeharto. Maka sangat wajar kalau kemudian kotak pandora itu pun terbuka dan *unpredictable.*

Wawancara dilakukan di Jakarta

Percakapan dengan

Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir, staf pengajar STAIN Cirebon dan Sekretaris Jenderal Fahmina Institute Cirebon. Menyelesaikan S1 pada Fakultas Syariah Universitas Damaskus, Syiria, dan program Magister bidang Fikih dan Ushul Fikih dari Fakultas Ilmu Wahyu Universitas Islam Internasional Kuala Lumpur, Malaysia.

Untuk meruntuhkan kuatnya intervensi pemerintah terhadap kehidupan beragama warganya dan untuk mengatasi pelbagai salah paham masyarakat ataupun aktivis pro-demokrasi terhadap fenomena perda syariah adalah membuka seluas-luasnya ruang untuk mendialogkan nilai-nilai yang bersifat publik-kemanusiaan. Sehingga warga terbebas dari kungkungan sistem yang zalim. Maka jangan sampai menyakralkan suatu nilai agama ke dalam ranah politik. Bagaimanapun al-Quran bukan monopoli seseorang atau kelompok tertentu untuk membuat klaim kebenaran absolut seraya menutup pelbagai nilai dan opini yang berbeda. Pun pada dasarnya fikih adalah filsafat hukum Islam yang rasional dan masuk akal (*ma'qûliyat al-ma'nâ*) yang mendorong ijtihad dan prinsip perbedaan pendapat.

Sekularisme memiliki citra sangat buruk di Indonesia. Sebagian kalangan memaknainya sebagai paham antiagama. Menurut Anda, apakah sekularisme harus diposisikan sebagai term yang datang dari Barat dan karenanya tidak tepat untuk Indonesia, atau sebenarnya Islam sendiri punya nilai-nilai tertentu yang afirmatif dengan sekularisme?

Menurut saya, istilah apapun, tidak hanya sekularisme, ketika dimunculkan ke publik menjadi milik semua orang dan memiliki makna berbeda-beda. Tergantung pada siapa yang memaknai. Tidak ada makna yang tunggal. Problemnya, terkadang kita memaksakan pemaknaan kita terhadap sesuatu kepada orang lain. Inilah yang terjadi dengan sekularisme. Sekularisme yang dipahami Majelis Ulama Indonesia (MUI) berusaha digeneralisir sehingga seolah-olah semua orang memahami sekularisme seperti itu. Atas dasar pemahaman tersebut, MUI mengharamkan sekularisme. Celakanya, lalu banyak orang mempercayai makna tunggal sekularisme yang diharamkan ini. Padahal, nyatanya, makna sekularisme sebenarnya mengalami berbagai perubahan sesuai dengan karakter masing-masing individu atau bangsa yang memahami dan mempraktikannya. Saya yakin para intelektual pun memiliki pemahaman yang berbeda tentang sekularisme. Meski demikian, secara pribadi, saya bisa memahami mengapa MUI mengharamkan sekularisme.

Tantangan terhadap sekularisme sebenarnya telah diungkapkan Karen Amstrong dalam dua bukunya: *Sejarah Tuhan* dan *Perang Demi Tuhan.* Dia memprediksi akan terjadi kilas balik penyerangan terhadap sekularisme. Hal ini terjadi karena para pelopor sekularisme cenderung tidak ramah terhadap agama. Beberapa pegiat sekularisme memerangi agama dengan penuh kebencian, tanpa

apresiasi sedikit pun. Model sekularisme seperti inilah yang memunculkan serangan balik dari agama (tokoh-tokoh pembela agama). Meskipun ada model sekularisme lain, yang ramah terhadap agama dan bertujuan kemanusiaan, ia tetap sulit diterima umat Islam. Hal itu di antaranya lebih karena adanya propaganda dari orang-orang yang tidak paham dengan sekularisme.

Beberapa kebijakan politik negara utara terhadap negara Islam, pada sisi yang lain, juga ikut memperburuk citra sekularisme. Terutama kebijakan Amerika Serikat terhadap Afghanistan, Irak, Iran, dan Palestina. Karena itu, banyak kritik yang disuarakan beberapa aktivis di negara-negara Eropa terhadap kebijakan pemerintah Amerika Serikat. Kata mereka, kebijakan seperti itulah yang justru akan menghancurkan demokrasi dan sekularisme itu sendiri. Sekali lagi, dari sisi ini juga, saya bisa memahami mengapa MUI mengharamkan sekularisme, sekalipun saya tidak setuju.

Fatwa MUI sendiri, menurut saya, sebenarnya tidak perlu ditanggapi secara serius. Ia cukup ditanggapi dengan fatwa lain, atau pandangan dari kyai lain, seperti pendapat KH Mustofa Bisri atau lainnya. Tetapi, sebagai pendidikan publik, kita harus mendiskusikannya secara publik. Kita biarkan publik mengetahui lebih banyak dan secara dewasa memilihnya sendiri. Dari sisi inilah saya tidak setuju dengan fatwa MUI, karena telah menunggalkan definisi 'sekularisme' yang sesungguhnya tidak tunggal. Sehingga publik, lewat fatwa MUI, tidak memperoleh pemahaman yang cukup mengenai sekularisasi atau sekularisme dari pihak-pihak lain. Akibatnya mereka takut belajar dan memahami pluralisme, karena sudah diharamkan MUI.

Sisi lain, saya tidak setuju dengan fatwa MUI karena memiliki tendensi politis untuk memperoleh dukungan publik di hadapan pemerintah. Dulu, posisi MUI secara kultural dan struktural sangat lemah, kini ia sedang mencari posisi dan berkembang mencari kekuatan. MUI ingin menguasai emosi publik untuk *bargaining* di hadapan pemerintah. Tentu saja ini hanya kecurigaan saya.

> Saya tidak setuju dengan fatwa MUI, karena telah menunggalkan definisi 'sekularisme' yang sesungguhnya tidak tunggal. Sehingga publik, lewat fatwa MUI, tidak memperoleh pemahaman yang cukup mengenai sekularisasi atau sekularisme dari pihak-pihak lain. Akibatnya mereka takut belajar dan memahami pluralisme, karena sudah diharamkan MUI.

Pada awalnya MUI tidak memiliki kekuatan kultural dan politik seperti NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah. Sekarang, mereka sedang membangun kekuasaan kultural untuk menggantikan kekuatan NU dan Muhammadiyah. MUI sedang membangun label sebagai 'pembela Islam dan umat Islam.' Membela umat Islam, artinya MUI diasumsikan oleh ulama tertentu sekarang ini sebagai lembaga pembela umat Islam. Berbeda dengan zaman Orde Baru, di mana MUI dianggap membela pemerintah, karena MUI hanya dijadikan lembaga pemberi fatwa yang mendukung kebijakan pemerintah. MUI sekarang tidak secara langsung mengamini fatwa pemerintah. Sebelum mengeluarkan fatwa, ia terlebih dahulu melihat perkembangan yang terjadi di dalam umat Islam Indoensia.

Menurut Anda adakah preseden sekularisme di dalam Islam?

Dengan makna sekularisme yang saya pahami, menurut saya, itu ada. Bagi saya, sekularisme adalah pembedaan antara Tuhan dan hamba. Dalam tauhid kita mengenal kalimat *"lâ ilâha illâ 'l-Lâh."* Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat itu merupakan ungkapan sekularisme. Artinya, kita membedakan mana yang sakral dan tidak sakral, mana Tuhan yang harus disembah dan disucikan dan mana yang bukan Tuhan dan tidak boleh minta disucikan atau diagung-agungkan. Pembedaan yang hampir mirip dengan ini, kita temui pada kitab-kitab *ushûl al-fiqh*, termasuk pada kitab *firqah*: *al-Milal wa al-Nihal* karya al-Syahrastani. Dalam kitab itu, dia membedakan mana yang disebut ibadah dan bukan ibadah. Ibadah pun dibedakan: ibadah *mahdlah* dan *ghayru mahdlah*.

Ketika kita membedakan Tuhan dan hamba berarti membedakan hal-hal yang bersifat *'ibâdî* (kehambaan) dari *ilâhî* (ketuhanan). Sekalipun sesungguhnya, tidak ada nilai ketuhanan yang lepas dari kemanusiaan. Tetapi pembagian seperti ini harus dimaknai untuk kemanusiaan. Pembagian ini juga untuk mempertegas: selain Tuhan itu sendiri, adalah manusia yang bisa berijtihad; melakukan kontrol dan dikontrol; bisa melakukan perdebatan dan saling mengkritisi satu sama lain. Kontrol dan kritik untuk penyempurnaan dan penemuan kebaikan.

Lepas dari perbedaan maknanya, saya kira, makna sekularisme akan mengikuti perubahan peradaban. Tapi saya ingin menegaskan bahwa sejak awal sudah ada upaya untuk membedakan mana wilayah Tuhan dan mana wilayah manusia. Wilayah manusia tidak bisa disakralkan dan dianggap seperti Tuhan, yang tidak bisa dikritik, dikontrol dan dimodifikasi untuk perbaikan.

Banyak kalangan menganggap Islam merupakan kesatuan bentuk antara al-dîn dan al-dawlah. Pendapat Anda sendiri bagaimana?

Menurut saya, sebenarnya secara akademis sulit untuk mencari literatur Islam yang membedakan antara *al-dîn* dan *al-dawlah*. Misalnya, ketika membicarakan *al-dîn,* orang langsung mengasumsikannya dengan agama. Kemudian ada juga pembedaan antara ilmu agama dan bukan agama. Contohnya Imam Al-Ghazali. Dia membedakan *'ulûm al-syar'îyah* dan *ghayr al-syar'îyah.* Ini dilematis. Apakah betul *al-dawlah* dalam Islam lepas dari *al-dîn?* Dan *al-dîn* dalam Islam lepas dari *al-dawlah?* Secara akademis itu sulit dibedakan. Dari segi definisi, menurut saya, juga masih dilematis. Karena saya sangat yakin kalau Islam juga memuat berbagai prinsip-prinsip pengelolaan negara. Nabi juga menggunakan dan mempraktikkan hukum-hukum tertentu kepada penduduk Madinah. Sementara hukum sendiri adalah salah satu pilar dari negara.

> Dalam tauhid kita mengenal kalimat *"lâ ilâha illâ 'l-Lâh".* Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat itu merupakan ungkapan sekularisme. Artinya, kita membedakan mana yang sakral dan tidak sakral, mana Tuhan yang harus disembah dan disucikan dan mana yang bukan Tuhan dan tidak boleh minta disucikan atau diagung-agungkan."

Tetapi, saya setuju, agar urusan-urusan yang bersifat publik dikelola dengan nilai-nilai yang bersifat publik-kemanusiaan. Tidak disakralkan. Publik-kemanusiaan artinya adalah orang tidak bisa mengatakan bahwa sesuatu adalah urusan Tuhan, yang tidak bisa didialogkan di antara anggota masyarakat, atau tidak bisa hanya diserahkan kepada kelompok manusia yang mengatasnamakan Tu-

han. Karena, pada praktiknya, itu merupakan urusan publik yang harus dikelola secara publik. Dalam konteks ini, biasanya yang mengatakan "Ini adalah urusan Tuhan" adalah ulama.

Misalnya konsep *ahl al-halli wa al-'aqdi* yang terdapat di dalam fikih. Menurut saya, konsep itu sudah tidak bisa diaplikasikan untuk zaman sekarang. Itu merupakan model demokrasi dengan perwakilan rakyat oleh anggota elite yang sangat sedikit. Ini tidak bisa lagi menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan di masa sekarang. Sayang, mereka yang menginginkan *khilâfah*, menganggap *ahl al-halli wa al-'aqdi* merupakan konsep dari Tuhan. Ia suci, sakral dan tidak bisa ditafsirkan atau disesuaikan dengan kebutuah zaman. Padahal, itu merupakan konsep fikih. Ketika khalifah sudah tidak bisa mengelola sendirian, lalu muncullah *ahl al-halli wa al-'aqdi.* Pada perkembangan berikutnya, *ahl al-halli wa al-'aqdi* juga tidak cukup untuk mengelola berbagai urusan yang ada, dengan anggota yang sangat terbatas. Konsep ini tidak bisa lagi diaplikasikan sekarang, karena persoalan kebangsaan dan kemanusiaan terus bergulir dan memerlukan pendekatan dari berbagai ilmu pengetahuan. Karena itu perlu lebih banyak orang. Dan perlu berbagai model yang lebih menjamin kepentingan publik agar tidak dibajak oleh kelompok elite tertentu.

Karena itu, menurut saya, orang yang membawa sakralitas agama, apapun agamanya, ke dalam konteks politik patut dicurigai. Mereka sendiri melakukan itu, biasanya, lebih disebabkan oleh kurangnya modal untuk membicarakan urusan publik secara lebih teratur, terukur, transparan dan bisa dikontrol secara bersama. Sebab, ketika agama masuk, atau tepatnya ketika membawa nama Allah, ada asumsi bahwa tidak boleh ada orang lain yang mengkritiknya.

Tetapi, sekali lagi, secara akademis sulit untuk memisahkan antara agama dan negara. Sekalipun saya setuju dengan pemikiran Ali Abdul Raziq, tapi terma tersebut masih dilematis. Karena definisi *al-dîn* juga sesungguhnya bukan hanya urusan ibadah. *Al-Dîn* juga secara bahasa bisa berarti tanggungan hutang. Dalam literatur Islam, urusan politik pun disebut urusan *al-dîn*. Pada saat yang sama, urusan salat (ibadah) pun ada aspek 'siasat'nya. Karena itu, ada *al-siyâsah al-syar'îyah,* politik syariah, baik untuk hal-hal ibadah atau yang lain. Dan politik syariah mencakup urusan ibadah juga.

Problem akan muncul jika ibadah juga diatur oleh pemerintah. Secara pribadi saya tidak setuju jika ibadah diatur pemerintah. Pemerintah tidak berhak menentukan mana ibadah yang sah dan mana yang tidak. Jika ini dilakukan, akan banyak ijtihad-ijtihad ulama yang dibatalkan pemerintah, hanya karena ada usulan dari satu orang ulama atau sekelompok orang. Imam Malik pernah menolak hal ini, ketika kitab *al-Muwaththa'* akan dijadikan undang-undang oleh Khalifah al-Mansur. Kata Imam Malik, "biarkanlah setiap kota memiliki imamnya masing-masing, jangan dipaksa untuk mengikuti pandangan saya dalam kitab *al-Muwaththa'*." Kitab itu sendiri hanya berisi ayat al-Quran dan Hadits.

Di samping itu, kalau pemerintah mengatur masalah-masalah ibadah, ia pasti akan lalai terhadap urusan-urusan publik. Tidak cukup waktu untuk melayani kebutuhan-kebutuhan warga negara. Ibadah juga terkait dengan urusan perasaan atau kedekatan seseorang kepada Allah. Kalau urusan perasaan diatur oleh pemerintah, maka sulit akan memperoleh kedekatan dengan Allah sebagai esensi dari ibadah. Sebab, pendekatan kepada Allah merupakan pengalaman yang sangat pribadi.

Apakah sekularisme memang sulit dipraktikkan di dalam Islam?

Yang sulit bukan Islamnya, tapi umat Islamnya. Pengalaman politik umat Islam cenderung ditentukan oleh kelompok ulama, jika kelompok bukan ulama yang berkuasa tidak mampu memberikan kebutuhan-kebutuah publik. Jika umat sedang galau dengan urusan kemanusiaan yang tidak bisa diselesaikan dengan aturan-aturan kemanusiaan, biasanya cenderung mendekat ke agama. Kalau kondisinya seperti itu, mempraktikkan sekularisme di dunia Islam akan sulit. Karena, di tengah kondisi demikian, semua orang sedang memimpikan simbol-simbol agama sebagai jawaban dari sekularisme yang gagal memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Terlebih tidak sedikit praktik sekularisme yang memusuhi identitas keagamaan.

Sebaliknya, ketika seseorang bosan dengan peraturan ulama, sekularisme dalam pengertian pemisahan antara agama dan negara akan muncul dan diterima umat dengan baik. Ini yang pernah terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ulama-ulama seperti Syekh Jamaluddin al-Afghani dan Syekh al-Azhar Muhammad Abduh, ulama tafsir Syekh Rasyid Ridla, justru mengampanyekan nasionalisme dan hak-hak publik, yang semua itu menjadi pilar sekularisme.

Kepemimpinan ulama, dalam sejarah, juga pernah dirindukan pada masa Dinasti Umayyah. Karena itu muncul khalifah Abdul Malik ibn Marwan . Dia adalah salah satu dari tujuh ulama ahli fikih di Madinah. Sejak kecil, dia selalu berkompetisi dengan cucu Rasulullah, Zainal Abidin. Ia muncul di tengah kegalauan masyarakat terhadap kepemimpinan sekular dan merindukan kepemimpinan ulama. Pada saat itu, para politisi sekular yang tidak mempunyai kapasitas untuk berijtihad dan tidak banyak paham agama, banyak

> Urusan-urusan yang bersifat publik dikelola dengan nilai-nilai yang bersifat publik-kemanusiaan. Tidak disakralkan. Publik-kemanusiaan artinya adalah orang tidak bisa mengatakan bahwa sesuatu adalah urusan Tuhan, yang tidak bisa didialogkan di antara anggota masyarakat, atau tidak bisa hanya diserahkan kepada kelompok manusia yang mengatasnamakan Tuhan. Karena, pada praktiknya, itu merupakan urusan publik yang harus dikelola secara publik.

melakukan kesewenang-wenangan terhadap masyarakat. Sehingga umat berpikir untuk mencari pengganti mereka dari figur ulama. Karena itu, Abdul Malik ibn Marwan dipilih. Padahal dia bukan anak khalifah yang ketika itu menjabat. Dia hanya anak paman dari khalifah sebelumnya. Tapi dia dipilih untuk menyelamatkan Dinasti Umayyah. Sebab, kalau yang memimpin bukan ulama, pemberontakan akan terjadi di mana-mana. Di Madinah ketika itu sudah terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Abdullah ibn Zubair. Demikian juga di Mesir. Dipilihnya Abdul Malik ibn Marwan sebagai khalifah rupanya mampu meredam amarah publik. Sekalipun tetap ada beberapa pemberontakan.

Tetapi, ternyata selain seorang ulama, Abdul Malik ibn Marwan juga seorang politisi. Dia justru menjadi orang yang paling kejam. Sehingga pada saat itu banyak Sahabat Nabi yang dibunuh. Dan dia punya dalil untuk menjustifikasi tindakannya. Dia bisa memainkan istilah *bughât* dan lainnya. Karena demikian kejamnya, kemudian orang berbalik lagi menjadi tidak suka dengan kepemimpinan ulama.

Saya bisa menyimpulkan bahwa masa depan sekularisme sangat tergantung pada konteks sosial politiknya. Sekarang kenapa

sulit? Karena, menurut saya, publik global, terutama yang dimotori Amerika yang dipimpin Bush, sedang tidak ramah terhadap umat Islam. Mereka menyerang Afghanistan, Irak, mungkin juga nanti Iran, dengan alasan-alasan yang sulit diterima publik global, apalagi dunia Islam. Padahal, pada saat yang sama, publik juga tahu, seperti kata Noam Chomsky (intelektual Yahudi Amerika), bahwa semua negara, dengan pimpinan Amerika, telah berbuat tidak adil dan melakukan kejahatan terhadap bangsa Palestina, dengan membiarkannya dijajah Israel terus-menerus. Padahal seluruh publik dunia sudah menyatakan komitmen pada kemerdekaan, kebebasan dan Hak Asasi Manusia.

Umat Islam juga bosan dengan jargon-jargon demokrasi yang tidak mensejahterakan dan tidak memberikan keadilan. Bahkan mereka menjadi korban kekerasan atas nama demokrasi. Karena itu, menurut saya, sekularisme pasti akan mengalami resistensi di dunia Islam, sampai benar-benar nyata bisa menghadirkan kehidupan yang baik dan adil. Atau sampai mereka sadar bahwa kepemimpinan dari elite agama justru akan mempersulit kehidupan mereka sehari-hari.

Dalam kasus lain, kehadiran fikih justru akan membatasi kehidupan yang sekular. Apakah memang fikih tidak bisa sekular?

Sebenarnya kerinduan orang bukan kepada fikih, tapi pada sosok ulamanya. Seperti pernah disinggung Fareed Zakaria, ini merupakan antitesa dari kegagalan demokrasi yang dipegang pemimpin-pemimpin dunia Islam yang otoriter dan zalim. Dia menyarankan untuk memberi kesempatan kepada kepemimpinan ulama, jika dipercaya publik melalui demokrasi. Biar masyarakat memiliki

pengalaman, karena sesungguhnya ulama juga akan menemui kesulitan untuk bisa mensejahterakan dan mengurus urusan publik. Yang problem menurut Zakaria adalah standar ganda Amerika ketika menggunakan demokrasi untuk mengatur dunia Islam. Ketika terpilih pemimpin dari pihak ulama secara demokratis ternyata tetap tidak direstui Amerika. Amerika malah melakukan intervensi untuk menaikkan pemerintah otoriter, tidak demokratis, asal mau bekerja sama dengan mereka. Inilah yang terjadi di Tunisia, Aljazair, Turki dan Mesir. Amerika malah bekerja sama dengan Saudi Arabia yang patuh terhadapnya, sekalipun memiliki pemerintahan yang didasarkan pada agama, otoriter dan tidak demokratis.

Inilah yang memperbesar kebencian orang terhadap sekularisme dan demokrasi. Pada saat yang sama, meningkatkan kerinduan orang terhadap kepemimpinan Islam dan ulama.

Hal itu wajar, karena banyak masyarakat dunia – termasuk umat Islam – merasa terancam oleh promosi demokrasi dan sekularisme dunia Barat. Sistem demokrasi, sayangnya, disuarakan oleh orang-orang yang berstandar ganda seperti pemerintah Amerika saat ini. Sehingga publik tidak nyaman. Mereka melihat politik global memposisikan mereka dalam kehidupan yang penuh dengan ketakutan dan intimidasi global. Mereka kerap dituduh teroris, jahat, dan stigma-stigma buruk lainnya. Sehingga saya yakin banyak orang, bukan hanya orang Islam, yang merasa terancam identitasnya. Mereka kemudian merindukan orang lain, selain dari orang yang menyuarakan sekularisme dan demokrasi, yaitu ulama. Sedangkan ulama yang lebih menonjol adalah ulama fikih.

Munculnya perda syariah di Indonesia juga karena mengagungkan fikih, walaupun hanya berkutat pada simbol-simbol, seperti jilbab, baca al-Quran dan sebagainya. Itu merupakan pendulum balik dari arus sekularisme atau sekularisasi yang digulirkan di Indonesia dalam rangka mendukung konsolidasi demokrasi. Bagaimana komentar Anda?

Secara pribadi, saya kurang sepakat dengan beberapa aktivis demokrasi yang membicarakan perda syariah. Kita bicara fikih saja dahulu. Fikih, menurut saya, sangat kaya akan pandangan dan literatur. Kekayaan itulah yang akhirnya menjadi sumber bagi siapa pun untuk memaknai Islam, baik yang ekstrem kanan maupun yang kiri. Yang menjadi masalah adalah ketika fikih dibicarakan lepas dari konteksnya. Sehingga tidak lagi membawa pesan-pesan dasar atau *maqâshid al-syarî'ah*-nya. Lalu fikih dipahami sebagai tujuan, bukan sebagai media. Hal itu bermasalah, sebab sesuatu yang mestinya menjadi alat dijadikan tujuan.

Perda syariah sendiri sebenarnya lebih merupakan persoalan identitas dan perebutan kekuasaan politik lokal. Sementara kita, aktivis demokrasi, menyerangnya sebagai perda syariah. Menurut saya serangan itu salah alamat. Kalau yang kita serang syariahnya, maka banyak umat Islam yang akan marah. Sekalipun kebanyakan mereka sesungguhnya tidak paham dengan syariah. Inilah problemnya.

Secara strategis, ketika kita mengatakan perda syariah sebetulnya kita telah salah besar. Mereka sendiri tidak mengatakannya sebagai perda syariah. Kita-lah yang membangunkan kesadaran publik mengenai adanya ancaman terhadap syariah. Saya tidak tahu mengapa kita menjadi demikian *sharia phobia*? Padahal itu hanyalah permainan politik lokal yang dilakukan oleh orang-orang yang takut

kehabisan jabatan dan untuk menutupi korupsi. Mereka mencari orang-orang yang baru muncul menjadi ulama untuk dikaitkan dan membentengi kepentingannya.

Pemerintah tidak berhak menentukan mana ibadah yang sah dan mana yang tidak. Jika ini dilakukan, akan banyak ijtihad-ijtihad ulama yang dibatalkan pemerintah, hanya karena ada usulan dari satu orang ulama atau sekelompok orang.

Di berbagai daerah, rupanya, yang membuat perda syariah adalah beberapa partai yang dulunya dianggap bergelimang masalah dan dosa, seperti Partai Golkar. Karena itu saya kurang sepakat dengan para aktivis demokrasi yang kurang jeli bagaimana mendudukkan problem semacam ini.

Isu perda syariah, saat ini, masih merupakan isu pengalihan dari persoalan yang dihadapai pemerintah daerah, yang sulit mereka pecahkan. Mulai ketidakefektifan birokrasi, korupsi para aparat dan ketidakmampuan memberikan pelayanan kepada publik. Perda syariah menjadi tiket murah untuk meraih dukungan publik. Atau minimal dukungan sekelompok orang yang bersedia berbicara ke publik. Kendati begitu, masyarakat pasti akan bangun, ketika pada akhirnya perda-perda itu tidak memberikan manfaat dalam kehidupan nyata mereka.

Anda sering ke Aceh, bagaimana Anda melihat penerapan syariat Islam di sana? Apakah antara tuntutan dan pelaksanaannya sesuai? Apa yang menguntungkan dari pelaksanaan syariat Islam dan apa juga sisi yang merugikannya?

Secara budaya, yang menguntungkan dari syariat Islam di Aceh adalah dapat membentengi masyarakat Aceh dari pengaruh ber-

bagai nilai luar atau asing. Pasca terjadinya tsunami, sebagaimana kita ketahui, banyak sekali bantuan yang masuk, baik dari NGO dalam negeri maupun luar negeri. Mereka masuk secara mendadak dan dalam jumlah yang sangat banyak dengan beragam agenda. Masing-masing pasti memiliki nilai-nilai yang berbeda dengan yang lain. Di tengah terpaan nilai-nilai asing itu, menurut saya, syariat Islam sedikit banyak dapat menjadi upaya terakhir yang membentengi masyarakat Aceh untuk berpikir sejenak guna memahami secara lebih seksama terhadap nilai-nilai baru yang masuk. Untuk sementara mereka hanya bisa menolak. Sekalipun penolakannya juga tidak jelas, ya hanya sekadar menolak. Setidaknya mereka punya jeda untuk berpikir terlebih dahulu, untuk menyerap lebih baik terhadap nilai-nilai yang dianggapnya asing.

Dalam pantauan saya, sebenarnya banyak orang Aceh yang menguasai khazanah fikih. Tapi pembacaan fikih mereka tidak muncul di diskusi publik ketika membicarakan syariat Islam. Karena, di mana-mana, yang berkuasa secara riil dan yang bersuara justru orang-orang yang kurang paham syariat Islam. Di lapangan, seperti diceritakan berbagai media, banyak anggota masyarakat biasa yang dengan mudah melakukan kekerasan dengan dalih syariah.

Di lapangan, banyak masyarakat yang memanfaatkan istilah 'syariah' untuk sesuatu yang memuaskan emosi sesaat mereka. Akibatnya tindakan tersebut terkadang bertentangan dengan tujuan syariah itu sendiri, seperti menggunting rambut dan jilbab perempuan, menelanjangi orang yang ketahuan berbuat salah, memukul, mengusir atau tindak kekerasan yang lain. Masyarakat Aceh sering menggunakan dua kata ampuh untuk menolak suara-surara atau pandangan yang lain, yaitu 'damai' dan 'syariah.' Jika merasa ada ancaman terhadap kebudayaan Aceh, atau dengan kepentingan dia

sendiri, seseorang akan melawannya dengan ungkapan "ini mengancam perdamaian" atau "ini akan menghancurkan syariat Islam." Kata-kata itu memungkinkan seseorang untuk menolak pihak-pihak yang membawa sesuatu yang berbeda. Sayangnya, dua kata itu juga menjadi kata mujarab yang digunakan oleh orang yang punya *power* untuk selalu memperoleh *bargaining.* Kepemimpinan perempuan, misalnya, ditolak beberapa kalangan dengan alasan syariat Islam. Padahal, Aceh pada masa kerajaan yang didasarkan pada Islam, telah memiliki sejarah kepemimpinan perempuan yang cukup lama dan diakui ulama.

Orang yang membawa sakralitas agama, apapun agamanya, ke dalam konteks politik patut dicurigai. Mereka sendiri melakukan itu, biasanya, lebih disebabkan oleh kurangnya modal untuk membicarakan urusan publik secara lebih teratur, terukur, transparan dan bisa dikontrol secara bersama. Sebab, ketika agama masuk, atau tepatnya ketika membawa nama Allah, ada asumsi bahwa tidak boleh ada orang lain yang mengkritiknya.

Di sinilah kelamnya persoalan penerapan syariat Islam. Dengan gegap gempita syariat Islam, hal-hal yang mestinya menjadi perhatian malah terbengkalai. Semuanya beralih ke simbol-simbol yang sebenarnya tidak memiliki kaitan dengan kebutuhan masyarakat. Ini merugikan mereka sendiri. Dan ini sebenarnya disadari oleh banyak pihak, termasuk Kepala Dinas Syariah sendiri, Bapak Aliyasa Abu Bakar. Syariat Islam pada akhirnya menjadi semacam bola liar yang tidak bisa dikendalikan, bahkan oleh ulamanya sendiri.

Walaupun kemasygulan seperti itu tidak disuarakan di publik, tapi dapat dirasakan oleh semua orang. Karena syariat Islam pada

praktiknya, yang melakukan eksekusi adalah masyarakat yang tidak paham.

Ada banyak hal yang menjadi perhatian para pemerhati sosial di Aceh, misalnya salah seorang kawan saya, Tengku Danial, ulama dari Lhokseumawe, menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat Aceh sedang dalam posisi kalah dan terjepit. Kalah karena konflik, dan terjepit karena datangnya orang-orang luar. Padahal, dia merasa, dulu dirinya jaya dan pintar. Dan Aceh adalah Serambi Mekah. Sekarang, semua itu tidak mereka dapatkan lagi secara sosial. Karena itu, mereka ingin menunjukkan kehebatannya dengan kata 'damai' atau 'syariah.' Jadi, semacam penunjukan identitas. Itu tidak murni agama. Dan itu tidak hanya dikatakan oleh orang atas, masyarakat pun melakukannya. Mereka ingin menunjukkan bahwa "kami punya identitas, kamu yang dari luar, jangan macam-macam memasukkan agenda ke dalam Aceh."

Konstitusi Indonesia tidak bersumber dari agama. Tetapi, konstitusi kita dibentuk jauh sebelum Kovenan HAM diratifikasi. Meski begitu, beberapa kalangan meyakini bahwa konstitusi kita adalah sekular, meskipun masih menyebut kata dan kalimat perihal ketuhanan. Benarkah demikian, atau justru konstitusi kita tidak tegas memisahkan antara urusan agama dan negara?

Konstitusi kita sudah cukup baik. Ia justru terinspirasi dari ajaran-ajaran agama. Saya tidak setuju dengan istilah bahwa agama tidak boleh ikut campur. Saya lebih setuju bahwa agama sebagai sumber inspirasi, sebagaimana dinyatakan Gus Dur dan Kang Said Agil Siradj. Islam menginspirasi dalam banyak hal, termasuk memi-

sahkan institusi agama dan institusi negara. Yang problem adalah ketika pemerintah mengurus keberagamaan masyarakatnya.

Konstitusinya sudah cukup baik dan tidak perlu diubah. Yang kita khawatirkan adalah penafsiran konstitusi pada tataran praktik, yang bisa jadi bertentangan dengan semangat konsititusi itu sendiri. Seperti sekarang, pengusiran kelompok Ahmadiyah, dianggap tidak bermasalah dari sisi konstitusi. Negara pun sepertinya diam saja, tidak melakukan pembelaan terhadap warga Ahmadiyah dari segala ancaman kekerasan dan pengusiran.

Sebab, pada dasarnya perdebatan apakah konstitusi kita sekular atau berdasarkan agama, juga soal perebutan makna. Artinya, perlu strategi untuk mengamankan konstitusi.

Tapi jangan sampai konstitusi bersumber hanya dari agama?

Menurut saya konstitusi kita masih bersumber dari agama, tapi dalam makna menginspirasi, bukan dalam makna menerapkan agama. Dalam hal ini saya setuju dengan kata-kata dari Imam Kasani dalam kitab *Badai' Shana'i*, yang menjelaskan tujuh makna negara Islam dan negara kafir. Di antaranya dia mengatakan bahwa *dâr al-Islâm* adalah negara yang menjamin keamanan, makanya disebut *dâr al-amn* atau *dâr al-aman*. Sementara *dâr al-kufr* adalah negara yang tidak aman. Dengan definisi ini, maka Indonesia bisa dikatakan sebagai negara Islam. Ada pula yang mengatakan negara Islam adalah negara yang pemimpinnya Muslim, sekalipun mayoritas penduduknya kafir. Dari sisi ini, Indonesia juga berarti negara Islam. Demikianpun ada yang mengatakan bahwa negara Islam adalah negara yang mayoritas penduduknya Muslim sekalipun pemimpinnya bukan orang Islam, selama umat Islam men-

dapat jaminan mengamalkan ritual ibadahnya. Ada yang mengatakan negara Islam adalah negara yang pemimpinnya membiarkan masyarakat melaksanakan praktik-praktik agama yang fundamental seperti salat, sekalipun pemimpinnya tidak melakukan itu, asal dia tidak menunjukkan ke publik dan dia tidak melakukan maksiat besar seperti berzina. Dari definisi-definisi itu, Indonesia masih dapat dikategorikan sebagai negara Islam.

Definisi-definsi di atas menunjukkan bahwa definisi fikih tentang negara Islam masih sangat longgar, dan tidak ada fikih yang mengatakan bahwa negara Islam adalah negara yang melaksanakan seluruh syariat Islam. Karena, dalam sejarahnya, baik di Khalifah Umayyah maupun Abbasiyah juga tidak seperti itu. Oleh karena itu, kalau merujuk ke fikih, Indonesia dapat disebut sebagai negara Islam. Sebagaimana sudah diputuskan oleh NU.

Liberalisme juga dinilai sangat pejoratif, bahkan salah satu pintu kebebasan berijtihad dalam Islam pun berusaha ditutup oleh orang Islam sendiri. Menurut Anda, harus dipahami seperti apakah liberlisme itu?

Secara terma, sama dengan lainnya, liberalisme bisa dimaknai secara beragam oleh masing-masing pihak. Dia bisa bermasalah, bisa juga tidak. Kalau liberalisme juga memasukkan liberalisme ekonomi, saya ikut menentang liberalisme. Tetapi kalau liberalisme yang dipahami oleh Asghar Ali Engineer yaitu libertarian, saya sangat sepakat.

Lantas apa dan bagaimana memaknainya? Kalau MUI memaknainya ke arah kebebasan tanpa batas, saya tidak sepakat dengan pemaknaan ini. Sebab para pemikir liberal pun saya kira tidak ada yang berpikir seperti itu. Artinya MUI bermain dengan

simbol, politik, dan bukan dengan fenomena sesungguhnya. Kalau dia mau membicarakan liberalisme mestinya dia mengundang pakar liberal, mendiskusikan secara matang, baru kemudian dapat memutuskan. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. MUI malah sengaja memunculkan, kemudian mencoba mencari keuntungan sebagai pembela Islam dan umat Islam. Padahal yang dibela, tentu saja, diri mereka sendiri.

Kini, di mana-mana, para mubaligh dalam ceramahnya mengancam orang-orang yang dianggap liberal. Siapapun yang dianggap menyuarakan pemikiran yang berbeda atau baru, dianggap liberal. Fatwa MUI digunakan untuk mengancam setiap upaya pembaruan dan perbaikan. Mereka membangun stigma bahwa orang yang liberal adalah salah dan tempatnya adalah di neraka. Sementara mereka dan MUI adalah yang benar dan berhak mendapatkan tiket masuk ke surga. Padahal belum tentu orang yang dianggap baik benar-benar berkelakuan baik. Kita lihat, MUI sendiri laporan keuangannya tidak pernah diaudit. Dan sekarang selalu meminta anggaran untuk memberangus orang-orang yang dianggap menyimpang.

Saya sendiri sebenarnya tidak sepenuhnya sepakat dengan JIL dalam memahami liberalisme. Saya mempunyai makna sendiri tentang liberalisme. Bagi saya, yang penting dari liberalisme adalah isinya. Istilahnya bisa menggunakan yang lainnya. Karena itu, orang sering mengatakan bahwa sebenarnya yang pantas disebut liberal itu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), karena artinya Partai Liberal Indonesia. Secara bahasa mereka liberal, tapi maknanya bisa berbeda-beda. Hizbut Tahrir (HT) sendiri sulit diterima di negara-negara Arab. Dulu pernah ada di Yordania tapi kemudian diusir. Dan lucunya, orang-orang HT yang aktif di pergerakan Ti-

mur Tengah, hidupnya malah di Eropa. HT besar di London dan Australia. Banyak kelompok garis keras Islam yang sulit hidup di negara-negara Islam, justru mereka hidup nyaman dan memperoleh dukungan untuk eksis di negara-negara Barat. Justru mereka memanfaatkan demokrasi dan liberalisme untuk kepentingan mereka sendiri.

Secara umum, saya memaknai liberalisme sebagai pembebasan seseorang dari kungkungan sistem yang zalim, tidak adil dan memaksa, tanpa memberikan ruang kepada individu-individu untuk bisa berpikir secara rasional, sadar akan masa depan dan bertanggung jawab pada apa yang dilakukannya.

Dalam konteks itukah lembaga Anda, Fahmina, menempatkan dan mengembangkan fikih sebagai yang membebaskan. Fikih yang coba lari dari kungkungan formal pemahaman konservatif Islam. Lantas, bagaimana Anda melihat model fikih perempuan yang sering disalahpahami dan apa yang bisa ditawarkan?

Sebenarnya, dalam memaknai syariah yang bersumber pada al-Quran dan Hadits, seringkali orang merasa bebas nilai, sehingga kebenarannya adalah murni. Padahal dia membawa nilainya sendiri, yaitu konstruksi sosial budaya yang melingkupinya. Sementara konstruksi sosial budaya seringkali lebih memperkokoh orang yang secara struktur sudah kuat. Ketika bicara laki-laki dan perempuan, maka di situ akan terlihat laki-laki diposisikan lebih kuat dari perempuan. Padahal itu konstruk sosial budaya dari sebagian besar masyarakat. Pada saat itulah maka pemahaman keagamaan akan memungkinkan adanya kelompok yang dirugikan, dalam hal itu perempuan.

Jadi ketika memaknai teks, di situlah selalu terjadi persoalan. Contohnya bisa banyak, salah satunya: kita tahu Aisyah merupakan istri Nabi yang banyak disebut lantang berbicara. Dia sempat mengkritik Nabi, sempat menyalahkan Nabi, dan sempat mendiamkan Nabi selama hampir dua bulan, karena nafkahnya kurang. Lalu turunlah surat *al-Tahrîm* yang menceritakan tawaran Nabi kepada para istri, untuk hidup bersama dengan kesederhanaan atau berpisah dan akan diberikan harta.

"Yang kita khawatirkan adalah penafsiran konstitusi pada tataran praktik, yang bisa jadi bertentangan dengan semangat konsititusi itu sendiri. Seperti sekarang, pengusiran kelompok Ahmadiyah, dianggap tidak bermasalah dari sisi konstitusi. Negara pun sepertinya diam saja, tidak melakukan pembelaan terhadap warga Ahmadiyah dari segala ancaman kekerasan dan pengusiran."

Penglihatan orang terhadap kasus di atas berbeda-beda. Yang struktur sosialnya melihat perempuan sebagai mahluk lemah, emosional dan sebagainya, akan melahirkan pandangan yang tidak adil kepada perempuan. Mereka menyalahkan Aisyah, yang emosional, *bawel* dan suka menuntut, sebagaimana biasanya perempuan. Tapi, Nabi justru banyak memuji Aisyah, menganggapnya sebagai separuh sumber agama Islam. Bahkan Nabi tidak pernah memarahi dengan kata-kata kasar, sekalipun Aisyah pernah melawan. Begitu besar penghormatan Nabi kepada perempuan. Padahal, kalau orang lain, Sahabat misalnya, pasti sudah melakukan kekerasan dan menampar istrinya yang banyak menuntut.

Ketika Nabi memuji Khadijah, Aisyah marah, dia bilang, "Untuk apa mengingat perempuan yang sudah tua, sementara di sampingmu ada wanita yang muda dan cantik?" Kata-kata seperti itu untuk

konteks sekarang, bisa jadi dianggap lancang terhadap Nabi. Tetapi Nabi tidak marah. Kemudian, ketika Nabi diperkenankan untuk kawin lagi, Aisyah mengatakan, "Kayaknya Allah itu mengikuti hawa nafsumu saja." Kata-kata tersebut kalau diucapkan pada zaman sekarang mungkin akan memunculkan demonstrasi besar-besaran untuk menghancurkan Aisyah. Tetapi, lagi-lagi, Nabi tidak pernah marah. Sampai akhirnya Abu Bakar, orang tuanya Aisyah, memegangnya dan mau menempeleng Aisyah, karena dianggap tidak sopan. Tapi, Nabi memegang tangan Abu Bakar dan mengatakan, "Walaupun dia anak kamu, tapi dia adalah istri saya, saya lebih berhak untuk memperlakukan dia dengan baik."

Hal yang sama terjadi juga pada Umar ibn Khattab. Dia bermaksud menempeleng Hafsah anaknya, karena sering mengikuti Aisyah yang suka protes pada Nabi. Ummu Salamah justru menasihati Umar dengan mengatakan, "Kamu aneh sekali, selalu mau ikut campur urusan-urusan kami. Nabi sendiri mendengarkan ketika kita berbicara. Nabi sendiri diam ketika kita mengkritik. Nabi justru memilih untuk berkata baik ketika kita kasar. *Kok* kamu marah-marah, dan menempelang?" Lalu Umar berkata, "Jadi begitu cara Nabi, kalau begitu saya akan meniru." Dulu, sebagaimana diceritakan Umar sendiri, sepanjang hidupnya tidak pernah membiarkan istrinya berbicara di hadapannya, apalagi memintanya berbicara atau mengajak berbicara. Ketika mendengar fakta itu, Umar baru berpikir akan mengajak bicara dengan istrinya. Itu Haditsnya sahih, dalam Bukhari.

Jadi terdapat problem konstruksi sosial yang melatari seseorang dalam melihat teks dan melihat sejarah masa lalu. Orang yang mempunyai konstruk sosial yang tidak ramah pada perempuan, akan menilai: begitulah perempuan (Aisyah, Hafsah, dan Ummu

Salamah), *bawel*, rewel, banyak menuntut dan sebagainya. Tetapi Nabi sendiri tidak berkata seperti itu. Kenapa itu terjadi? Inilah yang justru baru saya temukan pada Karen Amstrong dalam buku *Sejarah Muhammad.* Pada buku itu dia berkata, "Di sinilah letak keberhasilan Nabi mendidik perempuan." Artinya perempuan yang dulu tidak berani berbicara menjadi berani bicara dan tampil, kemudian mempengaruhi para Sahabat, di antaranya Umar yang kemudian jadi mau berbicara dengan istrinya. Para perempuan pun kemudian, ketika mengalami tindak kekerasan, jadi berani mengadukannya ke Nabi. Jadi, ketika pada waktu itu perempuan dipukul oleh suaminya, seperti kasus Zaid ibn Tsabit dan banyak lainnya, mereka mengadu ke Nabi. Dengan demikian, fenomena ihwal perempuan menuntut, melapor, meminta jatah, dan sebagainya, sudah terjadi sejak zaman Nabi, dan Nabi mendengar dan memberikan haknya. Inilah kebebasan yang diperoleh perempuan pada masa Nabi.

Semangat inilah yang harus dimiliki ketika membaca dan memformulasikan fikih pada konteks sekarang. Misalnya kita membicarakan surat *al-Mujâdalah* tentang perempuan yang protes kepada Nabi, karena sudah tua, sudah punya anak, kemudian di-*zhihâr* oleh suaminya. *Zhihâr* sendiri sebenarnya kultur Arab, bukan kultur Islam. *Zhihâr* dilakukan suami untuk membiarkan istri tanpa nafkah, tetapi statusnya tidak dicerai, karena sudah dianggap seperti ibunya. Ketika seorang perempuan di-*zhihâr* dia dianggap bukan sebagai istri lagi, karena itu tidak diberi nafkah oleh suaminya. Tetapi pada saat yang sama dia tidak bisa kawin lagi dengan orang lain, karena statusnya masih istri, sehingga dia akan terkatung-katung sampai meninggal.

Itulah kultur Arab pada saat itu. Sehingga, perempuan tadi menuntut ke Rasulullah, lantaran praktik seperti itu masih ada di dalam Islam. Sementara ia tahu bahwa Islam telah membebaskanya dari kultur yang menzalimi. "Ketika muda, saya dinikahi oleh suami saya, tapi ketika kepemudaan saya sudah hilang, dia men-*zhihâr* saya, saya sudah tidak bisa bekerja dan tidak laku lagi". Lalu Nabi berkata, "Tunggu wahyu turun." Wahyu pun kemudian turun dan mengatakan bahwa *zhihâr* tidak boleh dilakukan lebih dari empat bulan. Artinya empat bulan itu menjadi batas di mana orang disuruh memilih, membiarkan sebagai istrinya atau cerai. Kalau suami men-*zhihâr* dan tidak kembali ke istrinya, maka akan diputus cerai oleh pengadilan setelah empat bulan 10 hari. Sehingga sang istri bisa kawin dengan siapa saja. Di samping ia juga punya hak *muth'ah* demikianpun nafkah atas perceraian, untuk menutupi kebutuhan pasca-perceraian. Ini merupakan penyelesaian situasi sosial yang terjadi pada saat itu. Semangatnya adalah pembebasan.

Tetapi, ketika *zhihâr* dibawa ke masyarakat Indonesia menjadi sulit, sebab mereka tidak paham makna *zhihâr.* Ketika seorang suami mengatakan, "Kamu seperti ibu saya," dia bukan sedang menyakiti istrinya, tapi justru sedang memuji. Itu konteks Indonesia. Sebaliknya dalam konteks Arab, kalimat semacam itu adalah makian buat sang istri (*zhihâr*).

Jadi, praktik dalam kultur Arab tidak bisa diterapkan begitu saja. Sebab hal itu memiliki perbedaan makna yang signifikan antara di Arab dengan di Indonesia.

Contoh lainnya tentang *maẖram*. Dalam fikih terdapat sebuah doktrin, perempuan yang keluar rumah harus disertai muhrim. MUI pernah membuat aturan yang mewajibkan itu untuk orang haji dan TKI. Tetapi kemudian MUI mencabut larangan

bagi perempuan yang hendak haji dan mengadu nasib menjadi TKW tanpa disertai muhrimnya. Namun, beberapa perda justru kembali menyebutkan itu: perempuan tidak boleh bepergian di malam hari tanpa muhrim. Saya melihat Hadits *mahram* itu sesungguhnya adalah konsep perlindungan, bukan pembatasan. Kenapa perlu dilindungi, karena pada saat itu di Arab yang padang pasir sering terjadi perang besar-besaran. Siapa pun, terlebih perempuan, jika situasinya tidak aman, kalau pergi harus ditemani. Hadits ini muncul ketika ada Sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah kita semua mau pergi perang, istri saya mau berangkat ke Mekah sendirian." Lalu Rasulullah mengatakan, "Tidak dihalalkan bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk bepergian selama tiga hari kecuali ditemani oleh muhrim." Kalau *mahram* artinya pelarangan, maka Rasulullah akan mengatakan jemput istrimu, suruh dia pulang, tetapi Rasul tidak demikian. Rasulullah mengatakan "Temui istrimu dan temani dia sampai memenuhi keperluannya." Itu jelas sekali Haditsnya.

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab *Fath al-Bârî*, mengutip salah seorang ulama Syafiiyah, al-Royani, yang mengatakan bahwa seorang perempuan boleh pergi sendirian ke mana pun jika kondisinya aman. Perlunya muhrim adalah jika kondisinya memang tidak aman. Sayangnya kebanyakan ulama tidak memahami penekanan ini. Karena ini sesungguhnya bukan persoalan fikih, melainkan konstruksi sosial yang melatari pemahaman ulama. Dalam konteks sekarang, muhrim, atau tepatnya '*mahram*', adalah tanggung jawab negara. Bisa berbentuk undang-undang, keamanan, jalan harus terang, dan lainnya. Ketika kondisinya terancam, siapa pun tidak boleh keluar tanpa didampingi orang lain, atau kelu-

arga dekat. Terutama bagi mereka yang rentan, seperti anak-anak dan perempuan.

Yang jadi masalah adalah fikih seringkali dipahami untuk mengekang perempuan, sehingga perempuan tidak memperoleh hak-haknya. Menurut saya, pemahaman ini lebih dipengaruhi oleh konteks sosial politik yang ada di daerah tersebut dibanding oleh literatur. Sekalipun saya setuju kesadaran gender sebagai kesadaran sosial baru, yang dulu tidak ada, namun sebagai kesadaran bahwa setiap manusia mempunyai hak yang sama itu sudah ada. Karena itu, kalau kita membaca fikih, akan menemukan ada satu dua orang yang berpikir berbeda dengan *mainstream*. Bahkan ada *mainstream* yang berpikir berbeda dengan *mainstream* lainnya.

Kalau dulu ada perbudakan, kini Anda sering menyebut fenomena perdagangan manusia (human traficking) *juga sebagai perbudakan modern. Kira-kira semangat apa yang harus ditumbuhkan untuk menghilangkan perbudakan ini?*

Saya kira hampir semua ulama mengharamkan *human traficking*. Karena taktik, cara dan lainnya itu melanggar Islam. Yang problem adalah ulama tidak tergerak untuk membela mereka. Kenapa? Karena mereka mengasumsikan perdagangan perempuan terjadi karena kesalahan dari perempuan itu sendiri. Karena itu, yang harus ditumbuhkan adalah cara pandang untuk tidak menyalahkan korban, yaitu perempuan. Hal itu terjadi karena negara yang tidak melindungi masyarakatnya. Buktinya, negara lain seperti Thailand atau Filipina punya *bargaining* untuk melindungi buruh migran mereka. Kita tidak punya *bargaining*. Sebaliknya, MUI malah menyalahkan perempuan. Parahnya lagi, bukan ha-

nya MUI, tapi sebagian besar ulama masih punya pemikiran yang cenderung menyalahkan perempuan. Sikap yang sama juga ketika sebagian ulama lebih menyudutkan perempuan ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pada kasus itu, tak pelak, kebanyakan orang menyalahkan perempuan.

Artinya, perempuan berada pada relasi yang timpang dengan laki-laki. Perempuan selalu dianggap lemah, cerewet dan sebagainya. Ini juga terjadi karena relasi sosial kita yang selalu menguntungkan yang kuat. Karena itu, perlu terus menumbuhkan kesadaran gender di tengah masyarakat. Tetapi, kita juga tidak bisa hanya menyalahkan ulama, atau MUI. Perlu kesadaran semua orang untuk meluruskan relasi yang timpang ini. Karena biasanya laki-laki yang diberi kekuasaan lebih ketimbang perempuan. Pada konteks seperti inilah, perempuan selalu disalahkan, dan untuk memudahkannya, tak jarang orang menggunakan agama. Karena masyarakat kita cenderung tidak akan protes kalau dikatakan berdasar agama.

> Tidak ada fikih yang mengatakan bahwa negara Islam adalah negara yang melaksanakan seluruh syariat Islam. Karena, dalam sejarahnya, baik di Khalifah Umayah maupun Abbasiyah tidak seperti itu.

Di Indonesia kita memang telah memiliki UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Tapi problemnya, seperti UU lainnya, kesadaran terhadap UU itu sendiri belum tumbuh. Karena UU memerlukan tiga hal: konten, kultur dan aparatus. Kontennya mungkin baik, tapi kalau kultur dan aparaturnya tidak baik, maka akan percuma. UU KDRT sudah lama disahkan, sejak 2004, tapi sampai sekarang orang masih berpikir tidak apa-apa memukul perempuan. Polisinya sendiri mungkin

masih berpikir jangan-jangan istrinya yang salah. Jadi, ini jelas memerlukan waktu yang cukup panjang. Tetapi, minimal dengan adanya UU, orang jadi membahasnya. Minimal, kalau pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap masalah *traficking*, publik yang mempunyai kesadaran dapat melakukan *clash action*. Tapi, sekali lagi, UU PTPPO merupakan capaian yang sangat maju bagi Indonesia dibandingkan dengan Malaysia dan lainnya. Saya yakin semua ulama sepakat mengatakan bahwa perdagangan orang adalah haram, termasuk ulama Arab Saudi. Tetapi, karena dia tidak mau disalahkan, sehingga tidak mau memberlakukan UU PTPPO.

Tapi bukan hanya Arab Saudi, kemarin saya baru menemukan bahwa ternyata Amerika termasuk negara yang belum meratifikasi CEDAW, Konvensi internasional mengenai penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Ini sangat ironis. Padahal kita mengenal Amerika sebagai kampiun demokrasi. CEDAW selalu dibahas di Kongres Amerika, tapi juga selalu ditolak. Dan, lagi-lagi, ini mungkin disebabkan oleh poblem kekuasaan. Orang akan merasa rendah diri jika harus mengikuti Undang-Undang orang lain. Mungkin, tetapi persisnya saya tidak tahu. Padahal, Arab Saudi saja sudah meratifikasi CEDAW pada tahun 2005. Karena itu, Arab Saudi selalu mempertanggungjawabkan praktik CEDAW-nya di PBB. Artinya, betapa timpangnya dunia ini. Wajar kalau umat Islam kerap menganggap Amerika hanya membohongi mereka. Meski memang dalam setiap pembahasan konvensi intenasional selalu ada keinginan negara-negara tertentu untuk mendominasi negara lain.

Kita kembali pada istilah liberalisme sebagai pembebasan dari segala bentuk ketidakadilan. Karena itu, kita tidak bisa menempatkan manusia sebagai objek manusia lain, sehingga menjadi korban

ketidakadilan. Itulah misi pembebasan yang saya kira Islami. Dan semangat inilah yang harus ditumbuhkan pada persoalan kejahatan perdagangan manusia. Sehingga suami tidak menjadi lagi zalim kepada istri, orang tua kepada anak, majikan kepada buruh, negara kepada rakyat. Misi penghormatan kemanusiaan dalam Islam seharusnya menjadi kesadaran semua orang untuk melihat orang lain secara terhormat. Jika ini terjadi, tidak akan ada orang yang menjadi korban kejahatan *traficking*.

Semangat seperti ini yang sering hilang dalam pembicaraan mengenai fikih atau syariat Islam. Secara pribadi, saya sebenarnya tidak mempersoalkan tuntutan syariat Islam. Asalkan misinya menjadi kebutuhan publik, selama bisa didiskusikan secara publik, bukan menjadi monopoli orang tertentu yang merasa berhak mendefinisikan syariah. Hal yang sama juga saya pakai untuk demokrasi. Kalau demokrasi hanya dimonopoli orang-orang tertentu, maka tidak ada gunanya sama sekali. Ruang publik lalu tidak ada, hanya akan ada orang-orang tertentu yang merasa paling hebat dalam hal 'demokrasi' dan tidak bisa dikontrol. Orang yang mengatasnamakan syariah dan membawa-bawa Allah, seringkali merasa benar sendiri, seraya menutup dialog publik. Itu yang menjadi problem.

> Saya memaknai liberalisme sebagai pembebasan seseorang dari kungkungan sistem yang zalim, tidak adil dan memaksa, tanpa memberikan ruang kepada individu-individu untuk bisa berpikir secara rasional, sadar akan masa depan dan bertanggung jawab pada apa yang dilakukannya.

Tetapi kalau syariat Islam sudah dimanusiakan, maka sifatnya seperti fikih. Fikih itu rendah hati. Dalam kitab-kitab fikih selalu ditutup dengan kalimat *wallâhu a'lam bi al-shawâb*. Fikih,

seperti kata Imam Syafii, berpegang pada prinsip: saya benar, tapi bukan berarti orang lain salah. Saya mungkin juga salah dan orang lainlah yang benar. Sepanjang peradaban fikih, tidak ada ulama fikih yang menghendaki pandangan fikihnya dijadikan undang-undang pada sebuah negara. Fikih hanya pernah jadi mazhab. Dan mazhab tidak bisa diwajibkan kepada semua orang. Dia hanya dipraktikkan secara konsekuen oleh orang-orang yang mengikutinya.

UU sebenarnya melindungi hak perempuan. Artinya Indonesia tidak perlu lagi aturan lebih khusus. Konstitusi kita sudah menjamin dan melindungi hak-hak dan kebebasan setiap warga negara. Oleh karena itu pula, tidak perlu muncul perda syariah.

Ya, saya pikir demikian. Tetapi perda itu, menururt saya, lebih merupakan politik lokal atau bisa jadi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lokal semata. Terkadang perda dikeluarkan untuk mengatur moral masyarakat, padahal tidak ada kejelasan mengenai moral masyarakat. Yang kita perlukan adalah kejelasan definisi moral.

Tapi perda syariah merupakan bagian dari pengaturan kehidupan beragama?

Saya kira tidak sepenuhnya demikian. Perda hanya mengatur kehidupan publik saja, menurut latar lokal masing-masing. Sama seperti pengaturan seragam, waktu masuk kantor, atau yang lainnya. Problemnya, dulu tidak sensitif nilai budaya atau agama tertentu, sekarang menjadi sensitif.

Tetapi mereka yang merumuskan perda syariah mengklaim berdasarkan al-Quran?

Bisa jadi. Tapi, sebenarnya tidak sepenuhnya tepat. Karena kitab suci bisa dimaknai oleh siapapun. Pendapat yang dilontarkan seseorang bisa saja mengklaim berasal dari kitab suci, karena agama memang milik semua orang. Problemnya adalah bagaimana agar klaim itu tidak menutup opini yang berbeda dari orang lain. Karena itu, buka perdebatan ke publik, apakah betul secara fikih orang boleh menangkap perempuan yang keluar malam? Seharusnya dibicarakan terlebih dahulu dengan banyak orang sebelum memutuskan. Perda itu sama seperti UU yang lain, bisa dianulir dan bisa dibatalkan.

Mereka mencantumkan dasar al-Quran dan Hadits dalam setiap perda yang kita sebut perda syariah itu. Meski tanpa kejelasan ayat dan teks Hadits yang mana, juga tanpa kejelasan penafsiran. Tidak seperti keputusan *bahts al-masâ'il* NU atau *tarjîh* Muhammadiyah, yang menjelaskan argumentasi pemikiran sebelum membuat keputusan hukum. Ini yang perlu dibuka dan diperdebatkan ke publik. Sehingga tidak ada yang merasa paling qurani. Dan ketika kita mengkritik perda, yang katanya berdasar pada al-Quran itu, kita tidak sedang menyalahkan al-Quran. Tetapi sedang mendiskusikan perda yang dibuat oleh keputusan politik.

Dalam konteks otonomi daerah, urusan agama menjadi kewenangan pusat, bukan pemerintah daerah. Lantas bagaimana Anda menjelaskan posisi perda syariah?

Undang-undang menyatakan bahwa urusan agama menjadi hak pusat, tanpa memberi penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud

agama. Ternyata, kalau dari pagu anggaran, yang dimaksud agama adalah urusan-urusan Departemen Agama. Artinya urusan birokrasi, seperti haji dan wakaf. Itulah problem bangsa ini yang tidak tegas untuk memisahkan agama dan negara. Konstitusi itu dimaknai oleh semua orang. Kalau NU yang berkuasa, konstitusi dimaknai secara NU. Dan kalau Muhammadiyah yang berkuasa, konstitusi dimaknai secara Muhammadiyah. Di sinilah perlu kearifan untuk memunculkan karakter kebangsaan untuk semua.

Apakah perda syariah kontra-produktif bagi semangat dasar otonomi daerah?

Saya melihat problem otonomi daerah adalah problem sosial politik. Perda yang bermasalah bukan hanya perda syariah, tapi banyak sekali. Jumlahnya sekitar 460-an perda. Kebanyakan adalah persoalan keuangan dan birokrasi. Tapi, kita tidak ada yang mengkritisi hal itu. Padahal sama saja bermasalah. Menurut saya, justru perda syariah dimunculkan untuk melupakan masalah itu. Sehingga kita sibuk mengurusi perda-perda syariah dan melupakan problem perda yang lainnya. Akhirnya, kita dan mereka pun sama saja, sama-sama melupakan orang-orang yang terpinggirkan. Membiarkan rakyat menjadi korban ketimpangan sistem birokrasi, politik dan sosial yang ada. Secara politik dan kebijakan, sebenarnya perda-perda itu bisa dianulir. Tapi jangan dilakukan sepotong-sepotong. Ini problem otonomi daerah, ketika orang-orang berpikir memperoleh dukungan publik dengan cara murah.

Menurut saya, kita terlalu membesarkan perda syariah sebagai sesuatu yang mengancam Indonesia. Sementara, yang betul-betul menghancurkan, tidak kita bicarakan. Kita bilang itu bukan ba-

gian dari kita, itu bagian orang lain. Akhirnya kita terjebak pada pemahaman agama itu sendiri. Itu kerena nafsu. Pertanyaannya, siapakah yang memperoleh manfaat dari otonomi daerah itu? Setiap orang ingin mewujudkan identitasnya masing-masing. Inilah yang kemudian menutupi persoalan yang sedang dihadapi, seperti kekerasan, kemiskinan dan korupsi, yang kemudian bukan dianggap oleh pemerintah sebagai fakta, melainkan aib. Sehingga semua persoalan tersebut harus ditutupi, bukan diselesaikan. Sementara, cara orang menutupi aibnya sendiri berbeda-beda. Ada yang dengan nonton film *Ayat-Ayat Cinta,* lalu menangis di situ, sementara soal lumpur Lapindo dibiarkan saja. Sementara ada juga yang dengan menggulirkan tuntutan membuat perda-perda syariah.

> Kitab suci bisa dimaknai oleh siapapun. Pendapat yang dilontarkan seseorang bisa saja mengklaim berasal dari kitab suci, karena agama memang milik semua orang. Problemnya adalah bagaimana agar klaim itu tidak menutup opini yang berbeda dari orang lain.

Di Indramayu, contohnya, korupsi terjadi besar-besaran tetapi tidak ada yang berani mengusut. Seluruh masyarakat diam karena ditutupi oleh syariah Islam. Jadi, problem sebenarnya terkadang tidak kita ketahui lebih detil, kemudian buru-buru menyalahkan syariah Islam. Akhirnya, banyak yang marah karena itu. Orang kemudian justru membela Bupati, karena dia tetap menggunakan simbol-simbol agama. Dia menghajikan dan mengumrohkan ulama. Itu terjadi di mana-mana. Kita pun terjebak dengan melihatnya sebagai momok. Padahal, bukan itu persoalannya. Saya sendiri tidak tahu, jangan-jangan mereka juga punya pakar untuk men-*setting* kondisi seperti itu.

Kalau melihat praktiknya, benarkah agama Islam tampak anti-pluralisme?

Saya merujuk pada pengalaman umat Islam. Problem pluralisme, menurut saya, sama dengan problem demokrasi, yaitu problem komunitas. Problem mayoritas dan minoritas. Orang yang hanya punya agama, akan menggunakan agamanya. Dan yang memiliki suku, akan menggunakan kesukuannya. Belakangan, bahkan di negara kampiun pluralisme, Belanda, ternyata muncul sosok Geert Wilders yang membuat film antipluralisme. Di Belanda, kini, telah banyak orang-orang yang antipluralisme, mungkin sampai 30%. Ini merupakan problem sosial. Jadi, kita malah mencari justifikasinya masing-masing. Tetapi, pada masa pemerintahan Islam, di Spanyol, semua orang dari tiga kelompok agama besar (Islam, Kristen dan Yahudi), hidup rukun.

Dalam pandangan saya, fikih juga menyediakan banyak literatur tentang pluralisme atau anti-pluralisme. Tergantung bagaimana membacanya. Yang menentukan sekarang adalah sikap kita. Saya, secara pribadi, sangat setuju dengan ulama NU yang mengatakan bahwa negara Indonsia adalah final. Konstitusi Indonesia merupakan satu-satunya rujukan kehidupan sosial. Kalau konstitusi menjadi rujukan, kita tidak boleh melakukan kekerasan pada siapapun yang berbeda. Perbedaan harus dihargai, dan orang-orangnya memperoleh jaminan hidup di negara ini. Itulah keputusan ulama Islam Indonesia mengenai pluralisme.

Hampir di setiap negara Islam terdapat pengalaman menyerang dan memasung pemikiran berbeda. Demikianpun yang belakangan terjadi

di Indonesia dengan munculnya fatwa haram untuk pemikiran dan aliran tertentu yang berbeda.

Saya lebih setuju kalau kita menyebutnya umat Islam, bukan Islamnya. Karena kalau umat Islam artinya pengalaman sejarah peradaban Islam. Dan pengalaman itu beragam. Misalnya, kalau kita membaca *Musyawarah Buku* karya Khaled Abou El-Fadl, akan tahu bahwa sepanjang peradaban Islam banyak ulama yang berpendapat terbuka sekaligus mengamalkan nilai-nilai pluralisme, walaupun baru sebatas tingkat tertentu dalam toleransi. Meski definisi pluralisme sendiri berbeda-beda, fenomena dan ulama yang berwawasan dan bersikap terbuka sangat mungkin sudah ada. Misalnya, dalam sejarah tercatat umat non-Muslim bisa masuk masjid, bahkan bisa ikut berperang. Sementara secara teologis gagasan pluralisme sangat rumit dan panjang.

Fikih telah menggariskan prinsip-prinsip perbedaan pendapat, prinsip ijtihad dan pertautan dengan nilai-nail lain yang berkembang. Fikih itu penuh filsafat hukum. Ini yang harus dikembangkan. Fikih sendiri dikembangkan dengan penerimaan bahwa ajaran Islam rasional dan bisa dipahami akal (*ma'qûliyyat al-ma'nâ*).

Sebaliknya, juga terjadi dalam sejarah peradaban umat Islam di mana fatwa haram, sesat, bahkan tindak kekerasan dan pembunuhan cukup sengit mengiringi. Perseturuan paling panjang yang kerap mempertontonkan sikap anti-pluralisme dalam sejarah adalah konflik Syi'ah dan Suni. Tetapi semuanya tetap diakui sebagai Islam, meski dengan argumentasi keislaman masing-masing. Di dalam Suni sendiri perseturuan seperti itu pernah terjadi antara Hambali dan Hanafi. Jadi, masih antar-mereka yang mengatasna-

makan Islam. Misalnya kasus al-Hallaj yang punya pengikut sangat banyak. Walaupun orang mengatakan dia melakukan bidah, ia tetap punya umat. Di Kristen, perseturuan antara gereja dan sekular juga begitu keras, sampai terjadi pergantian kepemimpinan dari gereja ke sekular.

Sementara Islam tidak memiliki demarkasi yang jelas antara pemerintahan Islam dan sekular. Sehingga, pertikain dalam Islam tidak sesadis dalam pengalaman Kristen. Kalau dalam sejarah peradaban Barat, konflik agama dan sekular tersebut terjadi sangat panjang.

Namun demikian, yang menguntungkan buat Barat dan gereja, konflik tersebut menghasilkan sintesa yang jelas. Sebab, dalam Islam konfliknya masih abu-abu. Sehingga sintesanya juga abu-abu. Misalnya, seorang Din Syamsuddin yang dulunya pluralis, ketika masuk MUI malah menjadi antipluralis. Dengan model-model demikian, tampaknya kita masih sulit memunculkan sebuah sintesa menuju yang sekular-plural.

Kesulitan tersebut nyata dalam kasus Ahmadiyah. Kita punya konstitusi, undang-undang, yang secara tegas menolak kekerasan. Kalau dari sisi mayoritas Muslim menyalahkan, menyesatkan, dan mengkafirkan, saya kira bukan hanya di Indonesia saja. Di mana-mana, hal yang sama juga terjadi. Menyalahkan yang lain sebenarnya tidaklah bermasalah, selama tidak menggunakan kekerasan. Yang problem adalah ketika pertikaian tersebut muncul sebagai ancaman, seperti ungkapan akan membunuh warga Ahmadiyah dan sebagainya. Celakanya, pemerintah diam saja, karena lemah. Saya sendiri tidak tahu arah pemerintahan kita. Saya juga tidak tahu siapa yang membuat skenario politik pluralisme bangsa ini hendak dibawa ke mana. Padahal, kalau negara kuat

dan melindungi warga negara, sebanyak apapun fatwa haram yang dibuat MUI, tidak akan menimbulkan kekerasan. Yang salah di sini adalah negara. Saya melihatnya pada problem pemerintahan kita sekarang yang tidak punya ketegasan.

Bagaimana keterlibatan Fahmina Institute dalam advokasi warga Ahmadiyah di Manis Lor, Kuningan?

Kami terlibat, tapi tidak menggunakan bendera Fahmina. Kami berpartisipasi lebih pada kemanusiaan, bukan kelembagaan. Kami menghimpun data dan memfasilitasi mereka untuk bertemu dengan beberapa pihak. Kita sangat dekat dengan masyarakat. Dan, sejauh ini, kita bisa menjaga kedekatan tersebut. Saya berpandangan demikian juga karena saya punya pengalaman di masyarakat lokal yang berhubungan erat dengan masyarakat. Seberapa bagusnya sebuah ide, kalau tidak menggunakan strategi yang jelas, maka, terkadang, tidak bisa diterima masyakat.

Kalau negara kuat dan melindungi warga negara, maka MUI mau membuat fatwa haram sebanyak apapun, tidak akan terjadi kekerasan. Yang salah di sini negara, bukan MUI."

Sebagai lembaga yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, apa yang ingin disuarakan Fahmina terkait tiga isu besar sekularisme, liberalisme dan pluralisme?

Ada dua pembicaraan yang sampai sekarang masih menjadi masalah aktual di kalangan aktivis. Apakah kita harus ikut mengurusi negara atau hanya memberdayakan masyarakat. Dulu, ke-

banyakan orang mengatakan kita tidak perlu mengurus negara. Tapi ternyata sekarang negara yang bermain, atau dipermainkan pihak lain. Makanya, banyak juga yang berpikir kalau kita harus masuk mengurusi negara. Terkait dengan tiga isu: sekularisme, liberalisme dan pluralisme, saya lebih cenderung bagaimana menggunakan isu ini untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat agar memahami hak-haknya sebagai warga negara. Mereka harus bisa menyadari haknya untuk mendapatkan kebutuhan, meningkatkan kemampuan mereka dalam bernegosiasi dan menyuarakan aspirasi.

Kita tidak bisa menjelaskan ketiga isu itu ke tengah masyarakat dengan teori. Apalagi setelah diterbitkannya fatwa MUI yang mengharamkannya. Kita akan ditolak. Tetapi, kalau kita membicarakannya dengan contoh-contoh praktis, mereka mungkin akan menerimanya. Kami membicarakan ketiga konsep itu dalam ruang tertutup. Sementara ketika di tingkat lokal, kita membicarakan hak-hak perempuan, hak hidup warga, hak-hak Ahmadiyah dan sebagainya. Tentu saja, kalau kita bicara hal itu, kita tidak ingin bermain-main dengan literatur yang tidak dipahami oleh publik.

Anda dikenal sebagai pakar fikih. Bagaimana Anda merespon anggapan bahwa fikih merupakan sumber masalah? Lantas apa yang disuarakan oleh fikih?

Perubahan sosial di masyarakat tidak mungkin lepas dari potensi sosial yang ada. Oleh karena itu, kita harus bisa membaca potensi ini. Masyarakat Muslim Indonesia kebanyakan hanya memahami fikih. Sedikit saja yang memahami teologi dan filsafat.

Mungkin ada juga yang memahami tasawuf. Karena itu, potensi tersebut, harus diberdayakan untuk melakukan perubahan sosial. Perubahan sosial, akan menghadapi kesulitan jika berhadap-hadapan dengan fikih atau syariat Islam. Di mana-mana, perubahan akan sulit dicapai tanpa menggunakan potensi-potensi yang ada. Problemnya adalah bagaimana kita menggunakan potensi itu. Kitab fikih yang kita baca mestinya harus mulai dipahami sebagai bukan fikih yang sebagaimana adanya. Kita harus memahaminya dengan semangat pembebasan. Bisa jadi, ini dianggap eklektik. Tapi, percayalah, tidak ada orang yang hidup di dunia ini tanpa laku eklektik, tanpa mengkombinasikan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang diperolehnya. Semua pandangan, pada akhirnya, adalah sintesa eklektis dari pandangan-pandangan yang sudah ada atau sedang berkembang.

Faktanya, fikih yang Anda kembangkan mendapatkan tentangan dari orang lain yang mengklaim pandangannya berdasar fikih juga. Bagaimana Anda mengomentarinya?

Ya, saya paham. Dan itu terjadi tidak hanya di dalam fikih. Misalnya, kita mengklaim bahwa pluralisme, liberalisme dan sekularisme adalah milik Barat. Tapi ada juga yang berpandangan sebaliknya. Misalnya saja Tariq Ali yang menyerang demokrasi Barat dari sisi Hak Asasi Manusia, begitu juga Noam Chomsky. Artinya, fikih juga bisa dimaknai banyak pihak. Bahkan ada yang berpikir bahwa fikih sudah mandeg, sebagaimana pada zaman awal. Namun juga tetap banyak yang berpikir bahwa fikih itu bisa dan selalu progresif, memandang masalah untuk masa depan.

Artinya, ada sesuatu yang harus diluruskan dari perkembangan pemikiran fikih di Indonesia atau di dunia Islam secara umum?

Kita harus memahami bahwa hidup itu berjalan ke depan, bukan ke belakang. Kalau kita berpikir ke depan, berarti berpikir untuk kemajuan peradaban ke depan. Bukan ke belakang atau membiarkan hidup kita ditarik-tarik ke romantisme masa lalu. Kalangan yang memandegkan fikih bermimpi seolah sedang berada di fikih masa lalu. Padahal yang dihadapi adalah masa kini. Kesadaran hidup ke depan memungkinkan kita untuk membaca semua hal pada konteks kekinian dan ke depan, bukan pada konteks ke belakang. Saya yakin, yang mengatakan bahwa pencuri harus dipotong tangannya, akan sulit diterjemahkan ke dalam Undang-undang. Itu pikiran semu, yang pasti akan menemukan konflik dengan pikiran orang lain.

Fikih telah menggariskan prinsip-prinsip perbedaan pendapat, prinsip ijtihad dan pertautan dengan nilai-nail lain yang berkembang. Fikih itu penuh filsafat hukum. Ini yang harus dikembangkan. Fikih sendiri dikembangkan dengan penerimaan bahwa ajaran Islam rasional dan bisa dipahami akal (*ma'qûliyat al-ma'nâ*). Akal manusia harus banyak bekerja untuk fikih. Pada awalnya, kerja akal ini memunculkan metode *qiyâs*, *isti<u>h</u>sân*, *mashla<u>h</u>ah mursalah*. Pada perkembangannya kemudian muncul konsep *maqâshid al-syarî'ah*. Ini adalah perkembangan yang sangat menakjubkan. Sayang ini kurang dikembangkan oleh umat Islam. Termasuk pada masa sekarang. Umat Islam masih kerap dicekoki paham bahwa ajaran Islam itu tidak memakai akal. "Kalau memakai akal tidak mungkin mengusap sepatu, ketika wudlu, di bagian atas kaki, padahal yang kotor di bagian bawah sepatu. Ini pembodohan," demikian

kata mereka. Padahal banyak sekali ayat yang mengajak berpikir, merenung dan menyimpulkan. Ini yang perlu dikembangkan dalam kajian Islam.

> Fatwa MUI tidak akan dipedulikan masyarakat, kalau kondisi ekonomi membaik dan negara bersikap tegas. Karena, sesungguhnya masyarakat tidak mengetahui makna sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Yang menyebabkan terjadinya kekerasan di masyarakat, sebenarnya lebih dipicu oleh keinginan seseorang atau kelompok untuk menguasai orang lain.

Melalui persentuhannya dengan masyarakat, apa yang Anda tangkap dari pemahaman masyarakat terhadap fatwa MUI yang mengharamkan sekularisme, liberalisme dan pluralisme? Apakah Anda melihat kondisi massa yang mengarah pada sikap politik inteloran? Lantas, bagaimana masa depan pluralisme di Indonesia?

Menurut saya, fatwa MUI tidak akan dipedulikan masyarakat, kalau kondisi ekonomi membaik dan negara bersikap tegas. Karena masyarakat sesungguhnya tidak mengetahui makna dari sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Mereka bahkan tidak pernah tahu soal fatwa itu. Kekerasan di masyarakat sendiri sebenarnya lebih dipicu oleh keinginan seseorang atau kelompok untuk menguasai orang lain. Masyarakat sendiri bingung harus mendasarkan tindakannya pada alasan apa. Jika menggunakan hukum, tingkat legitimasinya lemah. Sebab tidak sakral. Maka, cara yang paling aman adalah menggunakan fatwa MUI, sehingga dia punya alasan lebih kuat.

Jadi, banyak faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan kekerasan, diantaranya: kemiskinan, psikologi, tidak bekerja, kecemburan dan lain sebagainya. Hanya saja mereka kebingungan untuk mencari alasan bertindak anarkis, sehing-

ga menggunakan fatwa MUI. Dengan basis argumentasi fatwa MUI, seolah mereka terbebas dari polisi, karena merasa sebagai pembela agama.

Sebagai pendidikan publik, kita harus menghadirkan fatwa lain selain MUI. Atau menghadirkan pandangan dan kajian-kajian yang lebih baik mengenai pluralisme atau yang lain, agar masyarakat juga memperoleh hak pengetahuan dan informasi yang cukup mengenai hal-hal itu. Selebihnya, kita biarkan mereka memahami secara dewasa, tidak dipaksa, membandingkan dan menerima secara bertanggung jawab. Pada titik inilah diperlukan adanya ruang sosial dan ruang politik yang mendidik semua orang.

Untuk konteks Indonesia, ruang seperti ini memang agak sulit ketika kebutuhan kebanyakan orang masih pada hal-hal dasar seperti makan, papan dan sandang. Kejernihan memahami dan menerima persoalan menjadi agak sedikit sulit, jika kebutuhan-kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi. Ini menjadi tugas kita semua.

Dan kita sebenarnya punya potensi besar untuk sukses sebagai bangsa besar. Dari dulu, kita sudah terdiri dari berbagai ragam etnik, golongan, agama dan kepercayaan. Kita bisa mengelola itu dan kita telah melampaui itu semua. Ke depan, kita pasti bisa. Yang terjadi sekarang ini, hanyalah riak-riak kecil akibat dari perbenturan yang sesungguhnya terjadi di seberang sana, namun masuk ke Indonesia. Mudah-mudahan dengan cepat badai ini bisa berlalu.

Wawancara dilakukan di Fahmina, Jumat, 11 April 2008

Percakapan dengan

Farid Wajidi

Farid Wajidi, Direktur LKiS (Lembaga Kajian Islam dan Sosial) Yogyakarta. Ia memperoleh gelar MA bidang Sejarah Islam Indonesi di Universitas Leiden, Belanda (1999) dan sekarang sedang menyelesaikan disertasi berjudul "Muslim Civil Society in Transitional Indonesia: A study on Muslim NGOs and Alternative Informal Networks in Java" di Universitas Utrecht, Belanda.

Tantangan bagi negara yang plural adalah bagaimana menerjemahkan setiap ketentuan partikular dari agama menjadi nilai yang bisa dirumuskan secara universal sehingga diterima oleh mereka yang bukan penganutnya sekalipun. Karena itu jangan selalu membatasi pada satu sistem bentukan masa lalu untuk diterapkan pada kehidupan publik sekarang yang jauh lebih kompleks. Jangan pula negara diatur menurut ketentuan agama tertentu tanpa melalui proses deliberasi yang melibatkan seluruh partisipasi warga secara setara. Nabi mengisyaratkan, *Antum a'lamu bi-umûri dunyâkum*. Inilah pentingnya sekularisme, yang sejatinya malah menjaga eksistensi agama agar terhindar dari upaya-upaya pemerosotan lantaran menjadi alat kekuasaan belaka.

Ramai pro dan kontra menyertai sekularisme. Bagi mereka yang pro, sekularisme dianggap sebagai usaha untuk menyelamatkan agama dari kepentingan kelompok tertentu ataupun segelintir orang. Sebaliknya, mereka yang kontra menganggap sekularisme justru akan membunuh agama. Di Indonesia, puncak dari pro dan kontra itu adalah munculnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan sekularisme bersama liberalisme dan pluralisme. Bagaimana pandangan Anda mengenai paham ini?

Saya rasa ada kecenderungan untuk mereduksi pengertian sekularisme seolah-olah ia berarti pandangan antiagama. Pandangan ini terutama sering dikemukakan oleh kelompok keagamaan yang tidak menyetujuinya. Jadi, seolah-olah kalau kita memilih sekularisme kita bermaksud menolak hidup kita diatur oleh agama dan eksistensi agama menjadi terancam karenanya. Memang ada sebagian penganut sekularisme yang mengambil posisi seperti itu, karena pengalaman traumatik di masa lalu, tetapi itu bukan seluruh pengertian mengenai kata itu.

Secara umum kita tahu bahwa sebagai sebuah konsep sekularisme lahir sebagai respon terhadap sebuah situasi Eropa Abad Pertengahan di mana agama menjadi kekuatan yang sangat dominan, baik secara kultural, di mana ia menjadi alat ukur satu-satunya mengenai apa yang benar secara mutlak, maupun secara politik di mana kekuasaan yang ditopang oleh Gereja menjadi kekuasaan yang sangat otoriter. Sekularisme lahir dari situasi yang otoriter dan menindas kebebasan berpikir seperti itu. Dan ia menjadi gerakan perlawanan yang keras di hadapan kecenderungan untuk menjadikan agama sebagai pusat dari seluruh pandangan dunia. Hal ini tentu saja menimbulkan krisis di kalangan agama.

Dari sinilah, saya kira, asal mula dari pandangan negatif kalangan agamawan terhadap sekularisme. Jadi ada trauma besar atas sejarah perselingkuhan kekuasaan politik dan kekuasaan agama. Orang-orang yang berpikir bebas kemudian menganggap agama sudah tidak lagi memadai menjawab persoalan kontemporer. Karena itu, kalangan konservatif memandang bila sekularisme diterapkan maka agama akan semakin terpinggirkan. Kehadiran ilmu pengetahuan baru seolah-olah akan selalu berujung pada upaya menyudutkan agama. Jadi, saya bisa memahami penolakan terhadap sekularisme, tetapi segera harus diberi catatan bahwa ia tidak selalu harus berarti demikian.

Bagi saya, sebagai sebuah konsep politik, sekularisme berarti pemisahan antara otoritas agama dan negara, di mana urusan agama tidak diintervensi oleh negara sebaliknya diserahkan sepenuhnya kepada para penganutnya sendiri, begitupun negara tidak diatur menurut ketentuan agama tertentu, melainkan harus ditangani melalui proses deliberasi yang melibatkan partisipasi semua warga negara secara setara.

Anda ingin mengatakan bahwa sekularisme sebetulnya tidak meminggirkan agama?

Ya. Sekularisme menyerahkan semua persoalan yang sifatnya publik terhadap orang-orang yang berkepentingan di dalamnya. Berbagai persoalan publik harus diatur oleh semua kelompok berdasarkan kesepakatan bersama. Saya beranggapan bahwa Nabi Muhammad mengisyaratkan sikap ini ketika beliau mengatakan: *Antum a'lamu bi-umûri dunyâkum*.

Saya sendiri memandang sekularisme sebagai sebuah keharusan, sebagian mungkin karena keyakinan dasar saya tentang kekuasaan. Kekuasaan selalu punya potensi untuk korup, dan tujuan utama penguasa setelah berkuasa pada umumnya adalah mempertahankan kekuasaannya. Jadi, sekularisme bagi saya berguna untuk menghalangi penggumpalan kekuasaan yang sangat besar, menjadi totaliter, dan tidak bisa dikoreksi.

Sekularisme berarti pemisahan antara otoritas agama dan negara, di mana urusan agama tidak diintervensi oleh negara sebaliknya diserahkan sepenuhnya kepada para penganutnya sendiri, begitupun negara tidak diatur menurut ketentuan agama tertentu, melainkan harus ditangani melalui proses deliberasi yang melibatkan partisipasi semua warga negara secara setara.

Nah, Abdullahi Ahmed An-Na'im, pemikir Islam asal Sudan, menambahkan aspek lain yang menarik dalam hal ini. Dia mengatakan, sekularisme justru diperlukan karena alasan untuk menjaga eksistensi agama itu sendiri, karena melalui sekularisme kita bisa menghindarkan agama mengalami pemerosotan lantaran menjadi alat politik kekuasaan.

Di Indonesia ada aspirasi dari sebagian kelompok Muslim untuk menerapkan syariat Islam. Menanggapi aspirasi ini, saya juga teringat An-Na'im pernah mengatakan bahwa kita tidak dapat sepenuhnya menolak penerapkan syariat Islam secara membabi-buta, karena syariah memang ada bersama kita. Namun, pada saat yang sama, kita juga tidak bisa menerapkan syariah secara mentah-mentah, meskipun itu

oleh negara. Lantas rumusan seperti apa yang memungkinkan agama dapat diterima dan diterapkan dalam ruang publik?

Saya setuju dengan An-Na'im. Dia mengatakan kecenderungan seseorang atau sebuah komunitas terhadap syariah adalah positif. Dalam arti ada semangat untuk menjunjung tinggi hukum, dan ini adalah sehat dalam sebuah masyarakat. Akan tetapi hukum seperti apa yang bisa dipakai? Dalam konteks masyarakat plural tantangannya adalah bagaimana menurunkan ketentuan-ketentuan partikular dari agama menjadi nilai yang bisa dirumuskan secara universal, sehingga bisa diterima bahkan oleh mereka yang bukan penganutnya. Misalnya, bila semangat menegakkan syariah kita terjemahkan ke dalam rumusan-rumusan yang mencerminkan semangat menegakkan keadilan, ia akan bisa lebih diterima dan beroleh titik temunya dengan komunitas lain. Semangat itu harus dihantarkan kepada pencarian dan perumusan nilai-nilai substantif agama yang juga bisa diterima oleh penganut agama yang lain.

Yang amat menggelisahkan saya dari usaha penerapan syariah adalah, dan ini juga diungkapkan An-Na'im: *pertama*, kecenderungan untuk mengeksklusi orang lain yang bukan penganut Islam; *kedua*, tampak sekali adanya tendensi untuk meminggirkan perempuan; dan *ketiga*, secara teknis rumusan-rumusan yang mereka tawarkan umumnya tidak memadai, karena kecenderungan untuk menarik semuanya ke masa lalu. Padahal situasi hidup kita jauh lebih rumit dan kompleks ketimbang masa-masa formatif ketika ketentuan-ketentuan syariah, atau lebih tepatnya fikih, dirumuskan dan dibakukan.

Mereka yang menolak sekularisme menawarkan konsep negara Islam. Mereka percaya bahwa Islam memiliki konsep yang jelas mengenai bagaimana negara mesti diatur, yaitu khilâfah Islamiyah. Apakah menurut Anda pemerintahan al-Khulafâ' al-Râsyidûn *hingga Turki Utsmani sebagai prototipe pemerintahan Islam yang berbeda dari sistem lainnya?*

Saya kira tidak. Bila kita kembali ke sejarah, kita melihat bahwa sistem pemerintahan Islam di masa lalu tampak berbeda-beda. Ada yang kerajaan, *khilâfah*, dan demokrasi terbatas. Dan perbedaan itu, terjadi pada fase-fase awal dalam sejarah Islam. Saya lebih setuju bahwa Islam tidak mengajarkan konsep baku tentang sistem kenegaraan, tapi lebih mengajarkan pada nilai-nilai. Khilâfah, menurut saya, tidak ada bedanya dengan sistem kekaisaran.

Menurut saya, sistem khilâfah tidak bisa disebut sebagai sistem yang islami, karena ia mewakili hanya satu episode dari perjalanan panjang sejarah Islam. Jadi, kenapa hanya episode itu yang diambil, bukan yang lain. Dari banyak episode, kita sebetulnya diberi banyak pilihan pula. Khusus mengenai mereka yang ingin membangkitkan kembali gagasan mengenai *khilâfah* islamiyah, terus terang saya

> Dalam konteks masyarakat plural tantangannya adalah bagaimana menurunkan ketentuan-ketentuan partikular dari agama menjadi nilai yang bisa dirumuskan secara universal sehingga bisa diterima bahkan oleh mereka yang bukan penganutnya. Misalnya, bila semangat menegakkan syariah kita terjemahkan ke dalam rumusan-rumusan yang mencerminkan semangat menegakkan keadilan, ia akan bisa lebih diterima dan beroleh titik temunya dengan komunitas lain.

benar-benar tidak bisa mengerti. Pada level gagasan ia sangat problematis, tetapi yang lebih rumit adalah membayangkan pada tingkat implementasinya. Dari mana mulainya, bagaimana membuat negara-negara bangsa yang sudah terpisah-pisah itu menyatu tunduk di bawah suatu kekuasaan tunggal, bagaimana kesepakatan dibuat, dan seterusnya. Jadi, bagi saya, itu gagasan absurd. Tetapi, ya sudah, kalau itu menjadi keyakinan mereka. Sejauh tidak memaksa orang lain untuk ikut atau menempuh jalan kekerasan, biarkan saja.

Bila membaca Farag Fauda, tampak jelas bahwa konsep khilâfah sebetulnya sangat tidak ideal, pun al-Khulafâ' al-Râsyidûn. Apakah Anda setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa Piagam Madinah, yang kemudian menginspirasi lahirnya Piagam Jakarta, adalah sebuah rumusan pemerintahan Islam yang ideal?

Memang ada warisan yang positif dari periode-periode awal pemerintahan Islam. Piagam Madinah itu sangat bagus. Akan tetapi ketika kita menarik begitu saja satu model tertentu dari periode tertentu, yang mungkin terjadi justru akan memiskinkan referensi kita, karena mengabaikan yang lain, dan akhirnya membuat kita terperangkap di masa lalu.

Prinsip menghargai keragaman di dalam Piagam Madinah adalah pandangan yang sangat maju, kalau kita melihat ke periode itu. Namun begitu, saya tidak ingin mengatakan bahwa kita harus meninggalkan warisan itu, tapi yang ingin saya tekankan adalah: jangan membatasi pada satu sistem yang dibentuk di masa lalu dan terus dibawa hingga sekarang. Menurut saya, upaya semacam itu justru tidak produktif, karena kini hidup kita lebih rumit dibanding masa itu. Soal pluralisme, misalnya, pada saat ini sudah

sangat berbeda. Kita tidak bisa lagi melihat pluralisme hanya sebagai kenyataan yang berbeda-beda. Tetapi, sekarang pluralisme adalah sesuatu yang harus kita gumuli, kita sikapi lebih positif, dan harus bermuara pada penghormatan yang setara kepada semua kelompok. Misalnya, bagaimana kita menghayati keimanan kita seraya akrab berhubungan dengan komunitas agama lain. Suasananya akan sangat berbeda. Kesediaan kita untuk mau menggumuli justru membuat kita lebih kaya.

Dengan begitu, apakah menurut Anda kemunculan wacana perda syariah merupakan sesuatu yang justru tidak produktif?

Kalau itu menjadi produk tertentu dari satu lembaga legislatif di daerah tertentu berarti mewakili sebagian pendapat orang. Ada orang atau kelompok yang meyakini bahwa bangsa ini harus diselamatkan dengan syariah, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dan kelompok seperti itu sebetulnya hanya kelompok kecil, tetapi sangat gigih sehingga kelihatan mencolok kehadiran mereka. Sementara di kelompok lain, terutama non-Muslim, ada kegelisahan. Mereka sampai bertanya-tanya: apakah kesepakatan nasional atas bentuk negara ini sudah diubah menjadi negara Islam?

Apakah itu produktif? Di samping beberapa problem yang sudah saya utarakan tadi, keberatan saya atas tuntutan seperti ini adalah kecenderungannya untuk memecahkan semua persoalan semata-mata dari sisi moral. Satu contoh yang bisa saya sebutkan, misalnya, adalah kebijakan pemerintah Bantul untuk membuat Perda Larangan Pelacuran. Perda itu menimbulkan beberapa implikasi dan akhirnya mendorong beberapa kelompok di Yogyakarta membentuk suatu aliansi untuk menolak Perda Larangan Pelacur-

an. Contoh serupa gampang kita temukan di tempat lain. Padahal, persoalan pokoknya, pada hemat saya, bukan bahwa mereka setuju dengan pelacuran, tapi pendekatan yang diambil dianggap tidak akan menyelesaikan masalah. Karena, perda-perda semacam itu hanya melihat masalah semata-mata secara moralistik. Daripada memecahkan masalah, kebijakan semacam itu berpotensi menimbulkan masalah-masalah baru.

Problem pertama, bila kita menggunakan pendekatan ini, kita tidak akan bisa memahami masalah yang sebenarnya dan kadang justru kita menghindari masalah sebenarnya. Munculnya pelacuran, misalnya, umumnya terkait dengan persoalan ekonomi. Menangkapi orang-orang yang berada di luar rumah pada malam hari adalah pekerjaan yang tidak menyelesaikan masalah. Di Parangkusuma, misalnya, ada istri pejabat desa yang tertangkap karena kebetulan dia jalan-jalan di pantai. Di daerah tersebut ada tradisi di mana pada malam tertentu warga melakukan *tirakat* di luar rumah. Karena ada perda ini mereka menjadi terganggu.

Menurut saya, membuat kebijakan semacam itu justru tidak akan menyelesaikan persoalan. Masalahnya bukan apakah orang bermoral atau tidak, tapi ada masalah lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ironis, bahwa upaya sekelompok orang untuk mendorong pendekatan moralistik ini justru memperkuat kecenderungan pemerintah kita untuk menyelesaikan masalah secara gampangan. Seolah-olah pemerintah telah melakukan sesuatu. Padahal yang mereka kerjakan adalah, sengaja atau tidak, menghindar atau mengelak dari persoalan intinya: menyelesaikan problem kemiskinan yang tentu saja memerlukan komitmen yang lebih kuat, kegiatan yang terencana, dan pasti lebih sulit. Jadi, pendekatan ini mendorong pemerintah cuci tangan.

Bagi saya, pendekatan moralistik seperti itu pertama-tama tidak mengatasi masalah; kedua, melahirkan risiko lain, misalnya penyebaran HIV-AIDS yang lebih luas. Saya mendapat info dari seorang dokter bahwa angka pengidap HIV-AIDS di Bantul itu paling tinggi di wilayah Yogyakarta. Menurut dokter yang melakukan studi persebaran HIV-AIDS, kelompok terbesar penderita adalah ibu rumah tangga. Mereka terjangkit HIV-AIDS diduga karena praktik medis yang tidak sehat di puskesmas-puskesmas yang ada di Bantul.

> Yang amat menggelisahkan saya dari usaha penerapan syariah adalah, dan ini juga diungkapkan An-Na'im: *pertama*, kecenderungan untuk mengeksklusi orang lain yang bukan penganut Islam; *kedua*, tampak sekali adanya tendensi untuk meminggirkan perempuan; dan *ketiga*, secara teknis rumusan-rumusan yang mereka tawarkan umumnya tidak memadai, karena kecenderungan untuk menarik semuanya ke masa lalu.

Dari sini kita bisa melihat bahwa pendekatan ini tidak mampu mengurangi angka penderita secara medis. Karena ia menyelesaikan dari tingkat yang lain. Pengalaman di banyak tempat menunjukkan, jika tindakan dan pendekatan moralistik semacam itu yang dipilih, hal itu justru berpotensi memperparah keadaan, karena orang menjadi cenderung tidak mau terbuka, akibat stigma terhadap orang-orang yang menderita HIV-AIDS. Alih-alih membantu memberantas HIV-AIDS, sebagaimana diklaim dinas kesehatan Bantul, langkah itu justru menghilangkan sarana untuk mengontrol penyebarannya.

Bukankah model-model penerapan perda syariah seperti di Bantul yang cenderung restriktif dan hanya menyentuh persoalan moral secara sosial menunjukkan lemahnya kapasitas negara?

Pada hal tertentu saya rasa memang demikian. Menyelesaikan kemiskinan dan pelacuran, misalnya, memang pekerjaan yang luar biasa susah. Kita tahu itu sangat berat. Tapi itulah salah satu tugas pokok pemerintah. Sayangnya, mereka bergerak ke arah lain, bukan pemecahan masalah yang sebenarnya.

Dalam konteks banyaknya eksistensi kepercayaan lokal dan munculnya kelompok baru harus dipahami sebagai gejala dari proses transisi. Negara yang dulunya teramat kuat menjadi kehilangan kemampuannya untuk mengontrol beberapa kelompok agama tertentu yang menghendaki bubarnya Ahmadiyah dan paham keagamaan lainnya yang berbeda. Celakanya, negara bukan hanya membiarkan, bahkan juga aktif menjebloskan mereka yang dianggap sesat oleh mainstream ke dalam penjara. Apakah ini bentuk mangkirnya pemerintah untuk melindungi dan menjamin hak-hak warga?

Dalam hal ini memang terlihat jelas bahwa pemerintah sekarang tidak memfungsikan diri sebagaimana mestinya yaitu sebagai pelindung atas hak-hak dasar warga negaranya. Sebetulnya, bagi saya, ini soal kekuasaan. Pemerintah mengambil sikap yang cenderung membenarkan sebuah fatwa yang diskriminatif, karena takut dianggap memusuhi Islam yang dianut mayoritas, atau tidak mencerminkan komitmennya pada Islam. Jadi, dalam hal ini memang konteksnya secara politik negara lemah. Implikasinya, negara tidak mampu melindungi warga negaranya. Padahal, soal keyakinan

adalah hak dasar dan tidak bisa dilanggar siapapun. Negara harus melindungi semua warga negaranya secara sama.

Apakah itu juga disebabkan negara yang terlalu mengurusi banyak persoalan, sementara kekuatan yang dimilikinya terlampau kecil?

Saya kira pemerintah itu bekerja tidak pada persoalan-persoalan yang riil. Situasinya juga sangat politis. Tapi secara teoretis memang benar, bahwa ketika negara terlalu banyak mengurusi pekerjaan seperti itu maka akan terlalu banyak pekerjaan penting yang terlewatkan.

Sampai batas mana menerjemahkan agama dalam konteks yang mutakhir, yang lebih sesuai dengan tafsir HAM, kebebasan berpikir, dan kehidupan publik yang plural?

Titik berangkatnya saya kira adalah penghormatan atas martabat manusia. Saya percaya kepada adanya HAM yang tak bisa diingkari oleh siapapun. Dan kepercayaan seperti itu kemudian membentuk bagaimana saya bersikap dan beriman. Kepercayaan itu menjadi bagian dari keyakinan Islam yang saya anut. Pandangan diskriminatif, kalau itu didasarkan atas teks-teks keagamaan tertentu, menurut saya, harus ditafsir ulang.

Sekularisme menyerahkan semua persoalan yang sifatnya publik terhadap orang-orang yang berkepentingan di dalamnya. Berbagai persoalan publik harus diatur oleh semua kelompok berdasarkan kesepakatan bersama. Saya beranggapan bahwa Nabi Muhammad mengisyaratkan sikap ini ketika beliau mengatakan: *Antum a'lamu bi-umûri dunyâkum.*

Kita harus sadar bahwa semua pandangan keagamaan adalah hasil interpretasi manusia atas teks-teks keagamaan. Artinya, dia mencerminkan cara pandangan yang sangat dipengaruhi oleh konteks waktu, kebudayaan, dan posisi sosial tertentu. Jadi, tidak bisa dibekukan untuk berlaku dalam semua waktu dan konteks lainnya. Kita harus melihat ulang pandangan-pandangan keagamaan yang ada dengan meletakkannya dalam konteks awalnya, baru kemudian mentransfer nilai-nilainya ke dalam konteks sosial dan budaya yang baru.

Dalam konteks ini seluruh kecenderungan untuk menutup diskusi dan memaksa kita mengikuti pandangan yang mapan, sekalipun tidak relevan, harus dilawan. Kebebasan berpikir adalah syarat dari beragama yang hakiki. Kelompok konservatif begitu gemar mengkampanyekan bahwa ketika orang menggunakan akal sebebas-bebasnya, maka orang akan kehilangan imannya. Itu pandangan yang aneh. Justru sebaliknya, orang baru bisa beragama secara *genuine* ketika dia memproses model keberagamaan dari kepalanya sendiri. Menolak kebebasan berpikir sendiri, menurut saya, tidak masuk akal. Karena kita sendiri tidak bisa meyakini apa-apa bila tidak diawali dari akal kita sebagai sesuatu yang diyakini dari pemberian Tuhan untuk menemukan kebenaran. Kita tidak akan kehilangan iman, melainkan beriman dengan cara baru yang mestinya lebih kokoh dan kontekstual.

Dalam konsep beragama, agama apa pun, kita kenal berbagai mazhab. Dengan munculnya beragam mazhab dan teologi memungkinkan setiap orang menjadi berbeda-beda, padahal bagi kebanyakan orang beragama memerlukan satu pegangan dan kepastian tertentu?

Iman bagi saya adalah sesuatu yang personal, dan kepastian itu harus kita tentukan sendiri. Mungkin dalam hal tertentu kita harus mengikuti pandangan seorang ulama karena keterbatasan waktu dan kemampuan kita untuk menjelejahi seluruh khazanah pemikiran keagamaan mengenai isu tertentu, tetapi yang penting adalah bahwa itu terjadi tetap dengan memikirkan seluruh argumennya. Dan dalam hal-hal tertentu, saya kira, kita bisa memilih.

Prinsip menghargai keragaman di dalam Piagam Madinah adalah pandangan yang sangat maju, kalau kita melihat ke periode itu. Namun begitu, saya tidak ingin mengatakan bahwa kita harus meninggalkan warisan itu, tapi yang ingin saya tekankan adalah: jangan membatasi pada satu sistem yang dibentuk di masa lalu dan terus dibawa hingga sekarang. Menurut saya upaya semacam itu justru tidak produktif, karena kini hidup kita lebih rumit dibanding masa itu.

Jadi, selalu ada pengecualian-pengecualian. Ada teman saya yang Muslim, tapi dia tidak suka dengan praktik penyembelihan kambing saat Idul Adha, dia bertanya: "Mengapa ekspresi keberagamaan harus diungkapkan dalam bentuk ini?" Saya kira dalam hal itu dia bisa membuat pengecualian. Saya kira eklektisisme dalam beragama itu sah-sah saja.

Tapi sebagian besar orang Islam menganggap pandangan liberal, yang memberikan ruang bagi perbedaan keberagamaan, sangat berbahaya?

Semua orang mempunyai hak untuk setuju atau tidak atas suatu pandangan keagamaan tertentu. Tidak jadi soal, malah bagus, kalau itu mendorong terjadinya dialog terus-menerus. Yang

penting tidak ada pemaksaan, dan jangan pernah menggunakan instrumen agama untuk memberlakukan aturan tertentu. Penting diingat, ini sama sekali bukan pemikiran yang baru dan tidak dikenal dalam tradisi Islam klasik. Para imam mazhab dalam masa formatif Islam tampaknya selalu sadar akan potensi perbedaan ini, dan mereka saling menenggang satu sama lain.

Menarik, dulu Imam Ahmad, misalnya, pernah menolak ketika khalifah al-Mansur berkeinginan agar kitabnya *al-Muwaththa'* mau ditetapkan sebagai kanon resmi negara saat itu. Beliau terkenal sebagai orang yang sangat ketat dalam pandangan keagamaannya, tapi *toh* tetap menolak formalisasi semacam itu. Beliau menolak penyeragaman pandangan seperti yang sekarang diinginkan banyak kalangan islamis. Saya kira beliau sangat sadar bahwa sekali otoritas itu diberikan kepada kekuasaan politik, upaya mengontrolnya agar tidak menjadi absolutis menjadi sangat berat.

Apakah sikap liberal dalam pemikiran dan pandangan keagamaan juga harus diikuti dengan dukungan terhadap liberalisme ekonomi?

Ini isu penting yang harus didiskusikan, terutama sehubungan dengan banyak diskusi mengenai kapitalisme global (atau neo-liberalisme) yang berjalan seiring dengan proses globalisasi sekarang. Saya kira jawabannya tidak harus demikian, tidak harus sama sebangun antara keduanya. Tentu saja, saya kira, kita harus menekankan adanya hak individu atas hak milik yang merupakan salah satu hak dasar dalam pandangan Islam, sebagaimana yang sering disebut dalam diskusi mengenai *maqâshid al-syarî'ah*.

Tetapi bagi saya sendiri selain prinsip kebebasan, prinsip keadilan adalah nilai yang juga sangat mendasar dalam pandangan

Islam. Di samping sumbangannya terhadap perkembangan ekonomi modern, liberalisme ekonomi dipandang sangat berpotensi menciptakan ketimpangan ekonomi yang membuat ketidakadilan dalam kehidupan sosial kita semakin mencolok. Banyak studi juga mengatakan bahwa ketidakadilan sosial yang mencolok itu juga telah menyumbang kepada pengerasan dalam pandangan keagamaan yang menjurus pada tindak kekerasan. Jadi, saya kira, upaya untuk mendorong perkembangan pemikiran keagamaan yang moderat dan toleran itu harus juga dibarengi dengan upaya menyelesaikan problem ketidakadilan ekonomi sampai pada tingkat yang bisa kita tolerir.

Nah, dalam konteks ini, kembali ke diskusi kita di atas, saya kira kita perlu merumuskan pandangan yang lebih tepat mengenai sekularisme yang tidak dengan sendirinya berarti peminggiran sepenuhnya terhadap peran agama dalam menangani problem-problem kemanusiaan yang riil. Ada beberapa konsep yang pernah ditawarkan sejauh ini, apakah itu yang disebut dengan deprivatisasi atau *public religion* sebagaimana yang ditawarkan Casanova. Menurut saya kita sebenarnya berada dalam posisi yang baik untuk merumuskan sejenis sekularisme yang tidak dilahirkan dari sebuah pengalaman traumatis sebagaimana terjadi dalam sejarah Eropa.

Terkait dengan relasi negara dan masyarakat. Apakah konstitusi negara saat ini, Pancasila dan UUD 45, Anda nilai sudah final dan cukup memadai dalam mengatasi berbagai persoalan sosial di masyarakat sekarang ini?

Untuk konteks sekarang saya kira cukup memadai. Dalam arti ia memberikan pijakan bagi setiap kelompok dalam rangka mem-

pertahankan eksistensinya masing-masing, sehingga mereka diakui sebagai bagian yang sah dari warga negara. Jadi, dalam konteks itu, konstitusi sudah memadai, dibanding pandangan yang berkeinginan untuk mengekslusi kelompok lain. Di situ bisa dirumuskan etika dan pola hubungan di antara berbagai kelompok. Konstitusi kita memberikan ruang bagi setiap kelompok, sosial dan agama, walaupun ia tetap harus diwarisi dengan sikap terbuka, yaitu tetap terbuka dengan penafsiran-penafsiran yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Sayangnya, pengalaman kita selama Orde Baru telah memacetkan upaya kita untuk mengembangkannya lebih jauh sesuai dengan kebutuhan perkembangan sosial kita. Kendati demikian, diskusi seperti ini harus dimulai sekarang.

Bagaimana Anda melihat fatwa MUI yang menurut sebagian pihak bertentangan dengan konstitusi, sebagaimana fatwa mengenai sesatnya Ahmadiyah, dan beberapa kelompok keagamaan seperti Komunitas Eden dan Usman Roy?

Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya rasa kita perlu mengklarifikasi terlebih dahulu mengenai bagaimana sebenarnya posisi fatwa dalam sistem hukum Islam. Problemnya kadang-kadang bukan muncul dari fatwa itu sendiri, tetapi juga karena ada kesalahpahaman mengenai makna fatwa ini dan bagaimana umat seharusnya bersikap ketika sebuah fatwa dikeluarkan.

Secara definisi fatwa adalah sebuah hasil perumusan hukum yang diambil oleh mereka yang dipandang otoritatif dalam bidang agama. Katakanlah, ia adalah hasil ijtihad. Tetapi yang jarang disadari orang adalah bahwa fatwa adalah pendapat hukum yang sifatnya tidak mengikat. Dalam banyak hal, sejak lama ulama kita

seringkali berbeda pendapat, sehingga menyediakan banyak pilihan bagi umat Islam untuk mengikuti pendapat yang mana yang dia rasakan cocok. Itu yang seringkali dikatakan bahwa perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Implikasinya, seorang Muslim tidak harus merasa berdosa kalau tidak mengikuti MUI, dan boleh mengikuti pendapat yang lain. Salah satu masalah kita, lagi-lagi, adalah adanya kecenderungan untuk menyeragamkan pandangan keagamaan tertentu dan kesalahpahaman bahwa setiap fatwa harus diikuti oleh seluruh umat Islam, kalau perlu dengan cara paksaan dan mengintimidasi orang yang tidak menerimanya.

> Kebebasan berpikir adalah syarat dari beragama yang hakiki. Kelompok konservatif begitu gemar mengkampanyekan bahwa ketika orang menggunakan akal sebebas-bebasnya, maka orang akan kehilangan imannya. Itu pandangan yang aneh. Justru sebaliknya, orang baru bisa beragama secara *genuine* ketika dia memproses model keberagamaan dari kepalanya sendiri.

Lalu, soal fatwa itu sendiri, kita harus menempatkannya dalam konteks yang tepat. Terlepas dari setuju atau tidak dengan fatwa yang dikeluarkan, kita harus melihatnya sebagai bentuk upaya untuk memberikan salah satu panduan keagamaan kepada umat. Hanya saja, dia harus berhenti pada titik itu, dan tidak menuntut negara untuk menjadikannya sebagai pendapat resmi sebuah negara mengenai isu keagamaan. Memang memprihatinkan bahwa MUI sekarang didominasi oleh kelompok konservatif, sehingga produk fatwanya lebih mencerminkan kepanikan moral yang akut di hadapan dunia yang berubah. Itulah realitas kita hari ini. Tapi MUI akan diting-galkan oleh sebagian besar umat Islam kalau terus begitu.

Berkenaan dengan sebuah fatwa mengenai eksistensi suatu kelompok keagamaan yang hak-haknya dihormati dalam konstitusi, negara harus berdiri tegak di atas prinsip konstitusinya sendiri. Dan itulah, saya kira, posisi yang tak bisa ditawar dari sebuah negara yang tidak berdasarkan agama tertentu, melainkan Pancasila yang mengakui eksistensi semua kelompok dan aliran agama. Apalagi negara kita juga sudah meratifikasi Deklarasi Umum HAM. Ratifikasi itu harus secara konsisten diikuti oleh pemerintah dengan tindakan nyata di dalam setiap kebijakannya.

Banyak orang sekarang dibuat gelisah oleh gejala merosotnya penghargaan terhadap pluralitas yang sejak lama menjadi bagian inheren dalam masyarakat. Di kalangan umat Islam, setelah keluarnya fatwa MUI, masyarakat menjadi jengah dengan kata pluralisme. Asumsi yang dibangun adalah pluralisme akan melahirkan sinkretisme dan relativisme. Menurut Anda, apakah makna pluralisme itu benar sesuai dengan apa yang ditafsirkan MUI?

Dalam pengertian tertentu, saya memang seorang relativis. Saya memahami tindakan beragama adalah usaha untuk menangkap dan berhubungan dengan realitas absolut yang disebut Tuhan. Dalam arti itu, seberapa pun dalamnya keyakinan saya sendiri atas cara beragama yang saya pilih, saya tetap harus meletakkannya sebagai pandangan yang relatif dan tidak bisa saya klaim secara pasti sebagai cara beragama yang pasti benar menurut Tuhan dan karena itu menjadi kebenaran bagi setiap orang. Itu sudah cukup bagi saya dan tidak bisa lebih dari itu. Saya hanya bisa beragama dalam kapasitas saya sebagai manusia, yang memilik kelemahan dan keterbatasan. Itu terjemahan saya atas makna tauhid.

Posisi ini pula yang akan saya pakai ketika saya bertemu orang lain, sehingga saya tidak bisa memutlakkan pikiran saya sendiri dan tidak merasa mempunyai hak untuk menilai iman orang lain. Karena itu saya berusaha menempatkan semua keyakinan secara sejajar. Yang demikian itu membuat saya menghargai pluralisme. Dalam arti bahwa pandangan kelompok lain harus diberi kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka juga punya potensi benar.

Salah satu masalah kita, lagi-lagi, adalah adanya kecenderungan untuk menyeragamkan pandangan keagamaan tertentu dan kesalahpahaman bahwa setiap fatwa harus diikuti oleh seluruh umat Islam, kalau perlu dengan cara paksaan dan mengintimidasi orang yang tidak menerimanya.

Menurut saya, pandangan seperti ini bisa ditemukan dasarnya dalam al-Quran. Tuhan memberi tempat kepada orang Yahudi, Kristen, dan agama lainnya, dan berjanji memberikan ganjaran atas perbuatan baik yang mereka lakukan secara tulus.

Apakah itu bisa menjadi pembenaran akan sebuah pandangan bahwa ada keselamatan di luar Islam, seperti halnya doktrin Katolik yang mengakui adanya keselamatan di luar gereja. Tanggapan Anda?

Ya. Tuhan, saya kira, tidak peduli dengan kotak-kotak agama. Yang terpenting adalah perbuatan baik, ketulusan, dan kerendahan hati. Bagi saya itulah yang masuk akal dan adil. Karena, kalau saya lahir dan besar dalam dan dengan komunitas agama Kristen, misalnya, saya tidak akan tumbuh kecuali dalam kapasitas sebagai seorang Kristen. Dengan cara berpikir seperti ini, maka saya tidak bisa mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar Islam.

Bagaimana konsep pluralisme yang dipahami sebagai sinkretisme agama?

Kalau saya mendefinisikan beragama sebagai proses pencarian, sebagaimana saya sebut di atas. Maka saya juga tidak punya problem dengan sinkretisme. Kita akhirnya sadar bahwa yang terjadi adalah bahwa kita meramu sendiri bangunan keimanan kita melalui proses bongkar pasang terus-menerus atas sejumlah warisan kultural, agama, pemahaman atas berbagai kitab suci, pemikiran filosofis, dan seterusnya. Sinkretisme dalam pengertian ini tidak terhindarkan. Dan itu terjadi pada setiap orang, saya kira. Masalahnya, apa kita mau melihat ini secara jujur atau tidak. Ini persis seperti kalau kita merenungi identitas diri kita, yang kalau kita *preteli* satu per satu, kita mungkin tidak bisa lagi mendefinisikan siapa diri kita pada akhirnya.

Wawancara dilakukan pada 22 Maret 2008

Percakapan dengan

Franz Dahler
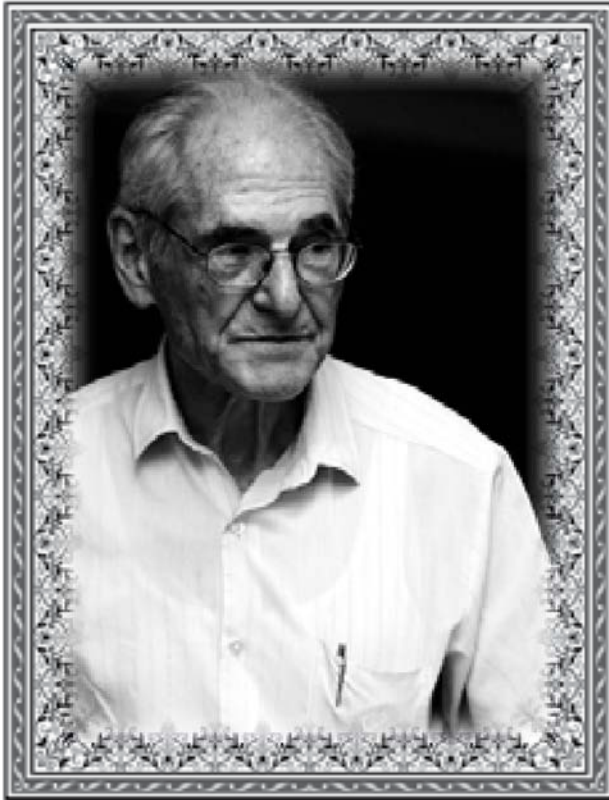
Franz Dahler, aktivis dialog antaragama kelahiran Swiss (St. Gallen). Sebelum kembali ke Swiss sebagai redaktur majalah Intrakultural, selama 1962-1979 ia menjadi Pastor Mahasiswa dan dosen Agama/Filsafat di Magelang, Semarang, dan Jakarta. Gelar Doktor Teologi ia peroleh dari the University of Innsbruck, Austria. Beberapa bukunya terbit dalam bahasa Indonesia, salah satunya "Pijar Peradaban Manusia: Denyut Harapan Evolusi", Kanisius (2000).

Sekularisasi memberi ruang bagi agama untuk berperan di ranah publik. Namun agama tidak boleh merampas hak setiap warga. Sebab, yang pertama kali ditekankan agama bukanlah kebaktian (ritual), tapi bagaimana mencintai Tuhan dan manusia sekaligus (perikemanusiaan dan keadilan sosial). Jika begitu, semua pihak harus rendah hati dan mengakui bahwa pengetahuan kita, termasuk tentang agama, terbatas dan tidak bisa meraih kebenaran mutlak. Artinya, diperlukan kerja sama dan tukar pikiran. Sebab relativisme positif dalam beragama sekalipun lebih berupa kehendak untuk menautkan keimanan kita pada iman lain dalam kerangka belajar dari agama lainnya. Dari sini, liberalisme dengan spiritnya mengutamakan kebebasan individu, dalam bingkai dan struktur negara yang disebut demokrasi, patut didorong.

Bagaimana Anda memahami sekularisme?

Saya membedakan antara sekularisme dan sekularisasi. Dawam Rahardjo memberikan konotasi yang positif terhadap sekularisme, sedangkan saya tidak. Penggunaan kata sekularisme dan sekularisasi dalam bahasa Barat atau juga di kalangan gereja memiliki arti yang lain. Sekularisme adalah sikap yang terarah melulu akan hal duniawi tanpa memandang pemahaman agama, terlebih lagi kehidupan di akhirat. Menurut pandangan ini, hal-hal seperti itu sama sekali tidak memiliki arti. Gejala-gejala sekularisme adalah konsumerisme, *entertainment*, *infotainment,* dan merajalelanya kepentingan ekonomis sampai timbul penghisapan baru atas diri manusia. Itu yang dinamakan sekularisme.

Sedangkan sekularisasi merupakan pemisahan antara urusan negara dan agama. Sekularisasi mula-mula oleh gereja ditanggapi negatif dan ditakuti, sebagaimana sekarang juga dalam umat Islam. Dalam konsep itu seakan-akan agama diremehkan. Anggapan seperti itu bisa muncul dalam proses sekularisasi, tetapi sebenarnya tidak perlu terjadi. Sebab sekularisasi juga bisa membawa dampak yang positif bagi agama. Seperti di Amerika Serikat ada pemisahan antara negara dan agama, tapi agama di situ justru berkembang. Gereja-gereja juga tidak kekurangan uang. Ketakutan akan sekularisasi bagi kalangan agamawan, di beberapa negara Barat, adalah bahwa mereka akan bertambah miskin dengan tidak adanya subsidi dari negara.

Dari sekularisasi juga muncul konsep privatisasi agama. Bagaimana Anda melihat konsep ini?

Privatisasi dalam artian yang fanatis berarti agama tidak usah berbicara dalam bidang politik atau kehidupan sosial politik. Saya memandang keliru privatisasi dalam arti seperti itu. Sebab agama tetap merupakan faktor penting dalam kehidupan masyarakat. Rata-rata di negara Barat, di mana ada sekularisasi, diakui juga bahwa agama mempunyai peranan sebagai faktor sosial dan politis, bahkan seringkali diminta bantuan. Misalnya, dalam dunia pendidikan ada sekolah-sekolah Katolik atau Protestan, *private school* atau juga dalam dunia pendidikan di sekolah-sekolah negeri biasanya diberikan pelajaran agama, kendati pelajaran agama sekarang mengalami perubahan. Kalau dulu—saya ber-bicara mengenai Swiss karena saya paling tahu keadaannya—biasanya ajaran agama itu ditujukan pada agama tertentu. Ajaran agama Katolik dipisahkan dari ajaran Protestan, apalagi ajaran agama Islam. Sekarang di beberapa tempat mulai diadakan ajaran agama Islam. Di sekolah dasar masih ada tuntutan agar pengajaran agama diwajibkan. Sementara di sekolah negeri yang merupakan mayoritas, beberapa tahun yang lalu ada kecenderungan ingin menghapuskan ajaran agama. Tetapi ada yang protes: mengapa seorang murid harus pandai ilmu bumi, ilmu eksak, ilmu sosial, tapi dalam ilmu agama dia bodoh? Dia seharusnya mengetahui agama juga. Dia harus diberikan pengetahuan agama, tidak hanya mengenai agama Kristen, tetapi juga agama lain, seperti Islam, Hindu, dan Budha. Di Swiss agama Budha sangat diminati.

Namun ajaran agama tidak boleh sampai menjadi tekanan buat anak didik, misalnya tekanan mengikuti kebaktian Kristen. Jadi ada pemisahan antara kebaktian dan pengetahuan. Dulu di beberapa tempat masih ada pewajiban seperti itu. Sebelum pelajaran dimulai, ada doa, begitupun doa penutup ketika pelajaran

usai. Sekarang tradisi seperti itu tidak ada lagi. Sehingga pelajaran agama bersifat pengetahuan dan kemudian diujikan, dengan begitu siswa mendapatkan nilai. Sebagaimana di Indonesia, agama menjadi mata pelajaran wajib dan diujikan. Tetapi tentu saja itu tidak sama di semua negara Eropa.

Sekularisme adalah sikap yang terarah melulu akan hal duniawi tanpa memandang pemahaman agama, terlebih lagi kehidupan di akhirat... Sedangkan sekularisasi merupakan pemisahan antara urusan negara dan agama. Sekularisasi, mula-mula dalam gereja ditanggapi negatif dan ditakuti, sebagaimana sekarang juga dalam umat Islam. Dalam konsep itu seakan-akan agama diremehkan. Anggapan seperti itu bisa muncul dalam proses sekularisasi, tetapi sebenarnya tidak perlu terjadi. Sebab sekularisasi juga bisa membawa dampak yang positif bagi agama.

Ada semacam koreksi terhadap sekularisasi yang cenderung memunculkan privatisasi agama. Koreksi ini dimunculkan oleh Jose Casanova dengan konsep deprivatisasi agama. Dengan menakar peran dan fungsi agama, melalui konsep deprivatisasi, dalam merespon persoalan yang tengah menimpa masyarakat, kira-kira sampai batas mana agama secara efektif berpihak untuk kesejahteraan umum?

Seperti yang tadi saya bilang, saya memberikan definisi tentang sekularisasi yang sebetulnya masih dalam tanda tanya: bagaimana urusan agama dipisahkan dari urusan negara? Apa urusan negara itu? Apa kaitan agama dengan kesejahteraan umum? Menurut saya, urusan agama juga tidak lepas dari kesejahteraan umum. Agama memperhatikan kesejahteraan umum, tetapi lebih dalam bidang spiritual berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Sedangkan negara, dalam proses sekularisasinya, tidak menanyakan faktor Tuhan. Ken-

datipun, lagi-lagi, sudah disadari bahwa pemisahan mutlak antara urusan negara dan agama tidaklah mungkin. Fenomena pemisahan mutlak itu mungkin paling keras terjadi di Prancis.

Bagaimana Anda menanggapi fenomena partai politik agama? Di mana posisi partai agama dalam arus sekularisasi?

Partai politik agama di Jerman ada, yaitu *Christlich Demokratsche Union* (CDU); di Swiss juga ada, yakni *Christliche Volkspartei* (CVP). Tetapi tidak berarti bahwa semua orang Katolik masuk ke dalam partai itu. Saya secara pribadi tidak masuk partai itu, karena bagi saya ia terlalu kanan, sedangkan saya cenderung kiri dan lebih memperhatikan faktor keadilan sosial dan nasib orang miskin. Itu arah saya. Hal seperti itu lebih terpelihara dalam partai sosial demokrat daripada partai Katolik. Demikian juga di Jerman. Partai Katolik seringkali lebih dekat dengan kaum borjuis yang kaya. Walaupun tidak selalu demikian, sebab partai agama di beberapa daerah juga ada sayap berhaluan sosial. Bapak saya dulu ikut di situ.

Dalam definisi sekularisasi yang Anda sebutkan tadi, apakah partai politik punya tempat dalam konsep pemisahan antara agama dan negara?

Ya, masih punya tempat seperti terlihat di Swiss dan Jerman, sementara di Prancis, Inggris dan Amerika, tidak. *Jerman speaking countries* terdapat partai-partai yang menggunakan nama Katolik atau Kristen.

Menurut pengamatan Anda, apa yang menjadi motivasi kalangan agamawan berkiprah di dunia politik melalui partai politik agama? Kenapa mereka tidak memperjuangkan aspirasinya melalui partai politik sekular? Kenapa mesti ada partai agama?

Liberalisme adalah pandangan yang mengutamakan kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi juga menyangkut kebebasan pers, kebebasan agama dan kebudayaan seperti yang tercantum dalam deklarasi hak asasi manusia (HAM). Sebetulnya deklarasi HAM adalah cetusan dari spirit liberal. Liberal dalam arti historis, bukan dalam arti neoliberal.

Di Amerika Serikat, tidak terdapat partai agama, hanya Demokrat, Republik, dan partai kecil-kecil lain. Di Inggris juga begitu. Di Itali sekarang partai Katolik tidak berarti lagi. Seperti di Indonesia juga, ada partai Kristen dan Katolik, tetapi tidak berarti bahwa partai itu menjadi pilihan orang-orang Kristen atau Katolik, yang justru kebanyakan memilih Golkar atau PDI. Di situ, bagi mereka, mungkin malah lebih mempunyai pengaruh, ada lebih banyak hasil dibandingkan dengan partai yang memakai bendera agama yang jelas.

Artinya, apakah proses sekularisasi dan sekularisme yang terjadi di Barat, juga di dunia lain, memang meminggirkan agama?

Tidak bisa disangkal, bahwa bahaya itu ada. Tetapi agama harus berani menempuh risiko itu. Harus belajar positif, mengapa banyak orang menjadi ateis. Kadang-kadang bisa karena konsumerisme atau sekularisme yang kian buruk, tapi kadang-kadang orang juga menjauhi agama atas pertimbangan yang lebih mendalam, ka-

rena kesalahan dan kekolotan para pimpinan agama sendiri yang kurang memperhatikan mental generasi muda. Sebagai tambahan informasi, bahwa di Barat anak-anak yang sudah mencapai rata-rata usia 16 tahun sudah menentukan pilihan hidupnya sendiri. Kalau bapak-ibunya memaksa, mereka berontak. Saya pernah berbicara dengan anak-anak saya: "Kelihatan bahwa generasi muda sekarang meremehkan atau tidak mengindahkan agama". Mereka menjawab: "Bapak salah". Jadi tidak bisa ditafsirkan bahwa mereka, generasi muda di Barat, tidak punya penghargaan terhadap agama. Sementara itu, di sekolah-sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah-sekolah menengah atas (SMA) ada pilihan sukarela antara mengikuti les agama atau tidak. Kebanyakan dari mereka masih memilih mengikuti les agama, karena agama masih dianggap hal yang tidak bisa diremehkan dan menjadi faktor penting dalam kehidupan. Tetapi jangan menyinggung atau membatasi kebebasan orang muda. Merekalah yang mau menentukan, tidak bisa ditakdirkan dari atas.

Bahwa agama semakin mundur dan tersisihkan, bukankah itu fakta?

Ya, secara resmi, di Barat orang yang pergi ke gereja semakin berkurang. Berbeda dengan yang saya saksikan di Indonesia dan Malaysia. Ketika saya pergi ke Malaysia, gereja penuh sesak. Saya menjadi iri hati. Mereka yang pergi ke gereja banyak juga orang muda. Waktu saya di Yogyakarta, dan masuk ke gereja, di kiri-kanan saya semua orang muda. Sedangkan kalau saya pergi ke gereja di Swiss, di kiri-kanan saya orang-orang yang seusia saya, atau malah lebih tua, kira-kira berusia di atas 50 tahun. Artinya, jika agama diartikan seba-

gai ibadah atau kebaktian, ya memang agama mundur. Tetapi dalam hal penghayatan filsafat hidup, saya kira, yang ateis itu minoritas. Mayoritas masih mengakui Tuhan. Minat untuk mempelajari filsafat atau teologi juga tidak berkurang. Kalau gereja Katolik mengalami kekurangan pastor, salah satu sebabnya banyak calon yang sebetulnya mempunyai minat dan bakat untuk menjadi pastor, namun tidak mau diwajibkan untuk tidak kawin (selibat). Tapi, lagi-lagi, minat generasi muda untuk mempelajari teologi tidak merosot. Dalam hal ini, minat terhadap agama, lebih-lebih dalam arti spiritual-psikologis (bahwa agama dibutuhkan untuk kesehatan jiwa dan pendalaman hidup) tidak merosot.

> Pluralisme adalah kebhinekatunggal-ikaan. Jadi kesatuan tidak begitu dipentingkan, sebab dapat menjadikan perbedaan hilang. Perbedaan tetap dihargai, bahkan sebaiknya harus tetap ada. Secara teologis, Tuhan sendiri menghendaki kebhinekaan. Hal itu terlihat dalam dunia tumbuhan dan binatang, ada biodiversitas yang mengagumkan. Kemajemukan berlaku juga pada dunia manusia, sehingga ada perbedaan suku, bangsa, kebudayaan, bahasa dan agama. Pluralisme, secara teologis, mencerminkan cinta Tuhan akan kebhinekaan.

Data tentang Eropa ini memang kasus yang khas Eropa, seperti kasus kartun Nabi Muhammad di Jyllan Posten*, juga kasus di beberapa wilayah di Eropa, seperti Denmark, Ceko atau wilayah Skandinavia, di mana antiagama sudah menjadi* life style*, sebagai fashion. Ini tidak bisa dimungkiri. Pertanyaannya: kira-kira apakah sekularisasi itu ancaman atau keniscayaan?*

Saya kira orang Barat harus menemukan Tuhan dan agamanya secara baru. Konsumerisme yang merajalela membuat banyak orang lebih mementingkan nikmat hidup duniawi ketimbang agama yang mengajarkan cita-cita luhur. Ini praktik sekularisasi dalam arti sangat negatif.

Tetapi ada juga sekularisasi dalam artian yang tidak bisa ditafsirkan negatif, yakni keinginan membina filsafat hidup atas pertimbangan pikiran mereka sendiri. Seperti tadi saya katakan bahwa disiplin teologi dan filsafat tetap diminati. Putra saya hampir masuk fakultas filsafat, dan putri saya sekarang masuk fakultas psikologi. Dalam psikologi pasti terdapat dimensi agama, materinya tidak bisa lepas dari agama. Jadi agama sebagai nilai hidup, saya rasa, tidak bisa begitu saja dibilang mundur, kalau saya boleh bicara atas nama generasi muda, yang saya masih menjaga banyak pergaulan dengan mereka. Tetapi, catatan yang paling penting dari fenomena tersebut, jangan sekali-kali mengharuskan agama kepada mereka.

Respon Vatikan terhadap fenomena itu sendiri bagaimana?

Sebagai pimpinan tertinggi, Vatikan ingin mengkristenkan lagi generasi muda. Agenda ini disebut injilisasi, evangelisasi, atau penginjilan dalam bahasa Indonesia. Paus Johannes Paulus II, yang sudah meninggal dua tahun yang lalu, menganjurkan program evangelisasi. Generasi muda harus diajarkan lagi agama Kristen. Ini maksudnya baik. Tetapi jangan mempertahankan hal-hal yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi, misalnya pandangan puritan mengenai seksualitas. Generasi muda di Barat menentukan agama dan seksualitasnya sendiri. Perihal berhubungan seks dengan pacar, mereka sendirilah yang menentukan. Memang ada juga yang mau

menunggu sampai perkawinan, tetapi yang demikian ini minoritas. Mayoritas anak muda berpandangan bahwa sebelum perkawinan harus ada pengalaman seksual. Sementara kalangan gereja masih bersifat puritan, lebih keras dari saya. Faktor seksualitas generasi muda itu sangat mempengaruhi mereka dalam menjauhi gereja. Mereka juga menolak larangan terhadap alat-alat kontrasepsi, seperti kondom dan sebagainya. Meskipun demikian, selalu ada minoritas yang masih setuju dengan larangan itu, terutama yang dibimbing oleh badan tertentu (Opus Dei, misalnya). Ketika Paus berkunjung ke Jerman dan Swiss, kaum mudanya berbondong-bondong seakan-akan mayoritas generasi muda mendukung Paus. Tetapi media massa memberikan kesan keliru, lantaran dalam kenyataan mayoritas tidak mendukung Paus dalam masalah ini.

Apakah dengan kasus itu bisa dikatakan bahwa agama-agama formal, dalam hal ini Katolik atau Kristen, tidak memberikan suatu format yang bisa mengakomodasi aspirasi dari kalangan sekularis?

Jawabannya tidak mudah. Ada bagian-bagian dalam gereja yang memang kurang bisa menanggapi aspirasi kalangan sekularis. Tetapi, terutama setelah konsili Vatikan II (1962-1965), gereja tampak mengalami kemajuan besar. Konsili itu mengusahakan agar gereja beradaptasi dengan dunia modern, juga mulai melihat akan kebutuhan umat manusia untuk perdamaian dan keadilan sosial. Sekarang gereja mulai menyadari masalah kelestarian alam. Aspirasi gereja terhadap umat manusia itu sekaligus juga mendekatkan agama Katolik dan Kristen, bahkan membuka jalan, menuju pergaulan yang baik dengan agama Islam, Hindu, dan Budha. Sejauh menyangkut adaptasi dengan generasi muda, betapa terasa pengaruh positif gereja, karena

kaum muda rata-rata lebih sadar akan masalah perdamaian, keadilan sosial, dan lingkungan yang diperjuangkan oleh sebagian gereja.

Meskipun kaum muda bersimpati dengan sikap terbuka gereja, mereka tetap enggan pergi ke gereja pada hari Minggu. Mereka mungkin bersedia berdoa di alam bebas atau dalam perkemahan atau di suatu kebaktian yang diadakan secara khusus bagi mereka. Musik modern, band, nyanyian yang bergairah menarik mereka untuk ikut dalam kebaktian. Tetapi usaha ke arah itu masih kurang. Faktor musik sangat penting bagi generasi muda. Jadi lagu-lagu iman yang *up to date* seperti musik spiritual gaya Amerika berkenan sekali bagi mereka. Secara keseluruhan generasi muda tidak menyangkal relevansi agama.

Kasus-kasus mengenai fenomena terpinggirkannya agama di setiap tempat berbeda-beda. Eropa, misalnya, punya style*-nya sendiri. Berbeda dari Eropa, di Amerika agama masih tampil agak eksplisit dan mempunyai peran yang cukup penting. Berbeda lagi di negara-negara Timur, misalnya di Indonesia atau negara-negara Arab, di sini agama masih memunculkan bentuk yang lebih eksplisit dalam kehidupan publik. Menurut Anda, kenapa kasusnya berbeda-beda?*

Saya sendiri bertanya pada diri sendiri kenapa perbedaan antara Amerika dan Eropa itu begitu mencolok. Gereja-gereja di Amerika masih penuh, dan banyak aliran-aliran atau sekte-sekte agama baru yang muncul. Sedangkan di Eropa, meskipun juga terdapat hal-hal yang semacam itu, namun masih kalah jauh dibandingkan dengan Amerika. Lebih memprihatinkan lagi di Prancis atau Jerman Timur yang dulu komunis. Masyarakat Jerman Timur rata-rata tidak peduli pada agama.

Kenapa hal itu bisa terjadi?

Banyak faktor, tidak bisa satu dimensi saja. Bisa saja faktor konsumerisme dan kemakmuran yang me-'ninabobokan'. Negara-negara sekarang bertambah kaya. Dulu, 100 tahun yang lalu, daerah di mana saya tinggal masih dianggap miskin. Sekarang hanya sedikit penduduk yang miskin, terutama imigran-imigran. Kemewahan yang terlampau mencolok. Anak-anak keluarga kaya yang baru berusia 20 tahun sudah dihadiahkan mobil oleh orang tua mereka. Dengan mobil mereka bisa ke sana-kemari. Lalu hari Sabtu dan Minggu maunya ke disko dan pulang sangat malam. Saya tidak suka menyaksikan kenyataan yang demikian. Tetapi kalaupun saya berontak tak ada gunanya.

> Pluralisme, secara teologis, mencerminkan cinta Tuhan akan kebhinekaan. Pluralisme dalam arti politis berarti bahwa setiap lapisan masyarakat punya hak hidup. Setiap jenis masyarakat punya hak untuk hidup.

Di Eropa, meskipun masyarakatnya jarang ke gereja, mereka masih beretika, dalam pengertian menjunjung tinggi asas kemanusiaan. Tetapi di Amerika, gerejanya penuh dengan jemaat namun mereka kurang beretika, agak barbar. Dengan kata lain, Eropa lebih spiritual. Dalam praktik sekularisme atau sekularisasi di masing-masing tempat, adakah dasar ideal yang membuat adanya kesamaan yang hendaknya perlu dicapai oleh sebuah negara, dan dalam wilayah seperti apakah sehingga praktiknya menampilkan wajah yang tidak seragam? Bagaimana jika dibandingkan dengan model Inggris, Kanada atau Turki serta negara-negara di dunia belahan Timur?

Ini suatu catatan yang baik dari Anda. Untuk kami orang Eropa—saya tidak hanya berbicara secara pribadi, tetapi untuk generasi muda di Eropa—Amerika Serikat adalah negara yang menjengkelkan. Perang, yang dicetuskan oleh presiden Bush misalnya, sama sekali tidak didukung. Malahan Islam masih dapat sedikit simpati. Dulu Eropa bersimpati pada Israel, sekarang pemerintah-pemerintah masih berpura-pura bersimpati pada Israel, namun tidak demikian dengan rakyat. Mereka berada pada pihak Palestina. Saya dulu juga mendukung Israel. Saya tidak berkata bahwa negara Israel hendaknya hilang, ia tetap punya hak eksistensi, tidak seperti pernyataan Ahmadinejad dari Iran yang ingin melenyapkan Israel. Jadi, Israel mempunyai hak eksistensi, sayangnya mereka sudah keterlaluan. Sekarang Amerika masih terus mendukung Israel, itu sama sekali tidak bermoral bagi kita.

Demikianpun dalam bidang perlindungan alam, Eropa lebih maju daripada Amerika. *Environment conscience* Amerika ketinggalan sekali. Amerika menghabiskan sepertiga atau seperempat tenaga dari seluruh dunia. Amerika adalah salah satu negara yang tidak mau menandatangani protokol Kyoto mengenai pemanasan global. Maka dalam etika lingkungan dan masalah keadilan, Eropa lebih maju. Namun harus diakui juga bahwa dalam universitas-universitas Amerika dan di pelbagai perusahaan, etika ekonomi lebih berkembang daripada di Eropa. Amerika merupakan masyarakat yang sangat multikultural, yang tetap mempunyai potensi besar untuk masa depan.

Jadi format negara sekular yang mana, apakah model Eropa, Amerika, Kanada yang dapat menciptakan tatanan hidup bersama yang lebih harmonis dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan?

Ditinjau dari segi sekularisasinya, baik model Amerika, Kanada maupun kebanyakan negara Eropa, terutama bagian Utara, cukuplah meyakinkan, dengan realisasi yang berbeda-beda. Yang menjadi masalah adalah Timur Tengah, seperti Israel dan kebanyakan negara Arab. Meskipun di Israel berlaku demokrasi, namun golongan agama Yahudi yang keras terlalu berpengaruh. Sedangkan mahkamah Agung di Israel masih punya keberanian melawan kebijakan pemerintah. Saudi Arabia, Sudan, dan Yaman merupakan negara agama yang keras, terpengaruh oleh aliran Wahhabisme. Ada juga negara Arab yang cukup progresif seperti Oman. Menurut United Nations Development Program (UNDP) *report* kekayaan negara di negara itu terbagi dengan baik dan pendidikan anak-anak terjamin. Meskipun begitu, orang Eropa seringkali kurang tahu perbedaan di antara negara-negara Islam. Mereka menyamaratakan semua. Sekarang saya tahu bahwa ada cukup banyak perbedaan antara negara-negara itu.

Dalam agama, relativisme positif berarti selalu menghubungkan atau membandingkan diri dengan agama lain; mau belajar dari agama lainnya (misalnya orang Kristen bisa belajar dari semangat puasa Islam). Menyadari, bahwa setiap agama sebenarnya bisa memberikan keselamatan dan kedamaian, maka setiap orang harus menuruti hati nuraninya; berusaha memperdalam agama; mencari kebenaran dan keyakinan, bahkan lewat studi dan tukar pikiran.

Baru saja saya pulang dari Malaysia. Saya menyaksikan perbedaan yang cukup berarti antara Malaysia dan Indonesia, meskipun negaranya dekat dan bangsanya hampir sama. Bedanya, di Malaysia berlaku syariat Islam. Tetapi orang Kristen di situ tidak banyak mengeluh, meskipun tetap saja masih terdapat kekhawatiran pada diri

mereka. Mereka masih berpikir siapa tahu pada suatu saat keadaannya bisa memburuk. Sekarang saja telah ada gerakan antimurtad di Malaysia yang menuntut agar orang Islam yang masuk Kristen bisa dihuku m, harus masuk *camp* konsentrasi, *rehabilitation center* dan sebagainya. Tetapi ketika saya bertanya tentang kepastian hukum, bagaimana kalau gereja dirusak atau dibakar di Malaysia? Pendeta sendiri menjawab, pasti akan mendapatkan hukuman. Di Sabah, di Kinabalu, sepertiga umatnya beragama Kristen. Saya heran sekali dalam perjalanan ke gunung Kinabalu, saya tidak melihat masjid, melainkan berturut-turut gereja Katolik. Penduduknya kebanyakan Katolik. Ini tidak saya duga sama sekali. Jadi Malaysia merupakan negara Islam yang moderat.

Dalam konsepsi Anda, apakah negara memang harus mendorong sekularisasi atau membiarkan sekularisasi itu berjalan secara alamiah? Atau mungkin seperti pertanyaan sebelumnya bahwa harus ada formulasi khusus untuk setiap negara, sementara proses sekularisasinya tidak harus disamakan?

Sekularisasi hendaknya berjalan secara alamiah. Itu pandangan saya pribadi. Biarkan kekuatan rakyat bergerak sendiri ke arah itu menurut sejarah dan kebudayaan negara masing-masing. Jadi, proses sekularisasi bebeda-beda, sebagaimana saya paparkan tadi.

Membiarkan sekularisasi berjalan secara alamiah, meskipun dalam negara agama semacam Arab Saudi atau Iran?

Kalau bisa alamiah. Tetapi karena Saudi Arabia itu negara feodal maka perkembangan secara alamiah hampir tidak bisa. Oleh karena

itu, mungkin di Saudi Arabia dibutuhkan pemberontakan. Kalau di Iran, pernah ada harapan ketika di bawah presiden yang dulu, sebelum Ahmadinejad, Mohammed Khatami. Bagaimanapun masih ada harapan yang bisa dicapai untuk menuju Iran ke arah yang lebih baik, karena banyak penduduk yang berpendidikan cukup tinggi dan berpikirnya sekular, yang tidak suka pada para senior yang konservatif yang mengawasi kesusilaan dan keamanan. Mereka, para pemimpin dari generasi tua, tidak disukai oleh mahasiswa, terutama perempuan. Perempuan cukup kuat di Iran. Pada hemat saya, Iran adalah suatu negara yang mempunyai potensi spiritual yang menumbuhkan harapan.

Ajaran agama tidak boleh sampai menjadi tekanan buat anak didik, misalnya tekanan mengikuti kebaktian Kristen. Jadi ada pemisahan antara kebaktian dan pengetahuan.

Saya pernah melihat film-film Iran yang sangat bermutu. Satu film yang saya ingat, menceritakan seorang pemuda 15 tahun yang disuruh ziarah ke Mekkah oleh bapaknya.

Dia berkata, “saya tidak mau”.

“Mengapa kamu tidak mau?”, bapaknya bertanya.

“Karena memboroskan banyak uang, lebih baik saya pakai uang itu untuk orang miskin”.

Itu juga pernah dikatakan oleh mistikus Al-Hallaj (858-922 M), yang dijatuhi hukuman mati. Film tadi diproduksi oleh negara Islam. Itu tanda kebangkitan spirit yang cukup tinggi. Saya sangat bersimpati kepada pemuda di film itu. Bagi saya, kebaktian selalu nomor dua. Yang pertama dalam agama adalah cinta kepada Tuhan dan manusia, perikemanusiaan, keadilan sosial, bukan kebaktian. Kebaktian harus memberikan spirit ke arah itu, jangan dimutlakkan. Pemuda Iran itu memahami inti sari agamanya. Ini

juga berlaku untuk gereja-gereja Kristen. Saya kenal satu keluarga di Jakarta yang terus-menerus melakukan kebaktian tiap minggu, tapi melalaikan kewajiban terhadap ibunya yang sudah tua. Kebaktian adalah nomor dua, nomor satu adalah pengabdian kepada manusia. Dalam film tadi pesan seperti itu kentara sekali. Pemuda itu akhirnya tidak jadi berangkat ke Mekkah, meskipun itu suatu kewajiban yang sangat tinggi dalam agama Islam. Saya tidak mengatakan bahwa ziarah ke Mekkah itu tidak baik, tetapi sekunder, jika dibandingkan dengan melakukan keadilan dan perikemanusiaan. Saya kira, Nabi Muhammad sendiri akan setuju kalau saya bicara begitu. Bacalah al-Quran: 107 (*al-Mâ'ûn*).

Anda tadi mengatakan bahwa corak keberagamaan di negara-negara Islam beragam, tetapi secara umum memang agama sangat kuat di sana. Pertanyaan saya pertama tadi adalah kenapa muncul perbedaan-perbedaan itu? Amerika dan Eropa berbeda. Ada yang mengatakan bahwa kenapa di Eropa terkesan agama dipinggirkan, karena memang ada sejarah masa lalu di mana agama begitu menindas. Sementara di Amerika tidak ada sejarah penindasan yang dilakukan oleh agama. Tetapi ini menjadi masalah ketika kita melihat dunia Islam. Ternyata, setidaknya menurut Dawam Rahardjo, penindasan yang terjadi di dunia Islam justru lebih kuat daripada yang terjadi di Eropa.

Saya tidak bicara terlalu pro-Barat. Waktu tentara Spanyol merebut Amerika Selatan, mereka melakukan kekerasan terhadap bangsa asli Indian dan memaksakan agama katolik. Jadi pernah ada penindasan, bahkan di Eropa. Tetapi mungkin satu keunggulan Barat sekarang ini adalah kesadaran akan kebebasan pribadi dan

perkembangan individu. Individualisme dalam arti negatif adalah egoisme. Individualisme dalam arti positif adalah perkembangan kepribadian yang mantap, berani melawan dan tidak takut kepada atasan, otonom dalam arti positif. Ini mungkin satu kekhususan Barat dan saya tidak tahu dari mana akarnya. Mungkin juga dari agama Kristen, karena dalam agama Kristen martabat manusia mendapat perhatian utama—kendati kemudian juga dilupakan di banyak tempat—termasuk juga dalam kepemimpinan. Kita melihat teladan Yesus sendiri, seorang yang sangat berkemanusiaan. Itulah yang menjadikan saya tertarik pada kepribadiannya. Perikemanusiaan menjadi cita-cita utama bagi dia dan teladan itu tidak pernah lenyap dalam sejarah gereja. Artinya, kesadaran akan martabat manusia itu hidup terus. Dalam Islam juga, terutama pada abad ke-9 sampai ke-12, terdapat kesadaran akan martabat manusia yang tinggi.

Sekarang, sedikit kritik terhadap agama Islam, pada hemat saya, Islam terlalu mementingkan hukum. Buku Dawam Rahardjo sendiri, *Islam dan Transformasi Budaya*, yang saya suka itu, terus bicara tentang hukum. Mengapa hukum? Dalam gereja Abad Pertengahan hukum juga dipentingkan padahal sebenarnya hukum itu sekunder. Yang paling utama adalah cinta kepada Tuhan dan sesama. Bukan berarti bahwa tidak boleh ada hukum. Perlu ada disiplin, saya tidak menyangkal perlunya hukum. Tetapi syariat Islam terlalu mementingkan hukum. Kemarin ketika saya ke tempat orang miskin di Cilincing, saya bertanya kepada sopir saya, seorang yang beragama Islam dan masih sangat muda, "apakah Anda setuju syariat Islam?" Dia berkata, "*wah* repot, disuruh segala-galanya".

Jadi menurutnya, dalam syariat Islam, semua diatur, banyak hal diharamkan dan mudah dikafirkan oleh penguasa hukum.

Tetapi dalam Islam sendiri sebenarnya ada arus lain, yaitu arus tasawuf, mistik. Mereka tidak terlalu mementingkan hukum, tetapi yang utama adalah pergaulan pribadi dengan Tuhan. Saya membaca buku Seyyed Hossein Nasr *Islamic Spirituality Manifestations* mengenai sufisme di Asia tenggara, suatu studi yang memperkaya Islam. Pengarang tidak terus-menerus berbicara mengenai hukum, tafsiran hukum, melainkan pengalaman serta penghayatan akan Allah dan manusia yang mendalam. Dalam gereja Katolik dulu—dan kadang-kadang sekarang juga masih—ada kecenderungan untuk mengatur semuanya. Generasi muda kurang suka pada gereja, karena terdapat terlalu banyak larangan dalam seksualitas. Dulu ciuman baru boleh kalau sudah bertunangan, tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi, tidak boleh menyentuh tubuh pacar. Waktu saya berumur 8 tahun, saya menganggap menyentuh alat kelamin sendiri itu dosa, karena guru agama mengajarkan begitu. Akhirnya saya berpikir, bagaimana kalau saya ke toilet, saya harus menyentuh alat kelamin saya. Lalu ada pertarungan antara akal budi dalam diri saya dan ketaatan pada hukum agama. Untunglah akal budi dalam diri saya menang.

Mengenai peraturan perundangan tentang pornografi, terutama Rancangan Undang-Undang Anti-Pornografi dan Pornoaksi (RUU-APP) yang menjadi kontroversi di Indonesia, menurut saya, jangan semuanya serba dilarang dan melemparkan kesalahan terutama pada perempuan. Karena jika tidak demikian, akan tidak produktif, sebagaimana menjadi kekhawatiran sopir itu: *wah* sangat repot kalau pemerintah menerapkan syariat Islam. Saya kira itu reaksi spontan dan jujur dari masyarakat.

Analisis Anda menarik, bahwa hukum (syariah) yang terlampau dipentingkan dalam Islam berimplikasi terhadap kemunduran atau konservatisme Islam. Tetapi, mungkin ada faktor lain yang turut menyebabkan hal tersebut. Ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak adanya pemberontakan atau perubahan yang berarti dalam dunia Islam disebabkan oleh begitu kuatnya sufisme. Sebab, penekanan tasawuf yang cenderung mengabaikan hal-hal yang duniawi. Bagaimana pandangan Anda?

Satu keunggulan Barat sekarang ini adalah kesadaran akan kebebasan pribadi dan perkembangan individu. Individualisme dalam arti negatif adalah egoisme. Individualisme dalam arti positif adalah perkembangan kepribadian yang mantap, berani melawan dan tidak takut kepada atasan, otonom dalam arti positif.

Hal seperti itu memang ada dalam sufisme. Tetapi, saya pernah membuat serangkaian kuliah di Universitas Zurich mengenai pengalaman Tuhan di pelbagai agama, dari sana saya menemukan bahwa salah satu paham tasawuf sejati adalah tidak menghina hal duniawi, bahkan mau berkecimpung dalam politik. Dalam Islam contohnya adalah Munir yang dibunuh dalam pesawat terbang itu.

Tetapi dia bukanlah seorang sufi?

Dia bukan sufi, tetapi dia hidup dari semangat agama. Kekuatan spiritualnya jelas dari agama Islam, bukan dari Kristen. Dalam arti tertentu, sikap dia yang begitu kuat karena didasarkan pada iman. Jadi iman sejati tidak perlu mengarah secara resmi kepada sufisme, tetapi mengarah pada pengalaman sufi, pengalaman mis-

tik, yaitu tasawuf yang tidak melarikan diri dari dunia, malahan berkecimpung dalam dunia. Inilah juga sikap saya pribadi.

Pendeta Jerman Dietrich Bonhoeffer, yang melawan sistem otoriter Hitler, jelas seorang mistikus. Surat-suratnya kepada tunangannya jelas menandakan bahwa dia seorang mistikus. Dia mengalami dan menyadari bimbingan Tuhan dalam hati. Itu berarti mistik. Jadi, sufisme memiliki wajah yang lain: mengiyakan dunia. Saya sangat terpesona oleh Ibn Arabi (1165-1240 M). Katanya ia masuk ke dunia mistik karena pengalaman cinta perempuan. Cinta kepada perempuan biasanya dianggap duniawi. Lain hal lagi dengan al-Hallaj, yang pernah mengkritik pemerintahnya di Baghdad. Dia jelas berpolitik. Memang saya tahu bahwa al-Hallaj adalah figur kontroversial dalam dunia Islam, karena dia pernah mengucapkan pernyataan yang sulit dicerna: *anâ al-Haqq*.

Jadi, seorang sufi belum tentu melarikan diri dari dunia. Sampai batas tertentu memang kita perlu menjauhi dunia untuk mencari yang transenden, mencari Tuhan. Kalau sibuk terus, tidak akan menemukan Tuhan. Sebaiknya kita menjauhkan diri dari dunia untuk sementara, kemudian kembali ke dunia ini menjadi manusia baru.

Apakah tasawuf yang Anda maksudkan itu bukan dalam arti gnostisisme?

Ya, bukan dalam arti gnostis. Gnostis itu merupakan pelarian dan terlalu mementingkan kerahasiaan, terlalu eliter dan sebetulnya merendahkan keduniawian. Yesus tidak pernah merendahkan keduniawian. Dia menghargai dunia materi. Yang sekarang termasuk dalam dunia materi adalah teknologi, seperti komputer. Saya

sangat berterimakasih dengan keberadaan komputer. Demikian halnya dengan mobil. Kalau mobil dihargai, diperlakukan dengan baik, ia akan bertahan dua kali lebih lama dari yang biasa. VW yang saya beli pada 1972, masih berjalan di Jakarta.

Cinta akan alam dan materi terkandung dalam setiap agama, juga dalam agama Hindu dan Budha. Budha, misalnya, sangat mencintai binatang dan tidak membunuhnya. Bahkan banyak penganut agama Budha tidak makan daging. Jadi, agama yang sejati tidak akan menghina materi, justru menghargainya, termasuk seksualitas.

> Liberalisme, yang berasal dari revolusi Prancis, mengutamakan kebebasan manusia dengan tidak melupakan persaudaraan dan kesamaan. Kemudian gerakan sosialisme lebih memper-juangkan persamaan dan persaudaraan, sedangkan liberalisme lebih mengutamakan kebebasan pribadi, yang diperjuangkan dalam struktur negara yang disebut demokrasi. Ini liberalisme yang historis.

Tadi Anda menyinggung perihal ketegangan antara putusan gereja dengan akal budi. Dalam konteks sekularisasi, ada diferensiasi antara negara dan agama. Diferensiasi itu juga berlaku dalam pembedaan antara agama dan ilmu pengetahuan, antara wahyu dan akal. Bagaimana Anda melihat relasi antara ilmu pengetahuan dan agama, antara akal dan wahyu?

Agama jangan menjauhi akal budi. Islam pada abad ke-9, 10, 11, 12 melebihi agama Kristen, dengan tokoh-tokoh intelektual besar seperti Ibn Rusyd, Ibn Sina, al-Biruni, al-Farabi, Ibn Arabi. Pada masa itu umat Islam dengan bagus melakukan perkawinan antara wahyu dan ilmu pengetahuan alam. Mereka sangat memperhatikan hasil-hasil dari ilmu pengetahuan. Kaum Mu'tazilah, dalam sejarah

Islam, mempertimbangkan pentingnya filsafat Yunani, bukan hanya wahyu. Jadi relasinya tidak berat sebelah. Tuhan menganugerahkan akal budi agar kita berpikir dan dengan demikian memperdalam iman. Baru setelah Baghdad runtuh oleh tentara kafir Mongolia, umat Islam mengatakan: "kita harus kembali ke wahyu". Kemudian wahyu dimutlakkan dan akal budi diremehkan.

Ketegangan antara agama dan ilmu alam dalam gereja Katolik kentara sekali pada kasus Galileo Galilei, yang memperkenalkan sistem heliosentris, dan Darwin, yang mengajarkan teori evolusi. Dalam kasus tersebut, agama tidak bisa mendiktekan pandangannya secara dominan. Kendati demikian, semua pihak harus rendah hati, mengakui bahwa pengetahuan kita tetap terbatas dan tidak bisa meraih kebenaran mutlak, juga dalam agama. Kebenaran mutlak hanya dimiliki oleh Tuhan, tidak bisa dimiliki oleh seorang manusia. Mengakui keterbatasan itu memerlukan kerjasama, tukar pikiran. Dalam hal seksualitas misalnya gereja Katolik kurang mendengarkan penyelidikan psikologi bahwa masturbasi belum tentu merupakan dosa besar atau kelainan psikis.

Prasyarat bagi kemajuan suatu bangsa adalah luasnya ruang kebebasan. Di sinilah liberalisme hendaknya menjadi semangat yang mendasarinya. Celakanya, liberalisme sering disalahpahami oleh banyak orang. Mereka memahami liberalisme sebagai kebebasan tanpa batas yang mengakibatkan dekadensi moral. Liberalisme juga dipahami sebagai suatu paham yang akan memunculkan benih-benih kolonialisme dan imperialisme, karena membiarkan kapitalisme semakin menguat. Pemahaman macam apakah yang seharusnya diberikan kepada khalayak umum tentang liberalisme?

Sebaiknya kita membedakan antara liberalisme dan neo-liberalisme. Liberalisme, yang berasal dari revolusi Prancis, mengutamakan kebebasan manusia dengan tidak melupakan persaudaraan dan kesamaan. Kemudian gerakan sosialisme lebih memperjuangkan persamaan dan persaudaraan, sedangkan liberalisme lebih mengutamakan kebebasan pribadi yang diperjuangkan dalam struktur negara yang disebut demokrasi. Ini liberalisme yang historis. Lalu satu aspek dari liberalisme adalah kebebasan hak milik pribadi, yang sangat berkembang di dunia Barat. Dari sinilah kemudian liberalisme mulai mengambil ciri yang agak antisosial. Kebanyakan orang borjuis masuk ke partai-partai liberal.

Namun demikian liberalisme dari setiap negara berbeda-beda. Di Swiss nama liberal berbunyi positif. Di Jerman juga ada partai liberal. Rata-rata partai liberal lebih dekat dengan kelas menengah dan kelas orang kaya. Sedikit demi sedikit berkembang neoliberalisme, yang mendapat angin setelah jatuhnya komunisme pada tahun 1989, waktu tembok Berlin runtuh. Kendali-kendali yang bisa membatasi hak milik pribadi mulai hilang. Seakan-akan setiap orang mempunyai hak milik pribadi yang mutlak, tidak pandang bulu terhadap akibat sosial apapun. Dalam bidang perusahaan berkembang obsesi mengenai profit dalam jangka pendek. Perusahaan besar berpandangan bahwa jika profit dalam setengah tahun menurun, misalnya dari 10% menjadi 8%, harus menjadi gelisah. Sebagai akibat mungkin sebagian buruh dan pegawai dibebastugaskan atau diusahakan *fusion* dengan perusahaan lain, sehingga pengangguran bertambah. Ini mental neoliberalisme atau neokapitalisme. Neoliberalisme mendapat tantangan dari dunia Barat sendiri, terutama dari partai-partai sosial demokrat, tidak jarang juga dari gereja Kristen dan Katolik.

Sebenarnya kata asli 'liberal' sendiri memiliki arti yang dekat sekali dengan kebebasan manusia. Dalam kasus karikatur Muhammad, misalnya, kentara sekali perbedaan kebudayaan. Mungkin mayoritas masyarakat Barat tidak setuju dengan karikatur itu. Tetapi mereka juga tidak setuju jika surat kabar yang menerbitkan karikatur itu dibredel atau dihukum. Mereka berpendapat bahwa kebebasan pers lebih penting daripada ketersinggungan pihak lain. Ini liberal dalam arti yang agak esensial.

Seorang sarjana ekonomi Austria, yang mendapatkan hadiah Nobel, menjadi bapak dari neoliberalisme, yaitu Friedrich August von Hayek. Menurut dia keadilan sosial untuk suatu perusahaan adalah *nonsense*. Menurutnya, perusahaan modern tidak bisa memperhatikan segi keadilan sosial. Dia sangat berpengaruh di kalangan neokapitalisme atau neoliberalisme. *Zürcher Zeitung*, surat kabar paling berwibawa di Swiss, rubrik ekonominya mengikuti pandangan neoliberal. Namun surat kabar itu cukup terbuka untuk kebebasan pandangan dan terkadang dimuat juga tulisan-tulisan yang melawan pandangan itu. Saya bertanya kepada seorang mahasiswa fakultas ekonomi St.Gallen Swiss, apakah teori ekonomi dari von Hayek dan Milton Friedman (ekonom asal Amerika) masih berlaku. Menurutnya masih sangat berlaku, mempengaruhi keputusan-keputusan perusahaan besar, dunia perdagangan dan keuangan. Di sini kritik Islam dan Kristen terhadap neokapitalisme bisa menyatu.

Kalau umat Kristiani sendiri, bagaimana pandangannya terhadap neoliberalisme?

Gereja-gereja, juga Paus Johannes Paulus II, persekutuan Kristen ekumenis sedunia mengecam secara tajam neoliberalisme dan neokapitalisme. Mengenai liberalisme historis, Bung Karno terlalu menjelek-jelekkan liberalisme, demokrasi liberal, sehingga nama liberal mendapatkan konotasi negatif di Indonesia. Sebaliknya, kalau orang di Swiss bilang, bahwa saya liberal, itu pasti merupakan pujian. "Orang liberal" berarti orang yang *jembar atine* (lapang dada), tidak kikir, berjiwa pluralis.

Agama tidak bisa mendiktekan pandangannya secara dominan. Kendati demikian, semua pihak harus rendah hati, mengakui, bahwa pengetahuan kita tetap terbatas dan tidak bisa meraih kebenaran mutlak, juga dalam agama. Kebenaran mutlak hanya dimiliki oleh Tuhan, tidak bisa dimiliki oleh seorang manusia. Mengakui keterbatasan itu memerlukan kerjasama, tukar pikiran.

Menurut Anda definisi kata liberal itu sendiri seperti apa?

Liberalisme adalah pandangan yang mengutamakan kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi juga menyangkut kebebasan pers, kebebasan agama dan kebudayaan seperti yang tercantum dalam deklarasi hak asasi manusia (HAM). Sebetulnya deklarasi HAM adalah cetusan dari spirit liberal. Liberal dalam arti historis, bukan dalam arti neoliberal.

Apakah betul bahwa liberalisme itu akan bermuara pada sikap permisif, kekacauan dan sebagainya?

Demokrasi sama sekali tidak berarti bisa bertindak seenaknya. Dalam sistem demokrasi kedisiplinan sangat ditekankan secara ketat. Kalau orang tidak mematuhi aturan permainan liberal, dia bisa dihukum. Misalnya kalau kejaksaan agung terbukti korupsi atau dipengaruhi eksekutif, bisa dituntut sampai dipecat. Jadi dalam demokrasi liberal ada aturan yang harus ditaati. Hal ini bisa dibandingkan dengan sepak bola, ada wasit resmi. Untuk itu rakyat sendiri dengan bantuan media massa, harus turut memperhatikan *fairness* dalam permainan. Jadi kalau pemerintah melakukan pelanggaran dalam suatu keputusan, pasti akan ada reaksi. Maka adalah kekeliruan besar jika liberal disamakan dengan kekacauan. Justru, liberal itu tertib. Tapi ketertiban yang bukan paksaan dari atas, melainkan kesadaran sendiri. Kita sadar bahwa ketidaktertiban akan menghancurkan demokrasi. Kalau dalam suatu *voting* mayoritas menang dan minoritas melakukan protes dengan kekerasan, hal itu tidak diterima. Minoritas harus tunduk kepada mayoritas. Tapi mayoritas juga tidak boleh sombong, mereka harus memperhatikan kepentingan minoritas. Sedapat mungkin diadakan kompromi lewat parlemen untuk mengakomodasi kepentingan minoritas. Permainan demokrasi itu berdisiplin atas dasar kedaulatan rakyat sendiri. Saya mengakui bahwa apa yang digambarkan sekarang ini terlalu ideal tetapi sebenarnya tidak jauh dari kenyataan. Sebab hal itu betul-betul merupakan cita-cita masyarakat demokratis.

Perbincangan kita tentang liberalisme sudah memasuki wilayah sistem. Dalam liberalisme, tujuan yang paling penting adalah bagaimana negara bisa melindungi dan menjamin hak dan kebebasan warga negara. Bagaimana Anda melihat konsep negara dalam konteks libe-

ralisme, apakah harus berbentuk minimum state, *membiarkan warga negara menentukan nasibnya sendiri?*

Negara harus menguatkan daya masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri. Pemerintah tidak boleh melakukan intervensi seenaknya, biarpun atas nama rakyat. Tetapi demokrasi juga tidak berarti bahwa pemerintah tidak berwibawa. Di Prancis, sebelum Perang Dunia II, jika ada suatu keputusan pemerintah yang ditolak oleh DPR, pemerintah langsung mengundurkan diri. Sistem ini sudah ditinggalkan. Pemerintah berhak bertindak dalam kerangka yang diberikan kepadanya oleh DPR atau langsung oleh rakyat. Presiden seumur hidup berlawanan dengan sistem demokrasi. Sekarang ada kemajuan besar di Indonesia, bahwa presiden tidak berkuasa lagi seumur hidup. Pemerintah yang berwibawa dihargai oleh rakyat. Perlu dan boleh ada kritik. Untuk itu kebebasan media massa sangat penting. Dalam hal ini pun Indonesia maju sejak presiden Habibie. Kritik harus berdasarkan fakta dan menghindari penghinaan.

Terkait dengan demokrasi, yakni problem minoritas dan mayoritas, bahwa kritikan orang selama ini terhadap demokrasi adalah kekhawatiran pada sistem ini yang dapat jatuh ke dalam mayoritarianisme, di mana kepentingan mayoritas begitu diutamakan sehingga menindas yang minoritas. Bagaimana pandangan Anda?

Dalam demokrasi baik kepentingan kelompok maupun individu perlu diperhatikan. Kelompok-kelompok masyarakat seperti kaum buruh, tani, nelayan, usahawan dan sebagainya bisa berkecimpung dalam salah satu partai untuk memperjuangkan kepen-

tingan mereka. Partai-partai itu sering berlawanan, misalnya para buruh terhadap usahawan. Serikat buruh lebih condong ke partai sosialis yang kiri, sedangkan para usahawan ke partai kanan. Namun partai-partai bisa juga bernegosiasi. Seperti contohnya di pemerintahan Jerman sekarang. Pemerintahan kanselir Angela Merkel merupakan suatu negosiasi antara partai kiri dan kanan, atau yang dianggap kurang lebih kanan. Mereka bisa berkompromi. Itu penting untuk sistem demokrasi. Jadi tidak terus-terusan keras pada pandangannya saja. Saya mendengar di Indonesia terlalu banyak partai. Tidak setiap pandangan pribadi atau golongan harus disertai dengan pendirian partai. Jadi harus belajar negosiasi, kompromi. Memang bisa ada kompromi busuk. Tetapi juga ada kompromi yang menyelamatkan kesejahteraan negara. Sehingga kepentingan minoritas tidak disingkirkan.

Praktik dari pandangan bahwa demokrasi adalah sistem di mana yang paling berkuasa adalah yang mayoritas, tampak tercermin di Indonesia dengan diterapkannya perda-perda syariah. Padahal, syariat Islam itu sendiri dalam pengertian yang normatif adalah sistem yang antidemokrasi. Menurut Anda?

Di Indonesia yang mayoritas adalah umat Islam. Jika mayoritas terlalu memaksakan kehendaknya, misalnya menjadikan syariat Islam sebagai hukum negara, akibatnya minoritas seperti Hindu, Kristen dan sebagainya dikesampingkan, menjadi warga negara nomor dua. Ini bertentangan dengan spirit demokrasi. Ini harus ditolak. Dalam hal ini, saya ikut memperjuangkan hak-hak Kristen.

Bagaimana caranya agar demokrasi tidak dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan nilai yang antidemokrasi?

Itu dapat dicapai lewat pendidikan. Pendidikan itu sangat penting, mulai dari TK sampai universitas. Saya kecewa karena gaji guru sekolah dasar (SD) di Indonesia terlalu rendah. Ini harus dirombak secara total. Guru SD merupakan suatu jabatan yang sangat penting. Bukan hanya mengajar bahasa atau matematika, melainkan akhlak. Semangat demokrasi hanya bisa dicapai lewat alat-alat pendidikan. Media massa termasuk bagian dari pendidikan. Sebab ia bisa edukatif. Contoh media massa yang seperti itu di Indonesia *Kompas* atau *Tempo*, misalnya, yang seringkali ada kolom-kolom yang berdasarkan ilmu yang cukup edukatif, tidak hanya hiburan. Mencapai demokrasi secara cepat tidak mungkin. Itu membutuhkan waktu yang panjang.

Jika mayoritas terlalu memaksakan kehendaknya, misalnya menjadikan syariat Islam sebagai hukum negara, akibatnya minoritas seperti Hindu, Kristen dan sebagainya dikesampingkan, menjadi warga negara nomor dua. Ini bertentangan dengan spirit demokrasi. Ini harus ditolak. Dalam hal ini, saya ikut memperjuangkan hak-hak Kristen.

Artinya, apakah demokrasi sebagai sebuah sistem politik tidak mempunyai tali pengaman untuk mempertahankan dirinya dari gerakan-gerakan yang bisa membunuh demokrasi itu sendiri? Misalnya pembajakan demokrasi yang dilakukan oleh Hitler. Nazi di Jerman menang melalui proses demokrasi, melalui Pemilu. Setelah berkuasa, Nazi menghapus demokrasi.

Tidak ada jalan lain kecuali dengan mengajarkan politik di lembaga-lembaga pendidikan agar masyarakat melek politik. Pada saat Hitler berkuasa, rakyat Jerman kecewa karena negaranya kalah dalam Perang Dunia I, sementara kekuatan tentaranya hebat. Lalu Hitler-lah yang paling banyak menyuarakan nasionalisme dan cendekiawan-cendekiawan terlalu banyak termakan semangat nasionalisme. Nasionalisme merupakan anjuran buruk, meskipun juga ada nasionalisme yang baik. Cinta kepada tanah air itu nasionalisme yang baik. Tapi nasionalisme yang cenderung menghina dan meremehkan negara lain itu adalah bentuk yang destruktif. Pada zaman Hitler rakyat kecewa dengan Perang Dunia I dan kecewa atas besarnya pengangguran. Hitler dapat angin, sementara cendekiawan-cendekiawan, yang bisa menganalisis keadaan, kurang bertanggung jawab. Sehingga Hitler akhirnya bisa terpilih secara demokratis, kemudian demokrasi dihancurkannya.

Dalam banyak konsep atau teori politik, dikatakan bahwa untuk bisa melindungi civil rights *dan* civil liberties*, negara harus netral. Bagaimana Anda melihat netralitas negara?*

Netral dalam arti apa?

Negara netral berarti negara yang adil secara hukum, tidak memberikan treatment *khusus atau sebaliknya tidak memperlakukan kelompok tertentu secara diskriminatif. Netral juga berarti bahwa negara harus mendorong semua nilai dan tujuan yang ada dalam masyarakat.*

Pokoknya pemerintah harus menjamin agar demokrasi terus berlangsung dan bisa melindungi serta menjamin hak milik pri-

badi, misalnya. Kalau hak milik pribadi dilanggar, seperti dalam praktik pencurian atau korupsi, pelakunya harus ditindak. Adanya pelaksanaan hukum adalah kewajiban pemerintah, selain menjaga keamanan dan ketertiban umum agar keadilan berlaku di dalam masyarakat. Tidak boleh ada suatu penindasan oleh golongan yang satu terhadap golongan yang lain. Itu dilakukan lewat perjuangan politik. Lalu netral dalam arti bagaimana lagi?

Apakah negara dengan pemerintahan yang liberal harus menjamin dan melindungi setiap warganya bebas untuk beragama dan berkeyakinan?

Ya, negara dalam hal agama harus netral. Jadi kalau mayoritas adalah agama Kristen, yang minoritas adalah agama Islam (praktik ini sudah mulai berlaku untuk Jerman dan Prancis), pemerintah tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap minoritas. Negara harus memberikan hak yang sama kepada minoritas untuk *voting* dan dalam hal kewarganegaraan. Begitupun dalam hal subsidi, tidak boleh mengutamakan satu agama saja. Demikian juga seharusnya dalam negara yang mayoritas Islam. Jadi kalau sekularisasi sudah sedikit berjalan di Indonesia, agama Islam tidak boleh mendapatkan terlalu banyak subsidi, sehingga tidak sesuai dengan jumlah mayoritas umat Islam. Umat lain juga harus mendapatkan perhatian dan perlindungan dari penguasa. Itu sudah dilakukan di negara dengan syariat Islam yang moderat seperti Malaysia. Seperti saya sudah bilang di atas bahwa gereja dapat perlindungan. Orang tidak bisa seenaknya merusak gereja, sebab akan mendapatkan hukuman. Jadi saya akui bahwa syariat Islam juga bisa diinterpretasikan secara lunak.

Orang biasanya menyamakan begitu saja antara demokrasi dan liberalisme. Padahal demokrasi adalah sebuah seleksi untuk menggapai sebuah kekuasaan sementara liberalisme adalah nilai-nilai kebebasan, HAM, civil liberties. *Fareed Zakaria pernah menulis tentang* "illiberal democracy". *Dalam sebuah buku yang berjudul* The Future of Freedom, *di negara-negara Timur Tengah, demokrasi formal dijalankan, ada Pemilu dan partai politik, tetapi hak-hak sipil,* civil liberties, *HAM dan lainnya sama sekali tidak dihargai. Perempuan juga diperlakukan secara diskriminatif. Menurut Anda, bagaimana hubungan antara demokrasi sebagai sebuah sistem untuk mencapai kekuasaan dengan liberalisme sebagai pendasaran* civil rights, civil liberties *atau HAM?*

Liberal dalam arti filsafat berarti penghargaan terhadp hak-hak asasi manusia. Dalam hal ini, partai sosialis juga bisa diartikan liberal. Sedangkan liberal dalam arti politis itu lain lagi. Kalau satu partai menamakan diri liberal, bisa begitu mengutamakan hak kebebasan pribadi, sehingga melalaikan faktor sosial. Agama Kristen, Katolik, dan Islam sama pendapatnya, bahwa hak milik pribadi memiliki fungsi sosial. Jadi hak milik pribadi tidak bisa digunakan dengan semena-mena. Zakat dalam Islam itu baik sekali, malahan menjadi praktik resmi. Jadi kekayaan mempunyai fungsi sosial. Fungsi sosial juga terlaksana dengan membayar pajak secara jujur. Seringkali orang yang sangat kaya menghindari hukum pajak. Itu melanggar etika liberal sejati.

Mungkinkah nilai-nilai liberal atau kebebasan itu ditegakkan tanpa demokrasi?

Tidak mungkin!

Dalam negara dengan sistem kerajaan yang feodal, misalnya, tanpa menerapkan sistem demokrasi, mungkinkah dapat menjunjung tinggi kebebasan beragama dan berpikir?

Kebebasan agama dalam arti kebaktian mungkin terjamin. Tetapi, kebebasan berpikir pasti akan amat terbatas. Begitupun semangat agama yang mengarah pada keterlibatan sosial demi hak asasi manusia akan dibatasi juga, mungkin malahan dilarang. Harus dicatat di sini, bahwa dalam masyarakat modern yang dikuasai paham neoliberal, kebebasan bisa dipreteli juga. Atas nama demokrasi golongan ekonomi yang perkasa, *the haves*, bisa menguasai suatu negara lewat perusahaan-perusahaan besar. Para buruh dan golongan bawah pada suatu saat bisa dibayar, bisa dibeli. Wujud lahir sistem demokrasi masih bertahan, tetapi sebetulnya sudah bukan demokrasi lagi, melainkan pengkhianatan terhadap demokrasi. Itu bahaya dari neokapitalisme. Neokapitalisme punya pengaruh begitu besar hingga bisa mempengaruhi media massa, iklan-iklan dan pembentukan parlemen. Di Amerika Serikat, misalnya, Bush begitu lihai dalam persiapan kampanye pemilihan umum, sehingga dia berhasil menarik orang-orang kaya dengan janji, bahwa pajak mereka akan diringankan. Demikian juga janjinya terhadap kalangan menengah. Perusahaan multinasional, karena memiliki uang yang sangat banyak, bisa membeli segala-galanya. Sejauh saya dengar, sebelum pemilihan umum di Indonesia, ada juga pembagian uang yang dilakukan oleh Golkar.

Adalah kekeliruan besar, jika liberal disamakan dengan kekacauan. Justru, liberal itu tertib. Tapi ketertiban yang bukan paksaan dari atas, melainkan kesadaran sendiri.

Ada anggapan bahwa kenapa demokrasi maupun liberalisme secara umum sangat susah muncul di dunia Timur, karena mereka menganggap bahwa gagasan-gagasan tersebut lahir dari kebudayaan Barat. Makanya orang semacam Fareed Zakaria atau Lee Kuan Yew menganggap bahwa demokrasi memang tidak terlalu cocok dengan Timur, karena mereka memiliki budaya yang berbeda. Kolektivisme sangat dikedepankan di dunia Timur sementara di Barat individualismenya sangat kuat. Bagaimana respon Anda terhadap pandangan itu?

Hal ini disinggung dalam buku Dawam Rahardjo, *Reformasi Budaya Islam*. Masalah ini sudah menjadi perdebatan sengit sejak pembentukan Republik Indonesia. Ada golongan yang lebih mementingkan sistem liberal atau demokrasi Barat seperti Sutan Takdir Alisjahbana, sedangkan Soekarno tidak. Dia lebih mementingkan ketimuran. Akhirnya pandangan Timur menang, lalu demokrasi merosot menjadi demokrasi terpimpin. Mahathir Mohamad dari Malaysia sering mengecam demokrasi Barat, demikian juga penguasa di Tiongkok yang kerap mencela demokrasi Barat, namun ada udang di balik batu. Mereka sebetulnya menginginkan pemerintahan otoriter, di mana mereka bisa berkuasa seenaknya.

Tapi ada benarnya juga, bahwa demokrasi harus mendapatkan wujud yang cocok dengan kebudayaan negara masing-masing. Mula-mula Soekarno dan Hatta memang mengusulkan Pancasila, itu diterangkan dalam buku Dawam Rahardjo. Pancasila itu bijaksana, namun kemudian ketika Soekarno makin berkuasa, dia “main larang-larangan”: Masyumi dan Partai Sarekat Islam (PSI) dilarang, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pun mau dilarang. Soekarno menekan kelompok Islam. Akhirnya nilai-nilai demokrasi dikhianati.

Namun, tidak seluruhnya benar apabila paham demokrasi di dunia Timur tidak ada. Di desa-desa Jawa seorang lurah dipilih oleh rakyat. Baru kemudian di zaman Soeharto orang militer ditempatkan menjadi lurah, ditentukan dari atas. Mungkin ilmu-ilmu humaniora masih kurang menyelidiki unsur-unsur demokrasi yang asli di kebudayaan Jawa. Di kebudayaan Batak, Dayak, Tionghoa pasti juga ada, karena ajaran Konghucu sendiri sebetulnya berjiwa demokrasi. Konghucu disalahgunakan oleh rejim otoriter Tiongkok. Padahal Konfusius sendiri menjadi pengkritik yang tajam sekali terhadap penguasa pada zamannya, sehingga dia diturunkan dari jabatannya. Kebudayaan Tionghoa pun memiliki unsur-unsur demokrasi yang asli. Mengapa? *Because to be a free man is very natural*. Setiap orang akhirnya menghendaki suatu kebebasan. Merdeka menjadi semboyan di mana-mana, karena itu manusiawi, hakiki pada manusia, bukan hanya pada orang Barat.

Dalam agama, relativisme positif berarti selalu menghubungkan atau membandingkan diri dengan agama lain; mau belajar dari agama lainnya.

Ada banyak contoh di mana demokrasi liberal justru dianggap sebagai sumber persoalan itu sendiri. Di Jerman, pada masa Otto von Bismarck, demokrasi justru dijadikan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan penguasa sebelumnya. Atau di negara-negara bekas Uni Soviet, demokrasi justru dianggap menyebabkan konfllik berkepanjangan. Begitupun ketika demokrasi diterapkan dalam sebuah masyarakat yang belum terdidik, seperti banyak negara Dunia Ketiga, seringkali justru menimbulkan masalah baru. Itulah kira-kira yang

menyebabkan Lee Kuan Yew menolak demokrasi dan liberalisme. Bagaimana pandangan Anda?

Bisa dikatakan bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang paling baik dan paling sulit. Oleh karena itu, dibutuhkan pendidikan moral dan kecerdasan. Menjadi orang cerdas harus giat belajar, tidak bisa terus-menerus mendengarkan musik atau pacaran. Menjadi cerdas membutuhkan banyak tenaga dan juga uang. Masyarakat yang terlalu miskin tidak akan bisa bersekolah, tidak akan bisa mengenyam pendidikan. Oleh karena itu, dengan dorongan pmerintah, masyarakat harus mementingkan pendidikan. Tetapi, sistemnya bukanlah model hafalan atau indoktrinasi. Guru harus bermutu tinggi, cerdas, dan bisa memancing pikiran anak-anak.

Anak saya waktu berumur 5 tahun bermain dengan balok lego, yang bisa disatukan dan dipisahkan. Dia juga senang bercerita. Saya, misalnya, menceritakan kisah air bah Nuh. Waktu zaman Nuh, umat yang berdosa dikirimi banjir sehingga mereka tenggelam dan mati. Lalu dia bertanya, mengapa Tuhan menghukum dengan banjir itu? Saya jawab, sebab mereka berdosa. "Dosa apa?" tanya anak saya. Sulit saya menjelaskan. Mungkin dalam hati anak saya terpendam pertanyaan: mengapa Tuhan menghukum umat begitu keras dan kejam? Saya tidak bisa menjawab pertanyaan secara memuaskan. Tetapi saya tidak bilang kepadanya "diamlah dengan pertanyaan-pertanyaanmu ini", saya berusaha terus menjawab, meskipun saya tidak pernah menemukan jawaban yang memadai. Karena menurut hati nurani saya sendiri Tuhan, dengan mengirim banjir kepada umat yang berdosa itu, terlalu kejam. Jadi pertanyaan anak saya itu masuk akal. Ia sebetulnya cerdas, tidak gampang puas dengan jawaban saya. Dengan demikian paham agama bisa

diperdalam. Sekarang saya tahu jawaban yang jitu tergantung dari interpretasi Kitab Suci.

Jadi kecerdasan harus dibina sejak anak kecil, dari pendidikan taman kanak-kanak. Di Magelang saya juga pernah mengajar agama di SD, dengan senang hati, karena saya mencintai anak-anak. Saya sajikan banyak cerita, tidak hanya dari Kitab Suci, melainkan juga dari kehidupan sehari-hari. Mereka jarang saya suruh menghafal. Tetapi, mereka justru senang kalau saya menanyakan pandangan mereka dan mengajak untuk bertukar pikiran. Anak-anak Magelang itu ternyata cerdas sekali kalau pikiran mereka dirangsang. Jangan sekali-kali meremehkan kemampuan anak-anak TK dan SD!

> Pluralisme itu tidak berarti mencampurkan agama, yang Anda sebut sinkretisme. Justru karena pluralisme itu mengakui perbedaan maka perbedaan itu perlu dikembangkan. Orang Islam berbeda dengan orang Kristen, Hindu berbeda dengan Konghucu, orang Batak berbeda dengan orang Jawa. Semuanya berhak berbeda, malahan harus bangga dengan adanya perbedaan.....pluralime tetap menghargai identitas pribadi, bangsa, agama, budaya, tetapi identitas yang tidak eksklusif.

Kalau saya melewati ruang sekolah dan guru tidak ada, mereka memanggil saya: “kesinilah, Romo!” “Ada apa?” Saya bertanya balik. Anak-anak menjawab: “pak guru tidak masuk”. Mengapa tidak masuk? Karena dia mencari pekerjaan. Gajinya tidak cukup!

Ada anggapan bahwa demokrasi yang diterapkan di Dunia Ketiga dan negara-negara di Timur Tengah adalah illiberal demoracy. *Na-*

mun, kita tidak bisa memungkiri bahwa demokrasi yang disebarkan oleh negara-negara Barat seringkali dengan cara kekerasan, seperti yang dilakukan oleh Amerika. Bagaimana pandangan Anda dengan kenyataan ini?

Saya setuju dengan pandangan ini. Amerika terlalu mementingkan ekonomi dan, berkaitan dengan itu, kekuasaannya. Sehingga, nilai demokrasi dalam politik luar negerinya sering diabaikan. Bahkan Amerika tidak jarang mendukung rejim otoriter, asalkan rejim itu tunduk terhadap kepentingannya, seperti Saudi Arabia.

Sebetulnya demokrasi selalu berada dalam bahaya dan sistem ini bisa runtuh kembali. Maka demokrasi harus terus diperjuangkan. Nilainya terlalu tinggi untuk tidak diperjuangkan. Harus selalu ada koreksi dan kritik. Demokrasi juga sulit terwujud dalam negara besar. Mungkin di Malaysia demokrasi bisa berjalan, karena negara itu tidak terlalu besar. Sebaliknya di Indonesia lebih sulit, karena negara ini luas sekali. Begitupun di Rusia sama sekali belum jalan. Negara itu terlampau luas, sehingga seorang pemimpin yang otoriter selalu bisa naik lagi. Sedangkan negara-negara di Eropa tidak terlampau luas, semuanya menengah atau kecil, sehingga demokrasi lebih mudah terwujud.

Apakah terwujudnya demokrasi di negara-negara Barat lantaran mereka hanya terdiri atas bangsa atau suku bangsa tertentu yang tidak begitu heterogen sebagaimana Indonesia?

Rata-rata negara Eropa memang berdasarkan satu bangsa tertentu. Tetapi ada beberapa pengecualian yang berarti, misalnya

sebagian dari Italia Utara (Südtirol) berbahasa Jerman. Di Swiss ada tiga bangsa dan tiga bahasa. Ada yang berbahasa Prancis, berbahasa Jerman dan berbahasa Italia. Kebudayaan Swiss-Prancis berbeda dengan Swiss-Jerman. Kendati begitu, tetap ada kesamaan. Mereka semua berjiwa demokratis dan minoritas Prancis dan Italia sangat dihargai. Paspor Swiss selalu dalam tiga bahasa itu. Negara Swiss terdiri dari satu nusa dengan tiga bangsa dan bahasa. Swiss sudah punya ciri-ciri demokratis sebelum Revolusi Prancis. Pada saat itu Swiss masih merupakan federasi. Masing-masing daerah punya otonomi sendiri. Ada sebagian yang feodal, sebagian lagi demokratis. Itu berlaku secara khas untuk Appenzell, daerah asal saya. Sejak hampir 600 tahun di situ umat berkumpul setiap tahun untuk memilih pemerintah dan memecat orang yang dianggap tidak lagi cakap untuk memangku jabatan. Saya mengalami sendiri, waktu saya berumur 12 tahun, mandat menteri kehakiman dicabut oleh masyarakat melalui pemilihan umum dan isterinya bisa menyaksikannya langsung dari jendela rumahnya! Saya terpesona sekali. Ini demokrasi langsung, *direct democracy.* Kesimpulannya, demi terwujudnya demokrasi kesatuan bangsa tidak perlu terlalu dipentingkan, malahan boleh ada perbedaan bahasa dan budaya.

Menakar heterogenitas elemen bangsa Indonesia, maka sangatlah fundamental untuk menjadikan gagasan pluralisme sebagai pondasi bagi kehidupan bersama yang harmonis. Problemnya, pluralisme oleh pelbagai kalangan masyarakat Indonesia sering ditolak karena dua pemahaman. Pertama, pluralisme sering dianggap sebagai sinkretisme, menyamakan semua agama. Kedua, pluralisme dianggap mudah

terjerembab pada relativisme. Apa respon Anda terhadap persoalan pelik ini?

Itu adalah tema diskusi saya di Atma Jaya yang membincang multikulturalisme dan pluralisme. Pluralisme adalah kebhinekatunggalikaan. Jadi kesatuan tidak begitu dipentingkan, sebab dapat menjadikan perbedaan hilang. Perbedaan tetap dihargai, bahkan sebaiknya harus tetap ada. Secara teologis, Tuhan sendiri menghendaki kebhinekaan. Hal itu terlihat dalam dunia tumbuhan dan binatang, ada biodiversitas yang mengagumkan. Kemajemukan berlaku juga pada dunia manusia, sehingga ada perbedaan suku, bangsa, kebudayaan, bahasa dan agama. Pluralisme, secara teologis, mencerminkan cinta Tuhan akan kebhinekaan. Dikatakan oleh rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta, Amin Abdullah, bahwa variasi warna juga ada dalam agama. Warna-warna ini tidak bisa dihilangkan atau dilebur dalam satu warna. Biru, hitam, putih, abu-abu dan lain-lain, semuanya membina keindahan dunia ini. Dengan mengutip al-Quran, Nurcholish Madjid menyatakan bahwa kebhinekaan merupakan karya Tuhan.

Pluralisme dalam arti politis berarti bahwa setiap lapisan masyarakat punya hak hidup. Setiap jenis masyarakat punya hak untuk hidup. Di Indonesia ada orang Bali, minoritas Hindu yang sangat kecil, memiliki hak yang sama untuk hidup dan mengembangkan kebudayaan mereka. Demikian halnya dengan umat Konghucu, Kristen, masyarakat Dayak, Batak, Minangkabau, Manado dan seterusnya. Ini sudah sejak lama diakui oleh Indonesia secara resmi, tinggal dihidupkan kembali.

Tetapi perlu diingat bahwa pluralisme itu tidak berarti mencampurkan agama, yang Anda sebut sinkretisme. Justru karena pluralisme

itu mengakui perbedaan maka perbedaan itu perlu dikembangkan. Orang Islam berbeda dengan orang Kristen, Hindu berbeda dengan Konghucu, orang Batak berbeda dengan orang Jawa. Semuanya berhak berbeda, malahan harus bangga dengan adanya perbedaan. Kebanggaan atas kebudayaan sendiri itu baik, karena itu Anda perlu bangga sebagai orang Jawa, saya bangga sebagai orang Swiss dan seterusnya. Tetapi kebanggaan akan bangsaku sendiri tidak menghalangi cinta kepada bangsa lain. Saya juga bangga mengenal dan mencintai Indonesia. Saya akan menulis biografi, judulnya *Kisah seorang Indozell* (kesatuan kata antara Indonesia dan Appenzell).

> Sistem demokrasi adalah sistem yang paling baik dan paling sulit. Maka dibutuhkan pendidikan moral dan kecerdasan.

Jadi pluralime tetap menghargai identitas pribadi, bangsa, agama, budaya, tetapi identitas yang tidak eksklusif. Kadang-kadang orang Jawa dianggap sombong, angkuh, tidak menghargai suku-suku lain. Terlebih, orang lain kerap melihat Jawa dengan kejawennya. Padahal, orang Jawa sendiri bilang, "*ko wong iki kejawen*", sedikit berlebihan. Artinya kurang menghargai suku, bangsa lain. Identitas pribadi terlindung dalam kebudayaan dan bangsa yang saya anut dengan tetap bisa menghargai yang lain. Mungkin dengan banyak pergaulan, tukar pikiran, ada *osmose* yang dalam ilmu hayat berarti ada pertukaran zat antar-sel.

Kebudayaan bukan sesuatu yang statis, bisa mengarah menuju sinkretisme. Misalnya kebatinan Jawa cenderung sinkretis. Sinkretisme dalam gereja Katolik, Protestan maupun agama Islam, sering mendapat konotasi negatif. Sebenarnya itu kurang adil, karena bagi saya ada sinkretisme kreatif, contohnya kebatinan Jawa. Waktu saya

di Magelang, saya mempelajari aliran Pangestu dengan bantuan pak Bupati, yang pada saat itu mengundang kita, kaum cendekiawan, untuk berdiskusi setiap bulan. Bahkan salah satu teman kami termasuk dalam aliran kebatinan.

Dalam aliran Pangestu, misalnya, baik Nabi Muhammad maupun Yesus disebut sebagai sang guru sejati. Ini sinkretisme yang simpatik. Mengapa orang dilarang menimba yang baik dari agama lain? Dulu saya sangat antisinkretisme, sekarang tidak lagi, setelah saya mempelajari kebatinan. Nahdlatul Ulama (NU) juga sedikit sinkretis. Mereka menerima adat istiadat Jawa, seperti musik atau tradisi pewayangan yang tidak ada sangkut-pautnya dengan agama Islam. Figur-figur seperti Semar, Arjuna tidak ada sangkut-pautnya dengan Islam. Orang Islam yang agak keras menolak itu. Tetapi, dalam NU selalu diterima. Pada hemat saya, sinkretisme NU itu kreatif, mendamaikan, dan menenteramkan.

Bertentangan dengan pluralisme adalah pandangan bahwa agamaku merupakan agama satu-satunya yang benar. Itu eksklusivisme atau fundamentalisme mutlak. Saya dulu, ketika masih studi teologi di Austria, juga berpandangan begitu. Saya yakin bahwa agama Kristen-Katolik adalah satu-satunya yang benar. Dengan mengenal orang-orang dari agama lain saya kemudian berjiwa *ekumenis*. Setelah saya ke Indonesia saya menjadi lebih ekumenis lagi, mulai mengenal banyak orang Islam, yang saya hargai, yang bersikap sangat baik terhadap saya. Saya sadar bahwa memang ada kebenaram *ilahi* dalam setiap agama. Ini juga dinyatakan dalam konsili Vatikan II, 1962-1965. Secara eksplisit diutarakan bahwa semua agama mempunyai kebenaran. Ada kebenaran di luar gereja. Meskipun begitu, tidak berarti menyamaratakan. Menurut

peribahasa Jawa, *kabeh agama pada wae.* Kebenaran berarti dalam warna-warna yang berbeda-beda. Ini pluralisme.

Lantas apakah memang pluralisme sama dengan relativisme?

Saya mendengar bahwa Paus Benediktus XVI, memberikan konotasi negatif kepada relativisme. Jadi, menurut hemat saya, hal ini selalu tergantung bagaimana kita menginterpretasikan istilah tersebut. Kalau relativisme diartikan sebagai indiferentisme, yakni sikap acuh tak acuh, tak pandang bulu terhadap agama manapun, maka saya mendukung pendapat Paus. Karena sikap ini dangkal sekali, meremehkan segi kebenaran, yang bisa diketahui dari wahyu ilahi, dari ilmu pengetahuan maupun suara hati.

Tetapi menurut saya ada juga relativisme positif. Relativisme berarti menghubungkan, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata relativisme berasal dari kata latin *relatio*, hubungan, *seserawungan* dalam bahasa Jawa. Bapak tidak hidup secara absolut, dia hidup dalam hubungan, relasi dengan anak-anak dan isterinya. Kalau terlalu memutlakkan dirinya sendiri, maka dia salah, dan tidak bisa disebut sebagai seorang bapak lagi. Kalau semua hanya harus melayani dia, dia tidak pantas lagi disebut bapak. Dia juga harus melayani anak dan isterinya. Ia hidup dalam relasi.

> Demokrasi sama sekali tidak berarti bisa bertindak seenaknya. Dalam sistem demokrasi kedisiplinan sangat ditekankan secara ketat. Kalau orang tidak mematuhi aturan permainan liberal, dia bisa dihukum.

Dalam agama, relativisme positif berarti selalu menghubungkan atau membandingkan diri dengan agama lain; mau belajar

dari gama lainnya (misalnya orang Kristen bisa belajar dari semangat puasa Islam). Menyadari, bahwa setiap agama sebenarnya bisa memberi-kan keselamatan dan kedamaian, maka setiap orang harus menuruti hati nuraninya; berusaha memperdalam agama; mencari kebenaran dan keyakinan, bahkan lewat studi dan tukar pikiran. Namun, kita juga tidak bisa gampang pindah agama. Andaikan pacarnya beragama lain atau membawa keuntungan ekonomi, lantas haruskah seseorang pindah agama? Motif perpindahan agama seperti itu mencurigakan. Saya tahu ada orang pindah ke agama Islam karena Islam mayoritas dan mereka merasa lebih aman dalam hal ekonomi, karena dilindungi oleh mayoritas. Pertimbangan ekonomis atau kepentingan pribadi bisa menyebabkan indiferentisme, agama gampang digantikan seperti mengganti pakaian. Itu bukan jiwa pluralisme yang sejati.

Francis D'Sa, yesuit India, yang pandai bergaul dengan orang Hindu dan Islam, menyajikan suatu simbol, *gegambaran*, bagaimana kiranya hubungan antara kebudayaan dan agama yang berbeda-beda dapat hidup bersama secara damai dan harmonis. Ia membandingkan umat manusia dengan orkes. Dalam orkes setiap alat musik penting: biola, seruling, klarinet, trompet, genderang dll, terlebih lagi apabila bisa ditambah dengan kor yang bersuara bas, tenor, sopran dan alto. Justru karena alat-alat dan suara-suara berbeda-beda dan memainkan peranan semurni mungkin, terbina suatu harmoni yang kedengaran indah dan hebat, di bawah pimpinan dirigen yang bijaksana dan cerdas. Artinya, kesatuan dalam kebhinekaan niscaya membahagiakan.

Wawancara dilakukan di Jakarta, Oktober 2006

Percakapan dengan

Franz Magnis-Suseno
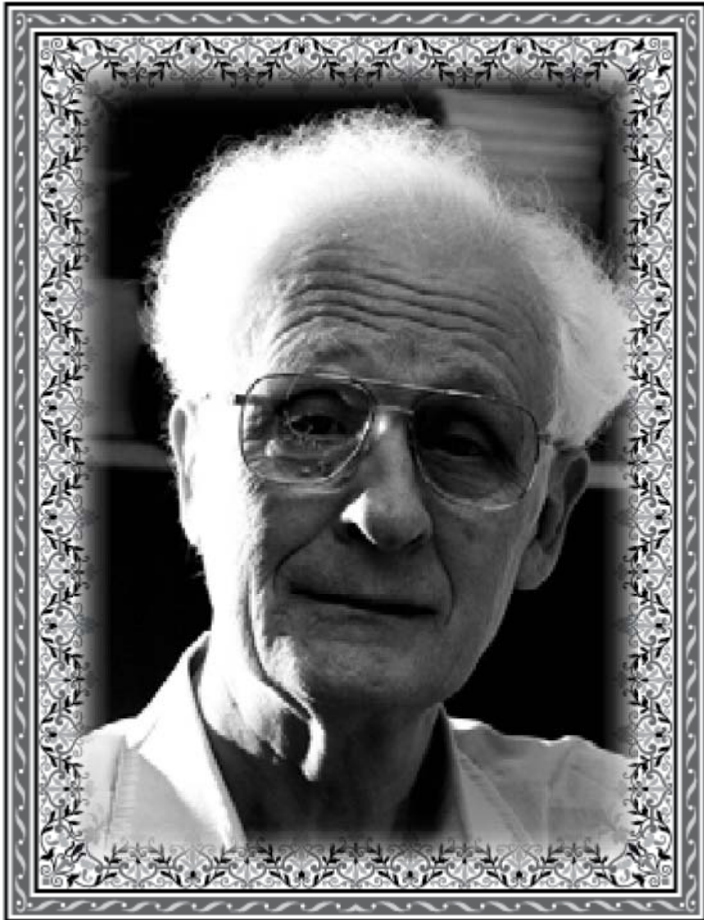
Franz Magnis-Suseno, rohaniawan yang menjadi Guru Besar Filsafat Sosial di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta. Ia memperoleh gelar doktor dari Universitas München, Jerman (1973).

Sekularisasi adalah proses sosial budaya yang mencakup desakralisasi. Namun begitu, pengaruh agama tidak seluruhnya hilang. Ia tetap muncul dalam bentuk tuntutan-tuntutan moral. Sebab, hukum agama tidak bisa diformalkan karena bertentangan dengan HAM. Di sisi lain, negara merupakan institusi manusia yang perlu disusun menurut tuntutan rasionalitas dan moralitas. Negara harus netral, tidak memberikan perlakuan khusus pada salah satu agama, apalagi yang mayoritas. Maka, Indonesia harus tetap menjadi negara sekular, dalam pengertian negara berketuhanan tetapi tidak mencampuri urusan agama warganya; meniscayakan kebebasan politik dan keterbukaan agama (liberalisme); dan menerima secara baik dan adil perbedaan setiap agama dan keyakinan warganya.

Bagaimana pandangan Anda tentang sekularisme?

Sekularisme merupakan konsep yang memerlukan sedikit penjelasan. Untuk itu hendaknya dibedakan antara sekularisme dan sekularisasi. Sekularisasi adalah sebuah proses sosial-budaya yang mencakup desakralisasi. Desakralisasi di sini dimaksudkan bahwa bidang-bidang kehidupan termasuk juga benda-benda yang dianggap sakral mulai sekarang dilihat secara murni duniawi. Ada dua contoh, pertama, misalnya di sebuah desa ada pohon yang dianggap sakral, maka sekularisasi berarti bahwa pohon tersebut adalah semata pohon, tidak lebih. Contoh kedua tidak lain adalah negara. Hampir di seluruh dunia, negara, khususnya dalam bentuk monarki, mengklaim memiliki semacam sakralitas. Misalnya, seorang raja mempunyai hubungan khusus dengan Tuhan atau diangkat oleh Tuhan. Sekularisasi berarti bahwa negara adalah institusi manusia yang perlu disusun menurut tuntutan rasionalitas dan moralitas. Dengan demikian sekularisasi juga berarti bahwa pengaruh agama tidak seluruhnya hilang, melainkan tetap muncul dalam bentuk tuntutan-tuntutan moral.

Gagasan ini sejak beberapa tahun menjadi salah satu pokok dalam diskursus filosof Jürgen Habermas. Habermas mengatakan bahwa dalam negara sekular, agama-agama tetap penting karena mempunyai alam nilai dan keyakinan-keyakinan moral yang harus mengisi formalisme demokratis. Habermas juga dengan keras mengritik apabila sekularisasi disamakan dengan sekularisme. Sekularisme, sebagai sebuah *isme*, adalah suatu keyakinan politik di mana agama sama sekali tidak mempunyai tempat dalam kehidupan publik. Publik harus steril dari agama. Contoh sekularisme yang keras itu dapat ditemukan pada model *laicití* di Prancis.

Prancis, pada abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, membuat undang-undang yang sebenarnya diarahkan terhadap kebijakan publik. Undang-undang itu melarang segala pengaruh agama, dalam hal ini pengaruh gereja, terhadap negara dan juga pemakaian simbol-simbol keagamaan dalam wilayah publik seperti sekolah negeri dan sebagainya. Fenomena inilah yang sejak sepuluh tahun belakangan justru sangat dirasakan oleh komunitas Muslim yang ada di Prancis. Perempuan Muslim Prancis tidak boleh memakai jilbab di sekolah. Padahal dahulu undang-undang itu dibuat tidak hanya melihat Muslim, melainkan simbol agama apa pun. Namun karena Muslim di Prancis mayoritas berkeyakinan bahwa memakai jilbab merupakan keharusan, maka undang-undang itu kemudian menjadi masalah bagi umat Islam di Prancis. Sekularisme dalam arti ini dianggap sebagai sebuah ideologi.

Dalam konteks negara, yang mesti didukung adalah negara sekular yang tetap memberi tempat pada agama. Hal itu bisa dilihat pada dua negara, pertama Jerman yang jelas sekular. Di sini agama tidak bisa memerintahkan negara, demikian pula sebaliknya. Namun demikian, Jerman tetap memperhatikan agama-agama. Misalnya, Gereja Protestan maupun Katolik mempunyai biro khusus dengan pemerintah Jerman. Sekarang hal itu juga mulai dipikirkan untuk Islam, supaya agama –dalam hal kebijakan yang relevan terhadap negara– dapat berdialog dan menciptakan suatu diskursus dengan pemerintah. Hal semacam itu dianggap sesuatu yang positif.

Sedangkan contoh berikutnya adalah Amerika Serikat. Di Amerika, pemisahan antara agama dan negara terjadi dengan sangat tajam. Misalnya, tidak boleh sama sekali terdapat salib di dalam sekolah negeri atau di luar sekolah negeri. Kendati demikian dalam

kenyataannya di wilayah publik suasana yang ada sangatlah agamis. Apakah dalam hal ini akibat dari pengaruh Injil atau bukan, pembahasan ini tidak sampai masuk ke situ. Karena itu Amerika tidak sekadar menuliskan *In God We Trust* pada mata uangnya, tetapi menganggap positif kehadiran agama-agama.

Sekularisasi adalah sebuah proses sosial-budaya yang mencakup desakralisasi. Desakralisasi di sini dimaksudkan bahwa bidang-bidang kehidupan termasuk juga benda-benda yang dianggap sakral mulai sekarang dilihat secara murni duniawi.

Namun demikian, hal semacam itu sangat berbeda dengan Prancis yang telah meletakkan agama secara negatif. Dari situ dapat disimpulkan bahwa salah kalau menganggap sekularisme sebagai sebuah ideologi yang hendak menyingkirkan keberadaan agama dari wilayah publik. Itu tidak mungkin. Maka bagi suatu negara sekular, distingsi antara sekularisme dan sekularisasi menjadi begitu penting untuk meluruskan kesalahkaprahan pemahaman bahwa sekularisme memiliki arti yang sama dengan penolakan negara agama.

Ada yang beranggapan bahwa sekularisasi, sebagai suatu proses desakralisasi terhadap wilayah publik atau negara, pada dasarnya juga akan mengarah kepada sekularisme. Apakah memang demikian?

Negara-negara Barat, seperti Prancis yang memiliki kadar sekularitas paling ekstrem, kini justru memperlihatkan hubungan antara negara dan Gereja Katolik yang mengalami banyak kemajuan. Nicolas Sarkozy, sebagai salah satu kandidat pemilihan presiden pada saat itu, malah ingin mengubah beberapa ketentuan dari *laiciti* itu

sendiri. Upaya perubahan tersebut tidak hanya demi gereja Katolik, tetapi juga Islam. Sebab dia sadar betul bahwa perubahan mendesak dilakukan mengingat integrasi masyarakat Islam yang makin besar di Prancis. Negara sudah sangat perlu untuk berbicara dengan masyarakat Muslim. Jadi, memajukan suatu kebijakan di mana negara begitu saja menganggap sepi eksistensi umat beragama, baik Kristen, Katolik, Islam atau yang lainnya, sejatinya sangat merugikan. Adalah penting bagi sebuah negara untuk membangun hubungan positif dengan seluruh masyarakat. Karena itu, religiusitas tidak bisa diabaikan. Jadi, proses sekularisasi tidak memiliki tendensi ke arah sekularisme.

Pada prinsipnya sekularisme, sebuah ideologi yang pada abad ke-18 dan 19 telah mempengaruhi Revolusi Prancis, merupakan reaksi terhadap kedudukan yang amat kuat dari gereja Katolik. Sekularisme muncul di negara yang warganya menganut Katolik untuk melawan Gereja yang pada abad ke-18, di zaman "orde lama", begitu berpengaruh dalam Revolusi Prancis. Sayang kekuatan ini kemudian justru diarahkan menjadi ateis. Dalam upayanya membikin Prancis sebagai negeri ateis, ribuan pastor dan suster dipenggal kepalanya, ditenggelamkan di laut, dan sebagainya. Suatu hal yang luar biasa mengerikan. Itulah puncak sekularisme. Kendati begitu, sekularisme tidak pernah sekeras itu di negara-negara lain. Semua itu tidak pernah terjadi di negara Protestan, begitupun di negara Budha atau Hindu. India merupakan negara sekular, tetapi jelas tidak ada Hinduisme. Di Islam, saya tidak cukup mengenal situasinya, kecuali Turki. Turki adalah suatu negara yang secara nyata sekular, dan karenanya, untuk kalangan Islam, menjadi kasus yang sangat menarik.

Kasus sekularisme Prancis justru lebih menarik lagi. Revolusi Prancis yang memakai jalan kekerasan sebagaimana dipelopori oleh Maximillian Robispiere, yang ternyata berakibat jauh pada proses ateisme, sepertinya belakangan ini menjadi suatu fesyen. Anti-agama tengah menjadi life style *di Eropa (Prancis, Belanda, Denmark dan sebagainya), sebagaimana terlihat pada mengemukanya kasus* Jyllan Posten. *Artinya, sekularisasi di Eropa mengarah pada anti-agama. Bagaimana Anda menjelaskan fenomena tersebut?*

> Sekularisme, pada hematnya, salah kalau dianggap sebagai sebuah ideologi yang hendak menyingkirkan keberadaan agama dari wilayah publik. Itu tidak mungkin. Tetapi bagi suatu negara sekular, sesungguhnya distingsi antara sekularisme dan sekularisasi itu penting. Sebab hal tersebut untuk meluruskan: penolakan terhadap sekularisme adalah sama artinya dengan penolakan negara agama.

Untuk melihat secara jelas ihwal proses sekularisasi di Eropa, hendaknya dibedakan beberapa kecenderungan yang terjadi di sana. Ada sebuah kondisi di mana sekularisasi di beberapa negara Eropa terjadi dalam arti bahwa kehidupan masyarakat semakin berjalan "seakan-akan tidak ada agama dan tidak ada Tuhan". Itu memang salah satu ciri modernitas, karena masyarakat modern menjadi fungsional. Sehingga, pelbagai wilayah kemanusiaan dipisahkan secara tajam. Misalnya hidup keluarga terpisah tajam dengan hidup profesional. Orang meninggalkan rumah menuju ke tempat yang benar-benar profesional kemudian kembali ke keluarga. Lalu mungkin ada macam-macam unsur *civil society.* Barangkali ia anggota partai politik atau anggota klub catur, dan sebagainya. Di sisi lain, istrinya tidak ikut

pada klub yang sama. Atau, istri itu sendiri menjadi anggota suatu klub lainnya. Jadi, semua itu berjalan tanpa acuan pada negara; tidak juga pada agama.

Kondisi semacam ini sebenarnya tidak bisa serta merta dikatakan anti-agama. Pada sebuah kota di Jerman, sebagai tamsilan, apakah orang beragama Katolik, Protestan, partai Islam, ataupun bermacam jenis identitas agama lainnya, tidak akan ada perbedaannya. Begitu juga kalau orang tersebut dioperasi. Dia tidak akan bertanya apakah dokternya Katolik atau bukan. Dan sebagai pasien, dia juga tidak ditanya apa agamanya oleh pihak rumah sakit. Jadi, sekularisasi dalam arti ini seolah-olah menghilangkan eksistensi Tuhan dari kehidupan. Jika demikian tidak usah ada agama. Agama dalam pengalaman keseharian orang Eropa, terutama Eropa Barat, telah 'menguap'. Di Eropa Barat, seperti Ceko, ada satu keunikan yang jika dicermati sebenarnya telah mengalami penurunan atau pengurangan keimanan kepada Tuhan yang sangat tajam. Di Skandinavia, orang-orang yang tidak lagi peduli apakah mereka masih anggota Gereja Protestan atau tidak juga cukup tinggi –mereka ini sebetulnya dapat dikatakan sebagai orang-orang yang tidak lagi beriman.

Di Jerman Timur, negara bekas daerah komunis, orang yang dibaptis hanya berjumlah lebih kecil dari 40%. Berarti selebihnya tidak beragama sama sekali, bahkan mungkin ada yang tidak tahu makna dari hari natal. Yang mereka ketahui dari hari natal hanyalah pohon natal. Bahwa itu merupakan momen perenungan di mana Yesus lahir, banyak sekali yang tidak tahu. Ceko, menurut banyak ahli, merupakan suatu pengecualian dari proyek modernitas Eropa sesungguhnya. Itu semua bukanlah masa depan modernitas yang ideal.

Amerika Serikat sama sekali berbeda. Di situ tidak ada sentimen antiagama sebagaimana terdapat di Denmark atau lebih jelas lagi di Prancis. Di Eropa Timur, Polandia dan sebagainya, juga tidak demikian. Bahkan Polandia, Kroasia dan Slovakia justru menjadi negara-negara yang sangat religius. Begitupun Amerika Latin. Sedangkan di Asia dan Afrika tidak ada masalah sama sekali yang berkaitan dengan sentimen terhadap agama. Cina, yang *notabene* Komunis, memiliki kemajuan agama, termasuk kekristenan, yang sangat pesat. Hal yang sama juga terdapat pada Korea Selatan.

Kalau memang situasi Eropa demikian tidak ramah terhadap agama, maka ada beberapa hal yang harus segera diluruskan. Mengapa demikian, karena masalah yang sebetulnya tidaklah berkaitan dengan sekularisasi. Termasuk dalam hal ini adalah merebaknya kecurigaan terhadap Islam. Kecenderungan anti-agama yang merebak di Eropa tidak lagi dialamatkan kepada gereja mereka sendiri, yang belakangan tidak terdengar lagi, melainkan kepada Islam. Islam di Eropa seringkali muncul secara *high profile*. Di tengah masyarakat Eropa, mereka memakai pakaian, potongan janggut, dan sebagainya 'yang lain' dari orang Eropa pada umumnya. Dengan cara seperti itu, mereka memperlihatkan diri sebagai Muslim. Tentu saja berbeda dengan di Indonesia, meski tetap ada orang-orang Islam yang muncul di tengah masyarakat dengan penampilan seperti itu. Pasalnya, sebagian besar dari penduduk Indonesia adalah orang Muslim, sehingga orang-orang yang memunculkan diri seperti itu tidak kelihatan sebagai 'yang lain', sebaliknya akan berbeda dengan orang Kristen. Hal-hal seperti ini sebenarnya tidak lagi berkaitan dengan sekularisasi, meski menjadi masalah yang sangat serius: menumbuhkan prasangka antarumat beragama (apakah di

dalamnya terdapat *clash of civilization*? Itu masalah lain yang perlu pemikiran lebih serius).

Dalam proses sekularsasi muncul istilah 'privatisasi' agama. Konsep yang berusaha menempatkan agama semata pada wilayah yang sangat pribadi (privat) ini kemudian mendapatkan counter *dari konsep "deprivatisasi"-nya Jose Casanova. Ia tidak setuju bila semangat dan nilai agama yang mulia tidak ditransfer dalam kehidupan sosial. Bagaimana Anda melihat konsep privatisasi, sebagai turunan dari sekularisasi?*

Saya tidak terlalu suka dengan istilah privatisasi. Yang harus diperjuangkan dalam masyarakat sekular adalah suatu sistem yang berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjunjung tinggi kebebasan beragama. Permasalahan yang ada di sini adalah berkisar pada relasi antara agama dan negara. Ihwal religiusitas atau praktik religiusitas pada tingkat individu dalam melaksanakan keyakinan agamanya di samping menjadi tanggung jawab individu juga tetap ada pengaruh dari agama. Pada prinsipnya baik Islam, Katolik, maupun Protestan berpendapat bahwa agama mempunyai pengaruh yang sangat menentukan pada seluruh dimensi kehidupan orang yang beragama. Agama berpengaruh tidak hanya pada lingkup pribadi dan keluarga, atau kalau bagi orang Katolik tidak terbatas pada hari Minggu saja. Jadi, meskipun profesi seseorang yang beragama Katolik tidak ada unsur agamanya sama sekali, pekerjaan yang digelutinya tidak akan benar-benar lepas dari nilai-nilai agama, misalnya saja tentang kejujuran dan tanggung jawab. Orang Katolik akan melihat profesinya dari sudut agama di mana senantiasa menekankan kejujuran dan tanggung jawab. Begitu juga

dalam urusan politik. Orang Katolik merasa bebas memilih partai apa saja –kecuali partai yang memperjuangkan kebijakan yang dianggap tidak bermoral. Tetapi jika dia seorang yang cukup intensif dan taat beragama, komitmen politik pun akan mencerminkan komitmen agama yang dipeluknya. Hal seperti itu juga yang dimaksud oleh Habermas.

Dengan pengertian lain, agama bukan sesuatu yang murni privat. Yang murni privat adalah penghargaan apa saja yang berkenaan dengan seni. Apakah seseorang lebih menyukai lukisan atau plakat-plakat dan poster-poster, itu yang disebut urusan privat. Urusan privat tidak mempengaruhi fungsi orang tersebut pada profesi yang digeluti atau partai politik yang dipilihnya. Tetapi beragama berarti bahwa seseorang hidup dalam ketaatan terhadap Tuhan. Dan ketaatan tidak memiliki batasan privat dan publik. Dalam negara sekular, itu terungkap sebagai sikap kritis dalam bernegara. Sebagai warga negara, seseorang berhak menuntut bahwa negara sekurang-kurangnya tidak mengambil kebijakan yang bagi agama orang tersebut dianggap tidak etis.

> Sekularisasi berarti bahwa negara adalah institusi manusia yang perlu disusun menurut tuntutan rasionalitas dan moralitas. Jadi sekularisasi juga berarti bahwa pengaruh agama tidak seluruhnya hilang, melainkan tetap muncul dalam bentuk tuntutan-tuntutan moral."

Gereja Katolik, misalnya, menentang undang-undang yang begitu saja mengijinkan abortus. Saya, secara pribadi, akan menentang undang-undang yang jelas akan merugikan kaum miskin, dan itu bukan urusan gereja. Pemerintah harusnya membuat aturan yang jelas agar *market* tertata dengan tertib sekaligus dapat lebih banyak

menyediakan lapangan pekerjaan bagi kaum miskin. gereja tidak punya hak apa pun untuk mengatur *market*. Tetapi supaya jangan terjadi eksploitasi atas nama kebebasan hak asasi manusia dan modal usaha, kepentingan buruh tidak boleh diabaikan begitu saja. Saya kira, itulah yang dikatakan oleh gereja.

Dalam arti seperti itulah privatisasi agama ditolak, meski agama tetap tidak boleh menguasai. Jadi, agama muncul dalam masyarakat melalui media-media demokratis. Misalnya melalui pemilihan umum, di mana orang Katolik atau orang Islam bisa memilih siapa yang mewakilinya.

Konsep deprivatisasi atau agama publik Jose Casanova terjadi pada tingkat civil society, *bukan negara. Di situ agama mempunyai peran moral untuk mengubah masyarakat atau membebaskan masyarakat dari ketertindasan. Menurut pandangan Anda, dalam konteks keindonesiaan, sejauh mana dan pada tingkat apa seharusnya agama memasuki dan berperan di ranah publik?*

Agama hanya bisa berperan sebagai bagian dari *civil society* yang menyuarakan pandangan, tuntutan, dan keinginan untuk mencoba mempengaruhi komponen *civil society* lain supaya sependapat. Hanya itulah kemungkinan yang ada. Contoh peran demikian dapat disebutkan seperti gereja Katolik yang bisa ikut menentukan, membuat pernyataan, mengkritik, menuntut, dengan mengharapkan bahwa moral dan semangat agama disertakan melalui media-media demokratis. Itulah yang oleh Habermas disebut pengepungan DPR oleh *civil society* supaya DPR atau parlemen tidak melupakan masyarakat. Masyarakat terus bersuara melalui media massa dan sebagainya.

Agama, misalnya Katolik atau Islam, sebagaimana juga diutarakan oleh Habermas, adalah salah satu bagian dari komponen *civil society* yang harus diberi ruang untuk bersuara. Tidak ada monopoli di sini. Misalnya kebijakan publik mengenai abortus itu ditentang keras oleh beberapa kelompok perempuan. Pendapat semacam itu sah-sah saja, sebab wilayah *civil society* harus terbuka. Oleh karena itu mereka berhak mengatakannya. gereja Katolik juga tidak mempunyai kemungkinan untuk memaksa negara. Negara akan mendengarkan kedua-duanya. Artinya undang-undang tetap dibuat oleh parlemen (entah berdasarkan pertimbangan apa) tidak bisa dikontrol oleh *civil society*. Tetapi *civil society* akan terus-menerus mengomentari kebijakan-kebijakan yang tidak diharapkan. Dan bagi pembuat dan pemegang kebijakan, aspirasi dari *civil society* hendaknya dijadikan acuan. Parlemen tidak bisa mengabaikan itu sama sekali.

> Tradisi tidak boleh dianggap sepi. Semua orang yang masuk dalam suatu agama berarti sekaligus juga masuk ke dalam suatu tradisi yang turun-temurun diterima begitu saja. Karena itulah orang-orang liberal selamanya akan mengatakan bahwa agama harus dilihat secara kritis. Makna di dalam agama mungkin terjadi pembekuan dan tambahan atau malah interpretasi manusia yang mempersempit, yang justru jauh dari maksud sabda Allah itu sendiri.

Bagaimana merumuskan bentuk dan peran agama dalam level politik?

Dalam ranah politik, setiap keputusan dari polemik politik dilakukan dalam badan legislatif dan eksekutif, agama tidak pu-

nya peran. Tapi agama, sebagaimana warga masyarakat, diperlukan untuk bisa terus-menerus menyuarakan pendapatnya. Semakin agama menganggap ini suatu yang relevan, yang dari sudut moral penting atau malah ditolak, maka agama akan bersuara semakin keras. Posisinya tidak mempunyai nilai lebih dan unggul, secara politis, dari suara dalam masyarakat. Dalam hal ini, agama sama dengan semua komponen *civil society*, mereka tidak secara formal bisa memaksakan sesuatu terhadap legislatif dan eksekutif.

Selama ini, di Indonesia, kita menyaksikan bermunculan tuntutan penerapan syariat Islam melalui perda-perda, begitupun yang terjadi dengan RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi dan lain sebagainya. Apa pandangan Anda tentang tuntutan-tuntutan seperti itu?

Pertanyaan tersebut dapat juga ditarik menjadi sampai sejauh mana tuntutan-tuntutan seperti itu bisa disesuaikan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar dan khususnya dengan hak asasi manusia. Kita bersyukur belum begitu lama gereja Katolik angkat bicara bahwa kenegaraan yang etis harus menjamin hak-hak asasi manusia. Pasalnya, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebuah kesepakatan dalam zaman modern dan pascamodern yang etis, dan karena itu tidak bisa diatasi hanya dengan pemungutan suara mayoritas. Justru itulah fungsi HAM yang seharusnya, yakni mendorong bahwa dalam demokrasi, unsur-unsur yang sangat vital, yang langsung menyangkut kehidupan seseorang dan kebutuhannya, tidak dapat dikenakan prosedur majoritarian.

Demokrasi tanpa HAM akan merupakan kediktatoran mayoritas. Karena itu, dalam rangka mengikuti mekanisme demokratis, tentu saja orang bisa memakai kebebasan menyatakan penda-

pat untuk mengutarakan, “aku ingin supaya syariah diterapkan”. Tetapi, mestinya negara harus menolak. Hal itu hendaknya dibedakan dengan kasus lainnya seperti tuntutan masyarakat mengenai kenaikan upah minimum atau menuntut untuk penegerian Freeport. Ini keputusan politik yang bisa dijalankan, tetapi bisa juga tidak dijalankan oleh negara, tidak tergantung HAM. Tetapi tuntutan formalisasi hukum agama jelas akan bertentangan dengan HAM. Bukan hanya bertentangan dengan hak asasi nonmuslim, yang tidak langsung akan terkena akibatnya, tetapi justru hak asasi orang Muslim sendiri.

Harus diakui bahwa liberalisme adalah istilah yang mempunyai beberapa arti, yang semuanya berkaitan dengan kebebasan namun secara etis dinilai berbeda. Sehingga, terdapat bidang-bidang di mana liberalisme pantas dikritik, tetapi ada juga bidang-bidang di mana liberalisme itu sangat bagus. Misalnya, liberalisme ekonomi yang melahirkan kapitalisme, sampai sekarang oleh kebanyakan, katakan saja, komunitas moral (komunitas yang memilih mementingkan moralitas), dinilai negatif.

Oleh karena itu saya berpendapat bahwa pada prinsipnya negara tidak berhak untuk mengatur kehidupan beragama siapa pun, juga tidak berhak mengatur kehidupan beragama mayoritas. Seperti juga gereja Katolik yang tidak lagi dapat menuntut, atau melalui keputusan mayoritas di negara yang mayoritas warga negaranya Katolik, untuk membuat perceraian tidak mungkin. Di Italia, lama sekali hukum gereja menjadi hukum negara. Sophia Laurent, seorang artis jaman dahulu, yang kawin ketika berumur 16 tahun, kembali melakukan perkawinan dengan produser film Carlo Ponte setelah perkawinan pertamanya kandas dalam usia dua tahun. Perkawianan kedua itu diadakan di luar

Italia. Karena bagi gereja dan negara Italia perkawinan itu tidak sah. Setelah perkawinan itu, Sophia tidak berani kembali ke Italia karena takut akan ditangkap. Padahal perkawinan yang keduanya ini kemudian berlangsung dengan sangat membahagiakan. Namun, sekarang kasus semacam itu tidak mungkin terjadi lagi. Sebab Italia telah lama menghapus hukum tersebut. Kini setiap orang bisa bercerai dan kawin lagi. Urusan semacam itu tentu saja harus diserahkan kepada mayoritas. Artinya, bisa saja gereja menyatakan secara moral bahwa hal itu tidak boleh, tetapi tidak berarti bahwa hak tersebut menjadi hangus. Hal itu berlaku juga pada persoalan apakah orang mau berpuasa atau tidak. Walaupun menurut saya akan lebih bagus kalau dia mau berpuasa, negara tetap tidak berhak menghukum orang yang tidak berpuasa.

Konsep liberalisme banyak ditentang karena, pertama, liberalisme dipahami oleh kebanyakan orang Indonesia sebagai kebebasan tanpa batas. Kedua, liberalisme mendorong lahirnya kapitalisme yang menyebabkan kolonialisme dan imperialisme. Dalam pengertian seperti apakah gagasan liberalisme harus tetap diperjuangkan?

Harus diakui bahwa liberalisme adalah istilah yang mempunyai beberapa arti, yang semuanya berkaitan dengan kebebasan namun secara etis dinilai berbeda. Sehingga, terdapat bidang-bidang di mana liberalisme pantas dikritik dan bidang-bidang di mana liberalisme sangat bagus. Misalnya, liberalisme ekonomi yang melahirkan kapitalisme, sampai sekarang oleh kebanyakan, katakan saja, komunitas moral (komunitas yang memilih mementingkan moralitas), dinilai negatif. Kapitalisme tidak berhasil untuk diterima sebagai sistem ekonomi yang netral. Ia tetap sebagai sistem ekonomi yang

tidak sesuai, kalau dilaksanakan secara murni, dengan hak-hak asasi manusia dan hak-hak sosial yang ada. Gereja Katolik selama ini selalu mengutuk kapitalisme. Termasuk juga Paus Paulus ke-2 yang sangat keras mengutuk kapitalisme.

Banyak juga orang yang menganggap liberalisme, terutama pada model liberalisme budaya, sebagai gagasan yang memperbolehkan melakukan apa saja, asal tidak merugikan orang lain. Salah satu ungkapan liberalisme seperti itu adalah revolusi seksual yang di Barat baru mulai pada tahun 60-an di abad yang lalu. Dalam revolusi itu ada beberapa hal yang saya anggap sebagai sebuah kewajaran, misalnya, *dekriminalisasi* kelakuan homoseksual. Secara pribadi saya tidak setuju kalau dua orang sejenis melakukan hubungan seks di kamar lalu dihukum oleh negara. Hal seperti itu dahulu mutlak dilarang di Jerman. Padahal itu bukan urusan negara. Tetapi bahwa liberalisme yang diartikan sebagai apa saja diperbolehkan, justru menyangkal adanya nilai-nilai dan norma-norma etis yang membatasinya. Misalnya adalah ketidakpekaan terhadap perasaan orang yang taat beragama.

> Dalam konteks negara, yang mesti didukung adalah negara sekular yang tetap memberi tempat pada agama. Hal itu bisa dilihat pada dua negara, pertama Jerman yang jelas sekular. Di sini agama tidak bisa memerintahkan negara, demikian pula sebaliknya. Namun demikian, Jerman tetap memperhatikan agama-agama.

Reaksi umat Islam terhadap kartun Nabi Muhammad, dalam konteks ini, adalah sesuatu yang positif. Sebab, reaksi semacam itu tidak pernah ditunjukkan secara demonstratif oleh orang Katolik ketika agama dihina dengan mengatasnamakan kebebasan bereks-presi. Karena itu, bagi umat Katolik, kemarahan umat Islam atas

penghinaan dan penodaan agama dianggap sebagai tindakan yang sangat tepat dan patut untuk ditiru, karena agama Katolik dan Protestan sudah sering dihina tetapi selalu dibiarkan saja. Tentu saja di dalam reaksi umat Islam tersebut, banyak juga yang berlebihan. Tetapi bahwa Islam marah dan tidak bisa menerima atas penghinaan tersebut, banyak orang Katolik yang menghargai dan mengaguminya. Mereka melihat, misalnya, instalasi seni di mana Yesus diejek dengan memperlihatkan alat kelaminnya dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu bagi orang Kristiani adalah penghinaan luar bisaa. Tetapi di pengadilan Jerman, misalnya, tindakan semacam itu tidak berhasil ditolak, dengan alasan kebebasan penciptaan estetis.

Di situ jelas bahwa liberalisme dengan kebebasan total bertentangan dengan kesadaran bahwa kita terikat. Dalam dua dimensi liberalisme jelas memiliki konotasi yang positif. Dalam dimensi politik, liberalisme melahirkan paham bahwa kekuasaan negara harus berdasarkan sebuah undang-undang dasar. Jangan lupa, pada 400 tahun yang lalu tidak ada negara dengan undang-undang dasar. John Locke merupakan orang pertama yang menuntut adanya undang-undang dasar yang mengatur di mana hak eksekutif dan hak legislatif. Liberalisme adalah paham yang memunculkan pembagian kekuasaan, pembatasan kekuasaan, toleransi, dan kebebasan beragama, begitu pula *the rule of law,* kedaulatan hukum dengan hak asasi manusia.

Liberalisme juga tidak selalu berkaitan dengan kapitalisme. Nurcholish Madjid yang lebih terlihat sosial-demokrat yang keras dan tegas, juga Habermas yang berpaham kiri, secara politis telah dianggap liberal. Kebebasan berbicara untuk menyatakan pendapat, kebebasan berkumpul dan membentuk partai politik, adalah

kemajuan-kemajuan politik terbesar dalam sejarah modernitas yang dibawa oleh gerbong liberalisme. Semua itu merupakan sisi positif liberalisme yang patut disyukuri dan kita sendiri menikmatinya. Karena itu liberalisme politik adalah sesuatu yang positif.

Dalam dimensi agama, kata liberal pada umumnya berarti orang yang berani mempertanyakan dan mengkritisi doktrin-doktrin teologi. Dengan pengertian lain dia bukan orang yang menerima begitu saja apa yang dibawa oleh agama. Sebab, apabila seseorang sudah berkeyakinan bahwa kalaupun keberagamaannya dipaksakan atas kehendak Tuhan, dan tetap menganggapnya sebagai sesuatu yang baik dan benar, maka itu sudah merupakan kontradiksi. Memang, salah satu hakikat agama adalah ketaatan kepada Allah. Tidak mungkin beragama kalau tidak taat kepada Allah. Akan tetapi, seorang liberal akan berani mengatakan agar ia betul-betul taat kepada Allah, ia harus mempertanyakan apakah interpretasi hukum agamanya yang berasal dari manusia itu betul-betul sesuai dengan kehendak Allah, yang pada-Nya-lah orang tersebut harus taat. Demikianlah pijakan dasar orang liberal. Dengan begitu, orang liberal tidak mau dengan serta-merta mengatakan, “terhadap Tuhan Allah aku pasrah”, tetapi ia berani dengan kritis, sebagai subjek, mempertanyakan apa yang oleh tokoh-tokoh agama, para praktisi agama, termasuk gereja (Katolik), misalnya ajaran para Paus, didakwahkan dan diyakini sebagai kekristenan yang asli.

Di dalam wilayah kekristenan, hal-hal seperti itu pertama kali dipersoalkan secara besar-besaran oleh Protestantisme dengan mengatakan bahwa banyak praktik dan ajaran gereja sudah tidak sesuai lagi dengan yang dibawa Yesus. Kemudian Kristen pecah. (Saya merasa sayang dengan Protestan, mengapa kekristenan sampai harus pecah.) Tetapi, demi Kekristenan, gereja Katolik memang perlu

mendapatkan kritik seperti itu. Dengan begitu baru dia menjadi sadar akan masalah dan terbuka terhadap kritik.

Pandangan liberalisme idealnya menyatakan bebas dari ketaatan mutlak terhadap interpretasi manusia. Sebab, umat beragama selalu mendapat agama-nya dari manusia, tidak pernah langsung dari Allah. Agama memang sebuah realitas, sebuah komunitas historis. Namun demikian, tradisi itu sangat penting. Tradisi tidak boleh dianggap sepi. Semua orang yang masuk dalam suatu agama berarti sekaligus juga masuk ke dalam suatu tradisi yang turun-temurun diterima begitu saja. Karena itulah orang-orang liberal selamanya akan mengatakan bahwa agama harus dilihat secara kritis. Makna di dalam agama mungkin terjadi pembekuan dan tambahan atau malah interpretasi manusia yang mempersempit, yang justru jauh dari maksud sabda Allah itu sendiri.

Jadi, liberalisme dalam agama bukan berarti apa saja diperbolehkan. Celakanya, jarang sekali ditemukan orang yang beragama berani mempertanyakan apa saja yang terkait dengan agamanya. Yang dipertanyakan bukan lagi eksistensi dan kekuasaaan Allah, seperti "apakah Allah berhak menuntut sesuatu dari aku"; melainkan bertanya "apakah Allah memang menuntut kepadaku berbuat suatu hal tertentu". Sebab Uskup atau Paulus selalu mengatakan demikian, sementara mereka adalah seorang manusia. Oleh sebab itu, sebagai orang liberal seseorang akan bertanya apakah pendapat Paus itu sudah memiliki kebenaran yang pasti, sesuai dengan kehendak Allah, ataukah tidak? Mungkin inspirasi seperti itu sejak mula datang dari Protetantisme, meski kemudian juga masuk ke gereja Katolik. Jadi belakangan ini gereja Katolik juga belajar terhadap Protestantisme. Di situ para teolog mulai kritis terhadap gereja dan kerap mempertanyakan akan tetap dipertahankannya model

hierarki yang sejatinya tidak disukai lantaran berimplikasi terhadap terlembagaknnya kekuasaan dalam agama. Sebagai contoh, dalam bahasa geraja Katolik sering disebut istilah "para gembala" di mana umat dianggap sebagai domba dari para penggembalanya (kalangan gereja). Sehingga biasanya yang peka terhadap problem liberalisme adalah gereja, sebab kerap mendapat getahnya. Begitu pula lembaga dari masing-masing agama.

> Kebebasan berbicara untuk menyatakan pendapat, kebebasan berkumpul dan membentuk partai politik, adalah kemajuan-kemajuan politik yang terbesar dalam modernitas yang dibawa oleh gerbong liberalisme. Semua itu merupakan sisi positif liberalisme yang patut disyukuri dan kita sendiri menikmatinya. Karena itu liberalisme politik adalah sesuatu yang positif.

Kembali ke konteks liberalisme politik. Dalam beberapa tulisan Anda tampak bahwa liberalisme juga mengandaikan netralitas posisi negara, begitu pula dengan apa yang diyakini oleh John Rawls. Pertanyaannya, seberapa pentingkah netralitas dalam gagasan liberalisme politik?

Netralitas dalam gagasan liberalisme politik berarti bahwa negara tidak memberikan *special treatment,* perlakuan khusus pada salah satu agama. Negara sebaiknya tidak memberikan perlakuan khusus terhadap satu agama minoritas, terlebih lagi terhadap agama mayoritas. Namun demikian negara harus tetap mendukung dan menjamin agar setiap hari-hari besar agama diselenggarakan secara nyaman dan hidmat. Hal ini harus tetap diupayakan agar tidak sampai mengusik rasa adil para pemeluk agama minoritas. Negara tidak boleh membiarkan dan tidak peduli terhadap faktor keamanan dan ketertiban perayaan upacara atau hari besar

keagamaan agama minoritas, seraya secara berlebihan memberikan keberpihakan terhadap setiap upacara keagamaan dari agama mayoritas. Hal tersebut dapat menimbulkan pelanggaran atas asas netralitas dan keadilan.

Dengan begitu netralitas bukan berarti acuh tak acuh. Negara harus menunjukkan kepedulian atas terselenggaranya upacara keagamaan dari seluruh agama yang ada. Akan tetapi, lagi-lagi, kepedulian negara ditunjukkan dengan tetap menenggang dan menjunjung tinggi asas keadilan. Sebab secara prinsipil apabila kepedulian negara tersebut justru menerbitkan ketidakadilan, seperti tindakan negara atau pemerintah menutup tempat hiburan dan warung makan (pada siang hari) selama beberapa hari untuk mendukung suasana puasa, justru bukanlah tujuan dari netralitas negara. Dalam negara sekularistis seperti Indonesia kebijakan seperti itu tentu tidak dibenarkan, karena negara sama sekali tidak mempedulikan apakah 80% dari masyarakat Indonesia puasa atau tidak, lantas bagaimana pula nasib perekonomian warga yang bergantung pada jenis pekerjaan yang ditutup pemerintah. Padahal, negara juga seharusnya peduli atas nasib seluruh warganya bukan malah melakukan diskriminasi terhadap yang lain.

Di samping netralitas dimaknai bahwa negara tidak boleh memberikan special treatment *terhadap suatu nilai, ide, agama atau komunitas tertentu, netralitas juga berarti negara harus mendorong segala jenis nilai yang ada, termasuk mungkin ateisme, komunisme, dan lainnya. Dalam makna yang kedua ini, bagaimana Anda melihat konsep netralitas negara?*

Kita mulai dengan contoh komunisme. Sebetulnya relatif mudah untuk menunjukkan mengapa komunisme tidak harus diijinkan sebagai ideologi resmi sebuah partai. Sebab, ideologi komunisme yang berkembang dan dipraktikkan adalah Marxisme-Leninisme yang tidak mengakui demokrasi dan HAM. Dengan pengertian lain partai yang berdasar pada Marxisme-Leninisme tidak akan memberikan jaminan bahwa dia bermain menurut aturan demokrasi. Hal seperti ini pernah terjadi di Eropa Timur sesudah Perang Dunia II, ketika sebuah partai komunis, atau koalisi partai komunis dan yang lain, memegang tampuk kekuasaan seperti di Ceko dan Bulgaria. Di sana mereka selalu menuntut menteri-menteri, khususnya, kementerian dalam negeri untuk menguasai polisi dan menteri pertahanan utuk menguasai militer agar dapat mengubah negara menjadi komunis. Karena itu, misalnya di Jerman, partai komunis pernah dilarang selama 20 tahun. Kemudian diijinkan lagi ikut serta dalam pemilu karena Jerman menilai bahwa lebih menguntungkan kalau partai ini tetap ikut pemilu –meski pada kenyataanya tidak akan dipilih oleh mayoritas– daripada dilarang.

> Yang harus diperjuangkan dalam masyarakat sekular adalah suatu sistem yang berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan mejunjung tinggi kebebasan beragama. Permasalahan yang ada di sini adalah berkisar pada relasi antara agama dan negara. Ihwal religiusitas atau praktik religiusitas pada tingkat individu dalam melaksanakan keyakinan agamanya di samping menjadi tanggung jawab individu juga tetap ada pengaruh dari agama.

Mengenai ateisme, Indonesia mempunyai acuan yang jelas melalui sila "Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketuhanan Yang Maha

Esa itu berbobot sangat mendalam mirip dengan gunung es, di mana 1/11 belaka yang ada di permukaan, sementara 10/11 sisanya di bawah permukaan. Yang di bawah permukaan adalah konsensus nasional, bahwa di Indonesia tidak ada agama yang diistimewakan. Atau dengan kata lain, pada dasarnya sesuai dengan konsensus nasional sejak awal kemerdekaan, Islam tidak menuntut perlakuan khusus secara konstitusional ataupun dasar hukum yang sah di Indonesia. Itu sangat jelas tercantum dalam Pancasila sampai hari ini. Kompromi waktu itu tercapai atas dasar bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa dijunjung tinggi. Karena itulah hendaknya hal tersebut secara tepat diterjemahkan bahwa Indonesia akan mendukung keagamaan.

Sedangkan kaitannya dengan ateisme yang semestinya tidak diberi persamaan kedudukan, apakah dengan begitu akan melanggar hak asasi manusia dan prinsip toleransi? Jawaban sederhananya adalah bahwa Pancasila tidak berkaitan dengan tingkat kedalaman pribadi seseorang. Maka apabila ada orang yang secara pribadi ateis, tentu tidak bisa dikontrol. Pancasila atau negara, begitu pula setiap warga negara, tidak sampai pada tahap memeriksa kepercayaan atau keyakinan seseorang apakah seseorang percaya pada Tuhan atau tidak. Itu sama sekali bukan urusan kita. Persoalan kepercayaan seseorang sepenuhnya menjadi hak bagi setiap warga negara, di mana setiap orang juga mendapatkan semua hak sebagai warga negara, kewajiban warga negara, hak pilih aktif dan hak pilih pasif. Negara hanya mengatakan bahwa bangsa Indonesia mempunyai tradisi yang kaya akan religiusitas. Hal itu bagi kita adalah sebuah nilai yang sangat tinggi dan karenanya secara resmi harus dilindungi dan dilestarikan. Sehingga kita tidak mengijinkan kalau nilai-nilai itu sampai digerogoti. Tentu saja, prinsip itu juga berlaku bagi orang

ateis. Jadi seorang ateis, dalam politik, harus tetap mendukung tindakan yang menunjang religiusitas bangsa. Dengan kata lain, hal itu tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.

Konsep netralitas sejatinya selalu terkait dengan upaya negara untuk melindungi dan menjamin civil rights *dan* civil liberties. *Yang hendak ditanyakan, apabila nilai-nilai yang diajukan dalam suatu komunitas, masyarakat atau agama ditampung melalui sebuah partai politik yang mengikuti mekanisme demokratis, seperti Pemilu, kemudian memenangkannya. Persoalan akan muncul ketika partai tersebut berkuasa dan membajak demokrasi, melanggar* civil rights *dan* civil liberties. *Kasus demikian terlihat seperti belakangan menjamur di Indonesia. Implementasi hukum agama tertentu melalui perda-perda syariat Islam di berbagai daerah diklaim telah memenuhi prasyarat demokrasi prosedural; begitu pula yang terjadi pada kasus yang telah lewat, partai nasionalis Jerman, Nazi. Bagaimana Anda menanggapi hal ini?*

Pembajakan demokrasi oleh partai politik yang mengakibatkan pada tercabutnya hak dan kebebasan warga negara memang selalu menjadi masalah. Sebagaimana dicontohkan di atas, partai komunis dan Nazi. Nazi berkuasa melalui cara yang legal, tidak melalui revolusi sama sekali, lewat suatu pemilihan umum dan kemudian membentuk pemerintahan demokratis. Namun setelah partai tersebut berkuasa demokrasi dihabisi. Pada hematnya, ini perlu mendapat cukup penjelasan. Terlebih dahulu harus sudah ada diskursus dalam masyarakat apakah ada partai politik yang mempunyai kecenderungan semacam itu di negara ini. Jika memang ada seharusnya dikritik dan dikontrol oleh masyarakat. Lebih

penting dari itu, negara ini memang memerlukan dan tetap harus mempertahankan Undang-Undang Dasar yang sudah ada. Undang-Undang Dasar dan Pancasila tidak memungkinkan negara untuk begitu saja membuat hukum agama menjadi hukum negara. Kalau mau tetap dicoba, menurut saya, partai semacam itu akan mengalami kesulitan untuk bisa memperoleh suara 50%. Pada sisi lain, Mahkamah Konstitusi pun bisa membatalkan keikutsertaan suatu partai jika terbukti tidak demokratis. Sebaliknya kalau betul-betul demokratis, maka tidak bisa dilakukan pembatalan. Kalau partai yang tidak demokratis ini tetap menolak, maka dapat diartikan kalau dia sudah melakukan kudeta. Jika sudah demikian, maka negara boleh mengambil tindakan kekerasan.

Hanya saja, di Indonesia sulit kiranya sebuah partai bisa mencapai 50%. Sebab kisaran paling mungkin bagi partai pemenang Pemilu adalah 20% atau 30%, dengan demikian tidak akan mencapai suara mayoritas mutlak. Tentu saja harus dibedakan dengan upaya negara memfasilitasi perbankan Islam, ini merupakan kebijakan yang sama sekali tidak melanggar Undang-Undang Dasar, hak asasi manusia, ataupun netralitas negara. Sebab negara hanya memberikan fasilitas. Negara mempersilakan siapa saja untuk mencobanya. Kalau kemudian perbankan Islam mendapatkan banyak nasabah dan lebih maju, karena memang cukup bagus, misalnya, harus tetap mendapat jaminan dan dukungan negara. Begitu juga, negara seharusnya tidak sampai melanggar ketidakberpihakan (netralitas). Misalnya negara tetap boleh memfasilitasi ibadah haji, meskipun kemudian tidak memfasilitasi ibadah haji bagi Katolik—karena memang Katolik tidak menjadikan ibadah haji sebagai ritual peribadatannya.

Jadi, pada dasarnya netralitas tidak usah dipahami secara formal atau kaku. Artinya, apabila umat Islam mengharapkan pelayanan tertentu dari negara yang memang umat lain tidak membutuhkan, selama negara mampu memberikannya, maka tidaklah menjadi persoalan. Ketika jenis pelayanan yang pada dasarnya memang harus berbeda, tentu tidak ada tuntutan terhadap negara untuk bersikap netral. Artinya apa yang diberikan kepada umat Islam tidak harus persis sama diberikan kepada umat lain. Tetapi kalau diberikan bantuan untuk membangun suatu rumah ibadah tertentu, maka harus paralel juga dengan umat-umat lain tentunya dengan presentase yang wajar. Sudah seharusnya negara berlaku demikian supaya tidak menimbulkan kontroversi.

Pandangan liberalisme idealnya menyatakan bebas dari ketaatan mutlak terhadap interpretasi manusia. Sebab, umat beragama selalu mendapat agamanya dari manusia, tidak pernah langsung dari Allah. Agama memang sebuah realitas, sebuah komunitas historis.

Jika mengaca lagi pada pengalaman demokrasi di Indonesia, kekuatan antidemokrasi kerap muncul di tengah kehidupan publik dengan pelbagai bentuk. Beberapa waktu lalu beredar isu tentang pembubaran Ormas anarkis, Ormas-ormas yang berpotensi membajak demokrasi. Bagaimana pandangan Anda tentang demokrasi yang, untuk menjaga dirinya, harus berhadapan dengan Ormas-ormas semacam tadi?

Saya tidak dapat melihat permasalahan tersebut secara teoritis ataupun melalui sudut etika politik. Namun seharusnya negara tidak mengijinkan Ormas apa pun yang bersifat milisi. Untuk itu

Ormas bersenjata sudah semestinya ditutup, apapun golongannya. Karena demokrasi menekankan negara hukum di mana monopoli kekerasan berada di tangan polisi dan militer dengan perbedaan fungsi yang jelas. Sehingga dalam sebuah negara demokratis, di mana hukum menjadi panglimanya, tidak boleh ada milisi. Tentu saja itu berlaku bagi semua milisi, laskar, latihan paramiliter dan lain sebagainya. Kelompok-kelompok itu harus dengan tegas di larang. Di situ tidak termasuk organisasi semacam pencaksilat dan ilmu beladiri lainnya yang sama sekali tidak mengancam negara. Kalau milisi dan organisasi sejenis itu ditutup, berarti suatu pertanda bahwa Indonesia adalah bentuk *soft state*, negara yang sama sekali tidak melegalkan Ormas bersenjata. Dengan begitu ancaman buat negara pun jadi berkurang.

Negara-negara Islam pada umumnya, termasuk Indonesia, sangat rentan terhadap munculnya kekuatan antidemokrasi dengan menumpang sistem demokrasi. Ini terkait dengan definisi mereka tentang demokrasi dan liberalisme sebagai paham atau tradisi yang tidak berasal dari Indonesia atau kawasan Timur, melainkan produk peradaban Barat yang mungkin dianggap tidak cocok untuk diterapkan di negara-negara Islam. Karena, tampaknya, demokrasi selalu gagal di negara-negara Islam. Ketika demokrasi diberikan, yang muncul kemudian adalah kekuatan-kekuatan yang menunggangi demokrasi, seperti Hamas, termasuk tuduhan terhadap FIS (Aljazair) atau partai-partai radikal yang muncul di Irak, juga di Indonesia. Apa pendapat Anda perihal fenomena semacam ini?

Tidak sepenuhnya betul apabila dikatakan bahwa demokrasi selalu gagal di seluruh negara yang islami. Contoh yang sangat nyata

adalah Indonesia sendiri di mana beberapa kelompok yang agak fundamentalis tidak ada yang ingin menghapus demokrasi. Malaysia pun mempunyai sistem demokrasi yang cukup berfungsi. Bangladesh, negara yang sangat miskin dan mengalami bermacam gejolak sesudah merdeka, demokrasinya tetap berjalan. Ketidakberhasilan demokrasi di Pakistan belum tentu dikarenakan faktor agama Islam. Mungkin saja lebih karena sektor perekonomian negara tersebut yang sangat lemah. Tidak gampang membangun demokrasi dalam situasi seperti ini. Lebih dari itu, Pakistan adalah negara dengan multibangsa yang jauh lebih sulit dipersatukan, bahkan jika dibandingkan dengan Indonesia. Situasinya di sana jauh lebih kompleks. Itu yang pertama.

Agama bukan sesuatu yang murni privat. Yang murni privat adalah penghargaan apa saja yang berkenaan dengan seni. Apakah seseorang lebih menyukai lukisan atau plakat-plakat dan poster-poster, itu yang disebut urusan privat. Urusan privat tidak mempengaruhi fungsi orang tersebut pada profesi yang digeluti atau partai politik yang dipilihnya. Tetapi beragama berarti bahwa seseorang hidup dalam ketaatan terhadap Tuhan. Dan ketaatan tidak memiliki batasan privat dan publik.

Lalu yang kedua, di Indonesia kelompok Islam secara historis tidak termasuk kelompok yang menentang demokrasi. Dulu partai yang paling mendukung demokrasi justru Masyumi, PSI, Partai Katolik, dan Parkindo (yang terbesar adalah Masyumi). Karena itu kemudian Masyumi dibubarkan oleh Bung Karno. Sekarang dengan bermunculannya partai-partai Islam tetap tidak ada masalah dengan demokrasi. Mugkin saja ada partai yang antidemokrasi, tetapi untuk kondisi masyarakat Indonesia yang sangat plural, dukungan terhadapnya tidaklah signifikan. Dengan belajar

pada pengalaman demokrasi negara ini, partai baru yang berasaskan agama hanya mempunyai kemungkinan naik secara demokratis paling besar mencapai sekitar 10%. Dia tentunya bisa mengatakan apa saja, tetapi tidak bisa sampai menentukan nasib negara. Dia harus mendapat dukungan lebih banyak.

Bagaimanapun partai-partai Islam juga memerlukan demokrasi. Meskipun bisa saja menghapus demokrasi jika didukung oleh 50%, apalagi kalau mencapai 60% masyarakat. Akan tetapi ini butuh waktu dan perjuangan yang sangat lama, karena kondisi faktual Indonesia jauh dari bayangan seperti itu. Kita bisa lihat kasus seperti itu hampir terjadi di Aljazair, di mana FIS memenangkan Pemilu dan seharusnya menjadi partai yang berkuasa, namun ada *coop* militer. Setelah itu terjadi bermacam gejolak yang sangat traumatis di mana demokrasi kondisinya amat sekarat. Semua itu didasarkan atas kekhawatiran bahwa FIS akan mengislamkan Aljazair. Namun demikian, kejelasan itu tidak pernah muncul karena FIS keburu di-*coop* oleh kekuatan militer sebelum memperoleh kesempatannya. Belajar dari itu, kejadian semacam ini merupakan sesuatu yang tidak akan cepat diulang kembali. Di Aljazair, kini, justru cenderung mulai terjadi stabilasasi.

Di Indonesia sendiri, secara politis, belum terlihat situasi yang mengarah pada proses politik yang tidak diharapkan sebagaimana terjadi di Aljazair. Bagaimanapun dari pemilihan-pemilihan umum yang bebas (pada tahun 1955, 1999, dan 2004) diakui sementara ini politik aliran masih amat kuat. Politik aliran berarti bahwa mereka yang pernah memilih partai sekular, entah mereka berdoa atau tidak, mereka tetap saja memilih partai sekular. Anda mungkin ingat bahwa di tahun 70-an, di Indonesia sebetulnya terjadi santrinisasi kaum abangan –sebagaimana Muslim Abdurrahman

pernah menulis itu– di mana kaum priyayi dan abangan yang tidak pernah berdoa dan melakukan ritual keagamaan lainnya, anak-anak mereka kemudian ternyata melakukan ritual doa, mengaji, dan lain sebagainya. Sehingga mereka menjadi Muslim yang taat atau semacamnya. Kendatipun demikian, partai Islam hanya mendapat kurang dari 40% suara.

Tidak hanya itu, menurut saya, mereka yang berangkat dari latar belakang Nahdlatul Ulama (NU) yang tradisional sulit, untuk tidak mengatakan tidak akan pernah, memilih partai yang berasal dari latar belakang modernis. Itu sebabnya pak Amien Rais tidak pernah berhasil menjadi presiden karena hanya dipilih oleh kaum modernis. Untuk menjadi pemimpin di Indonesia yang pertama-tama menentukan bukanlah kualitas. Sederhananya, Pak Amien itu jelas seorang modernis, sehingga tidak dipilih oleh orang NU dan tidak pula dipilih oleh orang-orang dari partai sekular. Karena sebuah partai yang berhaluan Islam modernis tentu akan mendapat pendukung dari kalangan modernis, bukan dari kalangan tradisionalis. *Entoh* begitu, seandainya semua kalangan modernis ikut memilih, setidaknya mereka tidak hanya memilih Partai Amanat Nasional (PAN). Sebagian dari mereka juga banyak yang memilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Dan kalaupun mereka bergabung tidak akan mencapai 20%. Kecuali kalau mereka, partai-

> Salah satu hakikat agama adalah ketaatan kepada Allah. Tidak mungkin beragama kalau tidak taat kepada Allah. Akan tetapi, seorang liberal akan berani mengatakan agar ia betul-betul taat kepada Allah, ia harus mempertanyakan apakah interpretasi hukum agamanya yang berasal dari manusia itu betul-betul sesuai dengan kehendak Allah, yang pada-Nya-lah orang tersebut harus taat.

partai Islam berkoalisi, barangkali bisa mendudukkan pemimpinnya sebagai presiden. Namun demikian, dengan kondisi Indonesia seperti sekarang ini, tetap saja akan sulit untuk membuat kebijakan di pemerintah menjadi satu arah kepentingan.

Pluralisme, di Indonesia, sering disalahartikan sebagai sinkretisme atau relativisme, sehingga banyak orang yang menentangnya. Bagaimana pendapat Anda sendiri tentang konsep pluralisme?

Kata pluralisme memang selalu memerlukan definisi. Bagi saya, pluralisme pertama-tama adalah kesetiaan menerima pluralitas dalam hal agama. Hal itu sama sekali tidak sama dengan sinkretisme ataupun juga relativisme agama. Jadi, seorang pluralis, yang hatinya sungguh pluralis, akan menerima bahwa di masyarakat terdapat umat beragama yang mempunyai keyakinanan betul-betul berbeda dari keyakinan yang dimilikinya dan keberadaannya harus diterima secara baik. Itu pluralisme yang saya anggap sangat penting.

Pluralisme itu justru tidak mengatakan semua agama sama saja. Kalau semua agama sama saja atau seragam, lantas di mana letak pluralitasnya. Menurut saya, jelas semua agama tidak sama. Misalnya, antara Islam dan Kristiani memang banyak kesamaan, tetapi jelas antara keduanya terdapat perbedaan yang hakiki yang harus kita terima. Pluralisme berarti mengakui kenyataan seperti itu dan sekaligus, misalnya saya sebagai orang Katolik, tidak akan mengatakan bahwa Islam, dalam semua hal, betul. Kalau sudah begitu saya sudah menjadi seorang Muslim. Oleh sebab itu, saya berpendapat bahwa orang Islam barangkali menghargai saya dan orang Kristen, tetapi mustahil kalau mereka (orang Islam) mengakui bahwa Yesus itu Putra Allah. Mereka juga tentu tidak akan

mengakui bahwa Yesus itu adalah kepenuhan wahyu ilahi, sehingga sesudah Yesus tidak ada wahyu lagi. Padahal bagi umat Islam wahyu terakhir yang definitif adalah al-Quran. Sehingga, seorang pluralis bisa menerima itu tanpa mengatakan bahwa kita semua benar. Pada akhirnya harus dikatakan dan diserahkan sepenuhnya: biarlah Allah sendiri yang mengetahui.

Pluralisme juga tidak sama dengan sinkretisme. Namun harus diperhatikan bahwa di Indonesia kadang-kadang sinkretisme dipakai untuk sesuatu yang sebetulnya bukan sinkretisme, melainkan merupakan penghayatan religius pelbagai aliran kepercayaan. Saya kira, baik Islam maupun Kristiani tidak bisa menerima itu. Tetapi sebagai seorang pluralis, saya menghargai bahwa mereka menghayati religiusitas dalam hati, di mana simbol-simbol dengan mudah diambil dari Hindu, Islam, Kristianitas, dan lain sebagainya. Namun demikian hal seperti itu, menurut saya, tetaplah menjadi sebuah penghayatan tersendiri yang saya hormati, meskipun berbeda dengan yang saya hayati sebagai orang Katolik.

Yang penting untuk diperhatikan di sini adalah bahwa oleh banyak orang –juga oleh beberapa teolog dengan latar belakang Kristiani– kata pluralisme terkadang dipakai untuk sesuatu yang seharusnya disebut relativisme. Pluralisme semacam itu saya tentang dengan keras. Penentangan semacam ini pernah saya lakukan ketika pluralisme model tersebut diajukan dalam konferensi internasional antaragama di Bali yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri. Waktu itu saya mengritik tajam seorang teolog Katolik, kalau tidak salah dari Washington, yang membawa persis pluralisme model itu. Dia mengatakan bahwa dalam konteks pluralisme agama-agama berada pada posisi yang paling gawat karena masing-masing mempunyai klaim kebenaran. Dalam

pluralisme, klaim semacam itu harus dilepaskan. Sebab, lantaran agama merupakan ungkapan religiusitas manusia, dengan begitu semua agama benar dan tidak ada yang lebih benar daripada agama lainnya. Maka tidak masuk akal mengatakan agamaku yang paling benar dan yang lain tidak; dan tentu saja tidak masuk akal juga mempunyai misi untuk berdakwah.

Kesimpulan dari seluruh pernyataan tersebut dianggap sebagai relativisme agama, yakni tidak ada kebenaran mutlak, yang sejatinya bukanlah yang dimaksudkan dengan gagasan pluralisme itu sendiri. Saya sebagai seorang Kristen percaya bahwa Yesus adalah jalan hidup dan kebenaran. Itu adalah ucapan Yesus bagi setiap orang. Saya juga yakin bahwa orang yang tidak dibaptis bisa masuk surga. Gereja Katolik mengatakan, setiap orang yang masuk surga karena diselamatkan oleh Yesus, dan Yesus akan menggembirakan bagi semua. Saya juga tahu, tentu saja, orang Islam tidak akan percaya demikian. Tetapi seorang relativis akan mengatakan bahwa ini semua harus dilepaskan. Yesus, Muhammad, Buddha, dan lainnya adalah seorang religius *personalities*, seorang yang sangat mendalam penghayatan religiusitasnya. Karena itu kitab suci mereka mengungkapkan sesuatu yang sangat bernilai. Lagi-lagi, saya menolak anggapan ini, karena tidak sependapat bahwa al-Quran adalah ungkapan religiusitas (pribadi) nabi Muhammad. Jelas itu tidak benar. Sebab al-Quran datang dari Allah. Dalam iman Islam itu hakiki. Umat Islam percaya nabi Muhammad menerima al-Quran dengan tidak mengubah dan tidak memberi bentuk apapun. Sama halnya dengan orang Kristen yang berkeyakinan bahwa Yesus itu datang dari Allah, bukan seorang manusia yang sangat mendalam penghayatan relegiusitasnya. Barangkali Budha juga seperti itu. Oleh Budhisme, Budha, tidak dianggap bersifat

ilahi, melainkan mungkin sebagai seorang spiritualis besar. Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi Islam, Kristen dan Yahudi.

Pandangan seperti di atas tadi harus ditolak. Jangan menyebut dirinya sebagai pluralis kalau menganggap bahwa semua agama merupakan ungkapan religiusitas yang sama. Sebab dengan anggapan tersebut maka pluralitas jadi hilang. Menurut saya, agama tidak perlu melepaskan klaim kebenaran. Yang saya kira penting adalah bahwa saya sebagai seorang Katolik, misalnya, mengakui bahwa agama yang tidak saya anut, Islam, Budhisme, Hinduisme juga mempunyai kebenaran masing-masing. Jadi, kalau saya menganggap mereka semua salah, itu adalah kampungan dan tidak memungkinkan bagi terwujudnya pluralisme yang positif.

Bagi saya, pluralisme pertama-tama adalah kesetiaan menerima pluralitas dalam hal agama. Hal itu sama sekali tidak sama dengan sinkretisme ataupun juga relativisme agama. Jadi, seorang pluralis yang hatinya sungguh pluralis, dia akan menerima bahwa di masyarakat ada umat beragama yang punya keyakinan yang betul-betul berbeda, yang tidak menjadi keyakinannya, tetapi keberadaannya hendaknya dia terima secara baik. Itu pluralisme yang saya anggap sangat penting.

Dalam Konsili Vatikan II, gereja Katolik akhirnya merumuskan bahwa orang Katolik harus menghormati umat agama lain, karena kepercayaan mereka terhadap Allah Yang Esa dan sebagainya. Jadi, bahwa kita tidak relativistis bukan berarti kita menyangkal bahwa ada kebenaran dalam agama-agama lain, tetapi kita memang tidak mengakui kepenuhan kebenaran agama lain. Bagi saya, pandangan seperti itu tidak masalah. Karena sejatinya memang ada perbedaan.

Apabila melihat realitas sehari-hari di Indonesia dan peluang-peluang pluralisme itu sendiri, tidak dipungkiri kalau paham trersebut meniscayakan suatu konflik dalam masyarakat. Terlebih jika setiap komunitas, iman, agama atau etnik tertentu menonjolkan the ultimate truth*–nya masing-masing, maka kemungkinan konfliknya sangat besar. Menurut Anda formulasi seperti apakah yang memampukan masyarakat merawat kemajemukan bangsa agar setiap umat beragama dapat hidup rukun berdampingan?*

Saya berpendapat bahwa klaim agama atas kebenaran sebaiknya tidak disebut *ultimate truth*. Sebab, *ultimate truth* betul-betul hanya pada Allah, dan hanya pada Allah kita melihatnya. Apabila saya percaya terhadap kebenaran agama saya, bukan berarti saya percaya bahwa dia memiliki *ultimate truth*. Karena mengenai agama, Kristianitas dalam kepercayaan Katolik sendiri selalu hanya sebagian dan coba-coba; selalu harus diperdalam dan sering dikoreksi, bahkan belajar dari agama lain. Sebab, Katolik tidak hanya banyak belajar dari Protestan, tetapi juga belajar dari Budhisme menganai hormat kepada nyawa. Soal itu dalam Budhisme lebih kuat dibanding dalam Kristianitas. Sementara dari Islam, Konsili sudah mengatakan bagaimana Islam menghormati Allah dalam keesaan-Nya dan Allah sebagai Maha Pengasih, hal itu juga memberikan sesuatu kepada kami. Jadi jangan karena Allah adalah *ultimate truth*, lantas agama juga mengklaim memilikinya. Pendapat dalam setiap agama seharusnya dilihat dari dua sudut, pendapat dari Allah dan pendapat dari manusia. Kami orang Kristiani meyakini bahwa di dalam pribadi Yesus kebenaran Allah terungkap. Tetapi kami tidak pernah dapat menangkap seluruh pribadi Yesus yang sesungguhnya, seluruh ajaran yang sebenarnya. Keterbatasan

ini mudah sekali kita baca. Apabila kita melihat sejarahnya, maka jalan Kristiani seringkali zig-zag dan sejarah gereja sendiri banyak memiliki hal yang salah, buruk –meski baru disadari dan diakui belakangan– yang dahulunya dianggap betul.

Harus digaris bawahi juga bahwa *ultimate truth* sebenarnya merupakan istilah yang berasal dari filsafat yang memang berlebihan. Saya khawatir andaikata setiap agama merasa memiliki *ultimate truth* pada saat yang sama akan mengira memiliki *ultimate truth* tentang apa saja. Tidak saja tentang agama, tetapi juga tentang negara, tentang keluarga, tentang bagaimana bermain sepakbola, dan lain sebagainya. Kalau seperti ini maka akan berbahaya sekali. Dalam arti ini saya tidak percaya bahwa agama saya atau agama manapun mempunyai dan bahkan harus mempunyai *ultimate truth*. Karena *the ultimate truth* sendiri adalah mutlak milik Allah. Artinya, jangan pernah sampai melupakan perbedaan antara Allah dan agama. Sebab agama itu selalu kita reduksikan pada kemampuan kita sendiri. Oleh karena itu, tak aneh kalau sering terdapat kemiripan antara satu agama dengan lainnya. Dari sini, agama memerlukan proses dialektis terus menerus, memerlukan kritik agar tidak membeku dalam sebuah

> Dalam dimensi agama, kata liberal pada umumnya berarti orang yang berani mempertanyakan dan mengritisi doktrin-doktrin teologi. Dengan pengertian lain dia bukan orang yang menerima begitu saja apa yang dibawa oleh agama. Sebab, apabila seseorang sudah berkeyakinan bahwa kalaupun keberagamaannya dipaksakan atas kehendak Tuhan, dan tetap menganggapnya sebagai sesuatu yang baik dan benar, maka itu sudah merupakan kontradiksi.

interpretasi kepicikan manusia yang akhirnya malah menyangkal isi agama itu sendiri.

Jika the ultimate truth *dari agama sama sekali tidak memadai, lantaran menyebabkan dan mendororng munculnya klaim-klaim dari setiap agama yang tidak produktif bagi kebersaman, apakah berarti Anda cukup dengan menganggap nilai-nilai yang ada dalam agama bersifat universal?*

Ya, saya malah berpendapat bahwa antaragama perlu memiliki nilai-nilai universal atau nilai-nilai bersama. Kalau iman dan akidah masing-masing agama berbeda, kita tetap bisa hidup bersama dengan baik. Tetapi kalau nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, kebaikan, persaudaraan, belas kasih, tanggung jawab, perihal kemanusiaan yang adil dan beradab berbeda, maka kita tidak bisa hidup bersama. Kalau yang saya anggap jujur itu Anda anggap penipuan, bagaimana kita bisa hidup bersama. Di situ kita perlu nilai-nilai bersama dan itu harus bisa kita gali dalam komunikasi.

Untuk itu baik agama wahyu maupun agama-agama lainnya perlu, secara institusional melaui para pemimpin masing-masing, untuk selalu rendah hati. Dengan demikian para agamawan harus rendah hati secara hakiki karena dia harus sadar bahwa pendapat dia selalu tidak memadai bila dibandingkan dengan Allah. Jadi dalam hal apapun hendaknya rendah hati. Bahkan dalam keputusan untuk mengutuk suatu ajaran sesat atau tidak hendaknya tetap rendah hati, jangan pernah berlebihan. Sebab dalam sejarahnya, banyak sekali dosa agama ketika melawan ajaran-ajaran yang dianggap sesat, termasuk dalam agama saya. Menurut saya, banyak sekali sikap Katolik yang tidak rendah hati dalam menyikapi per-

soalan tersebut, dan itu salah. Agamawan akan lebih meyakinkan, bahkan akan dapat meyakinkan orang yang tidak beragama kalau dia bersikap rendah hati. Sebab tidak sedikit dan para agamawan pun mengetahui bahwa kelakuan orang beragama malah menggelapkan cahaya agama daripada mencerahkannya.

Dalam Konsili Vatikan II, Gereja Katolik akhirnya merumuskan bahwa orang Katolik harus menghormati umat agama lain, karena kepercayaan mereka terhadap Allah Yang Esa dan sebagainya. Jadi, bahwa kita tidak relativistis bukan berarti kita menyangkal bahwa ada kebenaran dalam agama-agama lain, tetapi kita memang tidak mengakui kepenuhan kebenaran agama lain. Bagi saya, pandangan seperti itu tidak masalah. Karena sejatinya memang ada perbedaan.

Tetapi klaim universal nilai agama seringkali dimanfaatkan oleh sekelompok orang. Misalnya nyata terjadi bahwa di dalam Islam kebenaran nilai-nilainya mutlak bersifat universal atau sering dipaksakan bahwa seluruh nilai Islam diklaim sebagai raḫmatan li al-'âlamîn *(rahmat bagi semesta alam). Dari sini muncul persoalan manakala pemahaman mereka yang konservatif atas keuniversalan nilai-nilai agamanya menjadi dorongan untuk menafikan kebenaran nilai-nilai dari agama lainnya. Hal inilah yang sering disebut sebagai universalime monis (monisme) yang rentan menimbulkan konflik antar-agama. Padahal seharusnya universalitas jangan digiring ke dalam konsep yang monis. Apa pendapat Anda tentang hal ini?*

Dalam pandangan saya, universal membutuhkan pengertian bersama mengenai nilai-nilai substansial. Anggapan bahwa agamaku yang paling benar dan senantiasa bersifat universal, itu bukanlah

sebuah nilai. Itu adalah keyakinan dan itu boleh saja. Tetapi nilai adalah apa yang betul-betul kita hayati sebagai baik. Sehingga, di situlah hal-hal seperti keadilan, kejujuran, persaudaraan, *fairness*, belas kasih, ketidakkekerasan, dan kesediaan untuk memaafkan, merupakan sikap-sikap yang menentukan kualitas seseorang. Itu bisa dimiliki oleh orang dengan keyakinan agama apa pun. Kalau kita secara bersama-sama mempunyai nilai-nilai ini, maka perbedaan keyakinan mengenai agama yang benar, sama sekali tidak akan mengganggu. Apalagi kalau kita rendah hati. Kalau saya meyakini betul dengan kebenaran agama saya, maka saya akan meyakininya dengan rendah hati dan tidak dengan semacam rasa superior.

Ada satu alasan kenapa sikap-sikap seperti rendah hati terhadap keyakinan sendiri, toleransi, dan membuka ruang dialog dengan lainnya, oleh kalangan dalam agama tertentu justru harus dihindari. Sebab keyakinan seseorang terhadap agama atau terhadap nilai tertentu (akidah) dalam agamanya dapat berkurang karena bersentuhan dengan nilai-nilai (agama) yang lain. Menurut keyakinan kekristenan Anda, sejauh mana keyakinan Anda akan terancam ketika bersentuhan dengan keyakinan lainnya?

Menurut saya, iman saya tidak terancam sama sekali oleh nilai-nilai yang tadi saya sebutkan. Justru nilai-nilai itu sangat cocok dengan iman saya. Tetapi iman saya bisa saja terancam, di satu pihak, oleh keyakinan lain, sehingga lama-kelamaan saya menjadi tidak mempercayai dan berpindah agama atau menjadi ateis. Kemungkinan seperti itu memang ada. Tetapi yang lebih sering mengalami "penguapan" agama adalah orang yang begitu hanyut, di satu pihak, oleh pekerjaan profesionalnya, dan di lain pihak oleh

konsumerisme. Jadi kemungkinan semacam itu justru bukan dari sesuatu yang formal, di mana akhirnya agama tidak lagi dipraktikkan, tidak lagi diingat. Ada orang Kristen yang hanya empat kali ke gereja: tiga kali ketika hidup dan satu lagi setelah mati. Pertama, ketika ia dibaptis, lalu komuni pertama, ketiga, ketika menikah, dan terakhir ketika di dalam peti mayat. Hal yang seperti itu banyak terjadi dalam Kristen. Memang bahaya seperti itu ada. Tetapi, mungkinkah persentuhan dengan agama lain akan menjadi suatu ancaman iman, kita tidak tahu persis. Menurut saya, justru kalau nilai-nilai substansial itu kita miliki maka kita tidak perlu terlalu khawatir. Kita memang memiliki banyak persamaan. Saya begitu banyak mempunyai teman Muslim di mana jelas memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang sama meskipun secara ritual doanya berbeda.

Anda sempat menyinggung tentang fairness*. Beberapa pemikir ada yang menghubungkan keterkaitan antara gagasan pluralisme dengan liberalisme, di antaranya berkesimpulan bahwa kedua gagasan tersebut selalu sepadan dan tidak harus dipertentangkan. Misalnya Isaiah Berlin dan John Rawls. Jika disederhanakan, konsep Rawls tentang* fairness *pada dasarnya adalah sebuah upaya pemihakan terhadap minoritas. Apakah idealnya semacam itu?*

Persoalannya mayoritas tidak membutuhkan *fairness*. Posisi semacam ini dalam konsepsi HAM memang selalu berpihak kepada yang lemah. Yang kuat tidak memerlukan pemihakan karena dia sudah mempunyai segala-galanya. Tetapi pihak-pihak yang suka dilupakan, disingkirkan, dan lain sebagainya adalah minoritas atau yang secara sosial-politis lemah. Tidak harus minoritas, sebab da-

lam politik bisa juga kalangan elit yang sedikit namun bisa menentukan semuanya. Contoh lainnya, yang minoritas (elit politik) dalam kekuatan membuat undang-undang berkaitan dengan pembagian produk nasional justru acap kali terjadi dengan cara yang tidak fair. Semua masuk ke kantong elit, sementara rakyat selalu mendapat sedikit. Atau kasus lain seperti kalau orang besar melakukan korupsi hukumannya ringan, tetapi kalau orang kecil yang melakukan hukumannya menjadi lebih berat. Jadi, *fairness* dari semua nilai sebenarnya melindungi yang lemah. Harus diingat pula, bahwa perlindungan terhadap yang lemah adalah salah satu ciri kemanusiaan yang paling dini, yang membedakan manusia dari binatang. Kita tahu bahwa manusia seratus ribu tahun yang lalu sudah memelihara orang sakit dan itu tidak terjadi pada binatang, sebab binatang yang sakit terkadang ditinggalkan dan dibiarkan mati, dibiarkan menjadi mangsa binatang lain. Tetapi dari fosil-fosil yang ada, kita mengetahui bahwa orang yang sakit itu masih dipertahankan dan itu sudah terjadi dan dilakukan seratus ribu tahun yang lalu.

Kalau begitu kondisi kita sekarang ini sebenarnya jauh lebih primitif. Karena kita sering membiarkan nasib pihak-pihak yang lemah. Dengan pengertian lain, perhatian kepada yang lemah merupakan salah satu tanda kemanusiaan yang paling penting. Celakanya lagi, hal ini terancam karena ada kebencian-kebencian komunal yang terjadi tidak saja antar dan intra-agama, tetapi katakan saja kebencian luas di masyarakat terhadap orang Yahudi yang bertahan berabad-abad lamanya dan menghasilkan diskriminasi. Diskriminasi merupakan lawan dari *fairness*. Karena itu mereka (orang-orang Yahudi) di dunia ini kerap diperlakukan secara tidak fair, dan jelas didiskriminasikan. Hal demikian *notabene* terjadi di Barat yang

lebih mengerikan daripada di dunia Islam. Masalah Islam dengan Yahudi terjadi lebih karena setelah adanya masalah dengan Israel. Meski ini tetap merupakan masalah yang harus diatasi. *Fairness* harus diberlakukan termasuk bagi orang Yahudi dan bagi kelompok-kelompok minoritas lainnya. Di Jerman, misalnya, ada kelompok-kelompok kecil yang berbahasa Slavia di mana mereka harus diberi kemungkinan ruang agar budaya mereka tidak terlindas oleh budaya Jerman. *Fairness* memang selalu bagi yang lebih lemah.

Apa harapan Romo terhadap Bangsa ini ke depan?

Sudah menjadi kebutuhan yang jelas bahwa Indonesia harus tetap menjadi negara sekular. Namun demikian, sekular di sini dalam arti menjadi negara yang berketuhanan dengan tidak adanya campur tangan negara dalam urusan agama warganya. Meskipun begitu negara harus tetap menunjang dan mendukung keagamaan. Artinya, negara tidak harus netral, misalnya, terhadap ateisme. Indonesia harus pluralistik karena Indonesia sangat plural. Maka

Universalisme membutuhkan pengertian bersama mengenai nilai-nilai substansial. Anggapan bahwa agamaku yang paling benar dan senantiasa bersifat universal, itu bukanlah sebuah nilai. Itu adalah keyakinan dan itu boleh saja. Tetapi nilai adalah apa yang betul-betul kita hayati sebagai baik. Sehingga, di situlah hal-hal seperti keadilan, kejujuran, persaudaraan, *fairness*, belas kasih, ketidakkekerasan, dan kesediaan untuk memaafkan, merupakan sikap-sikap yang menentukan kualitas seseorang. Itu bisa dimiliki oleh orang dengan keyakinan agama apa pun. Kalau kita secara bersama-sama mempunyai nilai-nilai ini, maka perbedaan keyakinan mengenai agama yang benar, sama sekali tidak akan mengganggu.

apabila Indonesia tidak ditata secara inklusif, semua akan lebih merasa di rumah masing-masing, tanpa ada kepedulian terhadap yang lainnya. Jika demikian kondisinya, maka Indonesia akan segera berakhir dalam kekerasan.

Sementara liberalisme, dalam arti kebebasan politik dan keterbukaan agama, perlu diterapkan dan dunia pun sudah sangat menyadari pentingnya gagasan dan sistem tersebut. Liberalisme yang dimaksud bukan liberalisme yang sering disalahartikan sebagai sikap seenaknya, setiap orang bebas melakukan apa yang dikehendakinya.

Wawancara dilakukan di Jakarta, Oktober 2006

Percakapan dengan

Fuad Jabali

Fuad Jabali, pengajar Pascasarjana UIN Jakarta dan editor jurnal *Studia Islamika.* Dewan Penasihat PPIM UIN Jakarta ini meraih gelar MA bidang *Islamic Societies and Cultures* dari *School of Oriental and African Studies (SOAS)*, University of London (1992) dan gelar PhD bidang Kajian Islam dari *Institute of Islamic Studies*, McGill University (1999)

Pancasila merupakan kesepakatan yang islami, demikianpun keputusan menerima demokrasi sebagai sistem pemerintahan Indonesia. Adalah tidak adil, dari sudut keagamaan sekalipun, mengadopsi dan melembagakan sistem nilai agama tertentu ke dalam komunitas publik yang sangat beragam. Untuk itu, pada level sosial harus selalu ada ruang relatif, tempat semua orang bertemu dan berdialog. Dengan sekularisasi semua nilai agama memperoleh akses ke wilayah publik melalui negosiasi sehingga melahirkan sistem nilai agama yang dewasa. Inilah mekanisme demokrasi yang melibatkan partisipasi publik lebih besar, yang dalam konteks Indonesia yang demikian plural tidak akan pernah mengizinkan berdirinya negara Islam. Faktanya, penerapan syariat Islam di daerah-daerah bukan cerminan dari keinginan masyarakat, tetapi lebih kepentingan politik yang pragmatis.

Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan sekularisme?

Saya melihat sekularisasi sebagai usaha pembebasan wilayah publik, terutama negara, ekonomi, dan pendidikan, dari agama. Sebaliknya, islamisasi adalah usaha memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam negara, ekonomi, dan pendidikan. Maka kita mendengar istilah negara Islam, ekonomi Islam, bank Islam, dan pendidikan Islam. Islamisasi ilmu dan ekonomi sudah banyak dilakukan, sementara islamisasi negara banyak menuai kontroversi.

Pertama-tama, harus ditegaskan bahwa nilai-nilai agama tidak bisa dibersihkan dari wilayah publik. Sebab, tidak mungkin orang hidup di wilayah publik tanpa membawa sistem nilai yang ada di dalam dirinya. Namun, walaupun wilayah publik tidak mungkin bisa bersih dari sistem nilai agama, melembagakan sistem nilai agama tertentu di wilayah publik dan menuntut agar sistem nilai agama yang terlembagakan tersebut diadopsi oleh komunitas publik yang sangat beragam, dari sisi agama hal seperti itu tidaklah adil. Bagaimanapun, saya tidak setuju sekularisasi dalam arti formalisasi atau pelembagaan sistem nilai di wilayah publik melalui paksaan.

Banyak yang mengatakan bahwa sekularisasi pada akhirnya akan meminggirkan agama dari kehidupan publik, sehingga agama semakin berada di pojok-pojok kehidupan. Bagaimana menurut Anda?

Itu tidak akan terjadi. Fomalisasi nilai-nilai agama justru akan melahirkan hegemoni dan memojokkan kelompok-kelompok yang berbeda dengan hanya sistem nilai kelompok tertentu yang diformalkan. Ketika tidak ada formalisasi sistem nilai agama tertentu maka setiap orang punya akses yang sama di wilayah publik, dan

yang terjadi adalah negosiasi antarsistem nilai. Dengan demikian ruang publik menjadi milik semua orang, tidak diklaim oleh suatu agama atau sebuah kelompok dalam suatu agama tertentu. Seseorang atau sekelompok orang yang mau membawa sistem nilai tertentu ke wilayah publik harus melakukan negosiasi secara terus-menerus dengan kelompok lain, sehingga yang akan terjadi, menurut saya, adalah proses pendewasaan beragama.

Tetapi tidak baik juga atas nama sekularisasi, lantas agama dipojokkan. Ketika agama dipojokkan justru akan melahirkan sistem keagamaan yang kerdil. Di negara yang berpenduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia sangat tidak mungkin menghilangkan sistem nilai Islam dari wilayah publik. Kalau Islam, misalnya, dipojokkan terus-menerus maka yang akan lahir adalah Islam yang terpojok, Islam yang tidak pernah punya akses ke publik, Islam yang tidak punya kemampuan bernegosiasi dengan agama lain, Islam yang berwajah radikal. Orang Islam yang imannya dibesarkan dalam kesempitan sangat berpotensi melakukan kekerasan, ketika kesempitan iman – yang diyakini benar itu – diterapkan di ruang publik.

Sekularisasi seyogyanya dipahami sebagai media untuk membiarkan semua sistem nilai agama memperoleh akses ke wilayah publik untuk melahirkan sistem nilai agama yang dewasa. Coba lihat perjalanan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kalau saja mereka kampanye dengan Islam yang eksklusif, bisa dipastikan mereka tidak akan pernah bisa diterima publik dengan baik. Bagaimanapun tanpa legitimasi publik sebuah partai tidak akan berkembang. Mereka harus mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan dialogis dan mengarah pada deformalisasi dan universalisasi. Sistem nilai yang harus dikembangkan di wilayah publik adalah sistem nilai yang diakui bersama oleh publik. Jadi tidak eksklusif.

Lagi-lagi, saya menolak formalisasi nilai-nilai agama di wilayah publik dengan pemaksaan. Tetapi ketika dilakukan secara terbuka, dengan membiarkan semua orang terlibat dan berpendapat, menurut saya, sebagai sebuah kemungkinan, silakan saja. Termasuk membawa ide mewujudkan negara Islam ke dalam perdebatan publik. Tetapi orang-orang yang membawa ide negara Islam pun harus memahami bahwa ada juga kelompok masyarakat yang anti terhadap ide negara Islam tersebut.

Jadi, harus ada ruang yang sama, yang terbuka, termasuk di dalam pikiran kita. Apakah mungkin mendirikan negara Islam? Mengapa tidak? Tapi itu tergantung pada semua orang. Walaupun, saya yakin, dalam realitasnya tidak mungkin terjadi. Karena proses negosiasi lama-kelamaan akan menghilangkan gagasan akan kemungkinan berdirinya negara Islam.

Walaupun wilayah publik tidak mungkin bisa bersih dari sistem nilai agama, melembagakan sistem nilai agama tertentu di wilayah publik dan menuntut agar sistem nilai agama yang terlembagakan tersebut diadopsi oleh komunitas publik yang sangat beragam, dari sisi agama hal seperti itu tidaklah adil.

Itulah yang bagus dari demokrasi. Demokrasi mampu menjadi penawar radikalisme, apapun bentuknya – entah itu radikalisme agama, budaya, ataupun sosial. Lewat demokrasi hal semacam itu menjadi tawar, karena ia harus melalui uji coba ke wilayah publik. Sebab, mereka harus mendapat legitimasi. Oleh karena itu, mereka harus melakukan dialog dan kompromi. Jadi, ketika saya mengatakan bahwa gagasan negara Islam itu mungkin – bukan sesuatu yang mustahil – memang hanya dalam tataran teori (demokrasi), sementara pada realitasnya akan sangat sulit terjadi.

Ada kekhawatiran dari sebagian orang bahwa sekularisme atau sekularisasi akan mengikis iman pemeluk agama. Apakah menurut Anda seperti itu?

Menurut saya tidak. Keimanan bukan sesuatu yang mati. Keimanan adalah sesuatu yang terus tumbuh dan meningkat. Namun hal ini hanya mungkin kalau ada ruang bagi pertumbuhannya. Untuk itu, ruang tersebut seharusnya tidak dimonopoli oleh sistem nilai kelompok tertentu. Bagaimana mungkin iman akan dewasa dan kuat kalau hanya bertemu dengan orang yang seiman? Syi'ah bertemu Syi'ah, Sunni bertemu Sunni, mazhab Syafii bertemu Syafii, Islam bertemu Islam, Kristen bertemu Kristen dan seterusnya. Jika ruang iman sekadar demikian, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau Syi'ah bertemu Sunni, Syafii bertemu Hambali, *Ahl al-Hadîts* bertemu Mu'tazilah di wilayah publik, menurut saya, akan terjadi perdebatan dan akan mengakibatkan tumbuhnya kedewasaan.

Kalau ruang publik hanya dibuka untuk kelompok yang sama, kemungkinan yang terjadi adalah pengecilan makna agama. Karena mereka berbicara terus di ruangnya sendiri, tidak ada dialog. Sehingga, tidak ada penguatan iman dan tidak ada pengayaan. Padahal, dengan kemajuan teknologi seperti saat ini, siapa yang mampu menahan informasi dari kelompok-kelompok lain, bahkan dengan gagasan dan paham yang berbeda dan berlawanan sekalipun, untuk masuk ke wilayah kita. Justru kalau pembatasan atau pengkotak-kotakan ini dipertahankan, kita akan menjadi orang yang sangat galak, dengan ketertutupannya, karena kita harus menjaga sistem nilai kita dalam wilayah publik yang – dengan bantuan teknologi – bagaimanapun sangat terbuka. Dan ini akan menjadi sangat tidak produktif bagi tumbuhnya keimanan.

Apakah yang Anda maksud dengan formalisasi nilai agama di ruang publik melalui dialog yang terbuka sepadan dengan konsep public religion?

Menurut saya begini, aturan dalam bentuk apapun kalau dibuat secara terbuka dengan melibatkan semua sistem yang ada, pada ujungnya harus kita taati, apapun bentuknya. Kalau kita menggunakan logika secara lurus, katakanlah, kalau hukum rajam masuk ke dalam wilayah publik dan menjadi bagian dari konstitusi kita, dan proses masuknya melalui diskusi dan dialog yang panjang dengan melibatkan segenap elemen masyarakat yang berbeda-beda, maka kita harus terima juga, sebagaimana juga hukuman mati di beberapa negara yang masih diterima.

> Sekularisasi seyogyanya dipahami sebagai media untuk membiarkan semua sistem nilai agama memperoleh akses ke wilayah publik untuk melahirkan sistem nilai agama yang dewasa.

Jadi dari mana asal-muasal nilai itu, menurut saya, tidak relevan. Entah itu dari individu, kelompok, baik kecil atau besar, bagi saya tidak terlalu relevan. Begitu disepakati, kita harus terima.

Tadi Anda menyinggung tentang negara Islam. Menurut Anda, apakah Islam memiliki blue print *konsep negara yang berbeda sama sekali dengan konsep-konsep lain?*

Menurut saya tidak ada. Coba lihat setelah Nabi wafat, masyarakat Muslim terlibat konflik yang melibatkan tokoh-tokoh besar seperi Ali, menantu Nabi, Aisyah, istri Nabi, dan Muawiyah.

Waktu terjadi konflik antara Muawiyah dengan Ali, umat Muslim di Basrah dan Kufah menganggap itu sebagai permasalahan orang-orang Madinah. Jadi mereka tidak mengganggap diri mereka sebagai bagian dari kelompok yang bisa mengambil keputusan. Padahal mereka sama-sama Muslim, dan sama-sama dikenai akibat oleh konflik itu. Apakah itu islami?

Ketika Nabi masih hidup, Madinah menjadi pusat kekuasaan agama dan politik. Namun setelah Nabi *mangkat*, otoritas tunggal tidak ada. Mungkin kita bisa mengatakan bahwa para Sahabat menggantikan posisi Nabi. Akan tetapi masing-masing Sahabat yang menjadi khalifah pada kenyataannya mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dan tidak semuanya dikelilingi oleh Sahabat yang memiliki otoritas.

Abu Bakar, misalnya, mengirim orang-orang Madinah ke medan perang untuk menghadapi orang-orang Romawi dan Persia. Yang terjadi kemudian adalah Madinah kekurangan tokoh yang cukup terpandang dan mempunyai otoritas. Berbeda dengan Abu Bakar, Umar menahan para Sahabat "besar" untuk tidak maju ke medan perang dengan pertimbangan dia butuh teman diskusi. Khalifah selanjutnya, Utsman, tidak membuat kebijakan seperti Umar, sehingga ia justru dikelilingi oleh orang-orang yang tidak terpandang dan tidak memiliki otoritas. Hal ini kemudian menyulut konflik yang akhirnya membuat Utsman terbunuh.

Ketika Ali naik tahta, di Madinah sebenarnya sudah tidak ada figur terpandang yang bisa diandalkan. Oleh karena itu, Ali memutuskan memindah pusat kekuasaan ke Kufah, karena di sana tokoh-tokoh tua dari Madinah bermukim. Setelah berperang mereka memutuskan tidak kembali ke Madinah dan tinggal di Kufah. Sekarang yang didengar dan punya otoritas adalah orang-orang di luar Ma-

dinah. Sangat berbeda bukan? Hanya satu periode dari empat Khalifah saja sudah ada perbedaan, bagaimana politik dan agama harus dikelola. Demikian juga yang terjadi pada masa Muawiyah, Abasyiah, Mamluk, dan lain-lain. Masing-masing berbeda.

Jadi kalau merujuk pada masa Sahabat dan menganggap sistem pada waktu itu islami, pada level apakah itu disebut islami? Mereka punya integritas, kejujuran, dan keinginan berbakti pada orang banyak, tapi sistemnya berbeda-beda dari satu khalifah ke khalifah yang lain. Jadi, tidak ada sistem yang baku.

> Seseorang atau sekelompok orang yang mau membawa sistem nilai tertentu ke wilayah publik harus melakukan negosiasi secara terus-menerus dengan kelompok lain, sehingga yang akan terjadi, menurut saya, adalah proses pendewasaan beragama.

Artinya, apakah klaim sebagian orang bahwa sistem khilâfah Islâmiyah *tidak punya dasar sejarah benar belaka?*

Ada dasar sejarahnya, tetapi beragam. *Khilâfah Islâmiyah* yang dimaksud itu yang mana? *Khilâfah* banyak sekali. Pada masa *al-Khulafâ' al-Râsyidûn* sendiri ada empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sistem pemilihan mereka pun lain-lain. Di samping itu ada kekhalifahan Bani Umayyah, Abasyiah, Utsmaniyah, dan lain-lain. Jadi ketika mengatakan Khilâfah Islamiyah, yang dimaksud dengan *khilâfah* yang mana? Katakanlah *al-Khulafâ' al-Râsyidûn*, tapi yang mana?

Jadi, menurut saya, klaim tersebut tidak relevan. Tapi kita juga tidak bisa *ujug-ujug* menolak ide mereka, apalagi menakutinya. Biarkan saja masuk ke wilayah publik. Biarkan mereka bertanya atau

ditanya dan berdialog. Ide apapun yang masuk ke wilayah publik jika tidak didukung dengan argumen yang baik akan mengecil dan ditinggalkan orang.

Saya tidak takut dengan klaim negara Islam, begitupun dengan klaim sekularisme. Jadi biarkan saja mereka ke tengah. Bahkan kelompok Negara Islam Indonesia (NII) atau Darul Islam (DI) biarkanlah mereka ke tengah, beri ruang. Mereka akan ditanya banyak orang dan mereka harus menjelaskan. Mereka akan berdialog, dan lama-lama kita akan semakin cerdas.

Apakah proses dialog di ruang publik mesti didorong oleh negara atau dibiarkan saja tumbuh secara alamiah tanpa campur tangan negara?

Menurut saya, biarkan ia berjalan normal, berjalan dengan terbuka. Bagi saya, tidak relevan jika negara turut masuk. Justru wilayah publik yang terbuka pada akhirnya akan mengontrol peran negara. Tapi kalaupun negara mau masuk, silakan! *Toh* negara juga harus melakukan negosiasi dengan rakyatnya. Jadi kita jangan terlalu takut bahwa negara akan berlaku semena-mena. Inilah keuntungan sistem demokrasi yang kita anut saat ini. Jadi terdapat wilayah publik yang akan menetralisir dan mengakomodasi seluruh kepentingan, baik kepentingan negara maupun individu. Siapa saja bisa masuk, asal jangan ada kekerasan atau pemaksaan. Bersikaplah dewasa, terbuka, bijak, dan dialogis – pada wilayah publik.

Apakah menurut Anda tidak tertutup kemungkinan masuknya kepentingan privat-individual, seperti kepentingan kelompok agama tertentu ke dalam ruang publik?

Biarkan semua orang dan kepentingannya hadir di wilayah publik. Ketika ada keinginan menghadirkan persoalan privat, hadirkan saja tanpa harus dibatasi oleh pembedaan antara privat dengan publik. Kita tidak bisa mengatakan bahwa karena ini persoalan privat maka tidak boleh masuk ke wilayah publik. Menurut saya, kalau seperti itu, malah kontraproduktif. Misalnya, persoalan jilbab yang dianggap persoalan privat, sehingga tidak boleh masuk ke wilayah publik. Menurut saya, masukkan saja ke wilayah publik, yang merupakan wilayah semua orang, untuk apa harus ada yang dijaga-jaga. Kalau kemudian ada yang menjaganya, ini pun harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dibuat oleh publik. Inilah, saya kira, yang dipandang sebagai ijmak atau konsensus, keputusan jamaah. Dan, jamaahnya setiap kali berbeda-beda, bukan? Setiap generasi memiliki jamaah yang berbeda, dan jamaah inilah yang harus berfungsi.

Dari penjelasan Anda, saya menangkap bahwa pemisahan publik-privat menjadi tidak relevan lagi. Apakah Anda memaknai sekularisasi tidak sebagai privatisasi agama melainkan deprivatisasi?

Ya, bisa disebut dengan deprivatisasi. Artinya yang privat ini harus dibiarkan masuk ke wilayah publik. Jadi, biarkan saja. Kemudian, publik yang akan menilainya.

Bukankah agama memiliki dua wajah yang paradoks: di satu sisi mengajak pada perdamaian, tapi di sisi lain, agama juga mempunyai potensi sebagai sumber kekerasan dan bersifat eksesif, karenanya agama harus dibatasi perannya di ruang publik. Pandangan Anda?

Apakah kalau agama dijaga dari ruang publik tidak akan melahirkan kekerasan? Justru sebaliknya akan melahirkan kekerasan ketika agama dijauhkan dari wilayah publik. Karena *by nature* agama, terutama Islam, punya klaim lebih besar di wilayah publik daripada di wilayah individu. Kalau, misalnya, wilayah publik yang demikian terbuka kemudian dipagari agar agama tidak masuk, dalam arti bahwa agama disimpan di rumah saja, dipenjarakan, lantas di mana mereka harus menjalankan aktivitas agama? Kalau orang dilarang membawa agama ke wilayah publik, itu akan membuat frustasi.

Coba Anda lihat, ada jarak yang luar biasa antara klaim Islam dan realitas hidup kita sebagai Muslim. Di Indonesia sekarang ada keinginan untuk menghidupkan segalanya serba menjadi Islam: bank Islam, negara Islam, islamisasi ilmu, semuanya ingin diislamisasi. Menurut hasil survei Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, tampak bahwa orang Islam semakin rajin beribadah, tapi kenapa Indonesia tetap disebut sebagai salah satu negara terkorup di dunia? Kekerasan masih banyak terjadi, kelompok-kelompok Islam saling bentrok, orang dijatuhkan dari kereta hanya karena uang seribu rupiah. Apa masalahnya?

Ini ironis. Sebagian Muslim berpikiran bahwa untuk memperbaikinya kita membutuhkan pegangan di ruang publik yang bersumber dari agama. Kalau mereka tidak boleh membawa Islam ke ruang publik, berarti Islamnya adalah Islam yang domestik dan kerdil. Padahal untuk melakukan islamisasi perlu Islam yang besar dan kaya. Sementara Islam yang sekarang muncul adalah Islam yang tumbuh dari kondisi yang banyak dipojokkan oleh prasangka. Jadi ketika tantangan zaman tidak bisa dibendung lagi dan segalanya menjadi terbuka, ternyata Islam yang merespons itu adalah Islam

yang kurang siap, Islam yang telah dikerdilkan dan dipojokkan. Inilah kemudian yang menjadi masalah. Yang tersisa dari mereka tinggal klaimnya saja, sementara pokok persoalannya tidak terjawab. Menurut saya, itu berbahaya, karena kita akan terperosok ke dalam sebuah realitas semu dan akan mengeroposkan bangunan bangsa kita juga.

Abdullahi Ahmed An-Naim mengatakan bahwa kita tidak bisa menyingkirkan agama dari kehidupan publik, tapi pada saat yang sama kita pun tidak bisa menerapkan syariah secara semena-mena di wilayah publik. Apa gagasan yang hendak Anda tawarkan demi menampilkan ajaran agama ke wilayah publik?

Ya, Islam yang ditawarkan adalah Islam yang telah didewasakan dan sudah tahu bagaimana cara bersentuhan dengan sistem budaya lain. Islam seperti ini mendesak untuk dibuat. Caranya, salah satunya, melalui pendidikan. Perguruan tinggi, madrasah, dan pesantren adalah sarana yang dapat dilakukan untuk mendewasakan Islam. Pun Islam yang seharusnya diajarkan adalah Islam yang sudah dewasa, bukan Islam anak-anak atau bukan Islam yang telah "mati", melainkan Islam yang tumbuh dan dinamis. Ketika anak didik lulus dari lembaga pendidikan tersebut dan mereka masuk ke wilayah

> Penerapan syariat Islam harus dilakukan melalui keterlibatan publik yang lebih besar. Saya yakin begitu publik terlibat tidak akan ada negara Islam. Dengan begitu, saya menegaskan sekali lagi bahwa perubahan sistem menjadi negara Islam hanya terjadi dengan revolusi atau dengan cara-cara yang otoriter. Kalau lewat mekanisme demokrasi, hal itu tidak mungkin.

publik, entah mereka jadi politisi, budayawan atau apapun, mereka tidak akan menghadapi kesulitan, karena Islam yang mereka bawa adalah Islam yang sudah dewasa, Islam yang kaya.

Saya kira penerapan syariat Islam memang tidak akan bisa dihindarkan. Hanya saja bentuknya adalah bentuk Islam yang dewasa. Kalaupun aturan Islam diadopsi oleh publik, itu adalah aturan Islam yang sudah mengalami pendewasaan. Karena prosesnya sudah dilakukan sedemikian rupa, karena memang Islam sudah lebih kuat. Urusan membesarkan Islam pun harus menjadi urusan publik, bukan hanya menjadi urusan pribadi atau kelompok masyarakat dan lembaga tertentu. Jika demikian, kita bisa berharap bahwa masyarakat Muslim dapat melahirkan jenis Islam yang lebih baik untuk publik. Jangan kemudian publik tidak peduli hanya karena alasan bahwa agama adalah persoalan privat. Jangan berharap akan lahir Islam yang dewasa jika publik tidak peduli.

Memang, tidak sedikit orang Barat, salah satunya Huntington, yang agak sinis ketika melihat bahwa negara-negara Islam tidak mampu menyerap nilai-nilai di luar Islam, kita sebut saja misalnya nilai demokrasi. Kalau Anda bertanya apakah ada optimisme bahwa Islam akan mencapai sebuah kedewasaan, menurut saya itu bisa dicapai. Memang harus melalui proses yang panjang, tetapi saya yakin bisa. Kemakmuran salah satunya. Ada survei yang menunjukkan bahwa semakin makmur sebuah negara maka semakin sekular. Sebaliknya semakin tidak makmur sebuah negara maka semakin religius. Jadi orang menjadi sekular atau tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan kemakmuran. Artinya, kalau kita ingin mencetak orang yang terbuka, kita juga harus memikirkan persoalan kesejahteraan mereka.

Apakah menurut Anda sistem yang dipakai saat ini sudah merupakan sistem terbaik untuk negara kita? Dan apakah negara kita sekular atau tidak?

Saya kira, sampai saat ini atau mungkin untuk jangka yang lama, sistem kenegaraan kita sudah baik, *the best among the worse*, terbaik di antara yang terburuk. Mungkin dalam bahasa al-Ghazali, terbaik di antara yang mungkin. Namun, saya tidak melihat bahwa demokrasi sebagai ujung dari dunia. Mungkin suatu saat kita akan memasuki tahapan lain. Sebagaimana dulu orang berpikir bahwa sistem kerajaan adalah sistem yang terbaik, ternyata sekarang berubah. Boleh jadi suatu saat nanti sistem kerajaan atau sistem yang baru akan dianggap paling baik. Saya tidak melihat bahwa demokrasi sebagai akhir dari perjalanan manusia. Tapi sekarang, saya masih melihat demokrasi sebagai sistem terbaik dibanding sistem kenegaraan lain.

> Pancasila merupakan kesepakatan yang islami. Demikianpun menerima demokrasi, menurut saya, keputusan islami. Karena ketika diadakan survei, misalnya, sekitar 70% responden Muslim menjawab bahwa demokrasi adalah sistem negara terbaik untuk Indonesia.

Apakah negara kita sekular atau tidak, saya kira tergantung dari sisi mana kita melihat. Bagi saya, sebagai seorang Muslim, apapun harus dilihat dalam konteks keislaman. Saya konservatif. Namun saya berpandangan, selalu ada hal-hal yang berbeda dengan kita, tetapi tetap harus diakomodasi oleh sistem keagamaan kita. Demokrasi bagian dari realitas yang tidak bisa dinafikan dan harus punya perspektif. Bagi saya, sesuai dengan kemampuan saya menilai saat ini, Indonesia adalah negara islami, bukan sekular.

Dari pernyataan itu apakah Anda ingin mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang islami?

Ya, menurut saya negara Indonesia islami, bukan sekular. Kalau saya mengatakan bahwa tidak islami, berarti saya mengatakan bahwa saya hidup seumur-umur di luar Islam. Saya menganggap bahwa yang ada di dunia ini, apapun itu, harus menjadi bagian dari keislaman saya. Saya punya dua pilihan: menolak bentuk negara Indonesia terus-terusan karena tidak islami, atau saya menganggap model keislaman saya adalah model keislaman yang mungkin dilakukan di mana saja sesuai dengan kemampuan saya.

Pancasila merupakan kesepakatan yang islami. Demikianpun menerima demokrasi, menurut saya, keputusan islami. Karena ketika diadakan survei, misalnya, sekitar 70% responden Muslim menjawab bahwa demokrasi adalah sistem negara terbaik untuk Indonesia. Tetapi ketika ditanya apakah negara Islam adalah konsep negara terbaik untuk Indonesia, juga sekitar 70% responden menyatakan ya. Ini menunjukkan bahwa seorang Muslim sekaligus juga seorang yang demokratis.

Jadi, untuk konteks Indonesia sekarang ini, untuk menjadi Muslim yang baik adalah menjadi seorang demokrat. Itu ijmak. Artinya, saya ingin mengatakan bahwa demokrasi adalah islami, dengan segala keterbatasannya – karena tidak ada sistem yang sempurna. Walaupun sistem demoraksi yang dipraktikkan di Indonesia saat ini adalah islami, saya meyakini suatu saat kita akan punya sistem yang lebih baik dari sistem demokrasi.

Berbicara demokrasi, tidak bisa dilepaskan dari liberalisme. Namun, kata liberalisme sendiri sering disalahpahami. Liberalisme, misalnya,

dianggap sebagai bentuk budaya permisif, bebas melakukan segala-galanya. Menurut Anda?

Menurut saya sangat tergantung pada apa yang dipahami masyarakat. Demokrasi macam apa yang dikehendaki bangsa ini akan sangat ditentukan oleh kita sebagai masyarakat. Sedemokratis negari Kanada, misalnya, konsep liberalisme masih diperdebatkan di sana. Apakah seorang gay dapat menikah atau tidak, masih jadi perdebatan. Di negara-negara yang menerima atau menolak perkawinan sejenis sama-sama menggunakan demokrasi sebagai instrumen untuk menolak atau menerimanya. Kalau kemudian dikatakan bahwa pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki adalah tindakan kebablasan, siapa yang bisa menentukan standar kebablasan atau tidaknya kalau bukan kita sendiri sebagai masyarakat?

Penerapan syariat Islam, terutama, tidak mencerminkan keinginan masyarakat, tetapi lebih banyak didorong oleh keinginan pragmatis. Misalnya, yang terjadi di Cianjur. Ada orang yang mencalonkan diri sebagai bupati kemudian menggunakan kendaraan atau memanfaatkan isu-isu syariah yang sebetulnya tidak mengakar dalam diri dan masyarakatnya.

Itu, sekali lagi, yang bagus dari sistem demokrasi. Demokrasi membiarkan seseorang untuk mengeluarkan isi kepalanya dan publik yang menilai, sehingga terjadi *equilibrium*. Kemudian dites lagi, misalnya, karena ada kelompok yang tidak puas, juga di wilayah publik, lalu diperdebatkan dan kemudian ada *equilibrium* lagi, terus seperti itu. Jadi kebablasan atau tidak akan tergantung kita.

Kalau saya, sebagai orang Muslim, menginginkan anak saya baik, oleh karenanya, saya harus didik anak saya dengan nilai yang saya anggap baik pula. Kalau semua orang melakukan kebaikan,

niscaya tidak akan terjadi demokrasi yang kebablasan. Adalah tidak *fair* ketika kita tidak mempersiapkan apa-apa untuk masyarakat, sementara kita menuntut demokrasi ini tidak kebablasan. Kalau tidak ingin kebablasan, berbuat *dong*! Tidak ada yang gratis di dunia ini. Perbaiki sistem pendidikan! Perbaiki sistem nilai agama!

Jadi, kita semua menanam. Hasilnya adalah demokrasi yang mendekati dengan apa yang kita cita-citakan. Kalau kita tidak melakukan itu, yang disalahkan jangan sistemnya, melainkan kita sendiri yang tidak mau melakukan apa-apa.

Artinya, Anda ingin mengatakan bahwa liberalisme tidak serta-merta negatif?

Ya. Secara prinsipil, demokrasi bisa liberal, juga bisa tidak. Tetapi kalau liberal, tetap saja menyaratkan orang lain untuk diberi kebebasan dalam mengemukakan yang diinginkan. Itu liberal.

Jadi, liberal adalah prasyarat untuk apa saja. Misalnya, saya ingin mabuk dan menampar orang lain, tetapi karena publik tidak menghendaki itu, maka saya tidak boleh melakukannya. Bagaimanapun, jika tidak ada liberalisme, maka tidak akan ada negosiasi.

Untuk konteks Indonesia, demokrasi masih pincang. Sebab, pada sisi partisipasi politik sudah bagus, tetapi pada aspek kebebasan sipil masih ada persoalan, seperti kebebasan beragama. Apakah hal seperti ini menunjukkan substansi demokrasi Indonesia yang belum matang dan terkonsolidasi?

Salah satu ide kenapa mata pelajaran *civic education* harus masuk ke dalam kurikulum perguruan tinggi dan pesantren adalah

karena demokrasi perlu konsolidasi. Demokrasi kita tidak akan terkonsolidasi dengan sendirinya, melainkan harus ada usaha yang panjang yang harus kita lakukan. Pada 1950-an ormas besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mendukung negara Islam. Sekarang keduanya menolak. Artinya, ada perubahan sikap. Dan, ini terjadi tidak secara gratis, tetapi perlu usaha. Dibanding 1950-an bangsa ini relatif lebih maju. Karena itu, kita tidak boleh mendevaluasi apa yang telah kita kerjakan. Justru yang harus kita lakukan adalah meningkatkan capaian ini.

Persoalannya, sekarang orang hanya mengetahui kata bebas, padahal di balik kata bebas sebetulnya banyak kata yang menyertainya, seperti tanggung jawab sosial, etika, dan sebagainya. Mungkin ini yang harus dimengerti oleh masyarakat kita. Ketika mereka bebas, mereka harus mengetahui bahwa orang lain pun punya kebebasan yang sama, yang dengan kebebasan itu memungkinkan mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

Di mana-mana ada *hudûd* atau batas dan kepatutan, baik secara kultural maupun sosial. Jadi, siapapun tidak bisa sembarangan memaknai kata bebas. Karena itu yang perlu diajarkan ke masyarakat: apa makna bebas sebenarnya.

Bagaimana dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan liberalisme?

Bagi saya fatwa itu salah; tetapi bagi MUI, benar. Kata bebas sebetulnya, seperti kata-kata lainnya, tidak hanya memiliki satu makna, melainkan banyak makna. Makna sebetulnya tidak melekat pada kata tersebut, ia diberikan oleh seseorang ataupun sistem tertentu. Jika diberikan, berarti makna tersebut akan sangat tergantung pada

siapa yang memberikan makna tersebut. Dan itu pun akan sangat tergantung kepada pengalaman, latar belakang, pendidikan, bacaan, teman bergaul, mimpi atau bahkan cita-cita orang yang memberi makna pada kata tersebut. Ketika saya menyebutkan pohon jambu, mungkin Anda yang mendengarnya akan biasa saja, tetapi ketika ada orang lain yang mendengarnya, dia langsung menangis, misalnya, karena dia mempunyai pengalaman putus dengan pacarnya di bawah pohon jambu. Kita tidak bisa menyalahkan orang tersebut karena menangis, tetapi yang kita lakukan adalah memahami dan menyelami kenapa dia menangis.

Begitupun ketika MUI memahami konsep liberalisme atau kata bebas itu sendiri. Kita tidak bisa *ujug-ujug* menyalahkan mereka, tapi yang harus kita lakukan adalah kenapa mereka memahami seperti itu. Mungkin anggota-anggota MUI mempunyai pengalaman yang buruk dengan kata liberalisme, sehingga mereka gerah ketika mendengar kata-kata itu. Begitupun seharusnya MUI berusaha memahami liberalisme yang dipahami berbeda oleh pendukung gagasan ini, dengan yang MUI pahami.

Persoalannya adalah ketika apa yang dipahami oleh MUI menjadi legitimasi dan pemicu kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Islam radikal.

Ini memang tidak bijak. Mungkin orang tidak pernah terpikir bahwa pada akhirnya ucapannya akan menimbulkan kekerasan. Begitupun dari pihak yang melakukan kekerasannya. Kenapa dalam benak anggota-anggota MUI tidak pernah terpikir bahwa fatwa itu akan memicu semangat kalangan radikal Islam untuk bertindak kekerasan.

MUI mungkin berpikir kurang panjang. Alangkah lebih baik kalau sebelum mengeluarkan fatwa, MUI bisa melihat akibat yang paling pahit dari fatwa yang mereka keluarkan, yakni munculnya tindak kekerasan. Untuk sekadar berasumsi, boleh jadi MUI punya komitmen terhadap kebebasan, sehingga mereka punya kebebasan untuk mengharamkan liberalisme. Untuk sebuah kebebasan kita menghargai itu. Mungkin MUI juga sedang meng-*excercise* kebebasannya. Katakanlah seperti itu. Tapi yang jadi persoalan adalah adanya kelompok yang menjadi korban kekerasan dengan fatwa itu.

Menurut saya agama dan keyakinan saya paling benar. Tapi bukan berarti saya bisa semena-mena memperlakukan orang di luar agama dan keyakinan saya sebagai orang-orang sesat.

Sejak reformasi, dalam bingkai kebijkakan otonomi daerah, banyak muncul perda-perda yang bernuansa syariat Islam. Kemunculan perda ini banyak mengeksklusi kelompok minoritas. Bagaimana pandangan Anda?

Dalam "bentuk" yang sekarang saya tidak setuju. Penerapan syariat Islam, terutama, tidak mencerminkan keinginan masyarakat, tetapi lebih banyak didorong oleh keinginan pragmatis. Misalnya, yang terjadi di Cianjur. Ada orang yang mencalonkan diri sebagai bupati kemudian menggunakan kendaraan atau memanfaatkan isu-isu syariah yang sebetulnya tidak mengakar dalam diri dan masyarakatnya.

Dalam "konteks" sekarang pun saya tidak setuju. Tetapi saya tidak sedang mengatakan bahwa ide itu harus sama sekali dimati-

kan. Hanya saja penerapan syariat Islam harus dilakukan melalui keterlibatan publik yang lebih besar. Saya yakin begitu publik terlibat tidak akan ada negara Islam. Dengan begitu, saya menegaskan sekali lagi bahwa perubahan sistem menjadi negara Islam hanya terjadi dengan revolusi atau dengan cara-cara yang otoriter. Kalau lewat mekanisme demokrasi, hal itu tidak mungkin.

Menanggapi munculnya perda-perda bernuansa syariat Islam yang oleh sebagian kalangan dinilai bertentangan dengan konstitusi, pemerintah dinilai tidak cukup tegas. Menurut Anda, apakah dengan kondisi seperti ini justru akan menghambat konsolidasi demokrasi?

Saya yakin pemerintah daerah punya pertimbangan lain. Tetapi kalau mereka mau melihat jauh ke depan, saya kira mereka harus berani memikirkan ulang apakah perda-perda bernuansa syariah itu baik untuk bangsa ini atau tidak.

Perda itu muncul karena demokrasi juga. Tetapi, sebenarnya, demokrasi yang belum matang. Apapun posisi kita, orang yang melakukan kampanye syariat Islam hendaknya dibiarkan saja selama tidak menggunakan kekerasan. Lakukanlah dengan dialog. Kalaupun ditekan mereka malah akan menjadi *underground* dan membahayakan. Dengan memberikan ruang terbuka, selain kita bisa berdialog, kita sekaligus bisa mengontrolnya.

Seperti sekularisme dan liberalisme, pluralisme juga sering disalahpahami. Pluralisme dianggap sebagai bentuk lain sinkretisme dan relativisme yang akan mengancam akidah umat beragama. Bagi Anda, apa itu pluralisme?

Pluralisme bukan sinkretisme. Saya meyakini bahwa agama saya yang terbaik, karena itu saya tetap Muslim, meski saya punya pilihan untuk menjadi bukan Muslim. Ketika saya di luar Indonesia, misalnya, saya punya banyak pilihan: bisa tidak salat ataupun tidak puasa. Karena siapa yang mau peduli? Kendati demikian saya tetap memilih salat dan puasa, karena menurut saya agama dan keyakinan saya paling benar. Tapi bukan berarti saya bisa semena-mena memperlakukan orang di luar agama dan keyakinan saya sebagai orang-orang sesat. Itu tidak bisa.

Bagi pemeluk Kristen justru agama mereka yang terbaik. Bisa saja kita yang Muslim mengganggap mereka yang Kristen sesat, namun di mata orang Kristen kitalah yang sesat. Kalau masing-masing pemeluk agama menggunakan keyakinannya untuk menghakimi orang lain, pasti pecah konflik. Untuk itu, setiap kali bertemu non-Muslim kita tidak boleh mengatakan bahwa mereka kafir dan akan masuk neraka. Mereka tentu saja akan tersinggung dan menyulut semangat keagamaannya. Jika sikap kita seperti itu, pasti dunia ini akan kacau-balau.

Islam adalah petunjuk hidup saya. Sebagai petunjuk, harus ada kepastian dalam iman saya. Namun di level sosial harus selalu ada ruang relatif, tempat di mana semua orang bertemu dan berdialog. Bagi saya itu pluralisme.

Tetapi harus ditekankan di sini, bukan lantas saya meragukan kebenaran iman saya. Kalau saya tidak meyakini benar apa yang saya yakini, saya akan menjadi orang bingung yang tidak memiliki pegangan. Islam adalah petunjuk hidup saya. Sebagai petunjuk, harus ada kepastian dalam iman saya. Namun di level sosial harus selalu ada ruang relatif, tempat di mana semua orang bertemu dan berdialog. Bagi saya itu pluralisme.

Kita tidak bisa mengatakan bahwa semua agama benar, baik pada level individu maupun pada level sosial. Karena berkeyakinan seperti itu sama artinya kita bisa berpindah-pindah iman setiap saat. Saya hari ini bisa sebagai Muslim, besok saya pindah ke Kristen atau Budha. Itu bukan pluralisme.

Terkait soal anggapan pluralisme sama dengan relativisme, menurut saya, logikanya seperti ini: agama tidak akan ada tanpa manusia. Kalau agama melibatkan manusia maka agama akan selalu mengandung relativisme. Begitu dibicarakan, agama berpindah dari wilayah Tuhan ke wilayah manusia. Tidak ada agama tanpa manusia. Kalau agama dipahami sebagai titik temu antara Tuhan dengan manusia, akal dengan wahyu, bumi dengan langit, maka agama akan menjadi relatif, termasuk Islam. Kita pun ingin menangkap agama yang paling benar, tetapi kebenaran macam itu hanya dalam diri Tuhan, dan tentu saja kita tidak akan mampu menjamahnya. Dengan demikian pemahaman masing-masing orang tentang agama akan selalu plural dan relatif, karena yang bisa kita lakukan adalah hanya mendekati yang paling benar.

Relatif dalam pengertian ketika kita berhadapan dengan sang Ultimate Truth *(Tuhan)?*

Benar. Karena itu, ketika dihadapkan pada *ultimate truth*, yaitu Tuhan, di sini tidak ada masalah. Tetapi ketika dihadapkan pada sesama manusia, berbagai persoalan muncul. Kalau saya merelatifkan iman saya, apa gunanya saya beriman. Dalam diri saya harus ada ketegasan yang hanya berlaku bagi saya sendiri. Tetapi ketika berhadapan dengan orang lain saya tidak boleh memaksa mereka

untuk berkeyakinan sama seperti saya. Memang rumit untuk mengatakan bahwa Islam saya adalah Islam yang paling benar, tetapi pada saat yang sama juga menyadari kerelativannya. Kalau kurang kuat, kita bisa menjadi orang yang terpecah.

Apakah dalam Islam ada konsep keselamatan bagi pemeluk agama lain, sebagaimana Katolik yang mengakui adanya keselamatan di luar gereja melalui Konsili Vatikan II?

Saya memahami Islam tidak tunggal. Ketika Anda mengatakan seperti itu, Islam siapa yang dimaksud, apakah Islam orang Mu'tazilah yang rasional, *ahl al-Hadîts* yang tradisional, atau Asy'ariyah yang berusaha memadukan keduanya? Orang Mu'tazilah tentu meyakini bahwa non-Muslim dapat masuk neraka atau surga, seperti halnya dengan Muslim, karena mereka telah dilengkapi dengan akal. Melalui akal itulah semestinya manusia bisa mencapai kebenaran yang mutlak, yaitu Tuhan. Sementara Asy'ariyah tidak meyakini seperti itu. Kebenaran hanya didasarkan pada wahyu, di luar wahyu orang tidak akan mendapat kebenaran. Jadi tergantung dari sudut pandang mana kita mendasarkan pemahaman.

> Begitu dibicarakan, agama berpindah dari wilayah Tuhan ke wilayah manusia. Tidak ada agama tanpa manusia. Kalau agama dipahami sebagai titik temu antara Tuhan dengan manusia, akal dengan wahyu, bumi dengan langit, maka agama akan menjadi relatif, termasuk Islam. Kita pun ingin menangkap agama yang paling benar, tetapi kebenaran macam itu hanya dalam diri Tuhan, dan tentu saja kita tidak akan mampu menjamahnya.

Pada masa Orde Baru kerukunan umat beragama dilakukan dengan membuat sekat-sekat yang kita kenal dengan konsep Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Konsep ini sebetulnya sangat rapuh, sehingga ketika Orba dengan segala kekuatan represifnya tumbang, konsep ini pun runtuh. Menurut Anda, bagiamana membangun kerukunan umat beragama berdasarkan keragamaan bangsa ini?

Menurut saya harus dimulai dari proses penyadaran yang *genuine* dari semua pemeluk agama. Dan itu bisa dicapai kalau ada ruang terbuka yang cukup dan jangan ada manipulasi. Kalau, misalnya, saya mengakui Yahudi sebagai sebuah realitas yang harus diterima, itu harus menjadi bagian dari kesadaran diri sendiri, bukan dikatakan oleh orang lain. Kesadaran itu harus ada dan tumbuh dalam diri sendiri, bukan atas himbauan atau paksaan. Tetapi kalau hanya dikatakan melalui mulut saja, seringkali di dalam hati masih ada ganjalan. Ganjalan ini sebetulnya bisa dikeluarkan dan diungkapkan kalau tidak ada rasa takut. Entah takut disalahkan, takut rumahnya dilempari batu atau ketakutan-ketakutan lainnya. Jadi biarkan warga bertanya apa adanya dan apa saja dan harus mampu dijawab secara cerdas di antara mereka pula.

Pertanyaan-pertanyaan yang muncul di antara mereka jangan ditekan. Pertanyaan-pertanyaan dan rasa ketidakpuasan yang dibungkam melahirkan keterpaksaan, sikap penuh kepalsuan.

Misalnya kita membiarkan muncul pertanyaan: Apakah mungkin Lia Aminuddin yang mengaku menerima kabar dari Jibril itu benar? Bukankah Nabi dulu juga awalnya mengaku begitu dan tetap pada pendiriannya, walaupun orang-orang kafir Quraisy mencemoohkannya? (Jangan-jangan kita seperti orang Kafir Quraisy itu! Orang yang menolak membuka mata dan hati kepada kebe-

naran kenabian!) Atau pertanyaan: Apakah mungkin Ahmadiyah itu benar? Jangan-jangan Kristen itu yang benar?

Biarkan saja pertanyaan itu muncul. Bukankah pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering muncul ketika kita berhadapan dengan komunitas agama lain dan kita harus menjawabnya sebaik mungkin?

Dengan adanya keterbukaan dan dialog, memungkinkan orang semakin sadar bahwa ternyata banyak persoalan yang sulit untuk dijawab. Di Indonesia, sejauh ini, belum terjadi yang seperti itu, di mana diberikan ruang terbuka bagi setiap umat beragama untuk berdialog.

Di UIN Jakarta, langkah ini sudah dilakukan, seperti dengan memberikan ruang dan perlakuan yang sama bagi setiap pemikiran, mazhab dan agama. Misalnya, ketika orang Sunni melihat atau menganalisis Syi'ah harus dilihat seobyektif mungkin: Sumber apa yang dipakai orang Sunni untuk memahami Syi'ah? Pendekatan dan metodologinya apa? Dan sebagainya.

Jadi, persoalannya bukan apakah hasil dari suatu pemahaman itu benar atau salah, tetapi lebih pada pemahaman Islam sebagai sebuah disiplin akademis. Sekalipun ada bias, sebisa mungkin menghindari bias tersebut. Kalau ada mahasiswa NU yang membahas Muhammadiyah, sebisa mungkin dia menghindari bias latar belakangnya.

Pendekatan ini bisa dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari di antara seluruh umat beragama. Dan memang sejauh ini belum berjalan dengan baik. Sehingga, harus terus dilakukan proses penyadaran dan pembelajaran.

Melihat kondisi Indonesia saat ini yang banyak diwarnai aksi kekerasaan, baik dalam bentuk sosial, politi, budaya maupun agama, menurut Anda, apakah masa depan demokrasi di negara ini akan menjadi lebih baik atau justru semakin menurun?

Kalau lembaga-lembaga pendidikan berfungsi dengan baik, ormas-ormas juga memperhatikan dan sekaligus ingin investasi untuk mengembangkan pendidikan, niscaya perjalanan bangsa ini akan cerah ke depannya. Kuncinya adalah pendidikan.

Supaya umat Muslim tidak mudah terprovokasi, mereka harus memiliki pemahaman yang baik tentang pluralisme, kebebasan, dan demokrasi; makna akan sebuah bangsa dan kehidupan dalam konteks global; makna menjadi seorang Muslim dalam masyarakat yang plural, dan seterusnya.

Pada konteks inilah saya memandang madrasah dan pesantren kemudian menjadi sangat strategis untuk masa depan bangsa ini. Karena sekularisme atau sekularisasi tidak akan bisa menghilangkan sistem nilai atau agama dari wilayah publik. Kecuali dihabisi dengan *genocide*, kemudian diganti dengan generasi baru. Kalau kita ingin menyelesaikan permasalahan di Indonesia, selesaikan persoalan Islam dan umatnya. Kalau bangsa ini ingin kuat, menurut saya, investasi yang paling berharga adalah di sekolah, madrasah, dan pondok pesantren. Suplailah lembaga-lembaga tersebut dengan banyak *resources*, supaya yang keluar dari sana adalah Islam yang bagus untuk publik.

Lagi-lagi, dengan demokrasi memungkinkan orang untuk lebih ke tengah. Saya optimis ketika berkaca pada 1960-an, di mana banyak yang terlibat konflik, namun sekarang sudah damai. Itu tidak lepas dari peran ormas agama seperti NU dan Muhammadiyah. Studi Saiful Mujani menjadi penting ketika melihat peran lemba-

ga-lembaga agama dalam demokratisasi di Indonesia. Artinya, kalau ingin memperkuat demokrasi maka perkuat lembaga-lembaga agama, termasuk ormas dan pesantren. Saya mengatakan itu bukan karena saya orang UIN. Tetapi, saya mengatakannya karena itu *genuine*, dan memang seperti itulah seharusnya.

Wawancara dilakukan pada 14 Februari 2008

Percakapan dengan

Gadis Arivia

Gadis Arivia, dosen Filsafat dan Kajian Wanita di Universitas Indonesia. Mantan Direktur Eksekutif Yayasan Jurnal Perempuan ini memperoleh gelar MA bidang Psikologi Sosial dari E.H.E.S.S., Paris, Prancis dan gelar Doktor Filsafat dari UI.

Kebebasan perempuan bisa dijalankan hanya dalam negara sekular dan liberal. Di sana otonomi perempuan mendapatkan ruang yang luang. Karena itu perempuan hendaknya tidak didefinisikan oleh agama atau budaya tradisional tertentu. Namun begitu, dalam negara yang sekular, liberal, plural, demokratis, dan membela HAM, tidak cukup dengan jaminan *political rights* semata, tetapi juga harus memperhitungkan *civil liberties*. Jika tidak, pelanggaran HAM dan hak-hak perempuan menjadi peristiwa sehari-hari. Maka, untuk dapat melihat secara jernih bahwa suatu hal merupakan persoalan sosial, kita harus punya liberal mind, sikap dan pikiran yang terbuka. Dari sini seseorang baru bisa menentukan posisi teori dan analisa manakah yang akan dipakai untuk memecahkan masalah tertentu.

Kalau kita melihat diskursus yang berkembang dalam masyarakat, sekularisme seringkali dianggap sebagai penyebab terpinggirnya agama dari kehidupan masyarakat. Bahkan, di Eropa, khususnya di negara-negara Skandinavia, anti-agama justru menjadi semacam life style. *Bagaimana Anda melihat sekularisme?*

Sekularisme sebetulnya bukan antiagama. Ia digagas untuk memisahkan antara agama dan negara. Jadi, sekularisme bukan konsep yang antiagama. Bahkan seringkali orang yang sekular justru sangat agamis dalam wilayah privatnya. Tetapi, ketika di dalam wilayah publik mereka percaya bahwa negara dan agama mesti dipisah.

Praktik sekularisme yang berkembang di Eropa terasa lebih kuat karena mereka selama ratusan atau bahkan ribuan tahun mengalami konflik-konflik antaragama. Sehingga, mereka berpikir bahwa dalam negara modern, untuk menghindari perang agama seperti dulu, harus didirikan atas dasar pemisahan antara agama dan negara. Agama hanya bisa berperan dalam wilayah pribadi seseorang. Karena itu, ketika kita berada dalam wilayah publik, kita harus berpikir secara lintas budaya dan agama. Sebab kita berhubungan dengan orang-orang yang berlatar belakang agama, politik, etnis, dan ras yang berbeda. Terlebih lagi untuk konteks Eropa Barat dan Amerika, karena negara mereka makmur, banyak sekali imigran yang datang sejak dulu hingga sekarang. Dengan latar yang demikian itu, lantas bagi mereka negara sekular harus menjadi pijakan. Karena mereka merasa bahwa dengan sekularisme negara akan berfungsi secara maksimal. Artinya, mereka menyadari betul bahwa negara di mana mereka sekarang tinggal lebih bersifat multikultural. Bagaimanapun juga, corak multikultural ini hanya bisa diatur dengan konsep-konsep yang sekular dan liberal.

Karena dalam konsep sekularisme dan liberalisme terdapat toleransi yang sangat dibutuhkan bagi negara majemuk seperti sekarang.

Apa yang hendak Anda desakkan terkait dengan konsep post-sekularisme yang pernah Anda lontarkan untuk konteks Indonesia? Dan bagaimana konsep tersebut menjadi relevan terutama dengan isu-isu mengenai perempuan?

Bagi saya, kebebasan perempuan hanya bisa dijalankan dalam negara sekular dan liberal. Dan, karena beberapa bagian dari ajaran agama interpretasinya sangat konservartif dan tradisional, sehingga tidaklah mengagetkan kalau sumber penindasan justru seringkali datang dari agama. Liberal di sini berarti bahwa manusia otonom dan bebas. Karena itu pula, perempuan di sini hendaknya didefinisikan sebagai manusia yang otonom dan bebas; tidak didefinisikan oleh agama tertentu atau budaya-budaya yang tradisional. Oleh sebab itu, mereka, kalangan feminis, memilih pijakan yang sekular dan liberal.

Sekularisme sebetulnya bukan antiagama. Ia digagas untuk memisahkan antara agama dan negara. Jadi, sekularisme bukan konsep yang antiagama. Bahkan seringkali orang yang sekular justru sangat agamis dalam wilayah privatnya. Tetapi ketika di dalam wilayah publik mereka percaya bahwa negara dan agama mesti dipisah.

Gagasan post-sekularisme adalah proses di mana kita telah melewati tahapan sekular dan liberal. Ketika kita sudah merasa aman dan pasti bahwa negara ini sekular dan liberal, baru kemudian gagasan post-sekularisme ini bisa diterapkan. Artinya, dalam post-sekularisme identitas agama tidak menjadi ancaman karena identitasnya

tidak bersifat abadi dan terberi, akan tetapi temporer (orang bisa beralih agama sesuai dengan pilihannya). Agama di sini lebih merupakan pilihan pribadi yang bebas, tidak diturunkan atau diwariskan. Di dalam masyarkat post-sekular, tidak ada paksaan atau kebijakan-kebijakan yang didasarkan oleh agama-agama tertentu. Artinya, gagasan post-sekularisme memang hanya mungkin di negara-negara mapan dan dewasa.

Sebaliknya, kalau tradisi keagamaan itu diterapkan, misalnya di Aceh, di mana di sana gagasan liberal dan sekularnya belum mapan, maka akan sangat banyak terjadi pelanggaran, terutama pelanggaran terhadap hak-hak perempuan. Demikianlah gambaran yang tengah terjadi di Aceh, misalnya, di mana aturan soal pakaian, bagaimana harus bertingkah laku dan seterusnya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang dibuat oleh otoritas daerah, ujungnya akan sangat merugikan perempuan.

Demikian juga soal otonomi daerah. Gagasan post-sekularisme dalam era otonomi daerah hanya akan berjalan jika kepemimpinan di daerah sudah bersifat liberal dan sekular. Artinya, model kepemimpinannya sungguh-sungguh memahami bahwa negara kita memang adalah negara sekular, bukan negara berdasarkan agama tertentu. Hal tersebut mensyaratkan juga bahwa mereka harus bisa memutuskan masalah kepentingan-kepentingan daerah secara adil. Celakanya, yang muncul dalam otonomi daerah sekarang ini justru adalah unsur-unsur primordialisme yang disebabkan oleh ketidaksiapan pemimpinnya. Misalnya, pemimpinnya kurang berkualitas, tidak tahu arti demokrasi dan lemah terhadap penghargaan hak asasi manusia. Sebab, bagaimanpun juga, harus kita akui, bahwa selama ini kita melihat kepemimpinan di daerah-daerah tidak dibangun atas fondasi tersebut. Sehingga yang kemudian lahir adalah

aturan atau perda-perda yang sangat merugikan perempuan. Karena mereka, para pemimpin daerah, hanya memakai pijakan agama tertentu. Padahal, pijakan agama seharusnya hanya diterapkan di ruang pribadi dan bukan publik.

Jadi, gagasan post-sekularisme memang tidak bisa diterapkan di Indonesia, karena masih ada masyarakat yang belum paham (atau tidak rela) bahwa negara ini adalah negara sekular. Sebenarnya Indonesia sudah mengalami kemajuan dalam dua indikator utama, yakni dalam *political rights* dan *civil liberties* – karena memang dijamin oleh undang-undang dasar dan konstitusi kita, yang menyatakan bahwa negara kita memang bukan negara agama. Setelah reformasi, *political rights* dan *civil liberties* dianggap sudah berjalan, yakni dengan penerimaan yang bagus terhadap demokrasi. Namun dalam prosesnya tentu saja masih ada kekurangan dalam ranah *civil liberties*, terutama pada kurangnya sikap kedewasaan masyarakat, yang otonom dalam pilihan hidup dan menjunjung hak asasi manusia.

Bedanya *civil liberties* kita dengan negara lain yang sudah mapan adalah bahwa yang mayoritas di Indonesia tidak mementingkan – bahkan mengabaikan – hak asasi manusia (HAM). Dalam hal ini, yang mayoritas adalah umat Muslim. Karena mereka menganggap bahwa mereka adalah mayoritas, maka kalangan tertentu dari mereka merasa sah untuk menerapkan aturan Islam yang berlaku di tempat tertentu. Tetapi, sebetulnya, yang dianggap mayoritas adalah mereka yang selalu mengunggulkan nilai-nilai HAM. Atau, dengan pengertian lain, mereka yang selalu mengedepankan kepentingan-kepentingan minoritas. Jadi, meskipun *political rights* kita sejak reformasi sudah bagus, yakni dengan terpilihnya presi-

den secara demokratis dan juga para kepala daerah, namun *civil liberties* kita yang masih kurang matang.

Saya membaca sebuah laporan dari *Freedom House* yang mengatakan bahwa *political rights* dan *civic liberties* kita sudah bagus. Tetapi sebetulnya, menurut saya, masih ada problem. Karena dalam *civic liberties*, harus kita akui, masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap kelompok minoritas. Padahal, demokrasi artinya justru yang mayoritas melindungi yang minoritas.

Jika prasyarat untuk mengimplementasikan gagasan post-sekularisme adalah masyarakat yang sekular dan liberal secara matang, dengan jaminan dan perlindungan penuh terhadap political rights *dan* civil rights*, maka dapat dikatakan gagasan tersebut hampir tidak mungkin untuk konteks negara kita. Terlebih lagi apabila menengok ekspansi agama yang cukup agresif memarginalisasi nasib perempuan, misalnya yang tercermin dalam* UU Perkawinan ’74, RUU APP *perda syariat Islam dan sebagainya. Bagaimana Anda menyikapi setiap aturan hukum atau UU yang diskriminatif terhadap kaum perempuan yang berlaku di negara ini?*

Sebetulnya kalau kita melihat UUD ’45 dan platform yang dikemukakan oleh *founding fathers* negara ini, di sana disebutkan secara jelas bahwa negara kita bukanlah negara Islam atau negara agama. Jadi kelompok yang menginginkan negara ini menjadi negara agama sebetulnya sudah kalah. Artinya, persoalan ini sebenarnya sudah selesai. Problemnya adalah ketika negara sendiri tidak secara tegas menjaga visi awal negara ini. Hal ini terlihat jelas, misalnya, ketika negara atau pemerintah membiarkan munculnya

undang-undang atau aturan hukum yang bertentangan dengan UUD dan konstitusi kita.

> Berbicara mengenai pandangan liberal atau liberalisme, kita harus membedakan antara konsep *mind* yang liberal dan posisi teori yang liberalisme.

Sekularisme juga mendesakkan semangat ilmu pengetahuan modern dengan upayanya membebaskan dari segala nilai, baik tradisi ataupun agama. Kendati demikian, ilmu pengetahuan dalam sejarahnya tetap saja tidak bisa bebas dari nilai-nilai budaya yang bersifat patriarkhal, phallocentris *atau* misoginis. *Jika kenyataannya seperti itu, apakah berarti sekularisme dalam ilmu pengetahuan sudah terjadi? Dan kalau sudah terjadi, apakah ia sudah mulai memberi pemihakan terhadap perempuan?*

Pertama, sekularisme kita pahami sebagai upaya untuk membangun sebuah negara yang memisahkan agama dari negara, agar pengaturan negara bisa lebih baik. Bagaimanapun juga bentuk negara sekular sudah disepakati oleh *founding fathers* kita. Kedua, soal diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi karena kuatnya budaya patriarkhi yang ada di dalam negara dan juga di ilmu pengetahuan. Jadi, budaya patriarkhi juga masih ada di negara sekular. Untuk memerangi budaya patriarkhi membutuhkan waktu yang lama, karena budaya patriarkhi merupakan budaya terlama yang ada di dunia. Maka, kalau kita berbicara mengenai ilmu pengetahuan yang bias jender, sebenarnya kita tengah berbicara mengenai pengaruh budaya patriarkhi.

Sebagaimana kita ketahui, sejarah ilmu pengetahuan yang sudah dimulai dari abad ke-17 memang sedikit sekali menampilkan peran

perempuan. Perempuan saat itu dianggap tidak kompeten untuk berpikir secara abstrak. Misalnya, kalau kita lihat tulisan Jean Jacques Rousseau dalam *Emile* yang mengatakan bahwa laki-laki mampu berpikir abstrak-matematis, sedangkan perempuan lebih emosional dan harus diberikan pendidikan praktis. Kondisi yang seperti ini berakibat pada perkembangan perempuan dalam ilmu pengetahuan yang mungkin sudah tertinggal 200 sampai 300 tahun dibanding laki-laki yang lebih banyak mendapat akses.

Kondisi sekarang ini mulai berubah: akses pendidikan atau ilmu pengetahuan terbuka secara luas dan bisa dinikmati oleh siapa saja, terutama dengan adanya internet. Akses tersebut juga dinikmati oleh kelas sosial manapun. Oleh karena itu, dalam dunia kontemporer, nilai-nilai juga harus berubah. Di sini kelompok minoritas, apakah perempuan atau kelompok minoritas yang lain bisa bersaing. Dengan pengertian lain, semua ini bisa dikatakan sebagai optimisme dari globalisasi. Misalnya, seorang perempuan di sebuah desa di India bisa menyebarkan isunya secara mendunia hanya dengan menyiarkannya lewat internet. Karena itulah saya menganggap bahwa globalisasi justru sangat membantu perempuan karena ia bisa mengakses informasi seluas-luasnya.

Kemudian soal sekularisme dalam ilmu pengetahuan. Beberapa waktu lalu ada pengalaman menarik yang dialami seorang dosen mata kuliah estetika. Ia mengajarkan teori-teori estetika dengan memberikan contoh. Salah satunya adalah lukisan Salvador Dali. Dalam salah satu lukisan Dali ada lukisan perempuan telanjang separuh badan. Kemudian ada seorang mahasiswa yang meminta untuk tidak memakai contoh tersebut dengan alasan bahwa lukisan tersebut dianggap porno, dan mahasiswa bersangkutan menganggap bahwa pornografi dilarang di negeri ini. Ini adalah contoh konkret di mana paham sekularis-

me terancam. Anda dapat membayangkannya: kejadian ini terjadi di lingkungan kampus (negeri). Ini adalah bentuk lain dari represi Orde Baru yang melarang Marxisme karena dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila. Jadi bentuk represi seperti ini digunakan kembali, tetapi dengan bentuk yang lain. Kalau dulu kita melawan bentuk represi negara, sekarang kita dihadapkan pada bentuk represi komunal.

> Pluralisme memang mempunyai pengertian yang dapat mengarah pada sesuatu yang sangat relatif. Kalau kita memasukkan agama ke dalam ruang pribadi kita, maka ia akan menjadi sangat relatif.....pluralisme menjadi relatif karena membiarkan orang untuk memilih, membiarkan suara-suara lain masuk, tidak mengekslusifkan identitasnya, dan tidak *fixed*.

Jika melihat fenomena fundamentalisme agama yang kian merebak dan dalam praktiknya mengancam hak-hak dan kebebasan setiap warga, terutama juga kaum perempuan, lantas, menurut Anda, bagaimana upaya gerakan feminis untuk tetap konsisten menggaungkan agenda-agendanya di tengah ancaman gerakan fundamentalisme agama, terutama, terhadap cita-cita masyarakat yang adil dan setara (jender)?

Fenomena bangkitnya gerakan fundamentalisme ini memang sangat mengkhawatirkan. Sebenarnya gerakan feminisme merupakan gerakan minoritas untuk memperjuangkan hak-haknya yang tidak terlindungi. Tentu saja memang ada etnis minoritas, agama minoritas, dan lain sebagainya. Tetapi model minoritas perempuan juga dipakai untuk memahami minoritas lain. Bahayanya adalah ketika agama masuk ke ruang publik dan mencoba untuk mengatur wilayah pribadi seseorang, misalnya pengaturan pakaian apa yang bo-

leh dipakai atau tidak boleh dipakai oleh perempuan. Pengaturan semacam ini mengancam kebebasan berekspresi perempuan. Paham pengaturan pakaian berasal dari paham agama karena dalam agama tertentu pakaian perempuan berkaitan erat dengan tubuh perempuan, sensualitas dan seksualitas perempuan. Seksualitas dan sensualitas perempuan dipandang sebagai tidak suci oleh agama tertentu atau sebagai sumber masalah. Jadi bila ada aturan yang mengatur pakaian seseorang maka tentu saja ini maksudnya untuk mengatur perempuan. Celakanya, begitu ia bisa mengatur perempuan, maka ia nantinya akan bisa juga mengatur minoritas yang lain. Sekali kita bisa mendiskriminasi satu kelompok minoritas maka kita bisa mendiskriminasi kelompok minoritas lainnya.

Sekarang kebetulan saya sedang meneliti tentang kehidupan perempuan Indonesia di awal abad ke-20, terutama dari gaya berpakaiannya. Saya mencoba menggali cara berpakaian perempuan Indonesia mulai awal abad ke-20 (bahkan sebelumnya) sampai sekarang. Dan kalau kita hubungkan dengan budaya kita, saya melihat soal aturan pakaian yang diatur-atur ini ada yang salah. Bahwa secara budaya, pakaian perempuan Indonesia, seperti kebaya, adalah pakaian yang seksi dan transparan. Apabila dicermati, pakaian perempuan Indonesia secara budaya memang sangat terbuka, dan ini bertentangan dengan aturan-aturan pakaian yang didasari oleh paham agama tertentu. Lantas, bagaimana kita menyelesaikan persoalaan ini? Apakah paham suatu agama tentang berpakaian bisa masuk ke dalam aturan ruang publik? Kemudian, kriteria pakaian perempuan yang seperti apa yang harus ditertibkan? Apakah ia akan mengubah apa yang selama ini kita sebut sebagai perempuan Indonesia?

Yang saya pahami, Indonesia sejak dari awal sudah sekular dan tidak pernah mempermasalahkan pakaian perempuan. Masalah ini justru muncul belakangan. Agama bila memaksakan diri masuk pada pengaturan ruang publik, bagi saya, adalah perkembangan yang mundur (*regress*) dan bukan maju (*progress*). Kenapa kita mau memasukkan perempuan kembali ke zaman jahiliyah dan tidak membiarkan perempuan maju bersaing dalam dunia global?

Contoh konkret lagi terjadi di Universitas Indonesia, di mana agama sudah masuk ke dalam aturan ruang publik akademis. Ada kelompok-kelompok yang ingin mendirikan negara Islam dan kemudian membentuk kelompok di kampus ini dengan berusaha menyebarkan misi agar perempuan memakai jilbab. Terutama kalau mereka tahu bahwa mahasiswanya beragama Islam yang kebetulan tidak memakai jilbab. Kegiatan ini paling intensif dilakukan pada bulan-bulan penerimaan mahasiswa baru. Bahkan mereka mengiming-imingi dengan beasiswa ataupun Jilbab Award. Ini merupakan wujud bahwa agama sudah masuk ke ruang publik kampus. Jangan lupa, ini adalah wilayah universitas. Anda bisa bayangkan di luar universitas, bagaimana pemaksaan bisa mereka lakukan dengan semena-mena atas nama agama. Sehingga, saya memahami mengapa orang cemas dengan soal fundamentalisme agama karena persoalan yang dihadapi sangat nyata.

Bagaimana jika semangat agama tertentu ketika masuk ke ruang publik justru mendukung nilai-nilai demokrasi, seperti Gereja di Filipina dan Polandia?

Sebetulnya ketika dikatakan bahwa agama berada di wilayah privat dan bukan di wilayah publik, maka publik yang dimaksud

di sini adalah aturan-aturan perundangan yang dibuat dan berlaku bagi segenap khalayak (warga negara). Jadi, maksudnya mengapa agama harus di wilayah privat adalah ketika kita membuat undang-undang yang berlaku untuk semua orang, keyakinan agama tertentu tidak masuk ke dalamnya. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh mendiskusikan masalah agama di ruang publik. Hal itu boleh dilakukan. Kita juga boleh membentuk kelompok-kelompok agama dan lain sebagainya. Jadi yang dicegah adalah agama masuk ke dalam aturan-aturan hukum yang berlaku bagi semua orang, seperti Undang-Undang Perkawinan, Pendidikan atau yang lain.

Pendapat yang radikal justru menganggap atribut agama harus masuk pada setiap aturan hukum dan ada representasi keagamaan yang kuat di ruang publik. Sebab, bagi mereka yang berpandangan radikal, politik identitas itu penting. Bagi seorang sekular, memakai jilbab tidak menjadi masalah selama ia tidak masuk dalam aturan hukum negara. Tetapi bagi yang radikal, aturan memakai jilbab adalah upaya memperjuangkan politik identitas, bahkan, mungkin bukan hanya memakai jilbab tapi juga tidak bersedia bersalaman, misalnya, dengan pemeluk agama lain. Atau kalau dia laki-laki tidak mau bersalaman atau memandang mata perempuan. Jadi berbicara pada perempuan dilakukan dengan mata yang memandang bukan kepada subyek yang diajak bicara, tapi kepada obyek lain. Menghindari subyek perempuan.

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dengan mereka yang radikal sekular, yang memang ingin mengeksklusikan semua agama dari ruang publik, apakah hal itu bijaksana, karena pada akhirnya hal itu justru akan memancing kelompok-kelompok agama untuk menampilkan diri? Tetapi, apakah kemudian kelompok sekular moderat lebih bijak (yang membiarkan agama selama ti-

dak masuk ke dalam aturan hukum)? Maka kalau kita lihat kasus di Prancis dalam kasus pendidikan, misalnya, menjadi sangat menarik untuk diperhatikan. Prancis mempunyai konsep yang disebut dengan *laicité*, yaitu aturan bahwa dalam pendidikan negeri, agama apapun tidak boleh masuk ke dalam kurikulum. Bagi kelompok sekular-radikal hal itu dianggap sudah benar. Karena pendidikan adalah gerbang awal untuk menuju pengetahuan yang lebih luas, sebab kalau dimasuki doktrin agama maka pelajar tidak bisa berpikir secara luas dan kritis.

> Gagasan post-sekularisme dalam era otonomi daerah itu akan berjalan jika kepemimpinan di daerah sudah bersifat liberal dan sekular. Artinya sungguh-sungguh memahami bahwa negara kita memang adalah negara sekular, bukan negara berdasarkan agama tertentu.

Bagi kelompok sekular-moderat, tidak masalah agama masuk dalam pendidikan selama pendidikan yang bukan dibiayai oleh negara/publik. Di Jerman pernah ada kasus satu kelompok ingin mendirikan sekolah agama, kebetulan Muslim, tapi ketika pemerintah meminta mereka untuk mempelajari juga agama lain, mereka menolak dengan alasan bahwa mereka Muslim. Salah satu contoh konkret ihwal tarik-menarik antara ilmu pengetahuan dan agama terjadi di kampus ini (FIB UI), yaitu ketika salah satu dosen mengajar mengenai filsafat Timur dan salah satu tokoh yang dibahas adalah pemikir Hindu sehingga banyak mengutip ajaran Hindu. Kemudian seorang mahasiswa meminta dosen untuk berhenti dengan alasan bahwa yang diajarkan adalah ajaran agama Hindu. Saya kira memang harus ada penelitian mengapa banyak universitas yang 'diserbu' oleh kelompok fundamentalis.

Bagaimana pandangan Anda ihwal diskursus liberalisme? Bagaimana Anda meletakkan civil rights *dan* civil liberties *yang seharusnya dijamin dan dilindungi negara dalam hubungannya dengan hak-hak perempuan yang kerap termarginalisasi?*

Berbicara mengenai pandangan liberal atau liberalisme, kita harus membedakan antara konsep *mind* yang liberal dan posisi teori liberalisme. Pembedaan tersebut, misalnya, dapat dilakukan dalam melihat feminisme. Feminisme sendiri memang ada delapan arus teori utama: mulai feminisme liberal, radikal, sampai feminisme posmodern dan ekofeminisme yang sekarang menguat. Namun dari seluruh delapan teori tersebut harus ada *liberal mind* yang kuat. *Liberal mind* berbeda dengan teori-teori itu sendiri. *Liberal mind* adalah suatu posisi pikiran di mana kita menerima posisi pikiran manapun selama bisa dijelaskan dari akar sosialnya.

Persoalan feminisme merupakan persoalan yang lahir dari konteks ketidakadilan. Jadi, dalam feminisme persoalan yang ada dijelaskan dari akar sosial ketidakadilan jender. Kita tidak bisa menjelaskan feminisme dari akar moral, karena persoalan ketidakadilan ditemui di dalam kondisi sosial, bukan dalam wilayah moral. Moral tetap berada di wilayah pribadi. Sehingga, lagi-lagi, kalau kita berbicara mengenai masalah feminisme, maka kita berbicara mengenai kondisi sosialnya. Kalau ada ketidakadilan dalam kondisi sosial tertentu terhadap perempuan, di situlah feminisme harus masuk. Oleh karena itu, untuk melihat secara jernih bahwa suatu hal adalah persoalan sosial, maka kita harus mempunyai *liberal mind*, artinya harus mempunyai sikap dan pikiran yang terbuka.

Dari sinilah kemudian seseorang baru bisa menentukan posisi teori manakah yang akan dipakai untuk memecahkan masalah tertentu. Kita bisa memilih posisi liberal. Artinya, paham bahwa

penindasan terhadap perempuan ini hanya bisa diselesaikan kalau kebijakan-kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan juga diselesaikan. Jadi misalnya kalau ada persoalan poligami – yang menurut penelitian salah sebuah organisasi perempuan – yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga, bukan hanya terhadap istri, tapi juga terhadap anak, berarti kalau kita menganut teori liberal maka kita akan bekerja dalam domain hukumnya. Artinya, kita akan berusaha merevisi hukum yang membolehkan laki-laki menikahi dua, tiga atau empat perempuan.

> Bagi saya, kebebasan perempuan hanya bisa dijalankan dalam negara sekular dan liberal. Karena beberapa bagian dari ajaran agama interpretasinya sangat konservartif dan tradisional. Sehingga tidaklah mengagetkan kalau sumber penindasan justru seringkali datang dari agama. Liberal di sini berarti bahwa manusia otonom dan bebas. Karena itu pula, perempuan di sini hendaknya didefinisikan sebagai manusia yang otonom dan bebas; dan tidak didefinisikan oleh agama tertentu atau budaya-budaya yang tradisional. Oleh sebab itu, mereka, kalangan feminis, memilih pijakan yang sekular dan liberal.

Tapi bagi feminis radikal, mereka akan mengambil posisi yang lain. Karena, bagi mereka, undang-undang apapun yang dihasilkan, misalnya Undang-Undang Anti-Trafiking yang sekarang sudah ada, tetap saja ada kasus penjualan anak perempuan. Walaupun sudah ada Undang-Undang Perkawinan yang tidak membolehkan laki-laki berpoligami, tapi tetap saja akan ada laki-laki yang menikah di bawah tangan, *muth'ah* atau yang lain. Jadi, bagi feminis radikal, pilihan mutlak yang harus diubah adalah budaya patriarkhi, bukan sekadar kebijakannya.

Lalu ada teori yang mengatakan bahwa persoalan perempuan adalah persoalan psikoanalisa atau psikologis, yaitu perasaan inferior perempuan terhadap laki-laki. Kemudian ada juga kelompok feminis Marxis yang mengatakan bahwa persoalannya adalah persoalan ekonomi (infrastruktur). Jadi kalau perempuan mampu merebut ekonomi, atau independen secara ekonomi, maka perempuan tidak akan tertindas. Ini merupakan perdebatan teoretis yang sangat ramai. Akan tetapi dalam masing-masing teori tersebut tetap mengandaikan adanya *liberal mind*. Jadi, pilihan apakah kita berangkat dari mengubah kebijakannya; melalui pembongkaran kesadaran dalam psikoanalisa; analisa ekonomi, dan lain sebagainya, hanya pilihan strategis kita. Namun harus ada *liberal mind* dalam kesadaran kita.

Persoalannya adalah ketika pikiran kita sudah tertutup dan tidak mempunyai *liberal mind*, maka kita tidak akan bisa menerima pendekatan-pendekatan yang berbeda. Sebab, kalau tidak mempunyai *liberal mind* maka yang terjadi adalah penolakan terhadap pandangan yang berbeda: kalau ajaran agama mengatakan bahwa laki-laki boleh berpoligami dan perempuan tidak boleh berpoliandri, misalnya, maka tidak boleh ada pendapat lain yang bertentangan dengan doktrin tersebut. Jadi, *liberal mind* di sini tidak ada.

Kemudian soal civil and political rights *dan* civil liberties *yang di negeri ini terlampau susah untuk ditegakkan dalam memperoleh jaminannya, apa komentar Anda?*

Adalah menjadi suatu yang jelas bahwa *civil rights* dan *civil liberties* adalah tanggung jawab negara. Maka, sangat disayangkan ketika pemerintahan kita melalaikan tanggung jawab tersebut. Sebab dalam

perspektif *human rights* hal itu berarti pelanggaran negara terhadap *civil liberties* dan *political rights* warga. Saya kira, kita harus mempersoalkan secara terus-menerus kelalaian negara. Karena kalau hal ini tidak dilakukan akan merembet ke persoalan lain. Misalnya seperti dana non-budgeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Bahwa sebuah partai tidak boleh menerima dana dari pejabat negara, dan merupakan kekeliruan jika mereka menerimanya. Tetapi mengapa 'dikabarkan' oleh media tokoh-tokoh seperti Amien Rais, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan tokoh-tokoh lainnya, yang kita anggap sebagai tokoh reformis, justru mau menerima. Ini cerminan dari *civil liberties* di Indonesia yang belum berjalan. *Political rights* dan demokrasinya sudah terbentuk tapi *civil liberties*-nya belum. Bila apa yang diberitakan media benar, maka mereka belum memahami betul mana persoalan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Mereka mengaku justru setelah ketahuan. Itu semua menandakan bahwa *civil liberties* kita belum beranjak berkembang.

Ketika dikatakan bahwa agama berada di wilayah privat dan bukan di wilayah publik, maka publik yang dimaksud di sini adalah aturan-aturan perundangan yang dibuat dan berlaku bagi segenap khalayak (warga negara). Jadi, maksudnya mengapa agama harus di wilayah privat adalah ketika kita membuat undang-undang yang berlaku untuk semua orang, keyakinan agama tertentu tidak masuk ke dalamnya.

Terkait dengan civil rights, political rights *dan* civil liberties *bagi kaum perempuan, negara ini sebenarnya sudah meratifikasi CEDAW. Tetapi, komitmen negara untuk membangun tatanan yang lebih setara*

dan adil terhadap perempuan terasa masih sangat rendah. Lantas apa yang harus dilakukan oleh aktivis-aktivis perempuan untuk mendesak negara agar bertanggung jawab dalam menjamin dan melindungi hak-hak dan kebebasan perempuan?

Persoalannya, negara ini memang abai terhadap hak-hak dan kebebasan perempuan. Kalau dari segi *political rights*, kita sudah mempunyai CEDAW, Undang-Undang Anti-Trafiking, Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan lain sebagainya. Tetapi jaminan dan penghargaan atas *civil rights*-nya yang memang tidak ada. Terlebih, pemerintah-pemerintah di daerah tidak mengerti bahwa mereka adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk melindungi warganya. Inilah yang seringkali membingungkan analis dari luar. Karena dari *political rights*-nya sudah sangat bagus jika dibandingkan dengan negara lain, misalnya seperti Malaysia, karena sudah ada kebijakan-kebijakan di atas, tetapi kenapa masih ada kejadian-kejadian yang memperlihatkan kurangnya *civil rights*. Misalnya, di Pati (Jawa Tengah) ada daerah di mana perempuannya dijual justru dengan difasilitasi oleh perangkat pemerintahan setempat. Padahal mestinya mereka tahu bahwa mereka adalah orang yang berkewajiban untuk menjaga *political rights* dan *civil rights* warganya. Yang terjadi justru mereka yang paling besar menikmati keuntungan penjualan perempuan, karena bisnis ini adalah bisnis dengan keuntungan besar.

Jadi, menurut hemat saya, itu semua yang menjadi persoalan. Di satu sisi *political rights* kita bagus, bahwa perempuan bisa memilih dan dipilih dalam alam demokrasi, tetapi di sisi yang lain *civil rights*-nya tidak dijalankan dengan semestinya. Sebab, sejatinya, negara yang sekular, liberal, demokratis dan membela HAM ternyata

tidak cukup dengan *political rights*, tetapi juga harus memperhitungkan *civil liberties*. Kalau tidak demikian, maka akan selalu terjadi hal-hal seperti sekarang ini, di mana pelanggaran HAM, terutama, hak-hak perempuan hampir menjadi peristiwa sehari-hari.

Apakah advokasi yang dilakukan oleh aktivis perempuan hanya cukup melalui civil society *atau idealnya juga harus mendesak negara untuk berpihak pada perempuan?*

Menurut saya, *civil society* kita sudah sangat luar biasa bagus jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Bayangkan, sebelum reformasi 1998 organisasi perempuan sangat sedikit jumlahnya lantaran dikooptasi oleh Dharma Wanita. Sehingga, hampir tidak ada organisasi perempuan di luar itu. Kalaupun pada waktu itu ada organisasi perempuan, itu hanya sebatas kelompok-kelompok studi. Lalu setelah reformasi, tercatat setidaknya ada organisasi perempuan sebanyak 200 lembaga. Apalagi ketika lembaga donor membuka pendanaan untuk pembelaan hak-hak perempuan, banyak sekali bermunculan organisasi perempuan, bahkan mereka yang belum tentu feminis juga mendirikan lembaga agar mendapat dana dari lembaga donor.

> Kebebasan perempuan hanya bisa dijalankan dalam negara sekular dan liberal. Dan, karena beberapa bagian dari ajaran agama interpretasinya sangat konservartif dan tradisional, sehingga tidaklah mengagetkan kalau sumber penindasan justru seringkali datang dari agama.

Maka, sekarang ini yang mendesak untuk dituntut adalah komitmen negara. Artinya, kalau *civil society* sudah relatif kuat mendukung kemajuan perempuan, maka sekarang komitmen negara

yang harus jelas dalam mendukung upaya tersebut. Kalau negara merasa bahwa rancangan perundang-undangan, seperti RUU-APP, merugikan perempuan, maka ia harus tegas. Demikian juga dengan perda-perda di daerah yang merugikan perempuan. Apalagi jika kita mengacu pada laporan PBB mengenai perda-perda yang membatasi perempuan yang ternyata merugikan negara sebanyak 2,4 miliar dollar per-tahun. Karena dengan adanya perda-perda tersebut, partisipasi kerja perempuan menurun, yakni dari 52% perempuan yang bekerja sekarang menjadi 48% saja. Dan itu sangat mempengaruhi ekonomi negara kita.

Hal yang sama juga terjadi dalam dunia pendidikan. Yang sebelumnya sebanyak 98% perempuan melek huruf, sekarang menurun menjadi 95%. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Padahal ini merupakan persoalan yang sangat mendasar bagi berlangsungnya suatu negara yang ingin terus berkembang maju. Lalu mengapa ini terjadi? Apakah memang ada persoalan pada *civil liberties*-nya, meskipun *political rights*-nya dijamin? Jadi, kenyataan ini sangat mengkhawatirkan, bahkan, perda-perda syariat Islam tersebut ternyata juga sangat mempengaruhi perekonomian kita. Kalau setengah penduduknya bodoh, tidak sehat, dan tidak bisa bekerja, atau partisipasi kerjanya dibatasi, maka itu berarti setengah dari negara ini juga hancur.

Bagaimana dengan globalisasi yang bagi sebagian kalangan dianggap menempatkan perempuan sebagai obyek kapitalisme? Lantas bagaimana pula dengan kian demonstratifnya neoliberalisme jika dilihat dalam kaca mata seorang feminis seperti Anda?

Globalisasi seringkali dibenturkan dengan *local values*. Bahwa seseorang yang pro-globalisasi berarti ia tidak pro-*local values* atau nilai-nilai lokal. Sehingga, pada lokus inilah mestinya seorang feminis dapat menimbang-nimbang, di mana suara saya (perempuan) bisa terdengar: di masyarakat global atau di masyarakat yang menganut nilai-nilai lokal? Padahal, kita semua tahu, selama beribu-ribu tahun budaya patriarkhi justru dibangun atas dasar *local values*. Yakni nilai-nilai lokal yang sangat kuat dan tidak dapat diganggu gugat, yang mana nilai-nilainya tidak memberikan kesempatan kepada perempuan. Di sini pun (di lingkungan kampus FIB UI), perdebatan yang terjadi juga seperti itu. Sebenarnya kita sudah mencoba percaya dengan *local values*, namun yang terjadi kemudian ia menjadi nasionalisme yang sempit, sehingga menyebabkan negara yang korup. Sudah terbukti bahwa nilai-nilai lokal kita dipenuh dengan korupsi, penuh dengan tindak kekerasan, terlebih lagi, sarat dengan nilai-nilai yang diskriminatif terhadap perempuan.

Pertanyaannya kemudian adalah: apakah saya sebagai perempuan akan lebih bisa beraktualisasi dalam *local values* ataukah di dalam dunia global? Globalisasi sebenarnya lintas jender dan lintas kelas. Misalnya saya bisa masuk lewat internet untuk membeli saham walaupun saya berasal dari kelas dan jender tertentu. Fenomena Tukul, misalnya, merupakan fenomena globalisasi. Dia tidak perlu sekolah S3 untuk mendapatkan uang yang banyak. Ini semua adalah kemungkinan-kemungkinan yang diberikan oleh globalisasi. Memang ada hal-hal yang buruk dari globalisasi, akan tetapi di sana juga ada banyak sekali kemungkinan dan kesempatan, terutama bagi kaum minoritas, seperti perempuan, kelompok agama minoritas, kelompok minoritas secara seksual, dan lain sebagainya.

Jadi, menurut saya, kita hanya bisa berharap pada sesuatu yang memberikan kemungkinan-kemungkinan atau *possibilities* bagi kemajuan tatanan yang akomodatif terhadap perempuan.

Kemudian soal kapitalisme. Kalau kita mau jujur, adakah pilihan lain bagi sebuah negara selain kapitalisme? Akan tetapi perlu diingat, yang saya maksud dengan kapitalisme adalah kapitalisme yang sesungguhnya, bukan kapitalisme semu. Kalau kita menganggap bahwa kapitalisme itu buruk, tentu kita harus memberikan pilihan lain. Lantas apa pilihannya? Bentuk pasar seperti apa? Komunisme? *Planned market* seperti di negara sosialis? Yang perlu digarisbawahi di sini, saya tidak lantas membenarkan kapitalisme itu sendiri, melainkan, bagi saya, dalam kapitalisme *human rights* benar-benar dijaga.

Apabila kita mencoba untuk membandingkan sistem yang berseberangan dengan kapitalisme, komunisme, misalnya, secara kasar dapatkah kita melihat ada tokoh komunis yang seperti Bill Gates, yang memberikan uang sangat banyak untuk memberantas kemiskinan? Di dalam negara kapitalis yang membiarkan modal dan perusahaan berkembang tanpa batas, ternyata juga mempunyai aturan-aturan hukum untuk melindungi para karyawannya. Anda bisa lihat siapa yang membuat aturan bahwa perempuan bisa cuti haid, siapa yang membolehkan perempuan menjadi eksekutif atau direktur sekalipun. Semua kemungkinan semacam itu hanya bisa terjadi dalam dunia kapitalisme. Sampai sekarang saya belum menemukan sistem yang lebih baik ketimbang kapitalisme. Kita sudah melihat betapa sistem ekonomi yang tersentralisir seperti di negara komunis runtuh. Lantas, apakah jawabannya sistem ekonomi Pancasila? Apa itu sistem ekonomi Pancasila?

Kritik yang biasa diajukan terhadap sistem ekonomi liberal-kapitalis adalah bahwa sistem ini pada akhirnya hanya memberi ruang bagi kelompok yang kuat, sebaliknya menggilas yang lemah. Bagaimana pandangan Anda mengenai kritik ini?

Bagi saya jika persoalannya semacam itu, sebenarnya sistem yang tidak berjalan di situ adalah pemerintahannya. Kalau soal pedagang kecil yang tidak bisa berkembang, maka jawabannya adalah bahwa mereka harus menyetorkan upeti kepada aparat pemerintahan, sementara modal mereka terbatas. Lalu mengapa pedagang besar seperti Newmont, misalnya, mereka bisa besar lantaran memberikan upeti yang juga lebih besar. Jadi apakah sistemnya yang harus kita permasalahkan atau cara merawatnya ataukah regulatornya yang harus kita permasalahkan? Menurut saya, di situlah peran pemerintah menjadi sangat signifikan, ketika dikaitkan dengan upaya pemerataan ekonomi yang kurang berjalan maksimal.

Sejarah ilmu pengetahuan yang sudah dimulai dari abad ke-17 memang sedikit sekali menampilkan peran perempuan. Perempuan saat itu dianggap tidak kompeten untuk berpikir secara abstrak.

Apa yang dilakukan oleh Muhammad Yunus, penerima Nobel ekonomi Bangladesh, adalah hal yang sangat luar biasa. Mengapa pemerintah tidak mau melakukan hal yang sama? Tetapi nyatanya pemerintah tidak mau melakukan hal yang seperti itu, dengan pertimbangan bahwa pedagang kecil hanya memberikan sedikit keuntungan. Sebenarnya pemerintah bisa membuat aturan yang membatasi perusahaan besar macam Freeport atau menaikkan

pajaknya. Jadi, saya kira, kapitalisme harus berbarengan dengan *good governance.*

Tapi bukankah globalisasi juga masih menyisakan persoalan yang dilematis? Di satu sisi, diversitas dimungkinkan, namun, di sisi lain, perempuan masih didikte oleh pasar, seperti tampak dalam fenomena boneka Barbie yang kemudian oleh para pemodal besar penyeragamannya dapat berubah sesuai dengan pangsa pasar di mana Barbie *menjadi ikon di masing-masing tempat. Menurut Anda, bagaimana kelompok aktivis perempuan mengantisipasi sisi negatif globalisasi?*

Lagi-lagi, itulah mengapa dibutuhkan tegaknya *civil liberties.* Di dalam dunia kapital boneka seperti *Barbie*, dengan mata biru, rambut blonde bisa menjadi acuan pasar selama memberikan keuntungan sebesar-besarnya. Model seperti itu kemudian menjadi indentitas perempuan cantik, yakni bermata biru, putih, dan blonde. Tetapi ternyata kemudian *civil liberties* berkembang, karena bisa jadi lantaran adanya perkembangan pendidikan HAM. Kemudian muncullah *bratz,* yakni boneka sejenis *Barbie* dengan warna cokelat, hitam, kuning, dan bahkan ada yang ungu dengan warna mata dan rambut yang berbeda-beda. Sehingga yang menjadi kiblat bukan lagi model Marilyn Monroe, melainkan Jennifer Lopez dan Lucy Liu, misalnya.

Di sini, hendaknya globalisasi mesti dibarengi dengan *civil liberties* yang berkembang dan memberikan pilihan-pilihan yang beragam kepada perempuan. Bagi negara yang pendidikan dan HAM-nya belum kuat, perempuan akan terus menjadi obyek. Tetapi kalau pendidikan dan HAM kita sudah kuat, maka perempuan akan memanfaatkan globalisasi untuk terus berkembang, sebagai-

mana yang terjadi di Cina. Kita tahu bahwa Cina berusaha masuk menjadi anggota WTO (World Trade Organization). Padahal Cina dianggap memiliki budaya luhur, nilai lokal yang begitu kuat, dan lain sebagainya. Namun mereka berpikir bahwa bagaimanapun globalisasi sudah ada di depan mata, dan yang harus mereka lakukan adalah memanfaatkannya. Karena itu mereka dengan sadar memanfaatkannya.

Bagaimana tanggapan Anda mengenai adanya MDG's (Millenium Development Goal's)*? Apakah ia memberikan angin segar terhadap gerakan perempuan?*

Menurut saya program ini sangat penting. Dalam program ini kita mempunyai waktu sampai 2015 untuk mengejar semua ketertinggalan. Di dalam program ini dikatakan bahwa wajah dominan kemiskinan adalah perempuan. Oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah mengatasi masalah-masalah yang menimpa perempuan. Masalah perempuan yang diidentifikasi adalah masalah kemiskinan, kesehatan, budaya patriarkhis, dan lain sebagainya. Sebuah negara bisa mengatasi masalah kemiskinan kalau negara tersebut mampu mengatasi masalah-masalah perempuan. Oleh karena itu, program MDG's menjadi penting. Namun kita hanya punya waktu relatif singkat untuk segera bergerak.

> Untuk melihat secara jernih bahwa suatu hal adalah persoalan sosial, maka kita harus mempunyai *liberal mind*, artinya harus mempunyai sikap dan pikiran yang terbuka. Dari sinilah kemudian seseorang baru bisa menentukan posisi teori manakah yang akan dipakai untuk memecahkan masalah tertentu.

Menurut laporan PBB beberapa waktu lalu, kemiskinan negara kita sangat memprihatinkan. Sementara dalam realitasnya, kemiskinan itu berwajah perempuan. Sehingga, persoalannya menjadi semakin rumit karena ternyata statistik mengenai peran perempuan menurun. Sebagai contoh, kematian ibu melahirkan di rata-rata negara lain hanya 166 per 100.000 kelahiran, sementara di negara kita mencapai lebih dari 300 per 100.000 kelahiran. Belum lagi soal penurunan partisipasi kerja perempuan, termasuk juga dalam wilayah pendidikan dan partisipasi politik, sebagaimana telah saya sampaikan di atas. Bagaimana mungkin kita kalah dengan negara-negara di Afrika, yang tingkat IPU-nya, tingkat partisipasi politik perempuan mereka, lebih tinggi daripada negara kita. Sebab, partisispasi politik kaum perempuan di negara kita di bawah 11%, sementara di Afrika ada yang di atas 12%.

Padahal, partisipasi politik perempuan itu sangat penting. Kalau kita mau mengatasi masalah kemiskinan, dan kalau kemiskinan itu berwajah perempuan, maka kita membutuhkan politisi-politisi perempuan. Dengan jumlah penduduk perempuan yang sangat besar maka sangat tidak cukup hanya diwakili oleh sembilan% wakil perempuan dalam politik.

Memang, kaitannya dengan MDG's, kita hanya mempunyai waktu relatif singkat, sehingga seringkali kita pesimis. Bagaimana kita mau bekerja sama dengan anggota dewan, misalnya, jika di antara mereka ada yang beristri lebih dari satu. Artinya dia tidak bisa menghargai hak-hak perempuan. Kita juga kecewa dengan ulama yang kita anggap mampu berperan besar, tetapi ternyata masih menggunakan doktrin-doktrin yang melecehkan perempuan. Persoalannya tambah rumit ketika pemerintah daerah membuat kebijakan (perda-perda syariat Islam) yang kontra produktif,

namun dibiarkan oleh negara. Akhirnya, kalau kita kembali pada pandangan liberal maka yang dituntut adalah lebih pada wilayah individu. Kita tidak bisa berharap pada kelompok untuk menentukan keputusan-keputusan hidup kita. Akan tetapi, individulah yang seharusnya diperkuat untuk bisa menentukan kehidupannya mereka sendiri.

Terkait dengan kebebasan perempuan, dalam kritik sastra yang didasari telaah psikoanalisa dan teori linguistik posmodern terdapat konsep ecriture feminin. *Yaitu suatu upaya penulisan atau lebih sebentuk testimoni perempuan atas pengalaman atau peristiwa-peristiwa kebertubuhan yang melingkupi atau menimpa diri mereka, sekaligus bentuk perlawanan mereka terhadap logika phallus yang mendasari budaya patriarkhi. Mungkin Anda bisa menjelaskan ide yang digagas oleh* Helene Cixous *dan* Irigaray *ini, dan apa urgensinya untuk perempuan?*

Sebenarnya diskusi semacam ini bisa dimulai dengan Carol Gilligan yang mengatakan bahwa perempuan sebenarnya mempunyai etika yang sangat baik, dan etika ini juga bisa diadopsi oleh laki-laki. Salah satunya adalah etika kepedulian (*ethics of care*). Etika kepedulian ini sangat kuat dalam diri perempuan karena dia adalah satu-satunya makhluk (manusia) yang melahirkan. Dan karena perempuan bisa mengandung dan melahirkan inilah yang kemudian mengubah cara pandang mereka dalam melihat dunia. Mereka melihat dunia sebagai keterhubungan, sebagai dunia rahim yang luas. Karena mereka melihat bahwa jika perempuan bisa melahirkan manusia, maka semua manusia merupakan bagian dari diri mereka.

Cara pandang perempuan ini sangat berbeda dengan laki-laki yang memiliki sejarah panjang kekerasan. Laki-laki memiliki sejarah agresif karena mereka tidak memiliki pengalaman mengandung dan melahirkan. Ini pendapat Carol Gilligan. Dengan konteks semacam itulah, kemudian laki-laki kontemporer mengadopsi *ethics of care* dengan menjadi laki-laki feminis.

Kemudian soal *ecriture feminine*, perempuan mempunyai pikiran dan ekspresinya sendiri. Dan mereka merasa bahwa dunia mereka bisa diwujudkan dengan cara mereka dan itu akan membuat dunia lebih baik. Sebab, bagaimanapun harus diakui bahwa sejarah kekerasan sangat kental dengan budaya maskulin. Oleh karena itu, jika sejarah diisi dengan karakter feminin (dunia feminin) maka sejarah kekerasan seperti yang terjadi di Irak sekarang ini mungkin tidak akan terjadi. Dan mungkin jika George W. Bush mau memahami *ethics of care* mungkin ia akan mengurungkan niatnya memerangi Irak.

Ethics of care ini, menurut Helene Cixous, dianggap oleh budaya patriarkhi sebagai sikap cengeng, sehingga budaya patriarkhi menyusun budaya politik yang agresif, ekonomi yang akumulatif, etika lingkungan yang eksploitatif, dan lain sebagainya. Nah, Cixous berpendapat bahwa jika baik laki-laki maupun perempuan percaya bahwa *ethics of care* ini penting untuk menyusun dunia yang baru, berarti perempuan harus banyak menuliskan pengalaman-pengalaman mereka, sehingga kita kemudian bisa belajar untuk mewujudkan dunia yang penuh dengan *ethics of care*.

Oleh karena itu, Cixous berpendapat bahwa karena seksualitas perempuan selama ini tidak boleh ditulis atau tidak boleh dibagi dalam ruang publik, langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengadopsi *ethics of care* ini adalah dengan menuliskan seksualitas

perempuan. Sebenarnya seksualitas perempuan merupakan awal dari hubungan antar-manusia antara laki-laki dan perempuan melalui relasi seksual. Misalnya begini: kalau Anda peduli dengan hubungan seksual Anda, yaitu dengan bertanya kepada pasangan Anda, apakah dia orgasme atau apakah Anda telah memuaskan pasangan Anda? Semua itu sebenarnya merupakan kepedulian awal sebelum terjun dalam masyarakat. Ini adalah bentuk kepedulian terhadap *the other.*

> Adalah menjadi suatu yang jelas bahwa *civil rights* dan *civil liberties* adalah tanggung jawab negara. Maka, sangat disayangkan ketika pemerintahan kita melalaikan tanggung jawab tersebut. Sebab dalam perspektif *human rights* hal itu berarti pelanggaran negara terhadap *civil liberties* dan *political rights* warga.

Karena itu, jika ada etika kepedulian dalam seksualitas, maka ketika Anda masuk dalam kehidupan sehari-hari, Anda juga akan bersikap peduli terhadap *the other*. Pandangan ini sangat menarik, karena ternyata hubungan yang bersifat sangat privat mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam dunia publik. Selain itu, cara seorang perempuan merawat anak dan lain sebagainya jika diterapkan dalam mengatur negara ternyata akan mencapai hasil yang jauh lebih baik. Sehingga, Cixous mengusulkan untuk menuliskan pengalaman-pengalaman perempuan sebagai bahan untuk pembelajaran bersama.

Adalah kemestian buat bangsa ini, yang teramat majemuk, untuk menyadari pentingnya gagasan pluralisme. Celakanya, oleh banyak kalangan pluralisme pada akhirnya sering dipahami akan mengarah pada sinkretisme dan relativisme kebenaran. Bagaimana menurut Anda?

Di sinilah letak pentingnya sekularisme, di mana ada pemisahan antara yang privat, seperti agama, dengan yang publik. Dalam persoalan publik kita bisa merumuskan bersama mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Sebab, kita sebagai bagian dari publik harus mengikuti kebenaran yang sudah disepakati bersama dan akan menerima hukuman jika kita melakukan kesalahan atau melanggarnya. Tetapi dalam wilayah privat di mana agama berada, menurut saya, tidak ada aturan (publik) mengenai yang benar dan yang salah. Karena kebenaran dalam wilayah privat dikembalikan kepada individu masing-masing. Jadi, misalnya, jika seseorang menganggap bahwa sembahyang menghadap ke timur, selatan, utara atau barat itu boleh, maka tidak ada sanksi (publik) bagi dia. Karena itu merupakan urusan dirinya dengan Tuhan. Atau itu semua kembali pada pilihan masing-masing.

Pemahaman seperti inilah yang mungkin tidak dipahami oleh kelompok yang menentang pluralisme. Oleh karena itu, mereka mencampuradukkan agama dengan aturan publik. Bagi saya, agama itu memang tidak seharusnya berada di wilayah publik, karena memang tidak ada *manual book*-nya. Apakah orang mau berpuasa atau tidak, mau berjilbab atau tidak adalah pilihan dan tidak bisa dipaksakan oleh kelompok tertentu. Jadi, pada dasarnya pengertian-pengertian yang secara *clear* dan jelas inilah yang tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok yang mencoba mendesakkan agama ke ruang publik. Kalau mereka sadar bahwa agama bukanlah wilayah publik, tentu tidak akan terjadi kekerasan, dan mereka tentu saja akan menerima pluralisme.

Celakanya, kelompok-kelompok yang memaksakan agama masuk ke dalam wilayah publik telah memperalat ayat-ayat kitab suci. Sebagaimana pernah saya kemukakan bahwa fenomena ini

sebetulnya bisa kita analisis dari aspek pemakaian bahasa. Misalnya, ketika kita mengucapkan *assalâmu'alaykum,* kita sebetulnya sudah menegaskan identitas kita dan merasa setingkat lebih baik daripada orang yang hanya mengucapkan salam dengan kata selamat siang, misalnya. Pemakaian bahasa seperti ini dalam ruang publik menunjukkan bahwa sebenarnya kita telah bermain dengan memakai politik identitas. Hal seperti ini, bagi saya, berbahaya.

Bagi saya, pluralisme memang mempunyai pengertian yang dapat mengarah pada sesuatu yang sangat relatif. Kalau kita memasukkan agama ke dalam ruang pribadi kita maka ia akan menjadi sangat relatif. Lalu pertanyaannya: apakah orang yang menganggap agama relatif kemudian dianggap murtad ataukah ia bukan manusia lagi? Tentu saja tidak demikian. Memang pluralisme menjadi relatif karena membiarkan orang untuk memilih, membiarkan suara-suara lain masuk, tidak mengekslusifkan iden-titasnya, dan tidak *fixed*.

Kita harus mengakui bahwa kalaupun kita beragama Islam, misalnya, sebenarnya hanya karena kita kebetulan lahir dari keluarga Muslim. Kalau kita lahir sebagai orang Israel dan Yahudi, tentu kita juga tidak mempunyai pilihan lain. Terus terang saya selalu terganggu jika menerima telepon dan suara di seberang sana mengawali dengan *assalâmu'alaykum*. Bagaimana jika yang menerima itu bukan Muslim atau tidak bisa berbahasa Arab? Itu berarti kita selama ini telah memaksakan dunia privat kita pada dunia privat orang lain.

Artinya, apakah jika demikian pluralisme memang mengarah pada relativisme?

Bagi saya, pluralisme memang mempunyai pengertian yang dapat mengarah pada sesuatu yang sangat relatif. Kalau kita memasukkan agama ke dalam ruang pribadi kita, maka ia akan menjadi sangat relatif. Lalu pertanyaannya: apakah orang yang menganggap agama relatif kemudian dianggap murtad ataukah ia bukan manusia lagi? Tentu saja tidak demikian. Memang pluralisme menjadi relatif karena membiarkan orang untuk memilih, membiarkan suara-suara lain masuk, tidak mengekslusifkan identitasnya, dan tidak *fixed*. Kalau saya memakai atribut agama tertentu, maka hidup saya akan *fixed*, dan saya hanya akan berteman dengan orang tertentu yang seagama dengan saya. Demikian juga saya akan mencari pasangan hidup yang seagama, makanan, buku-buku, dan seterusnya. Tetapi bagi orang yang tidak mematok identitasnya, ia akan menjadi relatif dan fleksibel. Dengan begitu, bagi saya, kita bisa maju kalau semua orang memilih atas dasar pilihannya sendiri, bukan atas dasar kelompoknya atau atas dasar teks hidup yang sudah pasti atau didesain oleh agamanya bukan oleh dirinya sendiri.

Ada yang mengatakan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang toleran dengan bukti sejarah di mana sejak dahulu sampai sekarang warga Indonesia cenderung mudah untuk menerima agama, kelompok, dan paham asing. Bagaimana menurut Anda?

Apakah benar seperti itu? Coba Anda lihat sejarah Indonesia 1945, 1965, dan 1998. Apakah itu memperlihatkan bahwa kita adalah bangsa yang toleran? Yang terjadi dalam budaya kita belakangan ini sebetulnya adalah Arabisasi. Kalau kita melihat budaya asli kita, sebetulnya berangkat dari kepercayaan animisme.

Namun kemudian ketika Islam masuk ke Nusantara yang terjadi adalah percampuran antara Islam dengan budaya animisme dan mistisisme yang tidak sama dengan budaya Arab. Jadi yang terjadi belakangan ini adalah usaha Arabisasi yang sebetulnya tidak sesuai dengan karakter budaya kita. Saya masih ingat bagaimana nenek saya menjalankan ajaran agama Islam sesuai dengan budaya lokal dia. Karena waktu itu tidak ada lembaga seperti MUI yang demikian mudah membuat fatwa-fatwa untuk melarang suatu keyakinan Islam tertentu yang dianggapnya menyimpang. Dulu praktik-praktik keagamaan yang memadukan budaya lokal atau kepercayaan dibiarkan, tidak menjadi masalah.

Perlu diingat bahwa Islam Indonesia tumbuh berdampingan dengan budaya-budaya lokal yang ada di nusantara. Lalu kemudian muncul orang-orang yang berpendidikan Timur Tengah dan mengatakan bahwa praktik Islam di Indonesia salah, sesat. Mereka sendiri tidak menyadari bahwa budaya yang mereka impor adalah budaya yang sama sekali berbeda dengan budaya kita.

Ketika salat idul fitri, dan kebetulan waktu itu saya berada di Prancis, teman saya yang berasal dari Iran membaca doa dalam bahasa Persi, demikian juga teman saya yang dari Amerika membaca doa dalam bahasa Inggris, sementara saya berdoa dalam bahasa Arab. Mereka merasa heran dengan cara berdoa saya. Lantas mereka bertanya kepada saya, mengapa saya tidak memakai bahasa Indonesia? Saya sendiri justru merasa heran dengan mereka yang memakai bahasa ibu mereka untuk berdoa. Ini kemudian menjadi tanda tanya bagi saya. Namun akhirnya saya pun menyadari, bahwa semestinya boleh berdoa dalam bahasa Indonesia, mengapa tidak? Tetapi, ironisnya, beberapa waktu lalu ada orang yang dihukum karena berdoa atau salat dalam bahasa Indonesia.

Alasan kenapa ia dipenjarakan karena MUI tidak menghendaki praktik beragama seperti itu.

Wawancara dilakukan di Depok, 24 Mei 2007

Percakapan dengan

Hamid Basyaib

Hamid Basyaib, Direktur Program Freedom Institute, peneliti di Aksara Foundation dan The Indonesian Institute. Mantan Kordinator Jaringan Islam Liberal (JIL) ini pernah menjadi wartawan *Republika* dan majalah *Ummat*.

Semangat besar al-Quran adalah individualisme. Dengan kebebasannya manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri—pada Tuhan, kelak. Batas kebebasan seseorang adalah kebebasan orang lain. Artinya, ketika kebebasan seseorang, dengan keyakinan subyektifnya, merampas kebebasan beragama dan berkeyakinan orang lain, misalnya, maka berhadapan dengan hukum. Sebab pemaksaan keyakinan terhadap orang lain tidak menghargai perbedaan yang paling elementer, karenanya melanggar HAM. Berbeda dengan keyakinan religius yang tidak bisa dikompromikan (dogmatis), pada urusan publik, yakni politik, semuanya bisa dikompromikan. Bisa terjadi tawar-menawar—bukan relativitas moral—sehingga tercapai *common denominator* di tengah perbedaan. Karena itu pula jangan membawa urusan privat ke dalam ranah publik.

Apa yang Anda pahami tentang sekularisme, apakah berbeda dengan konsep yang pernah ditawarkan Cak Nur ketika itu? Dan apakah perlu ada perubahan paradigma dalam melihat sekularisme saat ini?

Ide sekularisme muncul pertama kali di Eropa. Tetapi jauh sebelum itu, banyak sekali tonggaknya. Kalau kita ingin mengambil tonggak yang paling awal, yang paling besar, tentunya dari Yunani, yaitu dari pemikir-pemikir besar Yunani, kemudian berevolusi hingga ke tonggak-tonggak pada masa modern, yaitu pada masa Prancis. Melalui Revolusi Prancis, mereka menyuarakan keinginan untuk mengurangi sejauh mungkin peran agama yang diwakili oleh Gereja Katolik dalam urusan-urusan publik. Itu kata kuncinya.

Jadi, mereka ingin agama yang *notabene* di wilayah privat, karena menyangkut batin manusia, harus diserahkan kepada individu masing-masing. Idenya sebetulnya sangatlah gamblang dan jelas – meskipun suasana saat itu sangat revolusioner. Karena, seperti biasa, ketika kita berada di wilayah tertentu, pada hal-hal yang gamblang pun kita kadangkala tidak punya jarak, sehingga kita ikut begitu saja. Begitu kita menarik diri ke luar dan melihat dari luar, persoalannya menjadi sangat gamblang, karena itu dengan sendirinya benar. Itu sebetulnya *truism*.

Jadi bahwa urusan kebatinan atau batiniah adalah urusan masing-masing, tidak bisa dibantah oleh siapapun. Semua orang pasti tahu bahwa hati kita yang tahu adalah kita sendiri dan Tuhan – kalau memang kita percaya Tuhan. *That is it.* Karena di luar itu kita tidak tahu. Maksud saya, manusia berbahasa bukan hanya untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan yang sebenarnya, tetapi justru seringkali untuk menyembunyikannya. Oleh karenanya

dinamakan *basa-basi*. Itu menunjukkan bahwa hati manusia tidak ada yang tahu.

Dengan dasar itu, pemisahan antara agama dari kehidupan publik, menurut saya, adalah sesuatu yang pasti benar. Karena latar belakangnya begitu gamblang bahwa gereja waktu itu yang mewakili agama Katolik dan dengan sendirinya dianggap sebagai perpanjangan tangan langsung dari Tuhan. Gereja mengurusi semua hal sejak dari dalam kandungan. Bahkan mereka sudah menarik pajak kepala sejak di dalam kandungan. Semua hal diurus gereja: dari soal perkawinan sampai partai politik. Pokoknya dari A sampai Z diurusi gereja. Ini berlangsung ratusan tahun di negara-negara Eropa dengan derajat yang masing-masing berbeda dan yang pasti lebih parah dari dunia Islam. Di dunia Islam, khilâfah pada dasarnya sekular (nanti kita bahas tersendiri).

Di Eropa sejarahnya pekat sekali. Setiap orang diatur dari ujung rambut sampai ujung kaki. Karena itu, ledakan pemberontakannya pun besar. Sebab ledakan selalu sebanding dengan tekanan. Yang paling tragis di Prancis, sebuah negara yang dijuluki Putri Gereja Katolik. Maka tidak heran jika ledakan pemberontakan yang paling keras terjadi di sana. Evolusinya seperti itu.

Mereka, masyarakat Eropa, kemudian sepakat bahwa agama, dalam hal ini Katolisisme, tidak mungkin dibasmi karena penganutnya masih banyak, tapi kekuasaan politiknya yang eksesif tidak boleh dilanjutkan. Kalau agama berpolitik, orang akan mendapatkan politik yang tidak bermutu, karena kitab suci tidak menyediakan pemikiran-pemikiran politik, manajemen berpolitik, dan sebagainya. Di sisi lain, orang juga tidak akan mendapatkan pemahaman agama yang benar karena agamanya pasti koruptif, lantaran mencampuri politik. Menjadi tidak jelas lagi, waktu itu, ketika meli-

hat seorang pastur apakah ia tokoh agama atau tokoh politik. Jadi identitasnya menyatu. Dan efeknya sangat luar biasa.

Lantas mereka sepakat. Keganasan agama harus dijinakkan, jangan ditumpas. Kemudian Katolik diberi tempat, namanya Vatikan, yang besarnya hanya 44 hektare, kalah dari bangunan Rasuna Episentrum yang mencapai 53 hektare, kemudian dikirim kira-kira seribu tentara sampai sekarang. Mungkin penduduknya hanya dua ribu, terdiri dari seribu pastur dan seribu tentara. Itulah yang dianggap sebagai kerajaan spiritual, kerajaan agama, benar-benar dipisah tegas dari kekuasaan politik.

Inti dari sekularsime adalah jangan membawa urusan privat ke dalam urusan publik. Yang termasuk urusan privat di sini adalah keyakinan-keyakinan religius yang tidak bisa dikompromikan. Padahal pada urusan publik, yakni politik, semuanya bisa dikompromikan, artinya bisa tawar-menawar – bukan relativitas moral.

Hal ini merupakan kompromi yang hebat sekali. Dari satu segi kita kagum, tentunya, setelah melewati proses yang berdarah-darah dan korbannya pun besar. Tidak pernah terjadi di tempat yang lain bagaimana darah yang tertumpah begitu banyaknya, sehingga mereka sangat traumatik. Meskipun di Islam atau di agama lainnya tidak terjadi sedahsyat itu, tapi sebetulnya semua agama mempunyai sisi gelap.

Itulah yang terjadi hingga sekarang, agama dikandangkan di Vatikan. Paus dipilih seumur hidup, bila mati baru diganti. Kemudian mereka mengirim pastur ke berbagai penjuru negeri, terutama ke negara-negara berkembang dan miskin. Tetapi karena umumnya warga negara Eropa kurang peduli atau mungkin sudah dewasa sekali beragamanya, sehingga mereka tidak ekshibisionis.

Ini berbeda dengan Amerika. Mereka tidak punya sejarah seperti itu, karenanya agama, terutama Protestan, sekarang kelihatan bergairah dan kaum fundamentalis semakin banyak.

Jadi, inti sekularisme sebetulnya bukan membenci agama atau hendak menumpas Tuhan. Tuhan itu sesuatu yang tidak pasti adanya, namun kenyataannya banyak orang yang percaya. Dan sekularisme ingin mengatakan, silakan saja. Yang penting keyakinan Anda yang tidak bisa dibuktikan itu jangan dipaksakan dan diterapkan untuk orang lain.

Berbeda dengan orang komunis. Bagi kaum komunis, kita tidak boleh bertuhan. Kalau seseorang mengakui keberadaan Tuhan, maka ia dibunuh dan dipenjara. Jadi, batin orang *dibedah*. Itu sisi buruk komunisme.

Sementara sekularisme menyilakan kita untuk percaya pada agama ataupun tidak. Yang terpenting adalah bagaimana kita mencari *common denominator* atau titik temu dari perbedaan-perbedaan di level sosial. Saya tidak peduli agamamu apa dan Tuhan mana yang kau sembah. Namun demikian, yang penting bagaimana kita membangun jembatan yang kuat, membuat gedung pertunjukan musik secara menarik, menciptakan sistem politik yang baik, membuat manjamen sosial yang baik pula. Apapun motifnya, ihwal agama adalah urusanmu. *Lakum dînukum wa liya dîn*, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itu sekularisme yang sebetulnya.

Dengan ini saya ingin mengatakan bahwa ada banyak kesalahpahaman yang tidak perlu. Pertama, inti dari sekularsime adalah jangan membawa urusan privat ke dalam urusan publik. Yang termasuk urusan privat di sini adalah keyakinan-keyakinan religius yang tidak bisa dikompromikan. Padahal pada urusan publik, yakni politik, semuanya bisa dikompromikan, artinya bisa tawar-mena-

war – bukan relativitas moral. Misalnya, saya ingin membangun gedung dan duitnya ada sekian. Sementara, menurut Anda, lebih baik bangun pabrik. Di sini terjadi tawar-menawar untuk mendapatkan titik temu. Itu maksudnya.

Kalau seseorang atau sekelompok orang minta sesuatu berdasarkan keyakinan religius yang *notabene* tidak bisa dicek, hanya berdasarkan keyakinan subyektif, bagaimana jadinya? Itu tidak mungkin. Karena, mereka cenderung menutup jalan kompromi. Padahal politik adalah *the art of compromise, the art of possible,* sesuatu yang serba mungkin, bukan sesuatu yang pasti. Sedangkan agama adalah sesuatu yang pasti bagi para penganutnya. Akibatnya terjadi komplikasi. Itu yang terjadi di Eropa di masa lalu, karena absolutisme. Ajaran agama dari atas, dari Tuhan. Bagaimana ia mau dicek? Ia tidak bisa dibuktikan. Hal yang sama juga terjadi di Iran, misalnya, dengan teokrasinya.

Batas kebebasan seseorang adalah kebebasan orang lain. Di situlah kemudian ada hukum sebagai perangkatnya. Jadi semuanya diatur. Anda bebas, tetapi kalau merampas kebebasan orang lain akan berhadapan dengan hukum.

Lagi-lagi, inti sekularsime bukan membenci agama, tetapi menempatkan agama pada proporsinya. Sejatinya sesederhana itulah sekularisme. Mestinya ia tidak harus menjadi perdebatan besar, karena jelas sekali.

Yang dikemukakan Cak Nur sebetulnya adalah sekularisme di level sosial yang juga bisa dibenarkan. Sementara konsentrasi saya adalah di level politik. Level sosial adalah sesama umat beragama. Yang dibidik oleh Cak Nur adalah internal umat Islam yang masih menganggap begitu banyak hal adalah sakral. Begitu banyak

hal sosial direligiuskan, dispiritualkan, disakralkan. Makanya dia mengatakan bahwa yang sakral hanya satu, yaitu Allah itu sendiri. Bahkan agamanya sendiri tidak sakral. Itu bagi Cak Nur.

Itu juga merupakan upaya Cak Nur untuk menerobos anggapan yang sangat berakar, yang merupakan kecenderungan umum umat beragama, yakni menerapkan semua hal berdasarkan perspektif agama. Anggapan ini diklaim ada dasarnya: bahwa agama (Islam) *kâffah*. Atau, pernyataan bahwa yang tidak memakai aturan Muhammad berarti ia bukan umatnya, dan sebagainya. Padahal, sebetulnya, itu hasil dari porses sejarah dan mungkin juga hasil penafsiran.

Jadi, sekali lagi, inti sekularisme bukan membenci agama, tapi menempatkan agama pada proporsinya yang tepat.

Lantaran gagasan privatisasi ataupun prinsip pemisahan ilmu pengetahuan dari agama, sekularisme kemudian dianggap berujung pada ateisme dan menggiring pada pola hidup yang tidak bermoral. Bagaimana mendudukkan tuduhan seperti itu?

Justru sekularisme harus disuarakan terus, kalau memang Anda ingin mengubah pandangan umum. Jadi, pertama-tama, berikanlah pemahaman yang tepat dan proporsional. Kedua, yang keberatan itu sebenarnya siapa?

Menurut saya yang keberatan adalah para pemuka agama, bukan penganut agama. Sebab, ada soal kepentingan di sini. Di Katolik yang paling berkepentingan adalah para pastur dan paus. Ini soal *power*. Bukan hanya *power* dalam pengertian politik kelompok pengambil keputusan atau yang bisa memerintahkan, melainkan *power* dalam arti *political influence.* Hal ini penting bagi mereka.

Tentu Anda tahu bagaimana enaknya ketika seseorang menjadi pemuka. Sehingga, tidak heran jika mereka yang paling bersemangat. Di Eropa pun seperti itu. Jadi keberatan dan tuduhan pejoratif terhadap sekularisme tidak ada yang baru sebetulnya.

Ketika para pengusung ide sekularisme menggusur otoritas gereja di wilayah publik, mereka, para pemuka agama, habis-habisan bertahan. Tetapi setelah bertahun-tahun mereka akhirnya kalah. *Nah* sebenarnya kelahiran Protestan pun untuk menggusur kesahihan wewenang pastur dan paus dari internal gereja. Martin Luther ingin mengatakan bahwa untuk berhubungan dengan Tuhan tidak harus lewat pemuka agama, semua orang boleh dan bisa. Hal ini sebetulnya adalah upaya sekularisasi, sebab waktu itu untuk berhubungan dengan Tuhan harus melalui satu gereja. Yang dilakukan Martin Luther masih tetap dalam kerangka agama. Yang awam sebenarnya saat itu tidak terlalu peduli meskipun para pemukanya bertahan, walaupun akhirnya kalah.

Sekarang pun polanya sama. Yang paling keberatan adalah mereka yang berkepentingan. Sebetulnya kepentingan-kepentingannya adalah kepentingan non-agama. Ini yang harus dicatat bahwa lewat agama mereka mengagregasikan kepentingan non-agama. Kepentingan agamanya itu sendiri kan tidak ada. Anda mau salat, ya jalankan saja, sementara yang lain-lain itu non-agama, termasuk dalam hal fasilitas yang pada dasarnya non-agama, non-spiritualitas. Sedangkan masalah spiritualitas sebenarnya sudah beres. Jadi perlu dijelaskan, yang keberatan terhadap sekularisme tidak lain adalah para pemuka agama dan tentu jumlahnya hanya sedikit. Tapi mereka kemudian mengklaim sebagai representasi dari umatnya. Apa betul seperti itu?

Klaim representasi ini tentu juga dinamis. Di masa lalu klaim representasi ini tinggi, tapi kemudian karena ada kemajuan tek-

nologi, diversifikasi sosial, dan lain-lain, kemudian mengikis *re-presentativeness* terus-menerus. Orang Protestan, misalnya, sudah tidak percaya lagi dengan orang Katolik. Masalahnya, Protestan kemudian mengental menjadi semacam Katolik baru dan pada akhirnya sama saja.

Ini juga penyakit yang diidap *The New Wave,* yaitu ketika orang non-agama berkumpul membuat syariah dan ritual sendiri, pada akhirnya persis seperti agama. Kelompok seperti Brahma Kumaris, Ananda Marga atau yang lain semua menjadi agama baru. Dan mereka memenuhi syarat untuk disebut sebagai agama karena ada kitabnya, yang dikarang oleh ketuanya sendiri, ada nabi-nabinya, ada sahabatnya, ada pemukanya, bahkan ada pakaian seragamnya.

Anda tadi menyinggung soal ateisme. Coba sekarang Anda balik! Menurut saya orang seperti Richard Dawkins dan kawan-kawan yang sekular dan ateis, jutru jengkelnya bukan main terhadap sifat eksesif agama. Mereka melihat agama dalam posisinya sebagai ilmuwan. Orang seperti Daniel Denneth, Richard Dawkins – pendeknya kelompok-kelompok itu, ada AM Wilson dan Bertrand Russell sebelumnya – yang justru mereaksi sifat eksesif agama. Apa dasarnya agama, yang tentunya diwakili oleh pemuka-pemukanya, mengklaim bisa mengerti semua hal, berpretensi mengatur hidup orang lain – dari soal kesehatan reproduksi, mengecat rambut, termasuk aspirasi politik, kegiatan ekonomi, atau preskripsi-preskripsi agama yang, menurut mereka, tidak bisa dicek?

Persoalannya, kalangan agama bernafsu sekali, maka tidak heran jika kalangan ilmuwan jengkel terhadap setiap kelompok agama yang tidak ada nalarnya, tidak ada kerangka pikirnya, tidak bisa mempertanggungjawabkan klaimnya sehingga bisa diikuti oleh orang lain. Tidak ada metodologinya tapi mengklaim diri yang paling benar.

Prinsip ilmu pengetahuan adalah harus ada metode yang bisa diikuti oleh setiap orang. Kalau orang mengikuti metode yang sama, hasilnya kemungkinan besar akan sama. Sementara agama tidak begitu, ia berdasarkan subyektivitas murni tapi pretensinya congkak sekali, tidak bisa dicek.

Jadi berpikirnya dibalik. Bagi saya memang ada keluhan dari orang-orang seperti Richard Dawkins dan kawan-kawan, bahwa agama yang mengklaim diri sebagai ilmu tapi teramat sombong. Ilmu justru seharusnya rendah hati. Kenapa? Karena ilmu memakai postulat-postulat yang gamblang, serta tidak berhenti pada postulat dan asumsi semata, tapi dieksperimentasikan. Setelah itu diumumkan bahwa kalau kita mengikuti prosedur dari A, B hingga G hasilnya X. Kalau ada yang tidak beres pasti ada kesalahan prosedur, dan itu bisa dicek bersama-sama. Jika setelah dicek ternyata salah maka harus mundur. Jangan lupa, komunitas ilmiah kritis sekali. Kalau ada yang keliru maka tidak dipakai lagi. Selain itu, mereka rendah hati dalam mengumumkan hal-hal yang ada di belakang pikiran mereka. Sebaliknya agama tidak seperti itu. Agama sepenuhnya sombong, sementara ilmu rendah hati. Agama tidak bisa dicek. Ia tidak bisa diotak-atik, sebaliknya langsung main atur-atur. Itu yang saya maksud sombong. Agama juga berpretensi mengatur semuanya.

> Jadi perlu dijelaskan, yang keberatan terhadap sekularisme tidak lain adalah para pemuka agama dan tentu jumlahnya hanya sedikit. Tapi mereka kemudian mengklaim sebagai representasi dari umatnya.

Memang secara retorik kadang-kadang ilmuwan sombong, tapi tidak perlu dipermasalahkan. Coba lihat lebih dalam dari itu, justru metodologinya rendah hati. Dalam arti ia dicoba, dites, dan

dikomunikasikan. Jika kemudian dikritik dan ternyata memang salah, maka sang ilmuwan akan menerima itu dan masuk laboratorium lagi. Seperti Saiful Mujani, misalnya, ketika prediksinya meleset kemudian ia mencoba lagi. Ini sikap rendah hati. Dan itulah ilmu pengetahuan.

Ada anggapan bahwa ilmu pengetahuan atau rasionalitas memiliki batas di mana ia harus berhenti. Dan di situlah Tuhan atau agama dihadirkan sebagai jawaban. Menurut Anda?

Pertama-tama, pernyataan-pernyataan bahwa rasionalitas ada batasnya adalah pernyataan orang yang sembrono atau malas. Mereka belum apa-apa sudah mengatakan ada batas, padahal dipakai saja belum. Itu sama halnya ketika saya mengatakan bahwa batas Indonesia ini adalah Bandung, sementara saya belum ke Bandung. Seharusnya saya cek dulu apakah benar Bandung adalah batas Republik Indonesia. Mungkin bisa benar atau salah. Orang-orang yang menyatakan seperti itu belum ke mana-mana tapi sudah mengambil kesimpulan. Lagi-lagi, semua itu lebih menggambarkan ketundukan mereka pada ayat-ayat kitab suci. Padahal klaim-klaim mereka akan keterbatasan rasio tidaklah valid, karena mereka belum pernah menerapkan rasio.

Kedua, kalaupun benar, tapi kita tidak pernah tahu di mana batasnya, katakanlah bahwa rasionalitas manusia itu ada batasnya, tapi di mana batasnya. Apakah mereka tahu? Tidak tahu. Berarti, menurut saya, cara yang paling bisa dipertanggungjawabkan, paling valid, sekaligus paling bijaksana adalah mengujinya. Sekalipun dia berbatas kita tetap mengujinya. Itulah yang dilakukan oleh ilmu secara terus-menerus, sehingga yang disebut batas itu menjadi sangat relatif. Orang dari dulu mengatakan, beratus-ratus tahun

lalu, bahwa rasionalitas ada batasnya tapi ilmu tidak menyerah. Setelah didatangi batasnya ternyata bukan di situ. Demikian seterusnya dan ternyata setelah ditelusuri batasnya semakin menjauh. Juga yang penting dicatat, bahwa orang-orang yang seharusnya mengatakan bahwa rasionalitas ada batasnya adalah ilmuwan, bukan orang agama. Karena kalangan agama tidak pernah memakai rasionalitasnya.

Jadi lebih baik kita tidak perlu mempedulikan itu. Yang penting, kalau kita ingin bicara, adalah manfaatnya. Dicoba saja terus, tanpa memikirkan batasnya. Seperti ketika dikatakan bahwa di sungai banyak kepitingnya. Jangan kemudian langsung percaya tanpa menceburkan kaki ke sungai untuk membuktikan ada kepiting atau tidak. Kalau ada, menggigit tidak. Kalau menggigit tarik kaki itu pindah ke sungai yang lain yang belum tentu ada kepitingnya. Jangan karena anggapan di sungai itu banyak kepitingnya kemudian tidak usah memasukkan kaki.

Dengan ilmu kita mengerahkan segala daya dan upaya, eksperimentasi laboratorium, mengerahkan pikiran-pikiran terbaik untuk menemukan jawaban yang kita cari. Kalau dengan ilmu tidak ketemu, apalagi dengan agama yang tidak pernah melakukan eksperimentasi seperti itu. Aneh sekali kalau ada orang mengatakan bahwa ilmu ada batasnya dan batasnya itu adalah agama. Berarti agama lebih tinggi dari ilmu. Menurut saya, anggapan itu tidak masuk akal. Sebab, agama tidak melakukan eksperimentasi apapun. Agama hanya berdasar pada doktrin, lantas bagaimana mau diandalkan.

Jadi menurut saya terjadi paralelisasi. Jangan mencoba-coba mencampuradukkan atau menjadikan ilmu dan agama sebagai tahap-tahap kebenaran. Menurut saya, sebaiknya paralel saja, berja-

lan sendiri-sendiri dan tahu batasnya masing-masing. Batas dalam arti wilayah. Begitu saja. Jangan mencoba menggabungkan ilmu pengetahuan dengan agama. Karena itu tidak akan ada gunanya. Yang terjadi pada akhirnya adalah apologetisme. Mungkin bisa terjadi dari dua belah pihak.

Ada juga kalangan ilmuwan yang percaya pada pernyataan *god of the gap*, yakni ketika mereka sudah mentok lalu mengambil alternatif agama. Tapi jumlah ilmuwan seperti ini sedikit. Umumnya ilmuwan tidak seperti itu. Jadi kita menggunakan istilah bahwa antara ilmu dan agama memakai jalurnya masing-masing. Saya kira ini istilah yang netral.

Anda tadi menyinggung soal integrasi ilmu pengetahuan dan agama, bagaimana pandangan Anda soal islamisasi ilmu pengetahuan?

Menurut saya, itu adalah cara pendekatan yang apologetik. Mereka yang mengatakan seperti itu bukanlah ilmuwan. Mereka adalah *free rider.* Dalam arti bahwa setelah para ilmuwan banting tulang, berdarah-darah, bekerja keras, mengabdikan seumur hidupnya untuk mencari kebenaran, tiba-tiba kemudian diklaim oleh kalangan agama sembari mengatakan bahwa temuan itu sudah ada di dalam kitab suci, atau dalam konteks Islam di dalam al-Quran. Mereka bicara seperti itu dari *langgar* mereka tanpa upaya ilmiah.

Lantas bagaimana sebetulnya pertanggungjawaban etiknya? Charles Darwin pada usia 26 pergi ke Galapagos, dengan risiko terkena malaria dan sebagainya, untuk mengetahui kenapa hidup ini aneh sekali, mau tahu kenapa ada daging, bagaimana dan dari mana kehidupan ini. Dia mencatat temuan-temuannya berpuluh-puluh tahun. Namun setelah dia menulis buku, itupun dengan rendah hati,

The Origin of Species, tiba-tiba kalangan agama mengklaim bahwa ini sudah ada di al-Quran. Kenapa saya mengatakan rendah hati, karena di buku itu ia mengatakan ada *missing link*. Dari manakah asal-usul kita ini? Kalau dari monyet tapi ada yang putus, dan dia mengakui belum menemukan jawaban yang pasti. Begitupun juga teori Einstein diklaim sudah ada di dalam al-Quran, yakni konsep tentang ruang angkasa.

Jadi kerangka besarnya saja yang diklaim kalangan agama. Sebetulnya itu hanyalah klaim kosong, dalam arti bahwa mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan pernyataan mereka. Yang ada dalam kitab suci garis besar sekali. Memang menakjubkan. Saya pribadi takjub. Tapi kita tidak boleh berhenti takjub, apalagi bangga hanya karena di kitab suci kita ada. Kalau memang betul-betul ingin mendapat kebenaran, kitab suci harus dipakai sebagai, katakanlah, mungkin salah satu inpirasi, bukan satu-satunya inspirasi. Sebagai inspirasi harus dicoba, dieksperimentasi seperti yang dilakukkan oleh kaum ilmuwan. Kalau hanya berhenti pada pernyataan-pernyataan umum seperti itu, lantas apa gunanya.

Afghanistan adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan, di mana segelintir orang memaksakan kehendaknya, mengajak banyak orang kembali ke masa silam (penerapan syariat Islam), setelah itu tidak tahu lagi mau ke mana. Karena bagaimanapun kita yang hidup di masa kini tidak mungkin kembali lagi ke masa silam.

Itu sebabnya di dunia Islam, saya kira, walaupun al-Quran begitu banyak memberi *hints*, aba-aba, dan tanda tentang beberapa hasil temuan ilmuwan, tidak ada yang maju sedikitpun. Karena mereka berhenti pada kebanggaan yang sebetulnya untuk menutupi inferioritasnya berhadapan dengan kegairahan keilmuan

orang lain. Orang lain tidak hanya berhenti di situ. Mereka kerja keras, pergi dari satu tempat ke tempat lain. Sementara orang Islam dininabobokan hanya oleh pernyataan-pernyataan yang pada titik tertentu tidak ada gunanya sama sekali, bahkan bisa menimbulkan kekonyolan-kekonyolan. Seperti di Pakistan, misalnya, ada orang membuat reaktor nuklir, kalau tidak salah, berdasarkan ayat al-Quran. Ada juga yang mau mengukur kecepatan malaikat dan lain-lain. Implementasinya tidak bisa setelanjang itu, harus banyak stasiun antara. Kalau betul, katakanlah dia diilhami oleh al-Quran tentang kecepatan malaikat, persoalan pertama, kecepatan di al-Quran disebut dengan istilah yang bermacam-macam. Kecepatan itu tidak pernah satu, seperti disebutkan persamaan kecepatan malaikat sama dengan 5000 tahun, satu detik malaikat kecepatannya lebih dari 5000 tahun di dunia. Apakah kecepatannya 5000 kilometer perjam? Ada macam-macam penjelasan. Artinya, tidak bisa semudah itu, harus banyak antaranya. Oleh karenanya upaya macam itu tidak bisa memenuhi kualifikasi ilmiah.

Jadi, selama sikap kita masih apologetik seperti itu, hanya dengan bermodalkan satu-dua statemen, lalu kita mengatakan bahwa kitab suci kita lebih lengkap dan lebih dahulu, itu tak lain pernyataan kosong dan tidak berguna sama sekali.

Setiap agama, terutama semit, bersifat eksesif dan ekspansif. Karena itulah ia mempunyai hasrat yang sangat besar untuk masuk ke wilayah publik, termasuk ke ranah politik. Bagaimana Anda melihat persoalan ini?

Pertama, dalam pemahaman saya, agama tidak dimaksudkan untuk menjawab semua hal. Ini harus disadari dulu dengan rendah

hati. Sementara, kalangan agama terlalu yakin bahwa agama mampu menjawab semua hal. Kalaupun agama diyakini berasal dari luar sejarah, dia muncul dalam konteks kesejarahan tertentu. Ini kunci dasarnya. Ya, kita sepakat bahwa agama dari luar sejarah, dia dari Tuhan, dari wahyu. Tetapi, dia turun tidak dalam keadaan vakum. Ia turun dalam konteks geografi tertentu, terutama sosio-kultural, sosio-ekonomi dan sistem politik tertentu. Kemudian agama berada di tengah para pelakunya yang tak lain adalah manusia biasa, manusia yang berada di dalam lingkup budaya. Jadi itu dulu yang harus dipahami. Karena itu, otomatis agama tidak akan bisa berlaku selamanya, sepanjang sejarah dan di semua tempat. Tapi dia berevolusi. Kristen, misalnya, telah berevolusi. 2000 tahun yang lalu Kristen turun di Kana'an, lantas bagaimana Anda mau menerapkan untuk orang di Kelapa Gading di abad dua puluh satu? Yang paling bisa diterapkan adalah prinsip-prinsip umumnya, seperti keadilan, kejujuran, dan sebagainya.

Sebetulnya sebelum ada agama prinsip-prinsip umum tersebut sebenarnya sudah dikenal oleh manusia. Agama datang hanya untuk menggarisbawahi saja, mensistematiskannya. Karena penghormatan terhadap ibu, misalnya, tanpa agama orang sudah hormat. Apakah dulu ada ajaran agar orang memukuli ibunya? Komunitas pagan di Yunani, misalnya, yang tidak punya agama, tidak pernah ada cerita orang memukuli ibunya. Jadi agama datang untuk menggarisbawahi prinsip-prinsip umum tersebut.

Bahkan ada anggapan bahwa agama juga mampu membajak moralitas. Jadi bukan sumber moralitas, sebaliknya agama juga penghancur moralitas. Contohnya kasus Ahmadiyah. Menurut moralitas sudah pasti salah memukuli orang, menghancurkan masjid orang, membakar rumah orang. Tetapi menurut agama hal terse-

but dibenarkan. Itu yang saya maksud agama membajak moralitas. Jangan dengan gampang mengatakan bahwa sumber moralitas adalah agama. Satu segi memang bisa, tapi di sisi lain, pada level yang lebih dasar, dia justru menghancurkan moral, karena moral sudah ada sebelum manusia beragama.

Kembali ke persoalan tadi, klaim-klaim bahwa agama mampu menjawab semua hal tidak didasarkan pada pemahaman kesejarahan yang tepat. Misalnya, soal *khilâfah*. Saya berulang kali menyatakan, yang dimaksud *khilâfah* oleh para pengusungnya itu yang mana? Dalam sejarah Islam ada banyak kekhalifahan. Selain *al-Khulafâ' al-Râsyidûn*, ada Muawiyah, Abbasiyah, Fatimiyah, dan Utsmaniyah yang memiliki sistem politik yang berbeda-beda. Lantas, mana yang dimaksud *khilâfah*? Masing-masing rezim punya karakter berbeda. Tetapi, menurut saya, ada titik temunya, yaitu bahwa pada dasarnya wataknya sekular. Kecuali periode kecil pada masa *al-Khulafâ' al-Râsyidûn* yang 29 tahun lamanya. Muawiyah, misalnya, sangat sekular. Bagi mereka urusan agama sudah selesai, yang penting sekarang adalah membangun ekonomi, persis seperti Soeharto.

Tidak heran jika kemudian Hadits palsu banyak beredar. Itu adalah bentuk perlawanan kaum ulama menghadapi pemimpin khilâfah yang berlaku seperti preman dan sekular. Mereka khawatir agama diremehkan. Dalam pandangan mereka, jika agama diremehkan maka ia bisa terkikis. Karena banyaknya Hadits palsu, kemudian keluar Hadits yang berbunyi: barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia masuk neraka. Itu adalah cara meredam banyaknya Hadits palsu. Dan, sebetulnya, Hadits ini pun palsu. Kenapa dia palsu? Jelas, ketika Nabi masih hidup, tanpa berkata seperti itu, tidak akan ada orang yang mencatut-catut namanya.

Dan kalaupun ada, dianggap sebagai ekses kecil dalam sosial saja. Ini mencerminkan betapa banyak Hadits palsu yang dibuat atas dasar politik.

Jadi sebetulnya kehadiran Hadits-Hadits palsu untuk merespon para sultan sekular yang mengatakan bahwa agama sudah beres dan tidak ada yang perlu ditambah lagi. Kalaupun ada yang perlu diurus, tak lain adalah kesejahteraan ekonomi. Dan itu mencapai titik puncaknya di masa Abbasiyah, di Baghdad. Pada masa Abbasiyah tidak ada ulama yang terkenal, tidak ada ahli fikih yang hebat. Kenapa? Karena agama dianggap sudah selesai. Yang muncul waktu itu adalah penyair hebat, seperti Abu Nawas, filosof ataupun dokter pintar. Itu menunjukkan bahwa pentas kultural nasional waktu itu diisi oleh diskursus nonagama. Dari studi-studi mengenai masa itu, ada yang menyatakan bahwa waktu itu sudah ada 800 dokter bersertifikat, artinya sudah ada sistem manajemen *screening* kualifikasi medis sampai abad 11dan 12. Pabrik kertas sudah dibuat waktu itu. Memang berasal dari Cina, tapi dibuat di sana. Luar biasa hebatnya prestasi yang dicapai. Dan tidak ada agama di situ. Agama dianggap bagian yang integral saja. Seperti saya dengan Anda, tidak ditanyakan kamu salat atau tidak, kamu Islam atau bukan. Saya tidak tanya itu karena itu urusan Anda. Yang penting adalah bagaimana membangun bersama. Itulah yang terjadi di Baghdad, juga di Cordoba. Karena itu mereka mempunyai ba-

> Sebagai ide sekularisme tetap valid, bahkan kalau kita boleh tambahkan, bagus sekali untuk kepentingan agama itu sendiri. Hanya di negara-negara sekularlah agama berkembang dengan sehat. Lihat di Amerika dan Eropa. Di negara-negara yang sangat religius, agamanya justru tidak sehat.

nyak waktu untuk menerjemahkan karya-karya dari luar, seperti karya-karya Plato.

Lagi-lagi pertanyaan saya, siapa ulama yang besar di masa itu? Tidak ada. Al-Ghazali itu bukan ulama. Dia adalah dosen biasa yang mengajar filsafat, yang kemudian mengalami semacam *spiritual enlightenment*. Kemudian dia menulis *al-Munqîzh min al-Dlalâl*, dia merasa bahwa masa lalunya gelap. Artinya, selama kehidupan sebelumnya dia tidak berurusan dengan agama. Dia sibuk belajar filsafat Yunani. Pengakuan itu pun setelah dia tua. Dan ada kecongkakan di situ, yaitu seolah-olah dia sudah berhasil keluar dari kegelapan. Seolah-olah dia sudah sampai, padahal manusia tidak akan pernah sampai.

Adapun kemudian banyak dikenal nama-nama ulama seperti sekarang ini, tak lain adalah hasil penelitian sarjana-sarjana orientalis, bukan oleh sarjana Muslim. Oleh sarjana orientalis ditemukan Hasan Basri, al-Thabari, dan lain sebagainya. Ibn Khaldun, yang hidup pada abad ke-14 M, bukanlah seorang ulama melainkan sejarawan. Ibn Taimiyah, mungkin ditemukan oleh Nicholson, mungkin oleh Montgomery Watt, Ignácz Goldziher, atau Joseph Schacht yang takjub bahwa zaman dulu ternyata ada ulama yang tampil. Dalam konteks ini, para orientalis melihat bahwa agama ingin berperan melalui ulama yang membahas hal yang bermacam-macam. Karena konteks waktu itu agama adalah diskursus pinggiran.

Saya kira pola umumnya seperti itu. Karena itu kalau sekarang ada program atau ajakan menegakkan *khilâfah*, bagi saya, menggelikan sekali. Jangan-jangan mereka tidak tahu kekhilafahan di masa lalu itu seperti apa. Memang ada *qâdlî* sebagai hakim hukum positif, dan itu biasa saja. Seperti sekarang, di sini,

adalah hakim yang mengerti hukum positif Belanda. Itu yang kemudian diangkat menjadi hakim. Tetapi yang ada di sana tidak hanya *qâdlî*, ada menteri keuangan yang profesor ekonomi, ada menteri urusan puisi, dan sebagainya. Jadi *qâdlî* dan hakim itu salah satu saja. Nah, itu yang menunjukkan bahwa sistemnya sekular, bukan dalam arti membenci agama, tetapi menempatkan agama dalam tempatnya yang tepat. Pemuka agamanya ada, hakimnya pun ada, tetapi tidak dominan. Mereka juga mengarang tafsir dan sebagainya, tetapi karya-karya mereka bukan karya yang dominan. Yang dominan waktu itu adalah novel, traktat filsafat, bukan agama.

Saya ingin hal ini benar-benar dipahami. Misalnya, Ibn Ishak membuat biografi Nabi. Jadi, posisinya sebagai sejarawan, bukan seorang ulama. Lalu Ibn Hisyam, 100 tahun kemudian menyempurnakan biografi ini, dia pun disebut sebagai sejarawan, ilmuwan.

Jadi, saya kira, sangat jelas bahwa himbauan untuk kembali ke *khilâfah Islâmiyah*, lagi-lagi, menggelikan sekali. Sederhananya, kalau saya hendak mengim-bau, coba dipelajari dulu yang benar, baru mengajak orang. Sebab kalau tidak begitu, jadi aneh dan menggelikan, dan bisa salah sasaran. Kebaikan yang mau dikejar, jangan-jangan malah keburukan yang datang, kalau kita menerima begitu saja tanpa menelitinya terlebih dahulu.

Intinya, masyarakat sebagai satu organisme sosial yang hidup tentu berevolusi ke depan, orientasi hidupnya ke masa depan, bukan ke masa silam. Kalau orientasinya ke masa silam berarti melawan sunatullah. Orang yang hatinya tertambat pada masa lalu tidak mungkin maju. Manusia, baik sebagai individu maupun masyarakat, selalu menuju masa depan. Mereka, saya menduga, mau menarik

kita ke masa silam, dan itu akan sia-sia belaka. Contohnya, Afghanistan. Afghanistan adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan, di mana segelintir orang memaksakan kehendaknya, mengajak banyak orang kembali ke masa silam (penerapan syariat Islam), setelah itu tidak tahu lagi mau ke mana. Karena bagaimanapun kita yang hidup di masa kini tidak mungkin kembali lagi ke masa silam.

Penerapan membabi-buta khilâfah atau syariat Islam pada akhirnya akan mencabut hak-hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tapi bukankah sekularisme, sebagaimana praktiknya di Turki dan Prancis, juga banyak melakukan hal yang sama, yaitu mengekang hak kebebasan dan keyakinan seseorang. Apa komentar Anda?

Apakah di sana, di Turki dan Prancis, begitu? Saya kira tidak seperti itu.

Bagaimana dengan larangan memakai jilbab di sekolah-sekolah negeri di Prancis? Atau larangan memperlihatkan identitas keagamaan di depan publik dalam acara kenegaraan di Turki?

Jadi begini, kita harus melihatnya secara berbeda-beda. Revolusi Prancis, sebagaimana saya nyatakan di awal, merupakan hasil evolusi panjang sampai masyarakat waktu itu bersepakat untuk membendung hal-hal yang berbau agama agar jangan masuk ke ruang publik. Konsensus itu pun tidak hanya berlaku untuk umat Islam, tapi semuanya. Menurut polling, saat warga Prancis ribut soal jilbab, warga Muslim Prancis yang setuju jilbab hanya 14%. Generasi awal warga Muslim yang tinggal Prancis juga tidak setuju dengan

kesepakatan tersebut. Tapi generasi kedua, ketiga, dan seterusnya sudah memahami kesepakatan tersebut. Karena itu mereka tidak keberatan. Sementara itu, hukum ini pun tidak bisa dihapus, karena konstitusinya memang menyatakan seperti itu.

Bukankah dalam Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan mengekspresikan keyakinan agama merupakan derogable rights?

Apakah dilarang?

Seperti larangan memakai jilbab?

Tetapi kalau di tempat umum kan tidak dilarang. Yang dilarang adalah memakai simbol-simbol agama di sekolah negeri. Hal yang sama juga diberlakukan bagi pemeluk Yahudi, Katolik, dan Protestan. Mereka dilarang memakai simbol-simbol keagamaan mereka. Kalau mau diubah, ubah dulu konstitusinya. Jadi ini hanya menjalankan amanat undang-undang dan konstitusi.

Kemudian di Turki. Turki memang terkadang eksesif. Itu sebabnya, bagi saya, Turki itu negara antiagama, bukan sekular tapi Kemalis. Tapi itu juga harus dipahami berdasarkan perspektif sejarahnya yang panjang, sampai kemudian lahir Republik Turki modern. Pengalaman kaum nasionalis yang dipimpin oleh Mustafa Kemal pahit sekali. Bayangkan kekuasaan mereka yang begitu besar hingga Austria dalam sekejap runtuh. Mereka tentu saja sangat terpukul jiwanya. *What's wrong with us?* Begitu runtuh, berdasarkan kajian yang begitu lama dan mendalam, Kemal menyimpulkan bahwa persoalannya adalah agama. Dalam arti bahwa agama dipraktikkan secara keliru. Sebagaimana pernah dikatakan Soekarno,

seringkali Islam yang dipraktikkan adalah abunya, bukan apinya. Ungkapan ini sebenarnya berasal dari buku Amir Ali, *Api Islam*. Itu dasarnya.

Sebagai contoh, waktu itu orang komunitas Yahudi sudah memiliki surat kabar, majalah, dan buku-buku. Begitupun Kristen, meskipun tidak memiliki media regular, mereka telah memiliki buku-buku. Sementara para ulama Islam mengatakan bahwa mesin cetak haram. Ada analisis yang bagus dari Bernard Lewis, kenapa Turki bisa jatuh dengan mudah adalah karena mereka terlalu terikat pada simbol-simbol. Misalnya, pakaian perang mereka tidak sederhana dan terlalu berat, yang menyebabkan mereka tidak gesit, sehingga kalah perang. Oleh karena itu, mereka berpikir bahwa pakaian perangnya harus diubah, karena kurang ringkas dan membuat tentara tidak bisa gesit. Sementara pakaian tentara Barat, seperti tentara Jerman, rapi dan ringkas, sehingga mereka lincah.

Jadi mereka, para pemimpin Turki sebelum Kemal, sultan-sultannya yang terakhir, sudah memikirkan masalah ini. Akhirnya oleh Kemal, ketika ada momentumnya, dimaksimalkan. Setelah mereka kalah kemudian membuat perjanjian, dan mereka sepakat untuk membatasi kekuasaan hanya di wilayah Turki dan membuat lembaran sejarah Turki yang baru sama sekali.

Oleh karena itu, mereka alergi terhadap agama. Karena dalam hitungan mereka, agama menjadi faktor penyumbang yang signifikan dalam keruntuhan kekaisaran Utsmani. Di masa lalu agama memang menjadi tenaga yang kuat, tetapi dunia telah berubah. Orang-orangnya yang dulu ditaklukan dengan gampang, dengan spirit agama, belakangan mengembangkan diri dan tidak lama kemudian menggulung balik. Jadi intinya, "baju" kemarin tidak bisa dipakai lagi hari ini. Jadi kira-kira seperti ini.

Ini yang kemudian sekularisme di Turki dianggap eksesif. Namun ini bisa dikritik. Jangan segan-segan untuk mengkritik yang eksesif seperti ini. Tetapi, tanpa menghancurkan bangunan besarnya, sebagai ide.

Sebagai ide sekularisme tetap valid, bahkan kalau kita boleh tambahkan, bagus sekali untuk kepentingan agama itu sendiri. Hanya di negara-negara sekularlah agama berkembang dengan sehat. Lihat di Amerika dan Eropa. Di negara-negara yang sangat religius, agamanya justru tidak sehat. Kita bisa lihat di Arab Saudi atau Iran, misalnya. Apakah di Arab Saudi ada gereja? Tidak ada.

Yang tidak boleh adalah perda yang jelas-jelas berlawanan dengan konstitusi. Ini yang harus ditinjau terus dengan *judicial review*. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus berani membatalkan peraturan-peraturan apapun yang bertentangan dengan konstitusi. Peraturan tertentu yang melanggar peraturan yang lebih tinggi harus batal demi hukum.

Kenapa orang tidak boleh mengekspresikan agamanya? Lagi-lagi, kembali lagi pada soal moralitas dan agama. Menurut moralitas jelas salah melarang orang mengekspresikan keyakinan agamanya. Tetapi, sebaliknya, menurut agama boleh, bahkan harus ditindas, harus diredam potensi kebangunannya. Jangankan Kristen, Syi'ah saja tidak boleh di Arab Saudi, sebagaimana Sunni tidak boleh di Iran. Itu semua, menurut moralitas, *that's totally wrong*, tapi menurut agama dibenarkan.

Kira-kira Indonesia bisa mencontoh model sekularisme negara mana? Karena harus diakui bahwa ada paradoks dalam konstitusi negara

kita. Pada satu sisi terkesan sekular, tapi di sisi lain restriktif terhadap hak-hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Secara umum kerangka negara kita jelas sangat sekular. Itu tidak bisa dibantah. Dasarnya adalah Pancasila. Jelas sekali ada perdebatan antara kelompok Islam dengan kelompok nasionalis di Konstituante. Itu dulu yang harus dipegang.

Selain itu, turunannya pun jelas sekali meski tanpa disebut sekular. Kita sering sekali anti dengan istilah-istilah yang sebetulnya tidak kita pahami, atau sebaliknya menyukai istilah-istilah yang kita tidak pahami, seperti *khilâfah*.

Jadi kerangka umumnya seperti itu. Bahwa dalam praktiknya di sana-sini ada kesan paradoks, harus kita akui. Tapi itu adalah bagian dari pertumbuhan sejarah bangsa kita. Ada banyak contohnya, misalnya acara *Nuzûl al-Qur'ân*, Isra Mi'raj harus ada di Istana Negara dan harus dihadiri presiden. Hal semacam ini adalah konvensi, tidak ada dalam konstitusi, tapi juga tidak melanggar. Ada juga Departemen Agama yang mengurusi agama orang. Tetapi wataknya juga tetap sekular, sebab Depag mempraktikkan "sekularisme dalam arti yang lain", di mana yang dipedulikan hanya masalah-masalah yang ada duitnya, misalnya haji dimonopoli. Apakah Depag mengurusi orang salat? Tidak. Paling-paling sifatnya hanya himbauan. Tapi secara umum Depag tidak dibenarkan mengurusi agama.

Negara kita dibangun atas dasar kompromi. Lagi-lagi ini harus dilihat dalam perspektif sejarahnya, bagaimana bisa muncul kompromi perihal apakah negara ini dibangun atas dasar Islam atau tidak. Yang setuju dengan dasar Islam akhirnya mundur, tapi meminta konsesi. Lalu dibentuklah Departemen Agama. Di sana juga ada tawar-menawar, karena negara kita terdiri dari beragam suku

dan agama, lalu dibentuk direktorat jenderalnya atau dirjen-dirjen untuk masing-masing agama. Jadi semuanya adalah hasil dari kompormi. Dan ini berjalan terus sampai sekarang. Tapi, menurut saya, kerangka besarnya sekular, yaitu Pancasila.

Belakangan ini, di beberapa daerah, muncul perda-perda yang kental degan syariat Islam, meskipun tidak disebut secara langsung sebagai perda syariah. Namun yang mengejutkan perda-perda ini sebagian besar diusung oleh partai-partai sekular, seperti PDIP dan Golkar. Bukankah munculnya perda-perda tersebut bertentangan dengan konstitusi?

Itulah yang disebut gejala *creeping syariaization*, pengsyariahan secara penggerogotan. Jadi payung di atasnya sekular, tapi digerogoti dari bawah. Hal tersebut, dari satu segi, mencerminkan kekalahan kaum islamis di level nasional, karena tidak bisa mengubah konstitusi, kemudian mereka bergerilya politik di daerah. Itu faktanya. Apakah hal itu dibenarkan? Harus diuji dulu, harus ada *judicial review*.

Semangat besar al-Quran adalah individualisme, jelas sekali: Anda sendiri yang bertanggung jawab pada Tuhanmu di akhirat kelak, semuanya tidak bisa menjawab kecuali organ-organ tubuh-mu, sehingga tidak ada kemungkinan untuk berbohong dan ditolong orang lain. Syafaat Nabi dan lain sebagainya adalah soal belakangan. Tapi bahwa kita bertangung jawab atas diri sendiri adalah sesuatu yang gamblang dan jelas.

Kita pun harus cermat. Sebagian perda-perda itu tidak berlawanan dengan konstitusi, walaupun memakai kerangka syariah. Misalnya aturan larangan judi, minuman keras,

dan lain-lain memang ada di dalam hukum positif kita. Saya menduga umat Islam hanya kurang suka dengan hukum sekular, jadi harus selalu dengan motivasi agama. Kalau kamu menentang judi atas dasar sosial, tidak ada pahalanya. Tapi kalau melarang judi karena memang dilarang Allah, ada pahalanya. Karena dalam Islam ada kaidah *innamâ al-a'mâlu bi al-nîyât.* Oleh karena itu, harus pakai niat yang jelas. Kalau niatnya sekular percuma, di akhirat nanti tidak akan dapat pahala. Ini saya anggap sebagai bentuk pubertas religius. Dan, menurut saya, hal ini boleh-boleh saja.

Yang tidak boleh adalah perda yang jelas-jelas berlawanan dengan konstitusi. Ini yang harus ditinjau terus dengan *judicial review*. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus berani membatalkan peraturan-peraturan apapun yang bertentangan dengan konstitusi. Peraturan tertentu yang melanggar peraturan yang lebih tinggi harus batal demi hukum. Hanya saja setelah reformasi, euforianya belum selesai. Itu juga adalah bagian dari persepsi ketertindasan umat Islam, yang sebetulnya tidak sepenuhnya tertindas di masa Orde Baru (Orba). Apanya yang tertindas di masa Orba? Bagaimana mengatakan tertindas sementara Soeharto membuat program Amal Bakti Muslim Pancasila dengan mendirikan 1.000 masjid, ia selalu hadir dalam peringatan *Nuzûl al-Qur'ân*, dan lain sebagainya. Yang ditindas adalah kelompok Islam ekstrem, yang mengatasnamakan keislaman secara keseluruhan. Jadi yang dibabat adalah kelompok Muslim yang ekstrem dan radikal, yang melanggar hukum. Sementara kelompok Islam lain tidak dapat masalah. Setiap ada musyawarah nasional, baik Nahdlatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah, Soeharto selalu datang. Semua organisasi kemasyarakatan Islam yang melakukan konferensi selalu dibantu oleh pemerintah. Misalnya, pada Muktamar NU 1984 di Situbondo,

ketika Gus Dur terpilih, ABRI dikerahkan. Jadi, ketertindasan Islam itu soal persepsi.

Karena itu, kelompok-kelompok yang berusaha mempromosikan perda syariah adalah kelompok-kelompok semacam itu. Yang perlu kita sesalkan adalah adanya kelompok-kelompok sekular, sebagaimana tadi Anda sebut, yang ikut dalam gelombang ini tanpa melihat latar belakang dan besarnya dukungan. Bila mereka mencermati hasil survei-survei, masyarakat tidak akan dukung. Karena survei-survei dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), misalnya, meyakinkan kita bahwa pendukung syariat Islam itu sebenarnya sedikit. Tapi meski mereka sedikit, mereka aktif menyuarakan isu penerapan syariat Islam. Itu juga disebabkan latar belakang orang-orang partai sekular yang mempunyai persepsi bahwa agama itu suci, sehingga mereka tidak berani menentang secara gamblang. Sebagian masyarakat yang tidak setuju pun tidak mau aktif menyuarakan penolakan mereka terhadap ide penerapan syariat Islam, sehingga yang aktif hanyalah mereka yang mendukung penerapan syariat Islam. Ini yang kemudian ditangkap oleh elemen-elemen sekular di parlemen dan dianggap sebagai representasi dari umat Islam.

Ini adalah data yang ditemukan melalui survei-survei publik. Yang ingin saya katakan dan tekankan bahwa agama seharusnya dipandang sebagai salah satu bidang kehidupan saja, bukan satu-satunya atau yang terpenting. Kecenderungan ini bukan hanya pada Islam saja, tetapi juga terjadi di seluruh dunia bahwa agama dianggap sebagai sesuatu yang suci. Anggapan ini muncul dari kepercayaan bahwa karena Tuhan itu suci maka segala sesuatu yang terkait dengan Tuhan suci pula. Itu dasar yang, menurut saya, sangat keliru.

Karenanya, kembali ke Cak Nur, ia sebenarnya mau menegaskan bahwa yang absolut dan sakral itu hanya Tuhan. Sementara yang lainnnya itu tidak suci, termasuk agama, pemuka agama, dan institusi-institusi agama. Bagaimana mungkin mereka dianggap suci kalau mereka adalah manusia biasa yang punya kepentingan? Namun demikian, susah sekali untuk menyadarkan orang bahwa kalau Tuhan itu suci, bukan berarti semua yang terkait dengan agama kemudian menjadi suci pula. Baik yayasannya, koperasinya, atau institusi-institusi lainnya. Semua itu tidak suci. Apakah karena koperasinya memakai nama Al-Hikmah kemudian jadi suci? Tentu saja tidak. Ia sama saja dengan Carrefour atau Hero. Masjidnya juga tidak suci. Karena uang yang digunakan untuk membangunnya ada yang berasal dari uang dagang yang juga mengandung *syubhat* dan sebagainya.

Berdasarkan dari anggapan seperti inilah (kesucian agama) kemudian banyak orang yang tidak berani menentang, termasuk dari elite-elite partai sekular. Inilah yang kemudian menjadi peluang besar untuk dimanipulasi oleh para petualang yang mengatasnamakan agama.

Bahkan pemerintah sendiri – dengan merujuk UU No.1/PNPS/1965 serta SKB dua menteri yang kemudian berganti Peraturan Bersama tentang pendirian rumah ibadah – mangkir dari tugas generiknya dalam melindungi dan mempromosikan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Bagaimana komentar Anda?

Saya ingin kembali mencurigai yang seperti ini. Yang namanya pemerintah atau negara akhirnya adalah kumpulan individu: ada pejabatnya, ada menterinya. Sebagai individu mereka juga tidak terlepas

dari nilai-nilai. Yang saya curigai, mereka juga men-*share* nilai-nilai konservatif, dalam arti memeluk ortodoksi, konservatisme. Dengan begitu, para elite politik atau pejabat kita juga masih menghitung-hitung pahala dan dosa, sama seperti rakyatnya.

Karena itu seorang menteri agama yang menganut agama Islam cenderung menganut konservatisme dan ortodoksi, sehingga dalam konteks ini dia bias. Pertama-tama dia muncul bukan sebagai pejabat negara, tetapi sebagai Muslim dari kelompok tertentu yang *mainstream*. Karenanya, menurut keyakinan mereka, Ahmadiyah itu salah. Ketua MPR begitu juga, karena dia Muhammadiyah. Hidayat Nur Wahid beranggapan bahwa menurut ideologi Muhammadiyah, Ahmadiyah salah. Sedangkan peran dia sebagai ketua MPR nomor dua.

Ini yang saya juga tidak tahu bagaimana mengatasinya. Saya kira yang kita perlukan adalah pejabat-pejabat yang sekular, sehingga benar-benar bisa netral. Bagaimana kita bisa berharap pada mereka kalau pertama-tama mereka memajukan akidah pribadinya, baru yang kedua kewajiban kenegaraannya. Kalau bukan itu apa penjelasannya? Bagaimana, misalnya, seorang ketua MPR mengatakan bubarkan saja Ahmadiyah.

Belakangan perampasan hak-hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan persis praktik inkuisisi pada Abad Pertengahan. Negara melalui Bakorpakem yang terdiri dari Polisi, Kejaksaan Agung, dan Departemen Agama melarang al-Qiyadah al-Islamiyah, mungkin juga, tinggal tunggu waktu, Ahmadiyah.

Ya, itu yang tadi saya khawatirkan. Bakorpakem dan lain-lain itu akhirnya adalah kumpulan individu-individu. Tetapi, celakanya, da-

lam hal ini, mereka merupakan individu yang mempunyai kekuasaan. Sehingga yang terjadi, sebagaimana juga di Eropa, dalam derajat tertentu, tidak maksimum atau malah ekstrem – seperti pastur atau uskup di Eropa, tetapi mereka menggantikan dalam kadarnya sendiri, karena keyakinan subyektif religius mereka. Jaksa, misalnya, agamanya mungkin Islam, mungkin orang NU atau Muhammadiyah, yang dididik sejak kecil bahwa nabi yang terakhir itu adalah Muhammad. Lantas ketika berhadapan dengan kelompok seperti Ahmadiyah, yang muncul pertama kali adalah dia sebagai Muslim *mainstream*, bukan dia sebagai jaksa. Kemudian mereka berkumpul dengan orang Bakorpakem melakukan inkuisisi. Ini yang sulit sekali untuk menjelaskannya.

Bisakah disimpulkan bahwa karena negara lemah, kemudian banyak muncul kekerasan?

Ada gejala seperti itu, tetapi tidak seekstrem yang dikeluhkan oleh para aktivis agama. Saya keberatan dengan ekstremisasi analisis mereka. Menurut saya, analisis mereka terlalu jauh. Sebab, yang terjadi tidak separah itu. Meskipun, memang, ada gejala seperti itu, karena, sebagaimana tadi saya katakan, persoalan dasarnya adalah akidah para pejabat negara.

Di sisi lain, wartawan juga seperti itu. Belum tentu wartawan atau media punya garis kebijakan tertentu soal kebebasan beragama. Wartawannya mungkin anak HMI, IPNU, PMII atau yang lain, yang sejak kecil telah diberi pemahaman bahwa Muhammad adalah nabi terakhir. Kemudian laporan mereka pun bias, karena keyakinan individualnya yang mencuat.

Adapun bahwa kemudian negara disebut lemah, menurut saya, belum sejauh itu. Yang patut kita sesalkan adalah kurang tegasnya negara. Tapi untuk jangka panjang dan secara keseluruhan, masih jauh sekali para promotor syariah mencapai tujuan mereka. Karena masih ada tentara. TNI, menurut saya, masih tawar-menawar. Dan jangan lupa ada banyak pejabat-pejabat kita yang sebenarnya tidak mendukung ide penerapan syariat Islam. Secara sporadik memang harus dilawan terus, tapi tidak harus reaktif. Sikap seperti itu lebih baik agar para pejabat dan jajaran pemerintahan memperoleh kesan bahwa pengusung syariat Islam itu kecil. Kalau reaksi kita berlebihan, mereka senang. Jadi kita remehkan saja.

Liberalisme bertolak dari paham tentang kebebasan. Lagi-lagi ini sangat alamiah dan sesuatu yang tidak dapat dibantah bahwa manusia sebagai individu bebas. Bagaimana membantahnya? Dia lahir sendiri dari orang tuanya, lalu ada kapasitas-kapasitas mental yang sudah ada dalam dirinya; punya naluri untuk *survive*; berkehendak menyelamatkan diri sendiri sebelum orang lain.

Dalam konteks kebebasan berpendapat, berpikir, berekspresi, dan berkeyakinan, termasuk di dalamnya kebebasan beragama, sangat relevan jika kita berbicara mengenai liberalisme. Bagaimana Anda memahami liberalisme, dan bagaimana ia mesti dipahami dalam konteks Indonesia saat ini?

Pertama-tama, liberalisme bertolak dari paham tentang kebebasan. Lagi-lagi ini sangat alamiah dan sesuatu yang tidak dapat dibantah bahwa manusia sebagai individu bebas. Bagaimana membantahnya? Dia lahir sendiri dari orang tuanya, lalu ada kapasi-

tas-kapasitas mental yang sudah ada dalam dirinya; punya naluri untuk *survive*; berkehendak menyelamatkan diri sendiri sebelum orang lain. Mengikuti Adam Smith, kalau ada kebakaran di daerah Anda atau ada peristiwa kematian 200 orang di Meksiko, dan pada saat yang sama kelingking Anda bengkak, yang Anda pikirkan pertama kali tentu kelingking yang bengkak. Kaki kita yang sakit karena menginjak paku lebih penting ketimbang orang mati di luar sana. Siapa yang bisa bantah itu?

Itu contoh-contoh yang gamblang bahwa manusia cenderung mementingkan kepentingannya sendiri. Justru karena demikian malah bagus. Ketika kepentingan-kepentingan pribadi ini dalam konteks sosial kemudian bertemu, maka terjadi interaksi yang saling menguntungkan. Kalau saya menjual kue, saya mencari untung, bukan memikirkan supaya Anda memakan kue yang enak. Saya mencari untung makanya saya harus membuat kue yang enak, supaya laku, bukan agar membuat Anda bahagia. Bahwa kemudian ada minat untuk itu (membahagiakan orang lain), soal lain. Yang pasti saya ingin untung dan untungnya untuk keluarga sendiri. Itu jelas sekali.

Jadi yang perlu ditanamkan adalah pemahaman seperti itu. Orang itu bebas dan punya kepentingannya sendiri. Hal ini harus dirawat dalam konteks negara. Dan, negara juga harus memberi peluang bagi setiap orang untuk mengejar kapasitas mereka secara maksimum, yang batas kebebasannya kita belum tahu. Jadi tugas negara hanya memfasilitasi.

Jangan khawatir bahwa nanti kebebasan itu akan eksesif karena yang dijamin oleh negara bukan hanya satu orang tapi berjuta-juta orang. Jadi, sekali lagi, jangan khawatir. Karena adanya kepentingan yang bermacam-macam inilah kemudian terjadi kom-

promi. Apa yang dapat mempertemukan kepentingan-kepentingan yang berbeda itu? Seperti yang dirumuskan oleh John Stuart Mill, bahwa batas kebebasan seseorang adalah kebebasan orang lain. Di situlah kemudian ada hukum sebagai perangkatnya. Jadi semuanya diatur. Anda bebas, tetapi kalau merampas kebebasan orang lain akan berhadapan dengan hukum, apabila menghancurkan rumah orang lain ada hukumnya. Sebab, tetanggamu punya hak untuk hidup aman. Jadi, jangan kau ganggu.

Karenanya sangat mengherankan mengapa paham yang begitu gamblang, alamiah, dan tidak bisa dibantah ini ditentang, bahkan diharamkan oleh MUI, apalagi dalam konteks Islam. Menurut saya, semangat besar al-Quran adalah individualisme, jelas sekali: Anda sendiri yang bertanggung jawab pada Tuhanmu di akhirat kelak, semuanya tidak bisa menjawab kecuali organ-organ tubuhmu, sehingga tidak ada kemungkinan untuk berbohong dan ditolong orang lain. Syafaat Nabi dan lain sebagainya adalah soal belakangan. Tapi bahwa kita bertangung jawab atas diri sendiri adalah sesuatu yang gamblang dan jelas. Itu Islam. Hebat sekali. Bagaimana tidak, manusia sebagai individu dipredikasi sebagai *khalîfah fî al-ardl*.

> Jangan mencoba menggabungkan ilmu pengetahuan dengan agama. Karena itu tidak akan ada gunanya. Yang terjadi pada akhirnya adalah apologetisme.

Sementara pengertian liberalisme, jika dikaitkan dengan paham filsafat Barat yang muncul di Eropa klasik, bisa didiskusikan lagi. Tapi secara alamiah, bagi saya, sama. Itu pada tataran teoretisnya.

Di dalam praktiknya, seperti yang dikatakan Milton Friedman, orang yang sering berkoar-koar demi kepentingan publik atau de-

ngan melandaskan kepentingannya pada kepentingan umum, biasanya berakhir dengan merugikan publik dan hanya menguntungkan dirinya sendiri. Tapi sebaliknya, orang yang didorong oleh semangat individualistik sering berakhir pada kemaslahatan orang banyak. Bill Gates, misalnya, tidak pernah berpikir bagi orang lain. Dia, pada usia 19 tahun, membuat *software* kemudian mendirikan *Microsoft*, apakah manfaatnya hanya untuk Bill Gates seorang? Beratus-ratus juta orang diuntungkan. Kita, meskipun hanya dipojok dunia, bisa berselancar ke mana-mana gara-gara dia. Kalau tidak ada dia, atau kalau dia tidak memikirkan kepentingan pribadinya, bagaimana kita bisa mendapat *Microsoft*. Itu contoh-contoh ekstrem.

Tuan Toyota, misalnya, dulu dibakar oleh nafsu untuk membuat mobil, tapi sekarang siapa yang pakai? Berjuta-juta orang dimudahkan dengan adanya program itu. Demikian juga Boing dan lain sebagainya. Bahkan nabi sendiri adalah kerja individual. Demikian juga ilmuwan, seperti Thomas Alfa Edison, James Watt, dan lain-lain. Mereka semua bekerja secara individual. Mungkin kalau ditanya apakah mereka memikirkan masyarakat, mungkin jawabannya belum tentu. Pun jika ada motivasi untuk masyarakat, tetap ada motif atau *passion* individunya.

Bagaimana dengan anggapan kelompok konservatif tentang permissiveness *liberalisme yang diidentikkan dengan pornografi, seks bebas, dan sebagainya? Bahkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan banyak kalangan antikapitalisme, misalnya, melihat bahwa pangkal kemiskinan adalah liberalisme dalam ekonomi?*

Anggapan seperti itu, bagi saya, satu kesalahan fatal dan anggapan yang aneh sekali. Saya tidak mengerti dengan cara berpikir

mereka. Apa yang mereka maksud dengan pronografi, seks bebas, dan telanjang-telanjangan?

Baiklah, pertama soal *permissiveness*. Mereka perlu tahu di negara-negara Barat pun hal seperti itu juga dikeluhkan. Dalam pikiran mereka (umat Islam), orang Barat semua suka dengan telanjang-telanjangan atau pornografi. Justru karena dikeluhkan oleh masyarakat Barat sendiri, kemudian dicapai kebijakan kanalisasi dan lokalisasi. Karena, lagi-lagi, itu tidak bisa dibantah, dan itu hak semua orang untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Ini fakta kehidupan. Tetapi kalau kemudian orang sembarangan menyalurkan hasrat seksualnya di terminal, di warung makan, ini bisa disebut masyarakat gila. Lantas diatur. Di Belanda eksperimennya lebih jauh, ada satu distrik yang membuat aturan seperti itu. Di luar daerah tersebut orang tidak akan berani. Artinya, di tempat lain beres semua. Itu dibuat, pertama, karena mereka merasa risih; kedua, apakah semua orang isi otaknya seks semata? Tentu tidak. Jadi itu mungkin pesan yang salah, yang tidak mencerminkan masyarakat Barat sebenarnya.

Jadi harus disadari bahwa semua kecenderungan seperti itu ada pada setiap manusia. Kalau terkait dengan kehidupan publik, maka dikompromikan, dicari jalan terbaik tanpa menimbulkan guncangan dan keresahan di antara masyarakat. Ini jauh lebih baik ketimbang di negara-negara yang hipokrit, di mana kekerasan terjadi di berbagai ruang, di rumah, dalam bus dan sebagainya, dan itu tanpa kontrol.

Tentang ekonomi. Bagi saya, adalah analisis yang menggampangkan jika mengatakan bahwa ekonomi liberal telah gagal dan solusinya adalah syariat Islam atau sistem ekonomi Islam dan sebagainya. Dalam hidup ini orang berbeda-beda. Dan, itulah yang

menjadi faktor dasarnya, yaitu bahwa manusia berbeda-beda dan tidak mungkin disamakan. Baik secara keluarga atau personal memang berbeda-beda. Sejarahnya, secara keseluruhan, sebagai bangsa juga berbeda-beda. Oleh sebab itu, kalau ada yang miskin, itu alamiah, karena orangnya berbeda-beda. Ketika ada seribu orang dan yang lima puluh orang kreatif, sehingga mungkin lebih maju meninggalkan yang 950, jangan kemudian yang lima puluh orang dihukum hanya karena mereka lebih maju, lebih kreatif, lebih pintar, dan lebih keras kerjanya. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan yang 950 orang ini agar seperti yang lima puluh. Jangan lantas menarik yang 50 supaya sama lagi.

Sama halnya dengan negara. Kita tidak bisa meminta Inggris untuk jangan terlalu maju, agar terbelakang sedikit. Bagaimana logikanya? Mereka sudah menata sistem pendidikannya dengan benar, mereka kerja keras, termasuk memang dengan mengkoloni bangsa-bangsa lain. Itu adalah kesalahan mereka di masa lalu dan mereka sudah meminta maaf. Dan kita tidak bisa terus-menerus menyalahkan mereka. Untuk kasus Inggris, mereka menghimpun negara-negara bekas koloninya dengan nama *Commonwealth*, negara-negara persemakmuran. Itu adalah bentuk mereka menyatakan diri bersalah. Di dalamnya ada Pakistan, Malaysia, dan beberapa negara lain. Mereka umumnya maju. Kita saja, Indonesia, yang sial karena dijajah oleh Belanda. Prancis juga melakukan hal serupa sebagaimana Inggris. Mereka masih menjalin hubungan dengan Tunisia, Maroko, Libya, dan Aljazair. Di negara-negara tersebut berdiri sekolah-sekolah milik Prancis dan warganya juga dipersilakan untuk sekolah ke Prancis. Hal semacam ini sudah dilakukan sejak 1960-70-an. Kalau kita terus menyalahkan mereka, sama halnya

dengan orang Yahudi terus merengek bahwa 6 juta orang Yahudi dibunuh. Jerman sudah minta maaf dan mengaku salah.

Jadi satu-satunya jalan adalah mengejar mereka. Secara individu, misalnya, kalau penghasilan saya 10 juta dan Anda 1 juta, tidak mungkin penghasilan saya diturunkan menjadi 1 juta, yang ada seharusnya adalah Anda mengejar saya. Mungkin ketika Anda sampai 10 juta, boleh jadi saya sudah lebih. Kalau tidak begitu bagaimana? Moralnya di mana kalau saya dihukum karena kepintaran saya. Apakah Bill Gates harus kita hukum karena dia terlalu pintar? Tentu tidak bisa seperti itu. Atau kita juga tidak bisa melarang orang lain untuk membuat teknologi yang bagus. Bagaimana cara berpikirnya?

Tapi kelompok yang menentang ekonomi liberal menilai ketimpangan tersebut karena start-*nya berbeda.*

Siapa yang mengatur *start*-nya? Itu alamiah. Bagaimana kita mengatur *start*-nya? Contoh sederhana, misalnya Anda dari desa dan saya dari kota, kita berbeda. Tapi apa salah saya jika saya yang lahir di kota sudah menikmati listrik, ada tv, kulkas, gramophone, dan keluarga saya, misalnya, berorientasi ke Barat. Dan saya tidak pernah meminta untuk dilahirkan di tempat tertentu.

Artinya, affirmative *action itu sendiri bertolak belakang dengan ide liberalisme?*

Ya, secara *in principal* salah. Hanya saja kita harus realistis dengan menganggapnya sebagai kebijakan darurat, jangan dianggap luhur pada dirinya. Tidak bisa orang maju dengan subsidi, dengan penganakemasan. Sebagai individu tidak bisa, sebagai komunitas apalagi.

Jadi kebenaran itu sendiri tidak tunggal. Kenapa kita harus terpaku pada satu kebaikan saja. Banyak yang bisa kita pilih. Kita lihat Malaysia. Mahatir ketika mau turun pada 2003, setelah 25 tahun memimpin, mengakui bahwa dia gagal. Mungkin yang terangkat hanya 25%. Bahkan dari segi lain dia melanggar HAM. Coba Anda bayangkan, orang Cina, misalnya, di Malaysia "dihalang-halangi" hanya karena dia lahir sebagai Cina. Dari mana dasar kebenarannya? Dia lahir tanpa meminta menjadi Cina, lalu setelah lahir matanya sipit, karena itu tidak boleh mendapat kredit bank. Di mana dasar moralnya? Makanya di Malaysia masyarakat keturunan India mulai bergejolak. Padahal hanya karena mereka berkulit hitam, dan mereka tidak pernah meminta agar kulit mereka seperti ini, kemudian dilarang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Bagaimana dasar moralnya?

Di sini ada yang disebut semangat zaman. 300 tahun yang lalu memang ada perlakuan diskriminatif macam itu. Sekarang kesadaran manusia sudah tumbuh bahwa itu adalah hal yang keliru. Jadi kesadaran tentang kemanusiaan 300 tahun yang lalu berbeda dengan sekarang. Sekarang kita tidak mungkin lagi melecehkan perempuan. 30 tahun yang lalu kita masih bisa siul-siul kepada perempuan sembarangan. Namun sekarang kita sudah malu pada diri sendiri. Artinya, mulai tumbuh kesadaran baru. Barangkali seorang petani di desa masih seperti itu. Tapi meski kita berasal dari mereka, karena pendidikan, kita tidak akan berani lagi macam-macam dengan perempuan. Itu contoh-contoh di mana mental seseorang berevolusi, bukan hanya fisiknya.

Apakah Anda melihat adanya tren menaik ketertarikan negara-negara Muslim terhadap demokrasi?

Saya melihat justru tren sebaliknya. Yang terjadi adalah karena mereka dikoloni oleh negara-negara Barat, justru mereka ingin menjauhi. Kalaupun ingin mengadopsi, mungkin elemen-elemen sosialistik dari negara-negara penjajah. Misalnya, Hatta yang sekolah di Belanda, yang dikembangkan adalah koperasi. Juga Natsir, yang mengambil sosialisme Arab, sementara dia menentang sosialisme Barat yang, menurutnya, dibawa oleh liberalisme. Tetapi di sisi lain, mereka tidak punya nomenklatur atau perbendaharaan kata di luar sistem Barat untuk membentuk sebuah negara modern. Oleh karenanya, dibuatlah sistem presidensial-parlementer. Di situ mereka meniru. Para pemimpin waktu itu mencari titik temu yang bisa diterapkan, tetapi pasti tidak secara keseluruhan. India juga begitu, sosialis. Baru tumbuh kesadaran menjadi demokratis 15 tahun belakangan ini. Setelah itu mereka menjelma menjadi naga baru ekonomi di Asia. Demikian juga Cina.

Pasti saya secara pribadi menganggap bahwa Islam paling benar. Tapi ini anggapan subyektif saya sebagai penganutnya. Karena itu tidak mungkin memaksakan keyakinan subyektif saya kepada orang lain. Itu masalahnya, sebab melanggar HAM. Pemaksaan suatu keyakinan tidak menghargai perbedaan yang paling elementer.

Jadi sangat jelas bahwa mereka menjauh untuk alasan-alasan kesejarahan yang bisa dimengerti. Logikanya adalah bagaimana mungkin mereka meniru musuh sendiri. Sekalipun ada yang ditiru tapi lebih pada unsur sosialistiknya. Ali Jinnah begitu, Nehru juga demikian. Tunisia, Maroko, semua sosialis. Tapi itu untuk alasan-alasan yang bisa dimengerti.

Namun kita sekarang harus berani meninggalkan itu semua. Masa lalu sudah selesai dan faktanya jelas sekali. Oleh karena itu,

saya tidak mengerti kenapa para aktivis susah sekali mengakui fakta kegagalan sistem sosialis. Yang ingin kita buat adalah sistem yang lebih baik, bukan sistem yang sempurna. Demokrasi pasti banyak cacatnya juga. Tapi kalau kita hitung pasti manfaatnya lebih banyak dibanding mudaratnya. Sedangkan sistem sosialis pasti banyak manfaatnya, tapi lebih banyak lagi madaratnya. Fakta itu dapat kita pastikan.

Jadi, persoalannya begitu gamblang. Yang mangalami globalisasi, pasar bebas, memang tidak 100% rakyatnya terangkat, tapi di sistem yang lama jelas tidak ada yang bisa diangkat. Yang ada hanyalah pemeratаan penderitaan. Memang di sini belum terjadi pemerataan kesejahteraan, tetapi orang yang meningkat kesejahteraannya makin banyak. Tidak bisa dibantah. Di Cina 300 jutaan, India sudah 100 jutaan. Itu luar biasa sekali. Misalnya di *Time* mengungkap sisi gelap kota Mumbai. Meskipun di sana gemerlap tapi memang banyak sekali orang miskin. Tapi itu lebih baik karena dulu miskin semua. Dan pertumbuhannya cepat sekali. Awalnya di sana memang banyak yang miskin, tapi tak lama kemudian naik antara 10-20%. Sementara sisanya stagnan, naiknya lama. Tapi generasi setelahnya mungkin akan lebih cepat lagi. Mungkin baru tercapai 100 tahun lagi. Cina diprediksi 30 tahun lagi akan lebih dahsyat dan melampaui Amerika.

Ini fakta yang jelas sekali, sehingga saya tidak mengerti bagaimana pemikiran aktivis-aktivis kita. Kenapa mereka tidak ikut membangun daripada terus berkoar-koar. Yang diteriakkan oleh para aktivis kita adalah aspek *output*-nya, selalu. Mereka tidak memikirkan *input*-nya. Dalam ekonomi ada dua hal *input* dan *output*. Kalau kita terus meneriakkan pemerataan terhadap orang miskin sementara aspek *input*-nya ditinggalkan, sampai kapanpun mereka

akan seperti itu. Sementara kita tahu yang memikirkan *input*-nya adalah orang-orang keturunan Tionghoa. Jadi, jangan heran jika mereka yang lebih maju.

Sekularisme sebetulnya bukan membenci agama atau hendak menumpas Tuhan. Tuhan itu sesuatu yang tidak pasti adanya, namun kenyataannya banyak orang yang percaya. Dan sekularisme ingin mengatakan, silakan saja. Yang penting keyakinan Anda yang tidak bisa dibuktikan itu jangan dipaksakan dan diterapkan untuk orang lain.

Bagaimana pandangan Anda tentang pluralisme yang sering dipahami sebagai sinkretisme dan relativisme?

Lagi-lagi ini soal ketidakpahaman yang akut dan parah. Pluralisme muncul sebagai paham justru bertitik-tolak dari perbedaan, bukan persamaan. Kalau kita sudah sama, tidak perlu ada urusan pluralisme. Jadi, orang yang menyebarkan pluralisme secara otomatis mengakui perbedaan dan persamaan. Karenanya pendapat menyamakan semua agama, misalnya, dalam konteks ini mustahil, karena dasarnya sudah mengakui perbedaan. Yang diinginkan adalah kita menghormati perbedaan itu sebagai fakta alamiah. Bahwa dasar atau *nature* manusia itu beda. Manusia, di satu sisi, persamaannya banyak sekali. Jangankan antara manusia dengan manusia, dengan hewan pun sedikit sekali, terutama dengan simpanse dan gorila. Jadi jangan sombong. Beda genetik manusia hanya 1,6% dengan simpanse, 2,3% dengan gorila. Meleset sedikit saja, kita sama halnya dengan simpanse atau gorila.

Rasisme tidak ada dasarnya sama sekali. Kita semua sama dan bedanya sedikit saja. Tapi beda yang sedikit ini implikasinya ternyata besar. Pada hewan tidak berimplikasi sebesar manusia. Tapi

pada manusia menjadi besar sekali, sehingga menjadi beda *style* musiknya, berbeda agamanya, budayanya, dan sebagainya. Segalanya kemudian berbeda. Dan itu kemudian menjadi natural.

Jadi, perbedaan yang sebetulnya sedikit sekali dan sejatinya juga natural, kemudian dikembangkan oleh kebudayaan, sehingga kita jadi demikina berbeda. Tentu saja, masing-masing pihak menganggap benar. Kalau saja saya menganggap bahwa agama saya tidak benar, untuk apa saya beragama Islam. Pasti saya secara pribadi menganggap bahwa Islam paling benar. Tapi ini anggapan subyektif saya sebagai penganutnya. Karena itu tidak mungkin memaksakan keyakinan subyektif saya kepada orang lain. Itu masalahnya, sebab melanggar HAM. Pemaksaan suatu keyakinan tidak menghargai perbedaan yang paling elementer.

Jadi, yang dimaksud dengan pluralisme bukan kebenaran yang relatif, tapi kebenaran itu mutlak menurut pendapat subyektif masing-masing. Begitu dia menjadi program sosial, begitu dia dilempar ke pentas sosial, dia menjadi relatif. Artinya, kebenaran Islam itu relatif menurut agama orang lain. Dan sebaliknya, benar mutlak agama Kristen bagi penganutnya, tapi menurut saya, sebagai Muslim, tidak. Itulah yang dimaksud dengan pluralisme, justru dalam rangka menghargai perbedaan. Saya tidak mengerti kalau pluralisme kemudian dianggap kebenaran relatif. Silakan anggap mutlak berdasarkan anggapan masing-masing.

Sebagai negara yang baru berdemokrasi, kita mengalami banyak sekali cobaan. Menurut Anda, apakah kita sudah pada jalur yang benar dan menuju kondisi yang lebih baik, atau sebaliknya kita akan kembali jatuh dalam kegelapan?

Menurut saya, dua kemungkinan tersebut selalu terbuka. Kalau saya lihat, secara keseluruhan, kita mengarah kepada sistem sosial, ekonomi, politik yang makin lama makin baik. Memang kuncinya ekonomi. Kalau ekonomi kita membaik maka kehidupan kita pun membaik. Jadi, orang mulai mempunyai *pleasure time* dan kurang sibuk dengan urusan-urusan kebatinan yang nyata-nyata subyektif, dan bisa menyalurkan hasrat-hasrat kebatinannya itu melalui kesenian. Seperti kata Nasr Hamid Abu Zaid, bahwa di Eropa orang mengganti fungsi gereja sebagai gedung museum atau gedung konser merupakan perpanjangan spiritualitas manusia. Jangan mengira orang Eropa tidak religius. Religiusitas mereka berbeda. Kalau kita masih di masjid, mereka sudah menonton opera atau musik. Inikan untuk memenuhi hasrat batin mereka. Mudah-mudahan di sini nantinya juga begitu.

Kalau melihat kondisi pertumbuhan makro ekonomi kita sejauh ini bagus, yaitu sampai 6% lebih, bahkan ada dugaan yang terlalu optimistik hingga 7%, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Namun bahwa belum ada pemerataan memang benar. Karena persoalan kita jumlah penduduknya 200 juta lebih. Di Singapura gampang membuat pemerataan, penduduk mereka hanya 3 juta. Brunei apalagi. Tapi lagi-lagi, seperti yang saya katakan tadi, banyak orang saat ini yang terangkat tingkat ekonominya.

Nah, itulah kuncinya. Kalau ekonominya berantakan terus maka akan sulit bagi kita untuk keluar dari persoalan saat ini. Tapi saya melihat secara keseluruhan semangat kebangsaan bangsa ini masih cukup besar, dan menurut saya sangat ajaib. Begitu banyak perbedaan tapi umumnya masih ingin dalam keindonesiaan. Aceh, misalnya, setelah 32 tahun dibawah rezim otoriter kemudian diberi kebebasan, mereka beres. Bahwa masih ada persoalan, harus kita

akui, tetapi intinya beres. Di Papua begitu juga, meskipun masih ada yang berteriak-teriak. Itu, lagi-lagi, proses.

Di Amerika perang saudara terjadi luar biasa mengerikan antara Selatan dan Utara. Jadi jangan berlebihan-lebihan soal konflik yang terjadi di sini. Kalaupun ada masalah, anggap ini bagian dari masa transisi. Kalau masa otoritarian sebelumya tidak dialami selama 32 tahun, mungkin euforia kebebasannya pun tidak sedahsyat saat ini. Menurut saya, sebanding saja.

Lantas, apa sebetulnya yang mendasari kekhawatiran itu? Kita sudah melaksanakan pilkada sampai 300 lebih dan sukses. Apakah memakan korban? Satupun tidak ada darah yang tertumpah. Memang ada keributan karena tidak puas. Tapi diperkirakan hanya sekitar 2%. Artinya, masyarakat yang selama ini dianggap bodoh ternyata siap. Kalau saja ini dibiasakan, kemudian elitenya bisa menerima, semuanya beres. Seperti yang terjadi di Amerika, saat kekalahan Al Gore, misalnya, dia mengakui kekalahannya dan saat itu pendukungnya mengikuti sikap elite. Sekalipun di Indonesia masih terjadi ketidakpuasan atas pelaksanaan pilkada di sejumlah daerah, tapi sikap mereka sudah dewasa dalam berpolitik. Kalau tidak puas mereka mengajukan ke Mahkamah Agung. Itu sudah memakai prosedur yang benar. Bukan mengerahkan pendukung dan kemudian saling membunuh. Secara keseluruhan, menurut saya, sudah bagus. Dan kita harus ikut dalam arus besar ini, kalau kita mencintai bangsa ini.

Wawancara dilakukan di Freedom Institute,11 Februari 2008

Percakapan dengan

Hamka Haq

Hamka Haq, Ketua bidang Agama dan Kerohanian DPP PDIP dan ketua umum Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi). Pendidikan doktoralnya ia peroleh di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia pernah menjadi Pembantu Rektor I UIN Alauddin, Makassar, kini menjadi guru besar di universitas tersebut. Pernah juga menjadi ketua MUI SulawesiSelatan.

Ruang publik harus kedap dari simbol-simbol keagamaan. Agama bisa masuk di dalamnya hanya jika sudah menjelma etos-etos yang bersifat universal dan tidak menimbulkan keberatan dari pihak lain. Sehingga ia menjadi nilai milik bersama. Terlebih, dalam konteks keindonesiaan, spirit keagamaan menjiwai Pancasila dan UUD '45 sebagai tata nilai publik kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi kesepakatan seluruh warga. Jika demikian, setiap perbedaan, termasuk wilayah agama ataupun paham teologi, yang jelas-jelas dijamin konstitusi, harus dihargai dengan kearifan, bukan egoisme beragama, demi mencapai kedamaian yang penuh silaturrahim dan saling pengertian di antara yang berbeda. Sebab, demikianlah ketentuan Islam, yang merupakan agama pluralis, dalam menyikapi perbedaan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa kontroversial berupa pengharaman sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Dari sini istilah-istilah tersebut menjadi sangat cemar di masyarakat. Menurut Anda sendiri, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sekularisme?

Dari segi sejarah, sekularisme muncul sebagai reaksi terhadap intervensi Gereja Katolik yang berlebihan dalam berbagai aktivitas sosial dan politik masyarakat Eropa. Gerakan itu menjadi kuat selain karena muaknya masyarakat dengan tekanan dan kekangan ajaran-ajaran dogmatis gereja, juga didukung oleh raja-raja yang kecewa dengan gereja yang telah mengintervensi pengangkatan mereka. Maka bangkitlah suatu gerakan yang ingin melepaskan diri dari keterikatan keagamaan yang sangat ketat.

Namun demikian, gerakan ini, yang ideologinya sekular, bukan berarti meninggalkan agama. Dalam sejarahnya, sekularisme tak lebih dari sekadar upaya untuk melepaskan diri dari pengaruh gereja yang terlampau jauh menekan rakyat dan penguasa di bidang sosial dan politik. Dengan demikian, sekali lagi perlu saya tekankan, sekularisme tidak berarti meninggalkan agama, melainkan memisahkan antara urusan keagamaan dan urusan sosial kemasyarakatan.

Bagaimana sekularisme dalam Islam?

Secara umum Islam sendiri tidak dapat dilepaskan dari wilayah sosial, politik, dan ekonomi. Meski demikian, sejarah membuktikan bahwa sekularisme dapat diterapkan di dunia Islam. Contohnya di Turki. Sekularisme di Turki bergema di bawah kendali Mustafa Kemal Attaturk pada 1924. Dalam pandangan Kemal, sekularisme

pun tak berarti meninggalkan agama, melainkan hanya memisahkan agama dari kekuasaan. Agama yang dimaksud Kemal bukanlah Islam itu sendiri, tapi kekuasaan para tokoh agama atau ulama Islam. Dalam konteks itu, Turki ingin memisahkan pengaruh tokoh-tokoh agama Islam agar tidak terlalu jauh mencampuri persoalan politik. *Khilâfah*, sebagai bagian dari campur tangan tokoh-tokoh agama, dengan demikian harus diubah. Dengan begitu, sekularisasi sebenarnya adalah upaya memisahkan secara mutlak antara agama dan negara, namun tidak berarti sama sekali meninggalkan agama.

Di Indonesia banyak orang memandang negatif sekularisme, makanya Cak Nur memilih menggunakan istilah sekularisasi. Menurut Anda pembedaan istilah seperti itu penting atau tidak dalam rangka mendiseminasikan sekularisme?

Saya kira penting, karena sebagian besar masyarakat, terutama umat Islam, tidak mengetahui arti sekularisme. Sehingga banyak orang beranggapan bahwa orang sekular adalah orang yang tidak beragama. Padahal tidak seperti itu. Maka untuk mendidik masyarakat agar mengetahui makna sekularisme dan sekularisasi, saya kira kedua istilah tersebut masih perlu dibedakan.

Sekularisasi yang saya pahami dari pandangan Cak Nur adalah upaya untuk melihat dan memilah antara urusan keagamaan yang patut disandarkan pada *nash-nash* kitab suci dan *al-sunnah* dengan urusan duniawi yang tidak harus selalu disandarkan pada kedua sumber hukum Islam tersebut. Urusan duniawi, menurut Cak Nur, memerlukan ijtihad dan pemikiran-pemikiran baru, yang mungkin ada kaitannya dengan *sunnah*, meski mungkin juga tidak. Memang, sejauh pengamatan saya, menggunakan istilah sekulari-

sasi lebih aman ketimbang sekularisme. Meski tetap menimbulkan kontroversi.

Kalau sekularisme diartikan sebagai pemisahan secara mutlak antara agama dan kehidupan duniawi, memang tidak cocok dengan Islam. Tetapi dalam arti upaya yang lebih luas lagi, seperti yang dikemukakan Cak Nur, istilah itu justru mungkin dapat kita pakai sebagai slogan perubahan. Perubahan ialah pembaharuan, yang dalam Islam disebut *tajdîd*, sebuah upaya penyesuaian ajaran Islam dengan perkembangan zaman yang selalu berubah dan berbeda. Pada dasarnya *tajdîd* diterima oleh para ulama sebagai bagian dari hukum sosial dalam Islam.

Sekularisasi bertujuan untuk memberikan wilayah yang lebih luas kepada akal pikiran, tetapi tidak berarti liberal seratus%. Ia tetap dilandasi etos-etos keagamaan. Sehingga pikiran-pikiran yang lahir tetap dipandu oleh naluri-naluri keagamaan namun, di sisi lain, ada wilayah-wilayah tertentu yang merupakan bagian dari akal, seperti ranah duniawi.

Apakah dalam Islam terdapat landasan teologis yang mendukung sekularisme?

Menurut saya ada. Nabi Muhammad saw pernah bersabda "*antum a'lamu bi-umûri dunyâkum*," engkau lebih mengetahui tentang urusan duniamu. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah tidak ingin campur tangan terlampau jauh dalam urusan duniawi. Oleh karena itu, dalam *ushûl al-fiqh*, yang biasa saya baca, Rasul berijtihad dalam wilayah-wilayah keduniaan. Sementara dalam wilayah keagamaan, khususnya ibadah, Rasul sendiri merasa tidak memiliki otoritas untuk itu. Baginya, ibadah merupakan priori-

tas wahyu dari Tuhan. Sebagaimana manusia biasa, dalam urusan duniawi, Muhammad berijtihad bukan atas nama kerasulannya, tetapi atas nama pribadi. Sehingga ijtihad Rasul bisa jadi benar dan bisa juga salah.

Suatu ketika, Rasul melarang masyarakat Arab mengawinkan kurma, itu bukan wahyu tapi hanya pikiran beliau, dan ternyata hasilnya kurang memuaskan. Maka, masyarakat Arab yang kurmanya kurang berhasil, mengajukan keberatan kepada Rasul yang telah melarang mengawinkannya. Rasul sendiri merasa bersalah dan kemudian menyadari bahwa anjurannya tersebut keliru. Contoh itu menunjukkan kesadaran Rasul agar secara pribadi tidak perlu campur tangan terlalu jauh terhadap urusan duniawi umat Islam, kecuali masalah ibadah yang memang sudah diatur atas otoritas wahyu Tuhan. Dalam kehidupan duniawi, beliau bisa berijtihad, bisa juga ijtihadnya dilemparkan ke para Sahabat. Tetapi dalam kehidupan ibadah, semuanya diatur oleh Tuhan, Rasul hanya pelaksana dan penyampai kepada masyarakat.

Kendati demikian, sekularisasi ataupun sekularisme dikhawatirkan kalangan Islam tertentu, seperti juga oleh MUI, dapat mengikis agama dari kehidupan umat, karena merongrong akidahnya. Apa komentar Anda menanggapi hal tersebut?

Menurut saya, sekularisasi tidak akan memberangus akidah umat. Karena, proses sekularisasi bertujuan untuk memberikan wilayah yang lebih luas kepada akal pikiran, tetapi tidak berarti liberal seratus persen. Ia tetap dilandasi etos-etos keagamaan. Sehingga pikiran-pikiran yang lahir tetap dipandu oleh naluri-naluri keagamaan namun, di sisi lain, ada wilayah-wilayah tertentu yang

merupakan bagian dari akal, seperti ranah duniawi. Dalam ranah duniawi, manusia boleh berpikir dan berkreasi secara bebas dengan berlandaskan pada kerangka tradisi keilmuan dan seni. Kendati demikian, orang Muslim nyatanya tetap tidak menghilangkan nafas keagamaan dalam berbagai kegiatan duniawinya.

Sebagai contoh, tradisi rebana, gamelan, dan gendang, yang sekarang terkesan islami sebenarnya tidak ada dalam tradisi syariah, melainkan kreasi bebas budaya lokal masyarakat Indonesia. Meski demikian, seni tersebut tetap diberikan sentuhan keagamaan oleh sebagian umat Islam. Itulah yang saya maksud sebagai perbedaan pemahaman sekularisasi antara masyarakat Indonesia dan Barat. Dengan begitu, saya yakin bahwa sekularisasi yang terjadi di Indonesia tidak akan memberangus agama.

Bagi saya, sepanjang nilai-nilai agama bersifat universal dan tidak mendatangkan keberatan dari pihak lain, maka nilai tersebut dapat menjadi milik bersama sebagai bagian dari kehidupan publik yang muncul dari agama.

Sekularisme juga dipahami sebagai pemisahan antara ranah publik dan privat. Agama dalam hal ini merupakan wilayah privat yang harus dipisahkan dari negara sebagai ranah publik. Bagaimana menurut Anda?

Saya kira pembedaan tersebut ada benarnya. Tetapi, harus di ketahui bahwa semua agama memiliki nilai-nilai universal. Dan nilai-nilai universal tersebut, menurut saya, bisa menjadi nilai-nilai publik. Bagi saya, sepanjang nilai-nilai agama bersifat universal dan tidak mendatangkan keberatan dari pihak lain, maka nilai tersebut dapat menjadi milik bersama sebagai bagian dari kehidupan publik yang muncul dari agama.

Dalam hal ibadah ritual, agama memang bagian dari ranah privat. Tapi, menyangkut kehidupan sosial ekonomi masyarakat, ajaran agama bisa menjadi ranah publik, karena nilai-nilainya bersifat universal. Lain halnya jika nilai-nilai tersebut tidak bersifat universal, hanya milik kelompok tertentu saja, misalnya adat perkawinan. Perkawinan antara tradisi Islam dan Kristen berbeda. Namun, ada ranah dari prosesi perkawinan yang menjadi bagian dari publik yang bisa dilaksanakan oleh semua orang tanpa mengenal perbedaan agama dan etnis.

Demikian juga dalam kehidupan ekonomi. Buktinya, ekonomi syariah tidak hanya dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia melainkan juga kaum non-Muslim di Amerika dan Eropa. Meskipun mereka tidak secara langsung menyebutnya syariah, nilai-nilai universal syariah sebenarnya telah dilaksanakan oleh mereka. Maksud saya, agama dalam arti ibadah dan ritual adalah ranah pribadi, tetapi sisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang bersifat universal dari agama bisa menjadi nilai publik.

Secara faktual masuknya agama ke ranah publik justru problematis. Munculnya perda-perda syariah di sejumlah daerah, misalnya, semakin mengukuhkan dominasi agama Islam atas agama lainnya. Implikasinya adalah pelarangan terhadap hak-hak kelompok minoritas dan perempuan. Bagaimana Anda mendudukkan hal itu?

Dalam konteks itu, kita membutuhkan kearifan. Maksud saya adalah ketika nilai-nilai universal suatu agama masuk dalam ranah pubik dan bisa diterima oleh orang lain, maka simbol-simbol agama harus segera dicabut. Perda yang melarang perjudian, misalnya, tidak perlu harus dikatakan sebagai perda syariah. Di sinilah salah

satu arti dari sekularisasi. Untuk menjaga relevansi dengan konteks yang ada, nilai-nilai agama yang menjadi landasan kehidupan sosial, harus rela melepaskan diri dari simbol-simbol yang mengikatnya. Karena nilai itu sudah menjadi etos dari semua umat beragama di Indonesia. Hal itulah yang membedakan antara sekularisasi di Indonesia dengan di Barat. Kalau di Barat, bukan hanya simbol, nilai juga harus dilepas.

Untuk konteks Indonesia, saya kira menjadi penting nilai-nilai agama melandasi berbagai produk hukum yang berlaku. Karena sila pertama Pancasila adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa". Jadi, seluruh produk hukum harus berwawasan ketuhanan. Artinya, setiap warga negara Indonesia harus merasa dirinya umat beragama. Tetapi harus dibedakan bahwa ada bagian agama yang menjadi ranah privat, seperti ibadah dan ritual, yang tidak bisa dicampur-adukkan dengan yang bisa diterima masyarakat umum, yakni nilai-nilai universal. Namun demikian, nilai-nilai universal yang dijadikan nilai bersama hendaknya melepaskan diri dari simbol-simbol agama sumbernya. Kalau tidak, munculnya reaksi balik yang cukup keras dari masyarakat adalah hal yang wajar.

Dengan alasan itu pula, beberapa waktu lalu, Fraksi Damai Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menolak Rancangan Undang Undang Perbankan Syariah, karena secara tegas membawa simbol syariah yang *notabene* Islam. Untuk mengantisipasi reaksi yang tidak produktif, mengapa tidak mengatakan RUU Perbankan Alternatif saja? Padahal, mungkin nilai-nilai yang dikandung dalam sistem perbankan syariah juga cocok untuk semua orang. Buktinya, sistem itu cocok di Eropa yang mayoritas warganya non-Muslim.

Sejak perumusan konstitusi muncul perdebatan yang bermuara pada kesimpulan apakah Indonesia negara Islam atau sekular. Sementara, negara juga mempunyai Departemen Agama (Depag) yang jelas-jelas mengurusi agama. Dari sini, kita tidak pernah secara hitam putih dapat mengatakan bahwa Indonesia adalah negara sekular atau negara agama. Apa komentar Anda?

Menurut saya, Indonesia bukan negara sekular, melainkan negara berketuhanan. Dengan pengertian lain, Indonesia adalah negara yang beragama, tanpa berlandaskan pada syariat agama tertentu. Tetapi, secara universal agama telah menjiwai Pancasila dan UUD 1945. Pada saat yang sama, secara moral, negara juga bertanggung jawab untuk menjaga dan menghidupkan semua agama.

Konstitusi Indonesia sering dikatakan lebih mengadopsi konstitusi negara-negara demokrasi liberal. Sementara liberalisme sendiri menjadi istilah yang terlanjur dipahami dengan sangat pejoratif di Indonesia. Liberalisme kerap dituduh sebagai paham kebebasan tanpa batas. Apa yang Anda pahami dengan liberalisme?

Liberalisme, sebagaimana sekularisme, juga berasal dari Barat. Tapi tidak berarti liberalisme adalah kebebasan tanpa batas. Lihatlah Eropa dan Amerika, liberalisme yang berkembang di sana tetap mengacu pada ikatan-ikatan tertentu. Yang mengikat mereka adalah Undang-Undang Dasar atau konstitusinya. Betapapun liberalnya seseorang tetap dibatasi oleh konstitusi. Selain konstitusi, yang menjadi acuan dan referensi mereka adalah Hak Asasi Manusia (HAM). Karena itu, betapapun liberalnya seseorang, ia

tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Jadi, kebebasan yang dimaksud bukan berarti tanpa batas.

Saya kira, baik di Barat maupun di Indonesia, liberalisme sebenarnya sama saja. Hanya mungkin cara menghadapinya yang berbeda. Antara pemerintah-pemerintah di Barat dan Indonesia agak berbeda dalam cara menghadapi kebebasan. Ini bisa dimaklumi karena kita baru saja lepas dari Orde Baru yang cenderung represif, memberangus kebebasan yang sejatinya dimiliki oleh semua warga negara. Liberalisme dalam segi agama pun menurut saya begitu. Karena Eropa sudah jauh lebih lama memisahkan secara mutlak hubungan agama dan kehidupan sehari-hari, sehingga bisa lebih longgar melihat liberalisme.

> Ketika nilai-nilai universal suatu agama masuk dalam ranah pubik, dan bisa diterima oleh orang lain, maka simbol agama harus dicabut. Perda yang melarang perjudian misalnya tidak perlu dikatakan sebagai perda syariah. Di sinilah salah satu arti dari sekularisasi.

Misalnya saja aborsi. Di Barat, sebagian negara telah memberlakukannya, walau tetap ada negara yang belum memberlakukannya. Sementara di Indonesia, tentu saja aborsi tidak bisa dimasukkan sebagai bagaian dari liberalisme. Karena agama, yang menjadi etos kerja bangsa sekaligus etos yang menafasi konstitusi kita, melarangnya. Di Indonesia, tidak mungkin ada konstitusi yang memberikan kebebasan aborsi.

Pada negara yang demokratis memungkinkan munculnya banyak partai. Di Indonesia, demokrasi yang berkembang kemudian memunculkan partai politik yang berasaskan agama tertentu, seperti Islam dan

Kristen. Pada titik ini, menurut Anda, tantangan seperti apa yang dihadapi demokrasi dan liberalisme?

Partai-partai yang ada di Indonesia tumbuh dalam bingkai konstitusi. Suatu partai tidak mungkin bisa hidup kalau bertentangan dengan konstitusi. Karena itu, munculnya partai-partai yang berasaskan Islam tetap sejalan dengan konstitusi. Islam yang menjadi asas pasti merupakan pemahaman Islam yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Islam yang demikian, berbeda dengan Islam yang ada di negara Iran atau Arab Saudi.

Islam yang menjadi asas partai-partai Islam adalah Islam yang secara kultural dan ritual telah sejalan dengan Pancasila. Tidak dapat dibenarkan jika partai bertentangan dengan Pancasila. Karena Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang menjadi konsensus bangsa Indonesia. Dan sejatinya, Pancasila sendiri merupakan pancaran dari nilai-nilai universal Islam. Kini, yang harus digaris bawahi, bukan saatnya lagi menempatkan Islam dan Pancasila secara berhadap-hadapan.

Bagaimana jika kemudian partai-partai agama justru mendesakkan agenda yang menentang konstitusi. Misalnya, sebagian partai masih ada yang menginginkan Piagam Jakarta diberlakukan kembali. Artinya, partai-partai tersebut, yang secara formal mendefinisikan diri sebagai partai Islam, pada saat yang sama akan menentang konstitusi?

Sebelum menjawab, saya ingin menunjukkan penafsiran yang lebih bagus tentang asas Islam yang ada dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai-partai Islam. Islam di situ, oleh sebagian partai Islam, dipahami sebagai berbasis pada umat

Islam. Artinya, dari segi keanggotaan, partai tersebut berbasis umat Islam; begitupun dari segi ideologi, berideologi Islam universal, bukan yang ekslusif. Ekslusif di sini, artinya hanya berjuang untuk kepentingan Islam.

Sebagai partai politik yang sah di negara ini, partai-partai tersebut seharusnya tak hanya berjuang untuk kepentingan umat Islam, melainkan membangun negara untuk kepentingan semua warga negara. Yang diperjuangkan adalah bangsa Indonesia yang meliputi semua agama dan etnis yang ada. Karena itu, mereka tetap akan memberi ruang bagi kebebasan beragama. Hal ini bahkan menjadi bagian dari perjuangan mereka yang inklusif. Lain halnya jika mereka ekslusif.

> Konstitusi tidak pernah menyebutkan bahwa yang sah di Indonesia hanya Islam Sunni. Karena itu tak ada alasan untuk mengusir dan memberangus Islam yang lain, termasuk Ahmadiyah.

Beberapa partai bersekongkol dengan kepala daerah untuk memberlakukan perda syariah. Mereka pun mengklaim bahwa perda itu terlahir secara legal sesuai dengan prosedur demokrasi. Bagaimana Anda menilainya?

Menurut saya, perda-perda seperti itu tetap bertentangan dengan konstitusi. Demokrasi yang mestinya dipahami adalah demokrasi di bawah payung konsitusi. Demokrasi jangan hanya dimaknai sebagai kekuatan yang bisa ditentukan dengan mengantongi suara seperdua tambah satu. Itu namanya demokrasi prosedural. Di atas segalanya, demokrasi adalah penghargaan setinggi-tingginya terhadap konstitusi, terhadap perundang-undangan yang berlaku.

Sebenarnya, perda syariah bisa saja dibuat dan dijalankan jika isinya bernilai universal dan tidak menggunakan nama syariat Is-

lam. Namakan saja dengan Perda Penghapusan Miras (minuman keras), contohnya. Tanpa simbol-simbol agama seperti itu, saya kira, malah akan lebih banyak mendapatkan apresisasi dari masyarakat luas. Miras bukan hanya urusan syariah, buktinya masyarakat Papua yang *notabene* mayoritas beragama Kristen pun kini berkeinginan untuk menolaknya.

Di Tangerang, misalnya, karena alasan penegakan syariah, perempuan yang keluar malam tanpa muhrim kemudian ditangkap, lantaran dianggap pelacur. Di Padang, banyak siswi non-Muslim terpaksa memakai jilbab. Demikianpun di Aceh, banyak sekali perempuan yang merasa terpaksa memakai jilbab. Apa pendapat Anda?

Saya sepakat bahwa perda syariah kerap kontra-produktif bagi bangsa kita. Betapa tidak, ketika di Tangerang dan Aceh diterapkan perda syariah, rupanya komunitas Kristen di Papua pun menuntut diberlakukannya Perda Injil. Dan tak tertutup kemungkinan, ke depan, di Bali, akan ada tuntutan untuk menerapkan Perda Hindu.

Demi keutuhan NKRI, alangkah bagusnya jika seluruh intisari nilai-nilai universal dari agama-agama yang ada di Indonesia digabung menjadi suatu produk undang-undang dengan tanpa menggunakan label agama tertentu. Kita perlu kembali membangun kearifan untuk meninggalkan egoisme beragama. Agama mestinya berkontribusi untuk memajukan bangsa, bukan malah menghancurkan tatanan bangsa.

Bagaimana pandangan Anda terhadap kebebasan berpikir dan menafsirkan sumber-sumber agama?

Kebebasan berpikir dalam Islam menjadi sesuatu yang sangat terbuka, sepanjang hal yang ditafsirkan tersebut tidak memiliki keterangan pasti dari *nash* (teks) al-Quran atau al-Sunnah. Jika tidak ada *nash* yang menerangkan suatu hal secara jelas, Anda bebas berpikir atau berijtihad. Tapi, kebebasan itu akan sedikit terbatasi jika ada *nash* yang mengaturnya. Mengapa terbatas? Karena kebebasan berpikir dalam konteks itu tetap harus berpangkal pada, atau hanya coba memahami, ayat atau Hadits yang sudah ada. Kita diberikan kebebasan dalam memaknai *nash*, dan tentunya akan lebih bebas lagi jika tidak ada *nash* yang mengatakannya.

Indonesia bukan negara sekular, melainkan negara berketuhanan. Dengan pengertian lain, Indonesia adalah negara yang beragama, tanpa berlandaskan pada syariat agama tertentu. Tetapi, secara universal agama telah menjiwai Pancasila dan UUD 1945. Pada saat yang sama, secara moral, negara juga bertanggung jawab untuk menjaga dan menghidupkan semua agama.

Problem yang terjadi di Indonesia adalah munculnya banyak sekali tafsir yang mengatasnamakan nash tanpa dibarengi penghormatan atas tafsir yang berbeda. Satu tafsir yang dikeluarkan oleh golongan mainstream *seringkali dipaksakan ke semua orang. Yang berbeda dianggap salah, bahkan sesat. Bagaimana pendapat Anda dan bagaimana pula cara menghadapi para pemaksa tafsir seperti ini?*

Memang belum ada metodologi yang disepakati semua orang dalam menafsirkan ayat. Tapi, menurut saya, setidaknya penafsiran atas ayat tertentu hendaknya tidak bertentangan dengan ayat

yang lain. Sebab ayat-ayat al-Quran merupakan satu kesatuan yang tidak saling bertentangan. Meski demikian, jika ada orang yang menafsirkan secara berbeda, maka kita tidak boleh menghakimi atau mengenyahkan kelompok penafsir yang berbeda ini dari pergaulan kita. Bagi saya, sepanjang masih bergelut dengan ayat, entah bentuk tafsirnya seperti apa, dia masih bagian dari kita (Muslim).

Pada tataran itu, maka perbedaan kita dengan Ahmadiyah tak perlu diselesaikan dengan penghakiman. Mereka tidak bisa kita pisahkan dari Islam. Karena nyatanya yang hingga kini mereka geluti adalah al-Quran dan al-Sunnah. Tuhan mereka Allah dan nabinya Muhammad saw. Yang membedakan hanya cara memahami al-Quran dan al-Sunnah. Mereka memahami bahwa al-Quran memberi peluang datangnya nabi baru untuk membantu kerasulan Muhammad saw. Meski begitu, atas perbedaan tersebut, kita tidak berhak untuk menghakimi, karena itu hanyalah hak Tuhan.

Di Indonesia, para penganut Ahmadiyah adalah warga negara yang sah, yang berhak mendapatkan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan dari negara. Lantas, mengapa kita harus mengusir dan menghabisi mereka atau merusak rumah ibadah (masjid) dan harta benda mereka? Itu tidak benar.

Kasus penghakiman terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan Al-Qiyadah Islamiyah adalah bukti kealpaan negara atas kewajibannya melindungi hak-hak dan kebebasan sipil yang dijamin konstitusi. Dalam kasus tersebut negara mengamini fatwa MUI, sehingga melegalkan pemberangusan suatu kelompok. Menurut Anda, bagaimana seharusnya sikap negara menghadapi masalah perbedaan?

Menurut saya, fatwa MUI sebenarnya tak terlampau istimewa. Fatwa tak ubahnya dengan pendapat. Dan pendapat MUI merepresentasikan pendapat kaum Sunni. Sebab, MUI adalah majelis ulama kaum Sunni. Maka, jangankan Ahmadiyah, Syi'ah pun disalahkan, diharamkan. Kalau MUI ditanya, benarkah akidahnya Duta Besar Iran di Indonesia itu? Jawabannya pasti salah, karena Duta Besar Iran untuk Indonesia itu orang Syi'ah. Semua ajaran Syi'ah, Ahmadiyah, dan lainya, yang berbeda dengan MUI, akan dianggap salah, sesat.

Bagaimana pemerintah mesti bersikap? Menurut saya, pemerintah harus arif dan bijaksana. Dia harus tegas dan memiliki komitmen untuk menegakkan konstitusi.

Fatwa atau pendapat MUI bukan atau tidak sama bahkan jauh di bawah konstitusi. Karena itu, fatwa MUI jelas tak dapat dijadikan dasar bertindak bagi pemerintah. Fatwa hanya menjadi saran atau masukan untuk Departemen Agama, sebagai wakil pemerintah, untuk membina masyarakat Sunni yang mungkin dikhawatirkan tertular oleh paham yang dianggapnya tidak benar. Sekali lagi, fatwa itu hanya sebatas pembinaan, sehingga tidak boleh dianggap sebagai dasar untuk bertindak, menghakimi pihak yang difatwa.

> Lihatlah Eropa dan Amerika, liberalisme yang berkembang di sana tetap mengacu pada ikatan-ikatan tertentu. Yang mengikat mereka adalah Undang-Undang Dasar atau konstitusinya. Betapapun liberalnya seseorang tetap dibatasi oleh konstitusi.

Jadi, sebenarnya yang bersalah bukanlah MUI, karena MUI hanya sebatas berfatwa tanpa instruksi agar fatwanya dieksekusi. Hanya saja, ke depan kita berharap fatwa MUI seperti itu sebaik-

nya disertai penjelasan bahwa fatwa hanya sebatas pendapat, yang seharusnya ditindaklanjuti dengan bimbingan persuasif kepada umat, bukan tindakan amuk massa. Dengan demikian, insya Allah fatwa MUI tidak akan disalahgunakan lagi oleh masyarakat yang sedang beringas.

Kenyataannya MUI tak sekadar bertindak sebagai ulama yang membina umat (Sunni), tapi telah berperan layaknya negara. Fatwa MUI berimplikasi pada munculnya tindakan anarkis masyarakat untuk menindas dan menyingkirkan golongan lain. Di sisi lain, negara hanya membiarkannya. Bagaimana Anda menilai sikap dan peran negara dalam menghadapi kasus semacam ini?

Sekali lagi saya tegaskan mestinya fatwa MUI dipandang tidak lebih sebagai pendapat atau himbauan yang berlaku hanya di kalangan Islam Sunni, tidak untuk Ahmadiyah dan lainnya. Untuk menyikapi hal itu, maka negara harus kembali pada konstitusi (UUD 1945), Pancasila serta peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur hak-hak masyarakat untuk beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya. Konstitusi tidak pernah menyebutkan bahwa yang sah di Indonesia hanya Islam Sunni. Karena itu tak ada alasan untuk mengusir dan memberangus Islam yang lain, termasuk Ahmadiyah.

Meski konstitusi menjamin hak-hak dan kebebasan berkeyakinan setiap warga, sayangnya negara, dalam hal ini pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tidak menjalankan amanat konstitusi. Pemerintah SBY lebih senang menjaga citra dan menebar pesona. Maka tak heran jika sikapnya terhadap penanganan kasus Ahmadiyah, Al-Qiyadah al-Islamiyah, Lia Eden,

dan sebagainya, cenderung diam, terkesan membiarkan tindakan anarkis menimpa mereka, bahkan mungkin ikut menghakimi mereka. Sikap tersebut dapat dibaca sebagai upaya SBY untuk meraih simpati mayoritas umat Islam demi kepentingan Pemilu 2009 mendatang. Saya kira kalau SBY konsisten dengan konstitusi sebagai amanah yang harus dijalankan oleh pemerintah, kasus-kasus anarkisme tersebut tak akan terjadi.

Pada sisi yang lain, Departemen Agama, sebagai representasi pemerintah, mestinya juga membina Muslim Sunni agar tidak tertular Ahmadiyah, Lia Eden, dan Al-Qiyadah, bukan malah berusaha menindak dan menyingkirkan paham-paham keagamaan tersebut.

Bukankah dengan keterlibatan Departemen Agama dalam membina masyarakat malah akan menambah masalah? Karena sebagai representasi negara, kalau mau adil, Depag juga harus membina Muslim Ahmadiyah, Lia Eden, dan aliran-aliran serta agama lainnya (di luar enam agama resmi)?

Ya, memang posisi Depag dilematis. Karena faktanya Depag sendiri tidak merepresentasikan seluruh aliran Islam yang ada. Meski di sana ada Bidang Penerangan Agama, tapi bidang itu tak ubahnya Penerangan Agama Islam Sunni. Kalau Islam yang boleh berkembang di Indonesia hanya Islam Sunni, maka akan banyak sekali orang yang harus terusir dari negeri dan tanah air mereka sendiri. Kemudian, duta besar Iran yang mempercayai *imâmah* pun tak akan diperbolehkan tinggal di Indonesia.

Dulu, ketika Petinju Legendaris Muhammad Ali sedang berjaya, ia menjadi kebanggaan Muslim Indonesia. Padahal, Muhammad Ali bukan Muslim Sunni. Ia justru berasal dari kelompok *Black*

Muslim yang percaya bahwa Elijah Muhammad adalah Tuhan, atau minimal Rasul. Tapi, karena rasa kebanggaan pada Muhammad Ali, umat Islam Indonesia pun mengelu-elukannya. Sekarang, Ahmadiyah dan lain-lain tidak mungkin mendapatkan hal yang sama. Umat mereka malah hanya mendapatkan diskriminasi di negerinya sendiri. Padahal Ahmadiyah jelas-jelas telah berbadan hukum yang sah menurut Departemen Kehakiman.

Hal itu saya ungkap, karena dulu ketika kuliah di Strata 1 (S-1), sikap saya mirip dengan MUI sekarang. Skripsi yang saya angkat adalah tentang Ahmadiyah. Isinya koreksi total atas paham keagamaan dan ajaran Ahmadiyah. Sekarang saya sadar, bahwa meskipun skripsi itu menunjukkan perbedaan saya dengan Ahmadiyah, tapi saya akan salah kalau karena perbedaan itu, saya harus membenci Ahmadiyah. Jadi, walaupun saya sependapat dengan MUI tentang akidah Ahmadiyah, tapi sikap saya sekarang sama sekali berbeda dengan MUI.

Implikasi fatwa sesat MUI sangat nyata. Umat Islam mainstream *yang merujuk pada fatwa MUI sama sekali tidak toleran dan mengeksklusi kalangan minoritas. Ditambah lagi konstitusi kita masih menyimpan pasal karet (pasal 156a tentang penodaan agama), yang sangat menunjang pemberangusan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Apa tanggapan Anda?*

Saya melihat, sekarang negara sedang digerakkan oleh pemerintah yang tidak konsisten dengan amanat konstitusi. Mungkin secara konseptual mereka lalai, tapi mungkin juga pemerintah melakukannya dengan sengaja demi menjaga citra hingga pemilu 2009.

Menurut Anda apakah menjaga citra hingga Pemilu 2009 menjadi salah satu motif pemerintah mendiamkan terjadinya kekerasan terhadap minoritas (crime by omission) *dan merestui penerapan perda syariah?*

Fatwa tak ubahnya dengan pendapat. Dan pendapat MUI merepresentasikan pendapat kaum Sunni. Sebab, MUI adalah majelis ulama kaum Sunni. Maka, jangankan Ahmadiyah, Syi'ah pun disalahkan, diharamkan.

Mungkin dari segi reaksi umat Islam, perda syariah merupakan bagian dari kultur dan keimanan mereka. Tapi dari sikap pemerintah yang membiarkan, saya kira lebih cenderung bermotif politik. Mereka, lagi-lagi, tidak mau citranya rusak di depan mayoritas umat Islam (Sunni) hanya karena melakukan sedikit tindakan, misalnya membela atau lebih tepatnya bertindak adil terhadap kaum Ahmadiyah.

Bisa dipertegas, Sunni mana yang Anda maksud, karena kalau bilang MUI, di sana jelas terdapat banyak kelompok yang berbeda-beda, ada NU, Muhammadiyah, Persis, HTI dan lainnya?

Kelompok-kelompok yang sekarang ada di MUI semuanya mengaku Sunni. Kalau Syi'ah, Ahmadiyah, Lia Eden, itu bukan Sunni. NU, Muhammadiyah dan lainya adalah Sunni. Meskipun kelompok-kelompok Sunni juga memiliki pandangan dan sikap yang berbeda satu sama lain. Ada yang cenderung radikal, sementara ada juga yang moderat bahkan liberal.

Bagi sebagian kalangan, ekonomi liberal dianggap tidak pro-rakyat. Sebagai pengurus partai politik yang mengatasnamakan diri sebagai

partainya wong cilik *(PDIP), bagaimana Anda menilai baik buruknya praktik liberalisme atau neoliberalisme dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia?*

Prinsip partai kami adalah: dalam bidang ekonomi Indonesia harus mandiri; politik Indonesia merdeka; dan pada bidang budaya Indonesia bermartabat. Mandiri tidak berarti harus menolak bekerja sama dengan negara lain. Pengertian mandiri di sini yaitu kita harus berdaulat dalam bidang ekonomi, dengan menguatkan ekonomi kerakyatan, utamanya kepada petani dan nelayan. Hal itu harus kita tumbuhkan, baik dalam arti dituangkan dalam undang-undang dan peraturan-peraturan, maupun dalam arti bimbingan langsung kepada rakyat. Itulah yang saya maksud ekonomi yang merakyat, yakni ekonomi yang mandiri tetapi tidak berarti menolak berhubungan dengan dunia luar. Karena yang namanya bernegara pasti ada hubungan timbal-balik dengan negara lain, termasuk dalam perdagangan dan jasa.

Pemerintah sekarang, menurut penilaian saya, kurang berperan dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan, seperti petani dan nelayan. Mestinya pemerintah berpihak kepada mereka, dengan menyediakan lahan pertanian yang lebih banyak, mengupayakan tersedianya pupuk, bibit pertanian yang unggul, dan memajukan teknologi pertanian. Hal itu perlu dirumuskan dengan baik, bukan malah meninggalkan petani ketika gagal panen. Selama ini, pemerintah lebih pro kepada pengusaha. Maka, kalau petani mengalami gagal panen, pemerintah meminta pengusaha untuk mengimpor beras dari negara lain. Akibatnya, ketahanan pangan sekarang tidak lagi di tangan rakyat kecil atau petani, tetapi berada di tangan pengusaha. Itu terjadi karena secara konseptual, pemerintah tidak terketuk untuk berpikir bagaimana melakukan pemberdayaan dan

penguatan ekonomi petani dan nelayan.

Menurut mazhab Hanafi, orang boleh salat tanpa menggunakan bahasa Arab, dan itu banyak dianut oleh umat Islam di Turki. Oleh sebab itu, ketika terjadi sekularisasi, di mana azan diubah dari bahasa Arab menjadi bahasa Turki, masyarakat Islam Turki tidak menolak.

Bagi banyak kalangan, Indonesia kini jelas-jelas mengadopsi ekonomi yang liberal, sistem ekonomi yang pro-pasar, bagaimana Anda menyikapinya?

Kebijakan semacam itu tidak benar. Kita harus kembali kepada kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat mestinya tidak hanya diberlakukan dalam bidang politik, tetapi juga di bidang ekonomi. Karena kalau kita mau melepaskan begitu saja perekonomian terhadap mekanisme pasar, rakyat kecil, seperti petani dan nelayan yang masih tradisional, pasti kalah dan akan terusir. Lihatlah, berapa banyak pasar tradisional yang setiap hari tergusur oleh pengusaha-pengusaha besar. Pasar tradisional kini telah diganti Carrefour, Giant, dan sebagainya, yang berdiri megah di atas lahan-lahan yang sebelumnya menjadi milik rakyat. Tetapi tidak berarti pasar modern tersebut dilarang. Pasar tersebut sah-sah saja, sepanjang memberi kontribusi bagi pelibatan rakyat kecil dalam dunia perekonomian, misalnya dalam bentuk kemitraan, minimal tidak mematikan usaha ekonomi yang selama ini digeluti oleh rakyat kecil.

Kendati bagi para petani dan nelayan, sebagai produsen, sangat dirugikan, namun ada pandangan yang mengatakan bahwa keberadaan Carrefour, Giant dan lainnya justru menguntungkan rakyat (para kon-

sumen). Karena ternyata harga yang diberikan oleh supermarket tersebut rata-rata lebih murah dibanding dengan harga di pasar tradisional. Menurut Anda masyarakat yang manakah yang harus dilindungi?

Memang, pertama kali secara instan liberalisme mungkin akan terlihat menguntungkan rakyat. Tapi, yang harus menjadi prioritas pemerintah sebenarnya bukan membuka pasar-pasar modern yang berskala besar, tapi, sebagai negara agraris, pemerintah harus memprioritaskan pembinaan secara konsisten kepada petani. Dengan demikian, petani dapat mengolah lahan pertaniannya sehingga berproduksi lebih banyak dan lebih berkualitas, dengan harga jual yang tetap bisa rendah atau murah. Yang terjadi, karena semakin lama biaya produksi kian mahal, pemerintah pun meninggalkan petani. Mestinya pemerintah memberdayakan petani, sehingga petani bisa berproduksi secara murah, dengan hasil maksimal, bukan malah mengimpor produk pertanian dari Thailand dan lain sebagainya. Itulah yang saya maksud dengan ekonomi kerakyatan.

Selain mengharamkan sekularisme dan liberalisme, MUI juga mengharamkan pluralisme. Bagi MUI pluralisme sama dengan sinkretisme, mencampuradukkan ajaran-ajaran agama, dan relativisme, tidak ada kebenaran yang satu melainkan banyak dan berada di mana-mana, karenanya tidak bisa mengklaim hanya satu agama yang benar. Bagaimana menurut Anda sendiri?

Pertama, pemahaman MUI bahwa pluralisme tak lain dari sinkretisme adalah keliru. Karena, yang perlu ditekankan di sini, semua agama baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu maupun Budha tidak berpaham bahwa pluralisme berarti sinkretisasi dari seluruh agama yang ada. Kalau yang dimaksudkan haram oleh MUI adalah

pluralisme dalam pengertian seperti itu, maka saya menganggap fatwa tersebut sebagai suatu kemubaziran. Sebab, anggapan MUI bahwa pluralisme dalam arti sinkretisme itu haram, begitupun kalangan masyarakat umum telah mafhum: mengharamkan sinkretisasi agama-agama. Maka, fatwa yang dikeluarkan pun tetap mubazir. Karena apabila masyarakat umum memang sudah mengharamkannya, mestinya hal itu tidak usah difatwakan. Fatwa tidak akan memiliki arti apa-apa kalau hanya mengeluarkan sesuatu yang sama dengan anggapan kebanyakan orang, anggapan masyarakat pada umumnya.

> Pemahaman MUI bahwa pluralisme tak lain dari sinkretisme adalah keliru. Karena semua agama baik Islam, Kristen, Hindu, maupun Budha tidak berpaham bahwa pluralisme berarti sinkretisasi agama-agama. Kalau yang dimaksud haram oleh MUI adalah pluralisme dalam pengertian itu, maka saya menganggap fatwa tersebut sebagai suatu kemubaziran.

Kedua, tentang relativitas kebenaran agama. Menurut saya, justru memang seharusnya begitu. Saya sebagai seorang Muslim, mengakui Islam agama yang benar. Tetapi, pada saat yang sama, saya juga harus tetap memberi hak kepada orang lain untuk mengakui bahwa agama mereka benar. Itu yang dimaksud pluralisme. Meskipun saya tidak pada posisi mengakui kebenaran agama mereka, tetapi saya harus memberikan ruang kepada mereka, baik yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, maupun aliran-aliran kepercayaan untuk mengakui kebenaran agama dan keyakinan mereka. Inilah yang disebut multi-kebenaran. Saya tentu mengakui bahwa agama saya benar, tetapi orang lain pun berhak mengakui kebenaran agamanya masing-masing.

Dalam konteks ini, yang saya pahami dengan pluralisme adalah paham untuk memberi ruang kepada semua agama mengakui kebenarannya masing-masing, tanpa saling mengganggu dan merendahkan. Kita tidak boleh marah ketika ada orang lain yang mengaku agamanya sebagai kebenaran, karena agama saya, tentunya menurut saya, juga adalah kebenaran. Sikap-sikap yang tidak toleran atas pengakuan kebenaran suatu agama atau keyakinan bagi para penganutnya, sudah seharusnya segera dibenahi. Maka, sekali lagi, pluralisme hendaknya ditunjukkan dengan tetap mengakui kebenaran agama masing-masing atau memberi ruang kepada orang lain untuk mengakui kebenaran agamanya, sebagaimana pengakuan kebenaran atas agama saya, tanpa saling mengganggu.

Dalam Islam pemahaman seperti itu memang sudah sejak awal jamak diketahui melalui ayat-ayat al-Quran yang cenderung pluralistik. Namun demikian, tak dapat disangkal bahwa terdapat ayat-ayat al-Quran yang tidak bercorak pluralis. Melihat fakta tersebut, menurut Anda sebenarnya Islam adalah agama yang pluralis atau tidak?

Menurut saya, Islam adalah agama yang pluralis. Yang tidak pluralis adalah penganutnya (Muslim). Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, yang beriman dan beramal saleh, pahalanya akan tetap dihitung dan akan masuk surga tanpa terkecuali. Dalam terjemahan Departemen Agama, Sabi'in dikatakan sebagai penyembah dewa, saya sendiri memaknainya sebagai penyembah dewa Syiwa (Shivaian) yang berarti Hindu. Jadi Hindu pun terakomodir dalam al-Quran. Dan al-Quran berkata, kalau mereka beriman dan beramal saleh akan masuk surga. Tapi, kalau Anda tidak mau mengakui mereka masuk surga, minimal

berikanlah hak kepada mereka untuk mengakui kebenaran agamanya. Jangan memonopoli kebenaran dengan menutup ruang-ruang untuk orang lain mengakui kebenaran yang berbeda.

Celakanya, pemahaman yang mainstream *di kalangan umat Islam Indonesia sekarang adalah pandangan yang monistik. Pandangan ini beranggapan bahwa kebenaran agama adalah satu, tidak bisa ditawar lagi. Karena agama saya benar, maka yang lain salah, sesat. Sehingga, kesesatan minoritas seperti Ahmadiyah, Lia Eden, Usman Roy, dan lainnya harus diberangus. Apa pendapat Anda menanggapi hal itu?*

Penyebab utamanya adalah karena mayoritas umat Islam Indonesia terlanjur menganut mazhab Syafi'i. Mereka tidak pernah diperkenalkan dengan mazhab-mazhab lain, khususnya mazhab Hanafi. Padahal, jika mereka diperkenalkan dengan mazhab Hanafi, pasti akan bisa memaklumi tindakan seperti yang dilakukan Usman Roy. Dari situ mereka akan tahu bahwa ada pendapat yang memperbolehkan orang untuk melakukan salat dengan dua bahasa. Menurut mazhab Hanafi, orang boleh salat tanpa menggunakan bahasa Arab, dan itu banyak dianut oleh umat Islam di Turki. Oleh sebab itu, ketika terjadi sekularisasi, di mana azan diubah dari bahasa Arab menjadi bahasa Turki, masyarakat Islam Turki tidak menolak.

Artinya, jika umat Islam Indonesia membuka wawasan keislamannya dengan tidak semata mengacu pada satu mazhab (Syafi'i), maka salat dengan menggunakan bahasa manapun tidak menjadi masalah. Tapi, itulah yang selama ini tidak disadari dan dipahami umat Islam di Indonesia. Karena, sekali lagi, dari dulu Indonesia hanya diajari satu mazhab saja, yaitu Syafi'i. Tidak ada yang mau tahu dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi yang cenderung

berperspektif terbuka agak diragukan di Indonesia, karena ketika agama Islam masuk telah berdiri kesultanan dan kerajaan-kerajaan yang memerlukan kemapanan. Di antara empat mazhab besar yang terdapat dalam Islam, yang paling sesuai dan pro-kemapanan adalah mazhab Syafi'i. Sehingga semakin "klop"lah mazhab ini dengan kultur kepemimpinan yang mendambakan kemapanan dan, akhirnya juga, mapan di masyarakat kebanyakan.

Menurut Anda, adakah budaya di Indonesia yang mendukung pandangan pluralisme? Sejak Indonesia terlahir dan kita mengikatkan diri sebagai satu kesatuan, apakah kita memang cenderung pluralis, toleran atau malah tidak toleran?

Sebenarnya Islam yang datang ke Indonesia adalah Islam yang toleran. Dalam sejarahnya, Islam dapat berkembang di Jawa dengan memanfaatkan instrumen-instrumen yang tidak pernah ada di Arab. Gamelan dan wayang yang merupakan produk budaya lokal paling populer dimanfaatkan sebagai sarana berdakwah oleh Walisongo. Saya kira dakwah yang mereka lakukan sangat toleran terhadap budaya-budaya yang ada di Indonesia.

Sikap intoleransi justru muncul di Indonesia baru sekitar 30-an tahun yang lalu. Dulu, sebelum agama Islam berada pada perkembangannya seperti sekarang, Muhammadiyah dan NU adalah organisasi keagamaan sekaligus penyebar toleransi yang paling besar. Intoleransi kemudian muncul ketika Islam Indonesia banyak dipengaruhi mazhab yang berkembang di Arab Saudi, seperti Wahhabi. Wahhabisme berusaha mengembalikan kemurnian Islam (purifikasi) dengan tindakan yang tak jarang salah kaprah. Wataknya agresif terhadap perbedaan. Wajah Islam yang kaya dan penuh

rahmat diringkus pada satu pandangan keagamaan yang konservatif, puritan, dan fundamentalistik.

> Tidak dapat dibenarkan jika partai bertentangan dengan Pancasila. Karena Pancasila adalah nilai-nilai dasar yang menjadi konsensus bangsa Indonesia. Dan sejatinya, Pancasila sendiri merupakan pancaran dari nilai-nilai universal Islam.

Konsep SARA yang dipraktikkan Orde Baru (Orba), meski terlihat jitu meredam konflik antar-agama dan keyakinan, tak ubah seperti bara dalam sekam. Makanya, ketika Orba tumbang, tatanan itu pun seketika luluh, masyarakat cenderung berada pada kondisi anarkis, chaos. *Apakah pola SARA juga menjadi penyumbang terhadap sikap intoleran masyarakat belakangan ini?*

Sebenarnya politik SARA dimaksudkan oleh Orba untuk meredam munculnya simbol-simbol keagamaan dalam berpolitik. Politik SARA sangat terlihat keampuhannya ketika pemerintah ingin menundukkan Masyumi dan Partai-partai Islam lainnya. Saya kira, dari aspek politik, SARA cukup berhasil. Tapi, mungkin saja aspek itu dapat berimplikasi pada praktik kultural masyarakat. Pandangan Anda ihwal SARA, pada wilayah kultural, sangat mungkin benar.

Apakah Anda melihat keberhasilan politik SARA dalam meredam puritanisme agama; bukankah konsep SARA menciptakan segregasi, berhenti pada simbol-simbol dan tidak masuk dalam problem yang paling fundamental; dan bukankah Orba tidak dapat membangun komunikasi antaragama yang intensif dan konstruktif bagi pluralitas?

Orba di satu sisi membuat aturan-aturan SARA dan di sisi lain melakukan pengelompokan kekuatan politik dalam bentuk partai Islam, Golkar, dan Nasionalis. Itulah yang justru, menurut saya, menjadi kekeliruan besar Orba. Seharusnya Orba tidak perlu mengelompokkan partai politik berlatar belakang agama menjadi Partai Islam, sebab di dalamnya mungkin ada yang progresif dan yang konservatif. Lebih aman, kalau mau, mengelompokkan Muhammadiyah dan Protestan ke dalam kubu progresif, misalnya, sementara kubu konservatif berisi gabungan NU dan Katolik. Itu menurut saya lebih baik, karena tidak dikelompokkan dalam satu agama –ketimbang membangun satu kubu yang semakin memperkuat isu SARA dan memicu tumbuhnya benih-benih perpecahan.

Kita berharap bahwa kehidupan bangsa Indonesia ke depan akan semakin damai, tidak ada lagi perang dan tindak kekerasan antarumat beragama, suku, daerah dan sebagainya. Menurut Anda, akan seperti apakah masa depan keberagaman Indonesia?

Saya kira kalau gagasan pluralisme berjalan secara proporsional dan tepat, kedamaian antarumat beragama akan terjalin. Tentu saja, kedamaian yang tidak semu, melainkan kedamaian yang penuh *silaturrahim* dan saling pengertian antarsesama mereka yang berbeda. Dengan demikian, orientasi kita dalam membangun bangsa ini semestinya bukan mengutamakan isu kebenaran agama dan keyakinan, tapi lebih kepada isu bagaimana keyakinan-keyakinan yang beragam ini bermanfaat untuk bangsa. Maka, mencari apa yang lebih bermanfaat untuk kepentingan bangsa itulah yang lebih menjamin terciptanya kedamaian.

Kita berharap kedamaian itu terwujud. Tapi itu tidak akan tercapai kalau pemerintah tidak konsisten dengan konstitusi.

Di samping itu, kita juga harus menyadari bahwa ada hal-hal yang perlu dikoreksi dari kultur kita, terutama dalam bidang pendidikan. Dulu, ketika zaman penjajahan, pesantren dan madrasah mengajarkan ayat-ayat yang revolusioner. Sekarang, seiring dengan perubahan zaman, ayat-ayat yang diajarkan beserta penafsirannya pun harus mengarah ke kebersamaan dan mengakui perbedaan. Kurikulum, secara lebih luas, hendaknya diubah dan dibenahi agar semakin bertambah baik dan bermanfaat untuk kemajuan bangsa. Kurikulum kita, yang diajarkan dari Taman Kanak-kanak hingga Perguruan Tinggi, hendaknya semakin banyak memperkenalkan wacana pluralisme agar dapat mengilhami anak didik untuk saling menghormati satu sama lain.

Wawancara dilakukan di Lenteng Agung, 11 Februari 2008

Percakapan dengan

Haryatmoko

Haryatmoko, pengajar di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB), Universitas Indonesia, S3 Politik Universitas Indonesia, dan Pasca-Sarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Struktur pemaknaan kehidupan memiliki paradigma berbeda-beda. Agama ditantang mampu memberi jawaban kontekstual dengan tidak berpuas diri apalagi memaksakan doktrin-doktrinnya. Sehingga "yang lain" tidak dianggap sebagai ancaman. Justru kehadiran "yang lain" memberi kesempatan bagi kita sebagai saat-saat moral. Maka yang terlebih dahulu dipersiapkan dalam membangun hubungan antaragama adalah menciptakan suasana perjumpaan. Untuk itu pluralisme dilihat bukan sebagai ideologi, tetapi bagaimana kemanusiaan semakin memanggil kita untuk lebih terbuka terhadap yang lain, bukan mengancamnya. Kecenderungan pengelompokan atas dasar agama seharusnya jangan berhenti pada sebatas akivitas yang karenanya kita justru melebarkan perbedaan dengan yang lain, sebaliknya ditingkatkan menjadi aktivitas kelompok yang terbuka.

Sekularisme sering disalahpahami sebagai paham yang menyebabkan decline of religion *di mana fungsi dan peran agama di masyarakat terpinggirkan atau lebih jauh lagi menimbulkan ketidakpedualian masyarakat terhadap agama yang berujung pada atheisme, bahkan anti-agama. Bagaimana pandangan Anda tentang sekularisme?*

Apabila ditelaah dengan seksama, saya melihat ada beberapa kemungkinan reaksi terhadap sekularisme. Reaksi pertama adalah menentangnya. Karena itu reaksi ini lebih bersifat negatif. Reaksi model pertama ini muncul lebih karena sekularisme merupakan bentuk dari rasionalisasi, sebagaimana dikatakan oleh Max Weber. Rasionalisasi menuntut agar rasionalitas kehidupan masyarakat dan rasionalitas di dalam bertindak sungguh-sungguh didasari atas pertimbangan-pertimbangan mengenai tujuan dalam menentukan pilihan sarana. Bagi saya, reaksi yang anti atau melawan sekularisme, sebagaimana reaksi pertama ini, hanya akan menjadi bumerang. Sebab, dengan sikap seperti itu justru masyarakat akan menjadi tertinggal. Kehidupan masyarakat menjadi sesuatu yang *archaic* dan lama-kelamaan akan tersingkir.

Sementara reaksi yang berikutnya lebih positif. Sebetulnya, reaksi yang positif terhadap sekularisme, terutama bagi agama sendiri, justru menjadikan agama-agama merasa lebih tertantang. Karena sekularisme menyatakan bahwa dalam kehidupan tidak hanya terdapat satu paradigma kehidupan, sebagaimana dikatakan oleh agama. Kalau meminjam istilahnya Foucault, *episteme*, agama dan kehidupan bukan lagi berarti bahwa semua harus menuju pada satu Tuhan, tetapi bahwa struktur pemaknaan kehidupan niscaya memiliki paradigma bermacam-macam. Justru di situlah agama ditantang untuk mencoba memberikan jawaban, tidak berpuas diri

dan malah memaksakan doktrin-doktrinnya. Kini agama harus dapat menawarkan jawaban-jawaban yang kontekstual. Agama ditantang untuk menjadi lebih relevan dalam menjawab persoalan zaman: mengatasi problem ketidakadilan dan kemiskinan masyarakat. Sebab, kalau kita melihatnya secara lebih kritis, jangan-jangan reaksi berlebihan yang ditunjukkan agama-agama terhadap sekularisme justru memang menunjukkan ketidakmampuannya untuk berhadapan dengan tantangan-tantangan baru.

Sekularisme menyatakan bahwa dalam kehidupan tidak hanya terdapat satu paradigma kehidupan, sebagaimana dikatakan oleh agama. Kalau meminjam istilahnya Foucault, *episteme*: agama dan kehidupan bukan lagi berarti bahwa semua harus menuju pada satu Tuhan, tetapi bahwa struktur pemaknaan kehidupan niscaya memiliki paradigma bermacam-macam. Justru di situlah agama ditantang untuk mencoba memberikan jawaban, tidak berpuas diri dan malah memaksakan doktrin-doktrinnya. Kini agama harus dapat menawarkan jawaban-jawaban yang kontekstual.

Apa yang dipaparkan Anda persis seperti gagasan yang ditawarkan Jose Casanova tentang deprivatisasi: menghadirkan kembali fungsi dan peran agama ke dalam ranah publik. Ia mengoreksi privatisasi agama yang, menurutnya, pada akhirnya hanya meyebabkan peminggiran agama. Menurut Anda bagaimanakah agar agama tetap terlihat santun di ruang publik dalam konteks Indonesia?

Menurut saya, salah satu caranya adalah agama harus berani menawarkan model-model interpretasi yang kritis terhadap diri sendiri. Artinya, di dalam menafsirkan teks-teks agama, kita ha-

rus bertitik tolak dari kenyataan di mana kita hidup. Di sini saya sepakat dengan apa yang ditawarkan Paul Ricouer bahwa penafsiran yang baik adalah penafsiran yang membawa si penfsir memahami diri menjadi lebih baik. Untuk memahami diri menjadi lebih baik, kita harus berani mengambil jarak, "distansiasi". Ricouer menawarkan tiga macam cara distansiasi, yaitu kritik ideologi, dekonstruksi, dan analogi permainan. Kritik ideologi adalah kritik terhadap keyakinan-keyakinan dan ilusi-ilusi kita yang kadang-kadang menipu atau mengalihkan atau menutupi sesuatu dari kita. Dengan kritik ideologi, kita diajak untuk mengkritisi itu semua, bukan mengingkari. Analoginya: kalau kita membaca suatu teks dengan jarak yang sangat dekat dengan mata, justru tidak bisa membaca; tetapi begitu mengambil jarak, kita bisa membacanya dengan sangat jelas. Distansiasi penafsiran tidak digunakan untuk mengingkari keyakinan atau iman, melainkan untuk melihat lebih jelas diri kita sendiri. Itulah bentuk pemurnian.

Dekonstruksi pada Ricouer memang tidak persis sebagaimana dikatakan Derrida. Dekonstruksi di sini adalah pembongkaran kepentingan-kepentingan, motivasi, dan tujuan si penafsir. Sebab, dekonstruksi itulah yang dapat membantu membongkar hal-hal yang membawa konflik atau konfrontasi dengan orang atau kelompok lain. Memang harus kita akui bahwa penafsiran tidak mungkin bersih dari segala bentuk motivasi atau kepentingan. Tetapi, minimal, dengan dekonstruksi model Ricouer ini, kita bisa melokalisir sumber konflik atau pertentangan itu.

Analogi permainan, sebagai bentuk pengambilan jarak, maksudnya adalah sebagaimana ketika kita sedang bermain, kita dilepaskan dari segala keseriusan hidup sehari-hari. Begitupun seharusnya ketika kita membaca atau menafsirkan. Kalau kita bermain, kita merasa le-

pas dari segala ketakutan sanksi sosial atau hirarki kehidupan sosial. Misalnya ketika *dies natalis* fakultas diadakan pertandingan sepakbola antara mahasiswa dan dosen. Maka seorang mahasiswa tidak bisa atau tidak mungkin begitu saja mempersilakan lawannya untuk menguasai dan memasukkan bola ke dalam gawangnya, hanya karena dia tahu bahwa lawannya itu adalah dosennya. Itu namanya tidak sedang bermain sepakbola, tetapi masih di dalam struktur hidup yang terlalu serius, masih terhierarkisasi, takut akan sanksi sosial. Dari situ dapat dipahamai bahwa pengambilan jarak dengan analogi permainan, dengan kebebasan yang ada, memungkinkan kreativitas untuk lebih tumbuh. Menurut Ricouer, dalam permainan telah terjadi apa yang ia katakan bahwa "imajinasi mendahului kehendak". Itu yang saya maksudkan bahwa agama harus berani mengambil jarak di dalam segala bentuk penafsirannya, sehingga akan terbuka dan terbongkarlah kepentingan, keyakinan dan ilusi yang ada di dalamnya. Pada saat yang sama, kita juga sekaligus diajak dan diseret untuk dibawa kepada suasasna kreativitas, menghilangkan suasana ketakutan, tidak dogmatis, dan diundang pada penemuan atmosfer relevansi di dalam kehidupan. Maka perjumpaan-perjumpaan informal: lomba musik, pertandingan olah raga, *camping* bersama lintas-agama, bermain teater bersama, merupakan bentuk analogi permainan dalam hubungan antaragama.

Apakah tawaran untuk meletakkan agama secara kritis dan mampu menjarak sudah otomatis berlaku juga untuk ilmu pengetahuan? Bukankah dalam proses sekularisai, terdapat marka yang jelas bahwa ilmu pengetahuan harus bebas dari segala nilai, baik nilai agama maupun nilai tradisi?

Dalam ilmu sosial, apakah ada ilmu yang bebas nilai? Secara epistemologis kita harus mengakui bahwa amat sulit menemukan ilmu pengetahuan yang bebas nilai. Mengapa? Karena ilmu-ilmu sosial baru berkembang pada abad ke-19, dan belum menemukan metode yang sahih. Lain dengan ilmu-ilmu fisika yang sudah sejak lama telah mempunyai metode-metode sahihnya sendiri. Kalau kita melihat ilmu-ilmu sosial dari kacamata epistemologi saja, sebagai contoh, maka akan kita temukan bahwa banyak ilmu sosial yang menggunakan landasannya dari ilmu-ilmu fisika. Misalnya saja pembagian Gilles-Gaston Granger yang mengatakan bahwa terdapat tiga tipe ilmu sosial, yaitu tipe energetik, sibernetik dan semantik. Tipe energetik memecahkan masalah makna dengan mengambil asosiasi pada energi. Contohnya Marxisme dan Psikoanalisa yang melihat bahwa yang bermakna sebetulnya adalah yang tersembunyi, yang tidak tampak. Dalam Marxisme disebut dengan yang infrastruktur dan dalam Psikoanalisa dengan yang laten. Ini tak lain mengambil dan dipengaruhi oleh konsep energi. Metode ilmu sosial seperti itu sama sekali belum khas, melainkan masih mengadopsi dari fisika.

Tipe sibernetik dicontohkan dengan tepat oleh fungsionalisme-strukturalnya Talcott Parsons, yang juga sangat mengadopsi fisika. Ia mengambil konsep homeostasis. Di dalam metode sosiologisnya, ia selalu mencoba menemukan adanya equilibrium, di mana cara kerjanya diambil dari mekanisme termostat yang sangat mekanik-fisik. Terakhir tipe semantik yang juga sama-sama mengadopsi metode hermeneutika.

Dari situ kita melihat bahwa dari metodenya saja kita belum melihat kesungguhan dan kemandirian ilmu sosial. Selain itu, kita juga harus melihat bahwa dalam model penelitian ilmu sosial ter-

> Liberalisme, sejauh membuka banyak kesempatan, memberi kemungkinan suatu kreativitas, itu baik dan saya setuju. Tetapi kita juga harus melihat sisi mata uang lainnya, bahwa liberalisme juga dapat menyingkirkan yang lemah. Adakah perlindungan bagi yang tersingkirkan itu? Dan kita dituntut untuk bisa menghadapinya.

dapat tiga konteks determinasi, yaitu pragmatis, normatif dan metodologis. Pada konteks pragmatis biasanya penelitian selalu sudah dipesan, ada sponsor yang berkepentingan. Warna politisnya sangat terasa. Artinya, dalam konteks pragmatis, penelitian selalu menanyakan ke-untuk-apa-annya. Ini yang bisa menjawab: apakah sebuah ilmu sosial itu bebas nilai atau tidak. Pilihan kerangka teoretis akan mempengaruhi hasilnya. Dengan demikian, pilihan dari penelitian yang pragmatis jelas bias dengan kepentingan, dengan nilai tertentu.

Namun kita juga bisa menanyakan, secara pragmatis, sejauh mana ilmu-ilmu membantu terhadap kesejahteraan bersama? Sejauh mana ilmu pengetahuan dapat membantu membongkar berbagai macam ketidakadilan? Kalau kita melihat model pendekatannya Pierre Bourdieu atau Michel Foucault, kita akan tahu bagaimana cara ilmu-ilmu mencoba membongkar bentuk-bentuk dominasi yang tidak adil. Kalau modelnya seperti itu, dari awal kita sudah bisa mengatakan bahwa ilmu itu tidak bebas nilai. Meskipun, di lain pihak, kita juga harus melihat tujuan yang mau dicapainya. Ilmu seperti itu justru memberikan sesuatu yang cukup bermakna bagi kemanusiaan.

Bagaimana dengan konteks lahirnya semangat obyektivitas ilmu pengetahuan, dengan disiplinnya masing-masing, yang kemudian dipa-

hami sebagai bentuk protes terhadap agama yang selalu ingin menjelaskan semuanya?

Apakah hal itu melulu sebagai bentuk protes atau secara bersamaan dipakai? Karena dahulu ilmu ternyata berkembang di sekitar biara juga. Artinya, ilmu selalu berkaitan dengan kepentingan agama itu sendiri. Tapi kemudian, seiring dengan munculnya zaman modern, mulai dipertanyakanlah heteronomi dalam hubungan ilmu dan agama. Dengan ilmu pengetahuan, *episteme* dunia menjadi berubah. Kini manusia berada di tengah, sebagai pusat, sebagai subyek, bukan lagi yang di luar, seperti Tuhan pada Abad Pertengahan. Jadi, modernisme membawa efek yang kemudian ditafsirkan sebagai awal dari sekularisasi. Di mana yang menjadi pusat bukan lagi yang transenden, tetapi manusia.

Selanjutnya kita masuk ke soal negara. Bagaimana Anda melihat relasi antara agama dan negara – karena sekularisme memiliki sejarah yang sangat panjang dan setiap negara mempunyai praktiknya masing-masing, dalam kaitannya dengan relasi antara agama dan negara?

Apabila telaah ini masih dilanjutkan dari persoalan ilmu pengetahuan tadi, pengetahuan akan mengatakan bahwa kalau bisa hubungan itu juga atas dasar jasa. Ilmu pengetahuan mempunyai jasa dan prestasinya sendiri yang sangat gemilang. Mengapa kecenderungannya kini adalah, terlebih di dunia Barat dan Kristianisme, adanya pemisahan antara agama dan politik. Kecenderungan semacam itu bukanlah hasil yang begitu saja. Kristianisme membutuhkan waktu yang sangat lama untuk bisa menerima hal tersebut. Katolik menemukan titik finalnya pada 1870, dengan Konsili Vatikan I. Di situ saja, sebenarnya, masih banyak yang tidak rela. Tetapi apa

yang melandasinya? Penjelasan mudahnya kalau landasannya adalah apa yang membantu, berjasa dan menyejahterakan masyarakat. Maka, seharusnya juga menghitung sumbangan teknologi dan ilmu pengetahuan untuk masyarakat. Makanya dalam konteks itu, kalau saya bisa menganalogikan, ilmu pengetahuan seolah berkata: janganlah kami selalu ditundukkan dari agama. Memangnya apa jasa agama terhadap kemajuan masyarakat?

Sementara, dalam konteks Eropa, kita bisa menanyakan mengapa agama berperang terus, sebagaimana yang terjadi antara Protestan dan Katolik? Sedangkan kami berusaha memajukan dan memenuhi kebutuhan rakyat dengan kemajuan ilmu dan teknologi. "Kalau Anda menuntut sesuatu, bahwa Anda mengatur segala hal dalam masyarakat, tunjukkanlah jasamu bagi masyarakat, jangan malah membuat kacau." Kira-kira demikianlah tantangan yang diberikan oleh ilmu dan teknologi kepada agama. Jasa itu bukan hanya untuk disombongkan atau dikatakan (sebagaimana klaim agama), tetapi dirasakan dan dialami – bukan hanya di dunia normatif melainkan juga di dunia yang faktual. Kalau ada mahasiswa membuat tesis lantas pembimbingnya bertanya apakah kamu mampu? Mahasiswa itu tidak bisa menyangkal. Satu-satunya

---

Pluralisme, dalam konteks agama, harus kita pahami sebagaimana dikatakan oleh Schillebeeckx, yaitu bahwa Tuhan begitu sempurna dan begitu penuh, sehingga lantaran itulah apakah kita akan rela kalau hanya salah satu tradisi keagamaan saja yang mengklaim bahwa ia sudah mengetahui segala-galanya? Apakah kita adil dan rela Tuhan kita hanya diklaim oleh salah satu tradisi keagamaan? Tuhan lebih luas dan lebih sempurna daripada yang dirumuskan atau dipahami oleh satu tradisi keagamaan tertentu.

---

cara menyangkal adalah dengan menyelesaikannya secara baik, dan itu tidak bisa dijawab secara normatif.

Untuk konteks Indonesia, dalam sejarahnya, kita mengalami kesulitan untuk memisahkan antara agama dan negara. Terlebih dengan adanya desakan dari kalangan Islam tertentu yang menghendaki pemasukan kembali piagam Jakarta ke dalam dasar negara, sebagaimana, misalnya, mereka menghendaki dimasukkannya nilai-nilai agama dalam perda-perda syariat *dan amandemen undang-undang. Apakah negara harus memiliki kadar sekularitas dengan batas yang jelas?*

Menurut saya, sejauh itu sungguh-sungguh bisa membantu menciptakan kondisi untuk tidak selalu terjadi konflik, mendorong dunia pendidikan semakin maju, mendukung penciptaan lapangan kerja, dan tidak begitu saja mudah memprotes dan melarang banyak hal – sehingga membuat kreativitas semakin dibatasi – maka itu perlu. Jangan sampai agama hanya mendapat stempel sebagai perusahaan yang melulu memproduksi larangan. Agama jangan sampai hanya menjadi sumber ketakutan.

Paralel dengan sekularisme, di Indonesia, banyak orang juga kerap begitu saja menolak liberalisme dengan asumsi bahwa gagasan ini menciptakan kehidupan yang permisif, segalanya diperbolehkan tanpa batas. Apakah pemahaman seperti itu benar? Kami minta Anda mengelaborasi gagasan ini secara konseptual.

Justru kita melihat bahwa sesungguhnya atmosfer liberal sungguh menciptakan suasana kreatif. Namun kita harus sadar bahwa kondisi itu juga mempunyai ekses atau efek negatifnya tersendiri.

Kita harus mengakui bahwa politik liberal selalu menguntungkan yang kuat. Prinsip ini harus kita perhatikan. Jadi, permasalahannya adalah bagaimana agar praktik politik liberal juga tetap bisa melindungi yang lemah? Karena, seperti dalam globalisasi, yang akan tersingkir itu sangat banyak, dan kita harus membantu kalangan yang tersingkir. Kita harus tahu bahwa politik liberal juga memiliki kecenderungan untuk menghancurkan struktur-struktur kolektif. Kritik Pierre Bourdieu terhadap politik liberal ditujukan pada kecenderungan ini. Bentuk pengahancurannya itu seringkali tidak disadari. Misalnya melalui konsumsi, seperti *handphone* (hp). Secara fisik dan praktis, dia sangat menolong kita. Tapi di lain pihak, dampak sesungguhnya tak kalah dahsyat. Dia telah mengintervensi sampai ke lingkup keluarga, bahkan ke hal-hal yang sangat privat, yang menyebabkan semakin melemahnya proteksi keluarga. Contoh konkretnya, dengan hp, kalau seseorang mau menghubungi mantan pacarnya, tidak takut lagi jika nanti yang menerima suami atau istrinya, sebagaimana ketika belum ada hp dan harus memakai telfon rumah. Makanya, dalam keluarga, harus ada kesepakatan, seperti kalau di rumah hp harus dimatikan supaya kalau ada orang yang menghubungi, maka menghubunginya lewat nomor rumah.

Agama harus dapat menawarkan jawaban-jawaban yang kontekstual. Agama ditantang untuk menjadi lebih relevan dalam menjawab persoalan zaman: mengatasi problem ketidakadilan dan kemiskinan masyarakat. Sebab, kalau kita melihatnya secara lebih kritis, jangan-jangan reaksi berlebihan yang ditunjukkan agama-agama terhadap sekularisme justru memang menunjukkan ketidakmampuannya untuk berhadapan dengan tantangan-tantangan baru.

Saya hanya mau mengatakan bahwa liberalisme, sejauh membuka banyak kesempatan, memberi kemungkinan suatu kreativitas, itu baik dan saya setuju. Tetapi kita juga harus melihat sisi mata uang lainnya, bahwa liberalisme juga dapat menyingkirkan yang lemah. Adakah perlindungan bagi yang tersingkirkan itu? Dan kita dituntut untuk bisa menghadapinya.

Dalam diskursus liberalisme politik, seperti dikatakan John Rawls, politik liberal tidak selamanya abai terhadap nasib disadvantage, *mereka yang tidak beruntung. Makanya ada konsep redistribusi yang dibebankan terhadap pemerintah demi pemerataan keadilan buat seluruh warga negara.*

Memang pada Rawls kekuatan prinsip liberalnya sangat kuat. Meskipun tetap ada sisi lainnya ketika mengatakan tentang prinsip keadilan bahwa semua memiliki hak yang sama. Sebab, ketidaksamaan sosial-ekonomi diperbolehkan atau ditoleransi asalkan: *pertama*, menguntungkan bagi yang paling tidak beruntung; *kedua*, berkaitan dengan prestasi yang berhubungan dengan jabatan, maka dalam konteks ini, jabatan terbuka bagi semua. Prinsip asal menguntungkan bagi yang paling tidak beruntung tersebut menunjukkan adanya visi suatu *option for the poor*. Mengapa sisi yang ini juga tidak diolah? Bagaimana keadilan prosedural itu diperhatikan, bukan hanya yang substansial. Modelnya Rawls ini bisa dianalogikan orang yang akan membagi kue. Aturan yang adil mengatakan bahwa yang membagi mendapat giliran terakhir, setelah semua mendapat bagian sesuai dengan porsinya. Saya hendak menggarisbawahi bahwa dalam keadilan prosedural juga ditekankan agar aturan hukum itu mengandung pengawasan, sehingga sudah

dengan sendirinya merelativisir bentuk-bentuk pelanggaran, bentuk-bentuk ketidakadilan.

Negara yang liberal me-ngandaikan adanya iklim kebebasan dan keterbukaan, sekaligus juga harus ada perhataian atau proteksi terhadap yang tersingkir. Bagaimana mewujudkan sebuah tatanan atau kebijakan melalui mekanisme konsensus yang memungkinkan terciptanya tatanan yang lebih adil atau fair?

Kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu pihak-pihak mana yang tersingkir, pihak mana yang merupakan kelompok yang sudah mapan dan sebagainya. Itu tidak mudah. Minimal dengan *civil society*-lah kita mampu memproteksi pihak-pihak yang lemah. Pihak-pihak yang lemah diberikan institusi atau tempat untuk menyuarakan suaranya. Sebetulnya selain LSM, organisasi-organisasi keagamaan juga bisa, asal jangan bersikap eksklusif. Baik LSM ataupun organisasi keagamaan dapat memperkuat posisi tawar dari kelompok-kelompok yang tersingkir. Di luar itu, agar yang tersingkir tetap mendapat tempat, saya mengusulkan, sebagaimana idenya Richard Sennett, bahwa model organisasi seperti organisasi buruh dan sebagainya, semestinya jangan hanya melindungi hak buruh atau pekerja saja, tetapi juga mulai bergerak mengantisipasi, mencarikan atau menciptakan pekerjaan, menghindari penghancuran struktur-struktur kolektif, memperhitungkan masa depan mereka, seperti dana pensiun dan sebagainya. Organisasi seperti ini hendaknya tidak hanya reaktif, melainkan proaktif.

Kami hendak memfokuskan ke masalah penghancuran struktur kolektif. Sebetulnya dalam sebuah masyarakat, kalau kita percaya dengan the

idea of progress, *struktur kolektif yang dihancurkan oleh liberalisme adalah struktur lama yang setelah dihancurkan juga akan membentuk struktur baru yang lebih menyesuaikan dengan kondisi yang ada.*

Apakah kita percaya begitu saja? Bagi saya hendaknya cara melihat persoalan ini tidak seperti itu. Dalam pandangan saya, liberalisme menghancurkan struktur kolektif karena dia menginginkan utopia pasar murni itu terlaksana. Tidak ada lagi resistensi atau perlawanan terorganisir secara struktural untuk melawan model seperti itu. Artinya, logika pasar atau ekonomilah yang harus menang. Penghancuran struktur kolektif itu lebih dalam kerangka memisahkan logika ekonomi dari logika sosial. Logika ekonomi dengan persaingannya itu menghendaki efisiensi; sedangkan logika sosial akan memperhatikan masalah keadilan dan redistribusi. Kecenderungan seperti itulah yang saya lihat dari liberalisme. Sekarang memang sudah terbentuk kelompok-kelompok seperti di kalangan eksekutif yang berorientasi lebih kepada *distinction* sebagaimana modelnya Bourdieu. Yakni, *distinction* sebagai strategi kekuasaan. Membedakan diri untuk bisa mengakumulasi modal atau mempertahankan kekuasaan.

Apakah yang terjadi di Indonesia – kaitannya dengan mulai masuknya angin liberalisme melalui logika pasarnya – dengan adanya upaya beberapa kelompok umat beragama mendesakkan nilai-nilai tertentu yang diyakininya, melalui mekanisme demokrasi, agar dilegal-formalkan, dapat juga dikatakan sebagai sebentuk konsumsi nilai-nilai agama ke dalam wilayah publik, yang hendaknya diserahkan pada pasar?

Kita bisa melihatnya dari berbagai sisi. Satu sisi, bisa secara positif kita lihat sebagai keprihatinan yang mendalam terhadap efek-efek yang semakin membawa kepada disintegrasi, kehancuran kolektif, dan sebagainya. Di sisi lain, jangan-jangan ini tidak lain adalah reaksi yang mencoba menutup atau mengisolasi diri karena ketakutan akan terkontaminasi, atau justru menunjukkan suatu ungkapan kelemahan karena tidak bisa melakukan atau memakai yang lain, yang diyakininya sebagai kebenaran. Atau, kasarnya, karena kalah bersaing, maka digunakanlah legitimasi agama. Masalahnya adalah bagaimana dengan kemajuan yang ada, semakin adaptif atau malah semakin reaktif? Kalau kesimpulan yang diambilnya ternyata salah, maka perlawanan yang terus diberikan justru akan menyebabkan agama semakin jauh tertinggal.

> Tuhan lebih luas dan lebih sempurna daripada yang dirumuskan atau dipahami oleh satu tradisi keagamaan tertentu. Masalah yang ada sekarang bukan lagi soal persaingan, tetapi kesadaran bahwa setiap agama mempunyai kekhasan.

Menurut Anda apakah dasar negara dan konstitusi kita, Pancasila dan UUD 1945, sudah mencukupi bagi suatu aturan yang adil?

Bagi saya, konstitusi itu tetap harus ditafsirkan kembali untuk disesuaikan dengan konteks yang ada. Tetapi, satu hal yang harus diperhatikan, yang merupakan ketakutan dari kelompok minoritas, adalah tentang sulitnya penerimaan akan keberagaman oleh mayoritas. Kebhinekaan sebagai sebuah nilai yang, menurut saya, sangat bagus itu hendaknya jangan sampai diabaikan. Sebab secara *dejure*, Indonesia sudah menjamin persamaan bagi semua kelom-

pok. Pencapaian ini jangan sampai dikorbankan karena adanya interpretasi baru. Bahwa yang lain perlu direvisi, saya setuju. Tetapi pencapaian seperti penghargaan atas keberagaman itu jangan sampai malah dihilangkan. Di situlah letaknya nasionalisme. Karena nasionalisme, sebagaimana dikatakan Ricouer, adalah kesetiaan terhadap identitas naratif. Identitas naratif itu datang dari apa yang disebut sebagai kesetiaan terhadap janji, yang dibentuk oleh faktor etisnya dan didukung oleh perlakuan hukum yang sama bagi semua warga negara. Apakah kesetiaan seperti itu sudah didukung dan dimiliki oleh semua warga?

Tidakkah hal itu berlaku dalam tataran yang ideal? Kalau Anda mengamati dan menilai defacto*-nya sendiri bagaimana?*

Anda bisa lihat penerimaan di Universitas atau pegawai negeri yang sampai sekarang masih menerapkan sistem kuota. Dari agama A berapa, agama B berapa, dan seterusnya. Dalam kontestasi pemilihan bupati, misalnya, perihal agama malah bisa dipakai sebagai cara untuk mendiskualifikasi calon tertentu. Itulah *defacto*, yang secara *dejure* sebenarnya tidak ada. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa hubungan keagamaan juga ternyata tidak hanya didasari oleh faktor teologi, tetapi juga interaksi kekuasaan, memakai bahasa Anthony Giddens. Di dalam teori strukturasinya, Giddens mengatakan bahwa interaksi itu berulang, terpola, dan membentuk struktur; dipengaruhi oleh modalitasnya. Tiga bentuk interaksi sosial yang dominan adalah komunikasi, kekuasaan, dan moralitas atau sangsi.

Kalau orang berbicara mengenai hubungan antar-agama, banyak yang mengira kalau itu hanya masalah teologi, perbedaan konsep,

dan lain sebagainya. Kita harus mulai mengungkap dan membongkar bahwa sebetulnya konflik lebih terjadi karena interaksi kekuasaan yang menghasilkan dominasi, yang dipengaruhi oleh modalitasnya, yaitu ekonomi, politik, sosial, dan ideologi. Pada wilayah inilah perebutan terjadi dan kerap menyebabkan konflik.

Secara praktis, di situ terjadi ketimpangan antara dejure *dan* defacto. *Menurut Anda apakah pemerintah perlu menjembatani masalah ini atau sebaliknya lebih menjadi tugas dari* civil society*?*

Bagi saya kedua-duanya harus dapat mengambil peran. Sebagai *test case*, misalnya, masyarakat kita terus-terusan menganggur, adakah lembaga pemerintah ataupun *civil society* atau LSM sebagai tempat kita untuk mengeluh dan mengadu nasib? Untuk menjembatani ketimpangan antara *dejure* dan *defacto* harus ada, lagi-lagi istilah Ricouer, narasi. Narasi tersebut yang menjembatani antara teori dan praktik. Narasi jangan hanya diinterpretasikan sebagai kisah, tetapi juga teladan, contoh, dan kisah bagaimana merealisasikan sesuatu. Identitas naratif yang telah saya katakan itu, salah satu yang membentuknya adalah kesetiaan pada janji. Sebagaimana yang dipertanyakan Ian Saphiro apakah demokrasi itu benar-benar representatif? Karena pada kenyataannya

---

Di dalam setiap pemahaman terjadi *fusion of horizon*s, terjadi peleburan cakrawala-cakrawala. Yaitu cakrawala penafsir dan cakrawala teks. Cakrawala penafsir memiliki banyak segi, ada *Vorhabe*, *Vorsicht*, *Vorgriff*. Kalau kita percaya pada diri sendiri bahwa kita mempunyai pra-pemahaman dalam tiga bentuk tersebut, lantas akan semudah itukah saya pindah agama kalau bukan karena alasan yang sungguh-sungguh mendasar? Kalaupun ada alasan mendasar, mengapa kita harus melarangnya?

---

banyak calon yang telah terpilih dalam pemilihan umum, justru tidak mewakili konstituennya. Mereka lebih mengurus kepentingan diri sendiri. Kita juga harus memperbaiki sistem representasi agar yang merepresentasikan konstituen itu selalu bisa dikontrol. Agar jika tidak lagi dapat merepresentasikan kepentingan konstituennya, mereka bisa dituntut atau di-*recall*. Saya kira, inilah yang belum ada dalam tubuh politik kita.

Jika membincang ihwal kebebasan, kita tidak bisa begitu saja mengabaikan peran media yang sangat ekspansif melalui citra-citranya menyerbu ke segenap ruang kehidupan, hingga yang paling privat sekalipun. Bagaimana kebebasan subyek yang semestinya hakiki dalam diri manusia – dengan desakan media yang begitu membius dan menjerat masyarakat – menjadi hilang otonominya?

Kita harus mengakui bahwa media telah banyak membantu dalam penyebaran ide-ide kebebasan, termasuk ide-ide pembawa dan penyampai hak-hak, dan sebagainya. Meskipun kita juga tahu bahwa media menawarkan sesuatu yang lain, seperti citra-citra sebagaimana Anda sebutkan tadi. Apakah citra itu sendiri sepenuhnya jelek? Tidak juga, asal didasarkan pada suatu tindakan nyata, seperti jasa dan prestasi. Sayangnya, citra yang ditawarkan banyak yang tidak berdasar akan hal itu.

Citra malah lebih dari sekadar sesuatu yang dibuat. Kita tidak bisa lagi membedakan antara yang *real*, *hiper-real*, dan simulasi (simulakra), sebagaimana diistilahkan Jean Baudrillard. Contohnya, kita lihat *team* gegana yang sedang mengadakan latihan penjinakan bom. Dalam latihan itu, mereka melakukannya secara serius, seperti benar-benar sedang menghadapi kasus nyata, ada *police line*, kalau

ada orang yang mau mendekat dilarang, dan sebagainya. Namun, begitu terjadi ledakan bom sesungguhnya, yang dilakukan malah tidak seserius seperti pada latihannya. Artinya, kita memang sering dikecoh oleh semacam citra ini.

Oleh karena itu, kita harus mulai kritis bahwa setiap instrumen kemajuan selalu memiliki pedang bermata dua. Selalu ada unsur yang membawa kebaikan dan unsur negatif yang dapat menimbulkan keburukan, di mana kita sebisa mungkin harus merelativisirnya. Di sinilah kita membutuhkan semacam etika komunikasi. Bagaimana kita harus menghadapi bentuk-bentuk kekerasan di dalam media, baik yang fisik maupun simbolik, yang merayu kita dan seringkali tanpa kita sadari. Untuk hal ini, bagi saya, baik juga kalau sejak kecil diberikan pendidikan media untuk anak-anak. Saya tertarik dengan SD Mangunan yang dulu dikembangkan oleh romo Mangun. Di situ, supaya dapat bersikap kritis terhadap televisi, anak didik diajak langsung melihat produksi siaran televisi. Mereka di bawa ke studio untuk melihat bagaimana acara televisi itu sesungguhnya dibuat. Dari sini, ketika mereka sudah pulang dan menonton televisi dengan teman-teman yang lain, mereka bisa kritis bahwa acara itu sebetulnya tidak terjadi secara nyata, hanya rekayasa, ada peran pengganti, dan lain sebagainya. Pada sisi ini jugalah dunia pendidikan tepat mendapat tantangannya.

Kita harus memahami bahwa makna datang dari perbedaan. Sehingga yang lain, bagi saya, tidak menjadi ancaman. Kalau menggunakan istilahnya Levinas, yang lain adalah momen moral bagi saya. Yang lain menyapa saya. Kehadiran yang lain memberi kesempatan bagi saya sebagai saat-saat moral.

Pada intinya, apakah Anda masih optimis dengan subyektivitas, yakni ruang buat subyek untuk mengekspresikan kebebasannya masing-masing yang tidak begitu saja diseragamkan oleh media, atau dengan kesadarannya dapat merebut dan memberikan makna tersendiri terhadap citra-citra yang dijejalkan media?

Saya optimis dalam arti bagaimana dalam kemendesakannya kita dapat mencari dan menemukan peluang-peluang. Kemendesakan menemukan peluang itu bagi saya adalah tindakan *urgen*. Lalu, bahwa politik yang lebih menyeluruh dan strategi yang lebih luas harus dibuat, itu memang betul. Dalam bahasa latinnya *minus malum,* yang terbaik dari yang jahat akhirnya juga kadang-kadang harus kita jalankan.

Kemajemukan negeri ini sudah sepatutnya disikapi dengan menggunakan cara pandang atau gagasan pluralisme. Celakanya, pluralisme sering dipahami sebagai sinkretisme (penyamaan bahwa semua agama benar) oleh masyarakat atau kalangan agamawan di negeri ini, karena itulah kemudian pluralisme ditolak. Pandangan Anda perihal pluralisme seperti apa?

Menurut saya, pluralisme, dalam konteks agama, harus kita pahami sebagaimana dikatakan oleh Schillebeeckx, yaitu bahwa Tuhan begitu sempurna dan begitu penuh, sehingga lantaran itulah apakah kita akan rela kalau hanya salah satu tradisi keagamaan saja yang mengklaim bahwa ia sudah mengetahui segala-galanya? Apakah kita adil dan rela jikalau Tuhan kita hanya diklaim oleh salah satu tradisi keagamaan?

Tuhan lebih luas dan lebih sempurna daripada yang dirumuskan atau dipahami oleh satu tradisi keagamaan tertentu. Masalah

yang ada sekarang bukan lagi soal persaingan, tetapi kesadaran bahwa setiap agama mempunyai kekhasan. Khas sendiri pengertiannya tidak sama dengan superior. Kekhasan saya itu bisa diketahui karena saya mengetahui yang lain. Logika biner di situ berjalan. Konsekuensinya kita harus memahami bahwa makna datang dari perbedaan. Sehingga yang lain, bagi saya, tidak menjadi ancaman. Kalau menggunakan istilahnya Levinas, yang lain adalah momen moral bagi saya. Yang lain menyapa saya. Kehadiran yang lain memberi kesempatan bagi saya sebagai saat-saat moral.

Permasalahan yang terjadi sekarang lebih karena melihat yang lain sebagai ancaman. Sebagaimana yang dimaksud oleh Sartre. Sartre mengatakan bahwa yang lain adalah neraka bagi saya. Maka wajar kalau Sartre kemudian juga mengatakan bahwa kebebasan mendahului tanggung jawab, berseberangan dengan Levinas yang sebaliknya mengatakan bahwa de-ngan adanya yang lain, tanggung jawab mendahului kebebasan. Pola seperti apakah yang mau diikuti oleh agama? Apakah pola seperti yang dikehendaki Sartre atau sebaliklnya lebih memilih polanya Levinas? Atau pertanyaannya, apakah agama-agama berani memikirkan kembali cara berpikir model demikian itu? Konkretnya, berani atau tidak para pemimpin dan guru agama melihat kembali dan menata paradigma bahwa agama bukan lagi memaksakan kebenaran, tetapi melihat apakah saya telah membantu umat untuk semakin mengenal dan mendekati Tuhan; ataukah pikiran saya lebih politis, yaitu semakin banyak massa pengikut berarti semakin hebat? Kalau pilihannya politis, maka akan terkait juga dengan masalah ekonomi, dan berarti terkait dengan kapital sosial juga.

Makanya, bagi saya, model-model dialog yang seharusnya dikembangkan itu alangkah lebih baik kalau mengikuti model ana-

logi permainan saja. Jangan langsung pada masalah teologis, tapi lebih dahulu melalui, misalnya, perlombaan pop song, jazz, teater, dan lain sebagainya, yang lebih bisa mencairkan suasana. Begitu kita sudah dekat, masalah teologi akan lebih mudah diatasi. Jadi, yang terlebih dahulu dipersiapkan sebelum masuk ke langkah lebih jauh dalam membangun hubungan antaragama adalah menciptakan suasana perjumpaan. Dan suasana itu dilakukan dengan informal; tidak usah formal. Itulah yang sampai sekarang belum mampu kita lakukan. Kecenderungan kita adalah terlebih dahulu menciptakan sekat-sekat agama. Lihatlah perkumpulan-perkumpulan yang jumlahnya sangat banyak, yang mengatasnamakan agama; yang, di satu sisi, memang memberi rasa aman bagi masing-masing umatnya, tetapi, pada sisi lain, sama sekali tidak ada yang berani memberi terobosan untuk masuk ke arah yang lebih konkret, melalui bidang seni, misalnya.

Kenapa harus seni? Anda perhatikan, seniman itu jarang yang disekat-sekat oleh agama. Namun, bukan berarti bahwa hal itulah yang terbaik. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa seni membawa sesuatu yang kadang-kadang tidak hanya berhenti pada *moral judgement*, baik-jahat. Keindahan itu menyatukan segala hal. Saya senang dengan seorang filosof Prancis yang bernama Luc Ferry. Dia mengatakan bahwa panggilan seorang pemeluk agama adalah menjadi karya seni (universalitas konkret). Orang seperti Muhammad Iqbal adalah karya seni. Dia universal, diterima oleh semua agama, tetapi sekaligus juga konkret, dia dibesarkan oleh Islam. Mahatma Gandhi merupakan tokoh spiritual yang diterima oleh semua agama, tetapi dibesarkan oleh Hindu. Demikian juga Ibu Theresa dalam Katolik. Jadi yang lebih diutamakan adalah prinsip bagaimana saya semakin bisa berguna bagi sebanyak mungkin orang, bahkan me-

lampaui kelompok-kelompok agama, seraya tetap mengakar pada agama saya yang khas itu. Di sinilah agama seharusnya berperan. Agama harusnya semakin membantu pemeluknya untuk lebih terbuka dengan pemeluk agama lain, bukan membuat pemeluknya semakin anti terhadap pemeluk agama lain. Kesimpulannya, saya tidak hanya melihat pluralisme sebagai ideologi, tetapi bagaimana kemanusiaan itu semakin memanggil kita untuk semakin terbuka dan bagi yang lain tidak mengancam.

Yang terlebih dahulu dipersiapkan sebelum masuk ke langkah lebih jauh dalam membangun hubungan antar-agama adalah menciptakan suasana perjumpaan. Dan suasana itu dilakukan dengan informal; tidak usah formal. Itulah yang sampai sekarang belum mampu kita lakukan.

Terkait dengan adanya sekat-sekat dalam agama (termasuk juga etnis), sebagaimana Anda uraikan lebih sebagai fenomena yang terlanjur kaprah di masyarakat kita, apakah ini sumbangsih dari Orde Baru melalui kebijakan yang segregatif, model "kerukunan" SARA yang kita ketahui bersama itu, sehingga yang tumbuh di antara umat beragama bukan perasaan saling menghargai secara aktif, dalam arti membaur dan membuka diri, tetapi sebaliknya, tumbuhnya rasa curiga di antara masing-masing umat beragama?

Saya setuju bahwa hal itu ada kesinambungan dari rezim Orde Baru. Dengan menggunakan analisis Foucault, kita bisa melihat bagaimana kekuasaan itu berlangsung melalui perbedaan. Di mana ada perbedaan, di situlah terjadi hubungan kekuasaan dan dominasi. Anda bisa melihat contoh ini seperti pada KTP. Di situ, salah satu yang ditonjolkan adalah perbedaan. Misalnya bagi orang Tionghoa, KTP-nya diberi tanda tertentu, demikian juga dengan

perbedaan agamanya. Kelihatannya memang netral, tetapi justru di situlah kekuasaan dan dominasi sebenarnya sudah dipraktikkan. Oleh karena itu, kita sebagai pemeluk agama, sangatlah perlu untuk semakin kritis terhadap manuver-manuver politik, karena kekuasaan terutama bukan dilihat dari siapanya, tetapi lebih pada bagaimana-nya. Artinya kita akan melihat kekuasaan dari strategi, teknik, dan mekanismenya. Sementara cara termudah untuk mempraktikkan hal ini adalah dengan menekankan perbedaan.

Dalam multikulturalisme, hal seperti itu ditunjukkan dengan, misalnya, penggunaan kata minoritas. Kata itu tidaklah netral dan sebenarnya digunakan sebagai cara agar yang minoritas tidak ber-daya. Itu merupakan stigma, yang sebetulnya juga bentuk lain dari diskriminasi yang ingin mengatakan bahwa kamu adalah kelom-pok minoritas dan karena itu jangan berbuat yang macam-macam. Konsep itu dipakai untuk menumbuhkan rasa rendah diri pada minoritas. Secara lebih abstrak kita bisa mengatakan bahwa di situ bahasa digunakan untuk mempraktikkan dominasi.

Perihal pengidentifikasian gagasan pluralisme oleh banyak orang se-bagai relativisme, paham yang menganggap segalanya (termasuk juga agama) adalah nisbi, apakah menurut Anda benar demikian?

Apakah benar pluralisme adalah sebuah relativisme? Saya akan mengatakan, kalau Tuhan itu maha sempurna, maka kita tidak akan rela jika kesempurnaan Tuhan direduksi hanya oleh kelompok tertentu saja. Lalu, apakah dengan saya menerimanya (atas kebe-naran pihak lain) berarti sebentuk relativisme? Bukankah peneri-maan pihak lain justru semakin mengafirmasi identitas saya. Bagi saya, orang "dewasa" tidak akan pernah merasa terancam dengan

kehadiran pihak lain. Orang yang sungguh-sungguh menguasai bidangnya, tidak akan merasa tersaingi atau terancam oleh pihak lain, karena dia percaya dengan apa yang dia miliki, dengan identitas atau kemampuannya. Tetapi orang yang setengah-setengah akan cenderung terancam oleh pihak lain, karena survivalitas dia sangat tergantung oleh bagaimana yang lain melakukan permainannya atau tergantung pada bagaimana strategi yang diterapkan oleh yang lain.

Dengan refleksi di atas, kita juga bisa menilai kelompok-kelompok agama dengan pertanyaan: mengapa harus merasa terancam dengan yang lain? Mengapa harus takut kalau yang lain juga mempunyai suatu bentuk kebenaran? Sejauh mana itu mengurangi kebenaran saya? Apakah kalau yang lain benar berarti saya salah? Tentunya, hal seperti itu sama sekali tidaklah memadai untuk dijadikan pendasaran dalam memandang perbedaan. Karena yang digunakan adalah logika biner yang keliru, yaitu kalau yang lain menemukan kebenaran berarti yang punya saya salah, atau kalau yang lain benar berati saya boleh berpindah-pindah. Jika pandangannya seperti itu maka satu agama merasa takut dan terancam dengan keberadaan agama yang lainnya.

> Kita harus mulai kritis bahwa setiap instrumen kemajuan selalu memiliki pedang bermata dua. Selalu ada unsur yang membawa kebaikan dan unsur negatif yang dapat menimbulkan keburukan, di mana kita sebisa mungkin harus merelativisirnya. Di sinilah kita membutuhkan semacam etika komunikasi.

Dalam konteks ini, saya tidak mengatakan boleh atau tidak, tetapi saya lebih setuju dengan modelnya Gadamer. Dia mengatakan bahwa di dalam setiap pemahaman terjadi *fusion of horizon*s,

terjadi peleburan cakrawala-cakrawala. Yaitu cakrawala penafsir dan cakrawala teks. Cakrawala penafsir memiliki banyak segi, ada *Vorhabe*, *Vorsicht*, *Vorgriff*. Kalau kita percaya pada diri sendiri bahwa kita mempunyai pra-pemahaman dalam tiga bentuk tersebut, lantas akan semudah itukah saya pindah agama kalau bukan karena alasan yang sungguh-sungguh mendasar? Kalaupun ada alasan mendasar, mengapa kita harus melarangnya? Dan seandainya terjadi, mengapa pula kita tidak menghormati bahwa setiap orang memiliki pilihan? Apakah dengan kita melarangnya berarti kita telah berjasa bagi Tuhan? Tentu tidak sesederhana itu cara melihatnya.

Apabila persoalan kemajemukan menjadi semakin kompleks, menurut Anda bentuk toleransi seperti apakah yang seharusnya ditumbuh-kembangkan di negeri dengan masyarakat yang begitu beragam dari agama, ras, budaya, bahasa, dan lain sebagainya, seperti Indonesia ini?

Apabila melihat generasi muda sekarang, saya merasa lebih optimis. Kalangan muda sekarang banyak yang memiliki cara berpikir terbuka. Namun, kita harus mengetahui bahwa dalam masyarakat seperti apapun, kelompok yang tertutup itu akan selalu ada. Di sinilah permasalahan kerap kali timbul. Oleh karena itu, menurut saya, di sinilah signifikansi peran media untuk menyosialisasikan ide-ide keterbukaan, toleransi, dan sebagainya. Meskipun kita harus mengantisipasinya dari awal akan konsekuensi lain bahwa media juga pada akhirnya bisa berpihak pada satu kepentingan tertentu. Maka dalam hal ini, pemberitaan yang saya maksud, yang harus dipromosikan oleh media, adalah pemberitaan yang mendukung ide-ide keterbukaan dan pluralitas.

Saya mengajar juga di Pasca-Sarjana UIN Yogyakarta. Di sana masih ada optimisme. Dengan melihat bagaimana cara berpikir atau keterbukaan orang muda terhadap gagasan-gagasan baru, maka dalam realitas lintas agama seperti itu, saya merasa lebih optimis bahwa hal tersebut akan terjaga dan hidup kita lebih damai, bisa saling menghormati. Namun, dalam konteks ini, kita juga harus sadar bahwa uluran tangan, kalau datangnya dari yang mayoritas, akan lebih mudah *follow up*-nya ketimbang ketika datang dari yang minoritas. Itu hukum sosiologi. Sekali lagi, hal seperti itu, lagi-lagi, tidak akan menghasilkan apa-apa kalau tidak dibarengi dengan intensitas interaksi dan perjumpaan informal antar-kelompok yang ada. Oleh karenanya, kecenderungan pengelompokan atas dasar agama, seharusnya jangan hanya berhenti pada sebatas pengelompokan yang justru karenanya kita melebarkan perbedaan dengan yang lain, tetapi sebaliknya ditingkatkan menjadi kelompok yang terbuka. Di Indonesia, hal seperti itu lebih dimungkinkan karena kegiatan pengelompokan tadi belum sampai pada taraf yang sudah menjadi hukum penyekatan. Yang saya takutkan, dengan perda-perda syariat, adalah berlakunya model penyekatan yang sampai mengikat umat secara eksklusif di dalamnya. Pandangan seperti itu, tentunya, dari saya, pihak yang selama ini dirugikan.

Wawancara dilakukan di Depok, 24 Mei 2007

Percakapan dengan

Husein Muhammad

Husein Muhammad, pengasuh Pondok Pesantren Dar al Tauhid, Arjawinangun, Cirebon. Ia pendiri Puan Amal Hayati (Jakarta), Yayasan Rahima (Jakarta), dan Fahmina Institute (Cirebon), serta menjadi anggota National Board di International Center for Islam and Pluralism (ICIP) dan The Wahid Institute. Ia juga Comisioner pada Komnas Perempuan (2007-2009).

Semangat konstitusi Indonesia jauh lebih islami daripada perda syariah. Sedangkan Islam sendiri merespon positif prinsip dasar sekularisme: memisahkan dua wilayah yang berbeda, *fî al-dunyâ hasanah wa fî al-âkhirati hasanah* (dunia dan akhirat). Namun begitu Islam hanya merumuskan prinsip-prinsip dasar. Sebab Islam tidak mempunyai konsep apapun perihal negara atau politik. Tetapi dasar atau pandangan apapun sejauh bertujuan menciptakan kondisi yang aman dan damai, sudah masuk dalam kategori Islam. Sebab keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap manusia adalah substansi agama. Sayangnya, sampai saat ini belum ada satu teori sosial-politik atau sistem negara yang baik seperti demokrasi yang menjadi dasar bagi semua keputusan. Yakni demokrasi yang berbasis keadilan dan menjunjung tinggi HAM.

Bagaimana pandangan Anda mengenai sekularisme dalam hubungannya dengan konsep-konsep dalam Islam?

Pertama-tama, saya tidak ingin terjebak dalam terminologi *mainstream* terhadap istilah sekularisme. Karena terminologi *mainstream* melihat istilah sekularisme secara sangat negatif. Namun saya ingin melihat istilah sekularisme secara positif sepanjang saya bisa memberi makna tersendiri mengenai istilah ini. Sekularisme oleh masyarakat dipandang sebagai paham yang ingin memisahkan antara agama dan negara yang diilhami dari sejarah masyarakat Barat yang mengatakan bahwa urusan kaisar untuk kaisar dan urusan gereja untuk gereja. Namun, saya tidak melihat hal seperti itu dalam Islam. Karena teks-teks Islam sendiri sudah menyebut dua hal tersebut: *fî al-dunyâ <u>h</u>asanah wa fî al-âkhirati <u>h</u>asanah,* sehingga, menurut saya, keduanya sangat positif.

Apakah Islam memandang antara dunia dan akhirat harus dipisah-kan? Bagi saya, tergantung dari aspek mana kita melihat agama. Kalau kita memandang agama dari aspek tafsir atas agama yang kemudian ingin dijadikan sebagai hukum negara, maka, saya kira, harus dilihat apa yang menjadi kepentingan pandangan keagamaan atau tafsir atas agama tersebut: apakah terkait dengan urusan-urusan personal atau terkait dengan urusan-urusan sosial? Apabila tafsir tersebut terkait dengan urusan personal, saya menganggap tidak perlu aspek-aspek tersebut masuk ke dalam ruang negara. Biarkan itu menjadi urusan privat masyarakat. Misalnya soal keyakinan atau ibadah seperti salat, puasa dan sebagainya. Akan tetapi jika terkait dengan aspek sosial, relasi antarmanusia atau aspek muamalat, menurut saya, pikiran atau tafsir atas teks agama bisa dimasukkan ke dalam ruang publik, urusan negara, namun

harus tetap memperhatikan pluralitas dalam masyarakat. Jadi tidak bisa sebuah pandangan keagamaan tertentu diterapkan begitu saja apalagi dipaksakan ke dalam masyarakat yang multikultural atau masyarakat yang plural tersebut.

Pendeknya, persoalan ini harus disandarkan pada sebuah paradigma besar Islam, yaitu keadilan, kesetaraan manusia, dan penghormatan terhadap manusia. Apabila pandangan keagamaan tersebut merefleksikan prinsip-prinsip di atas, maka atas nama apapun, menurut saya, sudah sah secara agama. Jadi tidak mesti harus ada teks agamanya, seperti teks al-Quran atau teks fikih. Demikianlah pandangan seorang ulama besar, Abu al-Wafa ibn Aqil, seperti dikutip Ibn Qayyim al-Jauziyah, yang mengatakan bahwa kebijakan publik harus dirumuskan berdasarkan kemasalahatan (kepentingan publik) meskipun tidak disebutkan dalam teks agama, baik al-Quran maupun hadits. Abu al-Wafa dan Ibn Qayyim adalah ulama yang dikenal sebagai penganut Islam literalis. Anda dapat membaca ini dalam buku "*al-Thuruq al-Hukmîyah fî al-Siyâsah al-Syar'îyah*". Jadi, Keadilan, kemaslahatan dan penghormatan terhadap manusia, menurut saya, adalah substansi agama.

Saya ingin melihat istilah sekularisme secara positif sepanjang saya bisa memberi makna tersendiri mengenai istilah ini. Sekularisme oleh masyarakat dipandang sebagai paham yang ingin memisahkan antara agama dan negara yang diilhami dari sejarah masyarakat Barat yang mengatakan bahwa urusan kaisar untuk kaisar dan urusan gereja untuk gereja. Namun, saya tidak melihat hal seperti itu dalam Islam. Karena teks-teks Islam sendiri sudah menyebut dua hal tersebut: *fî al-dunyâ hasanah wa fî al-âkhirati hasanah,* sehingga, menurut saya, keduanya sangat positif.

Bahkan, menurut saya, negara Indonesia – tidak sebagaimana yang digambarkan orang: bukan sebagai negara agama dan juga bukan negara sekular – adalah negara agama. Karena prinsip-prinsip yang dibangun sebagai dasar negara ini sudah memenuhi prinsip-prinsip dasar atau substansi agama tadi. Jadi negara kita bisa disebut sudah memenuhi kesatuan antara agama dan negara.

Ada pemaknaan lain, misalnya *dâr al-Islâm* dan *dâr al-Kufr.* Istilah *dâr al-Islâm* pada umumnya dimaknai sebagai negara Islam. Sementara, *dâr al-Kufr* sebagai negara kafir. Namun, bagi saya, Islam di situ tidak harus dimaknai dalam arti teologi Islam, melainkan dipandang sebagai konsep negara yang aman dan damai (*dâr al-Amn*). Jadi, dasar atau pandangan apapun kalau itu bertujuan untuk menciptakan kondisi yang aman dan damai, saya kira, sudah masuk dalam kategori Islam. Tidak seperti yang sering dikatakan orang bahwa harus ada teks agamanya baru kemudian bisa disebut Islam. Sementara *dâr al-Kufr* dimaknai sebagai negara represif atau despotik (*dâr al-Khawf*). Hal tersebut ditegaskan oleh Imam Abu Hanifah: *"anna al-maqshûd min idlâfah al-dâr ilâ al-Islâm wa al-Kufr laysa huwa 'ayn al-Islâm wa al-Kufr wa innamâ al-maqshûd huwa al-amn wa al-khawf.* Anda bisa membaca tafsir ini dalam kitab "*Badaâ'i' al-Shanâ'î fî Tartîb al-Syarâ'i'*, karya al-Kasani. Saya kira ini adalah makna-makna substansial dari terma keagamaan tadi. Begitulah saya memahami sekularisme dan Islam.

Ada yang beranggapan bahwa konsep khilâfah adalah konsep ideal mengenai negara Islam. Namun, di pihak lain, ada yang beranggapan bahwa Islam tidak pernah mempunyai konsep mengenai negara. Menurut Anda, apakah Islam mempunyai konsep negara?

Saya kira, Islam tidak mempunyai konsep apapun, apakah itu konsep negara, konsep ekonomi atau konsep sosial. Islam hanya merumus-kan prinsip-prinsip dasar. Dengan kata lain Islam tidak menentukan bentuk sebuah negara. Fakta sejarah kaum Muslimin sejak Nabi sampai sekarang menunjukkan banyak bentuk negara yang diterapkan dalam masyarakat Muslim. Jadi tidak ada bentuk tunggal. Akan sangat mereduksi, bagi saya, kalau kemudian ada yang menganggap ada konsep negara Islam, ekonomi Islam, sosiologi Islam dan lain sebagainya. Pandangan seperti ini akan sangat mereduksi Islam.

Menurut saya, pluralisme adalah hukum Allah. Yaitu bahwa Allah telah menciptakan manusia secara plural, beragam, berbeda-beda dan berwarna-warni. Bahkan saya kira tidak ada yang sama di dunia ini. Pluralisme ingin memperkenalkan kepada manusia akan adanya keanekaragaman, kegandaan dalam hal budaya, pikiran, ideologi, ras, keyakinan, jenis kelamin, biologis, sosial, geografis dan sebagainya.

Saya sepakat bahwa Nabi Muhammad tidak pernah mendirikan negara Islam. Akan tetapi Nabi Muhammad mendirikan sebuah komunitas atau masyarakat yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Dalam Piagam Madinah, misalnya, saya tidak melihat ada kata-kata negara Islam. Yang ada di situ hanyalah nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakat di situ yang plural. Konsepnya disesuaikan dengan konteks kebudayaan masing-masing. Jadi model negara Madinah yang seperti itu, bagi saya, hanya khusus untuk Madinah, sehingga tidak bisa diterapkan di tempat lain dan di waktu yang lain. Yang bisa diterapkan dalam ruang yang lain dan di waktu yang lain adalah prinsip-prinsip dasarnya, misalnya *musyâwarah,* keadilan dan jaminan keselamatan atau perlindungan terhadap semua warga-

nya. Akan tetapi, segera saya harus memberi catatan pada konsep musyawarah.

Istilah musyawarah pada awalnya mempunyai makna yang umum, namun kemudian dimaknai secara lebih spesifik. Oleh karena itu, apakah kemudian musyawarah sama dengan demokrasi? Kalau musyawarah di-maknai secara spesifik seperti pernah diterapkan pada masa yang lalu, maka ia tidak sama dengan demokrasi. Tetapi jika musyawarah dimaknai secara lebih luas, misalnya sebagai bentuk hak-hak rakyat atau partisipasi rakyat secara luas, yaitu dengan menganggap bahwa derajat setiap orang sama, sehingga pendapatnya perlu dihargai, maka, menurut saya, musyawarah bisa dianggap sama dengan demokrasi. Jika musyawarah dimaknai seperti ini maka sama sekali tidak bertentangan dengan demokrasi. Jadi kalau kita sepakat untuk mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem kenegaraan yang baik, terlepas ada sesuatu yang kurang dari demokrasi, bagi saya, itu adalah sistem negara Islam. Tetapi jika musyawarah hanya berlaku bagi orang-orang tertentu, maka tentu tidak sama dengan demokrasi.

Jadi Islam tidak mempunyai konsep yang spesifik. Ia hanya memberikan paradigma dan prinsip-prinsip dasarnya saja. Model khilâfah selama ini dimaknai sebagai model kepemimpinan yang global dengan satu kriteria kewarganegaraan berdasarkan agama. Pandangan ini, menurut saya, sulit sekali untuk bisa diterima. Bagi saya itu tidak islami. Sebab, model seperti ini nantinya akan memunculkan diskriminasi ketika kewarganegaraan hanya diukur berdasarkan agama, etnis atau yang lainnya. Nantinya akan ada hukum bahwa para pengambil keputusan publik seperti kepala negara atau kepala pemerintahan tidak boleh dipegang orang yang bukan seagama dengan agama negara. Kalaupun dianggap ada isti-

lah khilâfah dalam al-Quran, maka konsep tersebut tidak dengan makna kepemimpinan tunggal untuk seluruh dunia, melainkan dalam arti pengelolaan masyarakat dunia secara demokratis. Jadi harus dibedakan antara konsep *khilâfah fî al-ardl* dengan khilâfah dalam arti pemimpin sebuah negara. Khilâfah dalam pengertian *khilâfah fî al-ardl* adalah upaya pengaturan oleh manusia untuk menyejahterakan setiap orang, menata dunia, dan lain sebagainya dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Kami menangkap bahwa Anda tidak memandang negatif sekularisme. Bahkan menurut Anda Islam sendiri menerapkan nilai-nilai sekular dengan membiarkan hal yang privat sebagai urusan privat dan yang publik sebagai urusan publik. Jika demikian, apakah menurut Anda ada sumber dari Islam yang menunjukkan bahwa Islam tidak bertentangan dengan nilai-nilai sekularisme?

Sebenarnya pandangan ini muncul dari konsep *tawhîd,* monoteisme. Konsekuensi logis dari konsep monoteisme adalah bahwa ada dualitas: pertama, Tuhan sebagai realitas yang absolut; kedua, manusia dan dunia sebagai entitas yang relatif. Di hadapan Tuhan, dalam konsep tauhid, manusia semuanya setara dan semuanya harus dihargai sebagai makhluk Tuhan. Saya kira, ayat *wa laqad karramnâ banî Âdam* merupakan petunjuk bahwa semua bani Adam harus dihormati. Itu berarti bahwa monoteisme Islam harus melahirkan konsep kesetaraan manusia, keadilan di antara manusia, terlepas dari komunitas yang berbeda-beda. Dan semua itu merupakan realitas yang sifatnya sekular. Banyak sekali sumber Islam yang menyebutkan bahwa Tuhan tidak melihat latar belakang so-

sial, etnis, gender dan lain-lain. Yang dilihat atau dinilai Tuhan adalah ketakwaannya.

Ada pernyataan Nabi yang eksplisit mengenai hal ini, yaitu: "*Antum a'lamu bi umûri dunyâkum*" (kamu lebih mengetahui urusan duniamu). Ini menunjukkan bahwa urusan operasional pengelolaan atau perumusan dalam soal-soal kehidupan di dunia biar dilakukan oleh manusia sesuai dengan kebutuhan mereka. Islam hanya menentukan nilai-nilai moral saja, misalnya jangan berbuat zalim, jangan menipu, jangan merusak, jangan berbohong, saling rela (*al-tarâdlî*), berlaku jujurlah, berlaku adillah dan seterusnya.

Bagaimana dengan konsep ahl al-kitâb

Konsep ini tetap kita terima. Jelas sekali di dalam al-Quran mereka disebut sebagai umat yang memiliki kitab suci yang turun dari Allah dan diyakini. Sebab, saya melihat bahwa prinsip-prinsip dasarnya sama. Semua nabi diutus Tuhan dengan prinsip yang sama. Yakni menegakkan keadilan di antara manusia dan alam. Yang berbeda hanyalah syariahnya. Syariah di sini diartikan sebagai jalan menuju Tuhan. Jalan atau cara yang berbeda-beda itu karena disesuaikan dengan konteks budayanya. Oleh karena itu, saya beranggapan bahwa terdapat kesamaan keyakinan dengan *ahl al-kitâb*, yakni beriman kepada Tuhan, meskipun dengan syariah yang berbeda-beda dan itu tidak menjadi masalah. Pemahaman konsep ini tetap saja berlaku sama hingga kini, sekalipun periode setelah Nabi meninggal. Menurut saya, syariah yang mereka amalkan adalah jalan-jalan atau pilihan-pilihan menuju Tuhan. Kalaupun ada penyimpangan dalam hal ketuhanan mereka, misalnya Trinitas, itu lebih berkaitan dengan soal tafsiran sebagian mereka. Al-Quran

sendiri membedakan antara *ahl al-kitâb* dan *musyrikîn*. Al-Quran juga menyebutkan ada orang-orang Yahudi, Nasrani yang beriman kepada Allah, hari akhirat dan beramal saleh. Dan kalaupun ketiga hal keimanan tersebut merupakan keyakinan mereka semua, ya biarkan saja. Tuhanlah yang akan menentukannya kelak di akhirat. Hubungan-hubungan sosial, ekonomi dan sebagainya tetap bisa dilakukan bersama-sama berdasarkan moralitas kemanusiaan.

Islam tidak harus dimaknai dalam arti teologi Islam, melainkan dipandang sebagai konsep negara yang aman dan damai (*dâr al-amn*). Jadi, dasar atau pandangan apapun kalau itu bertujuan untuk menciptakan kondisi yang aman dan damai, saya kira, sudah masuk dalam kategori Islam. Tidak seperti yang sering dikatakan orang bahwa harus ada teks agamanya baru kemudian bisa disebut Islam.

Bahkan dalam internal Islam sendiri?

Benar, nanti kita akan mencoba melihat makna syariah itu apa. Lalu apa bedanya dengan fikih. Syariah, sejatinya, hanyalah jalan yang menjadi ketentuan pada masa Nabi saja. Pada masa setelahnya, syariah kemudian menjadi fikih. Karena apa yang kita amalkan selama ini adalah tafsir terhadap syariah atau teks-teks al-Quran dan al-Sunnah. Namun demikian, tafsir atas teks-teks al-Quran maupun hadits terbukti berbeda-beda. Sebab, tidak mungkin apa yang dilakukan oleh Nabi pada waktu itu seluruhnya kita ambil apa adanya. Karena hal ini akan sangat tidak relevan dengan konteks yang terus berkembang – kalau semuanya harus dilaksanakan sebagaimana Nabi melaksanakannya dulu di sana. Ini lebih karena zaman telah

dan akan selalu berubah. Perubahan zaman tidak mungkin dihentikan. Perubahan adalah niscaya, *sunnatullâh*. Lagi-lagi saya harus menegaskan bahwa hal demikian hanyalah untuk hal-hal yang berhubungan dengan aspek-aspek *mu'âmalât*, yang meliputi urusan sosial, budaya, politik dan sebagainya, bukan dalam aspek-aspek ibadah. Untuk aspek ibadah, tentu saja, tetap dan tidak berubah. Kita ikuti apa adanya.

Dulu orang meramalkan bahwa agama akan tergeser dengan adanya modernisasi. Namun kenyataannya agama tetap bertahan, bahkan sekarang agama cenderung bangkit kembali. Sayangnya, kebangkitan agama seringkali berwajah menyeramkan dan menjadi sumber konflik. Menurut Anda, apakah agama, terutama Islam, masih memberikan harapan bagi kita yang hidup di zaman modern ini?

Menurut saya, yang menjadi fenomena sekarang, terkait dengan sikap dan praktik-praktik keberagamaan sebagian masyarakat, banyak yang, memang, tidak menguntungkan bagi agama, terutama bagi Islam. Misalnya fenomena kekerasan, intoleransi atau mendiskriminasi orang lain (paham dan agama lain). Saya yakin bahwa agama muncul untuk kepentingan kemanusiaan; kemaslahatan manusia. Selama itu tidak tercermin dalam praktik-praktik kehidupan, maka itu adalah tafsir orang atas agama. Jadi mesti ada tafsir lain atas agama. Sehingga, fenomena Islam "galak", menurut saya, sangat merugikan Islam dan itu, menurut hemat saya, bukanlah Islam. Islam tidak pernah memulai perang atau kekerasan. Perang atau jihad hanya boleh dalam rangka mempertahankan diri dari serangan atau kekerasan orang lain atau karena diusir dari tempat

tinggalnya. Karenanya, kita harus membangun kembali citra Islam yang damai dan adil; citra Islam yang menghormati orang lain.

Kalau Islam yang kita kemukakan adalah Islam dalam konteks yang terakhir ini – dengan membawa citra damai, adil dan menghormati orang lain – maka akan sangat relevan dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat modern. Justru masyarakat modern harus diarahkan pada konsep agama yang membawa perdamaian. Modernitas sebetulnya juga ingin mewujudkan perdamaian. Namun bahwa kemudian pada praktiknya muncul tafsir yang kental dengan nuansa kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, yang menindas, saya kira, itu semua tidak bisa mengatasnamakan modernitas atau agama.

Islam tidak mempunyai konsep apapun, apakah itu konsep negara, konsep ekonomi atau konsep sosial. Islam hanya merumuskan prinsip-prinsip dasar. Dengan kata lain Islam tidak menentukan bentuk sebuah negara. Fakta sejarah kaum Muslimin sejak Nabi sampai sekarang menunjukkan banyak bentuk negara yang diterapkan dalam masyarakat Muslim. Jadi tidak ada bentuk tunggal. Akan sangat mereduksi, bagi saya, kalau kemudian ada yang menganggap ada konsep negara Islam, ekonomi Islam, sosiologi Islam dan lain sebagainya. Pandangan seperti ini akan sangat mereduksi Islam.

Bagaimana mengkontekstualisasikan prinsip-prinsip dasar Islam dengan pelbagai nilai modern seperti hak asasi manusia (HAM), demokrasi, kesetaraan, perdamaian dan lain sebagainya, dengan tanpa mengabaikan perbedaan ruang dan waktu?

Saya ingin mengutip dua pandangan dari dua pemikir Islam, pertama al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab *al-Mustasyfâ* mengenai masalah kemaslahatan. Beliau menyebut tujuan agama tidak lain adalah kemaslahatan. Kemaslahatan yang ia maksud adalah untuk melindungi lima prinsip: *hifzh al-dîn, hifzh al-nafs, hifzh al-'aql, hifzh al-nasl,* dan *hifzh al-mâl.* Pertama, *hifzh al-dîn* adalah perlindungan terhadap keyakinan keagamaan. Ini harus dimaknai sebagai perlindungan terhadap siapapun atas agama apapun yang dianutnya. Tidak seperti yang kita baca dalam tafsir yang selama ini digunakan, yaitu untuk menjaga agama Islam saja, sehingga orang Muslim tidak boleh murtad. Sedangkan kalau ia murtad akan dihukum mati. Inilah tafsir yang selama ini berlaku. Saya kira ini perlu dikaji kembali pemaknaannya. Saya kira murtad yang dihukum mati, untuk konteks sekarang ini, adalah orang yang memberontak atau makar terhadap sistem negara dan telah menyebabkan korban nyawa. Dalam konteks HAM hukuman mati karena pindah agama, adalah pelanggaran hak asasi manusia.

Kedua, *hifzh al-nafs,* yaitu perlindungan terhadap jiwa. Artinya, setiap manusia tidak boleh dibunuh, dilukai, atau yang lainnya. Ketiga, *hifzh al-'aql*. Prinsip ini tidak bisa direduksi maknanya hanya terbatas pada pelarangan meminum-minuman keras, ganja, narkoba, dan lain sebagainya sehingga terjaga akal sehatnya. Bagi saya, pemaknaannya tidak semata-mata seperti itu, meskipun tafsir yang muncul selama ini seperti itu. Menurut saya, tafsirnya harus lebih luas lagi, yakni termasuk "kebebasan berpikir", kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, berorganisasi dan sebagainya. Jadi prinsip ini sebenarnya menegaskan kebebasan berpikir, mengeluarkan pendapat, dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang harus dijunjung dan dilindungi.

Keempat, *hifzh al-nasl,* saya memaknainya sebagai perlindungan terhadap hak reproduksi atau kesehatan reproduksi. Tidak hanya dimaknai seperti tafsir yang berlaku selama ini, yakni tidak boleh zina dan lain sebagainya. Tetapi prinsip tersebut juga harus dimaknai lebih luas lagi: tidak boleh melecehkan dan merendahkan orang lain, khususnya terhadap perempuan. Jadi prinsip ini harus dimaknai sebagai perlindungan terhadap kesehatan reproduksi dan kehormatan seseorang (*dignity*).

Kelima, *hifzh al-mâl* adalah perlindungan terhadap kepemilikan. Prinsip ini sebenarnya tidak hanya berbicara mengenai masalah mencuri, tidak boleh *ghasab,* tetapi juga berbicara mengenai kebebasan orang untuk berkarya dan berusaha. Lima prinsip dasar ini saya kira sama atau identik dengan prinsip dasar HAM. Elaborasinya bisa seperti yang sekarang dikembangkan oleh PBB, misalnya. Tetapi kelima prinsip ini bisa ditambah, misalnya dengan *hifzh al-bî'ah*, yakni perlindungan terhadap lingkungan. Jadi, prinsip ini, menurut saya, sesuai dengan HAM. Bahkan prinsip-prinsip Islam tersebut mendahului prinsip HAM.

Pendapat yang kedua datang dari Ibn Qayyim al-Jauziyyah, seorang murid Ibn Taimiyyah. Saya kagum sekali dengan tokoh ini dan saya tidak sependapat dengan anggapan bahwa tokoh ini sangat tekstualis, sebab ia sama sekali tidak selalu begitu. Dia mengatakan *fa inna syarî'at al-Islâmiyah mabnâhâ wa asâsuhâ 'alâ al-hikami wa mashâlih al-'ibâd, wa hiya 'adlun kulluhâ, wa mashâlihun kulluhâ, wa rahmatun kulluhâ, wa hikmatun kulluhâ. Fa kullu mas'alatin kharajat 'an al-'adl ilâ al-jawd, wa 'an al-mashlahati ilâ al-mafsadah, wa 'an al-rahmati ilâ dliddihâ, wa 'an al-hikmati ilâ al-'abats, fa laysat min al-syarî'ah wa in dukhilat fî hâdzihi al-ta'wîl.* Artinya, Islam dibangun berdasarkan keadilan dan kemaslahat-

an hamba-hamba Allah *fî al-ma'âsyî wa al-ma'âd,* di dunia dan akhirat. Semuanya harus adil, maslahat, rahmat, dan bijaksana. Maka, setiap masalah yang keluar dari yang adil menjadi tidak adil, dari yang maslahat menjadi kerusakan, dari rahmat menjadi tidak rahmat, dan dari hikmah menjadi kesia-siaan bukanlah termasuk syariat Islam, meskipun ditafsirkan dan dilakukan dengan atas nama Tuhan.

Jadi menurut saya, hal itu juga termasuk ke dalam prinsip HAM sebagaimana saya sebut di atas. Islam ingin seperti itu. Oleh karena itu, kita harus mengembalikan semua tafsir yang sekarang berkembang untuk dikoreksi kembali atau ditafsirkan kembali dalam konteks sekarang. Karena begini, saya tentu saja prihatin terhadap Islam karena agama ini sudah lama sekali mengalami degradasi dan stagnan. Sebagian yang dipraktikkan sebagian kaum Muslimin tidak menguntungkan Islam. Itulah yang kita sebut dengan kemunduran, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan sebagainya. Penyebabnya, menurut saya, adalah karena umat Muslim masih mempertahankan tafsir lama yang dianggap sudah baku dan bahkan dianggap sebagai ajaran Islam itu sendiri. Padahal tafsir-tafsir tersebut hanya bisa berlaku untuk konteksnya sendiri, tidak bisa diterapkan dalam konteks yang lain.

Oleh karena itu, setiap tafsir orang dari masa lalu tidak bisa dibawa dan dipakai begitu saja untuk zaman sekarang, melainkan harus dimaknai secara lain untuk konteks yang baru. Tentu saja dengan tetap mengindahkan konsep dasar dari al-Ghazali maupun konsep dari Ibn Qayyim al-Jauziyyah tadi. Karena itu, sebetulnya, rumusan apapun dan oleh siapapun yang formatnya mengandung prinsip-prinsip tersebut, menurut saya, sudah bisa dikatakan Islam. Jadi apa yang dikembangkan di Barat, misalnya,

bagaimana berdisiplin, bagaimana menghargai orang, mengeksplorasi pengetahuan dan sebagainya bisa disebut Islam. Jadi yang perlu dilakukan oleh umat Muslim adalah merekonstruksi dan mereinterpretasi teks-teks parsial atau teks-teks konsep, bukan teks-teks prinsip atau teks universal.

Saya membedakan dua teks keagamaan: ada teks keagamaan yang bersifat universal dan ada teks keagamaan yang bersifat partikular. Teks keagamaan yang universal inilah yang seharusnya menjadi basis bagi teks-teks partikular. Sebetulnya teks-teks partikular, termasuk yang ada di dalam al-Quran sendiri, adalah contoh penerapan prinsip-prinsip universal ke dalam konteks tertentu. Misalnya, bagaimana prinsip dasar tersebut diterapkan, katakanlah, di Madinah, harus memperhitungkan konteks lokal di Madinah itu sendiri. Tetapi penerapan ini merupakan langkah pertama untuk suatu transformasi kultural yang ada sebelumnya, sehingga, menurut saya, proses ini perlu dikembangkan dan dilanjutkan sampai prinsip-prinsip kemanusiaan universal terwujud. Jadi teks partikular ketika diterapkan di Madinah memang tepat dan sangat maslahat, sangat maju. Namun contoh penerapan ini tidak bisa begitu saja diambil untuk diterapkan ke dalam konteks yang lain. Jadi, Madinah hanya satu contoh bagaimana satu prinsip dasar Islam di terapkan pada waktu dan ruang tertentu. Andaikata

> Saya sepakat bahwa Nabi Muhammad tidak pernah mendirikan negara Islam. Akan tetapi Nabi Muhammad mendirikan sebuah komunitas atau masyarakat yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Dalam piagam Madinah, misalnya, saya tidak melihat ada kata-kata negara Islam. Yang ada di situ hanyalah nilai-nilai moral yang harus dijunjung tinggi oleh masyarakat di situ yang plural. Konsepnya disesuaikan dengan konteks kebudayaan masing-masing.

kondisi dan situasi kita hari ini sama dengan pada masa Nabi, tentu kita akan melaksanakannya seperti yang diamalkan beliau.

Oleh karena itu, yang harus kita lihat di dalam teks partikular itu adalah logikanya atau semangatnya, ruhnya, jiwanya. Yakni kemasalahatan dan keadilan. Pastilah, menurut saya, yang diterapkan pada saat itu mengandung prinsip logika kemaslahatan dan keadilan. Karenanya, logika kemaslahatan dan keadilan itulah yang harus dipindahkan ke tempat yang lain. Tetapi, format dan mekanismenya bisa berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain dan antara zaman yang satu dengan zaman yang lain. Artinya, redaksi atau bentuknya bisa berbeda, tapi semangat dan jiwanya sama. Dengan begitu bukan berarti kita menghapus teks yang lama. Saya beranggapan bahwa teks tersebut sangat bijaksana dan sangat tepat, tetapi format yang seperti itu tidak selalu bisa diterapkan pada konteks yang lain. Bahkan bisa jadi kalau dipaksakan ia akan menjadi sangat tidak relevan atau bahkan merugikan, tidak maslahat.

Saya kira, contoh-contoh penafsiran ulang itu sangat banyak dilakukan oleh para Sahabat sepeninggal Nabi. Kita tahu sepeninggal Nabi sudah tidak ada otoritas manusiawi yang tunggal untuk memutuskan kebenaran. Sehingga akhirnya ukuran kebenaran menjadi sangat relatif, oleh karena itu, sering muncul perbedaan satu dengan yang lainnya. Di sinilah kita mengambil contoh bagaimana para Sahabat menerapkan logika kemaslahatan atau semangat itu dalam konteks mereka sendiri. Misalnya, Umar mempunyai konteks sendiri, Abu Bakar juga demikian, juga Utsman dan 'Ali, tetapi tujuannya sama, yakni bagaimana agar agama tetap relevan, tetap maslahat dan adil bagi semua orang. Mekanisme pemilihan mereka sebagai khalifah atau tepatnya *"khalîfatu Rasûlillâh"* (peng-

> Dasar atau pandangan apapun kalau itu bertujuan untuk menciptakan kondisi yang aman dan damai, saya kira, sudah masuk dalam kategori Islam. Tidak seperti yang sering dikatakan orang bahwa harus ada teks agamanya baru kemudian bisa disebut Islam...Saya kira ini adalah makna-makna substansial dari terma keagamaan tadi. Begitulah saya memahami sekularisme dan Islam.

ganti Nabi dalam kepemimpinan masyarakat, bangsa), atau *"Amîr al-Mu'minîn"* juga berbeda-beda. Sesudah periode itu, mekanismenya berbeda jauh lagi.

Ya, tentu saja, pergeseran itu boleh-boleh saja. Dulu tidak ada pemilihan umum, tidak ada pembagian kekuasaan. Dengan pengertian lain, apa yang tidak ada pada masa Nabi tidak berarti tidak boleh ada pada masa yang lain. Kata Ibnu Qayyim: *"Idzâ zhaharat amarat al-'adl wa asfara wajhuhu bi-ayyi tharîqin kâna, fa tsamma syar'u Allâh wa dînuhu"*. Artinya, "jika telah ada dan telah jelas indikator keadilan dengan jalan apa saja ia bisa dihasilkan, maka di situlah syariah dan agama Allah".

Sebagaimana telah Anda singgung bahwa sepeninggal Muhammad sudah tidak ada lagi otoritas tunggal untuk menjawab masalah keagamaan, sehingga mengandaikan kebebasan berpikir bagi umat Islam. Pertanyaan-nya, apakah kebebasan berpikir merupakan suatu yang pokok dalam Islam atau ia datang belakangan setelah Islam bersentuhan dengan peradaban lain?

Menurut pendapat saya kebebasan berpikir itu inheren dalam Islam. Terlampau banyak ayat-ayat al-Quran yang menyebutkan hal seperti itu. Bahkan al-Quran mengatakan: *afalâ yatadabbarûn*

al-Qur'ân am 'alâ qulûbin aqfâluhâ. Artinya, apakah mereka tidak merenungkan al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Selain itu banyak sekali kalimat-kalimat yang menyerukan untuk menggunakan akal pikiran. Oleh karena itu, bagi saya, ayat-ayat ini adalah prinsip Islam yang mendukung kebebasan berpikir. Banyak tafsir atas ayat berikut ini:

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾ فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾

Ayat ini menjadi prinsip dasar kebebasan berpikir bagi masyarakat Muslim saat itu. Karena itu, saya melihat bahwa pada periode Islam awal sampai pada abad empat Hijriah, dinamika pemikiran Islam sangat luar biasa dan kebebasan berpikir juga sangat berkembang, sehingga pada saat inilah disiplin-displin keilmuan banyak disusun. Jadi ketika Barat pada masa itu berada dalam zaman kegelapan Abad Pertengahan, umat Muslim justru mengalami masa keemasannya dan kemudian dari Islamlah Barat belajar.

Tiga atau empat abad pertama Islam sering disebut sebagai generasi salaf yang saleh. Nabi mengatakan bahwa generasi salaf adalah generasi Muslim yang terbaik, *Khayr al-qurûni qarnî tsumma al-ladzîna yalûnahum tsumma al-ladzîna yalûnahum*. Saya selalu menganggap bahwa konsep salafi itu harus mengandung makna kebebasan berpikir. Jadi bukan seperti yang sekarang kaprah dipahami

oleh kebanyakan orang bahwa salafi adalah tekstualis. Karena periode salafi itu, periode sampai abad keempat Hijriah, kebebasan berpikir, proses kreatif dan disiplin keilmuan banyak disusun. Ilmu tafsir, hadits, *ushûl al-fiqh*, sains, filsafat, matematika, teknologi dan sebagainya lahir pada periode-periode tersebut. Dalam sejarahnya saya menemukan bahwa para tokoh Islam sangat bebas mengambil, mengadopsi dan membaca karya-karya dari orang non-Muslim yang hidup sebelumnya, seperti karya-karya orang Yunani dan lain sebagainya. Mereka menyebutnya sebagai *'ulûm al-awâ'il*. Saya sering mengatakan bahwa teori *ushûl al-fiqh* Imam Syafi'i banyak mengambil inspirasi dari logika Aristoteles. Karena Imam Syafi'i juga membaca karya-karya Aristoteles dalam bahasa Yunani.

> Semua nabi diutus Tuhan dengan prinsip yang sama. Yakni menegakkan keadilan di antara manusia dan alam. Yang berbeda hanyalah syariatnya. Syariat di sini diartikan sebagai jalan menuju Tuhan. Jalan atau cara yang berbeda-beda itu karena disesuaikan dengan konteks budayanya. Oleh karena itu, saya beranggapan bahwa terdapat kesamaan keyakinan dengan *ahl al-Kitâb*, yakni beriman kepada Tuhan, meskipun dengan syariat yang berbeda-beda dan itu tidak menjadi masalah. Pemahaman konsep ini tetap saja berlaku sama hingga kini, sekalipun periode setelah Nabi meninggal.

Saya terkesan dengan satu informasi yang mengatakan bahwa suatu hari Imam Syafi'i ditanya oleh Harun al-Rasyid mengenai dari mana ia memperoleh pengetahuan tentang ilmu kedokteran. Imam Syafi'i menjawab bahwa ia mengetahuinya melalui bacaannya terhadap karya pemikir-pemikir Yunani seperti Posporius, Galenus, Socrates dan lain sebagainya. Dari bacaannya mengenai filsafat Yunani inilah teori *ushûl al-fiqh*-nya dibangun. Banyak pi-

hak memang tidak setuju dengan itu dan mengatakan bahwa teori fikih tersebut karya orisinal Imam Syafi'i. Tentu saja, pandangan seperti itu boleh-boleh saja, tetapi saya kira saat itu telah terjadi akulturasi kebudayaan dan peradaban. Selain itu, munculnya ilmu-ilmu fisika, kedokteran dan lain sebagainya yang dikembangkan oleh pe-mikir Islam awal, saya kira, adalah buah dari kebebasan berpikir masa itu.

Oleh karena itu, pernyataan "jangan kebablasan berpikir," bagi saya, menjadi tidak relevan. Kebebasan tidak bisa diukur kecuali dengan kebebasan orang lain. Karena itu, bagi saya, orang boleh berpikir apa saja, karena pada akhirnya nanti kebebasan tersebut akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Belum lagi soal stigmatisasi terhadap pemikiran liberal. Justru hal seperti ini akan mematikan kreativitas berpikir umat Islam. Menurut saya, berpikir liberal (*hurriyat al-tafkîr*) itu bagus dan merupakan tuntutan al-Quran sendiri. Oleh karena itu, saya tidak mengerti mengapa berpikir liberal dipandang negatif.

Banyak kalangan dari pelbagai agama menganggap bahwa liberalisme atau pemikiran liberal pada akhirnya akan menimbulkan budaya permisif, di mana semuanya dianggap boleh dan itu bagi mereka cenderung merusak agama. Bagaimana Anda menanggapi anggapan seperti itu?

Menurut saya, silakan saja Anda berpikir seliberal mungkin. Asal saja, Anda berpikir dalam kepentingannya sendiri dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain atau risikonya akan ditanggung sendiri. Tetapi jika pikirannya menyangkut orang lain, ia pasti akan menerima bantahan sebagai risikonya – jika berten-

tangan dengan cara atau logika (kebebasan) berpikir orang lain. Jadi, menurut saya, budaya permisivisme yang timbul sebatas menyangkut dirinya sendiri tidak menjadi masalah. Dengan pengertian lain, dia akan menanggung sendiri risikonya di hadapan Tuhan. Tuhan pastilah Maha Adil. Sebab, siapapun tidak berhak membatasi orang untuk berpikir. Tapi kalau sudah menyangkut atau mengganggu kepentingan orang lain, atau menzalimi orang lain, negara bisa dan wajib bertindak atas dasar undang-undang. Dengan begitu, sebetulnya tidak ada kebebasan mutlak. Demikianpun dalam hal ini tidak ada istilah permisivisme.

Oleh karena itu, mekanisme demokrasi menjadi sangat penting. Kebebasan berpikir antara yang satu dengan yang lain, pada akhirnya, memang mensyaratkan adanya mekanisme demokrasi. Yaitu mekanisme di mana semua pemikiran bisa diakomodasi tanpa ada satu pemikiran lebih berkuasa ketimbang yang lainnya. Jadi di situlah setiap pemikiran berkontestasi, tapi jangan dihantam atau dibunuh orangnya hanya lantaran perselisihan pendapat.

Dengan demikian, apakah demokrasi harus memberikan ruang yang sama bagi siapapun, termasuk kelompok fundamentalis yang berusaha mendesakkan kepentingannya?

Menurut saya, bentuk pandangan dan kepentingan seperti apapun tidaklah masalah asal jangan melakukan kekerasan. Jadi boleh saja mereka mengajukan pendapatnya atau bahkan menyerang pemikiran orang lain, tapi jangan dengan cara kekerasan, membunuh, meneror dan sebagainya. Silakan mereka melakukan bantahan terhadap pikiran-pikiran orang lain. Sebab nantinya mereka akan dinilai oleh masyarakat dan sejarah. Namun kita tidak

akan melakukan cara-cara yang tidak elegan dan tidak simpatik, misalnya dengan melakukan stigmatisasi, membunuh karakter seseorang atau cara-cara yang lain. Kita harus berpikir obyektif. Jangan kemudian perbedaan tersebut dipolitisasi, meskipun memang setiap orang mempunyai kepentingan. Jadi, menurut saya, tidak masalah jika mereka memanfaatkan mekanisme demokrasi dan kita juga memanfaatkan mekanisme yang sama, asal jangan dengan cara kekerasan.

Yang patut disayangkan adalah bahwa mereka menggunakan kebebasan dan kebenaran yang dianggap paling sahih untuk menghakimi orang lain dengan menganggap orang lain yang berbeda sebagai kafir, halal darahnya, bisa dihancurkan, dan sebagainya. Itu yang tidak saya sepakati. Saya kira ada baiknya kita membaca bukunya Imam al-Ghazali yang berjudul "*Fayshal al-Tafriqah Bayna al-Islâm wa al-Zandaqah*". Dalam kitab ini beliau menjelaskan terminologi Muslim dan kafir secara sangat detail dan kritis: siapa yang disebut Muslim dan siapa yang disebut kafir. Beliau sangat berhati-hati mengidentifikasi atau menghukumi orang sebagai kafir.

Apakah sampai saat ini, menurut Anda, demokrasi adalah mekanisme yang paling tepat untuk mengatasi perbedaan pendapat?

Sampai saat ini kita memang belum melihat satu teori sosial-politik atau sistem negara yang baik seperti demokrasi. Sistem khilâfah, menurut saya, sudah tidak bisa lagi digunakan untuk saat ini. Sebab jika diterapkan ia bisa mendiskriminasi dan menghalangi hak-hak orang lain. Sistem kerajaan juga tidak bisa karena kekuasaannya terletak pada satu orang dan tidak bisa menghargai orang lain. Penggantinya juga harus dari anaknya atau

keluarganya sendiri, tidak boleh orang lain, meskipun dia kapabel. Saya juga tidak sepakat dengan sistem yang diterapkan di Iran, *Wilâyat al-Faqîh* yang mempunyai otoritas sangat tinggi mengatasi otoritas rakyat.

Model *khilâfah* selama ini dimaknai sebagai model kepemimpinan yang global dengan satu kriteria kewarganegaraan berdasarkan agama. Pandangan ini, menurut saya, sulit sekali untuk bisa diterima. Bagi saya itu tidak islami. Sebab, model seperti ini nantinya akan memunculkan diskriminasi ketika kewarganegaraan hanya diukur berdasarkan agama, etnis atau yang lainnya

Jadi sejauh ini kita belum melihat satu teori lain yang lebih mumpuni ketimbang demokrasi. Meskipun demikiran, kita harus ingat, bahwa demokrasi juga mempunyai kelemahan ketika dihadapakan problem antara yang mayoritas dan minoritas. Karena itu, cara demokrasi prosedural seperti voting, misalnya, merupakan cara terakhir ketika cara lain tidak bisa dijalankan. Dalam konsep Islam, sebagaimana saya baca dalam Ibn Taimiyyah, kepemimpinan yang tidak adil atau zalim itu lebih baik ketimbang tidak ada pemimpin. Karena kalau tidak ada pemimpin berarti *chaos*. Jadi pilihan kita terhadap demokrasi yang memenangkan mayoritas dan menyingkirkan minoritas, menurut saya, itu adalah resiko yang harus diambil.

Artinya, Anda tidak melihat politik mayoritarianisme dalam demokrasi sebagai masalah?

Kalau kita bicara yang ideal, memang menjadi masalah. Seharusnya yang patut kita kembangkan adalah demokrasi substansial. Demokrasi substansial adalah demokrasi yang menghargai hak

asasi manusia dan itu harus menjadi dasar bagi semua keputusan. Yakni demokrasi yang berbasis keadilan dan menghargai hak-hak asasi manusia. Jadi bukan antara mayoritas dan minoritas. Kalau masih soal mayoritas dan minoritas, berarti di situ masih ada kepentingan. Kenapa masalah kemanusiaan tidak bisa diselesaikan secara bersama-sama? Ke depan demokrasi seperti ini seharusnya semakin dikembangkan. Saya mungkin sedang bermimpi.

Tadi Anda sudah memaparkan soal kebebasan berpikir dan tumbuhnya pelbagai disiplin keilmuan di dunia Islam pada masa awal, termasuk di dalamnya disiplin fikih dan ushûl al-fiqh. *Namun, seiring dengan surutnya kebebasan berpikir, disiplin keilmuan tersebut turut mandeg. Kemudian untuk mengatasi hal ini, sebagaimana tadi Anda katakan, adalah dengan melakukan interpretasi ulang teks-teks partikular. Karena studi Anda sangat luas di bidang fikih maka kami meminta Anda untuk mengelaborasi pembaharuan yang perlu dilakukan dalam bidang fikih.*

Begini, menurut saya, ada empat kategorisasi cara keberagamaan umat Muslim: pertama, *ittibâ‘ syakhsyî,* yaitu mengikuti orang secara personal. Cara demikian ini terjadi pada masa Nabi. Yang saya maksud adalah bahwa ketika Nabi Muhammad masih ada, semua keputusan persoalan ada di tangan Nabi. Apapun yang dilakukan Nabi pada saat itu adalah putusan agama. Ini yang dinamakan syariah. Meskipun Nabi sendiri juga memberikan kebebasan, namun pada akhirnya setiap ada persoalan keagamaan harus disampaikan kepada Nabi dan kemudian Nabi memberi putusan secara final. Terhadap keputusan Nabi inilah semua orang Islam harus tunduk.

Kedua, sepeninggal Nabi, saya sebut sebagai *ittibâ‘ muthlâq* atau taklid mutlak, yakni mengikuti secara bebas. Siapapun yang tidak memahami agama dapat bertanya kepada siapa saja yang ahli dan boleh berpindah-pindah. Jadi, misalnya, hari ini mengikuti Umar kemudian besoknya mengikuti Abu Bakar atau Ali atau Utsman mengenai satu hal tertentu. Pada periode ini bisa dikatakan bahwa tidak ada otoritas satu mengalahkan yang lain. Kecuali ketika mereka, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali menjadi khalifah, karena status mereka sebagai pemimpin komunitas. Masa ini berjalan cukup lama, yaitu sekitar dua abad.

Pernyataan "jangan kebablasan berpikir," bagi saya, menjadi tidak relevan. Kebebasan tidak bisa diukur kecuali dengan kebebasan orang lain. Karena itu, bagi saya, orang boleh berpikir apa saja, karena pada akhirnya nanti kebebasan tersebut akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Belum lagi soal stigmatisasi terhadap pemikiran liberal. Justru hal seperti ini akan mematikan kreativitas berpikir umat Islam. Menurut saya, berpikir liberal (*hurriyat al-tafkîr*) itu bagus dan merupakan tuntutan al-Quran sendiri. Oleh karena itu, saya tidak mengerti mengapa berpikir liberal dipandang negatif.

Setelah masa ini, kemudian muncul tokoh-tokoh yang mencoba mensistematisasi cara keberagamaan yang bebas tersebut dengan menyusun teori-teori keberagamaan. Pada saat itu juga masih ada kebebasan. Saya terkesan dengan pandangan Imam Malik, ketika khalifah al-Mansur meminta agar kitab *al-Muwaththa’* karangan beliau, dijadikan dasar bagi keberagamaan pemerintahan di Baghdad. Pendeknya, kitab *al-Muwaththa’* hendak dijadikan undang-undang. Namun Imam Malik dengan tegas menolak menjadikan kitabnya sebagai kodifikasi hukum untuk semua wi-

layah. Karena, bagi Imam Malik, di masing-masing daerah sudah ada imam yang diikuti. Semuanya sah diikuti. Dan ia berpendapat biarlah umat Muslim memilih cara keberagamaannya sendiri.

Tetapi kemudian tercipta kelompok-kelompok yang mengikuti imam di masing-masing wilayah yang disebut kelompok mazhab, seperti Imam Syafi'i di Mesir, Imam Hanafi di Kufah, Imam Malik di Madinah dan lainnya. Meskipun sebetulnya tidak hanya empat. Namun yang kita tahu hanya empat, padahal ada ratusan mazhab atau kelompok masyarakat yang mengikuti imam yang dianggap mampu memahami al-Quran dan hadits Nabi dalam konteks masing-masing. Pada masa ini masih bisa kita sebut sebagai kategori *ittibâ' muthlâq.*

Sepeninggal tokoh-tokoh ini, terjadilah apa yang disebt *taqlîd mahdlî,* yaitu ketika masyarakat sudah mengelompokkan diri sebagai pengikut satu imam tertentu dan konsisten dengan pikiran dan konsep-konsep tokoh panutan tersebut. Meskipun begitu, dalam kondisi atau konteks tertentu masih boleh pindah mazhab. Periode ini berlangsung sampai pada abad keempat Hijriah.

Patut menjadi catatan di sini, bahwa sampai pada abad keempat Hijriah sebetulnya terjadi pertentangan di tengah masyarakat yang luar biasa dalam dunia politik dan ideologi, antara pemikir rasionalis dan pemikir tradisionalis. Kekalahan aliran rasionalis Mu'tazilah kemudian menimbulkan kepemimpinan yang memihak pada pemikiran yang tradisionalis ala Ibn Hanbal. Karena itu, kemudian ada deklarasi yang disampaikan oleh khalifah al-Mu'tasim Billah, khalifah terakhir Abbasiyah, yang berisi bahwa masyarakat tidak boleh mengikuti cara keberagamaan selain mazhab empat. Jadi pada saat itu hanya mazhab empat yang boleh diikuti. Sebaliknya semua pemikiran lain dilarang. Semua buku-buku dan

guru-guru yang masih mengajarkan selain mazhab empat dilarang dan mereka dikeluarkan atau dipecat. Di sinilah lalu terjadi apa yang saya sebut sebagai *taqlîd jâmid*, yaitu ketika semua kreativitas pikiran menjadi beku.

Pada masa inilah kemudian lazim dinamakan sebagai tertutupnya pintu ijtihad dalam dunia Islam. Karena kebebasan sudah tidak ada lagi. Cara ini, konon, sebagai upaya untuk menyelamatkan umat Muslim. Namun saya tidak mengerti bahwa cara ini dimaksudkan untuk menyelamatkan umat, kecuali bahwa cara ini adalah pandangan politik rezim baru yang berusaha menutup pandangan politik rezim lama, yaitu rezim rasionalis yang kritis. Kemudian ditetapkan prinsip-prinsip atau cara pandang dan cara tafsir keagamaan yang sangat tekstualis. Jadi, menurut saya, cara pandang rasionalisme kemudian dibatasi.

Saya tidak tahu apakah pernyataan *man istahsana fa-qad syara'a,* yang artinya "barang siapa yang membikin-bikin maka ia telah membuat hukum", merupakan pernyataan imam Syafi'i sendiri atau pengikutnya. Mungkin saja imam Syafi'i mengatakan seperti itu, tapi apa maksudnya bahwa kita dianggap tidak tahu atau tidak mempunyai suatu pengetahuan untuk menentukan pilihannya sendiri. Dari pernyataan itu, seakan-akan kemaslahatan tidak menjadi "basis" bagi pengambilan keputusan. Pernyataan ini kemudian ditafsirkan oleh orang-orang setelah Syafi'i sebagai anjuran untuk selalu

Seharusnya yang patut kita kembangkan adalah demokrasi substansial. Demokrasi substansial adalah demokrasi yang menghargai hak asasi manusia dan itu harus menjadi dasar bagi semua keputusan. Yakni demokrasi yang berbasis keadilan dan menghargai hak-hak asasi manusia.

merujuk ke teks atau "tekstualisme". Artinya, setiap persoalan harus didasari oleh teks dan tidak boleh didasarkan pada pikiran bebas dan "basis kemaslahatan". Namun saya meragukan pernyataan itu datang dari Imam Syafi'i, karena beliau tidak mungkin mengatakan hal semacam itu. Kalau memang pernyataan ini berasal dari beliau, mungkin yang ingin dibatasi adalah kepentingan untuk kelompok atau kepentingan untuk hawa nafsu. Kemaslahatan tidak mungkin diabaikan oleh siapapun, karena merupakan tujuan terakhir syariah, hukum-hukum agama.

Ketika taklid jumud ini dibakukan, kemudian terjadilah reproduksi pikiran secara terus-menerus. Karena ijtihad sudah tidak ada. Yang terjadi kemudian adalah proses pensyarahan dari kitab-kitab para ulama sebelumnya. Misalnya teks-teks Hanafi, Maliki, Syafi'i dielaborasi sedemikian rupa kemudian diringkas, setelah diringkas kemudian dibuat dalam bentuk syair, dan setelah itu kembali lagi dibuat syarahnya. Proses ini terjadi terus-menerus, sehingga terjadi sirkulasi pemikiran yang stagnan. Memang ada perubahan-perubahan, namun perubahan itu sangat tidak mendasar. Perubahan yang parsial. Dan perubahan itu biasanya terjadi hanya karena ada keterdesakan yang kemudian melahirkan kreativitas. Keterdesakan yang saya maksud adalah kenyataan sosial yang mapan dan tidak bisa dihindari lagi.

Kita bisa mengambil contoh di Indonesia: ulama NU berpendapat bahwa melempar *jumrah* tidak boleh dilakukan sebelum tergelincirnya matahari. Dan pandangan ini sangat kuat atau *mu'tamad.* Tetapi ketika terjadi musibah di terowongan Mina, pandangan ini kemudian berubah, sehingga muncul pandangan baru yang menyatakan boleh melempar *jumrah* sebelum tergelincirnya matahari. Terjadinya proses kreativitas pada masa yang lalu juga terjadi sangat

parsial sebagaimana contoh tersebut. Secara keseluruhan pandangan mereka masih terpaku pada paradigma besar tadi. Memang kita sering mendengar pandangan yang mengejutkan dari NU untuk merespon pandangan-pandangan baru. Di NU ada istilah *taqlîd qawlî* dan *taqlîd manhajî*. *Taqlîd qawlî* artinya mengambil pendapat seorang mujtahid tertentu secara tekstual. Sementara *taqlîd manhajî* artinya mengambil metode berpikir seorang mujtahid.

Saya kira, secara umum, pola keberagamaan abad keempat masih dipertahankan sampai sekarang. Baru kemudian ada usaha-usaha pembaharuan seperti yang dilakukan oleh Muhammad Abduh. Sebetulnya sudah ada beberapa pembaharuan di masa yang lebih awal seperti yang dilakukan oleh Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah yang mencoba melakukan reinterpretasi. Tetapi yang sangat menonojol sebagai pembaharu pada masa berikutnya adalah Muhammad Abduh. Kemudian ada sejumlah tokoh baru yang muncul, akan tetapi selalu dengan dukungan kekuasaan, seperti Muhammad ibn Abdul Wahhab. Muhammad Abduh, menurut saya, sangat orisinal dan dia sangat konsentrasi dengan pengembangan keilmuan, pembelaan terhadap ijtihad tanpa ada pengaruh kekuasaan. Menurut saya, ini sangat luar biasa. Sementara pembaharu yang lain masih ada campur tangan penguasa.

Memang, setiap paham yang populer hampir selalu – kepopulerannya juga karena – mendapat dukungan dari kekuasaan, sebagaimana dulu Mu'tazilah. Demikian juga dengan Asy'ariyah atau Wahhabiyah, keduanya mendapat dukungan dari kekuasaan. Namun, sayangnya pembaharuan yang dilakukan oleh Abduh bisa kita sebut elitis, meskipun ia tidak pernah memaksakan orang, melalui kekuatan negara, untuk berpikir yang sama, melainkan membiarkan orang membaca dan memikirkannya secara langsung. Tetapi,

sayang, pemikirannya tidak bisa diakses oleh setiap orang. Selain Abduh, kita juga bisa menyebut Rifa'ah al-Tahtawi, Qasim Amin, dan lain sebagainya. Sebagai catatan, semua pembaharu tersebut mengambil inspirasi dari Barat untuk mengembalikan kebebasan berpikir yang selama ini sudah punah. Hanya saja dominasi pemikiran yang konservatif atau literal terasa masih sangat kuat di dunia Islam, sehingga mereka yang berpikir secara baru dan berusaha memajukan agama justru mendapat stigmatisasi dan selalu dicurigai. Fenomena ini sebenarnya sangat merugikan Islam sendiri.

Meskipun saya tidak membaca secara langsung seluruh pemikiran Muhammad Abduh, namun saya bisa membayangkan bahwa Abduh seakan bertanya: "Sebenarnya apa yang terjadi dengan Islam saat ini? Semua ini adalah boleh jadi salah kita, salah umat Islam sendiri." Menurut saya, kemunduran, kemiskinan, kebodohan yang mendera umat Islam adalah karena salah kita sendiri, bukan salah orang lain. Sebab, kita tidak mampu menggali dan mengeksplorasi kembali teks-teks Islam yang bersifat abadi, universal, dan relevan bagi kehidupan umat Muslim. Kalau teks-teks keagamaan Islam yang universal itu bisa digali, maka Islam akan mampu bangkit. Jika tidak, maka kita akan tetap seperti ini. Bahkan, menurut saya, mempertahankan pandangan klasik atau pandangan lama secara konservatif dalam konteks yang sudah berubah akan bisa memunculkan pandangan-pandangan fundamentalistik, bahkan radikal.

Bagaimana dengan kasus Aceh dan munculnya peraturan-peraturan daerah (perda) yang menerapkan syariat Islam? Apakah fenomena itu merupakan salah satu bentuk eksplorasi terhadap teks-teks keagama-

an Islam yang universal atau, malah sebaliknya, justru memasung kebebasan umat Islam sendiri?

Kalaupun dianggap ada istilah *khilâfah* dalam al-Qur'an, maka konsep tersebut tidak dengan makna kepemimpinan tunggal untuk seluruh dunia, melainkan dalam arti pengelolaan masyarakat dunia secara demokratis. Jadi harus dibedakan antara konsep *khilâfah fî al-ardl* dengan khilafah dalam arti pemimpin sebuah negara. Khilafah dalam pengertian *khilâfah fî al-ardl* adalah upaya pengaturan oleh manusia untuk menyejahterakan orang, menata dunia, dan lain sebagainya dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Saya ingin melihat problem tersebut pada dua level: pertama, level politisi; dan yang kedua, level masyarakat atau orang awam. Para politisi, menurut saya, memanfaatkan emosi umat Muslim yang awam, yang sudah terbentuk sejak lama, untuk kepentingan para politisi agar didukung. Sementara orang awam tanpa analisis-kritis menerima begitu saja ajaran-ajaran lama. Celakanya, bagi saya, fenomena semacam itu bisa menyulitkan perkembangan kehidupan ini, terutama bagi umat Islam, dan masyarakat luas yang plural. Isu perda syariah sebenarnya mengangkat isu lama yang terkontaminasi oleh budaya yang sangat patriarkal untuk diterapkan dalam masyarakat yang sudah demikian maju.

Jadi orang tidak bisa memilah bahwa ada perkembangan kebudayaan, dari kebudayaan nomaden, agraris, kebudayaan industri, dan sekarang terjadi kebudayaan informasi. Dalam perjalanan sejarah sebetulnya sudah terjadi perubahan-perubahan. Akan tetapi mengapa pikiran-pikiran yang muncul pada kebudayaan nomaden atau kebudayaan agraris harus dipakai dalam kebudayaan industri dan informasi seperti sekarang ini. Saya ambil contoh begini:

orang tidak pernah membayangkan bahwa ketika Nabi mengatakan perihal bagaimana seorang perempuan tidak boleh bepergian sendiri dan harus ditemani oleh muhrimnya adalah dalam konteks masyarakat agraris, di mana alam sekitarnya adalah pegunungan, padang pasir, masyarakatnya belum banyak, dan masyarakatnya juga baru keluar dari kebudayaan nomaden. Jadi menurut saya, pandangan itu tepat pada saat itu saja.

Pandangan atau keputusan Nabi tersebut adalah benar dan tepat adanya, dalam konteks tersebut. Konteks di mana kaum perempuannya baru keluar dari sistem sosial yang misoginis (membenci atau mendiskreditkan perempuan) – yaitu ketika derajat dan kedudukannya baru dipulihkan oleh Islam – memang dia tidak bisa keluar sendirian, terlebih tempatnya jauh. Kemungkinan akan terjadi pelecehan dan lain sebaginya pada masa itu sangat besar. Sementara itu keluarganya juga masih mungkin untuk mengantar atau menunggunya. Karena untuk konteks masa itu masyarakatnya tidak terlalu banyak disibukkan dengan pekerjaan. Namun, apakah kemudian praktik ini masih bisa diterapkan dalam masyarakat industri, di mana orang sudah tidak lagi menunggu panen tapi harus bekerja setiap hari untuk mencari nafkah? Apakah mungkin ketika perempuan sekolah harus ditunggui oleh muhrimnya, apalagi ia sekolah ke luar negeri? Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pada saat ini dunia telah berubah dengan perubahan yang sangat besar. Jadi, bagi saya, setiap masa punya cara-cara atau mekanismenya sendiri. Karena itu, dalam menyikapi kasus tadi, maka yang perlu kita baca dan kita tangkap adalah maksudnya, substansinya. Yaitu, perlindungan terhadap perempuan, dan perlindungannya tidak harus dengan orang, person. Perlindungan itu bisa dilakukan dengan membuat aturan hukum

yang jelas. Kalau terjadi pelecehan maka pelakunya yang harus ditangkap. Bukan sebaliknya, perempuan yang jadi korbannyalah yang justru ditangkap.

Jadi, menurut Anda, yang lebih menggambarkan Islam apakah perda syariat Islam sebagaimana diterapkan di Aceh dan beberapa daerah lainnnya atau konstitusi Indonesia?

Konstitusi Indonesia semangatnya sangat islami, ketimbang perda syariah. Sebetulnya, menurut saya, umat Islam di Indonesia tidak konsisten. Di satu sisi, mereka menginginkan syariat Islam, namun dari "beribu-ribu" undang-undang yang pernah dibuat tidak ada landasan teks agamanya, kecuali beberapa saja. Dan lebih parahnya lagi, yang membahas adalah orang-orang yang justru tidak mengerti banyak tentang agama. Mereka bukan mujtahid. Para anggota DPR kita kebanyakan tidak memahami betul persoalan agama. Namun, ketika mereka diundang untuk membahas undang-undang semacam itu mereka setuju saja. Fakta ini sangatlah paradoks, sehingga yang muncul kemudian adalah hukum-hukum yang parsial, seperti larangan pelacuran, hukum cambuk, hukum ra-

---

Ada sebuah syair yang sangat menarik: *'Ibâratunâ syattâ wa husnuka wâhidu / wa kullun ilâ dzâka al-jamâli yusîru;* "Bahasa kita berbeda-beda tapi yang cantik adalah satu / dan masing-masing berjalan menuju yang cantik itu." Syair ini, menurut saya, sebuah gambaran bagaimana ulama terdahulu melihat realitas masyarakat yang berbeda-beda namun sebetulnya menuju tujuan yang sama. Bagi saya, pluralisme adalah pandangan Islam juga. Pluralisme merupakan cara yang paling baik untuk mengatasi konflik dan kekerasan antarmasyarakat.

---

jam, dan sebagainya. Fakta tersebut juga berlaku di dunia Islam, di mana isunya juga tidak jauh dari isu-isu seputar itu. Celakanya lagi, mereka tidak pernah melihat bahwa cara itu adalah cara yang tepat buat umat Islam hanya pada masa lalu, dan tidak untuk umat Islam yang hidup di zaman modern ini. Saya tidak tahu negara Islam mana yang sekarang ini menerapkan hukuman tersebut dalam hukum positif mereka. Ini, menurut hemat saya, ambigu.

Terkait soal perda-perda syariah yang ternyata sangat merugikan dan meminggirkan perempuan, dapatkah Anda memaparkan isu-isu penting dalam fikih kaitannya dengan hal ini?

Menurut saya, ada empat sumber teks keagamaan yang menjadi legitimasi terhadap proses diskriminasi terhadap perempuan: *pertama*, ayat *al-rijâlu qawwamûna 'alâ al-nisâ',* yang sering ditafsirkan bahwa laki-laki mempunyai otoritas yang mengatasi perempuan dan dianggap sebagai sesuatu yang *given.* Ini akar masalahnya. Bahwa pada masa lalu kepemimpinan berada di tangan laki-laki, itu bisa diterima karena memang tepat pada saat itu. Budaya patriarkilah yang menghasilkan aturan seperti itu. Tapi, lagi-lagi, kepemimpinan itu tidak bisa dipahami sebagai sesuatu yang *given*, karena sangat terkait dengan logika sosial dan ekonomi saat itu. Pada waktu lampau kenapa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin dan lebih lemah ketimbang laki-laki adalah karena pada waktu itu perempuan dimarginalkan dan "dirumahkan," sehingga potensi akal pikirannya tidak berjalan dan lain sebagainya. Tetapi ketika sekarang terjadi perubahan, kita tidak bisa membantah bahwa perempuan mempunyai kekuatan yang bahkan melebihi laki-

laki. Artinya, kepemimpinan itu bukanlah hal yang *given,* yang kita terima begitu saja.

Kedua, konsep perempuan sebagai sumber fitnah. Hampir semua fikih yang mendiskriminasikan perempuan bersumber dari konsep perempuan sebagai sumber fitnah. Tetapi, menurut saya, pernyataan itu dimaknai secara laki-laki dan oleh laki-laki. Sebetulnya ada hadits Nabi yang sahih: *mâ taraktu ba'dî fitnatan adlarr 'alâ al-rijâli min al-nisâ'*, artinya, "Saya tidak meninggalkan, sesudah saya, sebuah fitnah yang lebih membahayakan bagi kaum laki-laki kecuali perempuan." Lalu apa makna fitnah dalam hadits ini? Fitnah biasanya dimaknai bahwa perempuan sebagai penggoda atau pemicu yang menimbulkan keresahan laki-laki. Tetapi pemahaman yang kaprah kemudian adalah menyalahkan semua kekacauan itu kepada perempuan, meskipun dia tidak melakukan apa-apa. Dari konsep ini kemudian konsekuensinya bisa bermacam-macam: perempuan harus memakai jilbab, suaranya harus pelan, tidak boleh keluar sendiri, dan lain-lain. Pemahaman macam ini juga dipakai oleh beberapa pemikir modern Islam, seperti Sayyed Quthb dan Hassan al-Banna. Sehingga bagi mereka perempuan tidak boleh menjadi anggota legislatif atau berperan di ruang publik; bukan karena akal pikirannya dianggap lemah tetapi karena ia akan bergaul dengan laki-laki, dan ini bisa menimbulkan masalah.

Saya kira murtad yang dihukum mati adalah orang yang memberontak atau makar terhadap sistem negara. Dalam konteks HAM hukuman mati karena pindah agama, adalah pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut saya, hadits tersebut harus dimaknai lain, tanpa harus mengabaikannya karena statusnya adalah hadits sahih, juga ka-

rena logikanya bisa benar. Hadits ini bisa berarti bahwa laki-laki harus berhati-hati menghadapi cobaan dari perempuan. Laki-laki seharusnya menghormati perempuan, tidak melecehkannya. Jadi seharusnya hadits ini justru ditujukan bagi laki-laki bukan kepada perempuannya yang dipandang sebagai sumber fitnah.

Jadi, wacana pemikiran *mainstream* masih ditentukan oleh konstruksi pikiran lama yang patriarkis. Sebetulnya di masa yang lalu sudah banyak perempuan yang tampil ke permukaan. Misalnya, para Sahabat Nabi yang perempuan. Mereka bebas berdialog dengan Nabi dan para Sahabat laki-lakinya. Siti Aisyah sering mendebat dan mengkritik Khalifah Umar atau Abu Hurairah. Banyak kaum perempuan yang ikut perang bersama kaum laki-laki. Namun setelah masa itu, perempuan seperti tidak boleh muncul lagi dan kenyataan ini berlaku hingga sekarang. Artinya, sejak itu perempuan dibatasi geraknya.

Padahal banyak sekali teks al-Quran maupun hadits Nabi yang menekankan perlunya kerjasama laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Sebetulnya pada masa itu telah terjadi proses transformasi atas kedudukan perempuan. Tetapi sayangnya kemudian tidak berlanjut, yakni setelah abad keempat Hijriah. Kepen-tingan laki-laki kembali menguat dan mendominasi segala ruang sosial. Akibatnya perempuan tidak banyak yang tampil sebagai pemikir, penulis atau pemimpin politik. Hal ini juga berakibat lebih jauh, yakni tiada-nya tafsir perempuan. Yang ada adalah tafsir laki-laki.

Anggapan bahwa perempuan sebagai sumber fitnah di beberapa negara, di dunia Arab, terutama di Saudi Arabia, sebetulnya masih sangat kuat sampai sekarang. Bahkan saya sempat bertanya-tanya: apakah buruh perempuan atau buruh migran di dunia Arab itu

masih dianggap budak atau tidak? Ada beberapa kasus memprihatinkan yang mengisyarakatkan bahwa sebagian masyarakat Arab mengganggap mereka, memang, sebagai budak. Logikanya karena para majikan sudah membayar, maka sudah membeli, sehingga para buruh migran itu bebas diperlakukan seperti apa saja, ya seperti budak. Yang menyedihkan lagi, hal itu diperumit karena teks agamanya masih ada.

Demikian juga ketika saya menjelaskan tentang poligami. Pertanyaan saya: kenapa orang tidak terusik dengan ayat yang senafas, yaitu: *wa in khiftum an lâ ta'dilû fa wâhidatan aw mâ malakat aymânukum.* Dalam ayat ini ada dua kalimat yang dihubungkan dengan *aw,* yang artinya kita disuruh memilih antara satu istri atau boleh banyak perempuan (poligami) walaupun tidak bisa berlaku adil, asalkan budak-budak. Persoalannya bukanlah karena kenyataannya perbudakan tidak ada, tetapi ayat ini masih ada. Jika demikian, apakah kemudian ayat ini sudah dibatalkan (di-*mansûkh*)? Memang meskipun ayatnya masih ada tapi perbudakan secara perlahan dan bertahap dihapuskan (dibebaskan) melalui baik al-Quran maupun hadits. Lantas, kenapa hal yang sama tidak diterapkan untuk kasus poligami? Dan mengapa sikap kita cenderung memisah-misahkan antara dua hal yang sebetulnya ada kaitannya dan mempunyai logika yang sama?

Jadi bagaimanapun konsep dan anggapan yang kaprah perihal perempuan sebagai fitnah yang selama ini diterapkan, telah membuat perempuan menjadi sangat tidak produktif. Padahal kita melihat dengan nyata bahwa perempuan memiliki potensi yang besar, memiliki tenaga dan produktivitas yang juga tak kalah besar dengan laki-laki. Betapa banyak perempuan yang ditinggal oleh

suaminya tetapi ia masih bisa bertahan meskipun ia juga harus menghidupi anak-anaknya.

Beberapa waktu lalu Anda menggagas fikih trafficking. *Apa sebenarnya yang Anda maksud dengan fikih* trafficking?

Ide utama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa perempuan boleh bekerja di mana saja dan kapan saja karena itu adalah hak setiap orang. Yang juga saya singgung adalah apakah perempuan yang bekerja harus ditemani mahram atau tidak. Berangkat dari konteks dan pelbagai fakta yang sudah ada, sekarang banyak perempuan, termasuk anak kyai atau ulama yang sekolah di tempat yang jauh, bahkan ke luar negeri tanpa ada yang menemani (tanpa mahram). Nyatanya tidak terjadi apa-apa, dan orang tuanya pun diam saja, tidak melarang, tidak mempersoalkannya. Hal tersebut mungkin karena mereka sudah mempunyai pertimbangan adanya jaminan keamanan, baik di perjalanan maupun di tempat di mana anaknya akan tinggal. Jadi, logika harus adanya mahram, yakni sebagai perlindungan terhadap perempuan, untuk konteks sekarang ini mekanismenya bisa dibuat, misalnya melalui aturan hukum. Jadi tidak harus dengan kehadiran pendamping yang dekat.

Trafficking dalam bahasa kita disebut perdagangan orang. Tetapi kasusnya banyak menimpa perempuan dan anak yang bekerja di luar negeri, menjadi buruh migran. Dalam banyak kasus *trafficking* yang terjadi adalah pemalsuan dokumen, bujukan, penipuan, pemaksaan, eksploitasi, sampai kekerasan seksual, dan hak-hak ekonomi yang tidak dipenuhi dan lain sebagainya. Karena itu, dalam buku fikih *trafficking*, yang saya gagas, juga disinggung mengenai

kewajiban majikan terhadap buruh, atau hak-hak buruh, kewajiban negara, kewajiban masyarakat, apa yang seharusnya dilakukan sebelum berangkat kerja ke luar negeri dan sebagainya. Semuanya menurut perspektif Islam.

Trafficking merupakan tindakan yang tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan agama, dan lain sebagainya. Kasus ini sebenarnya sangat membahayakan. Buku fikih *trafficking* tersebut mencoba memberikan semangat keagamaan dalam upaya memerangi kejahatan *trafficking*. Tetapi mekanisme dan teknisnya sepenuhnya harus diselesaikan oleh negara, misalnya dengan membuat aturan yang melindungi buruh perempuan dan lain sebagainya. Lebih baik lagi jika pemerintah segera menyediakan lapangan kerja bagi mereka yang miskin dan tidak punya pekerjaan, sehingga semua orang bisa memperoleh nafkah di dalam negerinya sendiri atau di rumahnya sendiri. Syukur, sekarang negara kita sudah mempunyai UU PTPPO (Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang). Karena itu, kita tunggu komitmen pemerintah dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikannya.

> Saya yakin bahwa agama muncul untuk kepentingan kemanusiaan; kemaslahatan manusia. Selama itu tidak tercermin dalam praktik-praktik kehidupan, maka itu adalah tafsir orang atas agama. Jadi mesti ada tafsir lain atas agama. Sehingga, fenomena Islam "galak", menurut saya, sangat merugikan Islam dan itu, menurut hemat saya, bukanlah Islam. Islam tidak pernah memulai perang atau kekerasan. Karenanya, kita harus membangun kembali citra Islam yang damai dan adil; citra Islam yang menghormati orang lain.

Menimbang betapa majemuknya realitas bangsa ini, maka relevan untuk membincang pluralisme sebagai bentuk penghargaan terhadap perbedaan dalam rangka hidup bersama secara adil dan damai. Bagaimana Anda memahami pluralisme?

Menurut saya, pluralisme adalah hukum Allah. Yaitu bahwa Allah telah menciptakan manusia secara plural, beragam, berbeda-beda dan berwarna-warni. Bahkan saya kira tidak ada yang sama di dunia ini. Pluralisme ingin memperkenalkan kepada manusia akan adanya keanekaragaman, kegandaan dalam hal budaya, pikiran, ideologi, ras, keyakinan, jenis kelamin, biologis, sosial, geografis dan sebagainya.

Jadi pluralisme sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan keyakinan atau agama. Pluralisme sesungguhnya adalah fakta dan realitas kehidupan manusia, bahkan kehidupan alam semesta yang tak bisa ditolak. Tuhanlah yang menciptakan keragaman dan keanekaan tersebut. Ayat-ayat al-Quran banyak sekali menyebutkan hal ini. Demikian juga hadits Nabi dan ucapan para ulama. *"Wa min âyâtihi khalq al-samâwâti wa al-ardli wa ikhtilâfu alsinatikum wa alwânikum. Inna fî dzâlika la âyâtin li al-'âlimîn (atau li al-'âlamîn),"* artinya, "Di antara bukti-bukti kemahabesaran dan kekuasaan Allah adalah bahwa Dia menciptakan langit dan bumi dan berbeda-bedanya bahasa dan warna kulitmu. Itu sesungguhnya merupakan pelajaran bagi orang-orang yang mengerti (atau bagi semesta). Kemudian, "Andaikata Tuhan menghendaki, niscaya umat manusia menjadi satu. Tapi Dia tidak menghendakinya. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah makhluk Allah". Semua yang ada di alam semesta ini yang berbeda-beda, beraneka ragam, justru menunjukkan ke-Esa-an Allah. Para ulama mengatakan: *"wa fî kulli syay'in lahû âyât tadullu 'alâ annahû Wâhid"*

(dalam segala hal terdapat tanda atau merupakan bukti bahwa Dia (Tuhan) adalah Satu.

Kiyai saya, almarhum K.H. Fuad Hasyim, mengatakan kepada saya, “Perbedaan adalah sunnatullah yang sama sekali tidak akan pernah bisa dilenyapkan oleh siapapun, kecuali Allah sendiri”. Pluralisme adalah warna kehidupan sekaligus keindahan.

Tetapi memang yang menonjol kemudian adalah pluralisme dalam keyakinan atau agama. Untuk hal ini sendiri ayat al-Quran yang menyebutkan tentang kebebasan orang untuk berkeyakinan atau beragama. Pernyataan yang paling tegas dan vulgar adalah “siapa yang mau beriman, berimanlah dan siapa yang mau kufur, silakan kufur”. Lalu, Tuhan juga menekankan, “Tidak ada paksaan dalam beragama”. Nabi juga tidak bisa dan tidak boleh memaksa orang untuk mengikuti agamanya, bahkan termasuk kepada keluarganya sendiri. *“Innaka lâ tahdî man a<u>h</u>babta wa lâkinna Allâh yahdî man yasyâ’”*, yang artinya, “kamu (Muhammad) tidak bisa memberikan petunjuk *(hidâyah)* bahkan kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah-lah yang memberikan petunjuk itu (sehingga dia bisa beriman)”. *“Lasta ‘alayhim bi mushaythir”*, artinya “Kamu (Muhammad) bukanlah orang yang bisa memaksa”. Dan masih banyak lagi.

> Pluralisme tidak dimaksudkan sebagai sinkretisme. Tidak seorangpun yang menganjurkan pluralisme berpikir seperti itu. Pluralisme pada dasarnya paham yang menghargai perbedaan.

Ketika Alî ibn Abî Thâlib berjalan-jalan dan melihat orang-orang Yahudi sedang beribadah di kuil mereka, ia teringat kata-kata Nabi saw agar membiarkan mereka. Alî mengatakan: *“Umirnâ an natrukahum wa mâ yadînûn”* (Kami diperintah membiarkan mereka bebas menjalankan keyakinannya).

Karena itu kerjasama dan saling memberi manfaat antarpemeluk agama sama sekali tidak dilarang. Ibnu Rusyd pernah menulis dalam bukunya, *Fashl al-Maqâl:* "*Jika kita menemukan kebenaran dari mereka yang berbeda agama, kita mesti menerima dan menghormatinya. Sebaliknya, jika kita menemukan kesalahan, maka kita patut memperingatkan dan memaafkannya*". Ibnu Rusyd memandang bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk membangun jembatan *'hiwâr khârijî'* (dialog antarumat beragama).

Ada satu pernyataan yang menarik dari seorang *tabi'în* yang bernama Qatadah. Ia mengungkapkan satu pandangan yang kemudian dikutip oleh Ibn Jarir al-Tabari, seorang *mufassir* besar, *al-dînu wâhid wa al-syarî'atu mukhtalifah,* agama itu satu tapi syariah bisa berbeda-beda. Pernyataan ini sebenarnya mengomentari ayat: *li kullin ja'alnâ minkum syir'atan wa minhâjan,* yang artinya: bagi kamu semua punya cara dan jalan sendiri-sendiri. Jadi, bahwa keyakinan akan otoritas tunggal yang mutlak adalah keyakinan semua agama, namun cara menuju Yang Mutlak itu berbeda-beda. Perbedaan itu bukan hanya antaragama, tetapi juga terjadi dalam satu agama. Para nabi pun mempunyai cara yang berbeda-beda pula dalam menyampaikan kebenaran. Cara kita berpuasa berbeda dengan puasanya umat lain, atau cara salat umat Nabi Muhammad berbeda dengan cara salat umatnya Nabi Isa, Musa, atau nabi-nabi yang lainnya. Menurut saya, perbedaan tersebut hanya pada tingkat syariahnya saja, sesuai dengan konteksnya masing-masing.

Oleh karena itu, semuanya harus dihargai, diberi kesempatan yang sama untuk hidup. Ada sebuah syair yang sangat menarik: *'Ibâratunâ syattâ wa husnuka wâhidu / wa kullun ilâ dzâka al-jamâli yusyîru;* "Bahasa kita berbeda-beda tapi yang cantik adalah

satu / dan masing-masing berjalan menuju yang cantik itu." Syair ini, menurut saya, sebuah gambaran bagaimana ulama terdahulu melihat realitas masyarakat yang berbeda-beda namun sebetulnya menuju tujuan yang sama. Bagi saya, pluralisme adalah pandangan Islam juga. Pluralisme merupakan cara yang paling baik untuk mengatasi konflik, dan mengatasi kekerasan antarmasyarakat.

> Saya kira, Islam tidak mempunyai konsep apapun: apakah itu konsep negara, konsep ekonomi atau konsep sosial. Islam hanya merumuskan prinsip-prinsip dasar. Dengan kata lain Islam tidak menentukan bentuk sebuah negara.

Bahwa pluralisme datang dari Allah kita sepakat, namun di Indonesia kita menemukan adanya kalangan yang bertindak semena-mena yang bisa diartikan sebagai upaya menolak pluralisme. Banyak kasus kekerasan terhadap kelompok yang berbeda seperti Ahmadiyah, komunitas Eden, Usman Roy, dan pelbagai kekerasan lain yang mengatasnamakan agama. Bagaimana pandangan Anda dengan fakta-fakta semacam itu?

Bagi saya, keyakinan apapun tidak bisa dihukum oleh manusia, karena itu adalah hak Allah. Yang bisa dihukumi oleh manusia adalah ketika orang melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain. Kezaliman itulah yang justru bisa disebut kafir dan itu bisa dilakukan oleh siapa saja dan atas dasar apa saja. Mengapa keyakinan orang seperti Lia Aminuddin harus diusik. Kalau dia berkeyakinan seperti itu, biarkan saja. Kalau kita percaya bahwa Lia Aminuddin menyeleweng, maka ketidaksetujuan kita bukan dengan cara melakukan kekerasan. Menurut saya, jika Lia begitu, maka mungkin kita yang tidak berhasil mengajaknya ke jalan yang benar, menurut kita. Kita

gagal dalam berdakwah. Al-Quran sudah menegaskan bagaimana seharusnya dakwah disampaikan. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan nasehat yang baik, dengan ilmu pengetahuan dan dengan berdiskusi secara lebih baik. Jadi bukan dengan kekerasan. Lia Aminuddin itu sebenarnya Muslim, mungkin karena dia tidak mendapatkan penjelasan keagamaan yang baik, sehingga dia jadi seperti itu. Namun cara berpikir Lia Aminuddin itu justru bisa memperkaya kita. Hanya saja karena praktik keagamaannya berbeda, ia menjadi sorotan dan dituduh sesat. Kalau kita berhasil menyebarkan agama dengan baik, hal-hal seperti itu seharusnya sudah tidak diurusi lagi. Sungguh aneh, saya tidak mengerti, mengapa kita lebih suka menyebarkan agama dengan kekerasan, memaksa orang, menghukum orang dan seterusnya. Ini bisa memberi kesan bahwa agama Islam itu agama yang keras. Atau bisa juga mengakibatkan orang lari dari Islam dan mencari agama lain yang lebih menghargai atau lebih simpatik juga lebih toleran.

Sebab, kalau kita mau jujur, sebenarnya banyak sekali umat Islam yang tidak salat. Namun begitu, kenyataan tersebut didiamkan. Misalnya, setiap kali salat Jumat kita melihat banyak sopir, tukang becak, dan lain sebagainya tidak salat. Kita juga tahu bahwa korupsi di negara kita yang mayoritas beragama Islam; itu demikian besar. Kriminalitas dan kekerasan seksual juga selalu kita baca setiap hari. Tapi mereka, kalangan Islam fundamentalis yang radikal, diam saja. Kenapa bukan mereka yang diajak secara baik-baik untuk menjalankan salat dan berhenti melakukan kejahatan. Jadi bukan mengusik orang atau kelompok yang meyakini apa yang mereka percaya sebagai kebenaran yang sebetulnya tidak melakukan kejahatan atau tindak kriminal apa-apa.

Kemudian soal Usman Roy yang melakukan salat dalam dua bahasa. Saya sebetulnya dulu diminta untuk menjadi saksi ahli untuk meringankan hukumannya. Saya mengatakan, "Kalau dari argumen keagamaan, saya punya argumennya." Tetapi, saya tidak mampu menerima stigmatisasi, hujatan atau bahkan serbuan orang nantinya, kalau saya menjadi saksi ahli. Argumen yang saya pegang adalah pendapat imam Abu Hanifah yang membolehkan salat dwibahasa. Ketika Abu Hanifah ditanya bagaimana kalau salat menggunakan bahasa Persia, beliau menjawab boleh. Dan saya punya rujukannya di kitab-kitab klasik seperti: *Badâ'i' al-Shanâ'i'*. Kitab *Majmû' Syarh Muhadzdzab,* dan beberapa kitab lain juga menginformasikannya. Jadi, untuk soal ini memang terjadi perbedaan pendapat.

Tetapi, jika Abu Hanifah membolehkannya, muridnya justru tidak demikian. Muhammad ibn Hasan al-Syaybani, murid beliau dan guru Imam Syafi'i berpendapat bahwa kalau ia bisa berbahasa Arab maka tidak boleh salat dengan bahasa lain, tetapi kalau ia tidak bisa berbahasa Arab maka boleh salat dengan bahasa lain. Murid Abu Hanifah yang lain, Abu Yusuf, juga berpendapat seperti ini. Sementara mazhab yang lain mengatakan bahwa terlepas ia bisa atau tidak bisa berbahasa Arab, tetap harus memakai bahasa Arab. Kemudian banyak yang mengatakan bahwa Abu Hanifah sudah menarik pendapatnya. Tetapi dari mana sumbernya mengatakan seperti itu. Apakah Abu Hanifah menyatakan hal itu atau itu hanya komentar orang saja?

Jadi sebetulnya memang ada rujukannya pada teks keagamaan. Tapi, menurut saya, tidak ada manfaatnya mengurusi hal-hal yang sifatnya personal seperti itu. Bagi saya, untuk hal personal ada aturannya sendiri. Saya setuju dengan pendapat mayoritas ula-

ma, tentu saja, demi kesatuan kaum Muslimin seluruh dunia. Tapi saya tidak setuju jika Yusman dihukum penjara.

Mari kita lihat persoalan ini secara lebih seksama. Ada paradigma berpikir bahwa teks-teks keagamaan yang menyampaikan hal-hal yang terkait dengan akidah atau keyakinan pada hal-hal metafisis (yang *ghaybîyât*), disampaikan dengan bahasa berita (*khabar*), misalnya Allah itu Esa, ada surga bagi yang beriman dan beramal saleh, neraka bagi yang durhaka, ada malaikat dan lain-lain. Maka sikap kita adalah percaya atau tidak percaya. Di situ Allah sebagai pemberi berita (*Mukhbir*). Jadi kita percaya saja karena memang berita itu disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw yang diterimanya dari Allah. Itu yang *pertama*.

Kedua, untuk pokok-pokok ibadah, aturannya ditetapkan oleh Allah: bahwa salat zuhur harus empat rakaat, harus dengan cara yang spesifik, dan lain-lain. Namun yang ditetapkan hanyalah gerakannya saja. Jadi ketika kasus Usman Roy kemudian dikomentari oleh MUI dan Kang Said Aqil Syiradj dengan hadits Nabi *Shallû kamâ ra'aytumûnî ushallî,* "Salatlah kamu sebagaimana aku salat," sehingga tidak boleh salat dengan dwibahasa. Namun, bagi saya, itu hanya untuk gerakannya saja bukan untuk bacaan. Kenapa? Karena untuk bacaan terdapat perbedaan para ulama: apakah ketika membaca surat *al-Fâtihah* harus membaca basmalah atau apakah salat harus membaca *al-Fâtihah*. Dalam persoalan itu tidak ada kesepakatan. Bagi Abu Hanifah, yang wajib adalah membaca al-Quran saja. Jadi fenomena yang berbeda-beda itu adalah wujud dari penafsiran terhadap teks tentang bacaan dalam salat. Tapi baiklah, itu tidak perlu diperpanjang, sekadar wacana saja. Saya sendiri tetap mengikuti mazhab Syafi'i dalam hal ini.

Ketiga, masalah muamalat. Untuk masalah muamalat teks al-Quran dan hadits selalu bersifat kritik. Tidak mengatur rincian tapi hanya bersifat kritik dan koreksi. Ukuran-ukuran yang dipakai adalah selama tidak menzalimi (*'adam al-zhulm*) dan tidak menyakiti (*'adam al-dlarar*), tidak boleh menipu (*'adam al-gharar*), tidak ada spekulasi naif (*'adam al-maysir*), saling merelakan (*al-tarâdlî*), kesepakatan (*al-ittifâq*). Jadi itulah ukurannya. Orang boleh membangun negara dengan sistem presidensial, parlementer, kerajaan atau yang lain, yang terpenting adalah jangan membuat kezaliman, kebohongan, kerusakan, penipuan atau tindakan lainnya yang merugikan orang lain.

Namun demikian, kalau mengikuti sistem yang dulu, khilâfah misalnya, kita juga harus menimbang kenyataan yang terjadi pada waktu itu. Sebab, siapa yang memilih Abu Bakar? Bukankah dia disepakati begitu saja oleh para elit. Sedangkan Umar ditunjuk oleh Abu Bakar, Utsman disepakati hanya oleh enam orang, dan Ali juga langsung dibaiat begitu saja. Khalifah selanjutnya mendapat kekuasaan setelah menang perang dan penggantinya berdasarkan garis keturunan. Jadi, kalau sebuah sistem masih mengandung segala sesuatu yang merugikan orang lain, itu berarti bukan sistem islami. Kalau pada dasarnya sistem tersebut tidak merugikan, maka tidak apa-apa untuk mengdopsinya.

Model negara Madinah hanya khusus untuk Madinah, sehingga tidak bisa diterapkan di tempat lain dan di waktu yang lain. Yang bisa diterapkan dalam ruang yang lain dan di waktu yang lain adalah prinsip-prinsip dasarnya, misalnya *musyâwarah,* keadilan dan jaminan keselamatan atau perlidungan terhadap semua warganya.

Terkait dengan muamalah atau relasi dengan orang lain, pada hemat saya, terbagi menjadi dua: relasi terhadap orang yang bersifat dual dan plural. Yang pertama itu terkait dengan *akhwâl al-syakhsyîyah* atau hukum keluarga. Sementara yang kedua, muamalah plural, adalah interaksi dalam masyarakat. Jadi ada banyak orang yang terlibat di dalamnya. Prinsipnya sama saja, seperti tidak boleh saling menzalimi, tetapi dengan musyawarah untuk mengatasi setiap problem yang muncul. Antara suami dan istri juga tidak boleh menzalimi. Soal siapa yang memimpin rumah tangga, ya terserah kesepakatan mereka berdua. Sampai hari ini, praktik yang lazim, suamilah kepalanya. Ya tidak apa-apa, asal bisa bertindak baik dan menghargai istrinya serta tidak melakukan kekerasan terhadap keluarganya. Nabi Muhammad sendiri tidak pernah melakukan kekerasan terhadap istrinya bahkan melarang bagi seorang suami memukul istrinya. Kata beliau: "suami yang memukul istrinya bukanlah suami yang baik."

Salah satu alasan umat Islam atau MUI menolak pluralisme adalah karena pluralisme dinilai sama dengan sinkretisme yang mencampuradukkan akidah, sehingga justru nanti akan mendangkalkan iman umat Islam. Bagaimana respon Anda terhadap anggapan semacam itu?

Saya kira itu hanyalah kekhawatiran yang berlebihan. Akidah adalah keyakinan. Keyakinan terdapat di dalam hati. Tidak seorangpun yang mengetahuinya. Hanya Allah yang dapat mengukur keyakinan orang. Pluralisme tidak dimaksudkan sebagai sinkretisme. Tidak seorangpun yang menganjurkan pluralisme berpikir seperti itu. Pluralisme pada dasarnya paham yang menghargai perbedaan.

Kalau penolakan terhadap pluralisme sebatas hanya pandangan masyarakat tidak apa-apa, tetapi saya khawatir kalau pandangan itu diadopsi oleh negara. Pasalnya, kasus keterlibatan negara di dalam fatwa keagamaan yang sebetulnya menghukumi wilayah personal atau individual, tidak bisa dibenarkan. Sebab, hal ini bisa dimaknai sepihak oleh negara dan ini bisa mengkriminalisasi orang lain yang sebetulnya tidak berbuat jahat.

Lalu yang dimaksud dengan sinkretisme itu apa? Apa kriterianya? *Talfîq* itu sinkretis atau bukan? Kemudian *Talfîq* itu boleh atau tidak?.

Pesan apa yang hendak Anda sampaikan terkait dengan masa depan Indonesia sebagaimana diimpikan oleh seluruh pihak yang, tentu saja, berbeda satu sama lain?

Saya percaya dengan perubahan. Perubahan itu berkembang dari tiada menjadi ada, dari ada satu menjadi dua dan seterusnya, dari buruk menjadi baik. Bagaimanapun juga saya percaya bahwa setiap orang selalu ingin menyempurnakan apa yang mereka anggap penting bagi kehidupannya. Itu yang *pertama*.

> Sampai saat ini kita memang belum melihat satu teori sosial-politik atau sistem negara yang baik seperti demokrasi. Sistem khilafah, menurut saya, sudah tidak bisa lagi digunakan untuk saat ini. Sebab jika diterapkan ia bisa mendiskriminasi dan menghalangi hak-hak orang lain.

Kedua, manusia adalah makhluk yang berpikir dan itu inheren dalam diri setiap orang. Jadi, pemikiran rasional adalah niscaya bagi setiap orang. Sebetulnya setiap orang, meskipun ia dikatakan bodoh, sebenar-

nya ia selalu berpikir. Maka, jangan lupa bahwa kebebasan adalah keinginan semua orang. Karena itu, menurut saya, masa depan akan semakin baik.

Tetapi, perubahan ke arah yang lebih baik itu tetap harus diusahakan, tidak bisa berjalan begitu saja. Hal itu, tentu saja, dibutuhkan dukungan dari semua pihak. Walaupun begitu, agama selalu menekankan keharusan menghargai orang lain, menekankan moral dan etika. Ini berarti bahwa kita perlu menggunakan akal pikiran. Yakni, berpikir rasional di satu sisi, tetapi juga harus berakhlak karimah di sisi yang lain.

Bahwa pada suatu saat terjadi proses yang tidak kita kehendaki, yakni ketika Islam terpuruk, saya kira, sifatnya situasional dan tentatif. Di samping juga terdapat faktor lain, terutama persoalan politik. Keadaan masyarakat Muslim sekarang ini adalah potret dari sebuah masyarakat yang tertindas begitu lama. Kemudian, mereka melihat ada ruang kebebasan, namun mereka juga melihat tidak ada perlakuan yang menguntungkan, sehingga mereka mencoba mencari model lain. Yang patut disayangkan, apa yang mereka temukan kemudian adalah masa lalu. Sedangkan kalau masa lalu yang mereka temukan, yang terjadi kemudian adalah romantisme. Saya sendiri tidak tahu apakah mereka mengetahui apa yang sejatinya terjadi pada masa lalu. Sebab, apa yang kita baca dalam perjalanan peradaban kaum Muslimin tidak sepenuhnya mulus dan indah. Betapa banyak peristiwa buruk yang mengiringi sejarah Islam. Masa gelap itu, terutama, terjadi pada pasca *al-Fitnah al-Kubrâ*. Peperangan di antara umat Islam sendiri terjadi. Perebutan kekuasaan terus terjadi. Ini mungkin karena pelajaran sejarah politik Islam hanya berhenti pada khalifah empat saja. Faktanya, dalam sejarah umat Islam, terjadi perebutan kekuasaan yang sangat dahsyat, bah-

kan terjadi antarSahabat Nabi sendiri. Ada perang Jamal (unta), perang Shiffin, ada juga penyerbuan kota Madinah dan Mekah pada masa Yazid, dan sebagainya. Wallahu A'lam.

Wawancara dilakukan di Jakarta tanggal 22 Mei 2007

Percakapan dengan

Ichlasul Amal
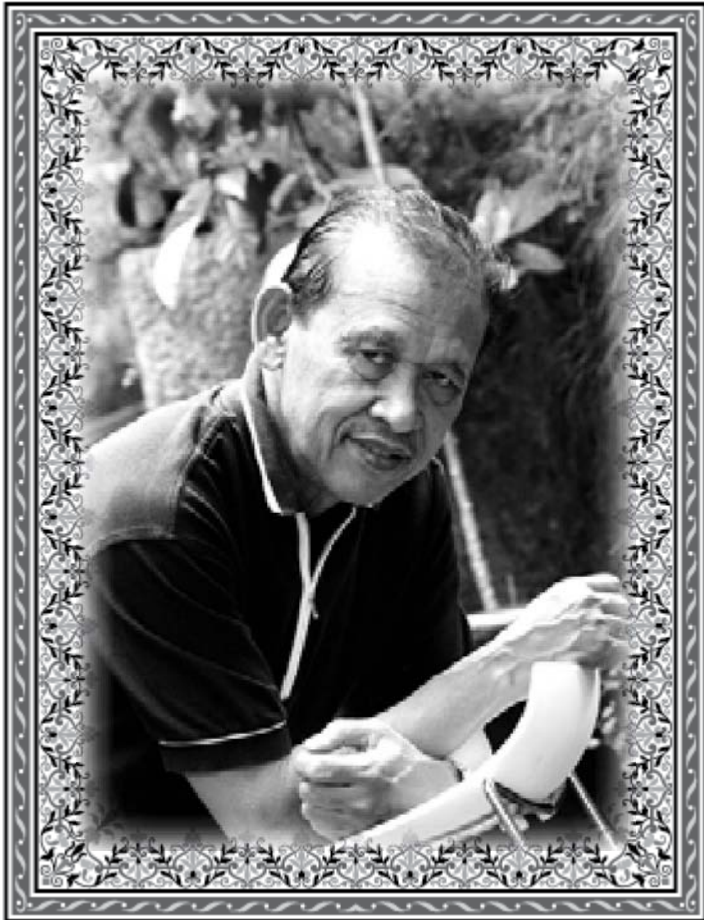
Ichlasul Amal, Guru Besar Ilmu Politik di FISIP Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Mantan Rektor UGM ini sekarang menjabat Ketua Dewan Pers (2006-2009).

Pers Indonesia sangatlah liberal. Setiap orang diberi kesempatan untuk mengekspresikan apa pun pandangannya. Kendati begitu, sulit untuk menganggap dunia pers Indonesia sekular. Sebab, meskipun kebebasan pers adalah hak semua orang, seharusnya tidak ada lagi pers yang berlandaskan pada sentimen keagamaan tertentu. Namun di atas segalanya, dalam konteks perbedaan suku bangsa, agama, bahasa, budaya, dan lain sebagainya, yang niscaya terdapat di Indonesia, maka yang harus selalu dihidupkan adalah semangat pluralisme. Sepatutnya juga pendidikan kesadaran media dan pendidikan wartawan multikultural secara konkret diberikan kepada para wartawan. Sebab, kemungkinan besar, ekspresi ketidakmajemukan dalam pemberitaan terjadi karena ketidaktahuan wartawan akan pentingnya kesadaran tersebut, bukan lantaran kesengajaan niat mereka.

Apakah terdapat hubungan yang paralel antara sekularisme dan kebebasan pers?

Kebebasan pers yang sekarang kita miliki merupakan konsekuensi dari reformasi. Reformasi telah menyebabkan perubahan dari yang sebelumnya otoriter, di mana segala urusan dipegang dan dikendalikan oleh pemerintah, kemudian dideregulasi menjadi tidak ada aturan dalam pers. Oleh karena itu, di dalam dunia pers Indonesia sekarang tidak ada lagi Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP), Surat Izin Terbit (SIT) atau pendaftaran apapun. Anda boleh membuat pers tiga kali dalam sehari, atau bahkan lebih. Semuanya bebas, termasuk organisasi-organisasi kewartawanan. Dulu, satu-satunya organisasi pers adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang berada di bawah Departemen Penerangan. Sekarang organisasi serupa sudah sangat banyak, bahkan terlalu banyak, sampai kita sendiri tidak tahu berapa jumlah sebenarnya. Dengan perkembangan seperti itu, kini lembaga pers bisa menerbitkan apa saja.

Kalau prestasi demikian dikaitkan dengan liberalisme, maka dapat dikatakan bahwa kebebasan pers kita sangatlah liberal. Kita telah memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk mengekspresikan pandangannya.

Lantas apakah prestasi seperti itu juga terkait dengan sekularisme? Tentu saja, iya. Sebab, kini setiap orang dapat mengemukakan pendapatnya secara bebas. Kendati demikian kita juga masih melihat bermunculannya majalah-majalah yang berbasis pada agama tertentu, sebut saja *Sabili*, *Hidayah* dan lain sebagainya. Majalah-majalah seperti itu, tentu saja, hanya menjadi besar pasca-reformasi. Namun, apabila berkaca dari kasus seperti itu, kita mengalami kesulitan untuk mendefinisikan pers kita, apakah sekular atau tidak.

Kalau mau dikatakan telah sekular seharusnya tidak ada lagi pers yang berlandaskan pada keagamaan tertentu, meski kebebasan pers adalah hak semua orang. Dikatakan tidak sekular, dunia pers kita juga sudah memiliki kebebasan yang mumpuni. Masalah majalah *Playboy*, yang kasusnya cukup menghebohkan itu, memang sangat dimungkinkan dalam alam yang kita rasakan sekarang. Yang menjadi pegangan bagi Dewan Pers, lembaga di mana saya sekarang aktif, untuk kasus seperti itu, adalah kode etik jurnalistik. Kode etik ini mengatakan bahwa wartawan tidak boleh membuat berita bohong, tidak boleh membuat berita yang berkaitan dengan SARA, tidak boleh memprovokasi perbedaan pandangan agama, termasuk juga pengaturan independensi wartawan itu sendiri.

Di Amerika, sudah sejak lama kebebasan pers sampai pada situasi di mana bentuk ekspresi atau pendapat paling ekstrem sekalipun dibebaskan. Kasus majalah Hustler *yang sampai di bawa ke meja pengadilan karena memuat pornografi dan secara tajam mengkritik hipokrisi dan dominasi kalangan agamawan, namun melalui undang-undang yang ada di sana, atas nama kebebasan berekspresai, majalah itu tetap memenangkan kasusnya hingga kemudian bisa terus terbit.*

Di sini kasus serupa itu tidak bisa terjadi. Sebab, di dalam kode etik jurnalistik juga disebutkan tentang batas-batas majalah pornografi dan lain sebagainya. *Playboy* Indonesia sendiri memang sangat lain dengan terbitan aslinya di Amerika. Bahkan, *Playboy* pusat malah mengingatkan *Playboy* Indonesia untuk tidak memuat foto-foto telanjang. Untuk kasus seperti ini, kita hanya berpegangan bahwa yang namanya pornografi itu sama sekali tidak berkaitan dengan tugas wartawan, yaitu mencerdaskan masyarakat dan bangsa.

Bagaimana jika majalah yang dituduh menyebarkan pornografi itu menggunakan alasan estetis, bahwa yang ingin ditampilkan adalah sisi keindahannya?

Tetapi jika *Playboy* versi Indonesia dibandingkan dengan majalah serupa di beberapa negara, yang ada di Indonesia sebenarnya masih lebih sopan. Majalah *Matra* malah lebih eksploitatif terhadap tubuh perempuan ketimbang *Playboy*. Oleh karena itu kita putuskan bahwa majalah *Playboy*, dari segi pers, masih bisa dikategorikan sebagai pers. Memang ada foto yang lumayan sensual, tetapi, menurut kita, itu tidak provokatif. Problem utama yang harus dijaga oleh *Playboy* di sini, menurut saya, adalah distribusiya. Seharusnya majalah ini tidak bisa dibeli oleh semua usia. Sayangnya fakta di lapangan kita melihat hal yang berbeda. Majalah ini ternyata juga terdapat dan dijual di jalanan umum. Kalau sudah seperti itu maka bukan lagi menjadi kewenangan Dewan Pers, melainkan kepolisian.

Majalah Playboy banyak menuai penolakan dari kalangan agamawan. Kalau kita benturkan antara kebebasan pers di satu sisi dengan aturan etik agama, akhlak, pada sisi lain, harus seperti apa? Apakah seorang agamawan, atas nama agama, bisa melarang pers tertentu untuk diterbitkan?

Siapapun tidak boleh memperjuangkan sesuatu dengan kekerasan, termasuk Front Pembela Islam (FPI). Dalam proses pengadilan pemimpin redaksi majalah *Playboy*, kekeliruan dari jaksa adalah menggunakan tuntutan berdasarkan KUHP, mestinya berdasarkan undang-undang (UU Pers) dan terlebih dahulu harus ditanyakan ke Dewan Pers. Kasus itu sulit dilihat hanya dengan cara

pandang yang hitam-putih. Saya pernah diundang dalam pembahasan mengenai RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi, di situ saya katakan bahwa Dewan Pers hanya menanggungjawabi hal-hal yang menyangkut berita, termasuk pornografi, tetapi kalau sudah masuk wilayah pornoaksi maka sudah menjadi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Inti kewenangan Dewan Pers adalah berita, kalaupun memuat gambar, maka kita lihat terlebih dahulu keterkaitan dengan beritanya. Dulu, pada zaman Orde Baru (Orba), ada pelarangan musik dan lukisan tertentu. Ada kasus lukisan orang telanjang yang dimuat oleh salah satu majalah. Majalah itu sendiri sebenarnya bermaksud memberitakan hilangnya lukisan tersebut. Karena ada pelarangan pad era itu, maka berita yang memuat lukisan dalam majalah tersebut kemudian di sensor. Untuk konteks sekarang ini, hal tersebut tidak benar. Sebab, dalam kasus itu berita sebenarnya adalah hilangnya lukisan tersebut, bukan hendak menunjukkan sesuatu yang menimbulkan gairah. Lantas bagaimanakah batasan pornografi itu? Apakah gambar seorang perempuan dalam memakai baju harus diukur terlebih dahulu oleh polisi?

> Sebetulnya konsentrasi liberalisme, yang kerap memicu persoalan, berada di bidang ekonomi. Di bidang itu, bahkan sejak masa Bung Karno, liberalisme merupakan predikat yang tidak kita kehendaki, meski kita tidak bisa menghindarinya. Pendidikan mahal, kemiskinan dan sebagainya adalah akibat dari liberalisme bidang ekonomi.

Sementara, dalam kasus RUU Anti-Pornografi dan Pornoaksi, justru yang banyak menentang RUU tersebut adalah aktivis perempuan. Kita bisa memaklumi, karena yang menjadi korban dari RUU itu memang perempuan, bukan laki-laki.

Menurut Anda apakah regulasi yang dilakukan Dewan Pers, dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat, harus dikontekstualisasi dengan keindonesiaan atau diperbolehkan saja seperti yang kita lihat di Eropa dan Amerika?

Di Indonesia, Dewan Pers sama sekali tidak membuat aturan khusus. Setelah reformasi, dalam konteks ini, tidak ada lagi regulasi. Yang ada hanya kode etik jurnalistik dan perumusannya dilakukan oleh organisasi wartawan sendiri. Dalam pembicaraan kode etik itu, di antara pembahasan yang hangat adalah mengenai apakah harus dimasukkan kalimat takwa kepada Tuhan YME. Setelah berdebat panjang akhirnya diputuskan untuk tidak dimasukkan. Kita memutuskan untuk menjadikan Pancasila dan UUD '45 sebagai dasar. Keduanya dimasukkan dengan pertimbangan yang menyangkut nilai-nilai sosial, karena kita anti dengan berita-berita yang menciptakan *violence*. Hal itulah yang sampai kini dijadikan ukuran apakah suatu berita melanggar atau tidak. Namun demikian, kesalahan seperti itu tidak serta-merta dapat menjerat pelakukanya ke persoalan pidana. Wartawan tidak bisa dipenjarakan. Pelaku pembuat berita yang dapat menerbitkan *violance* maksimal akan didenda sebesar Rp. 500 juta.

Sekarang banyak kita temui media-media yang memakai slogan Islam, seperti jihâd, intifâdah*, dan lain-lain, yang dapat membangkitkan dan memprovokasi sentimen Islam. Bagaimana Dewan Pers memandang media-media seperti ini?*

Dewan pers akan menyelidiki kasus berdasar pengaduan masyarakat. Kalau tidak ada pengaduan maka kita anggap tidak ada masyarakat yang terusik. Suatu ketika ada surat kabar yang sebe-

tulnya mengeluarkan berita "biasa", namun oleh organisasi Hindu di Bali diadukan ke Dewan Pers karena dianggap telah melakukan penghinaan agama. Karena ada yang mengadukan, kemudian kita panggillah surat kabar yang bersangkutan. Setelah kita proses, surat kabar itu mau meralat redaksinya dan masyarakat Hindu Bali juga menerima koreksinya.

Ketika Dewan Pers hendak mengurusi kasus seperti dugaan melanggar, menghina atau memprovokasi keyakinan agama lain yang dilakukan oleh pers tertentu, apakah harus terlebih dahulu melalui pengaduan masyarakat? Bagaimana dengan banyaknya media di negeri ini yang telah mencampurkan agama ke dalam urusan publik, bahkan begitu mudah kita bisa menemukan media-media yang mendasarkan diri pada nilai-nilai agama tertentu untuk memaksakan pandangannya dan kerap menghujat serta memprovokasi pandangan lain yang berbeda sebagai sesat dan meresahkan? Di luar posisi Anda sebagai anggota Dewan Pers, bagaimana Anda mengomentari hal seperti itu?

Kalau memang tidak ada orang yang merasa terusik, maka tidak ada masalah. Majalah *Tarbawi*, *Sabili* dan banyak lagi sejenisnya, sebagaimana telah saya bicarakan dengan Syafii Maarif,

Kita mengalami kesulitan untuk mendefinisikan pers kita, apakah sekular atau tidak. Kalau mau dikatakan telah sekular seharusnya tidak ada lagi pers yang berlandaskan pada keagamaan tertentu, meski kebebasan pers adalah hak semua orang. Dikatakan tidak sekular, dunia pers kita juga sudah memiliki kebebasan yang mumpuni. Masalah majalah Playboy, yang kasusnya cukup menghebohkan itu, memang sangat dimungkinkan dalam alam yang kita rasakan sekarang.

sebenarnya banyak memuat isi yang bisa dikategorikan provokatif. Sungguhpun demikian, tetap susah untuk segera diselesaikan persoalannya. Kita sepakat mengatakan salah kalau ada media yang sampai membangkitkan sentimen agama dalam rangka anti-Amerika, karena dalam tubuh Amerika sendiri ada kubu yang pro dan kontra terhadap kasus-kasus besar terkait kebijakan Amerika yang kontroversial. Kalau antinya terhadap Bush, bukan Amerika secara keseluruhan, mungkin bisa dibenarkan. Intinya, sekali lagi saya katakan, sejauh ada reaksi, kita bisa memprosesnya.

Terjadi juga di Medan kasus yang hampir serupa dengan konteks yang kita bicarakan. Suatu ketika ada karikatur yang menggambarkan seorang kyai yang berbuat sesuatu yang berkaitan dengan perjudian. Dari sini kemudian muncul reaksi sangat keras dari kelompok Islam. Setelah kita proses, surat kabarnya mau memperbaiki, dan perkaranya selesai.

Persoalannya, media-media yang kental memuat nilai-nilai agama tertentu dan secara provokatif menyerang setiap yang berbeda, lazimnya, diterbitkan oleh kelompok agama mayoritas yang beraliran keras. Akibatnya masyarakat merasa enggan dan tidak mau melaporkan perilaku media-media tersebut, lebih dikarenakan takut. Sebab, bukan saja kekerasan agama sebatas ditampilkan di media-media, dalam praktiknya kelompok ini juga melakukan intimidasi dan tindak kekerasan untuk menegakkan perjuangan dan cita-citanya. Kalau kasusnya seperti ini bagaimana?

Sejauh ini, memang, kita juga tidak bisa berbuat antisipatif. Namun begitu, menurut saya sendiri, sampai sekarang, sebenarnya tidak ada dari kalangan yang paling fundamentalis sekalipun yang melaku-

kan penghinaan terhadap agama lain. Memang ada seperti kasus yang menimpa Lia Aminuddin (Komunitas Eden) dan Ahmadiyah. Tetapi itu masih dalam kategori berita biasa.

Apakah tindakan seperti itu tidak bisa dikategorikan sebagai pembatasan seseorang atau kelompok untuk meyakini dan menjalankan keyakinannya; dan bukankah efek dari berita-berita semacam itu kerap memicu kalangan tertentu untuk melakukan tindak kekerasan terhadap individu atau kelompok yang dianggap mereka sesat?

Hal seperti itu tidak bisa dilakukan oleh Dewan Pers. Sebab, itu juga bagian dari kebebasan, di mana tidak ada seseorang pun yang dapat membatasi ekspresinya. Kecuali ada orang lain yang merasa bahwa ekspresi orang lain itu telah membatasi ekspresi atau keyakinannya.

Ada perselingkuhan yang amat jelas antara gagasan liberalisme – terutama ekonomi – dengan media. Di satu sisi liberalisme memberikan ruang yang sangat luas terhadap media, sementara pada sisi lain, liberalisme, lewat pelbagai medianya, dapat membuahkan sesuatu yang tidak menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu, seperti kalangan yang termarjinalkan atau minoritas. Sebab, pada ghalibnya media mendemonstrasikan berita atau tayangan yang memihak pada kelas dan kelompok masyrakat atau agama yang kuat dan dominan, tanpa menenggang kalangan marginal yang sering terlukai. Bagaimana Anda melihat tarik-menarik antara liberalisme dan media?

Sebetulnya konsentrasi liberalisme, yang kerap memicu persoalan, berada di bidang ekonomi. Di bidang itu, bahkan sejak masa

Bung Karno, liberal merupakan predikat yang tidak kita kehendaki, meski kita tidak bisa menghindarinya. Pendidikan mahal, kemiskinan dan sebagainya adalah akibat dari liberalisme bidang ekonomi. Imbasnya di bidang media, liberalisme banyak melakukan hal yang bersifat eksploitatif yang sebenarnya bukan esensi dari berita. Kini acara-acara televisi tidak bisa terlepas dari pertimbangan *rating*. Karena pertimbangan *rating* inilah berita-berita pun kemudian banyak mengekspos tentang, misalnya, tahu yang mengandung formalin, bakso berboraks, dan sebagainya, yang dapat merugikan para pedagang kecil, tanpa menakar akibat lebih jauh dari pemberitaan seperti itu. Apa yang keliru dengan hal ini? Karena di satu sisi makanan yang mengandung hal-hal seperti yang diberitakan memang tidak sehat, sementara pada sisi lain, lewat pemberitaan itu para pedagang kecil banyak yang dirugikan. Televisi berkepentingan untuk memberikan informasi kepada publik, maknya berita-berita seperti itu tetap harus dilakuakan, meski akan mengorbankan pihak-pihak tertentu. Dulu, di zaman Orde Baru, berita seperti itu tidak ada. Maka jelaslah hal itu memang merupakan ekses dari liberalisme dengan asas persaingannya yang keras.

Di awal pembicaraan Anda mengatakan bahwa pers memiliki kode etik yang seyogianya berorientasi pada misi-misi sosial. Eksploitasi media yang selama ini terjadi justru tidak peka dan menenggang keterdesakan kalangan-kalangan yang lemah atau terlalu demonstratif menampilkan nilai yang ditawarkan secara konsumeristik, kurang mengandung misi sosial.

Harus diketahui di sini, hal yang demikian bukan sepenuhnya kewenangan Dewan Pers. Kita tidak bisa masuk terlalu dalam.

Bagi saya itu sudah masuk ke dalam kategori *non-news*, semacam infotainment. Itu sudah menjadi bidangnya KPI. Menurut saya, eksploitasi media yang sekarang terjadi sangat dipengaruhi oleh komersialisme. Dalam kaitannya dengan persoalan yang Anda tanyakan, kemarin kita berbicara dengan pihak Trans untuk membahas masalah tersebut. Pihak Trans mengatakan dengan jujur, "mau bagaimana lagi, *wong* kita juga tergantung pada *rating*". Di luar alasan itu, yang sederhana saja, banyak sekali cerita sinetron yang ditayangkan di beberapa stasiun televisi, yang bagi saya, tak lebih dari cerita yang diperuntukkan bagi logika "anak SD". Di situ sama sekali tidak ada aspek sosial dan kebangsaan. Meskipun ada acara seperti petualangan ke berbagai daerah, dalam rangka menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, namun lagi-lagi *rating*-nya program ini rendah dan di taruh pada jam tayang biasa, bukan *primetime*. Kesimpulannya, kita bisa mengatakan apa saja tentang wajah gelap liberalisme, namun tetap tidak bisa menghindarinya.

> Pluralisme di Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Tidak bisa kita memaksakan diri untuk mengambil nilai tunggal. Saya selalu mengajarkan hal itu kepada mahasiswa saya, misalnya, karena suatu keprihatinan: sebagian besar kita hanya mengetahui pulau Jawa, tidak berusaha mempelajari dan mencoba mengerti budaya yang lain. Pemimpin kita sendiri dan elit pada umumnya, meski mungkin berasal dari luar Jawa, yang ia ketahui hanya daerahnya sendiri, tidak tahu tempat lain. Sehingga di antara kita sulit untuk menghargai dan menenggang persoalan yang tengah ditanggung orang lain.

Peran negara sendiri bagaimana?

Pada kenyataannya negara juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau negara mau melakukan intervensi, ikut

memberikan aturan, pasti akan ditentang oleh prinsip kebebasan pers sendiri. Sementara kalau persoalan di atas tidak diatur, imbasnya akan sangat tidak terkendali. Posisi media, dengan kebebasan persnya, dalam hal ini memang dilematis, serba salah.

Dalam bidang ekonomi, liberalisme pasar bebas memperbolehkan negara untuk membuat aturan tertentu tanpa intervensi secara langsung yang berlebih. Ini dapat dilakukan melalui pajak, aturan eksport-import yang tidak merugikan, aturan penanaman modal dan sebagainya. Melalui regulasi-regulasi inilah hendaknya negara melakukan perlindungan terhadap pengusaha kecil dan menyejahterakan warga miskin. Idealnya, hal seperti itu juga seharusnya dapat dilakukan oleh negara terhadap media yang mempunyai implikasi langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Di dalam UU Pers tertera bahwa pihak asing tidak diperbolehkan menguasai 50% apalagi lebih dari saham perusahaan media dalam negeri. Intervensi negara seperti itu, terhadap kekuatan modal asing, hanya masuk di televisi, tidak ada di surat kabar. Karena surat kabar bagi para investor kurang menguntungkan. Yang mungkin bisa menguntungkan hanya harian Kompas, lainnya hidup segan mati tak mau. Belum lagi jika investor menimbang bagaimana dengan nasib para wartawannya. Sebagaimana sudah menjadi rahasia umum, bagaimana kesejahteraan wartawan media cetak nasibnya cukup memprihatinkan. Sehingga, dapat dipahami jika kemudian banyak tuntutan, seperti apakah tidak seharusnya dibuat upah minimum untuk wartawan. Namun, hasil pembahasannya menyimpulkan tidak bisa, karena wartawan adalah profesi, bukan buruh.

Terkait dengan iklan, 70% iklan di Indonesia masuk ke televisi, 30% sisanya ke media lain. Negara tidak bisa berbuat apa-apa untuk hal ini. Dalam aturan perihal pembelian media televisi, *share* asing tidak boleh menguasai 50%. Tetapi, kenyatannya tetap saja aturan yang ada dimanipulasi. Misalnya, ANTV sebagai media yang melakukan *share* dengan perusahaan asing, Star tv, dalam catatan resminya penguasaan Star tv tidak lebih dari 50%. Namun begitu, ternyata, anak perusahaan Star juga masuk ke ANTV, yang kalau dikalkulasikan malah dominan. Untungnya, meskipun demikian film-film di Kabel tv dan Indovision, perusahaan media asing yang masuk ke Indonesia, masih tetap memberlakukan sensor. Dalam hal itu, masih ada semangat dan penghargaan keindonesiaan. Sebab, seharusnya kalau mereka mau betul-betul liberal-kapitalis tidak ada lagi sensor dalam segala acara.

Berangkat dari kesadaran betapa sangat pluralnya negeri ini, untuk itu Indonesia tidak mungkin menjadi negara otoriter. Untuk membuat suatu penilaian yang monolitik, pada sebuah negara yang sangat majemuk seperti Indonesia, adalah upaya yang sangat tidak mungkin.

Dengan liberalisme yang sekarang ini dipraktikkan media terlampau demonstratif, lantas apakah Anda setuju atau tidak dengan kenyataan seperti itu dan apa yang mendesak untuk segera dilakukan?

Kenyataannya di media cetak, liberalisme pasar bebas, dalam arti masuknya saham asing, tidak ada, karena memang tidak menguntungkan. Kendati kemudian mereka masuk di televisi, tetapi mereka tetap menghargai kita, dan tidak sepenuhnya mem-

praktikkan apa yang ada di negaranya (tayangan-tayangan dengan standar etis dan estetis Barat, yang tentunya banyak bertentangan dengan budaya kita). Sisi positif lainnya, *konon*, saya mendengar Star tv menginstruksikan secara langsung kepada ANTV agar tidak membuat program-program yang berbau mistik, terlebih program yang "porno-porno". Hal seperti itu bisa jadi sisi-sisi yang lebih baik untuk bangsa kita. Sementara Indosiar – yang pemodalnya adalah orang Indonesia sendiri – malah kelewatan dan terus menayangkan program yang berbau mistik dan tidak mendidik, meskipun sudah berkali-kali diperingatkan oleh KPI. Alih-alih mencerdaskan, program dan film-film seperti itu justru membodohi masyarakat. Yang saya permasalahkan ternyata MUI tidak bereaksi untuk hal itu. Padahal, semestinya MUI memberikan reaksi yang keras, seperti terhadap yang lainnya, yang dianggap meresahkan umat, bukan malah membiarkan.

Artinya Anda berkesimpulan bahwa liberalisme juga masih memberi harapan baik bagi kehidupan media massa kita?

Yang perlu diingat di sini, liberalisme tidak membiarkan semua hal. Kita lihat televisi-televisi di luar negeri, khususnya televisi umum, tidak ada yang membuat acara-acara seperti yang bisa kita lihat pada televisi tertentu di Indonesia. Di Jerman, televisi publik yang memang dibiayai pemerintah, mempunyai dewan pengawas dari semua agama, termasuk di dalamnya Islam, dan semua elemen masyarakat lain. Sebagai pengawas, mereka juga dibayar oleh pemerintah. Di sana, saluran seperti *adult tv,* secara jelas mereka tuliskan *adult tv* pada programnya. Sementara media kita tidak bisa bersikap jelas dan tegas semacam itu.

Di samping kita berharap terjadinya hubungan ideal antara kebebasan pers dan negara, kami juga ingin meminta konfirmasi tentang pendidikan media untuk menumbuhkan kesadaran media bagi anak bangsa. Menurut Anda apakah idealnya pendidikan media didiseminasikan oleh civil society, *bukan negara; dan bagaimana semestinya pendidikan media itu; lantas hendak dibawa ke mana arah kesadaran media bagi Indonesia?*

Bagi saya, pendidikan kesadaran media secara konkret hendaknya terlebih dahulu diberikan pada pendidikan wartawan. Memang upaya semacam ini seharusnya tidak dipegang oleh negara. Sayangnya pendidikan semacam itu, di negara kita, kurang diminati. Kalau kita membuka program bidang komunikasi, atau yang menyangkut kewartawanan, di UGM sendiri misalnya, sudah tidak laku sehingga sekarang ditutup. Padahal program itu membutuhkan biaya yang cukup besar, sementara yang mengambil programnya tidak banyak. Ada lembaga pendidikan yang cukup bagus untuk profesionalisme wartawan, namanya Dr. Soetomo. Sayangnya, akhir-akhir ini, media-media juga tidak mau mengirimkan orangnya untuk mengikuti program tersebut, maka lembaga itu

> Liberalisme tidak membiarkan semua hal. Kita lihat televisi-televisi di luar negeri, khususnya televisi umum, tidak ada yang membuat acara-acara seperti yang bisa kita lihat pada televisi tertentu di Indonesia. Di Jerman, televisi publik yang memang dibiayai pemerintah, mempunyai dewan pengawas dari semua agama, termasuk di dalamnya Islam, dan semua elemen masyarakat lain. Sebagai pengawas, mereka juga dibayar oleh pemerintah. Di sana, saluran seperti *adult tv,* secara jelas mereka tuliskan *adult tv* pada programnya. Sementara media kita tidak bisa bersikap jelas dan tegas semacam itu.

akhirnya tetap kekurangan dana, meskipun coba dibantu oleh Dewan Pers. Tampaknya kita harus menunggu adanya sponsor, seperti tawaran yang pernah datang dari pemerintah Norwegia atau dulu bantuan dari The Asia Foundation dan Ford Foundation.

Pendidikan media seperti itu, sekali lagi, memang lebih baik tidak ditangani oleh negara. Pada zaman Soeharto dulu pernah ada kontrol pemerintah untuk memberikan program semacam ini. Celakanya, tujuan utama dari pemerintah waktu itu adalah bagaimana bisa dengan efektif mengontrol surat kabarnya, bukan pendidikannya.

Jika berbicara perihal kemajemukan bangsa ini, bagaimana pandangan Anda tentang pluralisme dan bagaimana masa depannya di tengah iklim kebebasan pers?

Pluralisme di Indonesia adalah sebuah keniscayaan. Tidak bisa kita memaksakan diri untuk mengambil nilai tunggal. Saya selalu mengajarkan hal itu kepada mahasiswa saya, misalnya, karena suatu keprihatinan: sebagian besar kita hanya mengetahui pulau Jawa, tidak berusaha mempelajari dan mencoba mengerti budaya yang lain. Pemimpin kita sendiri dan elit pada umumnya, meski mungkin berasal dari luar Jawa, yang ia ketahui hanya daerahnya sendiri, tidak tahu tempat lain. Sehingga di antara kita sulit untuk menghargai dan menenggang persoalan yang tengah ditanggung orang lain.

Berangkat dari kesadaran betapa sangat pluralnya negeri ini, untuk itu Indonesia tidak mungkin menjadi negara otoriter. Membuat suatu penilaian yang monolitik, pada sebuah negara yang sangat majemuk seperti Indonesia, adalah upaya yang sangat tidak mungkin. Pak Harto mungkin bisa membuat pandangan seperti itu pun hanya pada periode tertentu saja. Setelah itu dia jadi lebih

condong ke “hijau” dari yang sebelumnya “merah”. Untuk hal ini, sampai kemudian ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa Pak Harto seperti semangka, dari luar tampak hijau tetapi di dalamnya merah. Ketidakmungkinan lain untuk membuat negara Indonesia otoriter adalah karena adanya *pressure* dari berbagai hal dan kekuatan, baik dari dalam (dengan berbagai kepentingannya masing-masing) maupun luar negeri (dunia internasional).

Karena kebutuhan terhadap pluralisme yang sangat besar inilah, demokrasi juga harus kita jaga. Kita bebas namun bukan bebas “sebebas-bebasnya”. Harus ada satu nilai yang bisa membuat *sentripetal*. Di satu pihak kita harus kritik otonomi daerah, karena melalui kebijakan itu, ternyata, pluralisme Indonesia cenderung mengarah pada apa yang pernah dialami negara-negara Balkan. Yang semula satu, kini terpecah-belah menjadi sekian banyak negara. Itu memang pandangan yang terlalu pesimistis. Kita mestinya tidak usah terlalu khawatir, karena akan selalu ada ekses dari segala kebijakan, termasuk otonomi daerah. Makanya harus kita maklumi kalau otonomi daerah kemudian mengekspresikan juga orientasi kedaerahan, seperti isu putra daerah. Sayangnya, wacana putra daerah yang kita anut selalu berdasar pada darah atau semangat patrimonialisme. Sekali Anda orang Batak, meski lahir dan tinggal di Yogyakarta bertahun-tahun, tetap akan disebut orang Batak.

> Kalau mau dikatakan telah sekular seharusnya tidak ada lagi pers yang berlandaskan pada keagamaan tertentu, meski kebebasan pers adalah hak semua orang. Dikatakan tidak sekular, dunia pers kita juga sudah memiliki kebebasan yang mumpuni. Masalah majalah Playboy, yang kasusnya cukup menghebohkan itu, memang sangat dimungkinkan dalam alam yang kita rasakan sekarang.

Hal demikian terjadi juga pada negara kita. Negara mematok orisinalitas keindonesiaan (pribumi) pada pihak bapak yang berdasar pada darah. Meski orang Cina lahir dan besar di Indonesia, tetap tidak akan bisa menjadi warga negara asli. Mereka tetap saja bukan pribumi. Belakangan mencuat isu tentang pengakuan anak hasil perkawinan campur antara warga Indonesia dan warga asing. Pemerintah akhirnya dapat memberikan kepastian kepada anak yang orang tuanya beda negara.

Di atas segalanya, dalam konteks perbedaan suku bangsa, agama, bahasa, budaya, dan lain sebagainya, yang niscaya terdapat di Indonesia, yang harus selalu kita hidupkan adalah semangat pluralisme. Harus selalu ditanamkan kesadaran kepada bangsa kita bahwa kita sangat bervariasi. Tidak mungkin lagi ketunggalan atau pandangan yang sentralistik-monolitik seperti dulu, yang semua kebijakan berasal dan terpusat pada Jawa. Pak Harto melakukan hal seperti itu, karena dia memang hanya mengetahui Jawa.

Media, baik cetak maupun elektronik, sangat terbuka terhadap ancaman pluralisme, seperti berita dan tayangan-tayangan agama yang cenderung konservatif, dengan memberikan makna tunggal dan ketidakbebasan untuk mengekspresikan keyakinan penganutnya secara beda, juga menanamkan kebencian terhadap pihak-pihak yang berbeda dan dianggap sebagai musuh. Hal lain yang senada dengan itu adalah makna-makna yang ditawarkan media juga cenderung tunggal: kehidupan konsumeristik. Media seolah ingin menyeret masyarakat kepada bentuk ketunggalan budaya tertentu. Sehingga tidak ada kebebasan bagi pembaca atau pemirsa. Tegasnya, media juga mempunyai andil dalam memberikan atau menghadirkan ancaman bagi pluralisme di

Indonesia. Makanya kemudian ada beberapa kalangan yang mencoba memajukan pentingnya kesadaran media agar masyarakat bisa kritis terhadap media dan mampu mencerna apa yang tengah ditawarkan oleh media dengan membuat maknanya sendiri.

Sikap kritis seperti itu harus muncul dari masyarakat sendiri. Untuk merealisasikan dan menumbuhkan kesadaran media ini, kita mendukung munculnya *media watch*. *Media watch* ini kita anggap sebagai wakil dari masyarakat dan bisa mengadukan seluruh permasalahan pers di daerahnya kepada Dewan Pers. Di masa-masa awal reformasi, media seperti itu jumlahnya sangat banyak, hampir di miliki oleh semua daerah di Indonesia. Sekarang tinggal beberapa saja. Yang masih hidup dan lumayan bagus hanya Habibie Center, yang tentu saja tidak cukup untuk meng-*cover* semua hal yang berkaitan dengan media. Media-media *watch* (pengawasan) yang masih ada sampai sekarang terkadang frustrasi, sehingga tidak memberikan teguran lagi, karena identifikasi terhadap berita-berita yang dianggap mereka dapat membahayakan itu, kemudian sama sekali tidak dihiraukan oleh media massa.

Media massa di Indonesia, 70% di antaranya tidak sehat secara bisnis, hanya 30% selebihnya saja yang sehat, mungkin malah bisa kurang. Biasanya yang tidak sehat bisnisnya, mempunyai orientasi semata-mata untuk meningkatkan oplah. Itu berbahaya dan sayangnya tidak bisa diatur dengan larangan. Hal tersebut sangat kompleks, bahkan persoalan ketidaksehatan media ini bersangkut-paut pada perekonomian kita. Di atas segalanya, kita harus sadar bahwa media yang berjumlah sangat banyak juga bisa berimplikasi tidak sehat. Ternate yang penduduknya hanya sedikit sampai memiliki empat media. Di Yogyakarta saja hanya terdapat *Bernas*

dan *Kedaulatan Rakyat*. Medan lebih parah lagi, sampai mempunyai 20 surat kabar. Itu berbahaya, dan celakanya bisa dipastikan kalau sebagian besar medianya tidak sehat. Akibatnya, orientasi media sekarang ini hanyalah bagaimana memperbanyak oplah agar tetap *survive*.

Kalau dikaitkan dengan pluralisme, kita bisa menganggap bahwa banyaknya media bisa merupakan refleksi dari pluralisme. Karena itulah media-media yang bertebaran juga tidak bisa dihukum atau dilarang untuk terbit begitu saja. Secara ekonomi kita juga bisa melihatnya bahwa sekarang, dalam keadaan di mana sangat sulit mencari pekerjaan, banyaknya media dapat memperbanyak kesempatan kerja.

Dari kasus-kasus yang sudah saya kemukakan sebelumnya, terdapat kemungkinan bahwa pluralisme juga bisa mempunyai ekses yang negatif terhadap media, dan kita harus menyadarinya. Ekses itu bisa muncul tidak hanya dari koran-koran atau majalah-majalah yang banyak menampilkan pornografi, tetapi juga koran atau majalah yang banyak memuat berita provokatif dan reaktif dalam soal agama.

Dalam pemantauan yang sejauh ini Anda lakukan, apakah secara keseluruhan media yang ada di Indoneisa telah mampu menampilkan kemajemukan bangsa dengan wajah yang santun dan toleran? Sebab, kesadaran akan kemajemukan pada warga juga diharapkan muncul dari media, yang kerap mewacanakan demikian banyaknya realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui medialah masyarakat mengetahui persoalan politik, ekonomi, sampai pada kesadaran bersikap toleran terhadap yang lain, dan sebagaianya.

Menurut saya, hal seperti itu sudah dan lebih banyak dilakukan oleh media *mainstream* yang sehat secara ekonomi. Mereka memang sudah mencerahkan publik dengan sangat bagus. Kita lihat, sebagai salah satu contoh, Kompas. Ia sudah sangat bagus melaporkan pemberitaan tentang Islam, Katolik dan lain sebagainya. Sekali lagi saya katakan, media seperti itulah yang bisa dikategorikan *enlightenend*. Sayangya, lagi-lagi, kebanyakan media di negeri ini, yang tidak sehat secara ekonomi itu, hanya berorientsai kepada oplah. Misalnya dapat saya sebutkan seperti media yang ada di Jakarta, salah sebuah yang dapat dicontohkan, terdapat media yang bernama Lampu Merah, yang sama sekali tidak sehat, malah mungkin, menurut saya, sudah gawat, beritanya jauh dari mendidik dan mencerdaskan publik.

Banyaknya media, termasuk yang "gawat" itu, jika dilihat secara keseluruhan, apakah bisa dikatakan sebagai bentuk perayaan terhadap kemajemukan atau malah menjadi ancaman?

Di atas segalanya, dalam konteks perbedaan suku bangsa, agama, bahasa, budaya, dan lain sebagainya, yang niscaya terdapat di Indonesia, yang harus selalu kita hidupkan adalah semangat pluralisme.

Lagi-lagi, bagi saya, khusus untuk media-media yang saya kategorikan sebagai tidak *enlightened*, jelas tidak mencerminkan kemajemukan, karena berita yang ada, kalau tidak porno, pasti kekerasan. Tidak ada yang mencerahkan. Orang yang mau menulis dengan benar dan mencerahkan juga tidak mau mengirimkan tulisannya ke media seperti itu.

Lantas apa harapan Anda terhadap masa depan pluralisme kaitannya dengan apa yang ditampilkan oleh media sekarang ini? Apa yang seharusnya dilakukan oleh media untuk merayakan kemajemukan yang memang sudah merupakan suatu keniscayaan?

Kita mempunyai program untuk tahun depan menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi kepada wartawan multikultural. Wartawan multikultural yakni wartawan yang memiliki kesadaran akan kemajemukan. Sudah seharusnya wartawan diberikan informasi tentang hal itu. Karena ada kemungkinan di mana mereka yang mengekspresikan ketidakmajemukan dalam pemberitaan, terjadi karena ketidaktahuan wartawan akan pentingnya kesadaran tersebut, bukan lantaran kesengajaan niat. Materi seputar itulah yang akan diberikan dalam pendidikan wartawan multikultural. Kita sudah memberikan hal seperti itu ke daerah-daerah dalam kaitannya dengan kode etik. Mungkin kode etik belum spesifik, dan program ini sudah di-*setting* agar jauh lebih spesifik.

Wawancara dilakukan di Yogyakarta, 09 Juni 2007

Percakapan dengan

Ihsan Ali-Fauzi

Ihsan Ali-Fauzi, Direktur Program pada Yayasan Wakaf Paramadina (YWP), Jakarta.
Ia meraih gelar MA dari Ohio University, Athens, AS.

Agama publik hanya mungkin terjadi kalau ada toleransi kepada pihak lain. Dalam konteks tersebut, mustahil menafikan pluralisme. Jika kita ingin ekspresi publik dari agama kita terwujud, kita juga harus membuka kemungkinan bagi terwujudnya ekspresi publik agama lain. Karena itu, demokrasi harus memberi kesempatan bagi setiap warga negara untuk berekspresi apapun, sampai kemudian terbukti bahwa ekspresinya melanggar kebebasan berekspresi orang lain. Demokrasi adalah cara bagaimana Anda mengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat majemuk. Demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa ada negara, oleh sebab itu, yang seharusnya mengatasi pelbagai persoalan yang bermunculan adalah negara, bukan agama. Kendati begitu, agama jangan diistimewakan hanya karena dia agama, tetapi jangan pula segera dicurigai dengan alasan yang sama, yakni karena dia agama.

Ada kecenderungan bagi kalangan agamawan atau teolog, termasuk Nurcholish Madjid, tidak mau memakai istilah sekularisme. Alasan mereka, terutama kaum teolog, adalah pengalaman traumatik dalam sejarah sekularisme yang menimpa umat Kristiani Eropa di mana agamawan dan teolog banyak yang dibunuh, ketika masyarakat Eropa begitu murka melihat gereja yang sangat politis dan banyak menginterevensi ruang publik. Menurut Anda apakah pembedaan antara istilah sekularisme dan sekularisasi merupakan hal yang penting?

Menurut saya pembedaan tersebut tidak penting. Biasanya orang mendefinisikan sekularisasi sebagai proses di mana yang "sekular," yakni sesuatu yang terkandung di dalam kekinian dan kedisinian, diperlakukan sebagaimana adanya, ya kekinian dan kedisinian itu. Jadi, inti sekularisasi adalah proses. Lalu mereka membedakannya dari sekularisme sebagai sebuah paham, yakni orientasi hidup yang ditopang oleh kesadaran bahwa apa yang di sini dan kini itu seharusnya dipandang dengan cara yang demikian juga. Pada yang terakhir (sekularisme), yang penting buat saya adalah komitmen kepada orientasi hidup itu sendiri, bukan pada substansinya, isinya. Oleh karena itu, kalau kita bertanya apa itu sekularisme, saya tidak melihat bahwa "isme"-nya itu terkait dengan substansinya. Akan tetapi "isme" di situ berarti bahwa kita percaya dan menerapkan prinsip tersebut secara terus-menerus. Dari segi ini, tidak terlalu berguna untuk memisahkan antara sekularisme dan sekularisasi. Karena, dari segi substansi, ada beragam jenis sekularisme di banyak negara. Tetapi semuanya bersepakat mengenai keharusan menerapkan prinsip itu.

Apakah karena pengalaman sekularisme di masing-masing negara berbeda-beda, sehingga tidak ada satu bentuk yang baku untuk menangkap substansi sekularisme?

Bukan hanya karena persoalan itu. Yang penting dari pembedaan antara sekularisasi dan sekularisme adalah bukan pada substansinya. Tetapi pada prinsip memperlakukan kekinian sebagai kekinian semata; bukan sebagai yang lain, misalnya, dikaitkan dengan akhirat atau yang lainnya. Isme dalam sekularisme itu bukanlah substansi dari pemisahan antara agama dan ruang publik, melainkan berarti: marilah kita setia pada prinsip pemisahan itu, yakni prinsip memperlakukan suatu kekinian sebagai kekinian. Jadi, menurut saya, pembedaan antara sekularisasi dan sekularisme tidak ada hubungannya dengan substansinya sendiri. Substansinya bisa bermacam-macam. Misalnya di Turki, mereka menyebutnya sekularisme atau sekularisasi, kadang-kadang antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Amerika didasarkan pada sekularisme, dalam pengertian: mari kita memperlakukan hal yang kekinian sebagai kekinian, sedangkan yang di luar itu, tetap di luar. Tetapi wujud dari sekularisme itu bisa bermacam-macam dan tidak mesti bertentangan dengan ekspresi publik dari agama.

Misalnya juga di suatu negara ada sekolah agama yang diberi bantuan atau pajaknya diringankan, dan lain sebagainya. Jadi, sekali lagi, pembedaan antara sekularisasi dan sekularisme itu tidak terkait dengan substansi atau isi, tetapi lebih terkait pada prinsip: marilah kita memperlakukan suatu kekinian sebagai kekinian, dan yang di luar kekinian kita perlakukan sebagai sesuatu yang di luar. Tetapi wujud konkret dari prinsip itu bisa berbeda-beda.

Jadi tergantung pada praktik di masing-masing negara?

Ya, jadi sekularisasi lebih kepada proses, sedangkan sekularisme lebih menyangkut pada prinsip bahwa kita setuju dengan proses seperti itu. Karena itu, menurut saya, pembedaan antara sekularisasi dan sekularisme itu tidak ada substansinya.

Terkait pula dengan soal istilah, sekularisme itu biasanya diartikan sebagai pemisahan atau separation. *Jika demikian maka antara yang publik dan yang privat, agama dan negara, dan yang duniawi dan ukhrawi harus dipisahkan. Implikasinya, terutama di Eropa, terjadi semacam* decline of religion. *Artinya, fungsi dan peran agama di masyarakat Barat kian terpinggirkan. Ada juga yang mengartikan sekularisme bukan sebagai separation, melainkan* differentiation, *yakni sekularisme sebagai pembeda di antara kedua ranah yang memang berbeda. Menurut respon beberapa kalangan, pandangan kedua ini terasa lebih santun dalam meletakkan sekularisme. Bagaimana pandangan Anda dengan pendefinisian tersebut?*

> Sekularisme, yang penting buat saya adalah komitmen kepada orientasi hidup itu sendiri, bukan pada substansinya, isinya. Oleh karena itu, kalau kita bertanya apa itu sekularisme, saya tidak melihat bahwa "isme"-nya itu terkait dengan substansinya. Akan tetapi "isme" di situ berarti bahwa kita percaya dan menerapkan prinsip tersebut secara terus-menerus. Dari segi ini, tidak terlalu berguna untuk memisahkan antara sekularisme dan sekularisasi. Karena, dari segi substansi, ada beragam jenis sekularisme di banyak negara. Tetapi semuanya bersepakat mengenai keharusan menerapkan prinsip itu.

Bisa saja demikian, apabila mengikuti yang Anda maksud atau kalau sekiranya prinsip pemisahan ini – katakanlah asumsi Anda itu benar, karena bagi saya itu saling terkait – kemudian menjadikan fungsi negara dan fungsi agama atau antara fungsi tabib dan fungsi dokter, dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan, harus dipisahkan, maka implikasinya yang tadi Anda sebut, yakni makin merosotnya peran agama. Jadi fungsi-fungsi yang tadinya diperankan oleh lembaga-lembaga agama atau aktor-aktor agama sekarang dimainkan oleh aktor-aktor luar, non-agama, meskipun mereka bisa jadi seseorang yang religius. Atau, meskipun dalam kesehariannya justru seorang dokter bisa sekaligus juga seorang Muslim yang baik. Atau jangan-jangan dia menjadi Muslim yang lebih baik ketika dia menjadi dokter yang baik. Artinya, seorang dokter yang mengobati dengan cara ilmu pengetahuan yang benar justru memainkan peran Muslim yang lebih baik ketimbang dia seorang dukun atau tabib yang mengklaim melakukan fungsinya atas nama agama, namun bertindak *aneh-aneh* dalam memperlakukan tubuh orang.

Memang, idealnya sekularisme lebih dipahami sebagai pembeda. Namun, kalau sekularisme dipahami sebagai separation *atau pemisahan, implikasinya di antaranya privatisasi yang ekstrem (tegas). Itulah yang menyebabkan agama semakin terpinggirkan.*

Saya ingin mengatakan bahwa dengan sekularisme, agama tidak serta-merta terpinggirkan. Saya mengambil contoh tadi, bahwa dengan Anda, misalnya, menjadi seorang dokter yang mempelajari ilmu kedokteran dengan sebenar-benarnya dan pada saat yang sama Anda Muslim (apapun definisi Anda mengenainya), bukan-

kah Anda menjadi dokter yang baik sekaligus Muslim yang baik juga? Bagi saya, Anda malah seorang Muslim yang lebih baik dibanding seorang tabib yang memperlakukan tubuh pasiennya secara semena-mena sambil mengklaim bahwa ilmunya ia peroleh dari agama. Sebenarnya dalam hal ini tidak ada privatisasi. Privatisasi hanya terjadi ketika Anda menjalankan peran sebagai seseorang dalam dunia privat. Namun tidak serta-merta dengan Anda menjadi privat maka Anda menjadi Muslim yang tidak baik. Tidak ada implikasi seperti itu.

> Tidak semua agama bisa mewujud dalam ekspresi publik yang diterima semua orang. Jadi hanya agama-agama yang mempunyai doktrin penerimaan terhadap orang lain yang wajah publiknya bisa diterima. Artinya, dia harus mendukung toleransi, demokrasi, dan pluralisme. Tanpa dukungan seperti itu sebuah agama tidak mungkin mempunyai wajah publik. Karena wajah publik agama yang kebanyakan ditonjolkan adalah wajah yang tidak toleran dan tidak pro-pluralisme, maka dia tidak akan bisa diterima oleh publik.

Bayangkanlah politisi seperti presiden Turki yang baru terpilih sekarang. Dia merasa bahwa dia bisa menjadi politisi yang lebih baik kalau dia menerima sekularisme Turki, tetapi pada saat yang sama dia tetap seorang Muslim yang taat. Istrinya punya keyakinan bahwa memakai jilbab adalah suatu keharusan agama. Sang Presiden tidak mau memaksa istrinya untuk melepaskan jilbab hanya karena ia menjadi seorang politisi, seperti didesakkan kalangan militer di sana, yang memandang bahwa jilbab di ruang publik adalah ancaman terhadap sekularisme Turki. Bahkan anak presiden ini terpaksa harus belajar ke Amerika karena di Turki tidak boleh sekolah dengan memakai jilbab. Jangan-jangan dialah

Muslim yang lebih baik daripada Muslim yang memaksakan diri dengan cara memprivatisasi agama. Jadi, kembali ke argumen Anda tadi, apakah dalam kasus tersebut peran agama manjadi merosot? Tidak juga.

Artinya, seseorang dengan sikap keberagamaan seperti Arifin Ilham sekalipun, misalnya, dalam beberapa bagian dari praktik kehidup-annya bisa disebut sebagai orang sekular, sehingga sekularisme tidak serta-merta membunuh agama?

Ya. Arifin Ilham bisa kita lihat sebagai seorang penyebar aga-ma dan dia belajar akting untuk bisa seperti itu, misalnya, dan agama di situ menjadi suatu produk. Kalau memakai kategori-ka-tegori tadi persoalannya menjadi ruwet. Bagaimanapun, dia me-makai perangkat-perangkat yang sepenuhnya sekular. Agar tampil memukau di depan media, pelajarilah cara akting yang bagus dan lain sebagainya untuk menyampaikan produk-produk agama yang bagus, meskipun dengan cara yang sekular sama sekali, yaitu de-ngan mempelajari ilmu pengetahuan.

Lantas, dalam hal ini bagaimana posisi ilmu pengetahuan dalam dis-kursus sekularisme? Dulu Natsir, misalnya, pernah mengatakan bahwa ilmu pengetahuan sah untuk dimasuki semangat-semangat religius, atau justru agama harus bisa merasuki ilmu pengetahuan. Sementara dalam ilmu pengetahuan sendiri, untuk mencapai obyektivitas, ha-rus sepenuhnya sekular. Artinya tidak boleh ada nilai tertentu (value free), *baik nilai tradisional maupun nilai agama.*

Saya kira prinsipnya jelas. Pertama, bahwa untuk menjadi seorang dokter yang baik maka seseorang harus mempelajari ilmu pengetahuan, yakni ilmu kedokteran, yang mempelajari segala sesuatu secara rasional, dengan penelitian dan sebagainya, yang bersifat kumulatif. Jika proses itu dilalui dengan benar, maka dia menjadi dokter yang baik. Sebagai dokter Anda bisa saja, pada saat yang sama, juga sebagai seorang Muslim, yang dengan semangat kemuslimannya berniat membantu orang dengan biaya yang ringan, misalnya. Ketika dia mau menyuntik pasien, boleh jadi dia selalu membaca basmalah agar dia percaya diri kepada dirinya sendiri. Namun suntikan itu sendiri tidak ada hubungannya dengan basmalah yang dia ucapkan. Obat atau serum yang masuk ke dalam tubuh pasien tidak ada hubungannya dengan basmalah. Itu pengetahuan biasa. Sebagaimana seorang Arifin Ilham, fungsinya sangat sekular, dalam pengertian bahwa dia adalah seorang entertainer yang bisa mengemas suatu produk agama. Bagi Arifin Ilham, agama adalah substansi yang bisa diproduk dan dikemas sedemikian rupa. Jadi kita perlu membedakan antara metode dan motif pribadi seseorang. Seseorang bisa memiliki motif untuk menjadi entertainer, khatib, dan lain sebagainya, tetapi cara yang dia pakai untuk mengemas adalah cara ilmu pengetahuan, cara yang sudah terbukti ampuh dengan penelitian dan lain sebagainya. Di Amerika Serikat, belakangan ini banyak evangelis yang khotbahnya di televisi dikagumi banyak orang, tetapi kemudian perilakunya ketahuan media melanggar apa yang diungkapkannya dalam khotbah.

Apakah dengan demikian islamisasi pengetahuan, seperti munculnya bank Islam atau yang lainnya tidak akan mengancam sekularisme?

Saya melihat bahwa islamisasi semacam itu akan mengancam sekularisme. Namun, ia tidak akan bisa bekerja semestinya. Misalnya, sebuah ilmu sosial atau sosiologi yang harus empirik, yang tidak akan bisa jalan jika dasarnya adalah teologi, yang bersifat normatif. Saya tidak mengatakan bahwa itu akan mengancam sekularisme atau tidak. Klaim saya adalah: saya tidak bisa mengerti bagaimana sebuah ilmu pengetahuan sosial yang empiris bisa berjalan dengan baik jika hal itu dimulai dari teologi. Teologi adalah teologi. Sementara ilmu sosial harus empiris berdasarkan data. Gambaran al-Quran tentang masyarakat Muslim adalah satu hal, dan itu normatif, sementara masyarakat Muslim yang aktual, yang harus dipelajari sosiologi atau antropologi, adalah hal lain lagi.

Kita masuk konsep deprivatisasi, sebagai reaksi atas privatisasi agama. Deprivatisasi agama asumsi dasarnya adalah bahwa agama mempunyai semangat profetis untuk pembebasan dan keadilan masyarakat. Sementara kita mengetahui agama memiliki dua wajah, di satu sisi profetis, di sisi lain dia juga bisa memicu konflik. Bagaimana menempatkan deprivatisasinya Casanova?

Agar lebih *fair* dalam melihatnya saya akan mulai dari awal. Casanova ingin melihat ada beberapa unsur dalam teori sekularisasi yang mestinya diukur secara benar. *Pertama*, dalam prinsip diferensiasi. Bagi dia sekularisasi bisa terjadi sepenuhnya dalam hal diferensiasi struktural. Seperti telah saya sebutkan di atas, tugas-tugas yang dulu dimainkan para aktor agama sekarang sudah dimainkan oleh orang-orang yang prinsipnya bukan lagi berdasarkan agama. Kalau dulu orang menyuntik atau orang mengobati karena dia percaya bahwa agama bisa mengobati orang, sekarang mes-

Isme dalam sekularisme itu bukanlah substansi dari pemisahan antara agama dan ruang publik, melainkan berarti: marilah kita setia pada prinsip pemisahan itu, yakni prinsip memperlakukan suatu kekinian sebagai kekinian. Jadi, menurut saya, pembedaan antara sekularisasi dan sekularisme tidak ada hubungannya dengan substansinya sendiri. Substansinya bisa bermacam-macam.

kipun dia seorang Muslim tapi prinsip bekerjanya adalah dia mengobati bukan karena agama tapi karena ilmu pengetahuan yang mendasari penelitian mengenai kedokteran. Karena itu, dalam hal diferensiasi struktural sekularisasi bisa saja terjadi.

Kedua, privatisasi agama, dalam arti harus dipisahkan antara aspek privat dari agama dan aspek publiknya. Yang hendaknya dipehatikan di sini, Casanova mengatakan bahwa dalam persoalan ini tidak mungkin terjadi *zero sum game.* Artinya, agama semata harus privat atau, kalau tidak, agama harus publik. Yang menjadi pertanyaan Casanova adalah bagaimana agama menjadi sesuatu yang sifatnya publik. Saya kira itu suatu terobosan yang berarti dan semakin bisa menjelaskan fenomena kebangkitan agama di mana-mana: fenomena di mana fundamentalisme Islam, Kristen, dan sebagainya kian menguat. Jadi, sekarang peran publik agama semakin diyakini berguna, dan terbukti orang-orang belakangan ini semakin senang menggali dan menumbuhkan semangat agama dalam kontribusinya di wilayah publik. Banyak indikator yang menunjukkan agama semakin berwajah publik, dan hal yang demikian, sebenarnya, dianggap biasa saja oleh demokrasi sekalipun.

Ada kritik Talal Asad terhadap pandangan Casanova ini. Pandangan Casanova secara implisit menyimpulkan bahwa tidak semua agama bisa mewujud dalam ekspresi publik yang diterima semua

orang. Jadi hanya agama-agama yang mempunyai doktrin penerimaan terhadap orang lain yang wajah publiknya bisa diterima. Artinya, dia harus mendukung toleransi, demokrasi, dan pluralisme. Tanpa dukungan seperti itu sebuah agama tidak mungkin mempunyai wajah publik. Karena wajah publik agama yang kebanyakan ditonjolkan adalah wajah yang tidak toleran dan tidak pro-pluralisme, maka dia tidak akan bisa diterima oleh publik. Artinya ada sisi-sisi yang sifatnya normatif dalam penjelasan Casanova. Hanya agama tertentu saja yang bisa menampilkan wajah publiknya. Karena publik memandang kalau sekiranya agama Anda ingin mempunyai wajah publik, maka asumsinya agama orang lain juga harus memiliki wajah publik. Jadi harus ada prinsip resiprokalitas di sana. Artinya, kalau (agama) saya bisa, (agama) orang lain juga boleh menampilkan wajah publiknya.

Sebaliknya, kalau prinsipnya adalah saling mengeksklusi orang lain, maka yang terjadi adalah perkelahian. Apabila di antara wajah-wajah publik agama saling berkelahi, maka artinya muncul pemaksaan. Jika terjadi pemaksaan, artinya wajah publik agama justru merusak. Dengan demikian, tidak mungkin sebuah wajah publik agama bisa diterima tanpa, pada saat yang sama menerima wajah publik agama yang lain. Saya kira seperti itu.

Dapatkah Anda mengeksplorasi gagasan sekularisasi dari Norris dan Inglehart?

Saya kira teori sekularisasi sudah "mentok" sebagaimana pernah saya jelaskan dalam beberapa kesempatan. Jadi bukan masalah sekularisasinya berhasil atau tidak, masalahnya tidak ada pemahaman yang di-*share* secara bersama-sama oleh banyak orang mengenai

apa itu sekularisasi, elemen-elemennya, dan bagaimana cara mengukurnya. Jadi kira-kira, meminjam istilah Casanova, cara kita melihatnya saja yang semakin maju karena metodenya juga semakin maju, sementara obyeknya tetap sama. Salah satu buktinya adalah bagaimana Casanova memilah elemen-elemen di atas itu, sehingga ukurannya menjadi sama. Kita jangan berbicara mengenai dua hal yang berbeda. Karena kita tidak bisa berdebat mengenai dua hal yang berbeda.

> Agama jangan diistimewakan hanya karena dia agama, tetapi juga jangan segera dicurigai dengan alasan yang sama, yakni karena dia agama. Artinya, di antara semua itu ada sederet kemungkinan dan pengalaman-pengalaman dari luar yang memberikan contoh dalam hal mengelola agama dan identitas lain.

Karena itulah, pada titik ini relevan untuk membahas salah satu terobosan bagus yang disampaikan oleh Norris dan Inglehart. *Pertama,* datanya lebih banyak. Sebuah teori kalau ingin dilihat kuat atau tidaknya, paling tidak, harus dapat diterapkan di semua tempat. Dalam bahasa ilmiahnya, *universe of case*-nya harus terwakili. Kalau data-datanya hanya dilihat dari pengalaman sejarah Eropa atau Amerika, itu tidak cukup untuk klaim sebuah teori. Norris dan Inglehart datang dengan sebuah penelitian yang klaimnya bisa lebih dipertanggungjawabkan, karena mereka meneliti 80 masyarakat di seluruh dunia.

Kedua*,* parameternya jelas. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sekularisasi bermacam-macam. Namun Norris dan Inglehart hanya mengambil satu hipotesis saja. Menurut Norris dan Inglehart, fenomena bangkitnya agama dikarenakan ancaman *existential security*. Jadi mereka mau melihat bagaimana *existential secu-*

rity orang, definisi orang mengenai apakah dirinya *secure* atau tidak secara eksistensial, di mana hal itu berpengaruh terhadap apakah dia sekular atau tidak. Definisi operasional *existential security* menurutnya dapat dipahami dengan melihat apakah dia makan atau tidak, bisa berobat atau tidak, bisa bertahan hidup panjang atau tidak. Demikianlah ukuran definisi operasionalnya. Sedangkan yang mereka maksud dengan sekularisasi adalah religiusitas, termasuk juga salah satu implikasinya adalah kehadiran regular ke gereja, yang paling objektif untuk melihat sekularisasi.

Mereka berdua kemudian melihat bahwa ada orang di masyarakat tertentu yang merasa *secure* eksistensinya dan ada orang tertentu di masyarakat yang lain yang tingkat pendapatan ekonominya rendah dan tidak terlalu merasa aman. Kendati sebenarnya mereka melihat ada sesuatu yang menarik, namun demikian tidak ada perubahan yang berarti di kedua masyarakat itu. Bahwa di masyarakat di mana orang merasa *secure* eksistensinya, justru agama tidak terlalu berperan sebagaimana dulu, satu abad yang lalu, ketika agama juga tidak terlalu berperan. Artinya, sekularisasi yang di dunia ini paling lambat sudah terjadi kira-kira 50 tahun yang lalu, sungguhpun demikian sekarang tingkat sekularitas dari suatu masyarakat tetap sama seperti dulu. Jadi tidak terjadi perubahan yang signifikan dalam hal tingkat sekularitas. Demikianpun di negara-negara yang penduduknya merasa tidak aman eksistensinya, ternyata fenomenanya juga sama. Artinya, mereka sama religiusnya sekarang ini dengan mereka seabad yang lalu. Jadi tidak ada pola yang berubah secara signifikan.

Yang menarik dari penelitian mereka adalah: sementara jumlah mereka yang merasa aman makin sedikit, jumlah mereka yang merasa tidak aman jauh meningkat. Inilah yang menjelaskan

mengapa seakan-akan sekularisasi terhambat dan anti-sekularisasi meningkat. Menurut keduanya, bukan tingkat sekularitas yang meningkat atau menurun, melainkan jumlah orang yang mendukung keduanya.

Ketika Norris dan Inglehart melihat variabel antara dua kelompok di atas, mereka menemukan bahwa orang-orang yang secara eksistensial aman, yakni orang yang sekular, justru adalah orang-orang yang tidak mau mempunyai anak, sehingga tingkat pertumbuhannya stagnan. Sedangkan masyarakat-masyarakat di mana orang tidak terlalu *secure* kehidupannya, justru tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi. Alasan mereka, antara lain, karena merasa tidak aman hidup, sehingga mereka merasa perlu punya anak banyak. Implikasi besarnya, kalau dua gejala itu digabungkan: di negara-negara di mana orang merasa *secure* secara eksistensial, tidak terjadi gejolak sekularisasi demikian juga tidak terjadi religiusisasi, misalnya sekularisasi menjadi menurun. Tetapi di sini juga tidak terjadi kemunduran yang berarti. Hanya saja secara kualitatif di dunia ini orang-orang yang sekular jumlahnya lebih sedikit dibanding orang yang beragama kuat, sebagaimana satu abad yang lalu karena jumlah mereka yang meningkat.

Jadi penjelasannya bukan pada *existential security* sendiri, melainkan pada variabel antara, yaitu orang yang makin tidak *secure* makin ingin punya anak lebih banyak, sehingga jumlah orang di seluruh dunia yang sekular lebih sedikit dibandingkan orang yang tidak sekular, yaitu orang yang sama religiusnya pada satu abad yang lalu. Itu definisi mereka secara lebih teknis.

Apakah itu kemudian ada hubungannnya dengan *clash* di antara keduanya, seperti dikatakan Huntington? Potensi *clash* memang ada, menurut Noris dan Inglehart. Hanya saja potensi itu tidak

serta-merta akan digunakan atau tidak. Artinya, jika *opportunity* itu dimanipulasi sedemikian rupa, maka *clash* yang tadinya hanya potensi kemudian bisa menjadi aktual. Menariknya lagi, Huntington tidak menjelaskan hal tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa *clash* yang potensial itu tiba-tiba bisa menjadi aktual. Sebaliknya, Norris dan Inglehart mengatakan bahwa potensi konflik tersebut akan terjadi jika *demagog* di kedua belah kubu memanfaatkan kesempatan yang ada, sehingga terjadi konflik.

Dalam pelbagai tulisan lain, Norris dan Inglehart juga mempreteli tesis Huntington dalam pelbagai sisi. Misalnya, yang sangat menarik, sebenarnya dalam perihal demokratis atau tidak demokratis, tidak terjadi perubahan yang signifikan – antara doktrin, seperti yang dikatakan Huntington, di negara Barat dengan yang di negara Islam. Yang berbeda antara Barat dan Islam hanyalah dalam masalah-masalah seks dan keluarga saja. Artinya, hanya dalam soal perempuan dan keluarga dan yang terkait dengan itu, tetapi tidak dalam soal demokrasi. Karena itulah mereka menolak tesis Huntington bahwa Islam *inherently* anti-demokrasi.

Menurut Anda, apakah diseminasi wacana sekularisme seharusnya dilakukan melalui civil society *ataukah melalui negara, sebagaimana diterapkan Prancis atau Turki?*

Sebelum jauh ke sana, saya kira, ada *record* yang belum saya sampaikan. Wujud dari pemisahan antara agama dan negara sangat beragam. Satu kasus yang sangat jelas menunjukkan wujud publik agama adalah apakah seseorang boleh atau tidak ikut mendirikan partai politik berdasarkan agama. Eropa memiliki sejarah paling panjang tentang partai agama. Partai Kristen Demokrat, misalnya,

sudah ada sejak 1900-an. Padahal, di Indonesia, PKS tidak menyebut diri sebagai partai Islam. Sementara di Eropa, Partai Kristen Demokrat secara jelas menyebut diri sebagai partai agama. Ini yang pertama.

Civil liberties seseorang hanya akan menjadi masalah kalau bertentangan dengan *civil liberties* orang lain.

Yang kedua, dilihat dari undang-undang dasar sebuah negara, menurut penelitian Alfred Stephan, dari sekitar 50 negara di Uni Eropa 15 negara menyatakan di dalam UUD mereka bahwa ada agama resmi. Biasanya agama resmi adalah agama penduduk mayoritas. Misalnya, di negara kita adalah agama Islam. Hal itu biasa terjadi di negara-negara Skandinavia. Dan itu tidak serta merta harus berimplikasi pada penindasan terhadap agama minoritas.

Kemudian, ketiga, dilihat dari sejauh mana negara mau atau tidak membiayai pendidikan atau aktivitas sosial yang dikelola oleh lembaga agama. Ini contoh yang mengejutkan, di Jerman tidak ada *official religion* atau *eshtablished cruch,* tetapi kalau Anda mau menikah, dibaptis, atau kalau meninggal ingin diadakan upacara di gereja, maka Anda harus setuju dengan perjanjian di formulir pajak Anda bahwa sembilan% dari pajak tersebut akan disalurkan kepada lembaga-lembaga agama yang mengerjakan proyek-proyek publik, seperti panti asuhan, lembaga pendidikan, panti jompo, dan lain sebagainya. Ini yang terjadi di Jerman. Ini berarti Anda harus setuju menjadi anggota gereja.

Demikian pula yang terjadi di Belanda. Saya lupa apakah di Belanda ada *official religion* atau tidak, tetapi di sana dikenal istilah *consociational democracy*. Teori ini dikembangkan oleh Arend Lijphart dari Belanda. *Consociational democracy* adalah demokrasi

yang didasarkan pada kesepakatan antara pilar-pilar masyarakat tertentu. Di antara pilar-pilar masyarakat yang utama tersebut, selain kelompok ateis dan kelompok yang kurang beragama, ada dua kelompok agama, yaitu Protestan Calvinis dan *Presbytarian*. Karena dalam sejarah keagamaan Belanda pernah terjadi perang agama, sehingga sekarang muncul kesepakatan jika di masyarakat tertentu yang dominan adalah kelompok Presbitarian atau Calvinis, maka pengelolaan lembaga sekolah tertentu, misalnya, dilakukan oleh orang-orang yang terkait dengan gereja Calvinis atau Presbitarian. Bahkan kesepakatan ini juga berlaku untuk sekolah umum. Dan sekolah-sekolah yang dikelola oleh lembaga keagamaan ini juga didanai oleh negara. Negara juga bahkan memberikan bantuan dana pada sejumlah stasiun radio dan televisi yang dikelola oleh kelompok keagamaan di atas. Jadi itulah yang disebut *consociational democracy.* Model tersebut juga banyak dipraktikkan di negara lain. Inilah varian sekularisasi yang berbeda dengan sekularisasi di Prancis.

Di Amerika, ada wilayah-wilayah tertentu di mana orang boleh melakukaan aborsi atau tidak boleh. Juga ada wilayah di mana lembaga-lembaga agama memerankan peran lebih banyak. Artinya, tergantung kesepakatan-kesepakatan yang ada. Menurut Stephan, ada yang dilupakan oleh Michael Walzer ketika ia beranggapan bahwa agama harus di-*cut-off* dari ruang publik, yakni kesempatan yang diberikan oleh demokrasi untuk bernegosiasi. Oleh karena itu, yang paling penting dalam demokrasi, menurut Stephan, adalah adanya kesempatan yang diberikan demokrasi untuk bernegosiasi.

Inilah contoh-contoh di mana hubungan agama dan negara bervariasi. Dan jangan lupa bahwa wajah publik agama juga sangat bervariasi, dari kesempatan dan fasilitas yang diberikan oleh

negara kepada lembaga agama dalam menjalankan program tertentu yang sifatnya publik sampai yang sangat formal seperti pembentukan partai politik.

Sekarang saya ingin ceritakan kasus di mana sekularisme justru mengancam demokrasi, yaitu di Turki. Fenomena Turki merupakan kasus yang aneh sekali, yakni ketika orang tidak bisa menjadi politisi hanya karena istrinya berjilbab. Itu berarti bahwa sebenarnya tidak ada demokrasi karena orang tidak bisa menjalankan apa yang dianggap sebagai kebebasannya. Ini yang pertama. Kedua, di Turki orang percaya akan keterlibatan militer untuk menyelesaikan perkara. Dan militer Turki selalu ada di belakang membayangi proses demokrasi.

Tujuan negara, dalam prinsip besarnya, adalah untuk menyejahterakan masyarakatnya, sehingga hak-hak sipilnya harus dihormati. *Civil liberties* seseorang hanya akan menjadi masalah kalau bertentangan dengan *civil liberties* orang lain. Jadi, menurut saya, soal identitas itu bukan hanya soal agama tapi juga berkaitan dengan hal lain yang harus kita pikirkan, dan agama hanya salah satunya.

Diskursus sekularisme tentu saja tidak bisa dipisahkan dari tatanan demokrasi. Dan berbicara mengenai demokrasi adalah bagaimana civil rights, political rights *dan* civil liberties *dapat dijunjung. Tetapi, seringkali kebebasan yang diterima oleh masyarakat berimplikasi pada masuknya identitas agama ke wilayah publik. Ketika identitas suatu kelompok dipaksakan menjadi suatu aturan perundang-undangan, maka dapat berakibat pada tercerabutnya hak dan kebebasan warga, seperti perda syari'at dan sebagainya. Bagaimana Anda melihat kasus Indonesia secara menyeluruh?*

Persoalan pertama adalah masalah identitas. Masalah identitas tidak hanya terkait dengan agama. Masalah identitas juga sangat terkait dengan kesukuan tertentu, atau penggunaan bahasa tertentu sebagai bahasa pertama. *What can you do if I was born* sebagai seorang Betawi atau yang lain. Masalahnya, identitas seringkali langsung dikaitkan dengan agama, padahal tidak mesti demikiran. Kalau saya lahir sebagai seorang Dayak, tentu saja saya punya dorongan bawaan untuk menerapkan identitas ke-Dayak-an saya. Bukankah tujuan negara, dalam prinsip besarnya, adalah untuk menyejahterakan masyarakatnya, sehingga hak-hak sipilnya harus dihormati? *Civil liberties* seseorang hanya akan menjadi masalah kalau bertentangan dengan *civil liberties* orang lain. Jadi, menurut saya, soal identitas itu bukan hanya soal agama tapi juga berkaitan dengan hal lain yang harus kita pikirkan, dan agama hanya salah satunya.

Sekali lagi, dalam prinsip besarnya, menurut saya, demokrasi harus memberi kesempatan bagi warga negara untuk berekspresi apapun sampai kemudian terbukti bahwa ekspresinya melanggar kebebasan berekspresi orang lain. Itulah alasannya kenapa kemudian dibuat aturan-aturan hukum. Kalau, misalnya, seorang perempuan Muslim ingin berjilbab karena merasa bahwa ia akan semakin islami kalau berjilbab, tentu saja tidak bisa dilarang. Apa hak negara melarang orang berjilbab. Persoalan ini adalah urusan pribadi seseorang dan kalau orangnya menjalankan dengan senang maka tidak perlu diganggu.

Persoalannya, bagaimana kalau identitas atau nilai-nilai yang mereka anggap paling luhur tersebut diterapkan dalam undang-undang?

Seperti yang saya jelaskan di atas, ketika Anda percaya bahwa pada tingkat tertentu ada nilai-nilai ke-Dayak-an yang baik, sehingga Anda akan berupaya untuk menjadikannya sebagai aturan publik. Namun caranya harus melalui *public reasoning* agar semua orang dapat memahami dan kalau diterima maka ia menjadi nilai atau aturan yang dimiliki bersama. Saya merujuk pada istilahnya Gus Dur yang mengatakan, jadikan sumber nilai-nilai tersebut sebagai "inspirasi," dan bukan "aspirasi." Inspirasi berarti bahwa sumber nilai-nilai tersebut harus diolah dulu di dalam diri atau komunitas, sehingga muncul gagasan baru yang bisa dikomunikasikan kepada publik. Kalau nilai-nilai tersebut Anda anggap sebagai aspirasi itu berarti nilai-nilai tersebut langsung diajukan tanpa adanya perenungan terlebih dulu. Kalau inspirasi dia menjadi bahan mentah yang kemudian perlu diolah dulu.

Demokrasi harus memberi kesempatan bagi warga negara untuk berekspresi apapun sampai kemudian terbukti bahwa ekspresinya melanggar kebebasan berekspresi orang lain. Itulah alasannya kenapa kemudian dibuat aturan-aturan hukum.

Selain itu, juga berlangsung prinsip-prinsip besar, yaitu bagaimana kita hidup di masyarakat yang majemuk. Kalau kita ingin diterima maka harus ada ruang di mana orang lain dapat menerima kita. Salah satu yang dikembangkan oleh Walzer adalah prinsip-prinsip resiprokalitas, yaitu adanya pengakuan dari luar bahwa, misalnya, hukum yang menjadi argumen saya ini, yang sudah menjadi publik, bisa diterima orang lain bukan karena didasarkan pada agama tapi karena memang hal itu bagus untuk dijadikan sebagai aturan publik. Karenanya, di sini mesti ada prinsip resiprokalitas. Bagaimana kita meminta pertanggungjawaban seseorang

atas tingkah lakunya kalau dia tidak memiliki kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu? Saya berhak untuk memukul Anda kalau hukuman tidak salat, misalnya, harus dipukul, kalau Anda punya pilihan untuk melakukan salat atau tidak salat. Artinya hukuman bisa terjadi kalau orang bisa melakukan sesuatu, sehingga sanksi itu berguna atau tidak berguna.

Bagaimana kajian mengenai kasus Israel yang dipahami sekaligus sebagai etnis, agama, dan bangsa?

Negara seperti itu biasanya akan menjadi negara yang monolitik dan tingkat demokrasinya rendah. Kecuali kalau ada kesepakatan, misalnya, bahwa kelompok-kelompok minoritas mau bergabung berdasarkan aransemen konstitusional tertentu. Artinya, ada saat-saat di mana kesepakatan-kesepakatan besar dicapai, biasanya sesudah terjadi sebuah pergolakan atau perubahan sosial yang besar. Itulah yang dikatakan Jacques Bertrand, misalnya, dalam penelitiannya mengenai nasionalisme dan konflik etnis di Indonesia. Ada saat-saat di mana aransemen institusional yang ada mulai dipertanyakan dan hendak direvisi, di mana kesepakatan-kesepakatan besar mengenai pengelolaan negara hendak ditinjau kembali. Kesepakatan besar di Indonesia adalah UUD 1945, pemilu 1955, dan lain sebagainya.

Jadi, kalau kita bersepakat bahwa negara ini adalah negara agama, berarti sejak awal kita mendefinisikannya sebagai negara agama. Atau kita sepakat mendefinisikan diri sebagai negara kerajaan, seperti Arab Saudi, misalnya. Jadi mendirikan suatu negara tergantung pada orang atau kelompok yang menjadi *stakeholders* negara tertentu. Kalau semuanya bersepakat, maka tidak akan masalah.

Dan jika kemudian ada orang-orang atau kelompok yang bersedia menjadi minoritas dengan aransemen tertentu, tidak masalah sejauh mereka bersedia. Jika ada perkembangan baru, seperti naiknya kalangan menengah terdidik yang Islamis di Turki, keistimewaan yang dimiliki tentara akan dipertanyakan karena hal itu dianggap bertentangan dengan demokrasi.

Jadi, jangan kita beranggapan bahwa permasalahan demokrasi akan segera berakhir hanya dengan kenyataan bahwa masyarakat berasal dari agama yang sama, seperti di Israel. Karena identitas itu tidak hanya ditentukan oleh agama. Bisa jadi ini terjadi di Israel. Israel memang Yahudi. Tetapi jangan lupa bahwa ada Yahudi yang berasal dari Arab, Yahudi dari Eropa Timur, Rusia, yang selalu akan memunculkan konflik kepentingan antara generasi baru dengan generasi yang sebelumnya. Masyarakat, secara teori, akan selalu majemuk. Dan demokrasi adalah cara bagaimana Anda mengelola konflik yang terjadi dalam masyarakat yang majemuk.

Jadi, menurut saya, prinsip besarnya adalah bahwa agama jangan diistimewakan hanya karena dia agama, tetapi juga jangan segera dicurigai dengan alasan yang sama, yakni karena dia agama. Artinya, di antara semua itu ada sederet kemungkinan dan pengalaman-pengalaman dari luar yang memberikan contoh dalam hal mengelola agama dan identitas lain.

Agama seringkali dianggap menyediakan nilai yang total, seperti ketika sebelum munculnya konsep negara-bangsa. Agama menjadi identitas yang membentuk komunitas politik, seperti yang pernah diungkapkan oleh Bennedict Anderson, yaitu dengan memahami agama sebagai perekat komunitas ummat. *Oleh karenanya, agama cende-*

rung terlihat kurang sinergis dengan gagasan kebangsaan. Makanya perdebatan yang muncul pada 1945 adalah antara kelompok yang mendukung persatuan Islam dengan persatuan Indonesia. Bagaimana menurut Anda?

Sebenarnya dengan derajat yang sama, kita mempunyai *sense of belonging* pada yang lainnya. Hanya saja sekarang kita tidak merasakan hal tersebut karena ada *polity* yang lebih besar yaitu negara sekular. Sebelum itu, Anda adalah bagian dari komunitas etnis tertentu. Namun nilai tersebut makin tergerus dengan nilai identitas yang memiliki cakupan lebih lebar seperti agama. Agama memiliki nilai tambah dalam hal cengkeramannya pada kita, karena dia punya rujukan kepada yang transendental, yang berbicara mengenai problem eksistensi. Jadi agama mempunyai klaim yang sangat besar atas kita dan terus menghantui setiap orang.

Yang terpenting: kalau benar kita punya janji pada rakyat bahwa bangsa ini, lewat *polity* yang namanya NKRI, bisa mensejahterakan mereka, maka usahakanlah agar janji itu terpenuhi. Tunjukkanlah bahwa identitas sebagai bagian dari bangsa Indonesia itu memang benar-benar berguna, menyejarhetarakan dan sebagainya. Kalau tidak, maka orang akan mencari identitas lain, atau merujuk kepada identitasnya yang lebih menjanjikan, termasuk agama.

Tapi pengalaman di Indonesia, dengan munculnya kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah, Komunitas Eden atau kontroversi perda-perda syariah, menunjukkan bahwa agama seringkali terlihat beringas?

Ya, itu benar. Seperti sudah saya singgung, agama adalah identitas dengan daya panggil yang lebih tinggi karena orientasinya ke-

pada yang transendental. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa fenomena itu tidak hanya terjadi antara Islam dengan yang lain tapi juga di internal Islam sendiri. Yang lebih parah, karena ini masalah internal kemudian dianggap selesai. Kelompok-kelompok tersebut dianggap seperti duri dalam daging yang menyebabkan sikap umat Muslim demikian keras terhadap Ahmadiyah dan Komunitas Eden. Jika berhadapan dengan umat agama lain memang sudah dimaklumi, karena memang mereka orang kafir. Namun sebenarnya ada pluralisme internal dan pluralisme eksternal yang mesti diterapkan.

Apakah itu terjadi karena hukum di Indonesia lemah?

Kalau kita kembali ke belakang, agama publik hanya mungkin terjadi kalau ada toleransi kepada pihak lain. Karena jika kita ingin ekspresi publik dari agama kita terwujud, maka kita juga harus membuka kemungkinan untuk ekspresi publik agama lain. Artinya, di sini perlu penerapan pluralisme internal dan eksternal. Karena perbedaan pendapat itu tidak hanya terjadi antara kita dengan orang lain, tapi juga terjadi dalam tubuh Islam sendiri. Maka dari itulah, di antara keduanya perlu ada lembaga yang mengatasi *rule* tersebut, dan itu adalah ne-

> Kalau kita ingin diterima maka harus ada ruang di mana orang lain dapat menerima kita. Salah satu yang dikembangkan oleh Walzer adalah prinsip-prinsip resiprokalitas, yaitu adanya pengakuan dari luar bahwa, misalnya, hukum yang menjadi argumen saya ini, yang sudah menjadi publik, bisa diterima orang lain bukan karena didasarkan pada agama tapi karena memang hal itu bagus untuk dijadikan sebagai aturan publik.

gara. Sebab, demokrasi tidak mungkin tanpa ada negara. Karena dalam demokrasi harus ada jaminan untuk menjalankan aturan hukum. Demokrasi itu sendiri adalah prinsip-prinsip di mana kita harus bersepakat bahwa mesti ada lembaga yang membuat hukum dan menjalankannya. Jadi demokrasi tidak mungkin berjalan tanpa ada negara. Oleh sebab itu, yang seharusnya mengatasi persoalan-persoalan yang bermunculan adalah negara.

Masalahnya, di tengah situasi seperti ini, di mana kita sedang mengonsolidasikan demokrasi, negara terlalu rentan dan lemah. Sehingga ada suatu paradoks: sementara, pada satu sisi kesempatan politik semakin terbuka, pada saat bersamaan orang-orang yang mestinya mengurusi hukum lemah *(weak)*. Jadi ada dua hal yang paradoksal, yaitu *pertama,* orang semakin ingin menyuarakan kepentingannya. Sementara di sisi lain, orang yang mengurusi saluran-saluran partisipasi itu lemah. Namun, kenyataan ini memang tidak bisa dihindarkan.

Untuk mengatasi persoalan ini di tengah lemahnya negara, maka perlu memperkuat aparat hukum. Polisi, misalnya. Bagaimanapun juga, yang harus mengatasi ini semua adalah polisi sebagai ujung tombak pelaksana hukum. Dalam negara hukum ada aturan bahwa orang-orang yang menyuarakan pendapat tidak boleh melakukannya sambil membawa bambu runcing atau rencong. Jika ada aturan seperti itu, seharusnya polisi tidak perlu ragu-ragu untuk menindaknya. Teorinya seperti itu.

Tetapi kita tidak boleh menyalahkan pihak tertentu atau putus asa, karena hal ini terus-menerus kita temui, yakni negara yang lemah *(weak)*, polisi yang berpihak, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh putus asa dan kemudian malah menyalahkan aturannya. Memang selalu ada jarak antara aturan dalam teori dengan apa yang dilaku-

kan. Bisa dipahami bahwa negara kita, seperti telah saya sebutkan, berada pada situasi yang sangat lemah berhadapan dengan semangat politik yang sedang meningkat. Oleh karena itu, polisi kita harus diberdayakan, dan kalau kerja mereka baik maka harus ada pujian.

> Agama publik hanya mungkin terjadi kalau ada toleransi kepada pihak lain. Karena jika kita ingin ekspresi publik dari agama kita terwujud, maka kita juga harus membuka kemungkinan untuk ekspresi publik agama lain. Artinya, di sini perlu penerapan pluralisme internal dan eksternal.

Termasuk jangan disalahkan ketika polisi menangkap Lia Eden atau Usman Roy yang dianggap menyimpang oleh masyarakat?

Menurut saya, harus disalahkan. Walaupun kemudian persoalannya menjadi sangat kompleks. Namun pada prinsipnya kita harus mengecam itu. Mengecam dalam arti bahwa kalau disepakati bahwa tindak penangkapan adalah tindakan yang tidak tepat dan kita setuju bahwa itu salah, maka kita harus kecam.

Dalam hal perumusan dan implementasi hukum, apakah secara teoretis kita harus berpaku pada hukum yang sifatnya kontraktual seperti konstitusi – yang kerap dilihat sebagai hukum yang berlaku tetap – atau lebih menekankan hukum yang lahir melalui negosiasi dan kompromi terus menerus mengikuti konteks yang sedang berjalan – misalnya, di daerah tertentu karena menghendaki syariat Islam, maka sebagai bentuk kompromi dengan kehendak mereka kemudian dibuat sebuah aturan hukum yang sesuai dengan yang mereka kehendaki dan sesuai dengan tradisi di wilayah tersebut?

Biasanya undang-undang dasar yang mestinya menjadi landasan pokok pertama kita, setelah itu mengacu pada sumber hukum di bawahnya. Misalnya, sekarang ini banyak yang beranggapan bahwa syariat Islam bertentangan de-ngan UUD, berarti mestinya sudah cukup dengan konstitusi. Lantas, bagai-mana hukum pidana atau hukum syariah yang tidak merujuk pada konstitusi, melainkan pada ayat-ayat kitab suci? Menurut saya, itu melanggar konstitusi. Namun untuk menyelesaikan hal itu, saya tidak tahu bagaimana mekanisme-nya. Mungkin bisa diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi atau kalau tidak bisa diubah, mungkin bisa diamandemen.

Saya tidak tahu apakah Mahkamah Agung (MA) bisa mela-kukan sesuatu sebelum masalahnya diajukan kepada mereka atau tidak. Artinya, apakah mereka aktif atau responsif. Misalnya, ka-lau ada perda syariah yang dianggap melanggar, bisa langsung di-tindak oleh MA. Beberapa waktu lalu saya mendengar pernyataan bahwa pada tingkat yang mendasar saja perda-perda syariah itu sudah bertentangan dengan konstitusi, misalnya dengan menjadi-kan ayat-ayat suci al-Quran tertentu sebagai dasar pertimbangan pembuatan undang-undang.

Atau, jangan-jangan kelompok yang mengusulkan syariat Is-lam belum menyadari implikasi jangka panjangnya. Seperti halnya dalam soal reformasi ekonomi, bahwa memang ada hal-hal baik tertentu yang hanya bisa dicapai dengan berorientasi pada masa depan yang panjang, seperti pencabutan subsidi dan sebagainya. Dan memang usul penerapan syariat Islam berlawanan dengan logika politik. Yakni, logika *accountable politics.* Logika bahwa se-orang politisi harus bertanggung jawab kepada konstituennya, de-ngan menjanjikan sesuatu yang sifatnya jangka pendek yaitu lima tahun, agar mereka dipilih kembali dalam pemilu.

Jadi logika yang mendorong politisi untuk mengkampanyekan sesuatu, atau melegalisasi sesuatu, atau mengajukan undang-undang tentang sesuatu, sekarang ini adalah logika berpikir lima tahunan. Padahal, banyak hal-hal baik tertentu yang tidak bisa dicapai hanya dalam rentang waktu lima tahun. Dalam konteks seperti inilah, lagi-lagi, mobilitas politik terjadi karena ledakan dalam demokratisasi yang baru tumbuh. Oleh karena itu, kita harus berani mengambil kebijakan atau membuat aturan hukum yang pahit-pahit namun mempunyai manfaat di masa mendatang.

Wawancara dilakukan di Jakarta, 12 Mei 2007

Percakapan dengan

Ioanes Rakhmat
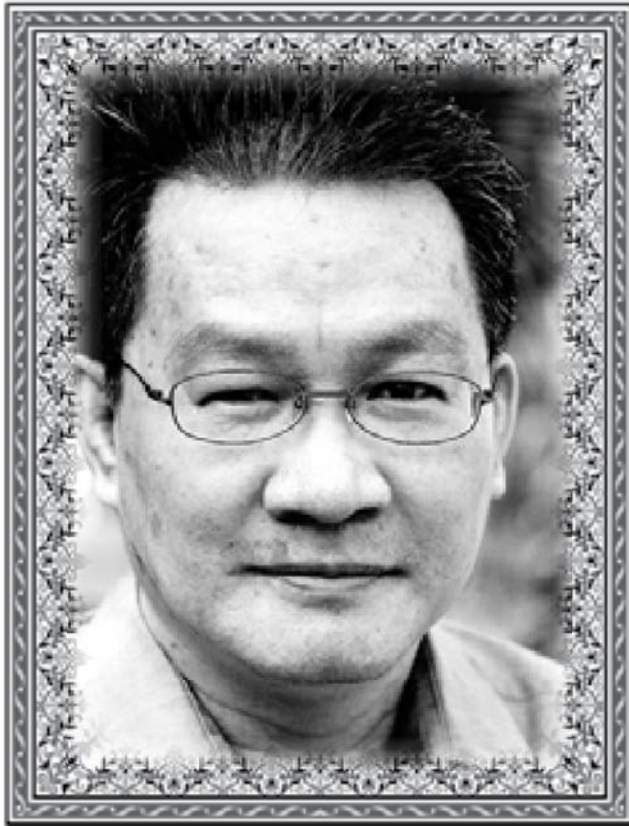
Ioanes Rakhmat, pendeta yang aktif di pelbagai forum antaragama. Ia telah menulis banyak artikel, menerjemahkan buku, dan menghasilkan dua buku: *The Trial of Jesus in John Dominic Crossan's Theory: A Critical and Comprehensive Evaluation* (Jakarta: UPI-STTJ, 2005); *Yesus, Maria Magdalena, Yudas dan Makam Keluarga* (Tangerang: Sirao Credentia Center, 2007). Ia berhasil menempuh studi doktoral di Belanda (2002).

Pancasila adalah pilihan Indonesia. Ia membentuk identitas negara ini tidak sepenuhnya sekular dan tidak pula menjadi totaliter agamawi. Karena itu, kebebasan beragama, apabila dibangun dengan kemauan dan kemampuan politik yang direalisasikan dalam praktik kehidupan, sejatinya dijamin Pancasila. Penting pula kekayaan tradisi dan kearifan lokal yang mendidik warga untuk bersikap toleran, ramah, dan bersemangat gotong-royong terus dikembangkan demi merawat perbedaan; pun menabur pluralisme sebagai pengakuan terhadap otentisitas semua agama yang mengarahkan manusia kepada kehidupan yang utuh: keselamatan. Namun begitu, tetap dibutuhkan perangkat tafsir liberal atas agama yang ditempuh melalui ketaatan terhadap prosedur menjalankan ilmu pengetahuan berdasarkan pada sumber-sumber sejarah dan analisa sosiologis-kultural-historis.

Kami ingin mendapatkan gambaran yang jelas perihal sekularisme dari sudut sejarah. Bagaimanakah sejarahnya hingga sekularisme muncul di Eropa dan dipraktikkan secara mapan?

Proses sekularisasi di Eropa ditandai: *pertama,* oleh keyakinan bahwa akal budi harus diberi tempat utama. Kalau sebelumnya kitab suci dan lembaga-lembaga keagamaan mendominasi penjelasan atas realitas kehidupan, kini dominasi itu diambil alih oleh akal budi yang melahirkan ilmu pengetahuan. *Kedua,* munculnya kesadaran sejarah yang kemudian berpengaruh terhadap cara pandang orang atas kitab suci, khususnya di kalangan Kristen. Kitab suci tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang murni berasal dari wahyu Allah, tetapi didekati secara historis sebagai produk literer dari pelbagai komunitas keagamaan. *Ketiga*, modernisasi dan usaha mengejar *progress*, kemajuan, dalam membangun peradaban manusia. *Keempat*, ter-singkirnya peran lembaga keagamaan seperti gereja dari kehidupan sosial dan politik dalam masyarakat.

Sebelumnya, agama Kristen mendominasi pelayanan publik, seperti pendidikan, pelayanan terhadap orang-orang miskin (*diakonia*), serta pelayanan karitatif di bidang lain untuk kepentingan warga gereja dan masyarakat. Sekarang, dengan perkembangan sekularisasi, fungsi-fungsi sosial yang semula diemban oleh gereja diambil alih oleh negara dan lembaga-lembaga swasta di luar gereja.

Dengan tersingkirnya peran sosial yang semula dimiliki gereja, orang juga kemudian menganggap bahwa gereja tidak bisa lagi dijadikan instansi utama untuk mencari pertolongan. Orang kemudian tidak lagi menggantungkan diri kepada gereja. Dulu orang mencari pinjaman kepada gereja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sekarang telah ada lembaga negara dan swasta yang mengelola

kebutuhan itu. Hal-hal inilah yang membuat warga gereja kurang merasa perlu terlalu dekat lagi dengan gereja. Ini juga disebut sekularisasi, yakni keluarnya orang dari gereja lalu mencari lembaga-lembaga lain dalam mencari pertolongan.

Yang mempercepat dan memperkuat proses sekularisasi adalah kemajuan sains (ilmu pengetahuan), terutama mengenai hal yang berkaitan dengan pertanyaan dari mana manusia berasal dan bagaimana alam semesta terjadi. Sebelum proses sekularisasi gencar terjadi, orang mendapatkan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan itu pada agama. Sekarang, dengan proses sekularisasi yang ditandai dengan kemenangan ilmu pengetahuan atas agama, ilmu pengetahuanlah yang menjadi penjawabnya. Fakta ini jelas dicontohkan oleh teori evolusi yang mampu menjelaskan asal-muasal manusia secara natural. Menurut teori ini, adanya manusia dan terciptanya alam semesta tidaklah memerlukan eksistensi sang pencipta adikodrati sebagai perancangnya. Ilmu fisika menggantikan dominasi agama dalam menjelaskan kejadian alam semesta. Dengan capaian di bidang ini, penjelasan asal-usul kejadian alam semesta tidak lagi diambil dari Kitab Kejadian pasal 1 dan pasal 2 dari kitab suci Perjanjian Lama. Itulah dampak proses sekularisai terhadap gereja dan otoritas kitab suci.

Satu lagi fase penting dalam proses sekularisasi adalah ketika kitab suci mulai diperlakukan sebagai dokumen-dokumen yang lahir dalam sejarah. Dari sini, lahirlah pendekatan yang bersifat kritis-historis dalam memahami kitab suci. Ini menandai sebuah era yang sangat luar biasa dalam perkembangan ilmu tafsir dan hermeneutika Kristen. Kini, dogma tidak bisa lagi apriori menguasai penjelasan terhadap kitab suci, tetapi digantikan oleh penelitian sejarah (*historical research*) dan penelitian-penelitian interdisipliner

lain mengenai sifat-sifat dokumen tertulis yang menjadi bagian dari kitab suci (*literary research*).

Dari penjelasan di atas dan beberapa keterangan yang selama ini kerap Anda sampaikan, tersirat bahwa Anda membedakan antara sekularisasi yang dimaknai sebagai proses dan sekularisme sebagai sebuah paham atau isme, yang merupakan hal yang berbeda dari sekularisasi. Dari telaah tersebut, dapatkah Anda mengelaborasi lebih lanjut tentang perbedaan itu?

Sekularisme, sesuai dengan namanya, yang mengandung kata 'isme' di dalamnya, berarti sebuah ideologi, sebuah paham. Sekularisme tidak lain sebuah doktrin atau penjelasan yang mau menyingkirkan Allah dari realitas kehidupan. Sekularisme adalah paham di mana Allah tidak lagi dipandang sebagai yang ada; sebaliknya, segala sesuatu dianggap lahir dari proses alamiah, natural; atau, sebagai proses yang berlangsung dalam dunia ini berkat prestasi akal budi yang melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Pendeknya, dalam derajat paling ekstrem, sekularisme memang merupakan sebuah ideologi yang sangat dekat atau bahkan dapat disejajarkan dengan ateisme.

Sedangkan sekularisasi merupakan proses yang terjadi di dalam kebudayaan di mana fungsi-fungsi yang semula dipegang agama diganti oleh yang non-agama. Sekularisasi adalah proses di mana agama sebenarnya tidak dihilangkan sama sekali, melainkan tidak diberi peran lagi seperti sebelumnya dalam segala kegiatan publik. Orang yang mau beragama tetap diperbolehkan, dan keberadaan Allah sendiri tidak langsung disangkal. Dalam konteks ini, agama diposisikan hanya berkaitan dengan yang privat, dan tidak boleh

mencampuri urusan ekonomi, politik, ketatanegaraan dalam mengelola masyarakat. Hal-hal yang disebut terakhir ini, kini, dipegang oleh lembaga-lembaga non-keagamaan.

Kecenderungan studi-studi kontemporer mengenai sekularisme dan sekularisasi mengatakan bahwa pada kenyataannya negara-negara yang mempraktikkan sekularisme tidak serta-merta memberangus agama, bahkan Amerika Serikat dalam beberapa hal cukup religius. Oleh karena itu, apakah masih relevan untuk membedakan atau memperlawankan antara sekularisasi dan sekularisme?

Sekularisme adalah paham di mana Allah tidak lagi dipandang sebagai yang ada; sebaliknya, segala sesuatu dianggap lahir dari proses alamiah, natural; atau, sebagai proses yang berlangsung dalam dunia ini berkat prestasi akal budi yang melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Pendeknya, dalam derajat paling ekstrem, sekularisme memang merupakan sebuah ideologi yang sangat dekat atau bahkan dapat disejajarkan dengan ateisme. Sedangkan sekularisasi merupakan proses yang terjadi di dalam kebudayaan di mana fungsi-fungsi yang semula dipegang agama diganti oleh yang non-agama. Sekularisasi adalah proses di mana agama sebenarnya tidak dihilangkan sama sekali, melainkan tidak diberi peran lagi seperti sebelumnya dalam segala kegiatan publik.

Kita juga bisa mendefinisikan sekularisme sebagai suatu usaha konsepsional dalam menjelaskan dan memberi uraian sistematis terhadap proses sekularisasi. Sekularisasi, sebagai proses natural dan sosiologis dalam masyarakat, harus dijelaskan asal-usulnya, kecenderungan perkembangannya, dan sifat-sifatnya. Nah, cakupan penjelasan itulah yang kemudian masuk ke dalam ranah sekularisme. Saya tidak berkeberatan terhadap pandangan ini.

Penerimaan sekularisasi, sebagaimana juga agama, pada akhirnya menjadi urusan individu yang terjadi secara alamiah, bukan konstruk yang disengaja. Penjelasan proses sekularisasi yang Anda berikan juga menggambarkan bahwa proses sekularisasi itu memang terjadi secara sosiologis, alamiah. Bagaimana dengan proses sekularisasi yang dikonstruk dan didorong secara sengaja oleh negara, sebagaimana kasus Turki dan Prancis?

Di dalam suatu negara yang majemuk, agama tidak boleh diberi kewenangan untuk mencampuri urusan politik, misalnya untuk menentukan pemilihan presiden dan wakilnya, sampai penentuan menteri-menteri, apalagi sampai pada perumusan undang-undang. Dalam negara seperti itu, kalau agama tidak dibatasi, yang akan terjadi adalah persaingan dan pertikaian horisontal yang dapat menjurus pada disintegrasi bangsa. Jika demikian kondisinya, ada baiknya negara mempercepat proses sekularisasi di dalamnya. Sekularisasinya adalah dengan tidak menyingkirkan agama sama sekali, tetapi memberinya tempat tersendiri atau mengalokasikan tempat khusus untuk agama, misalnya sebagai sebuah pranata yang boleh dipakai sejauh berurusan dengan masalah privat, tidak boleh dengan masalah politik. Kalau hal ini dapat dilakukan, ini akan berimbas pada efek yang justru bagus, yaitu melahirkan demokratisasi dan modernisasi kehidupan perpolitikan dan perekayasaan sosial masyarakat.

Fondasi dari sekularisme bisa bermacam-macam. Dalam lingkungan Protestan sendiri, apakah teologi menyediakan landasan bagi tumbuhnya sekularisasi, sebagaimana tesis Weber bahwa kapitalisme lahir sebagai sebuah proses yang didorong oleh Protestantisme?

Di dalam kitab suci Perjanjian Lama, pasal-pasal 1 dan 2, sudah sejak awal ditegaskan dengan kuat bahwa dunia atau *nature* tidak boleh diilahikan. Kekuatan-kekuatan di angkasa yang menguasai proses bekerjanya alam semesta, lalu benda-benda langit seperti bulan, bintang dan matahari, yang di masa Pembuangan Israel di Babilonia abad ke-6 SM, semuanya dianggap ilahi, oleh Perjanjian Lama tidak lagi dipandang demikian. Justru untuk melawan pengilahian alam, lahirlah perintah, kredo, pengakuan iman, atau syahadat, dalam Kitab Kejadian pasal-pasal awal itu, yang menegaskan bahwa alam tidak boleh diper-*ilah*. Matahari, bintang, atau bulan adalah benda-benda ciptaan saja yang tidak boleh dijadikan *ilah* yang mengatur hidup manusia. Keilahian disingkirkan dari dunia semesta; ini adalah sekularisasi: dunia adalah dunia, bukan Allah.

Kebebasan beragama akan terjamin jika dibangun dengan kemauan dan kemampuan politik yang serius dan riil, artinya, bukan hanya dijamin oleh UU, tetapi juga direalisasikan dalam praktik kehidupan.

Di samping itu juga ada perintah untuk tidak mengeramatkan dunia. Dunia bukan bagian dari yang ilahi yang tidak bisa disentuh dan dieksplorasi oleh kemampuan kebudayaan manusia. Misalnya perintah "penuhilah bumi", "beranak-cuculah", "kuasailah" dan sebagainya, melahirkan sebuah visi dan praktik kehidupan sosial untuk tidak membiarkan dan memandang alam sebagai yang ilahi, tak tersentuh. Justru sebaliknya, visi ini mendorong manusia untuk menggali, mengeksplorasi dan memanfaatkan alam. Di sinilah terjadi apa yang Weber sebut sebagai *disenchantment of the world*, yang melahirkan sekularisasi.

Jadi ada dasar skriptural yang kuat dalam tradisi Yahudi-Kristen untuk membenarkan proses sekularisasi. Dunia tidak ilahi, tidak ke-

ramat, tetapi harus digali, dieksplorasi dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan manusia. Kalau sebelumnya dunia didekati dengan gentar, seolah manusia berhadapan dengan *numinosum*, cahaya keilahian yang memancar begitu kuat dari alam semesta dan dari dunia tempat manusia diam, yang melahirkan sikap hormat dan tunduk terhadap alam, oleh kitab suci Yahudi-Kristen diubah: manusia tidak boleh tunduk kepada alam melainkan hanya kepada sang pencipta. Alam harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ini yang ikut mendorong proses sekularisasi, yang kekuatannya baru disadari kemudian ketika zaman Pencerahan tiba.

Kalau berbicara dalam alam modern, di berbagai belahan dunia, khususnya di Eropa, bahkan bisa kita lihat juga di Indonesia, ada kecenderungan bahwa kini lembaga keagamaan muncul di ranah publik dengan membawa kemasan yang lain (public religion). *Di Amerika Latin, agama dikemas sedemikian rupa sehingga menampilkan sesuatu yang berbeda: teologi pembebasan, misalnya. Apakah perubahan strategi ini tidak malah dapat mengikis sekularisme atau sekularisasi itu?*

Orang yang yakin bahwa proses sekularisasi sedang berlangsung sangat kuat, umumnya akan melihat masa depan sebagai masa di mana agama kehilangan perannya di masyarakat atau bahkan jadi tidak diperlukan lagi. Tetapi faktanya, setelah melewati beberapa dekade, agama tidak juga hilang, malah bermunculan agama-agama lama dan agama-agama yang dikemas secara baru. Fenomena ini, saya kira, menggambarkan suatu bentuk kesadaran baru bahwa ternyata diri manusia, sekalipun dikendalikan oleh akal budinya tanpa batas, pada

akhirnya akan tetap mengakui adanya suatu kebutuhan spiritual dalam diri yang sudah *built in*, yang merupakan bagian dari genetika manusia yang diturunkan. Makanya, kalau kita perhatikan bagian-bagian otak manusia, di dalamnya ada bagian-bagian yang membutuhkan pengisian dari hal-hal yang *non-logic,* yang supra-rasional, yang bisa jadi hanya bisa dipenuhi oleh agama. Inilah yang membuat agama tidak serta-merta lenyap, kendatipun proses sekularisasi sudah berlangsung dengan sangat kuat.

Yang melawan proses sekularisasi juga adalah agama-agama itu sendiri, yang kalau mau dihilangkan dari luar, ditentang, dan direpresi oleh kekuatan sekular, malah menimbulkan usaha-usaha untuk tegar bertahan dengan mengambil bentuk gerakan-gerakan dari yang ekstrem politis sampai yang hanya melayani urusan batin. Yang pertama, terlihat pada aliran-aliran fundamentalistik dalam semua agama. Dalam kasus pertama ini, proses sekularisasi justru makin memunculkan model-model agama yang disebut dengan fundamentalisme religius. Di lain pihak, muncul agama-agama zaman baru (*New Age*), yang lebih bernuansa mistikal. Allah tidak hanya dicari di luar, di langit, di surga (sebagaimana perspektif ortodoks), tetapi lebih di dalam batin. Saya kira ini merupakan sebuah fenomena menarik yang layak untuk dikaji lebih jauh, bahwa ternyata akal budi tidak bisa menyingkirkan kebutuhan manusia akan yang supra-rasional, trans-historis, mistikal dan adikodrati, yang merupakan kebutuhan inheren manusia yang sudah terpatri secara genetis-biologis. Hal inilah yang menyebabkan kenapa hingga saat ini agama tidak bisa dihilangkan. Hal lain yang menjadi penyebabnya adalah timbulnya reaksi sadar umat beragama untuk tidak dikalahkan oleh sekularisasi. Kesadaran itu dibuktikan dengan membangun doktrin-doktrin keras dan strategi perlawanan baru, di mana titik

yang terekstremnya, lagi-lagi, melahirkan fundamentalisme religius politik, yang sekarang bermunculan di banyak negara, termasuk di negara yang menjadi sumber sekularisasi itu sendiri, Amerika Utara dan Eropa Barat.

Fenomena mutakhir memperlihatkan bahwa deprivatisasi, sebagai lawan privatisasi, tidak bisa lagi dikatakan bertentangan dengan sekularisasi. Problemnya, ketika agama diberi ruang yang teramat luang pada ranah privat maupun publik, justru memunculkan konservatisme dan fundamentalisme. Bagaimanakah mempublikkan kembali agama agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai sekularisme, yang, di samping meletakkan agama menjadi ranah individu, sekaligus juga tidak menjadi pandangan totaliter, mengeksklusi yang lain?

Dalam situasi seperti ini, lebih baik kalau sekularisasi terus berjalan dan desekularisasi juga tidak disingkirkan. Paling baik agama mengambil bentuk sebagai pembawa pencerahan di pelbagai bidang dan ranah kehidupan, termasuk ranah publik-politik. Jadi, berilah tempat untuk agama sesuai dengan fungsi kognitif, moral dan etisnya di kancah sosial-politik dengan tidak menjadikan agama sebagai kendaraan politik, melainkan kendaraan untuk mencerahkan para pelaku politik, agar berpolitik dengan baik dan cerdas, memiliki hati nurani sekaligus watak yang bagus dan terpuji.

Sebagaimana teori klasik mengatakan, kemunculan sekularisasi dilatari dengan modernisasi. Kami minta Anda mengelaborasi lebih lanjut tentang hal itu, khususnya dalam konteks Indonesia. Karena Indonesia, meski sebagian telah mengenal dan mempraktikkan mo-

dernisasi, belum menjadi negara yang sepenuhnya modern. Sebagian besar rakyat Indonesia masih berada dalam alam kehidupan agraris. Dengan kondisi seperti ini, apakah sekularisasi bisa diterapkan di Indonesia?

Dari perspektif sosioreligius, ada yang meyakini bahwa Indonesia, meski belum sepenuhnya modern, telah memasuki era pascamodern. Kalau dalam dunia modern agama tersingkir, karena sekularisme dan sekularisasinya, maka Indonesia di era seperti sekarang ini, agama tidak tersingkir atau lenyap, tetapi tidak juga menjadi pranata yang totaliter atau otoriter menguasai semua sendi kehidupan. Ini dicontohkan dalam bentuk negara yang di dalamnya agama diberi tempat untuk menjadi dasar dan sumber moral dan etik bagi pembangunan, namun tidak boleh mengendalikan politik, atau sebaliknya orang tidak boleh mempolitisasi agama. Agama hanya dibutuhkan untuk menerangi dunia politik, tanpa berpretensi mencampuri. Hal seperti inilah sebetulnya yang sedang terjadi di kawasan dunia luar, yang sudah menyebut diri pascamodern. Agama tidak disingkirkan, tetapi juga tidak menjadi fungsi tunggal dalam politik. Diberi peran, tapi juga dibatasi. Atau sebaliknya, dibatasi, tapi juga diberi peran. Sebuah proses dimana sekularisasi dan desekularisasi dijalankan secara bersama-sama. Untuk Indonesia, kalau situasi seperti ini sedang dijalani, alangkah baiknya diteruskan.

> Sebetulnya liberalisme maupun penafsiran liberal terhadap kitab suci tidak bermaksud menyingkirkan Allah, tetapi ditempuh lebih karena ketaatan terhadap prosedur menjalankan ilmu pengetahuan.

Lantas seberapa sekularkah Indonesia sekarang, sehingga dapat diharapkan menopang kemajuan bersama?

Dari pilihan antara negara sekular atau negara agama, untuk negara Indonesia kita telah menolak dua-duanya. Pilihannya adalah negara Pancasila. Di dalamnya, agama diberi tempat untuk memberi sumbangan pencerahan dalam dunia politik, tetapi tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Indonesia juga bukan negara sekular karena agama diberi tempat penting. Sayangnya, sekarang kita telah kehilangan otoritas Pancasila karena penyalahgunaannya di masa Soeharto. Kini kita berada dalam zaman Reformasi. Belakangan saya bersyukur, karena orang seperti mantan rektor UIN Jakarta, Azyumardi Azra, pernah menulis di koran bahwa kita perlu merejuvenisasi, meremajakan, Pancasila. Tulisan ini lantas disambut dengan banyak dukungan meski banyak juga yang kontra. Tapi ini adalah sebuah langkah yang sangat bagus. Sarana lain seperti siaran-siaran radio juga dapat menjadi sarana-sarana rejuvenasi Pancasila, seperti dilakukan Radio Utan Kayu yang juga terus menayangkan iklan layanan publik yang menginginkan kembali Pancasila untuk menjadi landasan filosofis hidup bangsa. Saya setuju dengan hal-hal itu, dan bagi saya, negara Pancasila adalah negara jalan tengah, di mana negara tidak menjadi sepenuhnya sekular dan tidak juga menjadi totaliter agamawi.

Kita tahu bahwa liberalisme, dalam sejarahnya, adalah "saudara kandung" dari sekularisme sendiri. Kebebasan berpikir, penghargaan terhadap akal budi, sains dan penafsiran kritis-historis kitab suci, lahir setelah kemunculan sekularisasi. Kalau di atas sedikit telah disinggung masalah tafsir, dalam proses liberalisasi sendiri, bagaimanakah

perkembangan tafsir kitab suci khususnya, yang tak bisa dipisahkan dari reformasi Protestan itu?

Sekularisasi, dalam dunia tafsir kitab suci Kristen, telah melahirkan tafsir liberal. Tafsir model ini dan pandangan liberal, oleh sebagian kalangan Kristen dianggap hendak menyingkirkan dimensi adikodrati dalam dunia manusia. Orang-orang liberal itu, kata mereka, menolak mukjizat sehingga segala sesuatu harus hanya dijelaskan secara natural-historis-sosiologis, tidak perlu menerima adanya intervensi yang ilahi. Ini yang dijuluki sebagai posisi liberal. Walaupun demikian, sebetulnya liberalisme maupun penafsiran liberal terhadap kitab suci tidak bermaksud menyingkirkan Allah, tetapi ditempuh lebih karena ketaatan terhadap prosedur menjalankan ilmu pengetahuan. Ketika mau menjelaskan kitab suci, orang-orang yang meneliti dengan semangat liberal seperti ini, harus taat kepada prosedur penelitian ilmiah. Artinya, kalau sedang meneliti suatu peristiwa yang dikisahkan oleh kitab suci, si penafsir tidak boleh tiba-tiba melakukan "lompatan iman" dengan mengklaim adanya intervensi ilahi sebagai penyebab terjadinya peristiwa itu. Jika ia melakukan hal seperti ini, si sejarawan Kristen yang sedang menafsirkan kitab suci secara *critical-historical* ini telah tidak menaati asas-asas penerapan ilmunya. Oleh karena itu kalau ada suatu peristiwa dalam kitab suci yang bisa dijelaskan dengan meng-

Sekularisme sebagai suatu usaha konsepsional dalam menjelaskan dan memberi uraian sistematis terhadap proses sekularisasi. Sekularisasi, sebagai proses natural dan sosiologis dalam masyarakat, harus dijelaskan asal-usulnya, kecenderungan perkembangannya, dan sifat-sifatnya. Nah, cakupan penjelasan itulah yang kemudian masuk ke dalam ranah sekularisme. Saya tidak berkeberatan terhadap pandangan ini.

acu pada sumber-sumber historis atau pada proses-proses alamiah, kita tidak perlu mempostulatkan adanya intervensi yang adikodrati ke dalam realitas sejarah. Semaksimal mungkin si penafsir harus menjelaskan hal-hal yang terjadi di dunia ini dengan menggunakan sumber-sumber historis dan analisa sosiologis-kultural-historis. Inilah salah satu ciri penafsiran liberal dalam kitab suci.

Lantas apa akibat dari penafsiran liberal seperti ini? Penafsiran liberal memang membuat akal budi dinomorsatukan dan Allah disingkirkan. Kaum liberal mengatakan bahwa kalau sesuatu bisa dijelaskan dengan masuk akal, dengan memakai referensi historis-sosio-kultural, kenapa ini tidak dilakukan. Kalau Anda menjadi dokter sekaligus seorang Muslim atau seorang Kristen yang taat, yang percaya pada Yang Maha Kuasa yang bisa melakukan mukjizat, maka ketika mau menyembuhkan pasien, Anda tetap harus dengan konsisten menempuh prosedur ilmu kedokteran. Kita tidak boleh mengatakan bahwa orang yang sakit itu tidak usah diobati, cukup menunggu mukjizat saja; bahwa tidak usah menempuh prosedur umum ilmu kedokteran, cukup menunggu intervensi yang ilahi. Orang yang seperti itu, jika ada, ia akan dapat ditangkap, dan dapat dituduh melakukan mal-praktek dan tidak bertanggung jawab. Posisi hermeneutik orang liberal juga seperti itu. Bukan ia tidak lagi mengakui kemahakuasaan Allah, tetapi karena ia ingin taat-asas menerapkan ilmu penafsiran kitab suci yang memakai referensi natural-sosio-kultural.

Sehubungan dengan teks-teks tentang mukjizat, tafsir kitab suci sendiri, dalam kalangan Kristen khususnya, terbagi ke dalam tiga posisi: posisi *naturalis*, di mana semua hal mau dijelaskan secara alamiah. Ini disebut juga posisi rasionalis. Lalu posisi *supranaturalis*, yang belum apa-apa mengembalikan semuanya kepada intervensi

yang ilahi, sebagai mukjizat. Sehingga, kebenarannya tidak boleh diganggu-gugat, tinggal diterima dalam iman. Dan terakhir, posisi yang melihat teks-teks kitab suci itu sebagai teologi yang dikemas dalam bahasa *mitis metaforis*.

Sekalipun bercerita tentang sejarah atau menyaksikan intervensi yang ilahi, dengan pendekatan teologis, semuanya dilihat dalam kerangka teologi, yang tidak sama dengan sejarah. Posisi terakhir inilah yang dipegang oleh kelompok liberal dalam menafsir kitab suci. Pasti ada maksud teologis ketika sang penulis bercerita tentang terjadinya mukjizat. Maksud teologis inilah yang dicari. Dari sini lahirlah beberapa pendekatan yang sangat ilmiah-kritis-historis, yang umumnya ditentang oleh kaum fundamentalis keagamaan, yang ingin kembali kepada pendekatan literalistik terhadap teks-teks kitab suci. Bagi kalangan fundamentalis literalis biblis, apa yang ditulis, itulah sejarah, itulah yang harus diterima dengan iman sebagai kebenaran. Tidak boleh dilawan dengan akal budi. Kitab suci dikembalikan lagi untuk memiliki otoritas tunggal dalam menjelaskan dan mengarahkan ilmu pengetahuan. Ini kembali ke zaman pra-kritikal sebelum era Pencerahan.

Dari tulisan-tulisan Anda yang tersebar di beberapa media, terlihat bahwa ternyata, dalam kalangan Kristen, ada versi-versi kitab suci atau penafsiran kitab suci yang di

---

Beragama, menurut hemat saya, adalah berziarah. Kita belum selesai, belum tiba di titik final; kita tidak bisa mendaku bahwa agama kitalah yang sudah jadi. Semua agama adalah sedang menjadi, *becoming*, sedang berada dalam perjalanan menuju masa depan yang penuh dengan segala kemungkinan pembaharuan, redefinisi, kelahiran kembali, *rebirth*, perumusan kembali doktrin, dan sebagainya.

---

luar mainstream. *Kami ingin mendapat penjelasan tentang hal itu, kemudian bagaimana dampaknya terhadap agama, karena agama, kalau tidak lagi memiliki pegangan absolut, bisa dikatakan sudah bukan lagi agama. Dengan penafsiran liberal, apakah peran agama tidak malah terkikis?*

Orang-orang kalangan Kristen liberal tidak menyangkal adanya yang Absolut, yaitu Allah. Oleh karena itu mereka masih disebut teolog. Kalau seorang teolog tidak lagi percaya adanya *theos*, Allah, Yang Maha Absolut, maka ia bukan lagi seorang teolog melainkan, katakanlah, seorang sosiolog atau fenomenolog. Masalahnya, Alkitab itu bukanlah pengejawantahan dari yang Absolut menjadi teks seluruhnya. Ini mungkin berbeda dari pandangan *mainstream* di kalangan Muslim tentang al-Quran. Dalam lingkungan penganut agama Kristen, kitab suci umumnya dipandang sebagai kesaksian-kesaksian tentang yang Absolut. Yang Absolut sendiri mutlak, tetapi kesaksian tentangnya tidak. Kesaksian itu dikondisikan, ditentukan dan dipengaruhi zaman. Ketika si penulis kitab suci menafsir apa yang dia dengar sebagai suara yang Absolut atau suara Allah, dia harus memakai kerangka ilmu pengetahuan zamannya, yang tentu sudah berbeda dari ilmu pengetahuan zaman kita. Lebih dari itu, dia juga hidup dalam suatu lingkungan natural-kultural yang berbeda dari lingkungan kita sekarang. Misalnya ada agama yang lahir di kawasan pegunungan di Nepal, di India, di gurun pasir, di gurun Sinai seperti agama Musa, lalu ada yang di padang gurun Saudi Arabia – inilah kondisi-kondisi sosio-kultural, *environmental circumstances* yang memengaruhi sekaligus membatasi bagaimana dulu si penafsir menyuarakan apa yang diyakini sebagai suara yang Absolut itu.

Akhirnya, sekalipun wahyu itu ada dan mutlak, masalahnya ada pada keterbatasan si penerima wahyu, manusia, yang menulis. Ketika si penerima ini menulis, keterbatasannya juga tersalurkan ke dalam tulisan. Karena itu, posisi yang paling bertanggung jawab adalah tidak menolak adanya yang Absolut, seraya tidak mengabsolutkan kesaksian-kesaksian manusia tentang yang Absolut itu. Karena kesaksian itu dikondisikan oleh budaya dan zaman masing-masing penulis kitab suci. Umumnya para teolog liberal memandang secara demikian. Ada juga segmen dalam kekristenan yang memandang lahirnya Alkitab sama seperti *mainstream* Muslim memandang lahirnya al-Quran. Mereka paralelkan saja keduanya. Seolah-olah di surga ada mesin fax. Allah, via "fax surgawi," mengirim tulisannya ke bumi, lalu manusia menerima firman yang sama persis dengan aslinya. Tetapi orang-orang yang berada pada posisi penafsiran liberal-historis-kritis, tidak lagi memandang kitab suci seperti itu. Mungkin juga kalangan Muslim di dalam Jaringan Islam Liberal (JIL) tidak lagi memandang al-Quran sebagaimana kalangan *mainstream* Muslim memandangnya.

> Bagi saya, negara Pancasila adalah negara jalan tengah, di mana negara tidak menjadi sepenuhnya sekular dan tidak juga menjadi totaliter agamawi.

Dalam Kristen, konon, ada kitab-kitab suci temuan-temuan baru di luar mainstream *kitab suci yang dipercayai umat Kristiani sekarang. Dengan kasus ini, posisi sejarawan dan tafsir liberal bagaimana? Lantas, bagaimana dengan posisi umat sendiri?*

Jumlah dokumen dalam kitab-kitab suci Protestan berbeda-beda. Dalam kalangan umum Protestan (mengikuti Martin Luther dan Yohanes Calvin), jumlahnya 27 kitab untuk Perjanjian Baru

atau untuk tulisan-tulisan Kristen yang menjadi *kanon* ('ukuran' atau 'standar' untuk merumuskan ajaran yang benar; kumpulan dokumennya disebut dokumen-dokumen kanonik). Di dalam gereja-gereja Protestan sendiri masalahnya ada lebih dari satu kanon. Kanon Protestan arus utama itu hanya salah satu saja. Ada juga gereja-gereja Protestan, seperti gereja-gereja di Ethiopia, dengan tradisinya sendiri-sendiri, yang memiliki kitab suci yang jumlah tulisannya jauh lebih banyak. Di samping itu, ada Gereja Roma Katolik yang memiliki kanon lebih tebal lagi, karena di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, masih ada sejumlah kitab yang disisipkan ke dalamnya sebagai kanon kedua, disebut sebagai Deutero-Kanonika. Belum lagi ada kanon-kanon gereja-gereja Ortodoks (Mesir, Rusia, Yunani). Kalau ada yang berkeras "Kitab suci kita jumlah dokumennya harus hanya *segini*", itu hanya mewakili tradisi gerejanya. Masih ada gereja-gereja lain dengan tradisi berbeda yang juga memiliki jumlah tulisan suci yang berbeda.

Sebetulnya alangkah baiknya jika kita menganut prinsip "kanon terbuka". Bahwa kanon itu sebetulnya terbuka, bukan dibatasi oleh Allah tetapi oleh sejarah, oleh kepentingan masing-masing aliran gereja. Karena itu kanon bersifat selalu terbuka bagi penambahan di kemudian hari. Posisi seperti ini membuat orang tidak boleh menuduh apa yang tidak ada dalam kanon sendiri sebagai tulisan sesat. Kalau dikatakan bahwa Deutero-Kanonika-nya adalah kumpulan tulisan sesat, orang Katolik sendiri akan segera bersikap: yang emosional akan marah, dan yang lebih intelektual akan menjelasklan mengapa perlu ada tambahan kanon.

Dalam buku *The Complete Gospels* (suntingan Robert J. Miller, 1992, 1994), dimuat lebih dari lima belas dokumen Injil lain selain yang ada di dalam Perjanjian Baru. Injil-injil Yahudi-Kris-

ten saja, bisa saya sebutkan, ada tiga, yaitu Injil orang Ibrani, Injil orang Ebion, dan Injil orang Nasrani. Pengetahuan tentang hal itu sebenarnya bukan hanya muncul ketika ada penemuan-penemuan baru dalam abad ke-20, yang menggemparkan gereja. Orang-orang yang belajar kitab suci Yahudi-Kristen secara luas, sudah lama mengetahui bahwa ada sekian dokumen lain yang non-kanonik, yang ketika dulu lahir dan dipakai memiliki fungsi kanonik dan berwibawa buat masing-masing komunitas yang memakainya.

Kita sekarang mengatakan bahwa kitab-kitab yang diluar kitab suci itu tidak kanonik, bukan firman Allah. Padahal, pada zamannya, ketika kanon 27 kitab Perjanjian Baru itu belum ditetapkan, masing-masing dokumen itu dipakai di dalam gereja dan komunitas-komunitas keagamaan lain sebagai dokumen-dokumen yang kanonik dan berwibawa. Baru ketika kanonisasi membatasi jumlah, yang di luar itu dianggap non-kanonik. Mengacu pada isu mutakhir, di kalangan gereja sekarang mencuat diskusi tentang antara lain *Injil Maria Magdalena, Injil Filipus, Pistis Sophia, Injil Yudas, Injil Thomas,* dan *Akta Filipus*. Yang marak didiskusikan juga dan masih terus akan berlangsung sampai sekian puluh tahun ke depan adalah penemuan makam keluarga Yesus pada 1980, yang pada tahun 2006-2007 diangkat kembali ke permukaan melalui film dan buku-buku. Ini semua melahirkan kontroversi yang panas, yang membuat orang Kristen merasa diombang-ambingkan. Keamanan yang selama ini diperoleh dengan 27 kitab, sekarang dirongrong oleh sejumlah kitab lain yang pernah berwibawa dan yang sekarang dicoba diangkat lagi kewibawaannya. Ini memang gejala yang umum terjadi. Begitu sebuah agama yang fondasi-fondasinya sudah sangat kuat dan mapan selama ratusan bahkan ribuan tahun tiba-tiba dihadapkan pada pengetahuan baru, penemuan

arkeologi baru, penemuan kitab-kitab baru yang setelah diselidiki berusia sangat tua, bahkan lebih tua dari kitab-kitab resmi, tentu saja agama tersebut (dalam hal ini agama Kristen) akan terguncang dengan sangat serius.

Lantas sikap positif bagaimana yang harus diambil? Saya kira bukan dengan atas nama iman atau atas nama sebuah doktrin, suatu umat beragama kemudian buru-buru menolak semua penemuan baru. Itu sikap kekanak-kanakan, tidak produktif, tidak bertanggungjawab, sebagaimana yang pernah gereja jalankan dulu pada masa Abad Pertengahan. Sekarang, dengan zaman yang sudah maju, keterbukaan informasi melalui internet dan media elektronik serta media cetak lain yang tak bisa dibendung oleh siapapun, tidak ada jalan lain yang masuk akal dan konstruktif selain memberikan pengetahuan baru dan membeberkan analisa-analisa, penelitian-penelitian, dan kesimpulan-kesimpulan tentang penemuan baru itu kepada warga gereja. Jangan menganggap warga gereja atau warga agama pada umumnya sebagai orang yang bodoh, yang tidak tahu apa-apa.

Sikap saya dan sebagian besar orang yang berpikir positif terhadap ilmu pengetahuan juga seperti itu. Memberi pengetahuan kepada umat tentang penemuan baru, lalu mempertimbangkan apa implikasi dan konsekuensinya bagi iman. Itu harus dihadapi secara tegar, berani, kritis, terbuka, dan tidak defensif ataupun ofensif. Kalau ternyata ada bagian dari iman yang sudah dipegang selama ratusan bahkan ribuan tahun ternyata tidak cocok dengan fakta sejarah yang berhasil disusun ulang melalui penemuan-penemuan dan teori-teori serta metode-metode baru, maka tidak ada jalan lain selain meredefinisi iman. Begitulah caranya beriman, selalu tanggap pada setiap perkembangan zaman, jika kita meyakini Al-

lah adalah Roh yang hidup dan selalu berfirman secara baru untuk setiap zaman. Selain memperhatikan tradisi yang diwariskan, juga harus mempertimbangkan apa yang sedang berlangsung pada zaman sekarang. Ini yang dinamakan berteologi secara responsif, bertanggung jawab dan tanggap terhadap panggilan zaman. Inilah posisi liberal. Tidak ada jalan lain yang lebih baik selain yang seperti ini. Mengambil jalan yang ekstrem fundamentalistik sama sekali tidak akan produktif dan tidak bertanggung jawab. Mengatasnamakan iman, gereja, Yesus, dan Allah, untuk menolak semua pengetahuan dan semua penemuan baru sama sekali tidak tepat, tidak bertanggungjawab dan tidak produktif. Sekali lagi, yang terbaik adalah dengan menghadapkan fakta-fakta yang ada kepada warga gereja atau umat beragama: ajak mereka juga mengetahui, diskusikan bersama-sama apa akibat dan implikasinya bagi iman, serta berani meredefinisi iman dan doktrin kalau itu memang diperlukan.

> Dari pilihan antara negara sekular atau negara agama, untuk negara Indonesia kita telah menolak dua-duanya. Pilihannya adalah negara Pancasila. Di dalamnya, agama diberi tempat untuk memberi sumbangan pencerahan dalam dunia politik, tetapi tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Indonesia juga bukan negara sekular karena agama diberi tempat penting.

Beragama merupakan kebebasan paling dasar bagi manusia. Bagaimanakah Anda melihat hak dan kebebasan sipil, kaitannya dengan ekspresi keberagamaan, dalam konteks negara, karena dalam praktik kehidupannya, umat beragama juga selalu berhubungan dengan pemerintah dan negara?

Untuk praktik ini, saya kira negara kita harus bisa mencontoh negara-negara maju. Di situ, semua agama diberi kesempatan luas untuk dapat diekspresikan dan dianut oleh siapa saja; negara tidak akan mencampuri. Namun, atas nama hukum ditegaskan dengan kuat, tidak boleh umat yang satu menghina dan membatasi, apalagi membantai umat agama lain. Hak sipil untuk beragama dengan bebas harus dilindungi dan dijamin di samping oleh undang-undang, hukum atau peraturan yang berlaku, juga oleh kemauan politik pemerintah – bahkan untuk memeluk agama yang baru diilhamkan, seperti 'agama' model Lia Aminuddin sekalipun. Dalam negara yang modern dan demokratis yang menjamin kebebasan warganya sebagaimana disebutkan di atas, definisi sah dan tidaknya suatu agama tidak boleh ditentukan oleh negara. Sebaliknya, negara harus melindungi, mengayomi dan mendukung setiap warga negaranya untuk beragama, apapun agamanya, sambil, tentu saja, mendorong umat agama baru yang ada untuk menghayati keberagamaan mereka sebegitu rupa sehingga tidak menyinggung atau menghina umat agama-agama lain yang sudah lama ada.

Yang kedua, bagaimana agama-agama baru yang dilindungi oleh hukum dan negara ini tetap bisa hidup damai dalam suatu masyarakat tanpa menyinggung agama-agama lain? Di sinilah persoalannya. Ini sulit, sebab umumnya, agama yang baru lahir akan mengklaim menggenapkan atau bahkan mengabrogasi agama yang sudah ada. Kalau keadaan damai ini sulit dicapai dan umat agama yang telah ada sebelum agama baru itu tersinggung, pemerintah bisa berperan sebagai katalisator pendamaian, bukan merepresi salah satunya. Inilah posisi negara yang cukup sulit dijalankan untuk negara kita sekarang ini. Terlebih lagi, marak munculnya fenomena paham agama baru sekarang-sekarang ini tidak hanya terjadi

di dalam Islam, tetapi juga di dalam kekristenan. Ini adalah hal serius yang harus dipikirkan pemerintah dan oleh umat beragama pada umumnya.

Kalau melihat pemerintah, senyatanya kita masih melihat berbagai tindak pemihakan terhadap kelompok-kelompok yang sebetulnya bukan mayoritas, tetapi punya peran politik yang cukup signifikan sehingga bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam hal ini, apakah Anda melihat bahwa negara kita sudah mempunyai cukup legitimasi atau justifikasi (capacity state) *atau malah sebenarnya sama sekali belum punya? Tegasnya, apakah konstitusi kita tidak menjamin hak-hak sipil untuk bebas beragama dan berkeyakinan?*

> Liberalisme maupun penafsiran liberal terhadap kitab suci tidak bermaksud menyingkirkan Allah, tetapi ditempuh lebih karena ketaatan terhadap prosedur menjalankan ilmu pengetahu-an. Ketika mau menjelaskan kitab suci, orang-orang yang meneliti dengan semangat liberal seperti ini, harus taat kepada prosedur penelitian ilmiah.

Secara konstitusional sebenarnya kita punya landasan yang sangat kuat dalam hal kebebasan sipil untuk beragama. Undang Undang Dasar (UUD '45) negara kita menjamin setiap individu untuk mengamalkan dan menghayati agama yang dipercayai. Cuma, masalahnya memang, siapa yang menafsir UUD '45 atau perangkat hukum lainnya itu? Lalu apakah si penafsir itu memiliki posisi politik yang kuat di negeri ini atau tidak? Karena kekuatan posisi politik seringkali mengalahkan kekuatan hukum. Artinya, secara hukum, bukan hanya di bidang agama, tetapi juga di bi-

dang-bidang lain, negara kita belum tertib. Masih sering terlihat bahwa pada akhirnya kekuatan mayoritaslah yang menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Ini adalah tantangan bagi kita, semua umat beragama yang berbeda-beda ini, untuk berjuang bersama agar kebebasan sipil beragama dihargai murni sebagai hak sipil dan hak asasi yang harus dilindungi. Kelompok-kelompok politik yang mempunyai kekuatan besar dan berafiliasi dengan agama tertentu juga harus ingat bahwa mereka hidup dalam negara yang majemuk, bukan dalam negara agama, juga bukan dalam negara sekular.

Jadi, kebebasan beragama akan terjamin jika dibangun dengan kemauan dan kemampuan politik yang serius dan riil, artinya, bukan hanya dijamin oleh UU, tetapi juga direalisasikan dalam praktik kehidupan. Pada pihak lain, adalah kewajiban kita bersama dan pemerintah secara umum untuk mencerdaskan bangsa dan membangun mentalitas yang toleran, jujur, dan mengakui bahwa kebebasan beragama itu milik semua orang, bukan hanya milik umat beragama sendiri saja. Untuk membangun suasana seperti ini perlu kerjasama antara semua umat beragama. Saya kira jalannya adalah pemerintah harus memiliki kemauan politik untuk konsekuen dengan UUD '45 dan peraturan yang ada. Kalaupun ada UU ataupun peraturan pemerintah yang dibuat baru atau disusun ulang, wacananya harus dibicarakan terlebih dahulu secara umum. Jangan hanya memihak kepada salah satu agama yang mempunyai kekuatan politik lebih besar daripada kekuatan politik umat beragama lain. Pikirkan juga umat-umat lain yang lebih kecil, yang minoritas, baik di lingkungan internal suatu agama, maupun dalam hubungan antaragama.

Negara yang maju melindungi semua umat beragama di dalamnya, baik yang mayoritas maupun yang minoritas. Bahkan justru terhadap minoritas yang lemahlah, dukungan dan perlindungan pemerintah seharusnya lebih ditampakkan, bukan malah pada yang mayoritas. Kalau kita mempunyai anak yang lemah dalam rumah tangga, misalnya, karena ia sakit atau cacat jasmani, perhatian ekstra harus diberikan kepada yang lemah ini, bukan kepada yang kuat, meskipun juga tidak membenci yang kuat. Namun, ketika mengatur kehidupan, perhatian, perlindungan dan pengayoman harus lebih banyak diberikan kepada pihak yang lemah.

Kalau kita lihat kasus yang terjadi beberapa waktu lalu, seperti penerbitan Peraturan Bersama 2 Menteri (No 9 dan No 8 Tahun 2006) tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah, tampak bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah masih jauh dari memihak minoritas. Di situ masih menyisakan diskriminasi, meski telah dikompromikan. Di atas segalanya, tampaknya, negara kita masih belum bisa berbuat apa-apa untuk menjamin hak atau kebebasan sipil dalam beragama. Bagaimana Anda sendiri melihat hal ini?

Kebebasan sipil dalam beragama hanya bisa efektif dan akan terjamin kalau didukung oleh kedewasaan beragama dan berelasi sosial antarumat beragama sendiri. Maka untuk kasus Peraturan Bersama 2 Menteri itu, di satu sisi, karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, saya setuju bahwa pembangunan rumah ibadah harus dibatasi. Karena pembatasan ini berarti juga membatasi cara-cara penyebaran agama, yang dalam kalangan Kristen di Indonesia sering dilakukan dengan agresif dan ekstensif oleh golongan ekstre-

mis. Kalau tidak ada pembatasan pembangunan rumah ibadah oleh pemerintah, maka hal ini hanya akan memberi kesempatan kalangan ekstremis Kristen untuk menyapu Indonesia. Karena mereka memiliki *power* dan dana yang cukup besar. Kaum fundamentalisme religius ekstrim ini sangat kuat dalam gereja Kristen di Indonesia. Dan bagi saya, tindakan mereka yang selalu ingin memindahkan agama seseorang dari suatu agama lain masuk ke agama Kristen, baik dilakukan secara paksa maupun melalui bujukan, memang harus dibatasi. Kalau tidak dibatasi dengan peraturan yang kuat, legal dan mengikat, maka ini akan bisa membuat banyak pihak direpotkan, karena militansi penginjilan dan pengkristenan sangat kuat dimiliki di tingkat *grass root* orang Kristen Indonesia, meski mereka bukanlah kelompok yang *mainstream*.

Pada sisi yang lain, yang perlu diingat dan diperhatikan oleh para pembuat kebijakan adalah bahwa Peraturan Bersama 2 Menteri itu juga hendaknya jangan sampai menindas agama apapun. Peraturan ini seharusnya dimaksudkan agar relasi sosial-religius dapat berjalan dengan harmonis antara agama-agama yang ada di Indonesia.

Contoh paling dekat, sekarang kita baru saja menghadapi masalah politis-keagamaan di Papua (Manokwari) dengan didesakkannya Perda Inji oleh masyarakat dan Pemda di sana. Di daerah mayoritas Kristen ini muncul suatu tuntutan tandingan yang merupakan kebalikan dari tuntutan di tempat-tempat lain yang mayoritas Islam. Kalau di tempat lain kekristenan tertekan karena kesepakatan dua menteri itu, di Papua justru hal itu dipakai untuk membatasi masyarakat Muslim. Umat Kristen di sana, yang memang menjadi kekuatan mayoritas, ingin menegakkan 'syariat' Kristen. Bahkan wakil-wakil PGI dan lain-lain yang datang ke sana untuk coba

menentramkan dan merestorasi keadaan dengan baik-baik, malah dituduh sebagai agen-agen BIN. Bukannya dapat mendamaikan keadaan dan memulihkan persatuan dan kesatuan, mereka malah mendapatkan demonstrasi yang cukup keras.

Di luar kasus yang terjadi di Papua itu, menurut saya, kalangan *mainstream* Kristen sebenarnya sudah mengerti kalau gerakan-gerakan di tingkat *grass root* Kristen itu memang harus diatur. Kalau tidak, semangat kristenisasi dan politisasi agamalah yang akan sangat mewarnai kehidupan keagamaan di sana, sebagaimana juga terjadi di Islam melalui kalangan FPI dan lain-lain yang paralel. Kalangan Islam moderat sekarang mengalami kebingungan sekaligus kesal dengan gerakan-gerakan ekstremis Islam, sebagaimana kalangan moderat Kristen juga dipusingkan oleh kalangan ekstremis yang ada di dalamnya. Kalau kita tidak menginginkan terjadinya benturan frontal di lapangan antara FPI dan kalangan-kalangan ekstremis Kristen, maka negara harus mengatur, bukan menindas penganut-penganut agama-agama. Di negara yang plural seperti negara kita, peran negara tidak bisa ditiadakan. Kalau umat-umat beragama dibiarkan untuk mengatur dirinya sendiri, orang pasti akan kecewa dan terkejut dengan hasil yang akan dicapai nanti. Jika ini yang dibiarkan terjadi, maka kita akan menyaksikan lebih banyak bentrokan dan konflik daripada harmoni dan perdamaian. Di sinilah

> Yang harus kita pelihara dan kembangkan dalam rangka merawat pluralitas adalah tradisi-tradisi dan kearifan-kearifan lokal, yang mengajarkan dan mendidik orang untuk terbuka terhadap orang lain, untuk banyak menabur kasih dan kebajikan, untuk bersikap toleran, bersemangat gotong-royong, dan ramah.

fungsi katalisator sosial-politis dari negara itu berperan, misalnya melalui Departemen Agama, jika lembaga ini memang layak diandalkan.

Apakah di situ Anda sama sekali tidak melihat adanya ketegangan antara nilai-nilai kebebasan sipil dan hak-hak sipil. Artinya, menurut Anda, apakah negara kita memang sudah cukup baik?

Dari sejak kita masih sebagai bangsa yang dijajah, memang sudah ada perlakuan diskriminatif terhadap kalangan agama tertentu seraya membela kalangan yang lain. Hal ini terus masuk dan berjalan sampai ke zaman kita, khususnya kalau kita memperhatikan campur tangan Barat untuk membela kekristenan di Indonesia. Di situ ada pembelaan terhadap satu pihak yang dilakukan oleh Barat, sementara menekan pihak yang lain. Namun, pada sisi lain, pengalaman kita dalam konflik antaragama seperti Islam-Kristen yang sangat tajam mencuat di zaman Soeharto, dapat memberikan pelajaran bahwa tidak semua pengambil kebijakan, aparat pemerintah, benar-benar mau menghargai hak sipil untuk beragama. Justru mereka memakai agama-agama hanya sebagai wahana untuk memperjuangkan kepentingan politik. Mereka akan bermanuver, melakukan politik adu domba antaragama, hanya untuk mengambil keuntungan darinya. Artinya, ada segi gelap, buruk dan jahat dari para pelaku politik negara kita ketika mereka memainkan agama-agama demi kepentingan politik mereka.

Namun, pada level ideal kita tetap masih mempunyai harapan. Hal ini karena negara kita bukanlah negara agama ataupun negara yang sekular sama sekali. Negara kita adalah negara yang memberi tempat pada agama namun tidak menjadikan suatu agama sebagai

agama negara. Pada saat yang sama, negara kita juga tidak menyingkirkan agama sama sekali untuk menjadi negara sekular. Dalam posisi seperti ini, jika peraturan-peraturan tentang agama dibuat dengan memperhatikan kepentingan dan konsensus nasional, maka mungkin ini tidak akan menyakitkan agama tertentu, seperti yang sekarang terjadi. Sekarang, dengan capaian baru otonomi daerah, justru banyak yang memanfaatkan kondisi ini untuk membangun peraturan-peraturan daerah yang sangat diskriminatif, yang merugikan umat tidak seagama, seperti halnya dengan praktik penerapan perda-perda yang bernafaskan syariat Islam. Inilah yang harus benar-benar diperhatikan.

> Orang-orang kalangan Kristen liberal tidak menyangkal adanya yang Absolut, yaitu Allah. Oleh karena itu mereka masih disebut teolog.

Namun, keyakinan akan keterjaminan hak-hak dan kebebasan sipil warga negara, termasuk hak beragama, tetap ada dan akan terwujud di negara kita, karena berdasarkan pengalaman sejarah, bangsa kita adalah bangsa yang sangat sensitif dan sadar perlunya pluralisme dipertahankan, baik dalam kebudayaan, agama, maupun dalam pandangan politik. Yang oleh karenanya, para pendiri negara kita kemudian bertekad untuk mengayomi semua umat beragama dalam satu ideologi yang pluralistik inklusif, yaitu Pancasila. Dalam konteks kita sekarang, maka yang patut ditunggu adalah kemauan baik dari para penyelenggara negara dan pelaksana kehidupan pemerintahan untuk menelurkan peraturan-peraturan yang melindungi umat beragama. Oleh karena itu, kini, sudah saatnya dialog dan percakapan yang lebih serius itu dibuka oleh pemerintah dan lembaga-lembaga keagamaan.

Terkait dengan dialog yang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda dan membangun pola hubungan antaragama untuk menciptakan kehidupan bersama yang harmonis, kiranya tepat kalau kita membahas tema pluralisme. Sebab, tidak bisa dinafikan, Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri dari banyak sekali suku bangsa, bahasa dan agama. Dapatkah Anda menggambarkan konsep pluralisme?

Pluralisme adalah suatu posisi, keyakinan, *way of life*, doktrin, ajaran, atau ideologi yang mengakui semua agama adalah agama-agama yang otentik, valid, benar, dan mempunyai nilai dan daya untuk mengubah watak manusia, berfungsi positif untuk mengarahkan manusia kepada kehidupan yang utuh, yang disebut dengan keselamatan. Pengakuan bahwa semua agama adalah jalan keselamatan yang baik, yang berbeda-beda, yang dianugerahkan Tuhan, sehingga harus dihargai secara sama rata, tidak boleh ada yang dianggap nomor satu dan yang lainnya dianggap sekunder. Tegasnya, pluralisme menganggap bahwa masing-masing agama merupakan jalan keselamatan yang unik.

Di negeri ini, banyak sekali kalangan yang resisten terhadap pluralisme. Contoh yang terdekat adalah fatwa MUI yang mengharamkan sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Alasannya, pluralisme, misalnya, akan membawa kepada sinkretisme dan relativisme, karena semua dianggap benar, tidak ada yang absolut. Benarkah dengan mengatakan bahwa semua agama memiliki kebenaran dan jalan keselamatan seseorang tidak jatuh pada relativisme dan sinkretisme?

Yang menolak pluralisme religius pada umumnya adalah kalangan fanatik dalam setiap agama, yang kita sebut fundamentalis-

me religius. Dalam kalangan Kristen, hal seperti ini juga ditemukan. Saya sendiri, oleh mereka, dianggap sebagai seorang pluralis yang sudah menolak iman Kristen. Hal seperti ini dapat terjadi, bagi saya, tak lain adalah karena kesalahpahaman kelompok tersebut dalam memahami pluralisme. Pluralisme sebetulnya adalah kemajemukan tanpa meniadakan keunikan. Dalam pluralisme, semua agama tidak dipandang sama, sehingga boleh dilebur menjadi satu, yang disebut sinkretisme. Pluralisme justru mengandaikan bahwa semua agama itu memiliki keunikan, individualitas dan identitas sendiri yang tidak sama dengan agama yang lainnya.

Pluralisme sama sekali bukanlah relativisme. Karena itu pluralisme membuka kesempatan bagi orang yang berbeda-beda agama dengan identitas, jati diri dan keunikannya sendiri-sendiri untuk berdialog. Berdialog itu bukan berarti upaya penyeragaman. Dialog diperlukan hanya kalau agama-agama yang ada berbeda-beda dan masing-masing memiliki keunikan yang dapat ditawarkan kepada agama-agama lain dalam proses pengayaan timbal-balik. Kalau semua agama sama, maka dialog menjadi tidak perlu.

Bagi saya, unsur-unsur pokok dari agama sendiri minimal ada tiga, yaitu *cult, code,* dan *creed. Cult* adalah kultus atau ritual, *code* adalah etika, dan *creed* adalah kredo atau syahadat. Tetapi, di samping ketiga unsur ini, terdapat satu unsur yang lebih mendasar lagi, yaitu *spiritualita*s dan *religiositas*. Fundamen dari agama sendiri adalah pengalaman perjumpaan dengan yang Ilahi. Inilah yang disebut dengan religiositas atau spiritualitas itu.

Di bagian manakah agama-agama bisa menyumbang pada pluralisme, kalau kita menghayati bahwa semua agama sama-sama

unik? Dulu, pertemuan antaragama atau antardua agama diwarnai motivasi untuk memindahkan orang dari agama yang lama ke agama baru. Sekarang, dengan diterimanya pluralisme, dialog akan menghasilkan pertumbuhan timbal-balik antarorang yang berdialog. Misalkan saya yang mewakili Kristen dan Anda yang mewakili Islam berdialog; ketika kita berdialog, saya diperkaya oleh Anda sebagai partner dialog, begitu juga sebaliknya. Akibatnya bukan menimbulkan sinkretisme, melainkan pengayaan. Dari yang semula Kristen menjadi Kristen plus, yang semula Islam menjadi Islam plus, Buddhis menjadi Buddhis plus, dan Hindu menjadi Hindu plus. Faktor plus ini hanya bisa didapat melalui dialog. Apa yang dicapai dalam dialog bukanlah sinkretisme, karena identitas kita masing-masing tetap jelas. Hanya saja, keyakinan dan perspektif keagamaan kita kemudian ditambah dan diperkaya dengan pemahaman yang lain; untuk ini bisa terjadi, orang beragama perlu terbuka terhadap realitas agama lain.

Pertanyaan selanjutnya, apakah perlu semua agama berkembang, tidak statis? Perlu. Sebab beragama, menurut hemat saya, adalah berziarah. Kita belum selesai, belum tiba di titik final; kita tidak bisa mendaku bahwa agama kitalah yang sudah jadi. Semua agama adalah sedang menjadi, *becoming*, sedang berada dalam perjalanan menuju masa depan yang penuh dengan segala kemungkinan pembaharuan, redefinisi, kelahiran kembali, *rebirth*, perumusan kembali doktrin, dan sebagainya. Pemahaman seperti ini akan dimungkinkan kalau semua umat beragama terlibat dalam dialog yang bertujuan untuk memperkaya satu sama lain. Bahwa setelah melewati proses dialog kemudian ada orang yang ingin pindah agama, itu bukan tujuan dari dialog.

Tujuan dari dialog sendiri adalah, pada level doktrinal, kita sama-sama tumbuh dan, pada level praktis, kita sama-sama bersatu mengatasi problem-problem kehidupan, seperti bencana alam, perang, kebodohan, kemiskinan, pengangguran, dengan membangun kerjasama sosial, mengonsentrasikan sumberdaya yang ada, waktu, ketrampilan, dan ilmu agar masalah yang dihadapi dapat lebih efektif diatasi. Hal ini akan lebih mungkin berhasil dicapai kalau dilakukan bersama-sama daripada sendiri-sendiri.

Dalam tradisi Kristen, sekte-sekte itu dianggap sebagai aliran yang lebih rendah dari aliran utama, bahkan ada yang digolongkan sesat. Banyaknya sekte sendiri menandakan adanya perbedaan di dalam tubuh Kristen. Dalam konteks pluralisme, keberbedaan seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengeksklusi yang lain. Bagaimanakah Kristen sebenarnya menanggapi perbedaan sekte-sekte itu?

Kalangan puritan, dalam semua agama, selalu akan menolak sekte yang berbeda dari mereka. Maka kita tidak bisa mengharapkan keterbukaan dan penerimaan terhadap aliran baru agama dari kalangan puritan ini. Kita hanya bisa mengharapkannya pada kalangan *ekumenikal.* Kalangan yang bisa menerima keanekaragaman, yang berkonsentrasi dan bekerjasama dalam "dunia yang satu" (*ekumene*, dalam bahasa Yunani diartikan sebagai "dunia yang didiami bersama-sama"). Dalam Islam, itu bisa terwujud di kalangan pluralis atau liberal.

Pertanyaannya, lantas bagaimanakah posisi orang-orang dari kalangan agama sendiri dalam memandang adanya agama-agama baru yang bermunculan itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan terlebih dulu menguraikan esensi dari agama. Bagi saya, un-

sur-unsur pokok dari agama sendiri minimal ada tiga, yaitu *cult, code,* dan *creed. Cult* adalah kultus atau ritual, *code* adalah etika, dan *creed* adalah kredo atau syahadat. Tetapi, di samping ketiga unsur ini, terdapat satu unsur yang lebih mendasar lagi, yaitu *spiritualita*s dan *religiositas*. Fundamen dari agama sendiri adalah pengalaman perjumpaan dengan yang Ilahi. Inilah yang disebut dengan religiositas atau spiritualitas itu.

Spiritualitas adalah induk dari semuanya. Spiritualitas berasal dari kata *spiritus* yang berarti roh. Jadi spiritualitas merupakan perjumpaan dengan roh ilahi yang melahirkan segala sikap kebaikan. Sementara religiositas merupakan sikap tunduk dan hormat kepada yang induk. Dengan kata lain, spiritualitas adalah api dari agama yang selalu menyala, dan tetap harus dipertahankan menyala ketika agama masuk ke zaman-zaman atau tempat-tempat lain.

Menurut saya, kalau agama memang terlahir dari titik tolak pengalaman spiritual seperti ini, maka kita tidak bisa seenaknya membatasi jika ada kalangan atau individu yang mengklaim telah menerima pengalaman baru perjumpaan dengan yang ilahi, *the divine, the Sacred.* Pengalaman perjumpaan seperti ini, bagi saya, bisa melahirkan agama baru. Kalau kita yakin bahwa roh Allah terlalu besar untuk dikuasai oleh satu agama, maka kita harus terbuka pada kemungkinan munculnya agama-agama baru itu. Kita tidak bisa menolak kemungkinan ini, karena memang sejarah manusia belum berakhir. Abad ke-21 bukanlah abad terakhir. Masih akan ada abad ke-31, abad ke-41 dan seterusnya. Akhir zaman atau kiamat itu mestinya memang tidak akan pernah ada. Berarti agama-agama baru akan terus bermunculan. Karena itu, kemunculan agama-agama baru ini harus kita pandang sebagai pengalaman-pengalaman individu tertentu terhadap kehadiran yang ilahi. Melalui kultus,

kode etik dan kredo, pengalaman akan Yang Ilahi ini dirutinisasikan, dan ini melahirkan institusi agama.

> Proses sekularisasi akan makin memunculkan model-model agama yang disebut dengan fundamentalisme religius. Di lain pihak, muncul agama-agama zaman baru (New Age), yang lebih bernuansa mistikal. Allah tidak hanya dicari di luar, di langit, di surga (sebagaimana perspektif ortodoks), tetapi lebih di dalam batin. Saya kira ini merupakan sebuah fenomena menarik yang layak untuk dikaji lebih jauh, bahwa ternyata akal budi tidak bisa menyingkirkan kebutuhan manusia akan yang supra-rasional, trans-historis, mistikal dan adikodrati, yang merupakan kebutuhan inheren manusia yang sudah terpatri secara genetis-biologis.

Karena yang baru muncul itu menamakan dirinya agama, maka agama yang baru ini pasti akan membangun doktrin, dogma, menetapkan kitab suci, menetapkan perilaku moral dan etika untuk warganya. Maka, cara menanggapi kemunculannya, bagi kaum ekumenikal, adalah bukan dengan melarang atau memberangusnya, melainkan dengan sikap positif terbuka. Kita menerima sambil terus menguji apakah sebuah agama baru itu memang mendatangkan kebaikan atau malah kebobrokan dan kehancuran bagi manusia. Atau dengan kata lain, karena agama adalah perjumpaan dengan roh ilahi, maka tinggal kita uji saja apakah yang dibawa oleh agama baru tersebut roh Allah atau justru roh setan, roh baik atau malah roh buruk.

Pertanyaannya kemudian, lantas dari manakah kita bisa tahu pada posisi manakah dalam dualisme itu suatu agama baru berada? Jawabannya adalah dari dampak yang dihasilkan oleh agama tersebut dalam lingkungan kehidupan manusia yang nyata. Kalau sebuah agama baru lahir dengan menganjurkan umatnya untuk

bunuh diri seraya membunuh orang banyak, atau menghendaki umat yang berbeda untuk dibinasakan – artinya agama ini membawa destruksi bagi manusia – maka agama baru ini harus kita tolak. Tetapi kalau sebuah agama baru itu malah makin membuat semarak kegiatan yang mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan, maka agama baru itu harus didukung. Jadi, yang perlu kita lihat dari agama baru itu adalah dari mana roh yang telah mengilhaminya itu berasal dan apa buahnya. Pohon mangga akan berbuah mangga yang baik kalau akarnya memang baik. Kalau dasar ini yang kita pakai dalam menyikapi kemunculan agama-agama baru, maka akan tidak ada lagi pemakaian dogma dan lain sebagainya untuk menyerang agama yang lain. Sebaliknya, yang akan lebih dikedepankan adalah pemakaian tolok ukur etika yang menyangkut perbuatan hidup di dalam masyarakat. Dari buahnya kita akan mengenal pohonnya.

Tetapi, menghasilkan buah yang baik juga pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh akar yang baik, melainkan juga oleh lingkungan, cara kita merawat dan lain sebagainya. Bahkan terkadang, yang tidak kalah esensial justru pada cara perawatannya; cara kita memberi pupuk dan bagaimana setiap hari kita memperlakukannya. Sampai sejauh ini, sekularisme, liberalisme, dan pluralisme adalah penyokong utama tumbuh suburnya demokratisasi di manapun. Sebaliknya, ketiga gagasan tersebut bertentangan dengan keyakinan kaum fundamentalis, meski pluralitas adalah sebuah keniscayaan untuk Indonesia dengan keragaman budaya, bahasa, agama, etnis dan lain-lain. Namun, dalam praktiknya, meski keragaman dan persentuhan di antaranya sudah dilakukan bertahun-tahun, sampai sekarang masih tetap tum-

buh benih-benih fundamentalisme, selalu muncul orang-orang yang tidak bisa mengiakan keberadaan orang lain di sekitarnya. Pertanyaan besarnya, format ideal seperti apakah untuk membangun hubungan dalam konteks Indonesia yang sangat plural ini?

Menurut saya, hal itu bisa dilakukan melalui perawatan individu umat beragama. Saya kira tentu peran individu sangatlah besar dalam menentukan arah agama, meski yang lebih besar lagi adalah peran umat atau masyarakat. Saya tidak akan menjadi Kristen kalau lahir di Saudi Arabia atau tinggal dan besar di Al-Azhar. Artinya lingkungan sangatlah menentukan kita untuk menjadi si A atau si B. Namun demikian, lingkungan atau komunitas juga dapat berperan menjadi penopang pertumbuhan karakter individu yang makin sehat, atau sebaliknya juga dapat mengindoktrinasi individu sehingga si individu tidak dapat lagi melihat kemampuan pribadinya dan menyuarakan kepentingannya. Kepentingan pribadinya lebur ke da-

---

Pluralisme adalah suatu posisi, keyakinan, *way of life*, doktrin, ajaran, atau ideologi yang mengakui semua agama adalah agama-agama yang otentik, valid, benar, dan mempunyai nilai dan daya untuk mengubah watak manusia, berfungsi positif untuk mengarahkan manusia kepada kehidupan yang utuh, yang disebut dengan keselamatan. Pengakuan bahwa semua agama adalah jalan keselamatan yang baik, yang berbeda-beda, yang dianugerahkan Tuhan, sehingga harus dihargai secara sama rata, tidak boleh ada yang dianggap nomor satu dan yang lainnya dianggap sekunder. Tegasnya, pluralisme menganggap bahwa masing-masing agama merupakan jalan keselamatan yang unik.

---

lam kepentingan komunitas. Hidupnya semata-mata hanya untuk komunitas, bukan untuk diri sendiri.

Bagi saya, merawat atau memperhatikan kepentingan individu itu penting, sebagaimana memperhatikan doktrin dan etika komunitas juga penting. Sayangnya, praktik yang sering kita jumpai, dalam agama yang sangat komunal dengan pemimpinnya yang sangat kharismatis-totaliter, si individu seringkali kehilangan dirinya. Bahkan ada yang mau menyerahkan nyawa dirinya untuk sang pemimpin dan umatnya. Ada relasi yang sangat kuat antara individu dan komunitas dari sebuah umat beragama.

Selanjutnya saya akan menyoroti persoalan kedua dari pertanyaan Anda. Pertanyaannya, bagi saya kira-kira, bagaimanakah cara agar Indonesia – yang dalam sejarahnya telah begitu banyak memperlihatkan diri sebagai sebuah komunitas besar yang ramah dan terbuka – masih bisa dipertahankan dan dari dalamnya fundamentalisme religius dapat dikikis? Jawaban saya, *pertama*, jangan biarkan ada warga negara kita yang masih terus bodoh. Harus ada pendidikan yang merata dan dilandasi oleh filosofi yang mencintai kehidupan dan sesama manusia, dari tingkat perguruan tinggi sampai ke tingkat paling dasar. Pendidikan yang dijalankan haruslah pendidikan yang berwawasan ekumenis, pluralis, liberal, terbuka, toleran dan menghargai kemajemukan.

Kedua, jangan biarkan banyak warga negara kita yang terus hidup miskin. Orang seringkali menganalisa fundamentalisme keagamaan itu hanya dengan menganalisa doktrin-doktrin agama saja, yang memang tidak boleh dilupakan, karena memang doktrin yang fundamentalis akan melahirkan orang yang fundamentalis. Tapi, selain doktrin, lingkungan kehidupan juga sebenarnya sangat berpengaruh. Banyak rakyat Indonesia yang masih hidup dalam

ghetto-ghetto kemiskinan. Di lingkungan semacam ini, agama yang sebenarnya harus melawan kemiskinan, telah juga ikut melahirkan orang-orang yang fundamentalis, orang-orang yang sangat keras, yang anti terhadap umat agama-agama lain, yang ingin melihat dunia segera berakhir dalam bencana semesta apokaliptis di saat mana hanya kelompok mereka sendiri yang akan diangkat ke surga untuk menerima keselamatan kekal. Jadi, kemiskinan juga harus diatasi oleh kita bersama.

Ketiga, yang harus kita pelihara dan kembangkan dalam rangka merawat pluralitas adalah tradisi-tradisi dan kearifan-kearifan lokal, yang mengajarkan dan mendidik orang untuk terbuka terhadap orang lain, untuk banyak menabur kasih dan kebajikan, untuk bersikap toleran, bersemangat gotong-royong, dan ramah. Nilai-nilai positif seperti ini jangan sampai terkalahkan oleh budaya global, yang sekarang menguasai hampir segala sektor kehidupan, yang pada dasarnya adalah budaya Barat.

> Tujuan dari dialog sendiri adalah, pada level doktrinal, kita sama-sama tumbuh dan, pada level praktis, kita sama-sama bersatu mengatasi problem-problem kehidupan, seperti bencana alam, perang, kebodohan, kemiskinan, pengangguran, dengan membangun kerjasama sosial, mengonsentrasikan sumberdaya yang ada, waktu, ketrampilan, dan ilmu agar masalah yang dihadapi dapat lebih efektif diatasi. Hal ini akan lebih mungkin berhasil dicapai kalau dilakukan bersama-sama daripada sendiri-sendiri.

Keempat, membangun dialog, yang dikembangkan bukan hanya pada level para pemuka agama, tetapi dialog yang melibatkan umat-umat beragama pada aras *grass root.* Titik-tolaknya adalah dialog etika-sosial. Contohnya, ketika ada bencana alam, kita yang

dari agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan dari aliran-aliran kepercayaan dan lain-lain, duduk bersama untuk mengatur langkah-langkah mengatasi problem-problem yang ditimbulkan bencana alam itu. Lalu dialog etika-sosial ini dapat dilanjutkan dengan dialog doktrinal, yang di dalamnya kita percakapkan doktrin-doktrin kita. Hal seperti ini yang masih belum dilakukan. Dari dulu, umumnya dialog-dialog hanya dilakukan oleh para pemuka agama-agama. Kini harus diperlebar dengan melibatkan warga. Setelah itu kita bisa masuk pada dialog spiritual – mari kita cerita, apa pengalaman kita masing-masing dengan yang ilahi. Dari sini mungkin akan dapat ditemukan bahwa ternyata umat yang lain juga mengalami kehadiran Allah seperti kita. Kalau kita telah tiba pada kesadaran seperti itu, penghinaan terhadap agama lain sebagai agama yang rendahan, yang tidak bertuhan, dan yang tidak bisa memberikan pengalaman rohani, akan terkikis pelan-pelan, diganti dengan pengakuan yang sama bahwa agama kita semua adalah agama-agama yang betul-betul di dalamnya Allah dapat dijumpai, yang di dalamnya betul-betul ada pengalaman iman dan pengalaman spiritual. Dialog pada level *grass root* inilah yang akan memperkokoh kohesi atau ikatan sosial sehingga umat-umat beragama tidak mudah dicerai-beraikan dan diadu-domba kalau ada orang yang ingin memperalat agama-agama untuk kepentingan politik yang sempit dan partisan.

Dalam konteks ini, harus dicatat, yang tak kalah penting juga adalah peran perguruan-perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat dikatakan merupakan laboratorium eksperimentasi ilmu-ilmu baru untuk menghasilkan sintesis-sintesis baru atas berbagai ilmu dan teknologi, termasuk ilmu-ilmu keagamaan. Perguruan tinggi ini harus melahirkan pemikir-pemikir yang berwawasan lintas-agama,

lintas-kultural, sekaligus lintas-ilmu. Tidak hanya pintar dalam soal-soal keagamaan, tetapi juga mengikuti perkembangan sains. Tidak saja berkutat dengan sains, tetapi juga peduli dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan dan keagamaan. Jika hal ini bisa kita hidupkan, maka kehidupan bernegara dan berbangsa yang dilatari pluralisme, sekularisme, dan liberalisme sangat mungkin untuk dapat tumbuh dengan baik di Indonesia. Saya mendukung ketiga hal ini. Dan bagi saya, kalau ketiga hal ini benar-benar dipraktikkan, bisa mendukung proses demokratisasi dan modernisasi, penghargaan terhadap HAM, pengembangan *civil society*, dan penghargaan atas hak-hak sipil dalam beragama.

Wawancara dilakukan di Jakarta, 21 Mei 2007

Percakapan dengan

Jajat Burhanudin

Jajat Burhanudin, Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta. Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta ini menyelesaikan pendidikan S-1 di tempatnya kini mengajar. Sementara gelar MA dan Doktor ia peroleh di Universitas Leiden, Belanda.

Sebagai kekuatan etis, agama sulit dipisahkan secara tegas dari negara. Sebab agama turut andil sejak proses pembentukan negara ini. Tapi bukan berarti lahirnya kekuatan ideologi non-agama dalam konteks negara bangsa yang mampu mewakili sekaligus menjembatani berbagai kepentingan primordial berbasis agama tidak bisa diupayakan. *Civil society* pun harus mendorong pemikiran dan perilaku politik yang mendukung nilai-nilai demokrasi. Demokrasi yang bukan sekadar partisipasi, tapi aturan-aturan yang merepresentasikan kepentingan pelbagai warga untuk menciptakan *public good*. Maka tidak mungkin membangun demokrasi dengan formalisasi syariah yang mengedepankan agenda Islamisme, sebab penguatan terhadap praktik dan nilai demokrasi ditentukan oleh banyak faktor seperti pendidikan, ekonomi, politik, penegakan hukum, dan pemikiran keagamaan yang progresif.

Apa definisi sekularisme menurut Anda? Bagaimana tanggapan Anda dengan makin resistennya publik Indonesia terhadap sekularisme, terutama setelah difatwa haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)?

Definisi paling dasar dari kata sekularisme adalah pemisahan antara wilayah yang sakral dan profan, yang pada konteks kelembagaan berwujud pada pemisahan antara agama dan negara. Sekularisme itu sendiri merupakan hasil dari proses perkembangan sejarah yang sangat natural. Sehingga, dalam beberapa hal, sekularisme merupakan gejala alamiah yang tidak bisa dihindari. Sejarah umat manusia (Eropa) mencatat terjadinya diferensiasi pekerjaan, sosial, dan kemudian runtuhnya dominasi institusi agama. Negara, dengan seperangkat institusi dan aturannya, menggantikan peran dogma-dogma agama. Sebagai sesuatu yang bersifat historis dan alamiah, tentunya, sangat wajar jika perkembangan serupa dalam beberapa hal berlangsung di negara-negara Muslim pada umumnya.

Kenapa sekularisme dicitrakan negatif di Indonesia, ada dua penjelasan atas hal itu. *Pertama*, Islam memiliki doktrin dan sejarah yang berbeda dengan Barat menyangkut hubungan agama-negara, di mana ajaran Islam tidak mengenal pemisahan agama-negara. Perbedaan itu kemudian diperkuat, sebagai faktor *kedua*, oleh pengalaman sejarah yang menjadikan Islam dan Barat berada pada hubungan yang tidak baik *(dislike relationship)*. Segala sesuatu yang berbau Barat akan berusaha ditolak atau ditandingi dengan konsep-konsep Islam. Ada usaha terus-menerus untuk menolak Barat.

Jadi, menurut saya, meski tidak berdasar pada doktrin Islam, semangat untuk memisahkan agama dan negara dalam Islam pun tidak dapat dihindari. Karena agama memang tidak dapat men-

jangkau seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh sebab itu, saya menyebut sekularisme dalam beberapa hal penting sebagai *historical necessity* atau bahasa Islam-nya *sunnatullah*.

Perdebatan sekularisme di Indonesia telah setua usia negara ini. Sejak awal kelahirannya, para founding fathers *berselisih paham soal identitas Indonesia sebagai negara sekular atau negara agama. Pro dan kontranya hingga kini tak kunjung usai. Dengan kondisi demikian, mungkinkah Indonesia menjadi negara yang sekular?*

Itu sebenarnya menjadi pertanyaan banyak orang, termasuk pribadi saya. Banyak negara Muslim yang mencontoh Barat untuk memisahkan secara tegas antara agama dan negara. Tetapi tidak semuanya berhasil. Turki misalnya, sejak awal abad ke-20 telah secara tegas melakukan pemisahan antara agama dan negara. Namun, hingga saat ini hasilnya tidak seperti yang terjadi di Barat. Kekuatan yang bertentangan dengan sekularisme kini justru mulai bangkit di Turki, seperti diwakili oleh partainya Erdogan. Di Indonesia hal serupa juga terjadi. Tumbuh kekuatan Islamis, baik di dalam maupun di luar parlemen, yang berusaha memaksakan agenda-agenda Islamisme ke dalam negara.

Karena itu, mungkin ada baiknya kita mulai berpikir tentang sekularisme di negara Muslim. Maksud saya, itu berwujud dalam format yang sesuai dengan kondisi kultural bangsa Indonesia. Satu hal yang pasti adalah pemisahan secara tegas antara agama dan negara tidak dapat diwujudkan di negara Muslim seperti Indonesia. Selain karena perbedaan doktrin dan sejarah, karakter *nation-state* negara-negara Muslim khususnya Indonesia juga berbeda. Sejak awal, Islam telah menjadi bagian *inherent* dari proses pemben-

tukan negara (*state formation*) Indonesia. Dan hal itu antara lain berwujud pada tampilnya lembaga-lembaga agama yang bertindak seperti negara (*state-like institutions*), yang masuk ke dalam wilayah publik. Karena itu, di Indonesia, agama selalu dimungkinkan tampil ke ruang publik.

Kondisi tersebut selanjutnya diperkuat keadaan negara yang tidak dapat memenuhi seluruh hak-hak masyarakat. Akibatnya, agama tampil dalam berbagai bentuknya untuk mengisi kekosongan tersebut. Dan tampilnya agama ke ruang publik seringkali diiringi dengan pemaksaan untuk menjadikan ajaran agama mengatur wilayah-wilayah publik yang seharusnya diatur oleh negara. Ini terjadi mulai dari dominasi penafsiran kebenaran, kekerasan atas nama agama, dan lain-lain yang polanya memaksakan penggunaan ajaran agama sebagai aturan pada domain publik.

Karena itu, hemat saya, apa yang perlu dilakukan ke depan adalah upaya mendorong lahirnya kekuatan ideologi non-agama dalam konteks negara-bangsa, yang mewakili dan sekaligus menjembatani kepentingan-kepentingan primordialisme yang berbasis pada agama. Bersama dengan itu, kapasitas negara juga perlu diperkuat untuk meminimalisasi munculnya agama ke ranah publik.

Kita sepakat bahwa sekularisasi adalah kebutuhan mutlak, tapi Indonesia tidak dapat menerapkan model sekularisasi seperti yang telah diterapkan di Prancis atau Turki. Contoh lain dapat disebutkan seperti Kanada yang menerapkan konsep sekularisasi secara lebih soft, *apakah model seperti itu bisa ditiru di Indonesia?*

Ya, dan itu pula yang terpikir oleh saya saat berbicara tentang hubungan agama-negara di Indonesia. Kenyataan historis-sosiolo-

gis Indonesia mensyaratkan hubungan tersebut esksis. Hanya saja, masalahnya adalah bagaimana merumuskan pola hubungan tersebut. Di sini, apa yang dikemukakan almarhum Nurcholish Madjid sangat penting dipertimbangkan, bahwa hubungan tersebut hanya bersifat etis, bukan institusional formal. Negara berjalan dengan aturan dan agenda pemerintahannya; agama tampil sebagai kekuatan etika.

Hal tersebut perlu ditekankan, kendati membangun pola hubungan agama-negara seperti itu secara konsisten bukan hal mudah. Dan salah satu sumber masalahnya, tentu selain faktor-faktor struktural yang sudah saya singgung, adalah mentalitas budaya bangsa Indonesia, termasuk elit-elit agama, belum sepenuhnya mendefinisikan diri mereka sebagai warga bangsa *(citizen),* tapi lebih sebagai umat yang seolah-olah terpisah dari negara. Survey Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) beberapa waktu lalu membuktikkan hal di atas. Misalnya, agama lebih dominan sebagai *identity marker* dibanding kebangsaan. Mereka menjadikan agama sebagai perumusan identitas pertama, yang jauh lebih kuat ketimbang bangsa. Dan hal ini membawa implikasi serius pada perilaku, pemikiran, dan sikap politik mereka. Maka, kini wajar saja ketika ruang partisipasi yang tersedia semakin besar, mereka hadir dengan embel-embel yang bersifat primordialistik.

> Satu hal yang pasti adalah pemisahan secara tegas antara agama dan negara tidak dapat diwujudkan di negara Muslim seperti Indonesia. Selain karena perbedaan doktrin dan sejarah, karakter *nation-state* negara-negara Muslim khususnya Indonesia juga berbeda. Sejak awal, Islam telah menjadi bagian *inherent* dari proses pembentukan negara (*state formation*) Indonesia.

Casanova mengajukan ide deprivatisasi agama: menampilkan agama di ruang publik tetapi dengan cara yang tidak formalistik, lebih santun. Problemnya, di Indonesia kesempatan seperti itu, ditambah lagi demokrasi yang memungkinkan semua golongan dan etnis tampil ke ruang publik, rupanya dimanfaatkan secara berlebihan oleh golongan Islam tertentu untuk memberlakukan syariat Islam secara formal. Bahkan kelompok pengusungnya mengklaim kalau penerapan tersebut sesuai mekanisme demokratis, seperti perda syariat Islam di berbagai daerah. Menanggapi hal tersebut, bagaimana seharusnya mempublikkan Islam di Indonesia? Bagaimana negara harus bersikap melalui konstitusi yang ada?

Itulah yang tadi saya kemukakan, bahwa membagun wajah agama yang *soft*, yakni sebagai kekuatan etis, bukan perkara mudah dan mensyaratkan banyak faktor. Godaan untuk memaksakan agama ke ranah publik sangat besar di Indonesia, khususnya oleh elit-elit agama. Maka, ketika kran keterbukaan dibuka, proses partisipasi politik segera dibarengi dengan menguatnya kekuatan-kekuatan primordialisme yang berbasis pada agama (Islam). Diperparah dengan kondisi sosial-politik dan ekonomi yang tidak menentu, wajar kalau kemudian melahirkan sejumlah problem bagi toleransi dan pluralisme. Karena itu potensi konflik pun sangat kuat.

Menurut saya, untuk membangun hubungan antara agama dan negara yang harmonis, faktor-faktor yang bersifat kenegaraan sangat penting dipertimbangkan, selain sikap dan perilaku keagamaan yang santun, tentunya. *Pertama*, ia mensyaratkan negara mampu untuk secara konsisten melakukan penetrasi (melalui berbagai kebijakannya yang menyangkut *public services*) ke wilayah publik. Misalnya, jika menyangkut hak masyarakat maka negara harus melindungi sebaik-baiknya, jangan kemudian merasa sung-

kan karena alasan agama. *Kedua*, elit keagamaan kita, saya kira, masih mempunyai problem dalam hal berperilaku sebagai warga negara *(citizen)* yang sesungguhnya. Ini berhubungan dengan faktor pendidikan dan ekonomi.

Memisahkan agama dan negara secara tegas memang sulit diimplementasikan, setidaknya hingga saat ini. Harus diakui, agama memang bisa tampil dalam wajah yang *soft*. Namun pertanyaannya kemudian sejauh mana hal itu bisa bertahan? Awalnya bisa *soft*, tapi suatu saat, ketika telah menjadi kekuatan yang besar, kelompok-kelompok agama tertentu bisa tampil keras *(hard)*. Mereka akan memaksakan ajaran agama mereka ke domain publik. Karena itu, menurut saya, menerima begitu saja tesis itu (tesis Casanova) sama dengan bermain api. Suatu saat pasti akan bermasalah, karena negara kita tidak sekuat negara lain, ditambah dengan problem *public services* yang tidak berjalan. Selama negara seperti ini, maka teori-teori seperti itu potensial dan berbahaya mengubah yang *soft* menjadi *hard,* yang pada akhirnya berdampak negatif pada kehidupan demokrasi di Indonesia. Karenanya, pada konteks Indonesia, sekularisme lebih tepat diartikan sebagai usaha terus-menerus dan konsisten untuk membatasi peran agama agar tidak memasuki wilayah publik, seraya memperkuat kapasitas negara untuk bisa memerintah sebagaimana layaknya sebuah negara-bangsa modern.

Meski tidak berdasar pada doktrin Islam, semangat untuk memisahkan agama dan negara dalam Islam pun tidak dapat dihindari. Karena agama memang tidak dapat menjangkau seluruh aspek kehidupan manusia.

Jika agama sulit dikendalikan oleh pemerintah, peran apakah yang bisa dilakukan agama bagi masyarakat di era modern yang jelas-jelas membutuhkan sekularisasi?

Menurut saya agama cukup menjadi urusan individu. Sesuatu yang bersifat publik harus diatur oleh aturan formal negara, bukan aturan agama. Tentu saja, praktiknya tidak semudah itu. Penganut agama di sini memiliki semangat tinggi untuk menjadikan ajaran keagamaan sebagai regulasi yang mengatur wilayah publik. Saya pernah berdialog dengan Pengurus Komite Persiapan Penerapan Syariat Islam (KPPSI) di Sulawesi Selatan. Dia mengatakan: “Coba buktikan aturan mana dari sebuah agama yang melarang kejahatan dan minuman beralkohol, semua agama pasti melarangnya, kemudian mengapa perda syariah menjadi masalah?”

Bagi saya, yang menjadi persoalan bukan aturan-aturannya semata, tapi paradigma pemikiran di balik itu. Yaitu paradigma untuk menjadikan agama atau Islam masuk ke wilayah publik, meskipun beberapa aturannya tampak bersifat manusiawi seperti melarang perzinaan. Soal mengatur perzianaan, kita bisa belajar dari banyak negara. Tidak sedikit kota di negara maju memberlakukan aturan yang melarang prostitusi liar di jalanan, tapi disediakan tempat prostitusi yang legal (lokalisasi). Berbeda dengan di Indonesia, larangan diberlakukan untuk menghapus sama sekali praktik tersebut. Itu sesuatu yang tidak manusiawi.

Jadi, di balik aturan-aturan bernuansa syariah itu terdapat konsep-konsep keagamaan yang menyertainya. Dan ini membuktikkan bahwa sekali mereka (kelompok Islamis) diberi ruang, mereka cenderung nengedepankan agenda-agenda Islamismenya. Maka wajar

jika agama lain juga punya hasrat yang sama, seperti yang terjadi di Manokwari, yang memunculkan Perda Injil.

Ditambah lagi, perangkat hukumnya yang belum tentu siap. Bagaimana jika di daerah yang menerapkan perda syariah terdapat korban yang diperlakukan tidak adil, seperti seorang guru yang ditangkap aparat karena keluar malam tanpa *muhrim*. Ke mana dia harus mengadukannya, ada atau tidak pengadilan tinggi yang mengurusinya? Saya lihat semua itu belum siap. Tapi ironisnya, belum juga kita luruskan perangkat hukumnya, kita malah langsung masuk mendesakkan perda-perda bernuansa syariah.

Jadi, di balik itu, menurut saya, faktor formalisme agama jauh sangat dominan ketimbang keinginan untuk mengatur dan menciptakan kehidupan publik secara lebih baik. Untuk itu, sekali lagi, pemerintah seharusnya konsisten memisahkan antara wilayah agama dan negara. Yang kini terjadi justru sebaliknya, yakni munculnya inkonsistensi negara. Contoh lainnya dapat dilihat pada kasus Ahmadiyah. Ketika mereka diserang oleh kelompok tertentu, pemerintah malah diam saja. Padahal, itu jelas-jelas tindak kejahatan yang tidak bisa dibiarkan.

Seperti halnya sekularisme, liberalisme dari awal memiliki image *pejoratif di Indonesia. Liberalisme sering dikaitkan dengan kolonialisme, karena pada saat Belanda menjajah Indonesia, partai yang berkuasa di negeri Kincir Angin itu Partai Liberal. Pun liberalisme yang hadir sekarang, termasuk yang lebih mengambil bentuk pemikiran atau penafsiran keagamaan, dipandang sebagai perpanjangan tangan kolonialisme dan imperialisme. Hal ini diperparah oleh MUI yang memfatwa haram liberalisme. Menurut Anda, bagaimana seharusnya liberalisme dimaknai di Indonesia?*

Muslim Indonesia (kaum santri) memiliki sikap mental yang selalu mencurigai segala sesuatu yang berasal dari Barat. Itu tidak terjadi hanya pada liberalisme, yang paling kuat justru terhadap sekularisme. Hal ini berhubungan dengan perdebatan tentang hubungan agama dan negara sejak awal Indonesia berdiri sebagai sebuah negara-bangsa. Karena itu, istilah sekularisme seolah memiliki akibat dan citra yang sangat negatif. Liberalisme menjadi isu besar baru belakangan ini saja. Resistensi terhadapnya, menurut saya, juga bisa dipahami dalam kerangka historis di mana terdapat hubungan yang tidak begitu baik antara Islam dan dunia Barat. Dan bagi orang-orang seperti MUI yang konservatif, sangat mungkin mengambil kesimpulan seperti itu. Apalagi MUI adalah institusi semi negara, yang merasa diri sebagai institusi yang paling otoritatif untuk membicarakan masalah agama di Indonesia.

Bagi saya sendiri, pengharaman liberalisme oleh MUI merupakan kesalahan fatal. Apa yang dilakukan MUI untuk campur tangan dalam mengurusi bahkan memberikan fatwa terhadap gerakan pemikiran yang berbeda dengan *mainstream* adalah "penyakit". Ironisnya, ormas lain seperi Nahdlatul Ulama (NU) juga sudah mulai gerah dengan istilah liberalisme, sekularisme, dan pluralisme. Hasyim Muzadi, misalnya, ingin membuat semacam pakem bagi *Ahl al-Sunnah wa al-Jamâ'ah.* Hal ini dia kemukakan karena sekarang sudah banyak orang yang menggunakan NU untuk kepentingan yang sama sekali tidak *nahdlîyîn.*

Lebih ironis lagi, hal itu kemudian dipolitisasi. Ketika Harlah NU, beberapa waktu lalu, banyak spanduk dari Partai Politik berbasis NU yang berisi seputar penolakan terhadap liberalisme. Liberalisme

diidentikkan dengan terorisme sebagai ideologi yang harus ditolak oleh warga Nahdlîyîn. *Bagaimana komentar Anda?*

Memang, ternyata bukan hanya MUI, bahkan di NU kekuatan-kekuatan seperti itu (*conservative Islam*) mulai muncul. Kekuatan untuk melarang pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan keyakinan *mainstream*, termasuk NU. Terus terang saya kaget, sebab kalau ormas seperti NU saja sudah membuat pakem seperti itu, sangat mungkin kalau kemudian akan semakin banyak yang akan diharamkan di Indonesia. Segala sesuatu yang berbeda dengan NU akan dengan mudah ditafsirkan sebagai sesat dan terlarang. Itu adalah tanda kalau kekuatan-kekuatan konservatif mulai berkembang di kalangan NU, bahkan di Indonesia secara umum.

Yang perlu dilakukan ke depan adalah upaya mendorong lahirnya kekuatan ideologi non-agama dalam konteks negara-bangsa, yang mewakili dan sekaligus menjembatani kepentingan-kepentingan primordialisme yang berbasis pada agama. Bersama dengan itu, kapasitas negara juga perlu diperkuat untuk meminimalisasi.

Ketika Indonesia masih dalam jajahan Belanda, pemerintah kolonial membagi Indonesia ke dalam beberapa etnis. Bule yang Eropa-Kristen, Pribumi yang Jawa-Islam, kemudian Cina-Konghucu. Pengelompokan itu menyebabkan segregasi. Apakah itu berimplikasi terhadap lambatnya konsolidasi demokrasi dan kondisi hubungan antaragama dan keyakinan sekarang?

Menurut saya, bukan itu yang paling berimplikasi kuat. Snouck Hurgronje mengatakan bahwa seperti halnya Orde Baru, Islam kultural diperbolehkan berkembang pada masa rezim kolonial.

Contohnya, Ibadah Haji tidak dilarang. Tetapi sekali Islam masuk ke wilayah politik, dia akan dihantam habis-habisan. Karena itu, setiap gerakan kaum Muslim yang melawan pemerintah kolonial, diberantas terus-menerus.

Kebijakan soal pemilahan masyarakat seperti yang Anda katakan tentu berpengaruh, tapi bukan pada poin penolakan terhadap liberalisme. Yang punya pengaruh pada konteks sekarang ini adalah satu proses historis di masa kolonial yang menjadikan elit agama, terutama kaum santri, keluar dari arena politik atau domain kolonialisme, dan kemudian berdiri sendiri sebagai satu kelompok masyarakat dengan ciri khas yang berbeda dengan priyayi yang didukung pihak kolonial.

Dalam kondisi demikian, kaum santri justru menjadi terkonsolidasi sedemikian rupa di pesantren. Mereka mempunyai tradisi yang berbeda, pakaian yang berbeda, dan bacaan kitab yang berbeda dengan kaum priyayi. Kaum priyayi menulis dan membaca menggunakan huruf Latin sebagaimana kolonial, sementara kaum santri tetap menggunakan huruf Arab. Dari sini, kemudian pola pikir yang dimiliki oleh keduanya pun berbeda. Artinya, terdapat *identity marker* yang kemudian mengalami konsolidasi luar biasa di dunia santri, di luar kaum priyayi yang terakomodasi oleh rezim kolonial, dan juga kaum abangan.

Menurut saya, kebijakan kolonial semacam itulah yang tetap berpengaruh hingga ke masa sekarang ini. Maksud saya, berpengaruh pada kehidupan sebagaimana terlihat pada munculnya sikap elit keagamaan yang jauh dari sikap-sikap seorang warga negara. Toleransi menjadi sesuatu yang problematis. Segala sesuatu yang berbau negara dicurigai, karena mereka lama berada di luar kehidupan negara. Menurut saya, itulah yang sekarang menjadi

permasalahan ketika kita membicarakan demokrasi. Yaitu rendahnya kepercayaan elit agama dan masyarakat terhadap negara. Dan golongan seperti itu memiliki jumlah yang cukup banyak. Belum lagi masalah munculnya persaingan elit yang dalam beberapa hal membuat mereka kurang toleran satu sama lain.

Kebijakan kolonial Belanda yang menghancurkan kerajaaan Islam berikut institusi keagamaan di dalamnya—kecuali Surakarta dan Yogyakarta—memberi ruang lebar bagi tampilnya *informal leaders* (ulama) sebagai kekuatan non-negara yang terlibat tidak hanya dalam masalah agama, tetapi juga regulasi sosial-politik masyarakat. Inilah akar historis dari apa yang saya sebut sebagai *state-like institution*. Di satu sisi, proses historis di atas membuat kita memiliki apa yang disebut sebagai *Islam-based civil society*, artinya Islam sebagai kekuatan non-negara yang berpengaruh, seperti NU, Muhammadiyah, dan lainnya. Namun, di sisi lain, masih tetap menyimpan problem seperti toleransi dan *trust* terhadap negara. Itulah yang menurut saya warisan kolonialisme yang masih berdampak hingga saat ini.

> Pada konteks Indonesia, sekularisme lebih tepat diartikan sebagai usaha terus-menerus dan konsisten untuk membatasi peran agama agar tidak memasuki wilayah publik, seraya memperkuat kapasitas negara untuk bisa memerintah sebagaimana layaknya sebuah negara-bangsa modern.

Benar bahwa ormas-ormas Islam merupakan kekuatan non-negara (*civil society*), tetapi pada saat yang sama, kita juga harus bertanya sejauh mana mereka punya sikap, pemikiran, dan perilaku politik yang mendukung nilai-nilai demokrasi. Karena, kalau kita tanya kepada kiyai tentang demokrasi, mereka dengan mudah

menjawab setuju seraya menampilkan sejumlah dalil yang berbasis pada khazanah Islam (kitab kuning). Tapi ketika ditanya soal hidup bersama dengan hak sosial-politik dan beragama yang setara dengan kelompok-kelompok lain, yang berbeda, jawabannya beranekaragam. Misalnya, sikap kelompok tertentu dalam NU yang anti-Muhammadiyah tetap kuat dan banyak, begitu juga sebaliknya. Coba perhatikan kasus yang terjadi di Jawa Timur, Pilkada yang diselenggarakan di sana dinilai sangat problematis. Karena itu Hasyim Muzadi menyarankan agar Pilkada dihapuskan saja. Itu mengindikasikan bahwa elit agama sesungguhnya belum siap berdemokrasi dalam arti yang sesungguhnya.

Demokratisasi di negara yang pernah dijajah Belanda berbeda dengan negara-negara yang sebelumnya dijajah Inggris. India, misalnya, adalah negara yang tingkat perkembangan demokrasinya sangat cepat, meskipun dengan kondisi perekonomian yang rendah. Sementara demokrasi Indonesia hingga kini masih tertatih. Apa yang sebenarnya paling mempengaruhi fakta ini?

Meskipun kolonialisme memang berpengaruh, masalah demokrasi bukan ditentukan oleh apakah suatu negara dijajah oleh Belanda, Inggris atau negara manapun. Demokrasi ditentukan oleh banyak faktor, mulai dari pendidikan, kehidupan ekonomi-politik, penegakan hukum, dan pemikiran keagamaan yang berpihak pada penguatan nilai-nilai dan praktik-praktik demokrasi.

Dalam konteks liberalisme politik, apakah kehadiran parta-partai berasaskan agama, seperti yang marak sejak 1998, bisa dibenarkan?

Saya tidak memiliki kapasitas untuk menentukan itu benar atau tidak. Yang jelas, mereka memiliki hak untuk menyatakan aspirasi politiknya. Tetapi sejauh mana itu akan terus eksis, semuanya ditentukan oleh evaluasi rakyat melalui Pemilu. Dalam beberapa kasus, sebenarnya sudah terbukti bahwa partai Islam tidak pernah menang dalam pemilihan umum. Hasil survey PPIM selalu menunjukkan bahwa masyarakat tidak begitu antusias untuk mendukung partai politik berideologi Islam. Semakin rasional dan modern sebuah masyarakat, bisa dipastikan kalau partai-partai seperti itu dengan sendirinya menjadi semakin tidak diminati.

Benar bahwa ormas-ormas Islam merupakan kekuatan non-negara (*civil society*), tetapi pada saat yang sama, kita juga harus bertanya sejauh mana mereka punya sikap, pemikiran, dan perilaku politik yang mendukung nilai-nilai demokrasi.

Apakah hal yang sama juga akan terjadi pada implementasi syariat Islam, di mana masyarakat tidak lagi tertarik terhadapnya? Lantas, adakah persamaan dan perbedaan antara munculnya gerakan-gerakan Islam dalam melawan kolonialisme dengan gerakan Islam sekarang yang mengusung formalisasi syariat Islam?

Isu syariat Islam pada saatnya kelak hanya sedikit pengusungnya. Benar, keduanya sama-sama menjadikan Islam sebagai simbol dari kehidupan politik yang mereka inginkan. Pada konteks penjajahan, ideologi yang paling mungkin dijadikan alat resistensi terhadap kolonialisme adalah Islam. Makanya, semua perjuangan ketika itu dilakukan melalui tema-tema keagamaan. Islam memiliki konsep *kâfir*. Orang non-Muslim, penjajah, dianggap sebagai

orang Kafir yang halal darahnya. Dari sini, ada semacam kekuatan ideologis bagi Islam untuk tampil sebagai kekuatan alternatif berhadapan dengan kolonialisme. Dan itu sangat efektif, terutama bagi masyarakat pedesaan *(rural),* untuk dijadikan alat mobilisasi massa. Pada 1950-an juga ada sebagian kalangan yang memaksakan Islam untuk dijadikan dasar negara.

Jadi, pengalaman kolonialisme telah meletakkan satu landasan kuat bagi tampilnya Islam yang sarat dengan dimensi politik (anti-kolonial) dan karenanya ulama terlibat sangat intensif dalam masalah-masalah politik (*political engagement*). Di atas itu semua, pembentukan *nation-state* Indonesia memperkuat kecenderungan tersebut. Perlu saya jelaskan, pembentukan *nation-state* Indonesia berbeda dengan Barat. Jika di Barat terlebih dahulu terbentuk *nation* baru kemudian *state,* di Indonesia sebaliknya, *state* dulu baru kemudian *nation*. Maka perdebatan yang muncul di Indonesia adalah seputar bentuk dan ideologi negara.

Karena itu, perdebatan soal agama, dalam hal ini ide pembentukan negara Islam, menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari. Benarlah pernyataan Douglas E. Ramage dari The Asia Foundation (TAF) bahwa Indonesia adalah negara yang paling produktif melahirkan ideologi-ideologi tentang negara pada saat itu. Dan perdebatan itu hingga kini belum selesai, sejalan dengan pembentukan Indonesia menjadi sebuah negara-bangsa modern yang masih dalam proses, belum usai.

Perda syariah yang diberlakukan di beberapa daerah, menurut para pengusungnya, sudah dijalankan melalui prosedur demokrasi. Benarkah seperti itu?

Bagi saya, apa yang telah mereka lakukan itu bukanlah sesuatu yang dapat disebut demokrasi. Mereka sendiri tahu bahwa yang diusungnya adalah sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Sejatinya demokrasi tidaklah seperti itu. Demokrasi tidak sekadar partisipasi, melainkan suatu pemikiran tentang bagaimana kehidupan negara ini dibangun berdasarkan aturan-aturan yang merepresentasikan kepentingan banyak orang dan untuk menciptakan kebaikan bersama (*public good*). Oleh karena itu, yang telah dilakukan oleh para pengusung perda syariah, bagi saya, hanyalah klaim dan alasan yang mengada-ada. Menurut saya, tidak mungkin membangun demokrasi dengan formalisasi syariah. Sebab, syariah seharusnya tidak dijadikan hukum positif untuk mengatur seluruh warga negara yang beragam.

Pengharaman liberalisme oleh MUI merupakan kesalahan fatal. Apa yang dilakukan MUI untuk campur tangan dalam mengurusi bahkan memberikan fatwa terhadap gerakan pemikiran yang berbeda dengan *mainstream* adalah "penyakit".

Pancasila dan UUD 1945 memberikan jaminan terhadap hak dan kebebasan individu dalam beragama dan berkeyakinan. Namun, jaminan konstitusi terhadap kedaulatan individu disalahgunakan oleh kepentingan kelompok agama tertentu untuk menunutut haknya dalam mengimplementasikan syariah yang menurutnya paling sempurna, dengan mengorbankan hak individu lainnya, seperti minoritas agama dan kepercayaan.

Benar, negara telah menjamin *civil rights* dan *religious rights* yang dimiliki oleh setiap individu. Hanya memang masih banyak

terdapat penyimpangan yang sebagiannya justru dilakukan oleh negara. Beberapa waktu lalu saya menerima laporan dari Setara, LSM yang memantau kehidupan beragama di Indonesia, yang menyatakan bahwa negara merupakan faktor yang cukup besar dalam melakukan pelanggaran terhadap hak sipil dan hak beragama. Dengan kejadian ini tidak bisa disimpulkan bahwa undang-undang kita salah. Kesalahan itu lebih terdapat pada praktik pemegang wewenang, seperti MUI, yang telah mengeluarkan fatwa pengharaman keyakinan beragama.

Tapi undang-undang kita hanya mengakui enam agama yang jelas-jelas merupakan bentuk pembatasan keyakinan dan bertentangan dengan religious rights.

Menurut saya, kita memang membutuhkan suatu pemikiran ulang tentang kehidupan keberagamaan. Pembatasan enam agama yang diakui negara jelas menjadi masalah. Tetapi tidak ada campur tangan negara sama sekali di dalamnya juga tidak mungkin. Namun demikian, campur tangan negara yang diberikan seharusnya tidak bergerak pada kerangka keagamaan formal. Harus dibedakan secara tegas kapan negara bisa melakukan intervensi dan kapan tidak. Karena keyakinan tidak bisa dihilangkan, meski manifestasinya bisa saja terlihat tidak lagi beroperasi. Negara tidak bisa melarang seseorang karena menganut keyakinan tertentu, tapi intervensi negara dilakukan manakala melarang orang atau kelompok yang berkeyakinan tertentu yang melakukan perbuatan tidak toleran dengan merusak kehidupan yang lain.

Jadi, menurut saya, negara tidak bisa melarang Ahmadiyah, kecuali jika mereka malakukan kekerasan dan tindak kriminal.

Demikianpun negara tidak bisa melarang pemikiran yang fundamentalis, karena itu hak mereka. Tetapi, ketika pendapat mereka sudah berubah bentuk menjadi penyerangan terhadap minoritas, misalnya, negara harus mengambil tindakan.

Pluralitas Indonesia seringkali menimbulkan masalah, bukan menjadikan kehidupan lebih indah. Bentrok antaragama, antarpaham teologi, dan antaretnis kerap terjadi di Indonesia. Dari situ, kita tahu bahwa penting mendorong pluralisme. Pertanyannya, bagaimana seharusnya pluralisme dipahami?

Di dunia modern seperti sekarang, menurut saya, pluralisme adalah sebuah keniscayaan. Keanekaragaman agama, etnis, sosial, dan politik sama sekali tidak bisa dihindari. Pada konteks Indonesia sendiri, pluralisme menjadi keniscayaan historis dan sosiologis. Apa yang tidak beragam di Indonesia? Semuanya beragam. Melarang pluralisme adalah tindakan yang bertentangan dengan kecenderungan dan fakta historis yang ada di Indonesia. Itu berarti memaksakan sesuatu yang sesungguhnya tidak punya basis yang baik dalam kehidupan sosial maupun agama. Lagi-lagi, karena MUI memaknai pluralisme sebagai sesuatu yang berbeda, akibatnya seperti yang sekarang terjadi. Menurut saya, itu adalah kesalahan MUI yang sangat fatal.

Definisi bisa dibuat bermacam-macam. Itu terjadi karena mereka (MUI) memang mempunyai niat negatif yang didasari oleh semangat fundamentalisme untuk mengatur urusan-urusan keagamaan. MUI tidak hanya melakukan kesalahan interpretasi, tapi motif di belakngnya juga bermasalah. MUI, sebagai institusi semi negara, tidak sadar bahwa fatwa yang dikeluarkannya akan mem-

punyai implikasi sosiologis yang luar biasa besar. Dia tidak tahu bahwa ada sekelompok masyarakat yang menunggu fatwa itu. Jadi, MUI tidak mempunyai bacaan sosiologis yang benar terhadap kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia. Lebih dari itu, fatwa yang dibuat hanya mewakili kelompok kepentingan tertentu.

Bagaimana menerangkan ke publik bahwa pluralisme bukanlah sinkretisme dan relativisme, sebagaimana dimaknai oleh MUI?

Bagi saya, pluralisme adalah suatu sikap atau tindakan yang mengakui keragaman agama, etnis, sosial, dan sebagainya. Pluralisme adalah pengakuan bahwa setiap individu memiliki hak politik dan sosial yang sama.

Kalangan fundamentalis cenderung menilai negatif pluralisme, karena berpandangan bahwa pluralisme meniscayakan tidak adanya the ultimate truth *pada agama. Kalau seseorang beragama Islam maka harus mengakui bahwa Islam adalah yang paling benar, yang lain salah. Bagaimana komentar Anda?*

Menurut saya, tidak ada kebenaran mutlak, termasuk dalam agama. Bagaimana memaksakan *the ultimate truth,* dengan menganggap salah lainnya, sementara masing-masing agama mempunyai konsep yang berbeda-beda? Belum lagi kelompok-kelompok lain yang menganut politeisme, animisme, dan lainnya. Di antara mereka pasti akan berbeda. Hanya saja kaum fundamentalis tidak tahu kalau sebenarnya terdapat beberapa *item* sangat mendasar yang sama pada semua agama. Yang dimaksud *the ultimate truth* oleh mereka adalah Islam dalam versi mereka. Semua orang harus

mengakui bahwa Islam adalah sesuatu yang benar. Padahal dalam Islam sendiri terdapat beragam tafsir. Dan perdebatan mengenai hal itu sendiri sudah berjalan dengan sangat panjang. Yang kacau dan tidak bisa dibenarkan adalah tindakan memaksakan *the ultimate truth* tertentu sebagai kebenaran absolut terhadap orang lain yang berpandangan berbeda.

Persis pada titik itu, dengan keyakinan bahwa Islam memiliki the ultimate truth*, akhirnya membuat beberapa kelompok Islam memaksakan* monisme *beragama. Bagi kelompok ini, tidak ada keragaman atau hanya ada satu kebenaran dalam Islam. Kalau al-Quran mengatakan perangi orang kafir, maka orang kafir berarti musuh. Tidak bisa ada penafsiran lain. Dalam konteks demikian, harus seperti apakah upaya mendakwahkan ulang Islam yang toleran dan pluralis?*

> Hasil survey PPIM selalu menunjukkan bahwa masyarakat tidak begitu antusias untuk mendukung partai politik berideologi Islam. Semakin rasional dan modern sebuah masyarakat, bisa dipastikan kalau partai-partai seperti itu dengan sendirinya menjadi semakin tidak diminati.

Menurut saya, memperkuat pluralisme merupakan agenda yang mendesak untuk dilakukan. Tentu terdapat beberapa cara untuk itu. Pertama, intensifnya kampanye publik tentang pluralisme pada semua lapisan masyarakat. Mendakwahkan pluralisme untuk masyarakat bisa dilakukan dengan banyak cara. Yang terpenting dilakukan adalah menciptakan sebanyak mungkin kegiatan-kegiatan yang bersifat *bridging,* yaitu kegiatan-kegiatan yang membawa mereka pada kehidupan berdampingan dengan kelom-

pok lain, baik agama, etnis, maupun budaya dan sebagainya. Semakin mereka terbiasa dengan keragaman akan semakin kuat pula pluralisme di antaranya.

Selanjutnya, faktor pendidikan. Saya kira sudah waktunya kita mengevaluasi kembali sejauh mana pendidikan kita telah mengajarkan nilai-nilai pluralisme. Apakah nilai-nilai itu sudah teraplikasikan dalam kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, baik itu lembaga pendidikan umum maupun Islam atau agama lain. Jangan-jangan, guru agamanya malah mengajarkan untuk tidak menghargai keyakinan keagamaan lain yang berbeda.

Katolik memiliki basis pluralisme pada doktrin ada keselamatan di luar gereja, yang diterbitkan setelah Konsili Vatikan II. Islam yang notabene agama rahmatan li al-'âlamîn *juga memilikinya, salah satunya, dalam konsep* lakum dînukum waliya dîn. *Konsep ini, oleh beberapa kalangan, dipandang masih bergerak sebatas* coexixtence: *kita adalah umat beragama yang berbeda-beda, karenanya harus saling menghormati. Pluralisme sekarang sudah tidak bisa lagi seperti itu, melainkan harus* proexistence *dengan melakukan pembelaan, advokasi terhadap agama lain dan kaum minoritas yang terzalimi. Adakah landasan Islam yang kokoh dalam pluralisme?*

Saya kira ada. Muslim Indonesia sudah lama terbiasa untuk menerima kehadiran keyakinan yang lain selain Islam. Pada konteks Jawa dulu, orang tidak beragama juga tidak dilarang. Jadi itu bukan sesuatu yang *ahistoris*. Orang abangan yang cenderung percaya pada sesuatu yang non-keagamaan, pada saat yang sama tetap mengaku sebagai Muslim. Sebenarnya masyarakat kita sudah banyak mengakui kebenaran yang lain. Atau kira-kira tidak

mengkonfrontir dua keyakinan yang bertenatangan antara yang berbasis pada kehidupan tradisional dan yang berdasar agama. Dari situ, saya katakan bahwa kebebasan beragama pada konteks Jawa sangat memungkinkan, karena sebelum Islam datang Jawa sudah *established* sebagai sebuah peradaban. Lain dengan Melayu. Melayu merumuskan diri kemelayuannya berbarengan dengan Islam. Di sini tampak bahwa hubungan antara agama dan adat sangat kental.

> Demokrasi tidak sekadar partisipasi, melainkan suatu pemikiran tentang bagaimana kehidupan negara ini dibangun berdasarkan aturan-aturan yang merepresentasikan kepentingan banyak orang dan untuk menciptakan kebaikan bersama (*public good*).

*Orde Baru men-*setting *sebuah tatanan pluralisme di Indonesia melalui konsep SARA (suku, agama, ras dan antargolongan). Padahal konsep ini dihadirkan lebih sebagai segregasi antaragama, sama sekali tidak konstruktif untuk pluralisme secara menyeluruh. Tak aneh kalau kemudian banyak yang mengatakan bahwa justru dari situlah keruntuhan pluralisme Indonesia dimulai. Bagaimana analisis Anda?*

Menurut saya SARA merupakan bagian dari politik Islam Orba. Konsep awalnya berusaha ingin menyatukan semua hal. Mungkin strategi seperti inilah yang pada saat itu dibutuhkan oleh negara. Dalam beberapa hal saya bisa memahami itu. Namun, seharusnya negara mengakui semua keberadaan agama dan kepaercayaan lainnya, tidak hanya sebagian saja. Seharusnya Orba juga memberikan tempat untuk unsur-unsur lokal *(local wisdom),* bukan malah memarginalisasikannya. *Local wisdom* sebenarnya mempunyai banyak sekali pemikiran dan kebijaksanaan yang dapat mendukung plu-

ralitas, sayang tidak digunakan betul. Inilah sumber masalah yang terdapat pada konsep SARA Orba.

Apakah benar SARA pada saat itu memang dibutuhkan?

Ya, sayangnya itu dipraktikkan dengan kebablasan. Awalnya Orba hanya ingin menguasai kehidupan partai politik, tapi kemudian meluas sehingga ideologi-ideologi pun dilarang. Tidak hanya itu, pembatasan yang dilakukan kemudian merambah ke semua aspek, termasuk agama. Karena kekuatan agama di negara ini begitu sentral, maka konsep SARA Orba kemudian memperoleh reaksi balik berupa kekuatan antinegara. Muncullah ideologi pembangkangan masyarakat. Gerakan *counter* ini memiliki eskalasi yang luar biasa besar. Dari sini Orba sadar dan begitu tahu bahwa pembangkangan berlatar agama merupakan kekuatan yang dahsyat, karenanya kegiatan-kegiatan serupa kemudian dilarang secara tegas. Usaha Orba ini memang kemudian menciptakan keamanan, meskipun lebih tepat kalau disebut keamanan semu. Karena setelah pelarangan itu kemudian tidak ada suatu proses partisipasi masyarakat yang lebih baik. Inilah yang saya bilang kebablasan.

Jadi, menurut Anda kemunculan perda-perda syariat Islam merupakan bagian dari reaksi pengekspresian kebebasan yang baru didapat setelah tumbangnya Orba (euforia). Selain euforia sesaat, apa lagi yang bisa Anda lihat dari munculnya perda syariah?

Beberapa kasus memang lain. Aceh, misalnya, tidak bisa dipahami sebagai ekspresi sesaat seperti itu. Aceh punya pengalaman yang panjang soal penerapan syariah, atau minimal orang Aceh

mengklaim bahwa syariat Islam pernah diberlakukan pada masa kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya. Ada semacam *living tradition* yang terus-menerus dikembangkan masyarakat Aceh; syariah adalah sesuatu yang harus diterapkan di Aceh. Sementara selain Aceh, saya kira banyak faktor yang bisa menjelaskannya, bisa saja faktor euforia politik seperti yang Anda sebutkan tadi.

Formalisasi syariat Islam menurut para pengkritiknya adalah bentuk penerapan hukum positif yang dapat merusak pluralisme. Banyak sekali kaum yang dirugikan olehnya, seperti perempuan dan kaum minoritas (agama dan kepercayaan). Bagaimana Anda menanggapinya?

Memang, ketika syariah diformalkan akan berdampak luar biasa. Di Tangerang, misalnya, perempuan yang keluar malam ditangkap karena dianggap sebagai PSK. Karena perda ini tidak menyediakan kelengkapan perangkat hukum, maka perempuan sebagai korban sama sekali tidak memiliki kejelasan sarana untuk mengadukan permasalahannya. Berbeda dengan di Aceh yang sudah memiliki Mahkamah Tinggi Syariah, yang sudah mengenal proses banding dan sebagainya.

Lebih dari itu, problem sosiologis yang tercipta juga tak kalah luar biasa. Dari kacamata ini, kita tahu kalau perempuan selalu menjadi subyek yang dirugikan. Perda syariah sangat bias gender. Tak kalah dirugikan juga adalah kaum minoritas. Menurut saya, semakin menguat gerakan formalisasi syariah, akan semakin negatif pula dampaknya. Namun demikian, menurut pengamatan saya, sebagaimana telah disampaikan di atas, trend formalisasi syariah di daerah-daerah tidak akan berumur terlalu panjang. Tidak semua daerah mempunyai basis historis dan sosiologis seperti di Aceh.

Menurut Anda, trend ini kira-kira akan bertahan berapa tahun ke depan?

Mereka masih akan bertahan selama kondisi negara belum membaik dari segi ekonomi, hukum, pendidikan, maupun politik. Semakin kita banyak kekurangan pada sisi-sisi itu, maka semakin banyak juga orang yang akan mencari alternatif lain di samping konsep negara yang sudah ada. Jadi, tunggu saja. Makanya, menurut saya, sikap antinegara sudah tidak bisa dikedepankan lagi. Sebab, kapan kita akan bisa membuat suatu pembangunan yang *sustainable,* yang berdampak besar bagi perubahan negara, kalau perilakunya masih tidak demokratis begini.

Religious freedom *di Indonesia selain mendapat rongrongan dari perda syariah, juga dari institusi semi resmi, seperti MUI. Pelarangan Ahmadiyah, salat dua bahasa (Usman Roy), Komunitas Eden dan sebagainya adalah faktanya. Negara telah melakukan pembiaran terhadap pengrusakan dan pembatasan keyakinan seseorang dan kelompok. Bagaimana tanggapan Anda terhadap kondisi yang meruntuhkan pluralisme?*

Persis itulah yang saya maksudkan bahwa ada banyak wilayah yang seharusnya negara tetap campur tangan dalam kehidupan masyarakat, bukan dalam kehidupan keagamaan atau keyakinan yang personal. Kalau negara sampai melarang keyakinan, itu tidak benar. Tapi negara berhak melarang manifestasi keyakinan ke dalam wilayah yang semestinya menjadi domain negara.

Penyerangan terhadap Ahmadiyah jelas merupakan kekerasan sosial dan keagamaan, suatu tindak kriminal di mana para pelakunya

harus dikenakan sanksi hukum. Oknum-oknum yang merusak kafe-kafe dan melarang penerbitan Majalah *Playboy* bahkan dengan merusak kantornya harusnya ditindak, karena itu sudah menyangkut masalah keamanan yang menjadi tanggung jawab negara. Bagaimanapun hak-hak masyarakat, seperti hidup aman, tenang, dan sebagainya, harus dilindungi oleh negara. Untuk menciptakan kehidupan seperti ini mensyaratkan negara yang punya penetrasi proporsional terhadap masyarakat. Di sinilah pentingnya penegakan hukum. Karena itu, menurut saya, tidak ada salahnya kalau kita mendukung negara, karena kita butuh negara yang kuat. Jika negara tidak kuat akan banyak faktor lain yang masuk dan coba menguasai domain publik.

Negara tidak bisa melarang seseorang karena menganut keyakinan tertentu, tapi intervensi negara dilakukan manakala melarang orang atau kelompok yang berkeyakinan tertentu yang melakukan perbuatan tidak toleran dengan merusak kehidupan yang lain.

Kalau Anda lihat karya-karya tentang *civil society* di Indonesia, cukup banyak yang memaknai *civil society* sebagai kekuatan tandingan terhadap negara. Yang agak berbeda sebenarnya Cak Nur, yang memahami *civil society* dalam kerangka keadaban, dengan seruan mengisi kehidupan negara dengan konsep dan nilai demokrasi modern. Sarjana lain cendrung memahami *civil society* sebagai kekuatan antinegara. Menurut saya, kini sudah waktunya untuk mengubah *civil society* yang antinegara menjadi pro negara. *Toh* negara sekarang sudah demokratis. Jadi perlu mengubah paradigma *civil society* yang tidak punya *trust* kepada negara menjadi yang memperkuat institusi negara dengan cara-cara dan kultur yang

demokratis. Pada titik inilah, perlu adanya perubahan paradigma hubungan *civil society* dan negara.

Penodaan terhadap pluralisme, dari penjelasan Anda, tampak lebih disebabkan oleh lemahnya negara. Tapi demokrasi juga membutuhkan negara yang tidak terlalu kuat, karena kekuatan negara justru akan mengembalikan Indonesia kepada otoritarianisme. Bagaimana menurut Anda?

Kita harus membedakan konsep negara kuat dari otoriter seperti yang dipraktikkan Orba. Negara kuat adalah negara yang punya kapasitas untuk memerintah sesuai dengan prinsip-prinsip *good government*. Ketika ada kelompok yang hak-haknya terganggu, negara harus melindungi.

PPIM sering melakukan survey tentang kondisi sosial kemasyarakatan, termasuk masalah keberagamaan. Dari situ, apakah masyarakat kita telah memiliki keterjaminan civil rights *dan* civil liberties *yang memadai dari negara? Kalau sudah, tolong jelaskan, dan kalau belum, mestinya negara harus berbuat apa?*

Negara perlu hadir sebagai sebuah *state* yang modern. Artinya yang menjamin hak-hak hidup rakyatnya, baik dalam kehidupan beragama, ekonomi, maupun politik dan lain sebagainya. Dan itu yang sekarang sedang dilakukan negara, meskipun, karena berbagai faktor krisis, menjadi tidak begitu kuat. Faktor lain yang menambah deretan masalah dalam hal ini adalah tindakan kelompok masyarakat sendiri yang tidak memiliki sikap kewarganegaraan kuat sehingga justru melahirkan kekuatan-kekuatan antinegara. Dalam

skala luas, hal demikian tentu akan berdampak sangat serius terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Beberapa survey PPIM, misalnya, menemukan fakta bahwa sikap intoleransi semakin menguat di dalam masyarakat, sementara rasa kenegaraan atau semangat kebangsaan justru makin memudar. Belum lagi masih kuatnya faktor agama sebagai *identity marker* dibanding negara. Itu problem-problem yang cukup serius. Karena itu, pada tingkat elit, sekali lagi saya katakan, perlu adanya *mainstreaming* kebangsaan. Selain itu, sebagaimana telah saya katakan, negara harus mempunyai daya penetrasi yang memadai terhadap rakyatnya, bukan membiarkan agama untuk masuk menguasai domain publik dengan ideologi yang justru bertentangan dengan kepentingan orang banyak.

MUI, sebagai institusi semi negara, tidak sadar bahwa fatwa yang dikeluarkannya akan mempunyai implikasi sosiologis yang luar biasa besar. Dia tidak tahu bahwa ada sekelompok masyarakat yang menunggu fatwa itu. Jadi, MUI tidak mempunyai bacaan sosiologis yang benar terhadap kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia. Lebih dari itu, fatwa yang dibuat hanya mewakili kelompok kepentingan tertentu.

Melihat kondisi kehidupan keagamaan di Indonesia sekarang, kira-kira bagaimana perjalanan pluralitas kehidupan Indonesia ke depan? Apakah akan semakin terjaga atau sebaliknya semakin memprihatinkan?

Untuk beberapa saat kita masih akan menghadapi hambatan yang tidak mudah untuk bisa mewujudkan idealitas pluralisme di Indonesia. Namun, kita masih harus terus mengintensifkan kiner-

ja nilai-nilai pluralisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya yakin, seiring dengan terciptanya tata kehidupan politik, ekonomi dan lain sebagainya secara lebih baik, kekuatan-kekuatan anti-pluralisme, lambat laun, akan hancur dengan sendirinya.

Wawancara dilakukan di PPIM Jakarta, 8 Februari 2008

Percakapan dengan

Jalaluddin Rakhmat

Jalaluddin Rakhmat, Kepala SMU Plus Muthahhari Bandung. Ia pendiri sekaligus Ketua Dewan Syura Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) dan juga pendiri Islamic College for Advanced Studies (ICAS) dan Islamic Cultural Cennter (ICC) Jakarta. Ia mendapat gelar MA studi Komunikasi dan Psikologi dari Iowa State University dan gelar Doktornya dari Australian National University (ANU).

Soteriologi merupakan bagian dari pembahasan agama yang berkaitan dengan keselamatan. Setiap agama mempunyai soteriologinya masing-masing. Sementara pluralisme menegaskan bahwa semua agama berpeluang memperoleh keselamatan pada hari akhir. Namun begitu, pandangan yang mengatakan bahwa karena setiap agama selamat sehingga siapapun boleh berpindah-pindah agama sesuka hatinya adalah keliru. Itu sinkretisme, pandangan yang mencampur dan menjalankan semua agama sekaligus. Untuk itu, pluralisme pun tidak bisa hanya diotak-atik dengan logika, sebab harus dilengkapi dengan pengetahauan filsafat yang memadai, paling tidak filsafat sebagai cara berpikir.

Terus bergulirnya kontroversi seputar paham pluralisme di negeri ini, terutama sejak MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengharamkannya, mendorong kami untuk beroleh penjelasan dari Anda bagaimana mendudukkan konsep tersebut dalam hubungannya dengan persoalan keagamaan.

Jika kita mencari (*search*) kata *pluralism* dalam internet, maka akan mendapati bahwa salah satu kategori pluralisme adalah pluralisme yang dikembangkan oleh para teolog di bidang keagamaan, yakni pluralisme religius (*religious pluralism*). Di sana ada kalangan fundamentalis Kristen yang mengutip Alkitab untuk menolak pluralisme. Sementara itu, yang mendukung pluralisme agama juga mengemukakan argumentasi-argumentasinya dengan berdasarkan Alkitab. Memang, saya kira, kalau kita mau menyebarkan pluralisme di kalangan kaum Muslim atau di kalangan umat beragama, kita harus menggunakan dalil-dalil agama. Mendukung pluralisme tanpa mengemukakan dalil-dalil agama tidak akan didengar oleh umat beragama.

Membincangkan pluralisme tanpa dalil-dalil agama berarti menempatkan pluralisme sebagai kajian akademis – pluralisme di level sosiologis, misalnya, di sini pluralisme dipahami sebagai gejala sosiologis ketika masyarakat pada akhirnya berkembang menjadi masyarakat yang pluralistik. Namun begitu, pluralisme yang hendak kita bahas di sini bukan pluralisme sebagai gejala sosiologis, tapi sebagai sikap beragama.

Saya kira, mengapa pluralisme kaum liberal cenderung tidak diterima oleh kaum Muslimin adalah karena mereka tidak mempunyai rujukan dalam al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalangan Muslim akan berkata, "*what are you talking about?*", kalau

Anda berbicara tentang pluralisme sebagai gejala sosiologis. Sebab, Anda tidak perlu menghubungkannya dengan agama, *go ahead!* Jika dalam konteks tersebut Anda membincang pluralisme, barangkali saya pun tidak begitu memedulikannya.

Lalu, bagaimana mengkomunikasikan bahasa yang berbeda antara kalangan fundamentalis yang menolak pluralisme, yang melandaskan diri pada al-Quran, dengan kalangan pluralis, seperti Anda yang mendukung pluralisme dan juga sama-sama merujuk pada al-Quran dan Hadits?

Saya juga tidak mengerti mengapa ada orang yang mengartikan pluralisme dengan caranya sendiri. Ada sahabat saya dari kalangan fundamentalis yang mengartikan pluralisme sebagai paham yang menyatakan semua agama benar; paham yang menyatakan semua agama sama. Saya sendiri mendefinsikan pluralisme sebagai paham yang menyatakan bahwa semua agama mempunyai peluang untuk memperoleh keselamatan pada hari akhirat. Kalau begitu, tidak ada cara apapun untuk berkomunikasi, karena, bagaimanapun juga, kita tengah berbicara tentang makhluk yang lain. Jadi kalau kaum fundamentalis mengartikan pluralisme dengan caranya sendiri, begitupun saya mengartikan pluralisme dengan cara saya sendiri pula, artinya kita mempunyai definisi yang berbeda. Secara filosofis tidak mungkin terjadi diskusi. Tampaknya kalaupun kita bertengkar, mungkin kita bertengkar tentang sesuatu yang berbeda. Ironisnya, perbedaan definisi itu dijadikan argumen untuk menentang pluralisme. Mereka menolak pluralisme karena pluralisme diartikan macam-macam. Itu menurut saya sesuatu yang menggelikan.

Termasuk ketika mereka mendefinisikan pluralisme sebagai sinkreatisme misalnya?

Saya menemukan kaum liberal di Indonesia dalam beberapa hal ternyata anti-pluralisme. Dan saya heran mereka mengusung pluralisme tapi pada saat yang lain sikapnya sangat tidak pluralis. Misalnya dalam hal diskusi tentang poligami di televisi. Kaum liberal dalam diskusi tersebut sama sekali tidak bisa menerima pandangan kaum fundamentalis. Artinya, kalau kita kembali kepada bahwa pluralisme adalah soteriologi, saya menemukan dalam sikap mereka bahwa kaum fundamentalis tidak akan selamat. Mereka berpendapat seperti itu. Kaum fundamentalis dicap bodoh, kampungan, dan memanipulasi al-Quran. Ketika kaum fundamentalis berbicara mereka ribut, mereka tidak mau mendengarkan pendapatnya. Menurut saya, akhlak kaum fundamentalis dalam acara debat di televisi itu lebih pluralis daripada kaum liberal.

Ya. Jika pluralisme diartikan seperti itu jelas keliru. Kaum fundamentalis menentang pluralisme karena paham ini dianggap tidak jelas, merepresentasikan hal-hal yang berbeda. Penolakan ini tidak tepat. Apalagi jika pluralisme diartikan sebagai sinkretisme atau relativisme. Sementara kita, kalangan pluralis, membedakan antara apa itu pluralisme dengan apa yang disebut sebagai sinkretisme dan relativisme. Bahkan kita juga membedakan antara pluralisme dengan eksklusivisme. Kalau orang menentang suatu pendapat dengan mengatakan bahwa pendapat itu mempunyai definisi yang bermacam-macam, maka yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah penyamaan definisi.

Berkembang pandangan mutakhir bahwa pluralisme tidak cukup dengan toleransi, tidak cukup pula hanya dengan dialog teologis, tetapi

harus ada pengakuan politik (political recognition) *terhadap kaum minoritas, demi menciptakan atmosfer kehidupan bersama yang harmonis dan saling peduli satu sama lain. Sedangkan Kang Jalal sepertinya mempunyai kecenderungan yang berbeda, tidak merujuk pada konsep maslahat tapi merujuk langsung kepada al-Quran sendiri. Bagaimana menurut Kang Jalal?*

Anda berbicara tentang pluralisme sebagai sebuah ideologi politik. Itu lain lagi. Ada *political pluralism*, pluralisme sebagai sebuah ideologi politik. Tadi saya menyebutkan juga pluralisme sebagai sebuah gejala sosial yang muncul dalam kehidupan modern. Sementara, dalam perbincangan ini, saya justru mengemukakan seputar pluralisme dalam kehidupan beragama (*religious pluralism*).

Tentu kalau kita berbicara tentang *political pluralism*, nanti ada orang berpendapat bahwa tidak cukup pluralisme sekadar menghargai hak-hak minoritas dan mengakui kebebasan berpendapat, tetapi pluralisme juga harus memberikan kebebasan kepada orang untuk menjalankan agamanya masing-masing. Orang seperti itu sedang membawa pluralisme politik kepada pluralisme religius.

Demikian pula Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan bahwa harus dibedakan antara pluralisme dengan pluralitas. Pluralisme adalah suatu paham, sedangkan pluralitas menurut mereka adalah kemajemukan masyarakat yang memang merupakan realitas. Ungkapan seperti ini sebetulnya menunjukkan bahwa MUI tidak mengerti tentang pluralisme sebagai sebuah gejala sosial.

Menurut saya, paham pluralisme politik juga dapat dianggap sebagai pilar demokrasi. Ini supaya tidak rancu antara satu dengan yang lain. Sebab di dalam demokrasi itu sendiri terdapat keniscayaan adanya pembelaan terhadap hak-hak minoritas. Demokrasi juga meniscayakan adanya perbedaan pendapat.

Karena itu, dalam perbincangan ini saya ingin membatasi pluralisme hanya dalam konteks *religious pluralism* (pluralisme agama). Tolong jangan berbicara pluralisme dalam arti fenomena sosiologis (pluralisme sosial) atau fenomena politik (pluralisme politik). Sebab di sini saya membincangkan tentang pluralisme religius. Karena itu di sini, barangkali, apa yang saya kemukakan tidak bisa bertemu dengan pandangan pluralismenya Mas Dawam (Prof. Dr. Dawam Rahardjo). Mas Dawam tidak menginginkan pluralisme sebagai sebuah pluralisme religius. Tapi dia mungkin lebih menekankan *political pluralism*, yakni pluralisme sebagai sebuah ideologi politik.

Saya ingin menekankan bahwa yang pertama kali harus diselesaikan ialah apa yang dimaksud dengan pluralisme. Baru setelah itu kita berbicara dalam definisi yang sama. Kalau tiba-tiba ada orang mengatakan bahwa pluralisme itu mempunyai arti yang bermacam-macam, saya tidak mau ikut campur Misalnya tiba-tiba Adian Husaini berkata bahwa pluralisme sama dengan sinkretisme. Jadi, menurutnya, kalau membicarakan tentang pluralisme jangan hanya wacana saja, tapi harus dipraktikkan – pagi-pagi harus salat Subuh di masjid, siang bermisa di gereja, dan sore beribadah secara Hindu di kuil. Di sini letak kekeliruannya. Dia mengartikan pluralisme secara keliru. Dia berbicara tentang ‘binatang’ yang lain, bukan ‘binatang’ pluralisme yang se-

> Pluralisme adalah pandangan bahwa semua agama akan memperoleh keselamatan. Itu tidak langsung berakibat pada kemudahan orang untuk berpindah-pindah agama. Pluralisme dan pindah agama adalah suatu hal yang satu sama lain tidak sama. Untuk pindah-pindah agama, tidak ada urusan dengan masalah keselamatan dalam konteks agama.

dang kita bahas di sini. Orang membicarakan pluralisme memang seharusnya dilengkapi dengan pengetahuan filsafat yang memadai. Paling tidak filsafat sebagai cara berpikir, misalnya tentang bagaimana kita mendefinisikan istilah yang kita pergunakan.

Dalam hal ini, saya sangat heran baik kepada kelompok liberal yang mendukung pluralisme maupun kepada kelompok fundamentalis yang menentang pluralisme. Karena tampaknya mereka membicarakan makhluk yang berbeda, binatang yang berbeda, sehingga antara yang satu dengan yang lain tidak bisa bertemu. Karena itu saya juga tidak heran jika Mas Dawam mengatakan bahwa debat antara kalangan fundamentalis dan pluralis yang sama-sama mengemukakan argumentasi canggih berdasarkan al-Quran adalah debat kusir.

Di sini barangkali Mas Dawam mengalami kebingungan. Bagaimana mungkin dua pemikiran yang berbeda mendasarkan diri kepada al-Quran, sebagai sebuah rujukan yang sama dalam memperdebatkan pluralisme. Kebingungan ini dapat diatasi kalau Mas Dawam mengetahui bahwa sesungguhnya kedua belah pihak membicarakan suatu hal yang berbeda meski tetap dalam konteks pluralisme religius.

Perbedaan persepsi tentang pluralisme agama ini dapat diselesaikan, menurut saya, dengan cara kedua belah pihak sama-sama mendasarkan argumentasi kepada al-Quran dan mendefinisikan pluralisme dengan definisi yang sama. Misalnya saya mendefinisikan pluralisme sebagai sebuah paham keagamaan yang pada gilirannya tentu berpengaruh terhadap sikap beragama. Pluralisme menurut definisi saya lebih sebagai sebuah paham keagamaan yang memandang bahwa selain agama kita, yaitu pemeluk agama lain, juga akan memperoleh keselamatan.

Di dalam teologi, kalau kita berbicara tentang pluralisme religius, kita harus merujuk pada apa yang disebut sebagai "soteriologi". Soteriologi adalah bagian dari pembahasan agama yang berkaitan dengan keselamatan atau ilmu tentang keselamatan. Setiap agama selalu bercerita siapa saja orang-orang yang selamat pada hari akhirat nanti. Setiap agama mempunyai soteriologinya sendiri-sendiri.

Dalam hal ini, pluralisme yang kita perbincangkan adalah pluralisme religius yang merupakan bagian dari soteriologi. Pluralisme yang membicarakan tentang siapa yang akan selamat di hari akhir nanti. Menurut kaum eksklusivis, secara soteriologis hanya kelompok mereka saja yang selamat. Sekali lagi kita berbicara tentang soteriologi, bukan sinkretisme. Sinkretisme itu makhluk yang lain dan tidak ada hubungannya dengan soteriologi. Meskipun, bisa jadi, ada juga kalangan pluralis yang sinkretis, sebagaimana ada juga kalangan pluralis yang 'fundamentalis'. Karena kadang-kadang orang mempertentangkan antara fundametalis dengan pluralis. Padahal tidak demikian. Misalnya, saya kira Syeikh Husain Fadllullah adalah seorang fundamentalis, Sayyid Rasyid Ridla adalah seorang fundamentalis. Tapi secara soteriologis mereka adalah orang-orang yang pluralis.

Orang seperti Mas Dawam tidak dapat mengerti bagaimana bisa seorang fundamentalis menjadi pluralis. Itu karena dia membuat kategori yang sama tentang beberapa hal yang berbeda. Membandingkan fundamentalisme, pluralisme, dan sinkretisme sama halnya dengan membandingkan apel, tikus, dan meja. Apa perbedaan apel, tikus, dan meja? Semuanya tidak ada keterhubungan. Sebab pembandingan itu sesungguhnya merupakan pembicaraan

tentang sesuatu yang tidak ada hubungannya antara satu dengan yang lain.

Dalam filsafat, kalau kita membuat kategori, kita harus menggunakan kriteria yang sama. Kalau kita memaknai fundamentalisme, jangan dipertentangkan dengan pluralisme, sebab fundamentalisme merupakan pengelompokan yang lain dalam kehidupan beragama. Fundamentalisme mungkin harus dipertentangkan dengan liberalisme. Itu ada kelompoknya sendiri. Fundamentalisme adalah kecenderungan untuk menggunakan rujukan-rujukan agama, utamanya teks agama, untuk menjustifikasi paham kelompoknya. Sementara liberalisme adalah kelompok yang lebih banyak merujuk kepada konteks daripada teks.

Definisi pluralisme bisa merujuk kepada teks dan sekaligus dapat merujuk pula pada konteks. Pluralisme kaum liberal berdasarkan pada konteks; sementara pluralisme kaum fundamentalis berdasarkan teks. Karena itu tidak mengherankan jika Sayid Husein Fadllullah, tokoh spiritual Hizbullah di Lebanon, adalah seorang yang sangat pluralis. Sayyid Rasyid Ridla, yang dianggap sebagai orang yang me-Wahhabi-kan tafsirnya Muhammad Abduh, adalah seorang pluralis. Padahal, Wahhabi sangat fundamentalis. Oleh karena itu, menjadi jelas di sini bahwa Adian Husaini yang sangat Wahhabi itu anti-pluralis. Artinya, penganut paham Wahhabi itu bisa pluralis dan juga bisa anti-pluralis. Kelompok liberal juga bisa pluralis dan pada saat yang bersamaan bisa anti-pluralis.

Saya menemukan kaum liberal di Indonesia dalam beberapa hal ternyata anti-pluralisme. Dan saya heran mereka mengusung pluralisme tapi pada saat yang lain sikapnya sangat tidak pluralis. Misalnya dalam hal diskusi tentang poligami di televisi. Ini sekadar contoh. Kaum liberal dalam diskusi di televisi itu sama sekali tidak

bisa menerima pandangan kaum fundamentalis. Artinya, kalau kita kembali kepada bahwa pluralisme adalah soteriologi, saya menemukan dalam sikap mereka bahwa kaum fundamentalis tidak akan selamat. Mereka berpendapat seperti itu. Kaum fundamentalis dicap bodoh, kampungan, dan memanipulasi al-Quran. Ketika kaum fundamentalis berbicara mereka ribut, mereka tidak mau mendengarkan pendapatnya. Menurut saya, akhlak kaum fundamentalis dalam acara debat di televisi itu lebih pluralis daripada kaum liberal. Mereka, kalangan liberal, menganggap kaum fundamentalis pasti celaka sebab dianggap merusak Islam.

> Saya sangat heran baik kepada kelompok liberal yang mendukung pluralisme maupun kepada kelompok fundamentalis yang menentang pluralisme. Karena tampaknya mereka membicarakan makhluk yang berbeda, binatang yang berbeda, sehingga antara yang satu dengan yang lain tidak bisa bertemu. Karena itu saya juga tidak heran jika Mas Dawam mengatakan bahwa debat antara kalangan fundamentalis dan pluralis yang sama-sama mengemukakan argumentasi canggih berdasarkan al-Quran adalah debat kusir.

Ada pandangan yang memperlawankan pluralisme dengan monisme, demi mencoba untuk mengatasi problem monisme yang rentan berbuah totaliter. Bagaimana pendapat Anda?

Meskipun tidak mengambil spesialisasi filsafat, saya juga belajar filsafat. Di rumah saya, mungkin buku-buku filsafat lebih banyak ketimbang buku-buku yang lain, bahkan buku komunikasi sekalipun. Jadi kalau ada orang menyebut istilah-istilah filsafat seperti monisme, bayangan saya segera berpikir tentang monisme

di dalam filsafat. Pikiran saya langsung pergi menuju Spinoza. Dan monisme Spinoza sama sekali tidak ada hubungannya dengan pluralisme religius yang kita bicarakan ini. Spinoza bukan seorang teolog, tapi lebih merupakan seorang filosof. Saya pernah menulis artikel "Spinoza: Ateis yang Paling Bertuhan". Yang ingin saya tekankan adalah bahwa monisme sama sekali tidak ada hubungannya dengan pluralisme yang kita bicarakan. Sekali lagi, pluralisme yang kita bicarakan adalah pluralisme religius. Bukan pluralisme filsafat.

Dalam filsafat, pluralisme memang dipertentangkan dengan monisme. Secara sederhana, pluralisme menganggap bahwa yang ada itu banyak dan berbeda-beda. Monisme menganggap bahwa yang ada itu hanya satu; perbedaan hanyalah penampakan, fase atau fenomena dari yang satu. Monisme juga dipertentangkan dengan dualisme. Dualisme membedakan antara tubuh dan jiwa, materi dan roh, obyek dan subyek. Pandangan filsafat yang menolak perbedaan itu atau keyakinan untuk menggabungkan segenap perbedaan pada tingkat yang lebih tinggi disebut monisme.

Isaiah Berlin mencoba mempertentangkan antara pluralisme dengan monisme. Pertentangan ini ada benang merahnya sejak zaman pemikiran Plato sampai pemikiran yang mutakhir. Ada pemikiran yang cenderung pluralistis dan ada pula yang monistik.

Saya kira saya harus mengutip langsung Isaiah Berlin tentang apa yang dia maksud dengan monisme sebagai lawan dari pluralisme, "Musuh pluralisme adalah monisme, kepercayaan kuno bahwa ada satu harmoni dari berbagai kebenaran, yang jika *genuin*, di situ semuanya pada akhirnya akan serasi." Akibat kepercayaan ini (se-

suatu yang berbeda tapi berdekatan dengan apa yang disebut Karl Popper sebagai esensialisme – yang menurutnya sumber segala kejahatan) adalah bagi orang yang tahu harus menguasai orang yang tidak tahu. Orang yang tahu jawaban tentang masalah kemanusiaan harus dipatuhi, karena mereka sajalah yang tahu bagaimana seharusnya masyarakat diorganisasikan, bagaimana kehidupan individu harus diatur, dan bagaimana budaya harus dikembangkan. Inilah keyakinan Platonis tentang konsep filosof-raja. Selalu ada pemikir yang berpendapat bahwa jika hanya ilmuwan, atau orang yang dilatih sebagai ilmuwan saja yang mengatur, maka dunia akan luar biasa baiknya. Untuk hal ini, saya harus mengatakan bahwa tidak ada alasan yang lebih baik, bahkan tidak ada dalil yang lebih kuat dari monisme untuk membenarkan despotisme tak terbatas bagi kaum elit untuk merampok kebebasan dari mayoritas.

> Saya sendiri mendefinsikan pluralisme sebagai paham yang menyatakan bahwa semua agama mempunyai peluang untuk memperoleh keselamatan pada hari akhirat.

Apakah pertentangan itu sama sekali tidak dapat dikaitkan dengan agama, terutama cara pandang umat atas agamanya?

Memang dari segi kata-kata *pluralism* berasal dari kata *plural*, yang artinya banyak (*al-katsrah*). Sedangkan *monism* asalnya berasal dari kata *mono*, yang artinya tunggal. Jadi di sini pluralisme artinya paham yang menghargai *al-katsrah* (kebhinekaan) atau ilmu dan pandangan yang menganggap alam semesta ini sebagai sesuatu yang banyak. Sedangkan monisme memandang alam semesta ini sebagai sesuatu yang tunggal.

Jika ini dihubung-hubungkan dengan agama sulit menemukan relevansinya. Kalaupun dipaksakan, mungkin begini: pluralisme religius yang kita bahas adalah pandangan yang mengakui keragaman; sementara monisme adalah pandangan yang ingin menunggalkan semuanya. Seperti kebijakan asas tunggal, itu adalah bentuk dari monisme, sedangkan demokrasi adalah bentuk dari pluralisme.

Tampaknya pertentangan tentang pluralisme masih berkisar pada definisi yang bermacam-macam. Sebelum kita menjernihkan apa yang kita bicarakan, diskusi ini akan menjadi debat kusir yang berkepenjangan. Saya setuju dengan Mas Dawam dalam hal itu. Selama Mas Dawam tidak merujuk dengan jelas tentang apa yang dia bicarakan, kita akan debat berkepanjangan. Kita harus mendudukkan masalahnya terlebih dahulu, apakah pluralisme sebagai filsafat, pluralisme dalam konteks agama, atau pluralisme sebagai gejala sosial.

Menurut saya, masih bagus Wikipedia di internet dalam membicarakan pluralisme ketimbang perbincangan kita sekarang. Karena Wikipedia membincangkan *pluralism* mulai dari pluralisme itu sendiri, lalu membaginya ke dalam; *religious pluralism, sociological pluralism*, dan *political pluralism.* Kalau mau berbicara tentang pluralisme agama, tinggal kita klik saja *religious pluralism.* Itu untungnya internet. Fungsi klik di sini adalah untuk membatasi pembahasan. Karena kalau dicari kata pluralisme di internet, akan disajikan sekian juta informasi tentang kata itu. Tapi kalau Anda mencari di "*religious pluralism*", maka yang akan keluar hanya hal-hal yang berkenaan dengan pluralisme religius. Dan yang berkaitan dengan itu adalah inklusivisme, ekslusivisme, dan pluralisme.

Wikipedia kemudian juga mengatakan, jangan mengacaukan pluralisme religius dengan sinkretisme atau relativisme, walaupun

kadang-kadang ada pertemuan, *overlapping*, misalnya bahwa pluralisme itu menolak adanya absolutisme. Oleh karena itu orang kemudian berpikir bahwa pluralisme sama dengan relativisme.

Ada sebuah buku yang mengkritik pluralisme sebagaimana tertuang dalam buku John Hicks, *Deep Religious Pluralism.* Editornya: David Ray Griffin. Buku itu menyajikan kelemahan John Hicks dalam membahas pluralisme. Kelemahannya misalnya tatkala Hicks membicarakan pluralisme berdasarkan dalil-dalil dari Bibel. Itu dikritik dengan menggunakan dalil-dalil dari kitab yang sama, sembari kemudian menjernihkan pengertian pluralisme yang generik. Buku itu bagus sekali dalam mebicarakan pluralisme religius, meski konteksnya adalah agama Kristen. Namun demikian di dalamnya juga terdapat pluralisme menurut Sayyed Hossein Nasr seperti dijelaskan oleh Mustafa Ruzgar; pluralisme dari kalangan Hindu oleh Jeffrey D. Long; pluralisme Yahudi oleh Sandra B Lubarsky, dan sebagainya. Buku tersebut dan buku Hicks membicarakan pluralisme dalam dataran yang sama, pluralisme sebagai makhluk yang tunggal, yakni pluralisme religius.

Begitulah seharusnya membahas pluralisme religius. Di kalangan umat beragama, pluralisme dikenal dengan beberapa jenisnya. Dari kalangan Islam misalnya Sayyed Hossein Nasr, yang merupakan seorang filosof, seorang teolog, seorang perennialis, dan bukan seorang politikus. Jadi dia mempunyai otoritas untuk berbicara tentang pluralisme.

Kembali pada perbincangan tentang soteriologi, apakah dengan konsep ini kita dapat mengatakan bahwa semua agama benar, sehingga orang dapat berpindah agama dengan mudahnya?

Orang membicarakan pluralisme sebagai paham semua agama benar, berarti telah membicarakan sesuatu yang lain. Karena definisi sebenarnya dari pluralisme adalah pandangan bahwa semua agama akan memperoleh keselamatan. Itu tidak langsung berakibat pada kemudahan orang untuk berpindah-pindah agama. Pluralisme dan pindah agama adalah suatu hal yang satu sama lain tidak sama. Untuk pindah-pindah agama, tidak ada urusan dengan masalah keselamatan dalam konteks agama. Bahkan, menurut saya, orang pindah agama akan terjadi kalau hanya satu saja agama yang selamat. Misalnya seorang Kristen berdiskusi dengan seorang Muslim, lalu dia menemukan dalam diskusi tersebut bahwa ternyata yang akan selamat hanya Islam, maka ia berpindah kepada Islam. Tapi kalau ia berpendirian bahwa semua agama selamat, apa perlunya berpindah agama? Itu argumentasi dari Ulil Abshar-Abdalla. Ini merupakan argumentasi yang menurut saya paling bagus yang pernah saya dengar. Argumentasi ini menolak pandangan bahwa karena setiap agama selamat maka setiap orang boleh pindah-pindah agama setiap saat. Pandangan ini nanti akan dibawa ke arah sinkretisme, yaitu pandangan yang mencampurkan semua agama atau menjalankan semua agama sekaligus karena semuanya dianggap memberi jalan keselamatan.

Menurut saya, kemungkinan pindah agama lebih besar pada orang yang menentang pluralisme; yang menganggap hanya ada satu agama yang benar. Jika orang ragu bahwa yang selamat itu cuma satu agama saja, maka pilihan yang paling baik supaya probabilitas statistiknya tinggi, kita menjalankan seluruh agama. Ini dilakukan supaya paling tidak ada yang pas, yang menyampaikan kita pada keselamatan. Kalau cara bepikirnya begini, maka beragama itu seperti berjudi. Kalau kita lebih banyak membeli kartu lotere, maka

kemungkinan kita akan menang lebih besar, sebab hanya satu kartu lotere saja yang menang. Maka kita pun membeli kartu lotere sebanyak-banyaknya. Lain halnya jika kita tahu bahwa semua kartu menang. Ketika kita sudah memegang satu kartu, kartu yang sudah kita punya tidak perlu diganti lagi. Jadi, sangat keliru orang yang berpikir bahwa pluralisme membuat kita boleh berpindah-pindah agama.

Ada pandangan yang mengatakan bahwa agama yang pluralis lebih tepat jika dialamatkan pada agama-agama non-Semitik, seperti Hindu, Budha, atau yang lainnya. Sebab agama Semitik, yakni Islam, Kristen, dan Yahudi memiliki doktrin evangelic, *seperti konsep misionaris atau dakwah, yang mengasumsikan kelompok lain harus diselamatkan dengan memeluk agamanya. Bagaimana pandangan Kang Jalal?*

> Fundamentalisme adalah kecenderungan untuk menggunakan rujukan-rujukan agama, utamanya teks agama, untuk menjustifikasi paham kelompoknya. Sementara liberalisme adalah kelompok yang lebih banyak merujuk kepada konteks daripada teks.

Mungkin saja. Tapi, coba kita lihat dulu Hindu. Hindu sebetulnya bukan sebuah agama. Ia bukan *a single religion* (agama yang satu). Hindu merupakan *a collection of religions* (kumpulan agama-agama). Jadi kalau Islam disebut dengan *Islamic religion* tanpa huruf "*s*", Hindu harus menggunakan huruf "*s*", *Hindic religions*. Itu penjelasan kepada saya dari seorang Hindu dalam sebuah konferensi internasional.

Ada banyak aliran di dalam Hindu. Apalagi jika kita memandang Hindu sebagai agama yang politeistik. Ada sekelompok Hin-

du yang mengambil Wisnu sebagai Tuhan. Ada yang mengambil, bahkan, Batari Durga sebagai Tuhannya. Mereka terbiasa di dalam sistem itu, yakni sistem kepercayaan yang bermacam-macam. Bahwa semua dewa adalah ekspresi dari ketuhanan yang tunggal. Kalau dalam istilah tasawuf, semua dewa itu hanyalah *tajalliyah* (penampakan) dari Allah Yang Esa. Jadi melalui dewa manapun, menurut orang tasawuf, sama seperti melalui sistem (keberagamaan) manapun kita akan sampai kepada Allah. Sebagaimana sufi di dalam Islam bisa berpendapat bahwa ada manifestasi dari *jamâliyah* (keindahan) Tuhan dan ada manifestasi dari *jalâliyah* (keagungan) Tuhan, orang Hindu juga berpendapat ada manifestasi dari Wisnu dan ada pula manifestasi dari Shiwa.

Jadi, memang Hindu sudah pluralis. Tetapi harap dipahami bahwa pluralisme terdapat di dalam agama Hindu itu sendiri karena banyaknya Tuhan. Dari sini ada orang yang mengambil kesimpulan bahwa Hindu itu cenderumg pluralistik karena politeistik. Sementara agama-agama Semitik, karena sifatnya yang monoteistik, cenderung untuk eksklusivis. Saya lebih suka memakai kata eksklusivis karena dalam konteks pluralisme ada dua model cara pandang yang saling bersinggungan, yakni eksklusivisme dan inklusivisme. Bukan menghadap-hadapkan pluralisme dengan fundamentalisme. Sebab fundamentalisme merupakan kelompok yang lain, yakni satu kelompok bahasan dengan liberalisme.

Kalau kita mau membincang tentang mistisisme, maka harus berbicara tentang mistisisme dan hubungannya dengan, misalnya, formalisme. Sedangkan kalau kita berbicara tentang tasawuf maka jangan hubungkan dengan pluralisme, tapi kita hubungkan dengan fikih atau kalam. Itu tiga kelompok pemikiran di dalam Islam. Di dalam fikih, ada yang pluralis dan ada pula yang eksklusivis, walaupun

pada umumnya kaum sufi lebih pluralis daripada orang-orang fikih. Itu hanya akibat berikutnya saja. Kita tidak bisa mengklasifikasikan pluralisme, fikih, dan tasawuf dalam rubrik yang sama.

Orang yang mempunyai kecenderungan politeistik dan mistik lebih kuat, seperti Hindu, tidak secara otomatis menjadi pluralis. Karena, ada juga Hindu yang eksklusivis, bahkan lebih eksklusif dari orang-orang yang monoteistik. Sekarang ini di India ada sekelompok Hindu yang sangat eksklusif yang sering memicu konflik dengan umat Islam.

> Di dalam teologi, kalau kita berbicara tentang pluralisme religius, kita harus merujuk pada apa yang disebut sebagai "soteriologi". Soteriologi adalah bagian dari pembahasan agama yang berkaitan dengan keselamatan atau ilmu tentang keselamatan. Setiap agama selalu bercerita siapa saja orang-orang yang selamat pada hari akhirat nanti. Setiap agama mempunyai soteriologinya sendiri-sendiri.

Termasuk kelompok yang anggotanya membunuh Mahatma Gandhi?

Ya, termasuk yang membunuh Gandhi. Mereka juga pernah membantai kaum Muslimin. Kecenderungan eksklusif ini juga ada dalam kalangan orang yang dikenal terpelajar. Buku terakhir yang saya baca, *The End of Faith,* tulisan Sam Harris, mengkritik agama dengan keras. Dia menekankan perlunya agama disingkirkan dari kehidupan. Buku itu mengkritik Islam, mengkritik Hindu, dan mengkritik juga orang-orang yang beragama secara moderat. Menurut pengarang buku itu, tidak mungkin seorang yang beragama itu moderat.

Dia juga mengkritik orang yang beragama secara pluralis. Baginya, beragama dan pada saat yang bersamaan menjadi pluralis,

itu mustahil alias *contradictio in terminis*. Meski demikian, buku itu berbicara dalam dataran yang jelas. Apa yang disebut sebagai pluralisme dia definisikan dengan gamblang. Sehingga alur pembahasannya dapat diikuti dengan enak.

Jadi, kembali ke persoalan awal, tidak benar bahwa agama Hindu lebih pluralis dibanding agama lainnya. Untuk konteks agama Hindu sendiri (*within Hinduism*), barangkali, benar bahwa agama ini sangat pluralistik – kalau dibandingkan dengan Islam, yang mungkin karakter pluralistiknya baru pada tahap penghargaan antara mazhab saja, sebagaimana yang dilakukan oleh ahli-ahli fikih. Para ahli fikih, seperti yang sudah saya kutip dalam buku saya, *Dahulukan Akhlak di Atas Fikih*, mempunyai prinsip: *madzhabunâ shawâb ya<u>h</u>tamilu al-khata' wa madzhabu ghayrinâ khatha' ya<u>h</u>tamilu al-shawâb* (mazhab kami benar tapi mungkin mengandung kesalahan, dan mazhab selain kita salah tapi barangkali juga mengandung kebenaran). Menurut saya, para imam mazhab fikih sebenarnya pluralis, dalam pengertian seperti orang-orang Hindu.

Dalam konteks pluralisme Kristen, terdapat eukumene, *sedangkan Katolik melalui Konsili Vatikan II mengakui ada keselamatan di luar gereja. Sementara dalam konteks Islam sendiri apakah ada doktrin atau otoritas keagamaan yang menyerukan bentuk-bentuk pluralisme?*

Mengutip Romo Benny Susetyo, dalam sejarah Katolik pluralisme merupakan suatu hal yang baru. Terutama setelah adanya hasil dari Konsili Vatikan II yang tokoh utamanya adalah John Paul II, atau Paus Paulus II. Sebelum itu, Katolik adalah agama yang sangat tidak pluralis. Pluralisme religius yang kita bahas pada mulanya muncul di kalangan Protestan. Protestan tidak mempunyai otoritas

keagamaan. Aliran dalam Protestan, menurut orang Katolik, bisa muncul setiap musim. Kapan saja seorang pemikir Kristiani menemukan pendapat yang baru, dia dapat mendirikan sebuah gereja yang baru. Di Indonesia, yang tergabung dalam PGI saja ada lebih dari 300 aliran. Itu yang terdaftar secara resmi. Sementara masih ada beberapa aliran yang tidak terdaftar seperti Saksi Jehova (*Jehovah Witness*) dan sebagainya. Arus pluralisme pertama kali sebetulnya muncul dari kelompok Protestan. Sementara Katolik mempertahankan sikap anti-pluralisme selama berabad-abad. Protestanlah yang mulai mengarusutamakannya meskipun benih-benih pluralisme ini sudah muncul di dalam Katolik sejak lama. Menurut Romo Benny, yang membedakan Katolik dan Protestan adalah: Katolik berpijak pada tradisi sementara Protestan – karena pemikirannya lebih terbuka sehingga – tidak merujuk pada tradisi-tradisi.

> Definisi pluralisme bisa merujuk kepada teks dan sekaligus dapat merujuk pula pada konteks. Pluralisme kaum liberal berdasarkan pada konteks sementara pluralisme kaum fundamentalis berdasarkan teks.

Dapatkah Anda menemukan rujukan atau preseden dalam Islam tentang adanya keselamatan di luar Islam?

Nabi Muhammad saw sebetulnya sangat pluralis. Tentu Nabi tidak mengumumkan terminologi pluralisme, tapi tentang keselamatan di luar Islam. Jika kita memakai rujukan Nabi saw sebagai figur pluralis, maka kita harus mengutip teks-teks Hadits. Tidak bisa kita hanya mengotak-atiknya dengan logika (otak).

Apa betul Rasulullah seorang pluralis? Di sini saya harus merujuk kepada teks-teks, misalnya tentang bagaimana Nabi saw

menjelaskan ayat *lâ ikrâha fî al-dîn* (tidak ada paksaan dalam agama). Ayat ini sangat pluralistis, namun begitu sekarang dipahami orang menjadi sangat eksklusivis. Coba sekarang kita bertanya kepada ustad-ustad kebanyakan, apa makna tidak ada paksaan dalam beragama. Mereka tentunya menjawab: 'tidak ada paksaan dalam agama' di sini mengisyaratkan bahwa seseorang boleh masuk Islam atau boleh tidak. Tetapi, begitu seseorang sudah masuk Islam, dia harus dipaksa.

Biasanya penjelasan yang diberikan bersifat analogis bukan penjelasan logis. Misalnya tentara. Tidak ada paksaan untuk menjadi tentara. Tetapi begitu seseorang telah menjadi tentara, dia harus mematuhi semua aturan militer. Dia harus dipaksa untuk mematuhi hukum ketentaraan. Itu penafsiran analogis atas ayat "tidak ada paksaan dalam agama." Tapi bagaimana Nabi saw menjelaskan ayat itu dalam teks dan konteks waktu itu?

Meskipun kita tidak dapat menunjuk siapa orang yang pertama kali memopulerkan istilah pluralisme di dunia Islam, tapi yang jelas praktik pluralisme sudah berjalan sejak zaman Rasulullah saw. Sayyid Rasyid Ridla di dalam tafsirnya menjelaskannya dengan baik bagaimana beliau bersikap dan mempraktikkan pluralisme ini. Sayyid Rasyid Ridla menyebutkan beberapa riwayat. *Pertama,* ada seseorang Sahabat bernama Abul Hushayn. Dia mempunyai dua orang anak yang salah satunya bernama Hushayn. Abul Hushayn sedih dan marah melihat dua anaknya yang masih muda-muda itu masuk agama Kristen. Mereka masuk Kristen karena pada waktu itu banyak pedagang Kristen dari Syam ke Madinah. Kedua anak Abul Hushayn mengikuti agama para pedagang itu. Bapak yang merupakan Sahabat Nabi ini kemudian membawa anaknya ke hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, anak saya ini pindah agama.

Saya tidak mau anak saya masuk neraka." Kalimat "masuk neraka" mengasumsikan adanya konsep soteriologi bahwa anaknya tidak selamat. Apa jawaban Nabi saw mendengar laporan ini? Rasulullah berkata, "Biarkan dia memeluk agama itu." Setelah itu, ayat yang berbunyi *lâ ikrâha fî al-dîn* (tidak ada paksaan dalam beragama) itu turun.

Kedua, riwayat lain mengatakan bahwa kata *lâ ikrâha fî al-dîn* telah digunakan setelah Nabi saw hijrah ke Madinah. Kisahnya, pada waktu itu banyak orang Madinah yang sering menitipkan anaknya, terutama yang sakit-sakitan, kepada orang-orang Yahudi. Anak-anak itu pun tumbuh berkembang bersama orang Yahudi. Mungkin karena gizinya lebih baik, pertumbuhan mereka lebih sehat dan kemudian mengikuti agama pengasuhnya yang *nota bene* orang Yahudi. Mereka pun menjadi (beragama) Yahudi.

Kalau kita mau membincang tentang mistisisme, maka harus berbicara tentang mistisisme dan hubungannya dengan, misalnya, formalisme. Sedangkan kalau kita berbicara tentang tasawuf maka jangan hubungkan dengan pluralisme, tapi kita hubungkan dengan fikih atau kalam. Itu tiga kelompok pemikiran di dalam Islam. Di dalam fikih, ada yang pluralis dan ada pula yang ekslusivis, walaupun pada umumnya kaum sufi lebih pluralis daripada orang-orang fikih. Itu hanya akibat berikutnya saja. Kita tidak bisa mengklasifikasikan pluralisme, fikih, dan tasawuf dalam rubrik yang sama.

Ketika orang-orang Madinah masuk Islam dan Rasulullah datang ke Madinah, mereka bertanya kepada Nabi saw, "Ya Rasulullah, anak-anak kami menjadi Yahudi semua. Mereka belum mengetahui tentang kebenaran Islam ini. Bolehkah kami memaksa

mereka untuk masuk Islam?" Rasulullah menjawab, "Tidak boleh. Biarlah mereka memilih agama yang disukainya."

Riwayat ini menunjukkan bahwa praktik pluralisme telah ada sejak zaman Nabi Muhammad saw. Kalau dalam riwayat tersebut Nabi saw hendak menyelamatkan orang, tentu beliau akan memaksa anak-anak itu untuk masuk surga dengan memeluk Islam. Lalu Nabi Muhammad saw mengutip ayat *lâ ikrâha fî al-dîn* itu.

Jadi kalau saya ditanya, kapan saya menemukan teks yang mendakwahkan pluralisme, maka paling tidak teks yang paling pertama sekali saya temukan, adalah teks-teks (riwayat-riwayat) yang tadi saya sebutkan. Rujukan kita tentu bukan konsili-konsili atau muktamar-muktamar yang dilakukan oleh umat Islam. Sebab muktamar di dunia Islam tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam menetukan paham agama. Ia juga tidak memiliki potensi untuk menentukan mana yang benar atau mana yang salah.

Sebetulnya Islam lebih mirip Protestan daripada Katolik. Artinya, kita beragama tanpa berpegang kepada pernyataan-pernyataan personal atau lembaga tertentu. Di sini harus dikecualikan Syi'ah. Dalam Syi'ah orang harus merujuk pada pernyataan-pernyataan dari para marja' taklid yang mendukung pluralisme. Dalam hal ini saya bisa langsung menyebut Sayid Husein Fadhlullah (tokoh spiritual Libanon), yang dalam tafsirnya *Min Wahy al-Qur'ân*, Sayid Ali Khamenei yang merupakan Wali Faqih dari Republik Islam Iran, dan sebagainya.

Ada buku yang diterbitkan oleh Al-Huda berjudul "Menggugat Pluralisme" yang ditulis oleh seorang ulama terkemuka Syi'ah. Dia mengkritik pluralisme John Hicks. Bagusnya, ketika dia membicarakan pluralisme yang sama dengan pluralisme yang dibahas oleh Hicks, misalnya tentang teori keselamatan, ia tidak melantur

ke sana ke mari. Tapi dia berupaya mengkritik pluralisme model Hicks.

Meskipun buku tersebut anti-pluralisme, bagusnya, dia melampirkan pidato Sayid Ali Khamenei di akhir buku tersebut. Padahal Sayid Ali Khamenei merupakan tokoh yang berbicara dengan sangat soterelogis di buku itu. Dia tidak bicara bahwa semua agama benar. Sebab itu bukan definisi pluralisme. Dia berkata bahwa keselamatan tidak dibatasi pada agama tertentu, bangsa tertentu, dan wilayah tertentu. Itu artinya, Sayid Ali Khamenei mengerti tentang pluralisme. Bahwa pluralisme adalah masalah soteriologis atau masalah keselamatan. Lampiran itu menurut saya sudah cukup sebagai pernyataan resmi dari pemegang otaritas agama Islam, dalam hal ini Syi'ah.

Wawancara dilakukan di Jakarta, Maret 2007

Percakapan dengan

Jamhari Makruf

Jamhari Makruf, Pembantu Rektor Bidang Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan mantan Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta.

Demitologisasi atas konservatisme atau dogmatisme agama, terutama wacana publik tentang syariah, adalah langkah yang harus ditempuh dengan merekonstruksi (sejarah) Islam untuk mengantarkannya pada konteks kekinian, sehingga sesuai dengan karakter budaya masyarakat kita. Agama dikembalikan pada orbitnya: penyelamat dan penerang hati umat. Sebab Islam adalah pembebasan. Sebaliknya, ketika agama berbaur dengan kekuasaan (politik), ia mengidentikkan diri dengan otoritarianisme, kekerasan, dan perilaku korup. Maka, demitologisasi di sini lebih sebagai semangat pembebasan yang menjiwai liberalisme dan sekularisme dalam bingkai keindonesiaan. Salah satu caranya, membekali umat Islam, minimal kalangan akademis, dengan perspektif sosio-historis.

Sekularisme kerap dipandang sebagai pemisahan tegas antara wilayah privat dan publik. Akibatnya, ia pun dinilai meminggirkan peran agama di ranah publik, bahkan dianggap sebagai anti-agama. Menurut Anda, sebenarnya apa makna sekularisme?

Sekularisme, sebagaimana makna liberalisme dan pluralisme, tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosiologis masyarakat dan sejarah Eropa. Pada awal kemunculan sekularisme, Eropa masih begitu kental dengan unsur-unsur keagamaan. Secara kebetulan, dalam sejarah Eropa ketika itu, gereja sering bertindak menindas. Dari situlah kemudian timbul kesadaran dari beberapa kelompok untuk menentangnya. Dengan konteks seperti itu, bagi masyarakat Eropa, sekularisme merupakan pembebasan dari ketertindasan otoritarianisme agama yang terwujud dalam bentuk kekuasaan. Semangat pembebasan itulah yang tumbuh di Barat dan berkembang sampai sekarang.

Sementara, karena pandangan umat Islam tentang kekuasaan dan agama berbeda dengan Barat, sehingga dunia Islam juga memiliki sejarah sekularisme yang berbeda. Berbeda dengan Barat, dalam hal tertentu, umat Islam justru mengidolakan kekuasaan agama. Misalnya, kini muncul gerakan yang ingin kembali ke bentuk pemerintahan *khilâfah*. Dalam pandangan mereka yang mengusungnya, kekuasaan agama dimaknai sebagai sesuatu yang positif. Hal itulah yang kemudian membuat perbedaan penafsiran terhadap sekularisme, yakni perbedaan faktor sejarah. Itu juga yang melahirkan berbagai sudut pandang tentang sekularisme di dalam Islam.

Bagi saya, sekularisme dapat dimaknai positif dalam dua hal. *Pertama,* dan ini yang lebih penting, adalah bagaimana umat Islam memaknai sekularisme dari semangat yang melatarbelakangi-

nya, bukan isme-nya. Semangat yang melatarbelakangi sekularisme adalah semangat pembebasan. Dalam hal tertentu, ide pembebasan dari sekularisme justru bermakna positif, tergantung bagaimana kita mendudukkannya. Saya sendiri memandang sekularisme, dalam hal tertentu, bermakna positif. Karena sekularisme justru menyelamatkan agama itu sendiri. Selama ini, agama – karena bercampur baur dengan politik – kerap diidentikkan dengan kekerasan, otoritarianisme dan perilaku korup. Dengan memisahkan agama dari kekuasaan, menurut saya, agama justru akan dikembalikan pada fungsinya yang benar, yaitu sebagai penyelamat dan penerang hati umat manusia.

Kedua, saya memandang sekularisme positif dalam arti melihat masalah secara kontemporer dan kontekstual. "Jangan sampai umat Islam hanya berpikir kembali pada nostalgia dan romantisme masa lampau yang tidak pas diterapkan untuk saat ini." Bagi saya, sekularisme juga bermakna menempatkan Islam pada konteks kekinian.

Sekularisme biasanya dibedakan dengan sekularisasi. Cak Nur, misalnya, sangat berhati-hati dalam menggunakan istilah tersebut, untuk kemudian lebih mengedepankan penggunaan istilah sekularisasi. Anda sendiri bagaimana?

Menurut saya sekularisme dipandang negatif dan resistensinya cenderung tinggi karena, dari sejarahnya, ia dimunculkan oleh semangat melawan *(against)* agama. Dalam sejarah Amerika, misalnya, kita tahu bahwa eksodusnya orang-orang Eropa ke sana tak lain disebabkan oleh penindasan yang dilakukan rezim kekuasaan Katolik. Untuk menghindari terulangnya kekuasan gereja, mereka yang eksodus ini lantas mengentalkan protestantisme di Amerika dan merumuskan klausul *separation between religion and nation,*

pemisahan agama dari negara. Itu terjadi karena mereka memang punya pengalaman buruk dikejar-kejar penguasa Katolik, sehingga harus lari dari negaranya. Konteks pada saat itu memang agama memiliki hubungan yang sangat erat dengan kekuasaan politik.

Betapa kuatnya pandangan umat Islam terhadap konsep kesatuan agama dan negara, bagaimana menempatkan demitologisasi dalam konteks tersebut?

Suatu mitos lahir atau muncul pada sebuah masyarakat yang seringkali dilatari kepentingan untuk melestarikan sebuah nilai-nilai tertentu. Karena itu, suatu mitos jelas sangat dipengaruhi oleh konteks pada masanya. Salah satu contohnya adalah di masyarakat tradisional suku Aborigin di Australia. Mengapa kanguru "haram" dimakan, malah oleh mereka dijadikan Tuhan sebagai simbol mitos? Karena orang Aborigin ingin melestarikan kanguru agar tidak disantap dan dibunuh oleh manusia. Cara seperti inilah, mensakralkan kanguru, yang memang harus ditempuh untuk konservasi alam pada saat itu.

Seiring perubahan dan perkembangan masyarakat, mitos pun kemudian seharusnya berubah, karena lingkungan yang berputar juga mengalami perubahan. Saya selalu mengasih ilustrasi begini: dulu, sebelum ada pesawat terbang, orang sering membuat lelucon, "Suatu saat nanti kita mandi di Singapura, kemudian makan pagi di Filipina, makan malam di Australia dan makan pagi lagi di Jepang". Pada zamannya, hal seperti itu dianggap mitos, orang hampir tidak percaya bisa melakukannya. Sekarang, itu sangat mungkin dilakukan. Karena ternyata terbang ke Singapura hanya butuh waktu satu jam setengah, ke Filipina lima jam, ke Jepang enam

jam, sehingga makan berpindah seperti itu bisa terjadi. Ringkasnya, yang dulu tidak mungkin, kini bisa jadi sangat mungkin.

Mitos-mitos itu diciptakan untuk kepentingan melestarikan ideologi, nilai, atau kepentingan masyarakat tertentu. Karena itu, dengan terus bergulirnya waktu, mitos-mitos yang dulu pernah ada harus didemitologisasi, direkontruksi sesuai dengan konteks masyarakat sekarang. Saya kasih contoh yang paling ekstrem, misalnya, klaim bahwa seorang kiai kalau hari Jumat bisa terbang ke Mekah, kemudian salat Jumat dan seterusnya di sana. Dengan kemajuan teknologi seperti sekarang, kita bisa bertanya, "bukankah ada perbedaan waktu antara Indonesia dengan Arab Saudi? Jadi kalau kiai terbang ke Arab Saudi untuk salat Jumat pada waktu yang sama dengan salat Jumat kita, itu mustahil, karena pada waktu yang sama, di sana masih Subuh. Perbedaan waktunya sekitar 6 jam."

> Semangat yang melatarbelakangi sekularisme adalah semangat pembebasan. Dalam hal tertentu, ide pembebasan dari sekularisme justru bermakna positif, tergantung bagaimana kita mendudukkannya. Saya sendiri memandang sekularisme, dalam hal tertentu, bermakna positif. Karena sekularisme justru menyelamatkan agama itu sendiri.

Contoh di atas namanya mendemitologisasi apa yang dulu pernah menjadi mitos. Termasuk juga, misalnya, mitos-mitos kekuasaan Islam: *khilâfah*. Di mana dengan khilâfah, Islam dulu bisa menyatukan beberapa kebudayaan menjadi kekuatan besar. Sampai sekarang hal itu masih menjadi mitos yang sangat luar biasa. Sehingga masih ada anggapan bahwa kalau umat Islam mau berkembang maka harus kembali ke mitos itu. Menurut saya, sekarang kita harus melihat mitos itu dalam konteks yang riil dari masyarakat sekitar. Konteks yang ada

sekarang sama sekali berbeda, maka, menurut saya, sangat perlu adanya perubahan mitos-mitos (demitologisasi).

Dalam konteks Indonesia tidak mudah mendemitologisasi syariat Islam dan khilâfah. Sebab, masyarakat Indonesia sangat religius. Menurut Anda, sejauh mana batas-batas dari nilai-nilai Islam bisa lestari di wilayah publik, baik dari tingkat civil society *maupun negara, lantaran konsep* kaffah *mengandaikan Islam meliputi ruang privat sekaligus publik?*

Oke, saya setuju. Saya kira, penolakan umat Islam terhadap sekularisme juga beralasan. Sebab, kalau semua urusan publik diserahkan kepada *civil society* atau kepada sistem sekular, saya kira umat Islam tidak bisa menerimanya. Karena, mereka berkeyakinan bahwa agama mempunyai peran dan wewenang yang bisa menyatukan. Dalam hal ini memang ada peran agama yang bisa disatukan. Untuk menjawab pertanyaan bagaimana kita menyatukan orang-orang Indonesia dengan segenap pluralitasnya, saya kira, hal pertama yang perlu disadari adalah bahwa, di negara ini, Islam sudah menjadi identitas yang melekat. Bahkan, dalam hal tertentu, kita tidak dapat memisahkan antara identitas sosial, etnis, maupun identitas agama. Semua telah menyatu.

Ketika Islam menjadi identitas, maka Islam pun dapat menjadi: *pertama,* modal budaya *(cultural capital).* Apapun yang dikembangkan dalam kebudayaan – bagaimana membangun sebuah masyarakat dan seterusnya – pasti dipengaruhi dan diwarnai oleh Islam. Itulah yang terjadi di Indonesia. Mengapa perayaan Idul Fitri lebih ramai dibanding Idul Adha? Karena orang Islam di Indonesian mewarnai idul fitri dengan nuansa budaya saling memaafkan

kepada orang tua. Dan *kedua,* karena itu sudah menjadi identitas, maka secara otomatis Islam juga menjadi modal politik *(political capital).* Saya kira hal itu wajar dan masuk akal. Karena Islam sudah menjadi identitas kolektif, yang dapat menyatukan massa, maka Islam menjadi kekuatan politik yang luar biasa. Bayangkan saja, misalnya, seorang da'i sekaliber KH. Zaenuddin MZ dan Aa Gym bisa mengumpulkan jutaan orang, baik dengan maupun tanpa membayar. Itu merupakan sebuah kekuatan kapital yang sangat luar biasa. Maka wajar saja kalau ada orang yang mempunyai minat politik memanfaatkan Islam sebagai *political capital.* Berawal Islam sebagai *cultural identity*, menjadi identitas kuat yang kemudian menjadi *cultural capital* dan meningkat menjadi *political capital.*

Selama ini, agama – karena bercampur baur dengan politik – kerap diidentikkan dengan kekerasan, otoritarianisme dan perilaku korup. Dengan memisah-kan agama dari kekuasaan, menurut saya, agama justru akan dikembalikan pada fungsinya yang benar, yaitu sebagai penyelamat dan penerang hati umat manusia.

Kini, seiring perkembangan zaman, *ketiga,* Islam bahkan telah menjadi modal ekonomi *(economical capital).* Industri yang mengandalkan agama kian menjamur, mulai dari layanan *Short Message Service* (SMS) rohani, *tawshyiah*, hingga penjualan produk aksesoris Muslim. Bayangkan, berapa banyak nilai uang yang masuk dari layanan SMS Rohani? Tentu banyak sekali. Kita juga menyaksikan banyak sekali acara di sejumlah stasiun televisi yang memanfaatkan dan mengatasnamakan agama. Selain itu, seiring gairah berislam yang terus meningkat, butik-butik busana Muslim yang menyediakan pakaian mulai dari jilbab hingga aksesoris lainnya bertebaran di

mana-mana. Belum lagi, produk mutakhir dari transaksi keuangan yaitu bank syariah. Semua bank syariah memanfaatkan Islam sebagai *economical capital.* Bahkan, akhir-akhir ini, di Malaysia dan Thailand, asosiasi *halal food* menjadi industri yang sangat besar. Itu terjadi karena Islam ternyata mempunyai *capital market* yang dapat dikembangkan. Sekali lagi, Islam sebagai sebuah *economical capital,* berawal dari Islam sebagai identitas.

Sekaligus menjawab pertanyaan di atas, dengan realitas yang ber-kembang seputar promosi penegakan syariat Islam dalam wujud kekuasan politik, hal tersebut hanya akan menghancurkan modal budaya dan politik yang selama ini telah lestari di Indonesia. Sedangakan untuk menjawab kekhawatiran bagaimana kalau syariah atau Islam menyatu di Indonesia, saya kira, kita perlu usaha dan wadah yang mampu merekonstruksi sejarah Islam, sehingga bisa menjelaskan bahwa Islam di Indonesia mempunyai lingkungan sosial budaya yang berbeda dengan Timur Tengah. Hal ini untuk mendemitologisasi pandangan umat Islam yang selama ini begitu saja mengasosiasikan Islam selalu berorientasi pada Timur Tengah. Jadi, yang perlu didemitologisasi bahwa Islam bukan hanya Arab, tapi ada juga yang lain, yaitu Indonesia. Kita punya hak dan wewenang untuk menerjemahkan Islam sesuai dengan karakter budaya kita sendiri.

Pemisahan antara agama dan negara terjadi di Barat. Sementara di Indonesia, dengan kondisi sosiologis yang ada, agaknya sulit untuk menerapkan itu. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah sifat eksesif dan ekspansif agama yang sulit untuk didemitologisasi. Bagaimana komentar Anda?

Bagi saya, yang paling penting diperhatikan adalah bukan pemisahan yang tegas antara agama dan negara, melainkan bagaimana menyediakan mekanisme yang disepakati bersama untuk menyelesaikan segenap persoalan yang timbul akibat perbedaan. Di Amerika, mereka sepakat untuk menyelesaikan perbedaan melalui pengadilan (mekanisme hukum sekular). Jika terjadi konflik antarumat beragama, maka dianggap sebagai persoalan pribadi di antara mereka *(citizenship),* bukan persoalan negara. Dalam hal itu, negara tidak ikut campur. Tapi, begitu menjadi keputusan pengadilan, negara harus menghormati dan menjalankan kewajiban menunaikan keputusan. Namun demikian, negara tidak ikut menjadi bagian dari pihak yang berkonflik.

Di Indonesia, persoalan konflik tak terselesaikan bahkan kian karut-marut lantaran negara ikut menjadi pihak yang bertikai. Contoh paling gamblang adalah bagaimana menyelesaikan perbedaan Ahmadiyah dengan Islam *mainstream* yang mengemuka belakangan ini. Saya khawatir, karena dalam dunia Islam, ini sekaligus sebagai otokritik, preseden mekanisme penyelesaian masalah yang telah ada cenderung tidak demokratis. Misalnya, perbedaan antara umat Islam Sunni dan Syi'ah yang telah terjadi sekian lama, tidak pernah ada mekanisme penyelesaiannya yang memuaskan. Yang terjadi adalah mekanisme kalah atau menang. Begitu Syi'ah berkuasa, Sunni tersingkir, sebaliknya begitu Sunni yang menang, Syi'ah disingkirkan.

Kini, di tengah zaman yang sudah terbuka, kita harus mencari mekanisme yang tepat untuk memecahkan konflik. Menurut saya, pemisahan antara agama dan negara –dalam arti negara tidak ikut campur dalam konflik yang terjadi – bermakna positif.

Karena yang berkonflik adalah warga negara, maka yang mestinya menyelesaikan masalah adalah pengadilan. Begitu pengadilan memutuskan, maka negara harus mengamankan keputusan yang dihasilkan. Itulah yang harus ditekankan.

UIN Jakarta sebagai institusi yang tidak dapat dipisahkan dari wajah Islam Indonesia tentunya memiliki peran yang jelas dalam hal tersebut. Bagaimana proses demitologisasi yang disuarakan UIN Jakarta dalam rangka menempatkan agama dan hal-hal yang bersifat publik secara proporsional?

Untuk menjawabnya saya akan menceritakan problem pendidikan Islam terlebih dahulu. Selama ini, pendidikan Islam menggunakan pendekatan *(approach)* yang terlampau normatif dan doktrinal. Mempelajari Islam adalah mempelajari ritual, keimanan dan seterusnya. Penekanannya cenderung normatif dan hanya mempertimbangkan al-Quran dan al-Hadits. Karena hanya mengedepankan sisi normatif, studi Islam pun tidak pernah berkembang. Salah satu indikasinya dapat kita lihat pada perdebatan dalam politik Islam yang selama ini selalu masuk ke dalam perdebatan *fiqh siyâsî;* membicarakan pandangan *fuqahâ'* (para ahli fikih) tentang politik. Yang menjadi rujukan selalu al-Ghazali, al-Mawardi dan ulama klasik lainnya. Perdebatan politik seolah sudah menjadi bagian dari ibadah, bahkan menjadi doktrin.

UIN Jakarta mencoba untuk melakukan tambahan atau mereformasi pendekatan studi Islam dengan menggunakan pendekatan sejarah dan sosial *(social and historical approach).* Sebuah pendekatan yang berusaha memahami Islam berdasarkan konteks sosial dan sejarahnya. Sebuah peristiwa atau masyarakat tidak bisa dipahami

> Dalam bidang ilmu, Islam jelas telah melakukan sekularisasi. Misalnya, kalau mau membaca al-Quran kita harus terlebih dahulu berwudlu, sedangkan untuk membaca buku matematika, Fisika atau sastra kita tidak disuruh berwudlu. Contoh tersebut, menurut saya, menunjukkan inkonsistensi umat Islam dalam berpikir. Ini terjadi karena kita kerap memandang sesuatu secara tidak utuh. Atau mungkin juga karena pengaruh al-Ghazali yang telah membagi ilmu menjadi ilmu yang *fardlu 'ayn* dan *fardlu kifâyah.*

tanpa memahami konteks sosial dan psikologis yang berkembang. Menurut saya sangat penting mengajarkan umat Islam untuk melihat realitas sosial sebagai realitas sosial, bukan realitas agama. Contoh, tsunami yang menimpa Aceh, kalau menggunakan pandangan normatif-doktrinal, akan selalu dikaitkan dengan pengalaman keagamaan kita. Ada seorang kiai yang mengatakan bahwa tsunami di Aceh terjadi karena perempuan di Aceh tidak berjilbab. Ada juga yang mengatakan, itu terjadi karena banyak orang Aceh yang tidak salat, bermabuk-mabukan di pinggir pantai. Mereka menghubungkan antara faktor sosial dengan doktrin keagamaan.

Menghadapi persoalan itu, UIN Jakarta ingin memberikan tambahan dalam menganalisis peristiwa sosial. Bagi kami, memahami realitas sosial harus berdasarkan fakta sosialnya. Tsunami, kita pahami sebagai fakta sosial yang bisa dijelaskan secara rasional. Pandangan demikian juga akan berpengaruh pada solusi yang diberikan. Kalau menggunakan doktrin, solusi penyelesaian atau mengatasi tsunami adalah dengan memperbanyak ritual dan doa. Tapi dengan pendekatan sosial *(social approach)* akan terlebih dahulu menganalisis problem lingkungan yang ada. Melalui analisis sosial, solusi yang ditawarkan pun masuk akal, misalnya, jangan membangun rumah

di dekat pantai, memasang peringatan dini untuk tsunami, atau yang lainnya.

Oleh karena itu, dalam hal ini, saya setuju dengan konsep sekularisasi. Agama tidak bisa dijadikan payung hukum untuk memutuskan segala hal. Realitas sosial hendaknya dipotret atau dianalisis melalui konteks sosialnya, bukan dengan doktrin agama. Tentu agama dapat berperan menjadi penerang rasionalitas manusia yang cenderung alpa.

Bagaimana fungsi dan peran UIN Jakarta dalam konteks itu?

Fungsi dan peran UIN Jakarta dalam konteks ini yaitu memberikan penjelasan dan memberikan *skill* kepada umat Islam agar mempunyai cakrawala yang lebih luas dalam memandang agama. Karena umat Islam seringkali terlampau sempit memahami agama, maka kami menawarkan untuk menggunakan perspektif sosial *(social perspective).* Kenapa ini kita ajukan? Karena umat Islam seringkali begitu lantang menolak sekularisme politik, yang memisahkan urusan politik dengan urusan agama, padahal mereka melakukan sekularisasi besar-besaran dalam masalah pendidikan. Mereka kerap meneriakkan adanya pemisahan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum. Pendidikan Islam hanya berisi dan mengajarkan pendidikan agama. Sementara pendidikan umum mengajarkan ilmu-ilmu umum. Bukankah itu jelas-jelas praktik sekularisasi yang telah tanpa sadar mereka lakukan?

Dalam bidang ilmu, Islam jelas telah melakukan sekularisasi. Misalnya, kalau mau membaca al-Quran kita harus terlebih dahulu berwudlu, sedangkan untuk membaca buku matematika, Fisika atau sastra kita tidak disuruh berwudlu. Contoh tersebut, menurut

saya, menunjukkan inkonsistensi umat Islam dalam berpikir. Ini terjadi karena kita kerap memandang sesuatu secara tidak utuh. Atau mungkin juga karena pengaruh al-Ghazali yang telah membagi ilmu menjadi ilmu yang *fardlu 'ayn* dan *fardlu kifâyah.*

Yang sering saya sampaikan kepada para mahasiswa adalah bahwa umat Islam menolak sekularisasi di bidang politik, sementara melakukannya untuk bidang pendidikan. Ketika IAIN berubah menjadi UIN, banyak orang yang mengkritik dengan mengatakan "IAIN *kok* membuka fakultas umum?" Dengan perkataan itu, si pengkritik seolah menempatkan kewajiban menjadi dokter dan ahli komputer hanya kewajiban kedua *(second)* dari kewajiban menjadi ahli agama.

> Keinginan UIN Jakarta adalah membobol sekat-sekat mazhab yang ada di dalam Islam. Kita punya prinsip bahwa kalau kita bisa toleran sesama umat Islam yang berbeda mazhab, pasti kita bisa toleran dengan agama lain.

Melihat fakta seperti itu tampaknya kita tidak bisa memisahkan sama sekali ruang publik dari peran agama. Persoalannya, agama yang memiliki nilai-nilai kedamaian dan toleransi justru ditampakkan ke publik sebagai sesuatu yang menakutkan, tidak saja bagi yang lain, melainkan kepada intern umat seagama. Perda syariah dan khilâfah Islamiyah misalnya, bagi segelintir kelompok mungkin memberikan angin segar, tapi tidak sedikit kelompok yang merasa terancam dengan pemberlakuannya yang ternyata kontraproduktif. Menurut Anda bagaimana menampakkan Islam di muka publik?

Saya kira peran pendidikan di sini sangat penting. *Pertama*, kita harus meredefinisi pendekatan *(approach)* kita dalam studi Islam

dan menggambarkan diri ke publik dengan baik. *Kedua*, referensi yang kita baca juga harus semakin kaya. Kalau buku-buku yang kita baca sekarang masih sama dengan buku-buku yang dibaca dan diterbitkan oleh ulama-ulama pada beberapa abad yang lalu, kita akan kembali ke jalan yang sama, tidak akan berkembang.

Saya pernah menulis tentang kepemimpinan kaum muda. Tulisan ini didasari ide bahwa kepemimpinan dalam agama tidaklah salah kalau juga diberikan kepada kaum muda. Selama ini kepemimpinan agama selalu berdasarkan senioritas. Sekarang, sudah saatnya kaum muda harus diberi porsi lebih banyak untuk menjadi pemimpin agama. Sebab, kita lahir dan besar di zaman yang berbeda, maka untuk persoalan sekarang kita tidak bisa mengklaim atau menjustifikasi apa yang telah dilakukan oleh orang di masa lalu. Pendidikan kita jauh berbeda dengan ulama-ulama terdahulu. Karena itu pemimpin muda juga harus muncul dalam kepemimpinan agama. Ini penting untuk mengubah persepsi dan orientasi tentang diri kita sendiri, bagaimana mendefinisikan diri kita sebagai bagian dari dunia.

Untuk itu, menurut saya, pemimpin maupun ormas Islam seharusnya mulai memberikan porsi yang lebih besar kepada kaum muda untuk menjelaskan Islam sesuai dengan zamannya. Sekarang kita hidup di zaman komputer dan internet dengan permasalahan yang tentunya terus berkembang. Seharusnya kepemimpinan umat juga perlu memikirkan regenerasi.

Apakah menurut Anda kehadiran perda syariah dan khilâfah dalam proses sekularisasi di Indonesia adalah sesuatu yang sama sekali tidak kontekstual?

Fungsi dan peran UIN Jakarta dalam konteks ini yaitu memberikan penjelasan dan memberikan *skill* kepada umat Islam agar mempunyai cakrawala yang lebih luas dalam memandang agama. Karena umat Islam seringkali terlampau sempit memahami agama, maka kami menawarkan untuk menggunakan perspektif sosial *(social perspective).*

Ya, menurut saya bukan sekadar tidak kontekstual, tapi juga tidak *applicable*, itu mimpi. Saya selalu bertanya kepada para pengusung khilâfah bagaimana kita mengatasi perbedaan dalam sistem *khilâfah*? Dalam *khilâfah*, seseorang yang melakukan bidah akan disingkirkan dan dibunuh. Pada waktu Abbasiyah berkuasa, orang-orang Umayyah dihabisi. Sementara pada masa Umayyah, orang-orang Syi'ah juga habis. Itulah realitas sejarah kita.

Sekarang kita hidup dalam dunia yang berbeda. Inilah faktanya. Jadi, bagaimana kita mengatasi perbedaan itu? Bagaimana mungkin kita mau menghakimi kawan-kawan kita yang Syi'ah kalau Indonesia menganut khilâfah? Belum lagi mengatasi perbedaan antara Islam dan non-Islam. Apakah mereka akan dianggap kafir *dzimmi* dan itu berarti menjadi warga negara kelas dua *(second class citizens)*?

Tantangan yang kedua, menurut saya, lebih pada fakta hubungan internasional. Apa yang kita lakukan di Indonesia akan berpengaruh pada masyarakat di dunia internasional, lantas apakah kita rela jika umat Islam di Amerika, Australia, Eropa dan belahan dunia lain menjadi *second class citizens*, yang artinya penduduk Muslim di daerah-daerah mayoritas non-Muslim tidak boleh memilih presiden atau tidak mempunyai hak politik untuk memilih dan dipilih, dan sebagainya. Melihat hal itu, saya kira, konteks

penerapan khilâfah sama sekali tidak tepat, tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang pluralis.

Di sektor ekonomi, sekarang marak bermunculan bank syariah. Apakah itu merupakan implikasi langsung dari tuntutan-tuntutan sejenis (ideologis) di bidang kenegaraan secara umum? Lantas apakah itu murni tuntutan umat Islam secara kultural atau ada nuansa-nuansa lain di balik semuanya?

Saya tidak tahu persis, itu perlu penelitian lebih lanjut. Tapi saya mendapat informasi bahwa yang menjadi nasabah bank Islam di Malaysia ternyata bukan hanya orang Islam, tapi juga orang Cina. Bank Islam di sana, konon lebih *comfortable* ketimbang beberapa bank konvensional. Oleh karena itu, bagi saya, silakan saja ada bank syariah karena itu, sebenarnya, tuntutan ekonomi. Kalau ada dua jenis bank yang melayani masyarakat, syariah dan konvensional, tentunya akan lebih kompetitif, dan itu justru menguntungkan publik. Yang saya tidak setuju adalah kalau ada pemaksaan terhadap umat Islam untuk menabung di bank syariah. Di luar itu, tuntutan bank syariah saya kira merupakan sesuatu yang wajar, karena Islam sudah menjadi *political capital* dan *economical capital*.

Lebih dari itu, di Surabaya dan Jakarta *konon* ada yang disebut dokter Islami. Dalam bidang properti, ada juga perumahan Islami. Toh tetap ada yang memanfaatkan dan membeli itu. Artinya, itu lebih pada persoalan *market*. Yang problem adalah kalau itu diwajibkan, misalnya, semua umat Islam harus tinggal di hotel atau komplek islami yang sama. Tetapi, bahwa bank syariah dan hal-hal yang islami lainnya tentunya punya hak untuk muncul, tidak bisa dilarang. Itulah bagian dari identitas dan realitas kita.

Kalau hal seperti itu begitu saja diterima, apakah tidak kemudian justru memuluskan bentuk formalisasi syariah lain ke dalam negara?

Tidak, karena bank syariah bukan hanya diberlakukan di negara Muslim, di London pun ada. Inggris adalah negara yang sekular, tapi ia membolehkan bank syariah. Yang tidak boleh adalah formalisasi dalam bentuk *compulsory,* yang mewajibkan semua orang untuk ikut dalam satu bentuk. Di situlah letak problem formalisasi syariah. Tapi kalau kita membuat Universitas Islam Negeri (UIN), masak tidak boleh? Islam di situ adalah identitas. Yang tidak boleh adalah ketika kita mewajibkan umat Islam untuk masuk ke UIN. Itulah yang dinamakan formalisasi, negara ikut campur tangan.

Bagi saya, yang paling penting diperhatikan adalah bukan pemisahan yang tegas antara agama dan negara, melainkan bagaimana menyediakan mekanisme yang disepakati bersama untuk menyelesaikan segenap persoalan yang timbul akibat perbedaan.

Kalau formalisasi bagi Anda tidak wajar, maka Anda pun menilai munculnya perda syariah di Indonesia tidak wajar?

Ya, tidak wajar. Karena itu saya sering mengatakan bahwa sesungguhnya saya mengartikan tiga hal mengenai perda syariah. *Pertama*, ia merupakan bentuk kebangkitan budaya *(cultural revivalism)*. Ini terjadi karena Islam sudah menjadi identitas lokal. Di Makassar, antara Bugis dan Islam itu sudah susah untuk dibedakan. Demikian juga di Padang dan Madura, sudah sangat susah membedakan yang mana budaya Islam dan yang mana budaya lokal

setempat. Hal ini sendiri terjadi bermula dari kebangkitan kultural melawan hegemoni rezim Soeharto, jawanisasi dan sebagainya. Mereka melakukan perlawanan dengan etnik. Karena Islam sudah menjadi etnik, maka yang muncul adalah Islam.

Kedua, kebangkitan politik lokal *(political revivalism)*. Sekali lagi, ini karena Islam sudah menjadi *political capital*. Maka tidak heran jika di Tangerang muncul perda syariah. Karena Pemda sadar bahwa umat Islam di sana adalah mayoritas, maka dengan memunculkan isu-isu Islam diharapkan akan kembali mendulang suara untuk pemilihannya di masa mendatang. Lihatlah daerah-daerah yang memunculkan perda serupa, kebanyakan wali kota atau gubernurnya bukan berasal dari partai Islam, tapi dari Golkar dan sebagainya. Ini jelas syariat Islam tak lebih digunakan sebagai *political capital.*

Ketiga, kebangkitan moral *(ethical* atau *moral revivalism)*. Munculnya perda syariah karena dilatari kepentingan moral. Sejak reformasi, tatakrama kita tidak *karuan*. Tidak adanya keteraturan di para pengguna lalu-lintas jalan raya, salah satunya, di mana tidak adanya keteraturan publik inilah yang memicu munculnya kebangkitan moral. Isu moral yang terpikirkan oleh kelompok tertentu adalah bagaimana bisa mengisi demokrasi ini dengan baik. Isu moral itulah yang menurut mereka seksi. Tapi, kita lihat isu ini pada akhirnya mengalami penurunan popularitasnya. Dari tahun ke tahun jumlah pemda yang menerapkan perda syariah semakin menurun. Dugaan saya, itu terjadi karena ternyata perda seperti itu tidak menguntungkan bagi partai-partai politik. Maka sesungguhnya yang terjadi adalah bahwa perda syariah lebih kental bernuansa politik daripada nuansa agamanya.

Beberapa pemikir berpandangan bahwa periode awal Islam sebenarnya masa di mana Islam tumbuh liberal. Pemikiran keislaman tumbuh secara bebas dan tidak terbatas atau monolitik. Tetapi fase setelahnya, Islam justru sampai kini menjadi illeberal Islam. *Demikianpun di Indonesia, ketika angin segar liberalisme Islam berhembus dalam bentuk kebebasan berpikir, penolakan yang muncul tak kalah sengitnya. Bagaimana Anda menjelaskan liberalisme dalam Islam?*

Sebagaimana sekularisme, liberalisme lahir dan besar dari sebuah konteks sosial dan sejarah yang berbeda dengan Islam. Makna generik dari kata liberal sendiri, menurut saya, adalah pembebasan. Dan Islam adalah pembebasan. Islam memberikan ruang untuk berpikir bebas dan berbeda dengan pandangan lainnya. Monoteisme sendiri sebenarnya tak lain dari liberalisasi atas kungkungan politeisme dan "kesakralan" alam. Artinya, liberalisme sebenarnya sudah terjadi begitu lama di dalam agama kita. Selama ini umat Islam sudah terkungkung atau terkotak pada sejarah dan konteks yang sudah mapan. Ini sudah berlangsung dari mulai adanya formalisasi Islam. Karena telah berlangsung sangat lama, sekali ada yang mencoba loncat dari pagar formalisme atau sekadar mempertanyakan batasan lingkungan tersebut, dianggap sebagai orang yang aneh.

Saya memahami teman-teman yang ingin meloncati pagar atau coba melakukan

---

Selama ini, agama – karena bercampur baur dengan politik – kerap diidentikkan dengan kekerasan, otoritarianisme dan perilaku korup. Dengan memisahkan agama dari kekuasaan, menurut saya, agama justru akan dikembalikan pada fungsinya yang benar, yaitu sebagai penyelamat dan penerang hati umat manusia.

---

liberalisasi, memang, hendak melakukan beberapa hal yang berbeda. *Pertama*, Karena Islam besar dan berkembang di tengah budaya Arab atau *Arabic speaking countries,* kemudian ke Turki, India, Cina dan akhirnya berkembang ke Indonesia, jelas memiliki budaya dan bahasa yang berbeda. Dengan begitu dirasa perlu juga adanya pendekatan yang berbeda. Ini dilakukan tak lain untuk coba menerjemahkan Islam ke dalam budaya Indonesia.

Kedua, liberalisasi bermaksud membebaskan umat Islam agar berpikir hari ini, tidak berpikir masa lalu. Jangan hanya terkungkung dengan sejarah bahwa seolah-olah pemerintahan pada masa khalifah seperti Abu Bakar, Umar dan sebagainya, adalah bayang-bayang yang harus kita wujudkan sekarang untuk mengatasi problem zaman. Sebuah idealisasi terhadap masa lalu bagi kalangan liberal sama sekali tidak realistis. Walaupun harus diakui pula bahwa teman-teman yang mendukung Islam liberal tidak mempertimbangkan realitas budaya Islam Indonesia yang sudah melekat. Karena itu, perlu kearifan dalam menyikapi realitas Islam di Indonesia.

Tapi ada sementara kalangan yang beranggapan bahwa beragama adalah sebentuk ketundukan paksa, tidak bisa bebas. Apa respon Anda dengan pernyataan seperti itu?

Hukum memang selalu memaksa. Pemaksaan jutru ada dan dimungkinkan karena adanya hukum. Pada dasarnya hukum Islam berasal dari pembakuan ajaran Islam yang dipraktikkan Nabi dan para Sahabat. Hukum itulah yang memaksa orang untuk megikutinya. Misalnya salat Tarawih adalah ritual yang awalnya dibiasakan oleh Umar. Lambat-laun, karena telah biasa, seakan-akan menjadi hukum. Perayaan Maulid Nabi, dulu dipakai untuk menyema-

ngati tentara Islam, sekarang menjadi ritual simbol tradisi Islam. Hukum bermula dan berdasar pada preseden.Yang membuat suatu agama memaksa juga adalah preseden. Karena dulu umat Islam begini, maka sekarang harus begini juga. Menurut saya, pemahaman seperti ini sudah tidak bisa lagi dipakai, karena jelas kini memiliki konteks yang jauh berbeda dengan dahulu. Saya kira memang perlu ada kesepakatan baru untuk memahami agama.

> Makna generik dari kata liberal sendiri, menurut saya, adalah pembebasan. Dan Islam adalah pembebasan. Islam memberikan ruang untuk berpikir bebas dan berbeda dengan pandangan lainnya. Monoteisme sendiri sebenarnya tak lain dari liberalisasi atas kungkungan politeisme dan "kesakralan" alam. Artinya, liberalisme sebenarnya sudah terjadi begitu lama di dalam agama kita.

Tapi, secara antro-pologis, apa yang diungkapkan oleh orang atau kelompok yang tadi Anda sebutkan adalah betul. Betul bahwa tidak ada masyarakat yang tidak terpaksa. Tapi, keterpaksaan yang dimaksud terjadi karena adanya kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama tak jarang berupa sesuatu yang bersifat turun-temurun. Dan karena sudah terbiasa, maka menjadi hukum. Oleh karena itu, tak salah kalau sekarang kita perlu kembali membuat kesepakatan bersama sesuai dengan konteks zaman yang kita hadapi.

Formalisasi hukum-hukum agama, seperti perda syariah, pada praktiknya tidak memberikan kebebasan. Beberapa penelitian tentang perda syariah menyebutkan bahwa justru dengan perda syariah perempuan dimarginalisasi, kebebasan beragama diberangus dan ruang

dialog perbedaan agama menjadi tidak dimungkinkan. Bagaiamana menurut Anda?

Menurut saya problemnya bukan di situ, melainkan pada mekanisme yang digunakan oleh masing-masing sistem. Dalam demokrasi individu diberikan kebebasan untuk bersuara. Individu-individu sebagai warga negara menentukan konsensus bersama, sementara dalam agama (Islam) kesepakatan selalu berasal dari elite (ulama), bukan dari *grassroot*, individu-individu penganut agama. Dalam hal ini, misalnya, MUI yang merepresentasikan elite agama dan punya hak untuk menentukan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan agama.

Sekarang ini kita hidup dalam zaman demokrasi di mana setiap orang mempunyai hak dan pengalaman yang berbeda-beda. Agama juga seharusnya tidak hanya mendasarkan diri pada otoritas elite, sebaliknya, sudah saatnya mempertimbangkan publik. Inilah persoalan krusial yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, kita harus membuat kesepakatan mengenai mekanisme untuk menyelesaikan perbedaan. Dari situ, kita juga bisa bertanya, sebenarnya siapa yang berhak memutuskan persoalan perda syariah dan sebagainya? Menurut saya, sekarang sudah saatnya coba bertanya kepada publik, apakah mereka betul-betul memerlukan perda syariah? Kalau memang masyarakat memerlukannya, *why not,* toh itu sikap rakyat. Tapi kalau ternyata mereka tidak butuh, kenapa dipaksakan?

Apakah dengan begitu tidak malah kian memuluskan daerah-daerah tertentu di Indonesia untuk menerapkan aturan sesuai dengan suara mayoritas? Bali misalnya, kalau seperti itu, bisa saja membuat Perda Hindu,

Manokwari membuat Perda Injil. Bukankah itu akan mendiskriminasikan kaum minoritas?

Dalam hal ini, menurut saya, juga perlu adanya kesepakatan. Meskipun Amerika adalah negara demokrasi, tapi tetap ada negara bagian tertentu yang menerapkan hukum yang sangat khas. Misalnya di Brigham Young University, di Utah menganut paham Mormon, di sana kita dilarang minum teh di lingkungan kampus. Atau masyarakat Amis di bagian negara Pensylvania, yang menolak memakai listirik dan kendaraan bermotor, tetap bisa berjalan. Dan itu bisa dijalankan karena telah menjadi kesepakatan, sebuah kesepakatan untuk tidak salah dengan melakukan kekerasan, dan, tentu saja, menghormati hukum yang telah disepakati bersama. Yang agak krusial dan kerap menjadi perdebatan di Indonesia adalah seringkali simbol-simbol syariah masuk ke dalam hukum positif negara.

Menurut saya, sekarang dibuka saja semua peluang membuat regulasi yang sesuai dengan nilai-nilai lokal setiap daerah. Karena di Bali, misalnya, tanpa kita sadari sebenarnya sudah melakukan hukum Hindu, meski tak dikatakan secara tertulis. Misalnya, kalau hari Nyepi tidak boleh ada yang keluar. Itu kan "syariat" Hindu? Jadi, sebenarnya ada daerah-daerah tertentu yang sudah menerapkan perda seperti itu, bukan hanya yang secara ekstrem, seperti yang terjadi di Aceh.

Para pengususung perda syariah mengklaim tuntutannya telah melalui prosedur yang demokratis. Tapi tak dapat dielakkan bahwa beberapa item hukum pada perda syariah mengandung hal-hal yang antidemokrasi. Pemerintah harusnya berperan tegas dalam urusan ini. Bisakah

perda syariah yang antidemokrasi dieliminir oleh pemerintah dengan kekuatan demokrasi?

Kalau negara benar-benar mau mengambil perannya sesuai dengan amanat konstitusi dan berpegang pada asas demokrasi, itu seharusnya bisa. Tidak akan muncul perda syariah kalau negaranya kuat. Untuk itu, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi harus berani bersikap tegas. Di Amerika pun tidak jarang ada umat Katolik yang coba memaksa memasang salib di kantor tempatnya bekarja atau di tempat-tempat publik lainnya. Tapi karena pengadilan mampu bersikap tegas dengan konstitusi sebagai kesepakatan bersama, itu tetap tidak diperbolehkan. Maka menururt saya, sudah seharusnya Mahkamah Agung kita secara aktif mereview semua peraturan yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi.

Amerika yang begitu tegas menegakkan konstitusi dan dianggap sebagai kampiun demokrasi, tetap memiliki satu daerah di California yang melarang pengajaran teori evolusi, karena dianggap bertentangan dengan agama. Dengan ini, bukan berarti praktik sejenis boleh terjadi di negara kita. Kita tetap punya kewajiban konsisten dengan konstitusi yang telah menjadi konsesnsus bersama. Karenanya, tugas berat kita di sini adalah bagaimana mendisasosiasi syariah dengan negara Islam, baik bagi orang luar maupun umat Islam sendiri. Selama ini, begitu muncul *term* syariah, yang terpikirkan baik oleh umat Islam maupun orang luar adalah negara Islam. Di sinilah demitologisasi mutlak diperlukan. Kalau ada orang atau kelompok di daerah manapun berkeinginan membuat perda yang melarang praktik maksiat, sebut saja Perda Antimaksiat, jangan memakai sebutan perda syariah. *Toh* di Ohio, Amerika

Serikat, yang *notabene* tidak mayoritas Muslim, perjudian dan alkohol juga menjadi sesuatu yang terlarang. Artinya, jangan hanya karena kita mayoritas beragama Islam, simbol-simbol agama mayoritas harus dikedepankan. Kalau tanpa embel-embel simbol agama, namun manfaat yang dihasilkan sama-sama baik dan diterima publik, tentu tetap tidak salah dan akan tetap dinilai baik.

Sejak masa perjuangan hingga sekarang, negara Indonesia adalah sesuatu yang final, tidak bisa diganti dengan negara Islam atau ideologi lainnya.

Sekali lagi, wacana publik tentang syariah kini sudah harus didemitologisasi. Karena salah satu yang paling dikhawatirkan, dan memang kecenderungannya demikian, dari tuntutan yang selalu mengklaim demokratis ini adalah akan berujungnya tuntutan pada pendirian negara Islam, yang jelas bertentangan dengan kesepakatan berbangsa dan bernegara kita. Sejak masa perjuangan hingga sekarang, negara Indonesia adalah sesuatu yang final, tidak bisa diganti dengan negara Islam atau ideologi lainnya. Indonesia bukanlah negara yang berdasar pada ideologi atau agama tertentu.

Pluralisme adalah isu yang juga menjadi konsentrasi Anda. Salah satu tindakan yang bisa mencederai ini adalah gerakan radikal yang kerap muncul dalam agama-agama. Pertanyaannya, apakah yang Anda pahami dengan pluralisme?

Indonesia memang bangsa yang plural sejak sebelum Islam datang ke Indonesia. Kekayaan dan kelebihan Indonesia adalah di keanekaragaman budayanya. Dalam masyarakat yang beragam tentu

diperlukan sikap terbuka dan toleran terhadap perbedaan budaya dan perilaku. Maka gerakan radikal, baik dalam bentuk agama maupun ideologi, hanya akan mencederai sikap terbuka dan toleran yang selama ini menjadi pilar keutuhan Indonesia.

Anda pernah menulis buku tentang Gerakan Salafi Radikal di Indonesia, bisakah Anda jelaskan apa isi dan maksud dari buku itu?

Buku itu ditulis untuk memberikan kerangka teoretis atau cara memandang radikalisme. Dalam dunia akademik, penjelasan akan radikalisme sudah begitu banyak bermunculan. *Pertama*, ada yang mengidentifikasikannya sebagai reaksi dari kondisi kemiskinan. Menururt pendapat pertama ini, kemiskinan yang dibumbui oleh pemahaman agama tertentu bisa berubah wujud menjadi gerakan yang terkonsolidasikan. Ia bisa muncul dalam bentuk "pemberontakan". *Kedua*, fundamentalisme muncul dari paham agama yang ekstrem. Pemahaman agama yang cenderung literal akan membawa seseorang bersikap radikal.

Ketiga, fundamentalisme lebih menjadi gerakan yang berlatar alasan politik, yaitu menjadikan radikalisme sebagai pintu masuk menyuarakan aspirasi politik. Dengan bersikap radikal, seseorang atau kelompok akan diperhatikan oleh orang lain, karenanya mempunyai nilai jual politik. *Keempat*, radikalisme menjadi semacam gerakan ratu adil. Karena situasi ekonomi politik mengalami kekacauan, muncullah semangat menyelesaikan masalah yang biasanya kerap diidendtifikasi dengan kehadiran ratu adil. Salah satunya diyakini bisa hadir dari agama. Celakanya, pemahaman yang dibawa memiliki kecenderungan yang radikal.

Analisis itulah yang saya pakai untuk melihat kenyataan sosial di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, saya temukan beberapa organisasi yang bisa dikategorikan memiliki garis perjuangan radikal. Sebuat saja organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Front Pembela Islam (FPI), Jamaah Islamiyah (JI) dan Majlis Mujahidin Indonesia (MMI). Selanjutnya, saya juga melihat ada benang merah di antara kelompok-kelompok tersebut, yaitu kecenderungan *middle-eastern minded*. Saya lihat mereka mempunyai kesamaan dalam menganggap diri sebagai salaf. Padahal NU dan beberapa ormas lain yang cenderung tidak radikal juga mengaku salaf. Pada titik itu, menurut saya, salaf telah di-*hijack* oleh Wahhabisme dan gerakan radikal lainnya.

> Wacana publik tentang syariah kini sudah harus didemitologisasi. Karena salah satu yang paling dikhawatirkan, dan memang kecenderungannya demikian, dari tuntutan yang selalu mengklaim demokratis ini adalah akan berujungnya tuntutan pada pendirian negara Islam, yang jelas bertentangan dengan kesepakatan berbangsa dan bernegara kita.

Dalam identifikasi saya, radikalisme ini ditandai dengan kriteria seperti ingin menegakkan negara Islam, melihat pertentangan Islam dan Kristen sebagai jihad, perang abadi di antara keduaya, dan beberapa kriteria lainnya. Dari situ, kemudian saya membagi lagi kelompok-kelompok radikal tersebut ke dalam dua kutub besar. *Pertama*, kelompok yang lebih mengedepankan *activism,* dengan aktif berdemonstrasi dan melakukan kekerasan-kekerasan fisik. Dan *kedua*, adalah kelompok yang cenderung bermain di tingkat diskursus, wacana. Kelompok pertama diwakili oleh FPI, Laskar Jihad dan sebagainya. Sementara kelompok kedua diwakili oleh HTI dan MMI. Mereka memang

tidak *violence,* tapi secara akal dan wacana menentang demokrasi dengan sangat radikal.

Bagaimanapun radikalisme menjadi gerakan yang antipluralisme. Mereka cenderung memaksakan "nilai-nilai keagamaan tertentu" dianut oleh tidak hanya bermacam umat Islam tapi juga non-Muslim sebagai paham yang disepakati bersama dengan menampik paham lain yang berbeda. Indonesia sebagai negara yang plural mestinya tidak mungkin melahirkan gerakan-gerakan fasis seperti itu. Bagaimana Anda menjelaskannya?

Saya kira Islam, baik secara ideologi maupun kultur, hidup dalam masyarakat yang plural. Sejak zaman Madinah, bermacam etnis yang bergabung dan mengikatkan diri sebagai satu komunitas ternyata banyak sekali mempunyai perbedaan. Islam menjadi payung yang luar biasa untuk mewujudkan pluralisme pada saat itu. Makanya, menurut saya, pengalaman Islam dalam hal itu sebenarnya lebih kaya ketimbang Katolik dan Kristen. Lihat saja, dari Maroko sampai ke Indonesia yang dinamakan sufi itu bermacam-macam, sebutannya pun berbeda-beda, itu karena secara teologis Islam mengakui pluralisme. Coba lihat arsitektur masjid yang sangat kaya dibandingkan dengan bentuk gereja yang sangat dipengaruhi oleh Roma Katolik. Belum lagi bentuk pakaian. Di situ kita punya sajadah dan sarung dari berbagai tempat; Bangladesh, Pakistan, Indonesia dan lainya. Itu semua mungkin terjadi karena ajaran kita kental dengan nuansa toleransi. Islam sendiri, baik secara sosiologis maupun teologis, mestinya toleran. Ini tidak bisa dipungkiri. Dan inilah yang menurut saya akan membawa Islam pada kebesarannya.

Celakanya, di Indonesia, gerakan radikal didukung oleh MUI, suatu lembaga agama yang semi negara. Dari sinilah muncul apa yang kita sebut dengan monisme dalam beragama. Masyarakat Islam yang memiliki pemahaman keagamaan lain, seperti Ahmadiyah, menjadi tidak mungkin hidup bersama dalam bingkai kesatuan bangsa.

Yang perlu diredefinisi sekarang, menurut saya, adalah siapa yang berhak mengeluarkan fatwa? Ingat, sekarang zaman sudah berubah, tidak bisa kita samakan dengan masa Nabi dan para Sahabatnya. Di zaman internet ini, ada yang kita kenal dengan sebutan *online fatwa*. Seseorang bisa mencari fatwa dalam tema dan masalah apapaun lewat *google*. Dan melalui *online fatwa,* kita bisa memilih fatwa mana yang cocok dan tidak dengan pikiran kita. Jadi, kalau kita tidak sepakat dengan satu pendapat bisa memilih pendapat lain yang lebih sesuai menurut kita.

Dengan begitu saya ingin sekali lagi mengatakan bahwa Islam, tidak hanya secara sosiologis melainkan juga teologis, adalah agama yang pluralistik. Bayangkan saja, pada tradisi agama mana yang mentolerir perbedaan dalam ilmu kalam? Hanya dalam Islam. Tradisi mana yang kaya dengan mazhab? Sekali lagi, Islam. Bahkan dalam tradisi Islam juga memiliki perbedaan yang demikian kental seperti Sunni dan Syi'ah. Artinya, tak dapat disangkal bahwa Islam sejatinya adalah agama yang mengagungkan pluralisme.

Namun demikian, kita juga tak bisa mengabaikan begitu saja paham atau peristiwa-peristiwa yang memperlihatkan kecenderungan antipluralime dalam Islam. Pertanyaannya, dengan konteks seperti itu,

bagaimana Anda melihat pluralisme di masa mendatang di Indonesia, akan makin terkonsolidasi atau sebaliknya aus untuk kemudian benar-benar musnah?

Perlu usaha bersama untuk terus menjelaskan kepada masyarakat Indonesia bahwa kemajemukan bangsa Indonesia adalah takdir sosial. Oleh karena itu harus ada usaha terus menerus untuk menjaga agar umat Islam memahami realitas sosial Indonesia yang majemuk. Partisipasi di kalangan anak muda untuk penyadaran realitas plural ini perlu dikembangkan, agar ada pemahaman yang tak putus antar-generasi.

UIN Jakarta sering diidentikkan dengan Muslim Sunni. Padahal lembaga pendidikan mestinya tidak sektarian. Kalau mau menjadikan UIN sebagai pusat studi Islam, maka seharusnya semua warna Islam pun muncul di UIN Jakarta. Faktanya, kurikulum UIN masih kerap dikatakan Sunni oriented. *Apa penjelasan Anda?*

Saya kira ada benarnya. Tapi juga tidak sepenuhnya benar. Karena Syi'ah juga mendapat proporsi yang besar di UIN Jakarta. Buku-buku Murthada Mutahhari juga kita pakai sebagaimana buku-buku ulama Sunni atau lainnya. Bahkan kita mempunyai *Iranian Corner,* bekerjasama dengan Kedubes Iran. Kita juga mengirim mahasiswa dan dosen ke Iran untuk belajar Syi'ah. Secara akademik sesungguhnya kita bersikap *balance* terhadap Syi'ah. Buku-buku Syi'ah juga kita berikan kepada mahasiswa. Tapi karena banyak mahasiswa yang hidup di lingkungan Sunni, mereka tentu cenderung mengikuti yang Sunni.

Tapi, secara umum, sebagai pusat studi Islam, UIN Jakarta dirasa belum cukup lengkap karana belum menampung semua aliran Islam yang ada di Indonesia, seperti Ahmadiyah dan lainnya. Bagaimana jika ada orang luar yang ingin mengkaji Islam dalam wajahnya yang berbeda (Ahmadiyah dan lainnya)? Bisakah UIN Jakarta memfasilitasinya?

Kalau Ahmadiyah memang belum. Sekarang kita sedang membentuk sebuah tim riset untuk menilai agama-agama lokal, bukan hanya Ahmadiyah. Indonesia juga punya Islam *Wetu Telu* di NTB, juga ragam warna lokal lainnya seperti di Kuningan, Jawa Timur dan lainnya. Itu juga bagian dari kajian kita. Tapi bahwa UIN Jakarta sangat identik Sunni, itu tidak bisa dipungkiri. Meski demikian, kita juga tetap memberikan perhatian yang besar kepada non-Sunni. Intinya, kita mencoba bersikap *balance.* Karena harus diingat, salah satu keinginan UIN Jakarta adalah membobol sekat-sekat mazhab yang ada di dalam Islam. Kita punya prinsip bahwa kalau kita bisa toleran sesama umat Islam yang berbeda mazhab, pasti kita bisa toleran dengan agama lain. Selama ini kita tidak banyak mengajarkan perbedaan dalam Islam sendiri, karena itu buku-buku yang kita ajarkan di sini mencoba mengambil dari berbagai mazhab, supaya sekat-sekat fikih tidak menjadi formalistik, lebih dari itu fikih menjadi bagian dari pilihan *(choice).* Kalau kita bisa membobol sekat perbedaan mazhab, pasti kita bisa membobol perbedaan sekat etnik, agama, wilayah, negara dan sebagainya. Itulah keinginan UIN Jakarta.

Percakapan dengan

Kautsar Azhari Noer

Kautsar Azhari Noer, Guru Besar Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia mengajar pascasarjana di UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Indonesia, STF Driyarkara dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sejak 2007 ia diangkat sebagai Honorary Fellow Ibn Arabi Society yang berpusat di Oxford.

Kebebasan beragama bersifat mutlak dan harus mendapat jaminan dari negara. Tanpa kebebasan tidak dimungkinkan iman yang tulus. Dan karena sekularisme tidak mesti memusuhi agama, maka pemisahan antara urusan-urusan duniawi dan agama harus dilakukan. Sebab di negara sekularlah orang bisa bebas beragama. Sebaliknya, dalam negara-agama (teokrasi), peraturan yang diterapkan pasti yang sealiran dengan agama yang diimani penguasa: kebebasan beragama tercabut. Padahal hak-hak dan kebebasan sipil terjamin pada negara-negara yang menganut sistem liberal. Kaitannya dengan kemajemukan agama, masyarakat harus ditanamkan sikap toleran; paham teologis sama sekali tidak boleh dihakimi manusia, yang berhak menghakimi Tuhan semata. Sehingga pluralisme menjadi niscaya.

Kita akan memperbincangkan seputar tiga isu yang diharamkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yaitu sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Tentang ketiga isu ini, respon masyarakat terbagi menjadi tiga: ada yang menolak, setuju, dan ada juga yang sementara dalam proses memaknai. Ketiga kelompok masyarakat ini, tentu saja, memiliki argumentasi masing-masing. Bagaimana Anda melihat perbedaan respon tersebut dan bagaimana pula pandangan Anda tentang liberalisme, sekularisme dan pluralisme itu sendiri?

Penolakan umat Islam dan MUI terhadap sekularisme, liberalisme dan pluralisme, bisa jadi, karena kesalahpahaman. Kadang-kadang, orang belum mengetahui dan memahami betul apa itu sekularisme, liberalisme dan pluralisme, tetapi secara *a priori* sudah menolaknya. Ini yang sering terjadi. Celakanya, semua ini kerap tanpa didasari dengan argumentasi. Mereka, termasuk di dalamnya MUI, dengan serta-merta menentang sekularisme, liberalisme dan pluralisme, begitu pula terhadap Islam liberal. Padahal, yang sering terjadi, atau memang itu sudah terjadi, adalah apa yang dimaksud dengan ketiga paham itu oleh para pendukunganya dan oleh mereka yang menentangnya sungguh berbeda. Misalnya, sekularisme. Tidak selamanya gagasan ini berarti memusuhi agama. Ada yang mengatakan bahwa pemisahan antara urusan-urusan duniawi dan urusan-urusan agama harus dilakukan. Tetapi pemisahan tersebut tidak mesti berarti memusuhi agama. Sebab, kalau dicermati, justru di negara sekularlah orang bisa bebas beragama. Sebaliknya, dalam negara-agama biasanya negara itu didominasi oleh satu agama atau satu mazhab agama.

Negara yang didominasi oleh satu agama atau satu mazhab, yang kita sebut dengan negara teokratis, maka peraturan yang di-

terapkan di negara itu pasti yang sealiran dengan agama atau mazhab yang didukung oleh penguasa. Di situ, saya kira, tidak ada kebebasan beragama. Atau, paling tidak, kebebasan beragama di situ sangat sempit. Di Arab Saudi misalnya, jangankan gereja berdiri di Riyadh atau Mekah, kalau tidak salah, masjid untuk Syi'ah saja tidak ada. Mungkin ada, tapi tersembunyi.

Sebaliknya, di negara sekular keberadaan semua aliran dipersilakan. Yang lebih menggelitik lagi, dahulu sebelum Revolusi Islam Iran, Khomeini lari dari Iran ke negara yang sekular, yaitu Prancis, lantaran kebebasan di sana mendapat tempat. Jadi, kebebasan sangat dijamin di negara sekular.

Kendati demikian, sekularisme juga bermacam-macam. Kita harus terlebih dahulu melihat sekularisme yang seperti apa. Sebab, praktik sekularisme di Uni Soviet, agama malah ditekan dan dimusuhi. Namun, lagi-lagi, karena sekularisme berbeda-beda, maka yang harus diperjuangkan adalah model sekularisme yang tidak memusuhi agama.

Dalam kenyataannya, negara yang menganut sistem liberal, seperti negara-negara Barat yang maju, justru ke-bebasan lebih terjamin. Setiap individu mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapatnya secara bebas, tanpa takut ditangkap oleh intel dan dimaksukkan ke dalam penjara, sejauh tidak mengganggu ketertiban umum, sejauh tidak mengganggu kebebasan orang lain, sejauh tidak berbuat anarki. Saya lebih memandang liberalisme sebagai perihal kebebasan. Untuk itu, apabila kita menganggap liberalisme berbahaya, maka sebuah pertanyaan yang perlu kita ajukan: apa betul seperti itu? Jangan-jangan, sesungguhnya apa yang ada dalam pikiran kita sendiri tidak selalu benar. Jadi, liberalisme itu lebih merupakan hantu ketimbang kenyataan.

Saya pernah mendapat kuliah dari Karl Steenbrink, seorang sarjana Belanda. Dia pernah mengatakan bahwa pengertian sekularisme dan sekularisasi seperti karet. Karet itu elastis: bisa ditarik secara lebih luas dan longgar. Artinya, ini sangat tergantung pada siapa yang akan memberi makna terhadap sekularisme dan sekularisasi itu.

Bagi kelompok garis keras, sekularisme adalah musuh agama. Pokoknya, kalau mereka mendengar kata sekularisme – dan yang di Indonesia lazimnya dipersandingkan kepada tokoh-tokoh semacam Nurcholish Madjid (Paramadina), Ulil Abshar Abdalla (Jaringan Islam Liberal), dan Gus Dur – bayangan mereka adalah bahwa sekularisme berbahaya terhadap Islam. Padahal tidak seperti itu. Apakah orang-orang sekular seperti Cak Nur, Gus Dur, dan Ulil memusuhi Islam? Jawabannya sudah pasti tidak. Justru sebaliknya, mereka ingin mengangkat Islam atau membebaskan Islam dari kungkungan-kungkungan kemunduran, kejumudan dan kekakuan. Mereka menghendaki supaya Islam lebih fleksibel dan bisa menjawab tantangan masa kini. Karena tantangan-tantangan zaman berubah, maka tafsir atas agama untuk menjawab tantangan-tantangan itu juga bisa berubah, bahkan harus diubah.

Tafsir terhadap Islam juga bermacam-macam, tidak tunggal. Apakah semua tafsir itu benar dan apakah semua tafsir yang dulu sesuai dengan semua zaman dan sanggup menjawab tantangan masa kini dengan problem lokalitas yang berbeda-beda? Itu belum tentu.

Di kalangan umat Islam ada kelomok-kelompok tertentu seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan sejenisnya, memiliki imajinasi po-

litik bahwa ada kesatuan antara agama dan kekuasaan (al-dîn wa al-dawlah). *Bagaimana Anda memandang hal ini?*

Terkait hubungan antara agama dan negara, Islam tidak memberikan aturan yang jelas mengenai konsep negara. Saya sependapat dengan Jabiri dan beberapa pemikir lain, bahwa setelah Nabi Muhammad saw wafat, perselisihan di antara Sahabat mengenai *khilâfah* menunjukkan bahwa al-Quran tidak memberikan konsep yang jelas mengenai negara. Sebab, seandainya ada aturan yang jelas, tidak mungkin ada perselisihan untuk memperebutkan jabatan kepala negara setelah Nabi saw wafat. Al-Quran juga tidak pernah memberi aturan ihwal proses pengangkatan kepala negara, berapa lama masa jabatan kepala negara, dan bagaimana proses suksesinya. Al-Quran juga tidak memberikan aturan tentang bentuk negara dan pemerintahan. Yang ada dalam al-Quran adalah prinsip-prinsip universal, yang tidak hanya berlaku dalam Islam tetapi juga dalam agama-agama lain dan sistem-sistem filsafat. Misalnya, keadilan, kejujuran, dan sistem *al-syûrâ* atau musyawarah – yang masih diperdebatkan apakah sama dengan demokrasi atau tidak.

Kalau dicermati, justru di negara sekularlah orang bisa bebas beragama. Sebaliknya, dalam negara-agama biasa-nya negara itu didominasi oleh satu agama atau satu mazhab agama.

Jadi, dalam konteks ini Islam seharusnya masuk dalam wilayah moral, bagaimana orang berakhlak. Sebagai perumpamaan, seorang pemimpin negara harus berakhlak agar negara dan warganya baik. Maka, wilayah yang dipersoalkan Islam adalah perihal baik atau tidak, jujur atau tidak, dan seterusnya. Sementara mengenai segenap aturan (sosial dan politik) akan dibuat sesuai dengan situasi

sosial. Jika hal itu sudah masuk dalam urusan duniawi, tidak ada aturan-aturan yang rinci dalam agama. Itu menjadi urusan warga bersama. Sebab, Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan politik.

Bagaimana dengan gagasan negara Islam atau Piagam Jakarta yang selalu dirujuk dari konsep Piagam Madinah?

Jawabannya jelas. Gagasan negara Islam, seperti tadi saya katakan, tidak terdapat aturan yang jelas dalam al-Quran. Al-Quran hanya menganjurkan bagaimana memerin-tah sejauh dibimbing oleh moral. Tidak ada konsep negara. Islam memberikan bimbingan moral kepada para pemeluknya. Ide negara Islam itu baru muncul pada abad ke-19. Sebelumnya orang Islam tidak pernah membicarakan itu. Bahkan, kata "islam" dahulu juga jarang dipakai untuk menyebut nama disiplin keilmuan, nama karya, nama institusi, dan nama usaha. Maka, boleh dikatakan, sekarang kata "islam" telah mengalami inflasi. Dulu ketika pertama kali ayat turun, *Iqra'*, tidak disebut kata islam. Yang jauh lebih banyak dalam al-Quran adalah kata *îmân*. Nama-nama disiplin keilmuan dan nama-nama karya dahulu tidak memakai kata 'islam.' *Târîkh al-Thabarî*, misalnya, tidak disebut dengan *Târîkh al-Islâm al-Thabarî*. Begitu pula *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn* dan kitab-kitab lain tidak menggunakan kata 'islam.' Madrasah terkenal pada masa Abu Hamid al-Ghazali, yaitu *al-Nizhâmiyah*, tidak disebut *al-Madrasah al-Islâmiyah al-Nizhâmiyah*. Sekarang ini kata 'islam' banyak dipakai: negara Islam, sains Islam, bank Islam, ekonomi Islam, dan sebagainya. Dahulu banyak yang memiliki kualitas Islam, tanpa menyebut kata 'islam.' Tetapi sekarang terbalik, mereknya Islam, isinya belum tentu.

Menurut Anda, apa sebenarnya liberalisme dan mengapa banyak orang begitu rupa menentangnya?

Liberalisme mempunyai banyak arti. Ada yang mengartikannya sebagai pendapat atau kepercayaan yang bebas, khususnya dalam politik. Ada yang mengartikannya sebagai kepercayaan atau kebijakan yang bebas, khususnya berkaitan dengan politik, perubahan sosial, agama, dan lain-lain. Ada yang sekadar memahaminya sebagai prinsip dan ide yang bebas. Ada yang mengartikannya sebagai kepercayaan kepada kemajuan dan pembaruan. Ada juga yang mengartikannya sebagai sifat atau keadaan untuk menjadi bebas, khususnya dalam wacana filsafat politik yang membela kebebasan pribadi, bersifat individual; yang memperjuangkan bentuk pemerintahan yang demokratis; dan upaya pembaruan yang berangsur-angsur dalam institusi politik dan sosial.

> Di negara sekular keberadaan semua aliran dipersilahkan. Yang lebih menggelitik lagi, dahulu sebelum Revolusi Islam Iran, Khomeini lari dari Iran ke negara yang sekular, yaitu Prancis, lantaran kebebasan di sana mendapat tempat. Jadi, kebebasan sangat dijamin di negara sekular.

Saya pribadi lebih memandang liberalisme sebagai perihal kebebasan. Untuk itu, apabila kita menganggap liberalisme berbahaya, maka sebuah pertanyaan yang perlu kita ajukan: apa betul seperti itu? Jangan-jangan, sesungguhnya apa yang ada dalam pikiran kita sendiri tidak selalu benar. Jadi, liberalisme itu lebih merupakan hantu ketimbang kenyataan.

Dalam kenyataannya, negara yang menganut sistem liberal, seperti negara-negara Barat yang maju, justru kebebasan lebih terjamin. Setiap individu mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapatnya secara bebas, tanpa takut ditangkap oleh intel dan

dimaksukkan ke dalam penjara, sejauh tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu kebebasan orang lain, dan tidak berbuat anarki. Para penguasa tidak boleh membungkam kebebasan individu. Di negara-negara yang telah maju, para penguasa tidak dapat berbuat seenaknya terhadap rakyatnya. Mereka tidak bisa berbuat semena-mena demi mempertahankan kekuasaan mereka. Kebebasan beragama juga dijamin. Bila kebebasan beragama dibungkam, dikhawatirkan banyak orang berpura-pura melakukan sesuatu agar kelihatan tidak bertentangan dengan agama. Setiap orang bebas menganut dan mempraktikkan agama dan kepercayaan yang dianggapnya benar.

Tanpa kebebasan, banyak muncul kepalsuan-kepalsuan. Kita harus mengakui secara jujur bahwa masih banyak negara Islam yang tidak memberikan kebebasan dalam politik dan agama. Yang muncul adalah demokrasi palsu atau pura-pura. Yang muncul adalah pengekangan terhadap kebebasan beragama untuk kolompok-kelompok minoritas tertentu dan individu-individu yang dianggap sesat. Di Indonesia, misalnya, ada orang yang mencantumkan kata Islam dalam KTP-nya agar mendapatkan kemudahan urusan administratif dan kependudukan meskipun agamanya bukan Islam.

Terdapat semacam kekhawatiran sekelompok umat Islam tertentu yang menginginkan negara ikut campur dalam urusan agama. Sebab, kalau negara tidak ikut campur, menurut mereka, negara dan, terlebih lagi, agama, akan terkikis oleh ideologi-ideologi lain. Apakah ketakutan semacam itu cukup beralasan?

Barangkali dari perspektif orang yang merasa ketakutan, tentu mereka punya alasan. Tapi bagi kita, tentu saja, tidak. Dalam

demokrasi, kebebasan setiap individu dijamin. Yakni, kebebasan individual sejauh tidak mengganggu kebebasan orang lain. Maka pertanyaan yang muncul adalah: apakah Usman Roy atau Lia Aminuddin, misalnya, mengganggu kebebasan umat Islam lainnya, sehingga negara ikut campur dan harus mengadili dan memenjarakan mereka? Mungkin bagi sekelompok umat Islam yang tidak mampu menerima kebebasan dan perbedaan, keyakinan yang dianut Usman Roy dan Lia Eden meresahkan. Tetapi itu hanya dalam pikiran mereka saja. Itu semata ketakutan yang berlebihan, di mana kalau keyakinan-keyakinan seperti itu dibiarkan akan menjadi saingan mereka, di samping juga akan bertambah banyak pengikutnya. Jadi, bukan karena keyakinan-keyakinan tersebut mengganggu dan memaksa sehingga hak-hak dan kebebasan mereka terancam.

Kalau alasannya karena penodaan akidah Islam?

Menurut saya sejauh perbedaan paham tidak mengganggu, maka tidak bisa dikatakan seperti itu, walaupun pahamnya menurut kita aneh. Saya selalu berkata: kalau Anda tidak setuju dengan paham yang Anda anggap sesat, silakan Anda dakwahi orang itu. Tetapi berdakwah sudah ada ketentuannya dalam al-Quran: *"Ud'u ilâ sabîli rabbika bi al-hikmah wa al-maw'izhah al-hasanah wa jâdil-hum bi al-latî hiya ahsan"* ("Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan bijaksana, nasihat yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik," al-Quran 16: 125). Cara berdakwah itu ada tiga macam: (1) hikmah atau bijaksana; (2) nasihat yang baik; dan (3) berdebat dengan cara yang lebih baik. Bila orang lain tidak menerima apa yang didakwahkan, tidak apa-apa. Batasnya adalah bahwa orang itu tidak mengganggu kebebasan kita.

Jika ada orang Kristen atau orang Hindu memaksa kita (supaya pindah ke agama mereka), kita mungkin akan tersinggung. Atau, misalnya, jika ada orang Kristen datang ke rumah kita membawa Bibel atau Alkitab, wajar kita tersinggung. Namun, karena secara pribadi latar belakang atau basis saya adalah studi Perbandingan Agama, berbeda dengan kebanyakan orang, saya tidak tersinggung. Kalau mereka mengajarkan ajaran mereka di sekolah milik mereka, tentu saja tidak ada masalah. Itu adalah sekolah mereka. Akan tetapi, kalau mereka sampai mengganggu tetangga, masuk rumah tetangga, misalnya, itu baru masalah.

Kita harus bisa membedakan antara perihal kepercayaan dan perihal mengganggu ketertiban umum. Acara ritual keagamaan dengan pengeras suara yang mengganggu orang lain adalah persoalan. Contoh lain adalah mendirikan gereja di satu lingkungan tertentu. Jika gereja itu penuh oleh jemaat yang berakibat dengan parkir yang mengganggu tetangga sebelah atau jalanan umum, ini tentunya menjadi persoalan. Namun, hal seperti ini masih bisa diatasi dengan terlebih dahulu ditegur agar tempat parkir mobil pindah, misalnya, atau agar datangnya tidak menggunakan mobil pribadi. Dalam kasus seperti ini, harus dipisahkan antara pendirian gereja dan ketertiban parkir. Hanya saja persoalan seperti itu sering berubah menjadi persoalan yang menimbulkan konflik – dan dijadikan alasan bagi kelompok tertentu untuk melakukan tindakan kekerasan seperti pengusiran serta penghancuran gereja. Padahal, menurut saya, harus dipisahkan antara ketertiban umum dan paham teologis. Paham teologis tidak boleh dihakimi oleh manusia. Yang berhak menghakiminya hanyalah Tuhan. Al-Quran beberapa kali menyerukan, di antaranya, *"Fallâhu ya<u>h</u>kumu baynahum yawm al-qiyâmati fîmâ kânû fîhî yakhtalifûn"* ("Maka Allah menghakimi

(menetapkan hukum) di antara mereka pada Hari Kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan," al-Quran 2: 113). Kita tidak berhak menghakimi paham teologis atau kepercayaan seseorang. Ini merupakan ketentuan Tuhan. Maka, Ahmadiyah, aliran Usman Roy, Lia Eden tidak boleh dihakimi dan dizalimi. Sebab, itu semua adalah kehendak Allah. Allah berkata, *"Wa-law syâ'a rabbuka la-âmana man fî al-ardli kulluhum jamî'an. A-fa anta tukrih al-nâsa hattâ yakûnû mu'minîn"* ("Seandainya Tuhanmu menghendaki, niscaya semua orang di bumi ini beriman. Apakah Anda memaksa manusia sehingga mereka menjadi orang-orang mukmin," al-Quran 10: 99). Seandainya Tuhan menghendaki, niscaya seluruh umat manusia menjadi penganut satu paham saja.

Hemat saya, pluralisme pada tingkat teologis harus mendapat perhatian lebih. Ini merupakan tingkat yang paling sulit diterima oleh kebanyakan orang Muslim. Pluralisme pada tingkat teologis terkait dengan persoalan eskatologis mengenai keselamatan di akhirat.

Jika demikian, kalau kita tidak setuju dengan orang-orang yang berbeda agama atau paham dengan kita, kita harus memperhatikan dua hal. *Pertama*, kita bisa mendakwahi mereka dengan cara di atas tadi. Kalau orang tersebut masih tidak menerima, biarkan saja, tidak perlu dengan pemaksaan. *Kedua*, mereka yang berbeda paham dengan kita, mereka belum tentu sesat. Kalau kita memandang tiga prinsip yang harus dipegang untuk menjadi orang yang selamat di sisi Allah, yaitu iman kepada Allah, hari akhir dan amal saleh, maka mereka jemaat Ahmadiyah, Usman Roy, dan Lia Eden, misalnya, tidak sesat. Mereka juga tidak bisa divonis telah menodai agama atau akidah Islam. Jadi, mereka mempunyai dasar dan argumentasi masing-masing atas apa yang mereka yakini dan lakukan.

Menurut Anda, apakah agama secara teologis mendukung ide kebebasan? Lalu, mengapa Pak Ma'ruf Amin berpendapat bahwa kebebasan itu ada hanya ketika orang belum memilih agama. Jika seseorang sudah memeluk Islam, maka ia tidak bebas dan dipaksa dengan segenap aturan-aturan di dalamnya.

Begitulah pandangan orang Muslim yang tidak mengerti makna kebebasan dalam pandangan Islam. Sebab, mustahil memaksa semua orang harus semazhab dengan kita. Tidak mungkin pula menafsirkan agama secara seragam tanpa perbedaan. Itulah salahnya sebagian orang Muslim dulu dan juga sekarang. Banyak manusia yang memposisikan dirinya seperti Tuhan. Mereka sudah menghakimi paham orang lain dan memaksa orang lain untuk sepaham dan semazhab dengan mereka. Padahal jika menyangkut urusan teologis dan kepercayaan, kita hanya bisa memberikan pertimbangan spekulatif yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara pasti sekarang di dunia ini. Siapa yang benar dan siapa yang sesat hanya diketahui secara pasti oleh Allah. Siapa yang selamat dan tidak selamat, masuk surga dan neraka di akhirat kelak, hanya diketahui oleh Allah. Sekali lagi, al-Quran memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menentukan pilihannya dengan konsekuensi berani menanggung risiko yang akan dihadapinya nanti di akhirat atas pilihan bebas itu.

Bagaimana pandangan Anda tentang upaya formalisasi atau legalisasi hukum Islam, lalu di mana posisi minoritas jika nilai-nilai agama tertentu diterapkan sebagai hukum positif?

Terkait dengan penerapan syariat Islam, pertama kali perlu saya tegaskan bahwa penolakan terhadap perda syariah tidak mesti ber-

arti penolakan terhadap syariah. Penolakan itu adalah penolakan terhadap formalisasi syariah, bukan penolakan terhadap syariah itu sendiri. Tanpa formalisasi syariah atau tanpa pembentukan negara Islam, syariah sudah semestinya dijalankan oleh setiap orang Muslim. Untuk menjalankan syariah, kita tidak perlu menunggu formalisasi syariah atau negara Islam.

Pada prinsipnya yang lebih penting adalah aturan yang dapat menjamin kebebasan bagi setiap individu untuk menganut dan melaksanakan agama atau kepercayaan sesuai dengan apa yang diyakininya. Dengan pengertian lain, titik-tengkarnya bukan pada upaya menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif atau tidak, begitu pula kontroversi perda syariat Islam. Persoalannya adalah apakah setiap individu diberi kebebasan untuk menganut dan menjalankan agama sesuai dengan paham atau mazhab yang diyakininya. Contohnya jilbab. Ada yang berpendapat memakai jilbab itu wajib. Jilbab harus menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jika tidak demikian, berarti tidak islami. Itu salah satu paham. Di sisi lain, terdapat juga paham yang memaknai jilbab secara berbeda. Misalnya, ada yang berpaham bahwa esensi jilbab adalah fungsinya untuk menjaga diri agar tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif. Banyak orang tidak memakai jilbab tetapi berpakai-

> Tentang masalah toleransi, kita sebaiknya berkaca pada ketauladanan Nabi Muhamad saw. Nabi pernah memperkenankan sekelompok orang-orang Nasrani dari Najran mengadakan kebaktian di masjid beliau. Ini hal yang sangat luar biasa. Apakah ada peristiwa seperti itu di Indonesia? Kalau ada, pangurus masjid bisa diserang oleh khalayak. Dalam hal ini Nabi sebenarnya lebih liberal. Di Indonesia ini mana ada yang seliberal Nabi.

an cukup sopan, seperti presenter TV. Dengan berpakaian seperti itu mereka bisa menjaga diri. Untuk itu, siapapun, termasuk juga pemerintah tidak bisa memaksa orang yang menganut paham yang kedua agar sepaham dengan yang pertama, yang dianggap islami. Contoh lainnya, nikah beda agama. Ada mazhab fikih yang mengatakan bahwa nikah beda agama hukumnya haram. Tetapi juga ada mazhab yang mengatakan bahwa nikah beda agama diperbolehkan. Maka, semua mazhab yang berbeda tersebut tetap harus diberi tempat. Begitu pula hukum potong tangan bagi pencuri. Sangat mungkin ada yang memiliki tafsir lain. Misalnya, potong tangan lebih dimengerti sebagai memotong (menghilangkan) kekuasaan, oleh karena itu cukup dengan kurungan penjara. Tafsir lain ini juga harus diberi tempat. Dengan demikian, yang harus ditekankan adalah jaminan kebebasan kepada setiap individu untuk menganut dan menjalankan agama dan kepercayaan sesuai dengan yang diyakininya.

Sudah barang tentu minoritas juga sangat mungkin bisa terdapat dalam satu agama. Mereka mempunyai paham yang berbeda dari mayoritas, atau teologi *mainstream*. Karena itu, di mata umat yang mayoritas, mereka dianggap aneh, ganjil dan sesat. Sebaliknya bagi mereka sendiri, apa yang mereka anut tidaklah demikian. Ini yang harus dibela supaya iman dijalankan secara tulus. Tidak terjadi kepura-puraan dan keterpaksaan.

Jadi, lagi-lagi, persoalannya bukan pada apakah paham mayoritas itu dijadikan hukum positif atau tidak. Hanya saja, pada galibnya, problem yang kemudian menyeruak adalah ketika paham tersebut ditetapkan sebagai hukum positif, maka kebebasan tercabut. Bagi saya, itulah persoalan yang melingkupi perda-perda syariah, yang dalam praktiknya malah merampas kebebasan beragama itu

sendiri. Ini mungkin landasan kenapa orang ramai-ramai menentang formalisasi hukum agama.

Apakah untuk mencapai terpenuhinya hak dan kebebasan warga diperlukan undang-undang yang dapat menjamin mereka?

Saya setuju kalau ada perda yang menjamin kebebasan (beragama dan berkeyakinan). Namun, bukan berarti saya setuju dengan aliran kebatinan. Jangan disalahpahami. Saya tidak setuju dengan aliran kebatinan, tetapi saya juga tidak bisa memaksa penganut aliran kebatinan meninggalkan alirannya supaya menganut apa yang saya anut. Apa yang dilakukan Dawam Rahardjo bukan membela kebenaran ajaran Ahmadiyah, tetapi lebih membela hak dan kebebasan beragama yang juga menjadi ketentuan al-Quran. Saya bukan membela Ahmadiyah atau Lia Eden, tetapi membela kebebasan menurut al-Quran versi saya, yang kebetulan saja menguntungkan pihak Ahmadiyah dan komunitas Eden. Iman memerlukan ketulusan. Tanpa kebebasan tidak ada iman yang tulus. Masalahnya, seringkali peraturan dibuat oleh kalangan mayoritas sehingga merugikan kalangan minoritas, dalam arti merampas kebebasan mereka. Padahal, merampas kebebasan beragama sangat bertentangan dengan ajaran al-Quran yang justru menjaminnya.

Bagaimana kalau alasan dibuatnya aturan seperti perda syariah justru untuk menjaga moral umat?

Itu harus kita kembalikan pada prinsip kebebasan. Dengan diterapkannya perda syariah, apakah kebebasan tetap terjamin tanpa mengganggu kebebasan orang lain yang tidak setuju dengan aturan-

aturan yang terdapat dalam perda tersebut? Memang, *amar ma'rûf* dan *nahy munkar* harus dijalankan di manapun oleh umat Islam. Tapi tidak perlu syariat Islam diformalkan. Karena itu, harus ditegaskan di sini bahwa ketika seseorang tidak setuju syariah diformalkan tidak berarti dia anti-syariah. Pemahaman tentang syariah berbeda-beda. Dalam Islam kita menemukan beberapa mazhab fikih yang berbeda. Setiap penganut mazhab fikih hendaknya menjalankan syariah sesuai dengan fikih (pemahaman) masing-masing mazhab yang dianutnya.

Semua agama mempunyai syariah. Setiap orang yang beragama menjalankan syariahnya masing-masing. Apa yang dijalankan oleh seorang penganut agama tentunya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh agamanya. Itulah syariah yang dijalankannya.

Bukankah syariah itu sendiri pada dirinya memaksa?

Jika saya harus melakukan sesuatu menurut hati saya, berarti hati saya memaksa diri saya. Mungkin itu benar. Tetapi, pemaksaan di sini bukan dalam arti seperti itu. Yang dimaksud dengan pemaksaan: apabila ada kekuasaan atau kekuatan di luar yang memaksa seseorang atau satu komunitas untuk menjalankan ajaran yang ditentukan pihak luar. Dengan kata lain, ada unsur eksternal yang memaksa. Misalnya (negara) memaksa setiap warga negara menjalankan apa yang telah ditetapkan secara formal.

Sebaliknya, kalau saya menjalankan sesuatu menurut apa yang saya anut, ini tidak bisa dikatakan bahwa apa yang saya anut memaksa saya. Tetapi kalau yang dimaksud dengan memaksa adalah bahwa membuat kita harus terikat pada apa yang kita yakini, itu memang memaksa, tetapi tidak disebut memaksa dalam pengertian

adanya keterlibatan pihak luar. Kata *'aqîdah* berarti ikatan; yang mengikat kita. Itu adalah masalah teologis, ilmu kalam. Meskipun begitu, Ibn Arabi mengkritik bahwa Tuhan di dalam akidah bukanlah Tuhan (dalam arti sesungguhnya). Tuhan dalam akidah adalah Tuhan dalam persepsi manusia, Tuhan buatan manusia.

Bagaimana jika iman mengharuskan untuk memaksa orang lain, bahkan sering dengan kekerasan?

Jamaknya, masalah seperti ini sangat terkait dengan kekuasaan. Jadi, seseorang akan berani memaksa orang lain, meskipun pemaksaan ini tidak benar, ketika posisi dia lebih tinggi. Seandainya yang mayoritas adalah jemaat Ahmadiyah, kemudian mereka melarang orang Sunni menjalankan keyakinannya, saya akan memprotes juga. Saya akan membela Sunni, lebih tepatnya membela kebebasan menjalankan keyakinannya. Jadi, adalah sesuatu yang manusiawi: karena ada kekuasaan di tangan sekelompok orang, atau paling tidak dia tidak terhalangi oleh kekuasaan, maka sering terjadi pemaksaan. Secara tidak sadar orang yang dalam posisi memperoleh kekuasaan pasti selalu merasa tidak pernah memaksa. Padahal secara tidak langsung ia telah memaksa. Memang, terdapat banyak sanggahan dari mereka atau pihak-pihak yang melakukan pemaksaan terhadap orang lain, bahwa persoalan

Eksklusivisme dalam Islam, pada dasarnya, adalah semacam imperialisme teologis. Imperialisme teologis adalah ekspansi, keinginan untuk menguasai dan memonopoli kebenaran teologis. Jadi, semacam egoisme teologis, yang mengharuskan orang lain masuk ke dalam agama kita, dan sepaham dengan kita. Kalau tidak, ia tidak akan selamat. Pemahaman Islam yang seperti inilah yang mengancam pluralisme.

ini bukan berkaitan dengan kebebasan beragama, melainkan lebih menjadi persoalan akidah – yang menurut mereka sedang terancam dan mengalami penodaan.

Kendati demikian, harus diingat bahwa akidah adalah ciptaan manusia. Dalam Islam, karena terdapat perselisihan paham atau penafsiran terhadap persoalan agama, banyak muncul akidah, di antaranya *Ahl al-Sunnah*, Syi'ah, Ahmadiyah, dan sebagainya. *Ahl al-Sunnah* juga bermacam-macam, ada Asy'ariyah, Maturidiyah dan sebagainya. Demikianpun Syi'ah tidak hanya satu paham, juga Ahmadiyah dan seterusnya.

Sejatinya, Tuhan tidak bisa diikat oleh akidah. Tuhan di luar akidah. Kalau Tuhan diikat berarti Tuhan terbatas. Padahal Tuhan tidak dapat dibatasi. Maka dari itu jangan menuhankan akidah, tuhankanlah Tuhan. Orang seringkali tidak menyadari bahwa dia lebih setia pada akidahnya, alirannya, sektenya ketimbang kepada Tuhan. Mereka juga tidak menyadari bahwa Tuhan melarang kita membunuh orang lain. Tetapi, seringkali atas nama akidah ataupun Tuhan, tidak jarang orang rela membunuh. Ini bertentangan dengan larangan membunuh. Ini sangat bertentangan dengan prinsip bahwa Tuhan memberikan kebebasan dalam beragama. Ini bertentangan dengan kemauan Tuhan.

Apakah menurut Anda kebebasan beragama berkorelasi atau menunjang kemajuan sebuah bangsa?

Kebebasan beragama dan kemajuan jelas mempunyai korelasi, tetapi hal tersebut jangan dikaitkan atau diukur dengan materi. Sebab dalam kemajuan sebuah bangsa terdapat aspek intelektual dan spiritual. Karena itu, semangat kebebasan, termasuk kebebasan

beragama, yang menunjang kemajuan bangsa harus terus diperjuangkan. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan mengkritik pemerintah untuk kemajuan harus dijamin. Kebebasan beragama juga harus dijamin. Jika tidak, saya kira bukan hanya Ahmadiyah saja yang akan dibungkam, begitupun kelompok-kelompok liberal juga akan dibungkam, termasuk tafsir-tafsir yang dianggap aneh. Padahal, tafsir-tafsir atau pemahaman-pemahaman itu mungkin dianggap aneh bagi kelompok tertentu, tetapi tidak aneh bagi pendukungnya. Karena mereka benar-benar tidak paham atas tafsir-tafsir tersebut, kemudian mereka menganggapnya aneh. Lantas, setiap yang mereka anggap aneh harus dibungkam. Jadi pada saatnya nanti bukan hanya Ahmadiyah, mungkin juga Paramadina, Jaringan Islam Liberal, kaum minoritas lain, dan paham-paham baru lain akan menjadi sasaran mereka.

> Kebebasan beragama itu menurut saya bersifat mutlak dan, karena itu, harus dijamin. Kebebasan itu adalah karunia Tuhan. Maka, kita tidak berhak mengungkung dan merampas kebebasan itu. Alasan mengapa Tuhan menganugerahi manusia kebebasan, supaya manusia tulus dan ikhlas dalam beriman dan beragama.

Alasan mereka membungkam bukan hanya karena ketakutan teologis, tetapi juga politis. Sebab mereka membayangkan kalau seragam niscaya nantinya menjadi lebih mudah teratur, tertib dan akan mudah mencapai peradaban yang diidamkan.

Itu yang keliru. Justru keragaman adalah hukum alam. Kalau kita menentang perbedaan berarti menentang hukum alam. Kita patut merenungkan kata-kata bijak yang berbunyi, "*The world would be a dull place if we all agreed on everything.*" Karenanya ja-

ngan memaksa untuk seragam. Tuhan sendiri, seandainya menghendaki, semua orang menjadi satu umat. Itu tentu bisa dan sudah dilakukan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menghendaki demikian. Bukankah Tuhan telah mengatakan, seperti disebut di atas, "Seandainya Tuhanmu menghendaki, niscaya semua orang di bumi ini beriman. Apakah Anda memaksa manusia sehingga mereka menjadi orang-orang mukmin?" (al-Quran 10: 99).

Belakangan ini ada isu syariat Islam dipertentangkan dengan Pancasila, sebagai upaya dari beberapa kalangan Islam yang berhasrat menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dalam bentuk aturan-aturan formal, baik berupa peraturan daerah ataupun lebih ekstrem lagi negara Islam. Apa respon Anda atas upaya-upaya tersebut?

Seharusnya syariat Islam tidak perlu dipertentangkan dengan Pancasila. Pasalnya, pengertian dan paham kita tentang syariat Islam juga berbeda-beda, sebagaimana fikih juga bermacam-macam. Sekarang ada pula tafsir baru tentang syariah. Misalnya yang dilontarkan oleh Mahmud Thaha dan Abdullahi An-Na'im. Mereka mempunyai teori evolusi syariah. Menurut mereka syariah yang selama ini dijalankan masih diskriminatif terhadap kaum perempuan dan non-Muslim. Mereka lantas menekankan bahwa syariah yang dibutuhkan adalah syariah yang universal, egalitarian, demokratis, dan tidak diskriminatif. Mereka tidak anti-syariah. Mereka hanya memberikan tafsir baru tentang syariah. Biarkan saja orang menuduh tafsir baru itu sesat, asal jangan Tuhan yang menuduhnya.

Lalu, apakah Pancasila, sebagai dasar negara kita, dan UUD '45, sebagai landasan konstitusinya, sudah ideal?

Ya. Menurut saya tidak ada yang menjadi masalah. Itu memang cocok untuk Indonesia. Pancasila dan UUD '45 sama sekali tidak bertentangan dengan Islam. Karena itu, bagi saya, kembali lagi pada apa yang tadi sudah saya ungkapkan di atas: persoalannya bukan formalisasi syariah lewat perda-perda atau tidak, tetapi lebih pada problem terancamnya hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kalau syariah menurut sebuah paham tertentu sudah dijadikan perda, maka syariah menurut paham lain yang berbeda niscaya tidak akan mendapat tempat. Akhirnya orang menjalankan agama karena keterpaksaan, bukan karena ketulusan. Agama tanpa ketulusan tidak ada artinya. Begitupun tidak ada artinya menjalankan agama dengan keterpaksaan dan kepalsuan (kepura-puraan).

> Dalam kaitan dengan kemajemukan agama, yang harus diusahakan adalah bagaimana menanamkan pada masyarakat sikap toleransi. Ini terutama adalah tugas pemuka agama, terutama ulama. Yang menjadi masalah adalah ketika banyak ulama malah mananamkan sikap tidak toleran.

Mengapa resistensi umat Islam terhadap pluralisme demikian kuat?

Tentu saja, di samping sekularisme dan liberalisme, pluralisme juga lebih ditangkap oleh kebanyakan orang sebagai hantu. Akibatnya resistensi terhadap pluralisme bukan semakin reda, justru kian deras. Di benak mereka hanya kekhawatiran-kekhawatiran dan ketakutan-ketakutan. Sementara itu, saya lebih melihat pluralisme

secara bertingkat. Pada tingkat sosiologis, selama orang menghargai kemajemukan, walaupun misalnya tidak mengakui kebenaran agama lain atau paham lain, saya kira itu sudah bagus. Pada tingkat teologis, pluralisme biasanya diartikan bahwa semua agama, meskipun berbeda dalam rumusan teologisnya, dokrinnya, dan ritualnya, tetap memiliki tujuan yang sama. Yakni, bahwa semua agama, sejatinya, membawa para penganutnya kepada keselamatan. Inilah kesamaan dari setiap tujuan agama.

Pada hemat saya, pluralisme pada tingkat teologis harus mendapat perhatian lebih. Ini merupakan tingkat yang paling sulit diterima oleh kebanyakan orang Muslim. Pluralisme pada tingkat teologis terkait dengan persoalan eskatologis mengenai keselamatan di akhirat. Hanya saja, orang tidak berani mengatakan secara terus terang bahwa agama-agama lain (yaitu agama-agama selain Islam) tidak membawa keselamatan di akhirat. Sebagai perumpamaan, kalau orang tidak masuk Islam, kelak dia masuk neraka. MUI tentu tidak secara eksplisit mengatakan hal seperti itu. Tapi apa yang ditetapkan MUI berujung ke situ: "Kalau tidak memeluk Islam, orang tidak akan selamat." Namun, lagi-lagi, MUI dan kebanyakan orang tidak berani terang-terangan mengatakan pernyataan setegas itu. Itu adalah masalah eskatologis, masalah yang terkait dengan tujuan final hidup. Kebenaran masalah ini tidak bisa dibuktikan sekarang ini. Bukti kebenarannya hanya dapat dilihat di akhirat nanti. Berbeda halnya dengan hidup di dunia ini. Bagaimana hidup di dunia ini, semua orang, begitu juga orang-orang MUI, mengetahui bahwa negara-negara Barat yang demikian maju tidak pernah mengusung agama untuk dijadikan dasar negara. Tanpa agama negara-negara Barat yang sekular jauh lebih maju, makmur, kaya, dan aman.

Apakah penolakan dan pengharaman umat Islam dan MUI terhadap pluralisme, dengan alasan paham tersebut mengidap ide-ide sinkretisme yang dapat melemahkan dan membahayakan iman umat Islam, hanya bentuk dari kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan?

> Saya sependapat dengan Jabiri dan beberapa pemikir lain, bahwa setelah Nabi Muhammad saw wafat, perselisihan di antara sahabat mengenai *khilafah* menunjukkan bahwa al-Qu'ran tidak memberikan konsep yang jelas mengenai negara. Sebab, seandainya ada aturan yang jelas, tidak mungkin ada perselisihan untuk memperebutkan "jabatan" kepala negara setelah Nabi saw wafat.

Ini terkait dengan masalah teologis. Pluralisme merupakan polemik teologis, lantaran ia menyatakan bahwa semua agama – meskipun berbeda rumusan teologisnya, doktrinnya, dan ritualnya – adalah benar. Paham ini, bagi mereka, berbahaya. Keyakinan mereka tidak bisa ditawar-tawar lagi: pokoknya, kalau ingin selamat, masuklah agama Islam. Kalau masuk agama lain, Kristen misalnya, akan masuk neraka. Itu sudah doktrin yang tidak bisa diubah lagi. Hanya saja orang tidak bilang seperti itu.

Perbedaan pandangan tentang persoalan ini tidak akan pernah hilang. Yang penting adalah bahwa kita harus toleran terhadap perbedaan. Kita tidak perlu betengkar karena perbedaan tentang masalah ini. Saya sering berkata, "Daripada kita bertengkar lebih baik kita buktikan saja siapa yang selamat dan yang idak selamat nanti di akhirat." Bagi saya, Islam sama dengan apa yang diajarkan oleh para penafsir pluralis, bahwa Islam dalam arti esensialnya adalah penyerahan diri kepada Allah. Dalam arti dasarnya *islâm* adalah "ketundukan" *(inqiyâd)*, "kepatuhan" *(tadzallul)*, dan khusuk *(khu-*

syû') kepada Allah. Ketika menakwilkan ayat yang berbunyi, "Sesungguhnya *dîn* (yang benar) di sisi Allah adalah *islâm*" (al-Quran 3: 19), al-Thabari, seorang penafsir klasik terkemuka, mengatakan bahwa ayat ini bermakna: "Sesungguhnya kepatuhan yang adalah satu-satunya kepatuhan di sisi-Nya adalah kepatuhan kepada-Nya, pengikraran lidah dan kalbu bagi-Nya dengan penghambaan dan kerendahan, dan ketundukan lisan dan kalbu kepada-Nya dengan kepatuhan tentang apa yang disuruh dan dilarang, kerendahan lisan dan kalbu kepada-Nya dengan itu tanpa menyombongkan diri kepada-Nya, tanpa berpaling dari-Nya, dan tanpa menyekutukan segala sesuatu selain Dia dengan Dia dalam kehambaan dan ketuhanan." Jadi, sikap ketundukan dan kepatuhan kepada Tuhan adalah 'islam' (dengan huruf kecil). Sikap semacam itu tidak hanya terdapat dalam agama Islam. Dalam agama apapun, bahkan orang tidak beragama sekalipun, seperti penganut aliran kebatinan, jika pasrah pada Tuhan, itu adalah 'islam.' Ini adalah 'islam' dalam arti esensial, bukan dalam arti sosiologis.

Saya pernah mengunjungi salah sebuah kelompok di Skotlandia dan kebetulan saya pernah tinggal bersama mereka di sana. Mereka tidak mau disebut beragama, tapi pasrah kepada Tuhan – Budhy Munawar-Rachman juga mengetahui orang-orang dari kelompok itu yang lazim disebut Beshara. Mereka sangat menekankan sikap pasrah dan tunduk kepada Tuhan. Mereka juga mempraktikkan zikir. Sikap pasrah dan zikir selalu ditekankan oleh orang-orang Beshara tanpa harus mengungkapkan identitas agama apa yang mereka anut. Mereka menekankan sikap "*constant awareness to Him*," kesadaran yang konstan terhadap Dia Yang Mahamutlak. Ini adalah bentuk spiritualitas yang membuat orang dalam hidupnya sampai pada kondisi yang senantiasa

merasakan kehadiran Tuhan. Kesadaran konstan kepada Tuhan adalah zikir. Dengan zikir yang terus-menerus seseorang pasrah pada Tuhan setiap saat. Orang-orang Beshara itu ketika ditanya, "*What is your religion?*," mereka bisa tersinggung. "*We are secular*," mereka bilang. Tetapi mereka berzikir dan pasrah kepada Tuhan. Bahasa yang digunakan untuk zikir bersama di Beshara School, Chisholme, Roberton, Hawick, Skotlandia, adalah bahasa Arab lantaran mereka mengambil unsur-unsur Islam. Di ruang-ruang studi, meditasi, kantor, dapur, dan lainnya, yang terdapat dalam bangunan-bangunan di Chisholme, ditemukan banyak kaligrafi Arab dari ayat-ayat al-Quran dan Hadits.

Di Beshara School para 'santri' belajar kitab *Fushûsh al-Hikam,* kitab *Bhagavad Gita*, kitab *Tao Te Cing*, dan kitab *Injil Apokrifal*. Semua kitab ini mengandung ilmu esoterik yang pada intinya sama. Jika seseorang bisa memahami kitab *Fushûsh al-Hikam*, dia mudah memahami kitab *Bhagavad Gita*, *Tao Te Cing*, dan *Injil Apokrifal*. Begitu juga jika seseorang bisa memahami kitab *Bhagavad Gita*, dia mudah memahami *Fushûsh al-Hikam, Tao Te Cing*, dan *Injil Apokrifal*. Begitu seterusnya dengan dua kitab lain. Beshara tidak terikat dengan agama apapun atau sistem filsafat apapun, tetapi juga tidak menolaknya. Yang lebih ditekankan adalah pendidikan esoterik. Yang lebih penting adalah esensi, bukan bentuk. Orang-orang Beshara sama sekali tidak menonjolkan agama, dalam arti sebagai institusi formal, melainkan lebih menekankan esensi agama, yaitu spiritualitas. Mereka menekankan kesadaran akan kehadiran Tuhan. Mereka yang sudah menjiwai kitab-kitab semacam itu malah lebih rajin melakukan meditasi dan zikir. Tetapi kalau mereka ditanya soal agama, mereka kerap mejawab tidak menganut agama, yaitu agama dalam arti sosiologis.

Maka, kita harus senantiasa kembali kepada makna 'islam' sebagai kepasrahan kepada Allah. Inilah yang dimaksud dengan 'islam' sebagai kualitas personal. Di sini 'islam' tidak lagi dimaknai sebagai lembaga atau sistem yang formal. Sebaliknya yang dimaksud dengan 'islam' di sini adalah 'islam' sebagai kualitas personal, atau yang disebut Wilfred Cantwell Smith sebagai "agama personal" *(personal religion)*. Artinya, 'islam' bukan sistem yang mengandung ajaran-ajaran tentang teologi dan ritual. Pada mulanya, dalam sejarah, agama merupakan kualitas atau pengalaman spiritual. Namun, apa lacur, justru yang kemudian lebih populer seperti sekarang ini adalah agama sebagai sistem yang mengandung ajaran-ajaran tentang persoalan-persoalan ketuhanan dan praktik ritual.

Sejatinya, dalam arti dasarnya agama atau *dîn* adalah ketaatan, kepatuhan, dan kesalehan kepada Allah. Jadi, 'islam' sebagai agama dalam arti dasarnya bukan sistem atau lembaga, tapi kualitas personal. Dengan demikian menjadi jelas di sini bahwa apa yang dimaksud dengan 'islam' adalah kualitas personal. Kalau dipahami seperti ini, maka siapapun yang pasrah pada Tuhan dia adalah 'muslim' (dengan memakai "m" kecil). Ihwal seperti ini juga dikemukakan oleh Bawa Muhayyaddin, seorang Sufi asal Sri Langka yang pernah bermukin di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat. Menurutnya, 'islam' memiliki dua arti: (1) 'islam' dalam arti esensial, yaitu kepasrahan kepada Tuhan, dan (2) 'Islam' dalam arti *congregation,* yaitu Islam dalam arti komunitas. Islam dalam arti yang kedua inilah yang ada sejak zaman Nabi Muhammad. Sementara 'islam' dalam arti esensial telah ada sejak manusia ada di muka bumi ini. Sampai kapanpun dan di mana-pun 'islam' dalam arti esensial akan terus ber-semayam dalam batin manusia yang selalu pasrah, patuh dan sadar akan kehadiran Tuhannya.

Doktrin resmi mayoritas menyatakan: agama-gama lain juga benar tapi diasumsikan sebelum kedatangan agama Muhammad. Setelah Muhammad datang, semua manusia harus menganut Islam. Sebab, semua agama sebelum Muhammad, termasuk Yahudi, Nasrani, apalagi agama pagan, tidak berlaku lagi. Ini adalah tafsir mainstream *terhadap al-Quran.*

Kita harus membedakan antara al-Quran dan tafsirnya. Orang sering mengklaim bahwa apa yang dikatakannya adalah al-Quran. Padahal itu adalah al-Quran menurut tafsir atau pemahaman orang tersebut. Belum tentu orang lain memiliki tafsir yang sama dengan tafsirannya. Hal seperti ini yang sering terjadi. Abdulaziz Sachedina, seorang pemikir Muslim terkemuka asal Iran, mengatakan bahwa tidak ada ayat yang tegas yang menyatakan bahwa agama yang dibawa sebelum Nabi Muhammad terhapus oleh agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ayat yang berbunyi, *"Inna al-dîna 'inda Allâh al-islâm,"* (Q. 3: 19) juga bisa dimaknai bahwa agama yang dimaksud bukanlah sistem, melainkan agama personal; sikap kepasrahan kepada Tuhan. Maka ayat ini bisa diterjemahkan sebagai, "Sesungguhnya kepatuhan – yang diterima – di sisi Allah adalah kepasrahan – kepada-Nya."

Islam seharusnya masuk dalam wilayah moral, bagaimana orang berakhlak. Sebagai perumpamaan, seorang pemimpin negara harus berakhlak agar negara dan warganya baik. Maka, wilayah yang dipersoalkan Islam adalah perihal baik atau tidak, jujur atau tidak, dan seterusnya. Sementara mengenai segenap aturan (sosial dan politik) akan dibuat sesuai dengan situasi sosial. Jika hal itu sudah masuk dalam urusan duniawi, tidak ada aturan-aturan yang rinci dalam agama. Itu menjadi urusan warga bersama. Sebab, Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan politik.

Bukankah ayat-ayat al-Quran, misalnya yang terkait dengan reaksi al-Quran terhadap Yahudi, turun sebagai respon atas sikap Yahudi hanya untuk kala itu? Tetapi celakanya ayat-ayat tersebut lantas selalu menjadi rujukan umat Islam sekarang untuk membenci Yahudi atau agama lain.

Konteks ketika ayat-ayat al-Quran turun haruslah diperhatikan. Nabi hidup dalam situasi perang dengan kelompok-kelompok non-Muslim. Tetapi harus diingat bahwa perang antara umat Islam kala itu selalu dimulai oleh gangguan orang-orang musyrik. Namun Nabi Muhammad juga pernah berteman dengan Najasi, raja Habasyah, sekarang Ethiopia. Nabi juga pernah punya Sahabat Mukhairiq, pendeta Yahudi, sampai beliau meninggal. Nabi juga pernah mengatakan bahwa dia adalah orang Yahudi terbaik. Bahkan Nabi pernah mengizinkan orang-orang Nasrani dari Najran melakukan kebaktian di mesjid beliau. Jadi, Nabi memberikan tauladan agar bersikap toleran terhadap para penganut agama-agama lain.

Dalam perjalanan sejarah agama-agama belakangan ini, Barat sangat menghargai kebebasan beragama, sementara di wilayah lain, seperti negara-negara yang mayoritas Islam, penghargaan terhadap semangat kebebasan beragama kurang mendapat tempat. Apakah memang seperti itu?

Sebelum muncul negara-bangsa, khususnya sebelum revolusi Prancis, situasi di Barat sangat parah. Konflik internal di kalangan umat Kristiani parah sekali. Kalau kita membaca sejarah gereja, ada kelompok reformasi dan antireformasi. Perang di antara mereka telah memakan korban yang sangat banyak dan berlangsung puluhan tahun. Bahkan ada yang mengatakan bahwa terbagi-baginya nega-

ra Eropa juga terkait dengan perang antara kelompok reformasi dengan kelompok antireformasi. Hingga kini, sisa pertikaian masih ada. Tetapi, mungkin lantaran mereka sudah kapok dan kelelahan oleh konflik yang amat panjang lantas berhenti dan justru membangun toleransi yang lebih kuat. Namun munculnya semangat toleransi di Barat sebetulnya bukan hanya murni karena masalah agama. Amerika, misalnya, lebih karena perang antar-warga mereka sendiri (*civil war*). Faktor pengalaman buruk akibat perang dan kelelahan menimbulkan semangat toleransi. Mereka mau belajar dari pengalaman sejarah dan tidak ingin mengulangi masa-masa gelap (peperangan) seperti sebelumnya. Kesimpulan yang hendak saya sampaikan adalah: seharusnya kita mengambil pelajaran dari sejarah orang lain.

> Para penguasa tidak boleh membungkam kebebasan individu. Di negara-negara yang telah maju, para penguasa tidak dapat berbuat seenaknya terhadap rakyatnya. Mereka tidak bisa berbuat semena-mena demi mempertahankan kekuasaan mereka. Kebebasan beragama juga dijamin. Bila kebebasan beragama dibungkam, dikhawatirkan banyak orang berpura-pura melakukan sesuatu agar kelihatan tidak bertentangan dengan agama. Setiap orang bebas menganut dan mempraktikkan agama dan kepercayaan yang dianggapnya benar.

Tetapi yang lebih menarik lagi, ketika saya membandingkan agama-agama dalam konteks sejarahnya, konflik antaragama dan internal agama justru yang paling sedikit di Timur, tempat lahir dan berkembangnnya Budhisme, Konfusianisme, dan Taoisme. Sebab, Budhisme, Konfusianisme, dan Taoisme sangat kuat menekankan kasih sayang, kedamaian, dan keharmonian. Karena itu di kalangan para penganut setianya, suasana harmoni, kedamaian dan kete-

nangan terasa sangat kuat. Tradisi meditasi dan yoga sangat kuat di kalangan mereka. Kalaupun ada konflik antaragama seperti di Thailand atau di belahan bumi bagian Timur lain lebih disebabkan faktor politis. Unsur agamanya sangat kecil. Sejauh yang saya ketahui pula, perang antarsekte dalam Budhisme, Konfusianisme, dan Taoisme tidak ada. Sebaliknya dalam sejarah Islam ada, seperti antara orang-orang Sunni dan orang-orang Syi'i. Begitupun dalam Kristen, seperti perang antara Katolik dan Protestan.

Pandangan-pandangan Anda yang sangat toleran dan mendamaikan ini ditentang banyak orang. Lalu, bagaimana masa depan pemikiran seperti ini, apakah akan semakin diterima orang atau semakin terkikis?

Saya tidak mengetahui persis. Tapi yang jelas saya tidak sendirian, walaupun juga tidak bisa dikatakan sebagai mayoritas. Orang-orang yang bersikap toleran seperti orang-orang Paramadina, Jaringan Islam Liberal (JIL), Masyarakat Dialog Antaragama (MADIA), Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), International Center for Islam and Pluralism (ICIP), The Wahid Institute, Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), sebuah aliansi yang terdiri dari lembaga-lembaga kemasyrakatan dan keagamaan di Indonesia yang memperjuangkan *religious freedom*, dan orang-orang dari organisasi-oraganisasi lain yang mendukung pluralisme adalah orang-orang yang memperjuangkan sikap mendukung dan menghargai kemajemukan. Jumlah mereka memang sedikit. Maka, dalam kaitan dengan kemajemukan agama, yang harus diusahakan adalah bagaimana menanamkan pada masyarakat sikap toleransi. Ini terutama adalah tugas pemuka

agama, terutama ulama. Yang menjadi masalah adalah ketika banyak ulama malah mananamkan sikap tidak toleran.

Tentang masalah toleransi, kita sebaiknya berkaca pada ketauladanan Nabi Muhammad saw. Nabi pernah memperkenankan sekelompok orang-orang Nasrani dari Najran mengadakan kebaktian di masjid beliau. Ini hal yang sangat luar biasa. Apakah ada peristiwa seperti itu di Indonesia? Kalau ada, pangurus masjid bisa diserang oleh khalayak. Dalam hal ini Nabi sebenarnya lebih liberal. Di Indonesia ini mana ada yang seliberal Nabi. Apakah ada pengurus masjid berani mengizinkan orang Kristen melakukan kebaktian di masjid? Malah sebaliknya, alih-alih memberi fasilitas kepada orang Kristen untuk mengadakan kebaktian atau non-Muslim lainnya untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya, kalau bisa gereja dan tempat ibadah lainnya diruntuhkan saja.

Tanpa kebebasan, banyak muncul kepalsuan-kepalsuan. Kita harus mengakui secara jujur bahwa masih banyak negara Islam yang tidak memberikan kebebasan dalam politik dan agama. Yang muncul adalah demokrasi palsu atau pura-pura. Yang muncul adalah pengekangan terhadap kebebasan beragama untuk kolompok-kelompok minoritas tertentu dan individu-individu yang dianggap sesat.

Dalam kaitan dengan gagasan pluralisme, lantas ‘islam’ dalam arti manakah yang seharusnya dijiwai setiap orang? Saat ini orang lebih menyukai mengartikan Islam sebagai sistem. Bagi kebanyakan umatnya, yang dimaksud Islam adalah Islam yang khusus hadir sejak zaman Nabi Muhammad atau agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dengan begitu sudah terhapuslah ‘islam’ yang sebelumnya. Demikianlah kaca mata eksklusivisme. Maka hanya

penganut Islam saja yang benar. Kalau tidak menganut Islam seseorang tidak akan selamat di akhirat kelak. Tetapi saya sering mengatakan, “Apa ruginya orang-orang dari agama-agama lain kalau mereka juga selamat dan masuk surga?” Dalam suatu kesempatan diskusi di Teater Utan Kayu saya juga pernah mengatakan, “Eksklusivisme dalam Islam, pada dasarnya, adalah semacam imperialisme teologis.” Imperialisme teologis adalah ekspansi, keinginan untuk menguasai dan memonopoli kebenaran teologis. Jadi semacam egoisme teologis yang mengharuskan orang lain masuk ke dalam agama kita dan sepaham dengan kita. Kalau tidak, ia tidak akan selamat. Pemahaman Islam yang seperti inilah yang mengancam pluralisme.

Apakah kemudian bisa dikatakan bahwa pluralisme harus mengandaikan sekularisme dan liberalisme atau sebaliknya?

Bagi saya, ini agak sulit. Saya tidak bisa mengatakan secara otomatis seperti itu. Tetapi menurut saya pluralisme lebih dekat dengan gagasan demokrasi. Tidak ada demokrasi yang sejati tanpa pluralisme. Karena pluralisme menghormati kemajemukan. Jika itu diabaikan, tidak mungkin demokrasi bisa berjalan. Demokrasi juga sangat terkait dengan *civil society*. *Civil society* berarti masyarakat secara bebas dan mandiri mempunyai kemampuan untuk menyuarakan keinginan-keinginannya. Jadi masyarakat tidak didominasi oleh negara. Hal seperti itu sejalan pula dengan sekularisme di mana negara tidak mendominasi atau tidak didominasi oleh satu agama, dan yang secara implisit satu aliran semata. Kalau dikuasasi oleh satu agama – yang berarti juga satu paham teologi atau satu mazhab agama – secara otomatis agama lain juga paham teologi lain atau maz-

hab lain akan terpinggirkan. Di sini tidak ada kebebasan. Padahal kebebasan beragama itu menurut saya bersifat mutlak dan, karena itu, harus dijamin. Kebebasan itu adalah karunia Tuhan. Maka kita tidak berhak mengungkung dan merampas kebebasan itu. Alasan mengapa Tuhan menganugerahi manusia kebebasan, supaya manusia tulus dan ikhlas dalam beriman dan beragama. Dalam hal ini saya setuju dengan Abdul Karim Soroush yang membela kebebasan supaya manusia beriman dengan murni dan tulus.

Misalnya, orang memakai jilbab. Saya, dulu dan juga sekarang, sangat anti terhadap setiap kantor pemerintah atau kantor swasta yang melarang orang memakai jilbab. Sebab itu adalah keyakinan pemakainya. Karena itu pemakaian jilbab tidak boleh dilarang. Pelarangan adalah upaya pemaksaan agar tidak melakukan sesuatu, yang dalam hal ini adalah pemakaian jilbab. Kebebasan memakai jilbab harus dijamin. Begitupun sebaliknya, orang juga tidak boleh memaksakan supaya orang lain mamakai jilbab. Contoh lainnya lagi, di suatu daerah jika tidak memakai jilbab akan ditangkap. Hal seperti ini nantinya akan menyebabkan sangat banyak kemunafikan. Akhirnya, orang memakai jilbab bukan karena Allah, tapi lantaran takut ditangkap oleh polisi. Atau, begitu juga dengan salat. Kalau orang tidak salat akan ditangkap polisi, akibatnya orang salat bukan lagi karena ketulusan. Dahulu, waktu Soeharto masih memerintah, ada tradisi melaksanakan salat *tarâwih* di kantor-kantor menterinya. Semua bawahannya ikut. Tentu saja motif ibadah mereka bukan murni karena Allah, tapi karena jabatan. Jadi, kalau beribadah, orang mestinya betul-betul tulus, bukan karena ikut-ikutan saja karena kepala kantornya atau karena khawatir dipecat dan diperlakukan tidak baik oleh atasannya. Ini cara beragama yang tidak baik.

Ini bukan berarti saya menyetujui orang yang tidak salat. Atau misalnya juga saya tidak menyetujui ateisme. Namun demikian, kaum ateis jangan pula dipaksa untuk mengucapkan pernyataan bahwa dia percaya kepada Tuhan. Hal ini sangatlah penting supaya kalau seseorang percaya kepada Tuhan, kepercayaan itu betul-betul tulus. Kita pun tidak bisa memaksa orang lain untuk sepaham dengan kita. Karena keimanan itu sendiri datangnya dari Tuhan, sudah ditentukan oleh Tuhan. Seandainya Tuhan berkehendak menjadikan semua orang menjadi satu umat yang beriman, tentu Tuhan bisa. Tetapi Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian itu. Agama harus dijalankan secara tulus supaya tidak terjadi kemunafikan.

Meskipun saya juga tidak menyetujui pornografi, dan dalam batas-batas tertentu kita juga harus tahu sopan-santun, tetapi, bagi saya, orang tidak bisa dipaksa memakai jilbab, apalagi ditangkap karena tidak memakai jilbab. Maka akan menjadi masalah apabila negara mencampuri urusan agama – terlebih beragama dan berkeyakinan merupakan urusan yang sangat personal – seperti mengatur pakaian atau mewajibkan memakai jilbab. Akibatnya banyak orang memakai jilbab bukan karena keimanan, tapi lebih karena takut ditangkap. Artinya ke-imanan itu tidak tulus. Yang kita inginkan adalah ketulusan dalam beriman. Meskipun orang tidak memakai jilbab, kita tidak lantas membenci dia atau mengusir dia dan memperlakukannya secara diskriminatif. Ini sekadar contoh, tentu ada contoh-contoh yang lain. Dalam makalah yang dibikin untuk acara *Nurcholish Madjid Memorial Lecture*, saya pernah menyinggung peraturan yang diterapkan rezim Taliban yang sangat menindas kaum perempuan di sana, yang menetapkan ini tidak boleh, itu tidak boleh. Di dalam buku *My Forbiden Face*, yang ditulis oleh

Latifa, seorang perempuan muda korban peraturan rezim Taliban di Afghanistan, misalnya, disebutkan bahwa kaum ibu dan perempuan tidak diizinkan untuk bekerja di luar rumah, kaum ibu dan perempuan dilarang mengenakan pakaian berwarna terang di dalam burqa mereka, kaum perempuan juga tidak boleh naik taksi kecuali bersama muhrimnya. Termasuk di dalam bus kota, laki-laki dan perempuan harus dipisah.

Ide negara Islam itu baru muncul pada abad ke-19. Sebelumnya orang Islam tidak pernah membicarakan itu. Bahkan, kata "Islam" dahulu juga jarang dipakai untuk menyebut nama disiplin keilmuan, nama karya, nama institusi, dan nama usaha. Maka, boleh dikatakan, sekarang kata "Islam" telah mengalami inflasi.

Jadi, istilah-istilah liberalisme, sekularisme dan pluralisme, saya khawatir itu lebih merupakan 'hantu' daripada kenyataan. Itu hanya ada dalam pikiran. Apabila kita melihat di alam nyata, negara-negara Barat yang maju, seperti Britania Raya, Prancis dan Jerman yang menerapkan ketiga paham tersebut, kendatipun mungkin tidak dieksplisitkan, angka kriminalitasnya lebih kecil, korupsinya juga tidak sebesar di sini. Di Indonesia, kita setiap hari dapat membaca berita di media-media massa tentang orang saling bacok, perkelahian antar-kampung, tawuran pelajar, perampokan, dan tindak pelbagai kriminal lainya. Semua itu terpampang nyata kalau kita membaca berita dan menyaksikan acara-acara seperti Derap Hukum dan sejenisnya di televisi. Saya kira kriminalitas di negara-negara Barat yang maju tidak sebesar di sini.

Kalau memang kebanyakan dari umat Islam dan MUI cenderung lebih suka melihat 'hantu'nya, dan karena itu lantas mengharamkan

begitu rupa, ketimbang mencoba untuk belajar secara objektif apa sesungguhnya sekularisme, liberalisme dan pluralisme. Menurut Anda, faktor apakah yang menyebabkan semua itu?

Menurut saya kebanyakan mereka tidak mau memahami realitas yang sebenarnya. Cobalah jalan-jalan atau tinggal di sana (negara-negara Barat). Memang, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Di sana, seperti Prancis, Jerman, Swedia, Swis, Austria, atau tempat lain seperti Jepang, tentu saja ada kekurangan, tetapi negara-negara itu lebih makmur, korupsinya lebih kecil daripada yang terjadi di negara kita. Di sini, kita sehari-hari melihat para peminta-minta atau pengemis di bus kota dan di tempat-tempat lain. Kenyataannya seperti itu.

Mungkin penolakan atau pengharaman terhadap ketiga gagasan tersebut lantaran orang tidak paham atau mungkin juga karena ketakutan-ketakutan itu. Dan karena alasan-alasan itu pula, sampai-sampai demokrasi juga diharamkan. Kita juga tidak perlu meniru Barat sepenuhnya, apalagi menjadi 'terbaratkan.'

Atau lantaran mereka menganggap ketiga paham tersebut sebagai produk Barat. Padahal dalam kenyataannya sekularisasi di negara Islam sendiri sebetulnya sudah menjadi praktik keseharian. Mereka mengadakan pemilu dan lain sebagainya. Tetapi mereka tetap menggunakan jargon bahwa mereka tidak sekular.

Mereka, negara-negara Barat, tidak latah mengukur diri mereka dengan jargon dan slogan-slogan, "Kami negara sekular," misalnya, bahkan ungkapan itu pun tidak diucapkan. Tetapi mereka lebih mempraktikkan semangatnya. Saya tambahkan juga di sini, bahwa negara lain yang lebih bagus daripada negara kita pasti akan

menjadi incaran bagi para imigran. Kenyataannya penduduk Aljazair, yang mayoritas Muslim, dan juga penduduk negara-negara lain di Afrika, Turki dan negara-negara berkembang lainnya, ingin pergi ke Eropa. Artinya mereka tidak betah di negaranya sendiri. Mereka susah mencari penghidupan di negara sendiri. Ini menjadi bukti bahwa negara orang lain lebih disukai daripada negara sendiri. Dahulu banyak pengungsi dari Vietnam dan Kamboja hijrah ke Amerika karena hidup di negara mereka sendiri sangat susah. Sama saja misalnya, sekarang, orang Papua lebih memilih pindah ke Australia karena Australia dianggap lebih bagus penghidupannya. Demikian juga Indonesia, banyak tenaga kerja kita yang pergi ke negara-negara lain. Jadi kalau di negara sendiri kurang baik, orang akan memilih pergi ke negara lain yang lebih maju. Itu tidak bisa kita bantah.

Wawancara dilakukan di Jakarta, September 2006

Daftar Isi Buku 1 sampai 4

Indeks

A

B

C

D

E

F

G

H

E

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

Yayasan Abad Demokrasi adalah lembaga nirlaba yang berkomitmen untuk pemajuan demokrasi di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan tradisi keberagamaan yang menghargai nilai-nilai demokrasi, pluralisme, perdamaian, dan penghargaan terhadap hak-hak kemanusiaan.

Lembaga ini berupaya menyebarkan seluas-luasnya ide-ide pencerahan dan demokrasi ke khalayak publik. Juga memfasilitasi publikasi, penelitian, dan inisiatif-inisiatif lain terkait dengan isu yang sama.

Juga berupaya memfasilitasi transfer pengetahuan dan pembelajaran demokrasi dari berbagai belahan dunia. Lembaga ini juga concern terhadap upaya membangun tradisi akademik dan intelektual, sehingga proses demokratisasi Indonesia berjalan dalam fundamen yang kokoh dan visioner.

Lembaga ini juga berencana mengembangkan kader-kader pendukung proses pemajuan demokratisasi di Indonesia.

www.abad-demokrasi.com